SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya RKPD Tahun Anggaran 2025 untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program pembangunan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai:

a. kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

b. bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun Anggaran 2025 memuat:

a. bab I Pendahuluan;

b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. bab II Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. bab V Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

g. bab VI Penutup.

(2) Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 25

RKPD 2025

BAPPEDA
KABUPATEN KULON PROGO

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025



bappeda.kulonprogo.go.id
bappeda@kulonprogo.go.id
(0274) 773247
0897-1174-500

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2024

BUPATI

KULON PROGO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... xiii
BAB I PENDAHULUAN..... I – 1
1.1 Latar Belakang..... I – 1
1.2 Tahapan Penyusunan RKPD..... I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan..... I – 3
1.4 Hubungan Antar Dokumen..... I – 4
1.5 Maksud dan Tujuan..... I – 5
1.6 Sistematika Dokumen RKPD..... I – 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II – 1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah..... II – 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II – 1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah..... II – 1
2.1.1.2 Demografi..... II – 44
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II – 48
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II – 48
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II – 59
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II – 68
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II – 71
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II – 74
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II – 131
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... II – 196
2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan..... II – 216
2.1.3.5 Fokus Keistimewaan..... II – 239
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II – 276
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II – 276
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II – 278
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi..... II – 281
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II – 284
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023..... II – 285
2.2.1 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2023..... II – 287
2.2.2 Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun

2023..... II – 291
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II – 385
2.3.1 Isu Strategis..... II – 385
2.3.2 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II – 390
2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah..... II – 392
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III – 1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2019-2023..... III – 1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ..... III – 3
3.1.3. PDRB Per Kapita..... III – 5
3.1.4. Inflasi..... III – 6
3.1.5. Ketenagakerjaan..... III – 7
3.1.6. Kemiskinan..... III – 7
3.1.7. Ketimpangan Pendapatan..... III – 8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III – 9
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III – 10
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III – 14
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah..... III – 16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... IV – 1
4.2 Tema Pembangunan Tahun 2025..... IV – 3
4.2.1 Tema RKPD Tahun 2025..... IV – 3
4.2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025..... IV – 4
4.2.3 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025..... IV – 9
4.2.4 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026..... IV – 12
4.2.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027..... IV – 14
4.2.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025..... IV – 15
4.2.7 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2025..... IV – 16
4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... IV – 18

4.3.1 Maksud dan Tujuan..... IV – 19
4.3.2 Permasalahan dan Rekomendasi DPRD..... IV – 19
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI – 1
BAB VII PENUTUP……..... VII – 1
7.1 Kaidah Pelaksanaan..... VII – 1
7.2 Kesimpulan..... VII – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo....	II – 1
Tabel 2.2	Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo.....	II – 5
Tabel 2.3	Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 6
Tabel 2.4	Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 8
Tabel 2.5	Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 10
Tabel 2.6	Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates...	II – 11
Tabel 2.7	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 11
Tabel 2.8	Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 12
Tabel 2.9	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo.....	II – 14
Tabel 2.10	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023.....	II – 15
Tabel 2.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023.....	II – 17
Tabel 2.12	Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo	II – 22
Tabel 2.13	Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo.....	II – 25
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2023 (jiwa).	II – 41
Tabel 2.15	Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023.....	II – 41
Tabel 2.16	Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2023.....	II – 42
Tabel 2.17	Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023.....	II – 43
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023.....	II – 44
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa) Tahun 2019-2023.....	II – 45
Tabel 2.20	Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023.....	II – 46
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2019 – 2023.....	II – 47
Tabel 2.22	Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2019 – 2023 (jiwa/km²)....	II – 47
Tabel 2.23	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Milyar Rupiah).....	II – 49
Tabel 2.24	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Milyar Rupiah).....	II – 50
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen).....	II – 51
Tabel 2.26	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen).....	II – 52

Tabel 2.27 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)..... II – 53
Tabel 2.28 PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (juta rupiah)..... II – 55
Tabel 2.29 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023... II – 57
Tabel 2.30 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023..... II – 58
Tabel 2.31 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 59
Tabel 2.32 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023..... II – 59
Tabel 2.33 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 62
Tabel 2.34 Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023..... II – 62
Tabel 2.35 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 64
Tabel 2.36 Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023..... II – 64
Tabel 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 65
Tabel 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2019-2023..... II – 66
Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2019-2023..... II – 66
Tabel 2.40 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.... II – 67
Tabel 2.41 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2019-2023..... II – 69
Tabel 2.42 Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 70
Tabel 2.43 Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 70
Tabel 2.44 Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 71
Tabel 2.45 Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 71
Tabel 2.46 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun..... II – 72
Tabel 2.47 Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 74
Tabel 2.48 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023..... II – 77
Tabel 2.49 Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2019–2023..... II – 77
Tabel 2.50 Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II – 78
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023..... II – 81
Tabel 2.52 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2023..... II – 83
Tabel 2.53 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2023..... II – 84
Tabel 2.54 Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus Tahun 2020-2023..... II – 86
Tabel 2.55 Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2019- 2023..... II – 87
Tabel 2.56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023..... II – 90

Tabel 2.57 Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 90
Tabel 2.58 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 92
Tabel 2.59 Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 ..... II – 93
Tabel 2.60 Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 94
Tabel 2.61 Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 97
Tabel 2.62 Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2023..... II – 99
Tabel 2.63 Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat..... II – 100
Tabel 2.64 Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 102
Tabel 2.65 Data Kondisi Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 -2023..... II – 103
Tabel 2.66 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo..... II – 104
Tabel 2.67 Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2024..... II – 105
Tabel 2.68 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019–2023..... II – 107
Tabel 2.69 Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo..... II – 107
Tabel 2.70 Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo..... II – 108
Tabel 2.71 Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo..... II – 109
Tabel 2.72 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019–2023..... II – 109
Tabel 2.73 Luas RTH Publik Perkotaan Tahun 2019 - 2023..... II – 110
Tabel 2.74 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 112
Tabel 2.75 Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2019-2023..... II – 112
Tabel 2.76 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2023..... II – 113
Tabel 2.77 Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 (Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020)..... II – 114
Tabel 2.78 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023..... II – 115
Tabel 2.79 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023..... II – 116
Tabel 2.80 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2019 -2023..... II – 117
Tabel 2.81 Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2019-2023..... II – 118
Tabel 2.82 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023..... II – 119
Tabel 2.83 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 120
Tabel 2.84 Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 121
Tabel 2.85 Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2019-2023..... II – 122
Tabel 2.86 Tingkat Keaktifan Pekerja Sosial Profesional/TKS/Relawan Sosial di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 125

Tabel 2.87 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023..... II – 127
Tabel 2.88 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023..... II – 127
Tabel 2.89 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY..... II – 128
Tabel 2.90 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY..... II – 128
Tabel 2.91 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2023 menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin..... II – 129
Tabel 2.92 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023..... II – 129
Tabel 2.93 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023..... II – 130
Tabel 2.94 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023.. II – 130
Tabel 2.95 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2023..... II – 131
Tabel 2.96 Data Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023..... II – 131
Tabel 2.97 Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2019-2023..... II – 132
Tabel 2.98 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023..... II – 132
Tabel 2.99 Angkatan kerja menurut golongan umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023..... II – 133
Tabel 2.100 Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 133
Tabel 2.101 Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... Ii – 134
Tabel 2.102 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 134
Tabel 2.103 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 134
Tabel 2.104 Data Produktivitas Tenaga Kerja 2019-2023..... II – 135
Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2023..... II – 135
Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019–2023..... II – 136
Tabel 2.107 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani..... II – 138
Tabel 2.108 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 138
Tabel 2.109 Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2023..... II – 139
Tabel 2.110 Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 140
Tabel 2.111 IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 142
Tabel 2.112 Capaian IKLH Tahun 2023..... II – 143
Tabel 2.113 Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2021-2023..... II – 145
Tabel 2.114 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023..... II – 149
Tabel 2.115 Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023..... II – 150
Tabel 2.116 Layanan Catatan Sipil Tahun 2019–2023..... II – 150
Tabel 2.117 Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa)dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 150
Tabel 2.118 Kondisi Kantor Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 151
Tabel 2.119 Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan Tahun 2019 – 2023 ..... II – 152
Tabel 2.120 Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2019-2023..... II – 153
Tabel 2.121 Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2020-2023..... II – 153
Tabel 2.122 Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 154
Tabel 2.123 BUMDes se Kabupaten Kulon Progo tahun 2023..... II – 155
Tabel 2.124 Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 158
Tabel 2.125 Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon ProgoTahun 2020-2023..... II – 159
Tabel 2.126 Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2019-2023 ..... II – 159
Tabel 2.127 PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 160
Tabel 2.128 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 160
Tabel 2.129 Jumlah Kampung KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 162
Tabel 2.130 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 163
Tabel 2.131 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2019-2023..... II – 166
Tabel 2.132 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 166
Tabel 2.133 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 167
Tabel 2.134 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 169
Tabel 2.135 Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi..... II – 169
Tabel 2.136 Rute Layanan *Shuttle* Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta..... II – 171
Tabel 2.137 Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo..... II – 171
Tabel 2.138 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023..... II – 172
Tabel 2.139 Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 173
Tabel 2.140 Kapasitas *Bandwith* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 173
Tabel 2.141 Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 174
Tabel 2.142 Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023... II – 176
Tabel 2.143 Capaian Dimensi dan Sub Dimensi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun

2023..... II – 177
Tabel 2.144 Indeks SPBE Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023..... II – 178
Tabel 2.145 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023..... II – 179
Tabel 2.146 Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 181
Tabel 2.147 Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon ProgoTahun 2019-2023..... II – 182
Tabel 2.148 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 183
Tabel 2.149 Data Omset UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2019-2023..... II – 183
Tabel 2.150 Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA) Menurut Kapanewon Tahun 2019-2023..... II – 184
Tabel 2.151 Persentase Koperasi, UMKM, BPR Aktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 184
Tabel 2.152 Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023(juta rupiah)..... II – 185
Tabel 2.153 Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023…..…. II – 186
Tabel 2.154 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 187
Tabel 2.155 Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 188
Tabel 2.156 Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi..... II – 188
Tabel 2.157 Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional..... II – 188
Tabel 2.158 Data Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 191
Tabel 2.159 Perkembangan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa /Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2019-2023..... II – 193
Tabel 2.160 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 193
Tabel 2.161 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023..... II – 194
Tabel 2.162 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat tahun 2019-2023..... II – 195
Tabel 2.163 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 195
Tabel 2.164 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 196
Tabel 2.165 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023..... II – 196
Tabel 2.166 Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2019-2023 ..... II – 198
Tabel 2.167 Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 198
Tabel 2.168 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 200
Tabel 2.169 Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 201

Tabel 2.170 Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY (Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2019-2023..... II – 202
Tabel 2.171 Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 202
Tabel 2.172 Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 204
Tabel 2.173 Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 204
Tabel 2.174 Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berijin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2022..... II – 205
Tabel 2.175 Data Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB tahun 2023……..... II – 205
Tabel 2.176 Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023..... II – 207
Tabel 2.177 Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023..... II – 208
Tabel 2.178 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2021-2023..... II – 209
Tabel 2.179 Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Tradisional Tahun 2019-2023..... II – 210
Tabel 2.180 Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023.. II – 211
Tabel 2.181 Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 212
Tabel 2.182 Data Ekspor Bersih Tahun 2019-2023..... II – 212
Tabel 2.183 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2019 – 2023..... II – 212
Tabel 2.184 Jumlah Pedagang Pasar Negeri Berdasarkan Sarana Perdagangan yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 213
Tabel 2.185 Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Tahun 2019 – 2023..... II – 213
Tabel 2.186 Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023.. II – 214
Tabel 2.187 Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2019 – 2023..... II – 215
Tabel 2.188 Bantuan Untuk Modal Kerja Calon Transmigran Tahun 2019 – 2023..... II – 215
Tabel 2.189 Daftar Animo, Pendaftaran dan Penempatan Transmigran Tahun 2019-2023.... II – 216
Tabel 2.190 Daftar Inventarisasi Produk Hukum DaerahTahun 2019-2023..... II – 216
Tabel 2.191 Daftar Perangkat Daerah Tahun 2023..... II – 217
Tabel 2.192 Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019-2023..... II – 219
Tabel 2.193 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan Tahun 2022..... II – 221
Tabel 2.194 Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga PembiayaanTahun 2023..... II – 222
Tabel 2.195 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)..... II – 222
Tabel 2.196 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)..... II – 223
Tabel 2.197 Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 223

Tabel 2.198 Lembaga BUMD Tahun 2023(Unaudited)..... II – 225
Tabel 2.199 Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2019-2023..... II – 226
Tabel 2.200 Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023... II – 227
Tabel 2.201 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2019-2023..... II – 229
Tabel 2.202 Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2019-2023..... II – 230
Tabel 2.203 Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2019-2023..... II – 231
Tabel 2.204 Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2019-2023..... II – 232
Tabel 2.205 Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award..... II – 234
Tabel 2.206 Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2019-2023..... II – 235
Tabel 2.207 Jumlah SILPA Tahun 2019-2023..... II – 236
Tabel 2.208 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023..... II – 236
Tabel 2.209 Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020-2023..... II – 237
Tabel 2.210 Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2020-2023..... II – 237
Tabel 2.211 Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2019-2023 (Rp)..... II – 237
Tabel 2.212 Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2019-2023..... II – 238
Tabel 2.213 Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 240
Tabel 2.214 Urusan Kelembagaan..... II – 241
Tabel 2.215 Urusan Kebudayaan..... II – 250
Tabel 2.216 Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022..... II – 265
Tabel 2.217 Urusan Pertanahan..... II – 266
Tabel 2.218 Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan..... II – 270
Tabel 2.219 Urusan Tata Ruang..... II – 271
Tabel 2.220 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)..... II – 276
Tabel 2.221 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makana di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)..... II – 277
Tabel 2.222 Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..... II – 278
Tabel 2.223 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2023..... II – 278
Tabel 2.224 Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023.. II – 279
Tabel 2.225 Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2019-2023..... II – 280
Tabel 2.226 Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023..... II – 280
Tabel 2.227 Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2019-2023..... II – 282
Tabel 2.228 Data Kasus Kejahatan Jalanan DIY Tahun 2019-2023..... II – 282
Tabel 2.229 Jumlah Demo Tahun 2019- 2023..... II – 283
Tabel 2.230 Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2019-2023..... II – 284
Tabel 2.231 Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2023..... II – 285
Tabel 2.232 Predikat Kinerja Tujuan & Sasaran Daerah Berdasarkan Target RKPD Tahun 2023..... II – 287
Tabel 2.233 Tingkat Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2023..... II – 287
Tabel 2.234 Predikat Kinerja Program RKPD Triwulan IV Tahun 2023..... II – 288
Tabel 2.235 Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2023..... II – 288
Tabel 2.236 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023..... II – 292
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2021 s.d 2025 Kabupaten Kulon Progo..... III – 13
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2021 s.d 2025 Kabupaten Kulon Progo..... III – 16
Tabel 3.3 Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2021 s.d. 2025..... III – 17
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026..... IV – 1
Tabel 4.2 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025.. IV – 8
Tabel 4.3 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pada RPD 2023-2026 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025..... IV – 13
Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027..... IV – 15
Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2025..... IV – 16
Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Nasional pada RKP 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2025..... IV – 17
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025..... VI – 1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025… VI – 1
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025…… VI – 2
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025…….. VI – 2
Tabel 6.5 Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025…… VI – 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahap Penyusunan RKPD	I – 2
Gambar 1.2	Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....	I – 5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 3
Gambar 2.2	Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo.....	II – 4
Gambar 2.3	Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 7
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 16
Gambar 2.5	Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo.....	II – 26
Gambar 2.6	Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo.....	II – 28
Gambar 2.7	Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo.....	II – 29
Gambar 2.8	Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo.	II – 30
Gambar 2.9	Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo.....	II – 31
Gambar 2.10	Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo.	II – 32
Gambar 2.11	Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 34
Gambar 2.12	Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 35
Gambar 2.13	Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 37
Gambar 2.14	Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo.....	II – 38
Gambar 2.15	Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo.....	II – 39
Gambar 2.16	Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo	II – 40
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023.....	II – 46
Gambar 2.18	PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon ProgoTahun 2019 – 2023 (ribu rupiah).....	II – 54
Gambar 2.19	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (ribu rupiah).....	II – 55
Gambar 2.20	Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II – 56
Gambar 2.21	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023.....	II – 60
Gambar 2.22	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023 (tahun).....	II – 61
Gambar 2.23	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018 -2023.....	II – 63
Gambar 2.24	Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo.....	II – 63
Gambar 2.25	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2017-2023.....	II – 65
Gambar 2.26	Persentase Capaian Indikator TPB.....	II – 68
Gambar 2.27	Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023.....	II – 89

Gambar 2.28 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023 ..... II – 95
Gambar 2.29 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2018 – 2023 ..... II – 95
Gambar 2.30 Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2018 – 2023 ..... II – 96
Gambar 2.31 Jumlah Pelanggan Air Bersih yang Dilayani oleh PDAM Tahun 2018-2023 ..... II – 100
Gambar 2.32 Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023 ..... II – 103
Gambar 2.33 Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023 ..... II – 111
Gambar 2.34 Peta Prasarana Persampahan dan IPLT Kabupaten Kulon Progo ..... II – 147
Gambar 2.35 Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 ..... II – 157
Gambar 2.36 Fluktuasi Volume Lalu Lintas Jalan Nasional ..... II – 165
Gambar 2.37 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 ..... II – 179
Gambar 2.38 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023 ..... II – 186
Gambar 2.39 Capaian Nilai Usaha Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023 (juta Rupiah) ..... II – 210
Gambar 2.40 Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2019-2023 ..... II – 225
Gambar 2.41 Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023. II – 230
Gambar 2.42 Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Kreanova Menoreh Tahun 2019-2023 ..... II – 233
Gambar 2.43 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023 ..... II – 386
Gambar 3.1 PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo Tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024 dan 2025 (miliar rupiah) ..... III – 2
Gambar 3.2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2019-2023 (%) ..... III – 3
Gambar 3.3 Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2023 Menurut Lapangan Usaha (%) ..... III – 4
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025 III – 5
Gambar 3.5 PDRB Per Kapita ADHB tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025 (juta rupiah) ..... III – 6
Gambar 3.6 Laju Inflasi IHK DIY (%)Tahun 2019-2023 ..... III – 6
Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025 ..... III – 7
Gambar 3.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025 ..... III – 8
Gambar 3.9 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025 ..... III – 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan diselesaikan Pemerintah Kabupaten. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan 0,75 persen poin dari 16,39% pada tahun 2022 menjadi 15,64% pada tahun 2023, namun Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan lain adalah pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan gini ratio yang melebar dari 0,367 menjadi 0,402. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah rata-rata DIY, sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu ditingkatkan.

Permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2023 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2025, yang merupakan tahapan pertama dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam tahapan pertama, Kabupaten Kulon Progo berfokus pada penguatan fondasi transformasi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Hal ini juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

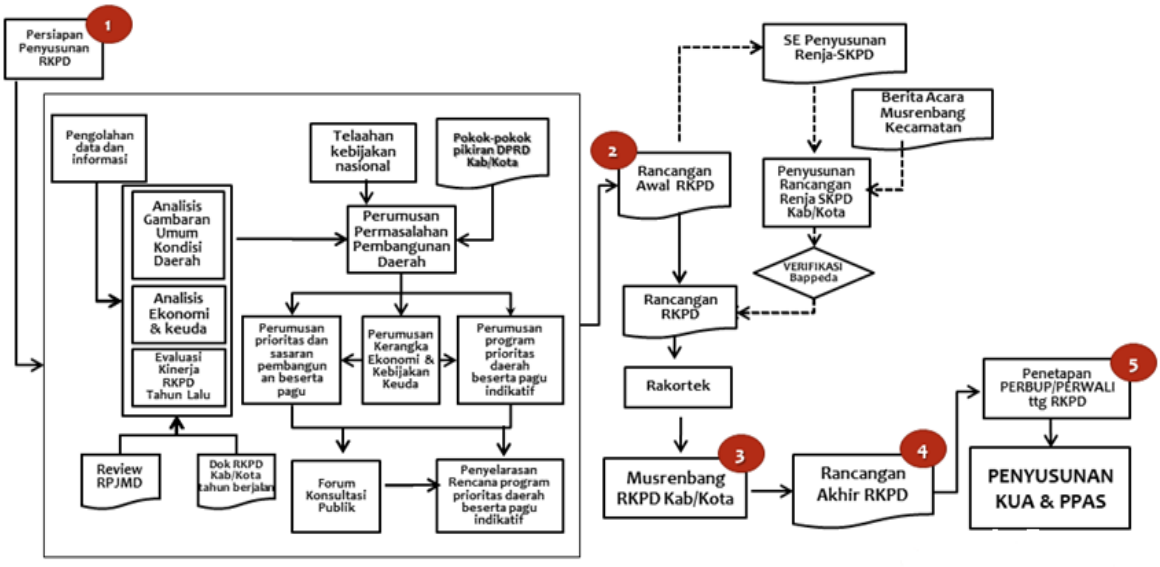
a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
c. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan lembaga legislatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kalurahan/ kelurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo dimulai dari analisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan kondisi daerah, kebijakan nasional dan provinsi, yang selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah. Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tahap penyusunan RKPD dimulai dengan orientasi penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, pelaksanaan reviu oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, pelaksanaan fasilitasi Gubernur DIY, dan penetapan RKPD tahun 2025. Secara detail, tahapan penyusunan RKPD disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.1

Tahap Penyusunan RKPD

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13).

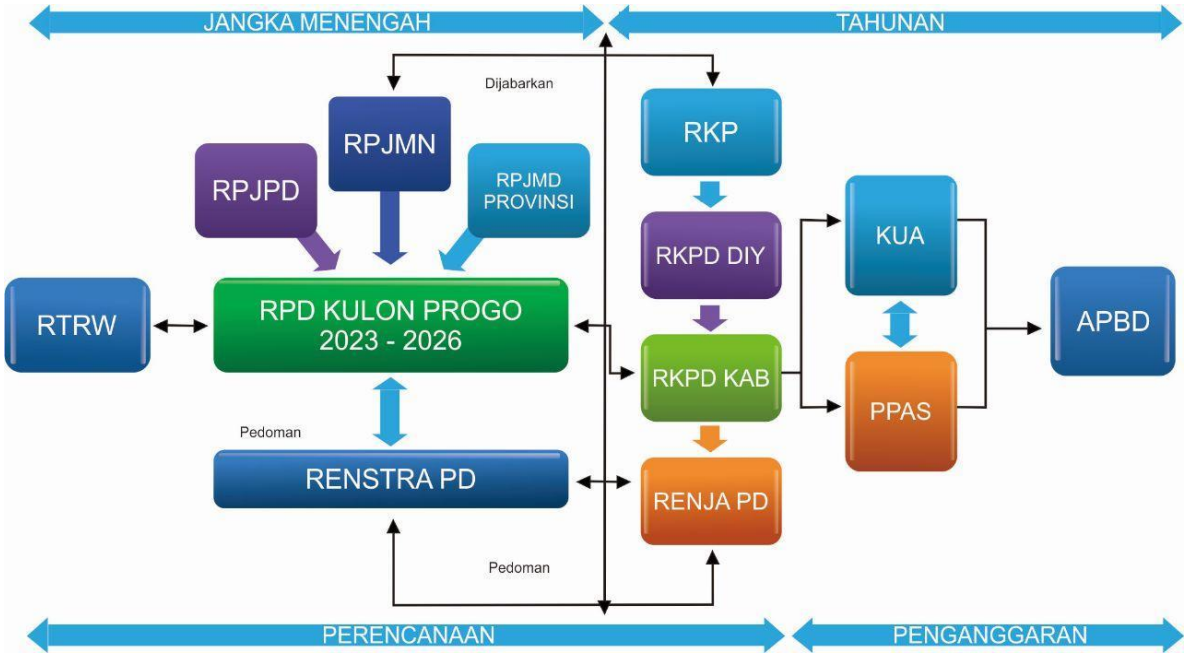
1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/ berpedoman pada RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana sebagian telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka RKPD Kabupaten Kulon Progo akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini



Gambar 1.2

Hubungan antara Dokumen RKPD

dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati

Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum Kabupaten Kulon Progo, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY. Kabupaten Kulon Progo tidak bersinggungan langsung dengan Kota Yogyakarta dan harus menempuh jarak kurang lebih 25 km untuk mencapainya. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, setiap kapanewon memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Berdasarkan karakteristik topografinya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 3 zona yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Dengan karakteristik topografi demikian menyebabkan perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda di tiap zona. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 577,22 km2. Jumlah luasan berdasarkan kepmendagri tersebut belum dirinci untuk setiap kecamatan. Menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 576,88 km2 . Perbedaan luasan ini kemudian akan menjadi bahan yang akan disinkronkan dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo yang masih berproses. Secara rinci nama Kapanewon dan prosentase luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon

Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Persentase (%)
1.	Temon	6,32
2.	Wates	5,66
3.	Panjatan	7,65

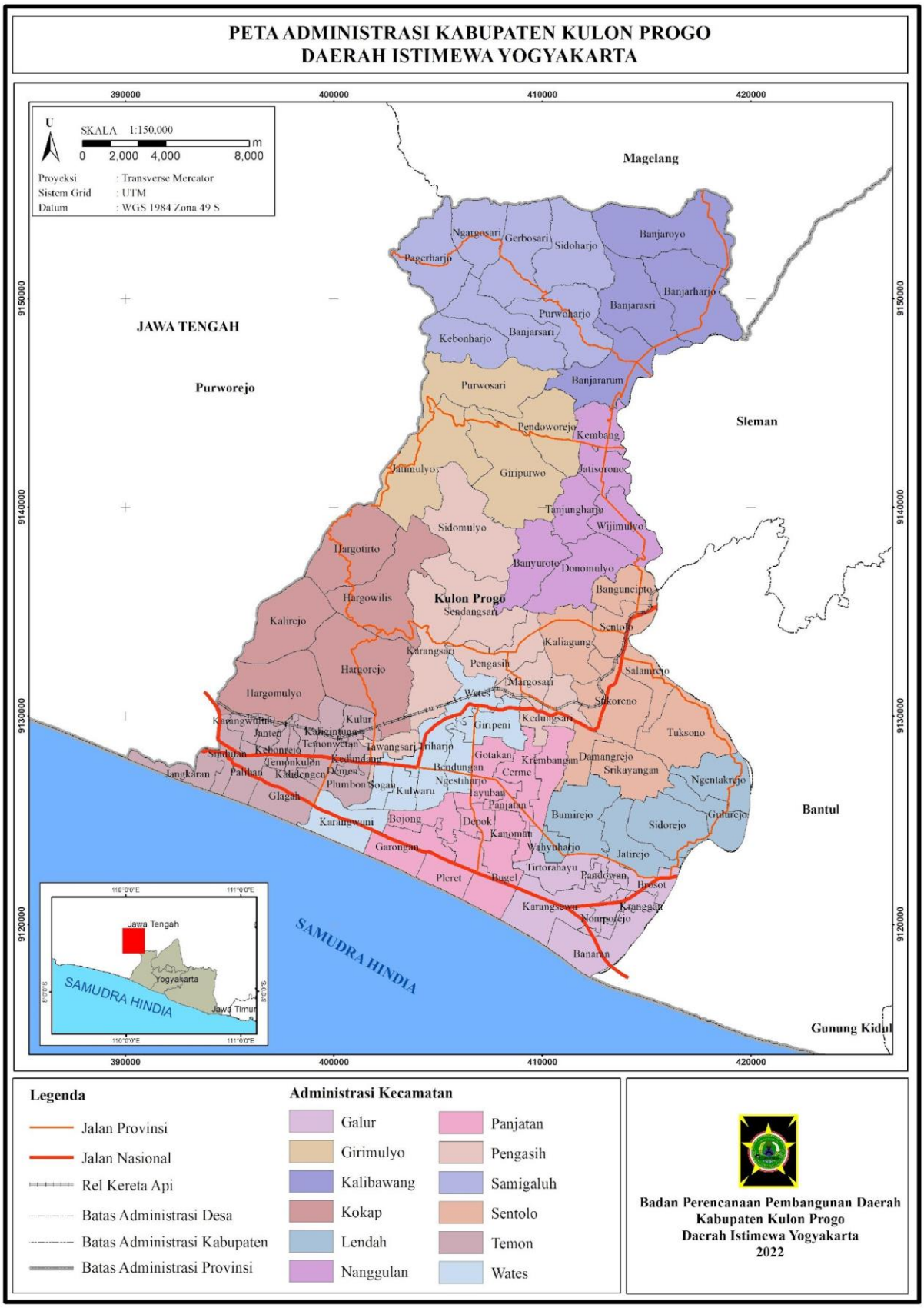
No	Kapanewon	Persentase (%)
4.	Galur	5,61
5.	Lendah	6,51
6.	Sentolo	9,33
7.	Pengasih	10,04
8.	Kokap	12,16
9.	Girimulyo	9,58
10.	Nanggulan	6,78
11.	Kalibawang	8,88
12.	Samigaluh	11,49
	Kabupaten Kulon Progo	**100,00**

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2024

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara.
- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur.
- Samudera Hindia di bagian selatan.
- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat.

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7º38'30" – 7º58'3" LS dan 110º1'37" – 110º16'26" BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, merupakan 'pintu gerbang' Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa (Kabupaten Purworejo) dan bagian utara Pulau Jawa (Kabupaten Magelang, KSPN Borobudur). Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi *geostrategic* dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Keberadaan BIY dapat memberikan nilai tambah/*global value chain* bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.

Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai di Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan.

Posisi *geostrategi*c tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu:

a. Kawasan pesisir

   Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, sebagian Kapanewon Sentolo, dan sebagian Kapanewon Pengasih. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2 persen, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b. Kawasan dataran

   Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan sebagian Kapanewon Kalibawang. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15 persen, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Kawasan pegunungan

   Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang.

2.1.1.1.3 Topografis

a. Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng $<2^0$ (40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng

Kabupaten Kulon Progo

No	Kemiringan Lereng	Persentase (%)
1.	$< 2^0$	40,11
2.	3^0-15^0	18,70
3.	16^0-40^0	22,46
4.	$>40^0$	18,73
Kabupaten Kulon Progo		**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020, diolah

Dilihat dalam skala kapanewon wilayah dengan kemiringan lereng $>40^0$ (daerah pegunungan) berada pada kawasan barat Kulon Progo yang membentang dari Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Nanggulan. Sedangkan Kapanewon yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng $>40^0$ meliputi Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, dan Kapanewon Sentolo. Kelima Kapanewon tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan.

Kapanewon yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng $<2^0$ terluas adalah Kapanewon Panjatan. Sedangkan Kapanewon Samigaluh merupakan kapanewon yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah, aktivitas ekonomi maupun konektivitas antar daerah.

b. **Ketinggian Lahan**

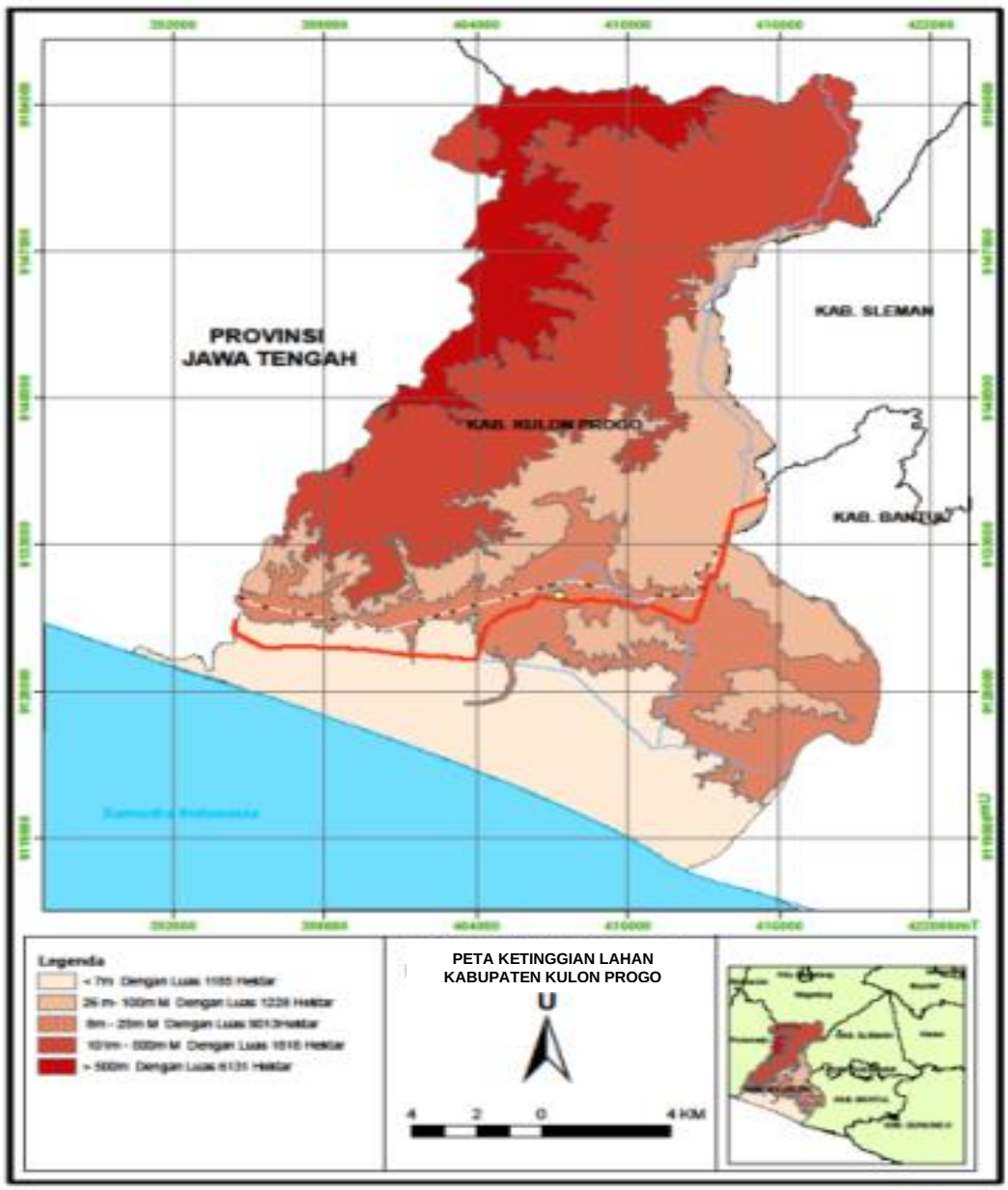
Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter di atas permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3

Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo

No	Ketinggian Lahan	Cakupan Kapanewon
1.	500-1000 m dpal	Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang
2.	100-500 m dpal	Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Kokap
3.	0-100 m dpal	Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Lendah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020 diolah



Gambar 2.3

Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.4 Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

1. Karakteristik dan Struktur

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai kubah *(Dome),* dengan struktur geologi daerah terdiri atas :

a. Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (*Fold*), merupakan deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur.
b. Struktur Geologi Patahan/Sesar (*Fault*), merupakan bagian dari batuan yang saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan oleh zona patahan atau

dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota Yogyakarta menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah.
- Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kapanewon Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan bagian barat.

c. Struktur Kekar (*joint*) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.

2. Formasi Batuan

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4

Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Luas Satuan Batuan (Ha)				Jumlah
		Endapan Gunung Api	Batuan Sedimen	Batuan Gunung Api	Batuan Instrusi	
1.	Temon	3.688	-	-	-	**3.688**
2.	Wates	3.063	138	-	-	**3.197**
3.	Panjatan	3.872	588	-	-	**4.454**
4.	Galur	2.229	-	1.063	-	**3.288**
5.	Lendah	2.009	1.075	475	-	**3.555**
6.	Sentolo	3.165	1.175	925	-	**5.259**
7.	Pengasih	4.342	1.825	-	-	**6.161**
8.	Kokap	550	4.230	-	2.600	**7.372**
9.	Girimulyo	125	5.366	-	-	**5.485**
10.	Nanggulan	250	2.736	975	-	**3.957**
11.	Kalibawang	375	3.971	950	-	**5.290**
12.	Samigaluh	-	6.929	-	-	**6.922**
TOTAL		**23.667**	**28.032**	**4.388**	**2.600**	**58.628**
Persentase		**40,37%**	**47,81%**	**7,48%**	**4,43%**	**100%**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007

Kabupaten Kulon Progo secara stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis Pegunungan Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon Progo dikenal dengan Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan batuan-batuan dari Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut Van Bemmelen (1949) kedua formasi terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya hanya berbeda faises.

a. Formasi Nanggulan

   Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon Progo. Singkapan batuan-batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di sekitar Kalurahan Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon Progo. Penyusun batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, Napal pasiran, batulempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff serta kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan formasi ini adalah 300 meter.

b. Formasi Andesit Tua

   Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat dan sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan andesit augit hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 660 meter mempunyai kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. Batuan penyusun formasi ini berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, yaitu dari beberapa gunung api tua di daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung Api Andesit Tua. Gunung api yang dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah pegunungan, Gunung Ijo di bagian selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara Pegunungan Kulon Progo. Formasi Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai Meiosen Bawah.

c. Formasi Kaligesing

   Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan menumpang tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian Tengah sisi selatan barat dan barat laut dari kubah Kulon Progo.

d. Formasi Dukuh

   Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan silang – siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras ditas Formasi Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah Dukuh Kapanewon Samigaluh.

e. Formasi Jonggrangan

   Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar Kalurahan Jonggrangan, suatu Kalurahan yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut sebagai Plato Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat yang ditumpangi oleh Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. Formasi Jonggrangan ini terletak secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini mencapai sekitar 250 meter (Van Bemmelen, (1949). Formasi Jonggrangan dan Formasi Sentolo keduanya merupakan Formasi Kulon Progo (“*Westopo Beds*”) diduga berumur Miosen Tengah.

f. Formasi Sentolo

Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan Napal, semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. Batu gamping koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan formasi Jonggrangan, tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih muda Formasi Sentolo ini mempunyai ketebalan sekitar 950 meter. Satuan Endapan Vulkanik Kuarter merupakan endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi sisipan laca dan endapan lahar. Satuan ini berumur Pliosen-Pleistosen. Satuan ini terdapat di atas semua formasi di bagian timur. Satuan Endapan Aluvial tersusun oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan bongkah sepanjang sungai dan dataran pantai.

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5

Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
Kuarter	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai.	**100**
Pliosen-Pleistosen	Endapan Vulkanik Kuarter	breksi sisipan lava dan endapan lahar	**20**
Miosen Bawah	Sentolo	Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuf	**950**
Miosen Bawah	Jonggrangan	Bagian atas batu gamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat diatasnya napal tufaan dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit	**250**
Oligo–Miosen	Dukuh	Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batulempung	**660**
Oligosen	Kaligesing	breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan	**600**
Oligo-Miosen	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen batuan lebih tua.	**660**
Eosen Atas – Oligosen	Nanggulan	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi, selang-seling napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	**300**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012

b. Potensi

1. Potensi Air Tanah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) tersendiri yang tidak melampaui ke wilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates. CAT Wates telah

ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Hendrayana (2020) selain CAT Wates, terdapat pula CAT Menoreh yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan kalkulasi pada penelitian tersebut, CAT Wates memiliki potensi air tanah bebas sejumlah 34.650.385 m^3/tahun sedangkan CAT Menoreh sebesar 56.889.340 m^3/tahun. Pemanfaatan CAT pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, industri dan non industri lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan perhitungan, proyeksi pemanfaatan air tanah bebas pada CAT Wates pada tahun 2021 mencapai 7.721.376 m3. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo lainnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6

Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (Kapanewon)	Debit (Liter/Detik)	Pemanfaatan
1.	Mata air Clereng	Pengasih	125	Sudah/PDAM
2.	Tuk Mudal	Girimulyo	5 – 15	Sudah
3.	Tuk Gua Kiskendo	Girimulyo	24 – 60	Sudah
4.	Tuk Grembul	Kalibawang	5 – 10	Sudah/PDAM
5.	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5 - 3,5	Sudah/PDAM
6.	Mata air Sekepyar dan Kayangan	Samigaluh	-	Belum
7.	Tuk Mudal Anjir	Pengasih	3 – 11	MCK
8.	Cekungan Air Tanah Wates *)	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	34,6 juta m3/th	Sudah

Sumber data : - Bappeda, DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2018

- *) Hendrayana, Heru.dkk. 2020. Neraca Airtanah Cekungan Airtanah (CAT) Menoreh dan Wates Kabupaten Kulo Progo. Geomedia Vol.18 No.2 Tahun 2020.Hal 10-29

2. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa Kapanewon. Untuk lebih lengkapnya sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten Kulon Progo diperlihatkan di Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.7

Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo

No	Kluster	Bahan	Lokasi	Pemanfaatan*
1.	Biofuel, Biokerosene, Bioethanol	Ketela rambat, jarak pagar, nyamplung	Seluruh Kapanewon	n.a.
2.	Biogas	Limbah tahu, limbah ternak	122 unit usaha tahu, 51.405 populasi ternak bisa dikembangkan biogas 15 ribu	Memenuhi kebutuhan rumah tangga
3.	Briket	Limbah kayu	Seluruh Kapanewon	n.a.
4.	Energi Tenaga Surya	Sinar matahari	Seluruh Kapanewon	n.a.

No	Kluster	Bahan	Lokasi	Pemanfaatan*
5.	Mikrohidro	Air	Semawung, Kedungrong, Kalisangga, Sermo	Semawung (kapasitas 600 kwh) dikelola oleh PT. Energy Puritama
6.	Energi Tenaga Angin	Angin	Sepanjang pantai dan pegunungan	n.a.
7.	Energi Limbah Sampah	Limbah sampah	TPA Sampah 70-75 m^3	n.a.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, diolah.

2.1.1.1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS Serang dan sebagian kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
1	Bogowonto	2.509,931	Dekso
			Gesing
			Keduren
			Kodil
			Ngasinan
			Plamping
			Semanggung
2	Serang	23.532,85	Nagung
			Ngrancah
			Serang Hilir
			Serang Sekiyep
			Sidatan
			Sumitro
3	Progo	30.141,92	Batang
			Bedog
			Blongkeng
			Diro
			Gandri
			Jenes
			Kedung-Gong
			Konteng
			Krasak

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
			Krawang
			Mlinting Putih
			Penter
			Progo Hilir
			Sileng
			Sindon Salak
			Sudu
			Tangsi
			Tinalah

Sumber data: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit minimum 13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan anak–anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektare, dengan debit maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.

Kabupaten Kulon Progo memiliki danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di Kapanewon Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplisi irigasi sawah yang berada di Kapanewon Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplisi kebutuhan air minum.

b. Sungai

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara umum sungai utama di Kulon Progo adalah Sungai Progo dan Sungai Serang. Sungai Progo memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kulon Progo. Sungai Progo menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri khususnya pada kawasan perkotaan. Sungai Progo juga menjadi penyokong utama air irigasi lahan pertanian pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Daerah Irigasi Sapon yang merupakan area pertanian irigasi teknis terluas yang berada di Kulon Progo. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang 2015-2035 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/KPTS/M/2016, Debit maksimum yang tercatat di stasiun Kalibawang adalah sebesar 331 m^3/detik dan debit minimum sebesar 12 m^3/detik.

Sungai Serang meliputi daerah tangkapan air seluas 280 kilometer persegi dengan debit rerata bulanan yang tercatat di stasiun Durungan sebesar 10,83 m^3/detik dengan debit maksimum sebesar 61,10 m^3/detik dan debit minimum sebesar 0,28 m^3/detik. Sungai Serang memiliki anak Sungai Ngrancah yang dibendung untuk mengoperasikan Waduk Sermo untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan suplesi irigasi pada sistem Daerah Irigasi Kalibawang. Secara umum kondisi morfologi

sungai di Kulon Progo sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 yang menyajikan data inventarisasi sungai di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.9

Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
1	Progo	56,70	650	6
2	Serang	23,16	60	8
3	Ngrancah	9,12	50	10
4	Gede	11,17	50	10
5	Nagung	10,97	20	8
6	Seling	7,75	15	4
7	Pening	7,63	15	6
8	Sidatan	3,86	8	2
9	Sari	3,31	6	3
10	Bogem	2,60	6	3
11	Kopat	1,69	8	3
12	Papah	21,94	30	5
13	Tinalah	6,70	50	15
14	Kamal/Sudu	11,60	20	12
15	Salak	5,64	10	6
16	Dunggong	5,45	10	7
17	Klegung	6,48	15	6
18	Rowo Jembangan	8,30	12	3
19	Banyu Meneng	5,03	8	5

Sumber data: Neraca Sumber Daya Alam Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018.

2.1.1.1.6 Klimatologi

a. Iklim

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 (enam) bulan. Iklim musim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. H. Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah, dimana bulan basah adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif >100 mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan

kumulatif <60 mm dan bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60-100 mm. Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q (dalam persen), yaitu iklim A, Q<14,3, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, 14,3=<Q<33,3, daerah basah, hutan hujan tropis; iklim C, 33,3=<Q<60,0, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau); iklim D, 60,0=<Q<100,0, daerah sedang, hutan peluruh; iklim E, 100,0=<Q<167,0, daerah agak kering, padang sabana; iklim F, 167,0=<Q<300,0, daerah kering, padang sabana; iklim G, 300,0=<Q<700,0, daerah sangat kering, padang ilalang; dan iklim H, Q>=700,0 daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 5 tahun (2015-2019) dalam Buku Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2020, maka Kabupaten Kulon Progo mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata bulan basah sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C kategori daerah agak basah.

b. Curah Hujan

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan Tahun 2013-2018 sebesar 153 mm/hari sampai 271 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar dari 8-14 hari dalam sebulan.

Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan November - Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

Berikut secara rinci Curah Hujan dan Hari Hujan menurut bulan dan rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini.

Tabel 2.10

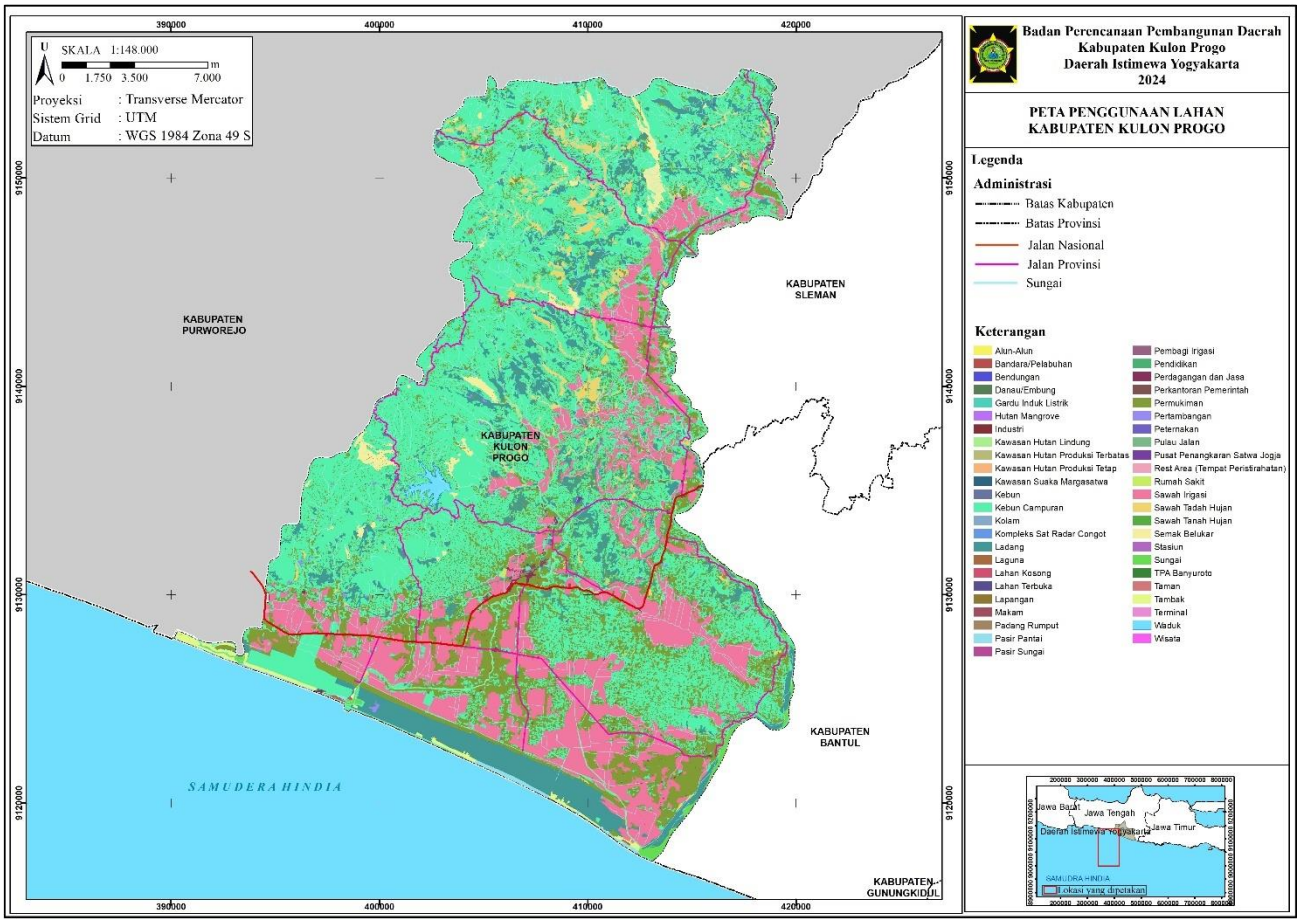
Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023

No	Bulan	2022		2023	
		CH	HH	CH	HH
1	Januari	397	20	199,4	27
2	Pebruari	251	11	232,1	24
3	Maret	289	18	203	19
4	April	176	8	115,9	14
5	Mei	178	13	85,2	5
6	Juni	191	10	53,4	8
7	Juli	32	3	49,4	9
8	Agustus	76	7	6	2
9	September	41	6	-	1
10	Oktober	700	22	-	-
11	Nopember	803	21	8	8
12	Desember	438	16	36,4	6
Jumlah		**3.572**	**155**	**988,8**	**123**
Rata-rata		**297,67**	**12,92**	**98,88**	**11,18**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat dikategorikan menggunakan pendekatan klasifikasi penutup lahan sesuai dengan SNI 7654:2010 terdiri atas daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Sedangkan daerah tak bervegetasi terdiri dari lahan terbuka, permukiman serta perairan. Mendasar pada hal tersebut, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 terdiri atas daerah bervegatasi sebesar 77% dan daerah tak bervegetasi sebesar 23%. Adapun pada daerah bervegetasi terdiri dari 73,5% lahan pertanian dan 3,1% lahan non pertanian. Sedangkan pada daerah tak bervegatasi terdiri dari 20,5% permukiman, 2,5% peraiaran dan 0,4% lahan terbuka. Penggunaan lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian menunjukkan karakteristik masyarakat Kulon Progo yang agraris. Sebaran penggunaan lahan diilustrasikan pada gambar berikut.



Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandhala lan Niti Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024 (diolah)

Gambar 2.4

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo

Adapun rincian penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kelas penggunaan lahan dari tahun 2021 – 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

No	Penggunaan Lahan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Bandara	0,91	1,01	1,02
2	Bangunan Industri	0,06	0,07	0,07
3	Bendungan	0,01	0,01	0,01
4	Danau/Embung	0,01	0,01	0,01
5	Gardu Induk Listrik	0,00	0,00	0,00
6	Gedung	0,01	0,01	-
7	Hamparan Pasir Pantai	0,34	0,46	0,36
8	Hamparan Pasir Sungai	0,01	0,01	0,01
9	Hutan Lahan Kering Primer	1,82	1,82	-
10	Hutan Mangrove	0,00	0,00	0,01
11	Kebun campuran	42,95	43,58	43,56
12	Kompleks Sat Radar Congot	0,00	0,01	0,01
13	Ladang	9,08	9,09	9,89
14	Laguna	0,03	0,03	0,03
15	Lahan Terbuka	0,43	0,41	0,00
16	Lahan Terbuka Hijau	0,01	0,01	-
17	Padang Rumput	0,86	0,87	0,01
18	Pasar	0,03	0,03	-
19	Pelabuhan Laut	0,02	0,02	0,02
20	Pembagi Irigasi	0,01	0,01	0,01
21	Pendidikan	0,26	0,27	0,28
22	Perdagangan dan Jasa	0,17	0,19	0,23
23	Perkantoran Pemerintah	0,17	0,18	0,18
24	Perkebunan	0,59	0,63	0,59
25	Permukiman	17,81	18,05	18,10
26	Pertambangan	0,09	0,09	0,10
27	Rumah Sakit	0,02	0,02	0,02
28	Sawah Irigasi	16,82	17,12	17,09
29	Sawah Tadah Hujan	2,25	2.29	2,35
30	Semak	0,01	0,11	-
31	Semak Belukar	1,24	1,28	1,26
32	Stasiun Kereta Api	0,01	0,01	0,01
33	Sungai	1,61	1,63	1,71
34	Tambak Ikan	0,01	0,01	-
35	Tambak Udang	0,47	0,35	-
36	Tanaman Campuran	0,01	0,01	-
37	Tempat Penimbunan Sampah/Deposit	0,00	0,00	-
38	Terminal Bus	0,00	0,00	0,00
39	Waduk	0,27	0,27	0,27
40	Kesehatan	0,018	0,02	-
41	Wisata	-	0,01	0,01
42	Pembagi irigasi	-	0,01	0,01
43	Kawasan Hutan Lindung	-	-	0.44
44	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	-	-	0.03

No	Penggunaan Lahan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
45	Kawasan Hutan Produksi Tetap	-	-	1.05
46	Kawasan Suaka Margasatwa	-	-	0.32
47	Kolam	-	-	0.01
48	Lahan kosong	-	-	0.02
49	Lapangan	-	-	0.13
50	Makam	-	-	0.27
51	Pusat Penangkaran Satwa Jogja	-	-	0.01
52	Tambak	-	-	0.47
53	TPA Banyuroto	-	-	0.00
54	Peternakan	-	-	0.00
55	Taman	-	-	0.01
	Total Luas	**100,00**	**100,00**	**100**

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandhala lan Niti Sasana Kabupaten Kulon Progo, 2024, *diolah*).

Penggunaan lahan pada data Tahun 2021 – 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, masih didominasi oleh lahan kebun campuran yang kemudian disusul oleh permukiman dan sawah irigasi. Lahan kebun campuran secara perlahan mengalami penurunan begitu pula dengan lahan sawah irigasi. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya persentase lahan permukiman. Selain itu, dapat diamati dari Tabel 2.11, bahwa luas penggunaan lahan tambak udang menurun pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan telah dilakukan penertiban terhadap aktivitas tambak udang yang berada di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo karena keberadaan tambak udang tersebut tidak diperbolehkan khususnya karena tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kelas penggunaan lahan baru muncul di tahun 2023 yang semula pada tahun 2021- 2022 sebanyak 42 kelas menjadi 55 kelas penggunaan lahan. Hal tersebut karena dilakukan pendetailan kelas penggunaan lahan berdasarkan hasil survey lapangan dan pengamatan berbasis citra satelit mendasar pada pemutakhiran peta dasar dan peta tematik pada review RTRW di tahun 2023.

2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan substansi pola ruang yang dirumuskan dalam substansi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari DPRD Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan terdiri dari:

1. Badan Air

   Kawasan Lindung Badan air meliputi waduk dan sungai. Luas Badan air adalah kurang lebih 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) hektar yang terdiri atas Waduk Sermo di Kapanewon Kokap dan sungai-sungai beserta anak sungainya yang meliputi Sungai Progo di Kapanewon Kalibawang,Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Galur;

Sungai Serang di Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Wates; dan Sungai Bogowonto di Kapanewon Temon.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar, berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

   Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 2.524 ha meliputi sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk/embung dan sempadan mata air yang terdapat di 12 kapanewon yang ada di Kulon Progo.

4. Kawasan Konservasi

   Kawasan konservasi terdiri atas:

   a. Kawasan suaka alam berupa suaka margasatwa dengan luas kurang lebih 185 ha berada di Kapanewon Kokap dan
   b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa konservasi penyu dengan luas kurang lebih 2 ha, berada di Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Temon.

5. Kawasan Lindung Geologi

   Kawasan Lindung Geologi meliputi:

   a. Kawasan cagar alam geologi dengan luas kurang lebih 145 hektar terdiri atas:
      - Kawasan Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo berada di Kapanewon Samigaluh;
      - Kawasan Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari berada di Kapanewon Samigaluh;
      - Kawasan Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang di Kapanewon Kalibawang;
      - Kawasan Gua Kiskendo Kapanewon Girimulyo; dan
      - Kawasan Mangaan Kliripan-Karangsari berada di Kapanewon Kokap dan Pengasih.
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dengan seluas kurang lebih 1.609 (seribu enam ratus sembilan) hektar berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, dan Kapanewon Samigaluh.

6. Kawasan Cagar Budaya

   Kawasan cagar budaya memiliki luas kurang lebih 3 hektar, meliputi:

   a. Makam Nyi Ageng Serang di Kapanewon Kalibawang;
   b. Kawasan Sendangsono berada di Kapanewon Kalibawang;
   c. Gereja Santa Maria Lourdes Promasan berada di Kapanewon Kalibawang;
   d. Puncak Perbukitan Suroloyo di Kapanewon Samigaluh;
   e. Makam Keluarga Paku Alam Girigondo berada di Kapanewon Temon;
   f. Jembatan Duwet berada di Kapanewon Kalibawang;
   g. Perumahan Pabrik Gula Sewu Galur berada di Kapanewon Galur;
   h. Rumah TB.Simatupang berada di Kapanewon Samigaluh; dan
   i. Rumah H.Djamal berada di Kapanewon Sentolo.

7. Kawasan Ekosistem Mangrove

   Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 3 ha berada di Kapanewon Temon.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Kesesuaian kawasan untuk kegiatan budidaya, selain berdasar atas perhitungan skor kesesuaian lahan, secara lebih rinci juga dilakukan identifikasi faktor-faktor fisik kawasan untuk kesesuaian fungsi kegiatan tertentu. Bentang alam Kabupaten Kulon Progo merupakan area dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan lerengan beragam mulai 0-70 persen. Kawasan budidaya terdiri dari:

1) Kawasan hutan produksi

   Kawasan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Hutan produksi tetap seluas 625 Ha berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Temon. Sedangkan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 2 Ha berada di Kapanewon Girimulyo.

2) Kawasan perkebunan rakyat

   Perkebunan Rakyat merupakan perkebunan yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik masyarakat. Luasan kawasan perkebunan rakyat adalah 6.450 ha yang tersebar di seluruh kapanewon di Kulon Progo.

3) Kawasan peruntukan pertanian

   Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan

   a. Kawasan Tanaman Pangan

      Kawasan tanaman pangan adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 10.886 ha dan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 13.522 ha terdapat di seluruh kapanewon.

   b. Kawasan Hortikultura

      Kawasan hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 3.321 ha tersebar di seluruh kapanewon.

   c. Kawasan Perkebunan

      Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

      Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu mete. Kawasan perkebunan meliputi luasan kurang lebih 180 ha yang tersebar di seluruh kapanewon.

4) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lokasi pengembangan kawasan perikanan:

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap

   Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) di meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Galur seluas kurang lebih 10 ha.

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

   Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 144 ha tersebar di seluruh kapanewon.

5) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam dengan luasan kurang lebih 11 ha yang terdapat di Kapanewon Kokap, Pengasih, Nanggulan, Kalibawang, Temon, Galur, Panjatan dan Wates.

6) Kawasan peruntukan industri

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan seluas kurang lebih 4.147 ha yang berada di Kapanewon Sentolo, Lendah, Nanggulan dan Temon

7) Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata meliputi luasan kurang lebih 31 ha di Kapanewon Galur, Kalibawang dan Temon. Kawasan Pariwisata terdiri atasan:

a. Kawasan Pariwisata Alam

   Dengan wilayah pengembangan meliputi Kapanewon Temon, Galur, Wates, Panjatan, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Pengasih dan Kalibawang.

b. Kawasan Pariwisata Budaya

   Pengembangan pariwisata budaya meliputi kawasan di Kapanewon Kalibawang, Wates, Temon, Samigaluh, Pengasih, Lendah dan Temon.

c. Kawasan Pariwisata Buatan

   Kawasan pariwisata buatan meliputi seluruh kapanewon kecuali kapanewon Temon.

8) Kawasan Permukiman meliputi:

a. Permukiman perkotaan seluas 10.984 ha yang meliputi Permukiman Perkotaan Wates, Permukiman Perkotaan Galur, Permukiman Perkotaan Sentolo, Perkotaan Nanggulan, Permukiman Perkotaan Dekso, Permukiman Perkotaan Lendah, Permukiman Perkotaan Kokap, Permukiman Perkotaan Girimulyo, Permukiman Perkotaan Kalibawang, Permukiman Perkotaan Samigaluh dan Permukiman Perkotaan Temon.
b. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 19.931 ha tersebar di seluruh kapanewon.

9) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi meliputi kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) seluas kurang lebih 1.354 ha di Kapanewon Temon.

10) Kawasan Pertanahan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 12 ha meliputi:

a. Satuan radar militer berada Kapanewon Temon;
b. Detasemen 2 Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kapanewon Sentolo;
c. markas polisi perairan (pos polisi laut) berada di Kapanewon Temon;
d. pos TNI angkatan laut berada di Kapanewon Temon;
e. markas komando distrik militer berada di Kapanewon Wates;
f. markas komando rayon militer tersebar di seluruh Kapanewon;
g. markas kepolisian resor berada di Kapanewon Pengasih;
h. markas kepolisian sektor tersebar di seluruh Kapanewon; dan
i. Lapangan Tembak Sentolo berada di Kapanewon Sentolo.

Adapun sebaran peruntukan ruang berdasarkan pola ruang Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.12

Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

NO	PERUNTUKAN RUANG BERDASARKAN POLA RUANG	LUAS (Ha)
A	KAWASAN LINDUNG	
	1. Badan air (Waduk dan Sungai)	1.162
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan lindung)	254
	3. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk/embung)	2.524
	4. Kawasan Konservasi	
	Kawasan Suaka Alam	185
	Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil (Konservasi Penyu)	2
	5. Kawasan lindung geologi	
	Kawasan cagar alam geologi	145
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	1.609
	6. Cagar Budaya	3
	7. Kawasan ekosistem mangrove	3
B	KAWASAN BUDIDAYA	
	1. Kawasan hutan produksi	609
	2. Kawasan Perkebunan rakyat	6.450
	3. Kawasan peruntukan pertanian	
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	10.886
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	13.552
	Kawasan Hortikultura	3.321
	Kawasan Perkebunan	180
	4. Kawasan Perikanan	
	Kawasan Perikanan Tangkap	10
	Kawasan Perikanan Budidaya	144
	5. Kawasan Pertambangan dan Energi	

NO	PERUNTUKAN RUANG BERDASARKAN POLA RUANG	LUAS (Ha)
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	11
	Kawasan Pertambangan Batuan	16.400
	6. Kawasan Peruntukan Industri	4.147
	7. Kawasan Pariwisata	31
	(Kaw. Pariwisata Alam,Kaw. Pariwisata Budaya, Kaw Pariwisata Buatan)	
	8. Kawasan Permukiman	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.984
	Kawasan Permukiman Perdesaan	19.931
	9. Kawasan Transportasi (Kawasan BIY)	13.54
	10.Kawasan Pertanahan dan Keamanan	2

Sumber data : Substansi Revisi RTRW Kulon Progo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha NIti Mandhala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua peruntukan ruang dapat terdokumentasikan secara numerik karena beberapa peruntukan ruang sifatnya tersebar di seluruh kapanewon. Satu ruang dalam pola ruang Kabupaten Kulon Progo dapat diperuntukkan untuk pemanfaatan ruang yang berbeda – beda (bukan merupakan peruntukan ruang tunggal) asalkan pemanfaatan ruangnya tidak saling bertentangan.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo juga dapat dilihat berdasarkan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo. Dalam substansi reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo banyak dinamika perubahan struktur ruang yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang ada dalam substansi RTRW Kabupaten Kulon Progo yang lama. Rencana struktur ruang yang cukup signifikan berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah salah satunya adalah keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Jika merujuk pada tujuan penataan ruang sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012 bahwa arah penataan ruang kabupaten lebih menitik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian sebagai basis yang didukung oleh pariwisata, pertambangan dan industri bahari kemudian dengan mempertimbangkan keberadaan BIY dan semua potensi ikutannya maka tujuan penataan ruang bergeser dan menjadikan sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor tumpuan yang didukung oleh bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan dan jasa serta industri. Adapun keberadaan BIY menimbulkan efek berganda bagi munculnya pusat pertumbuhan kawasan – kawasan strategis baru di Kabupaten Kulon Progo.

1) Pengembangan Kawasan Aerotropolis

   Keberadaan BIY di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2020 merupakan pemicu perubahan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang paling signifikan. Kawasan sekitar BIY menjadi kawasan strategis Kabupaten yang dikembangkan dengan konsep Aerotropolis. Kawasan Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo meliputi 8 Kapanewon yaitu Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, Kokap, Galur, Lendah, Panjatan dan Sentolo dengan luas total mencapai 26.605,5 Ha.

   Kawasan Sekitar BIY menjadi pusat transportasi udara berskala Internasional yang memberikan peluang besar bagi tumbuhnya pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan

ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebagai Bandar Udara skala internasional baru, diharapkan dapat menjadi gerbang keluar masuknya barang maupun orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengusung konsep pengembangan wilayah sekitar BIY sebagai Aerotropolis yang terarah dan terencana diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk potensi ekonomi lokal kawasan. Selain itu, dalam pengembangan dan pembangunan kawasan sekitar BIY harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan serta memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Infrastruktur pendukung keberadaan BIY dan kawasan Aerotropolis juga terus dikembangkan antara lain dengan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang berstandar internasional dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pengembangan sarana prasarana transportasi darat juga dilakukan dengan pembangunan jalur kereta api Bandara yang memudahkan dan mempercepat para penumpang tujuan Bandara untuk langsung menuju Bandara. Dengan dibangunnya jalur kereta api tersebut, stasiun Kedundang yang semula non aktif saat ini direaktivasi untuk mendukung operasional kereta tersebut. Kedepannya dengan semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi maka direncanakan pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar kawasan Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang. Sebagai tambahan, dalam rangka memperlancar pergerakan para pengguna jasa angkutan udara menuju BIY direncanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo. Selain pengembangan infrastruktur di bidang transportasi, pengembangan infrastruktur penunjang pemenuhan kebutuhan dasar khususnya air minum juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro. Adapun pembangunan bendungan Kamijoro terletak di Kapanewon Sentolo. Rencananya air baku dari bendung Kamijoro akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Kulon Progo terutama untuk memenuhi kebutuhan di kawasan Aerotropolis dan kawasan Peruntukan Industri Sentolo serta kawasan perkotaan di Kapanewon Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Temon dan Wates. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sekitar 286 Liter/detik. Sumber alternatif air baku lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum adalah dari rencana pembangunan bendung Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi DIY termasuk Kabupaten Kulon Progo didalamnya adalah sebesar 700 Liter/detik.

2) Pengembangan Kawasan Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur

Dengan ditetapkannya Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan target pencapaian kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo yang terletak bersebelahan dengan kawasan Borobudur memiliki potensi besar untuk menangkap peluang positif yang ada. Kawasan perbukitan Menoreh sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memiliki potensi daya tarik pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan agar dapat bersinergi dengan pengembangan pariwisata Borobudur. Rencana pembangunan Koridor Temon – Borobudur merupakan salah satu strategi daerah dalam rangka menyediakan akses transportasi dari BIY

menuju kawasan Borobudur. Rencana *exit – entry* jalan Tol juga mengakomodir keberadaan Koridor Temon – Borobudur agar konektivitas wilayah tetap sinergi.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, bahwa strategi pengembangan pola ruang Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan dengan penetapan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten dalam rangka mewujudkan pelestarian nilai – nilai budaya dan sosial masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat 4 (empat) Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten meliputi 1) Perbukitan Menoreh; 2) Makam Girigondo; 3) Pusat Kota Wates; dan 4) Pantai Selatan Kulon Progo.

2.1.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 (dua belas) potensi bencana meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah/ tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Adapun tingkat risiko dari keduabelas potensi bencana sebagai berikut.

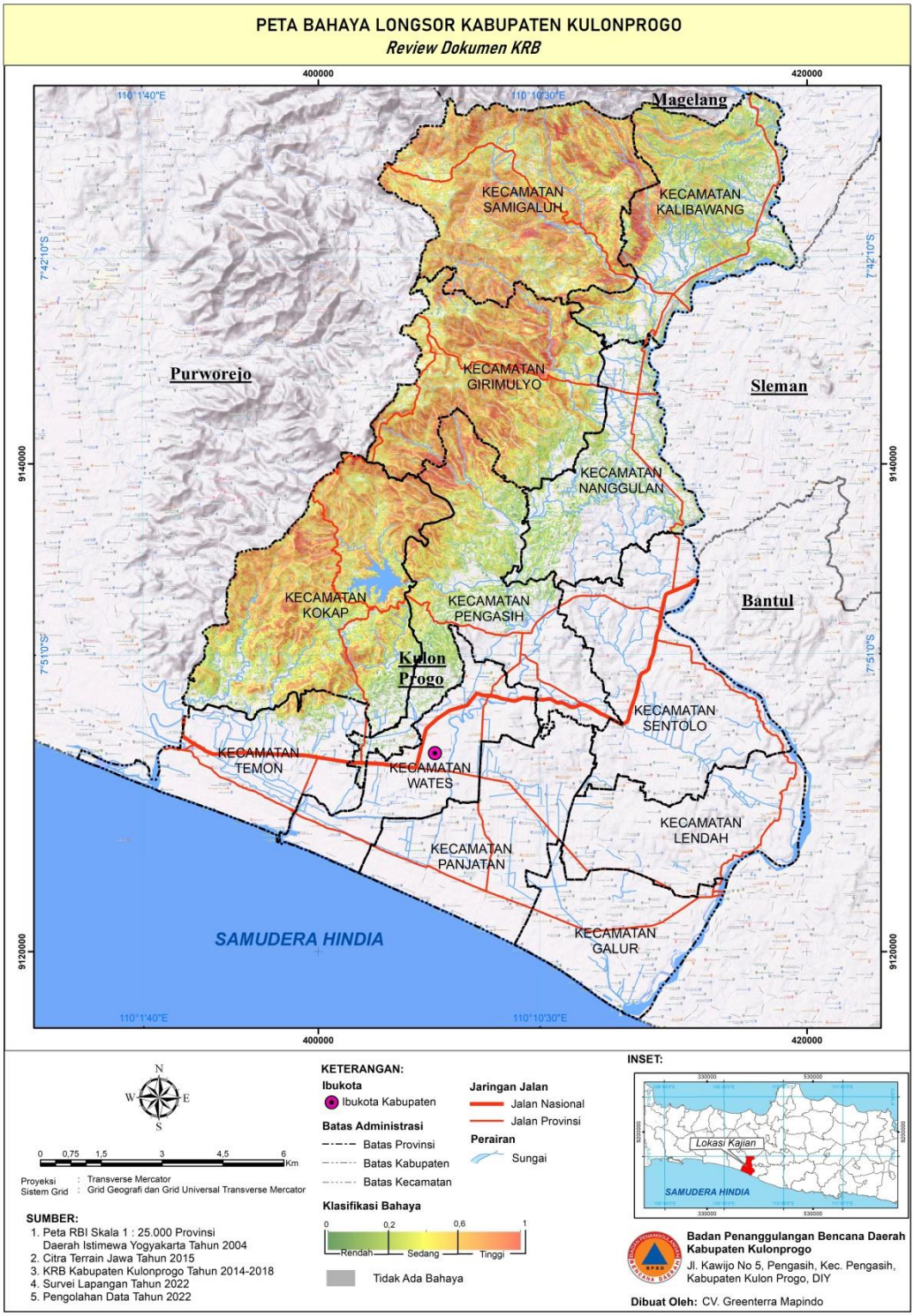
Tabel 2.13

Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo

NO.	KATEGORI BENCANA	JENIS POTENSI BENCANA	TINGKAT RISIKO BENCANA
1	Geologi	Gempa Bumi	Tinggi
2		Tsunami	Tinggi
3		Letusan Gunung Api	Rendah
4		Gerakan Tanah/ Tanah Longsor	Tinggi
5	Hidrometeorologi	Banjir	Tinggi
6		Banjir Bandang	Tinggi
7		Kekeringan	Tinggi
8		Cuaca Ekstrem	Tinggi
9		Gelombang Ekstrem	Sedang
10		Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang
11	Biologi	Epidemi/ Wabah Penyakit	Tinggi
12	Anthropogenik	Kegagalan Teknologi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Dari aspek kemiringan lereng wilayah Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Girimulyo memiliki tingkat kemiringan lereng dengan kategori sangat curam (>40º), sehingga ketiga wilayah kapanewon ini merupakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor yang tinggi. Selain ketiga kapanewon ini juga ada Kapanewon Kalibawang, Pengasih, dan Nanggulan yang sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng curam sampai sangat curam dengan potensi bahaya longsor tinggi. Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.5

Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo

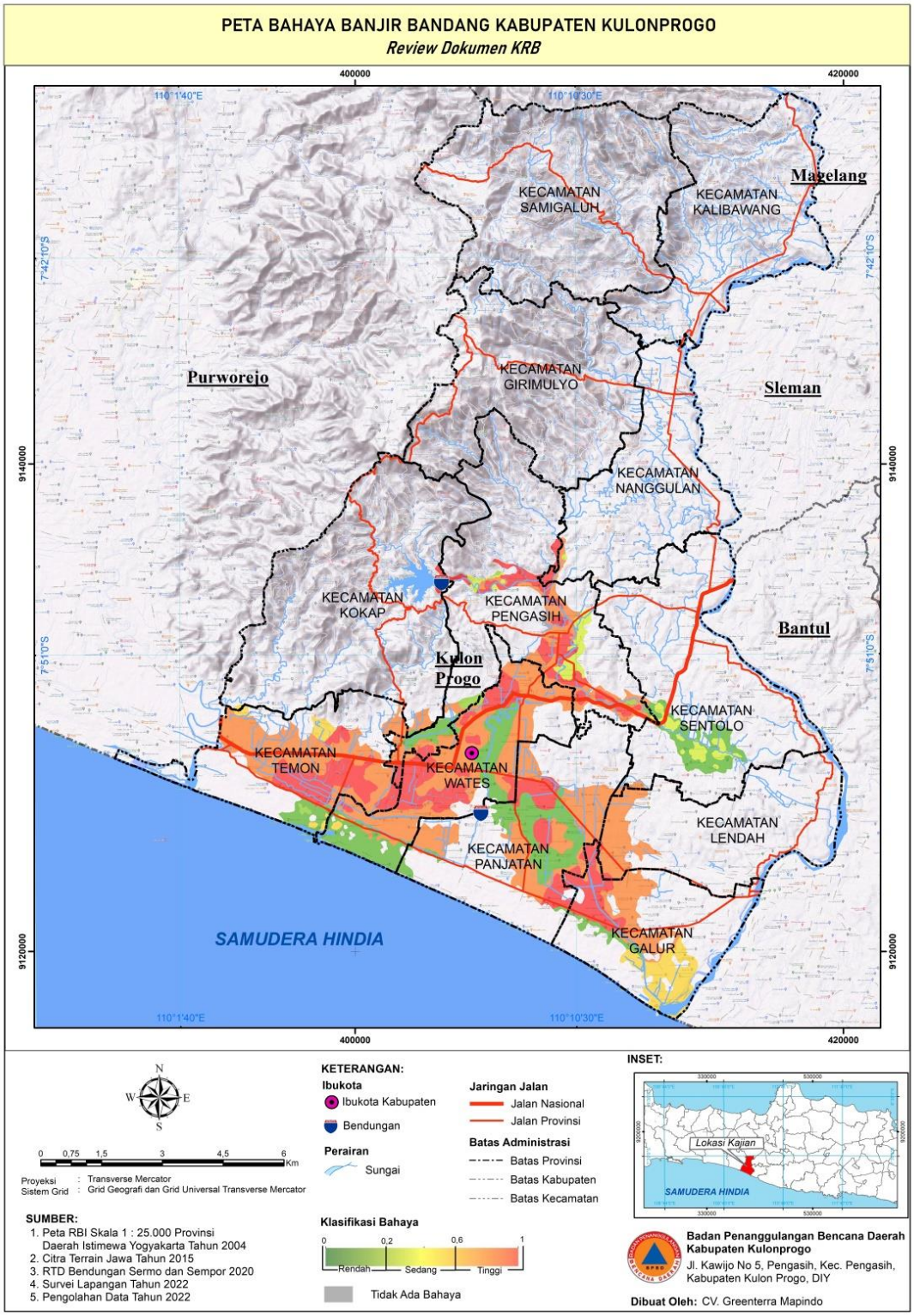
Longsor adalah bencana yang intensitasnya paling tinggi. Untuk meminimalkan risiko bencana longsor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural untuk penanganan longsor berupa intervensi pengurangan risiko bencana di bidang pembangunan infrastruktur yang berorientasi pengurangan risiko bencana, pemasangan EWS (*Early Warning Systems*), dan lain-lain. Mitigasi non struktural dilakukan dengan meningkatkan

kapasitas masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, kajian-kajian, regulasi di level Kalurahan; pembuatan SOP, dan simulasi/gladi. Adapun kegiatan mitigasi non struktural secara komprehensif dilaksanakan dalam program Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana.

Karakteristik geografis dan administratif Kabupaten Kulon Progo berpengaruh terhadap adanya potensi bencana lintas batas wilayah administratif seperti misalnya intensitas hujan tinggi yang terjadi terjadi di kawasan Hulu DAS Progo dan DAS Bogowonto dapat mengakibatkan banjir atau banjir bandang yang dampaknya sampai ke wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, kemiringan lereng yang besar di perbukitan menoreh terutamanya di Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, Kokap, dan Nanggulan, menyebabkan daerah ini memiliki potensi banjir bandang (*Flash Flood Potential Index* - FFPI) yang tinggi. Ditambah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luas menghasilkan debit aliran yang besar. Selain itu, banjir terjadi karena limpasan air hujan yang berada di bentang topografi yang relatif rendah terhambat mengalir ke pantai akibat drainase/sungai tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, tingginya intensitas curah hujan pada periode musim hujan berdampak terhadap kejadian bencana banjir terutamanya di wilayah langganan banjir di Kapanewon Panjatan dan Temon.

Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan mengakibatkan kerugian di semua sektor, terutama sektor jasa, pertanian, dan perikanan. Penanganan banjir dan genangan dilakukan dari level pemerintah pusat, propinsi maupun Pemerintah Kabupuaten Kulon Progo sesuai kewenangan. Bentuk penanganannya berupa kegiatan konservatif (pengurangan laju run off dengan vegetasi) maupun teknis (rehabilitasi dan normalisasi saluran) serta pembuatan bangunan sipil teknis lainnya. Saat ini masih berlangsung proyek multiyears pengendali banjir sekitar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menanggulangi banjir di kawasan sekitar bandara.

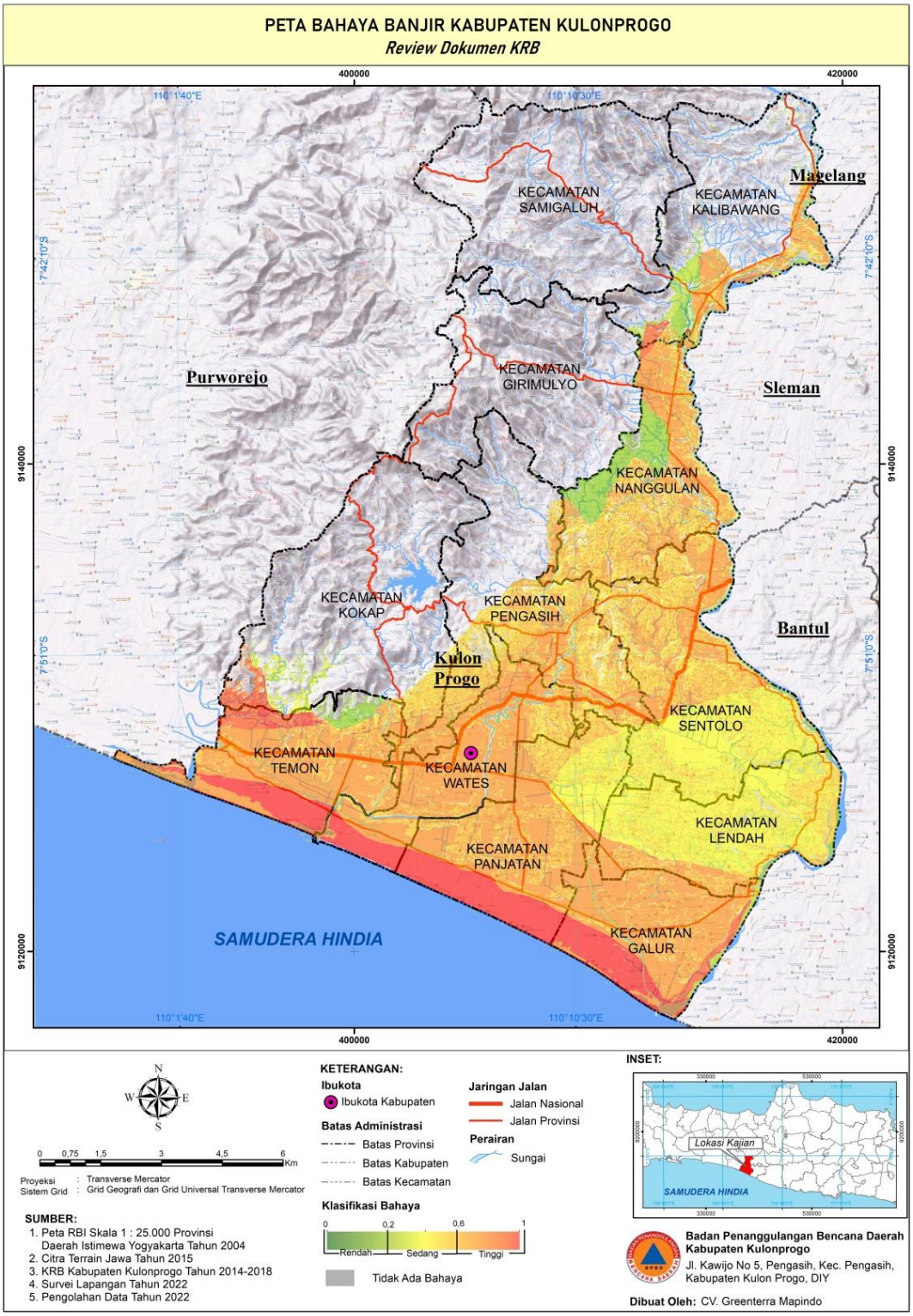
Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana banjir bandang dan banjir di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.6

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo

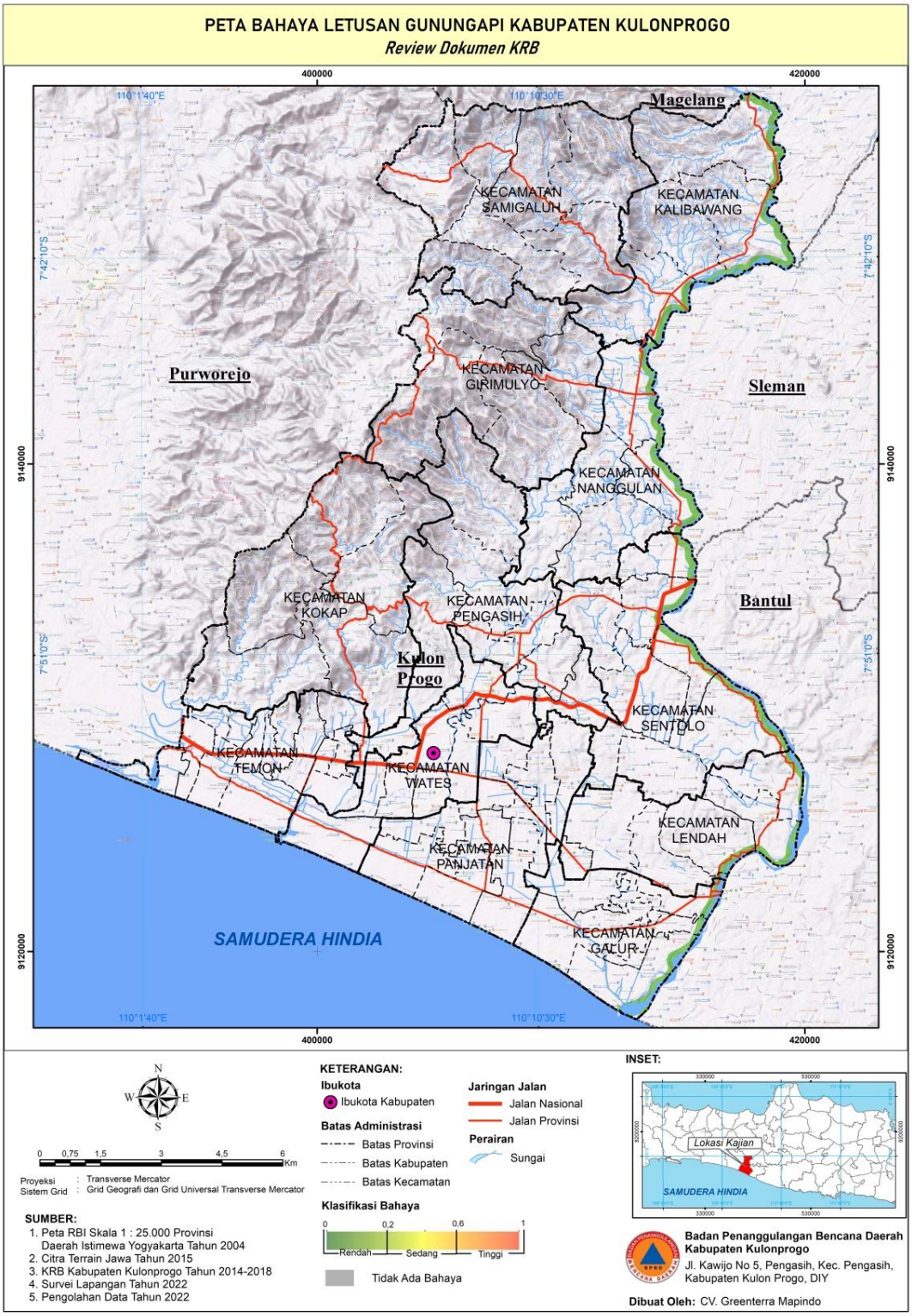


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.7

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo

Dampak hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunungapi Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten dapat melanda wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana letusan gunung api dapat dilihat pada peta berikut.

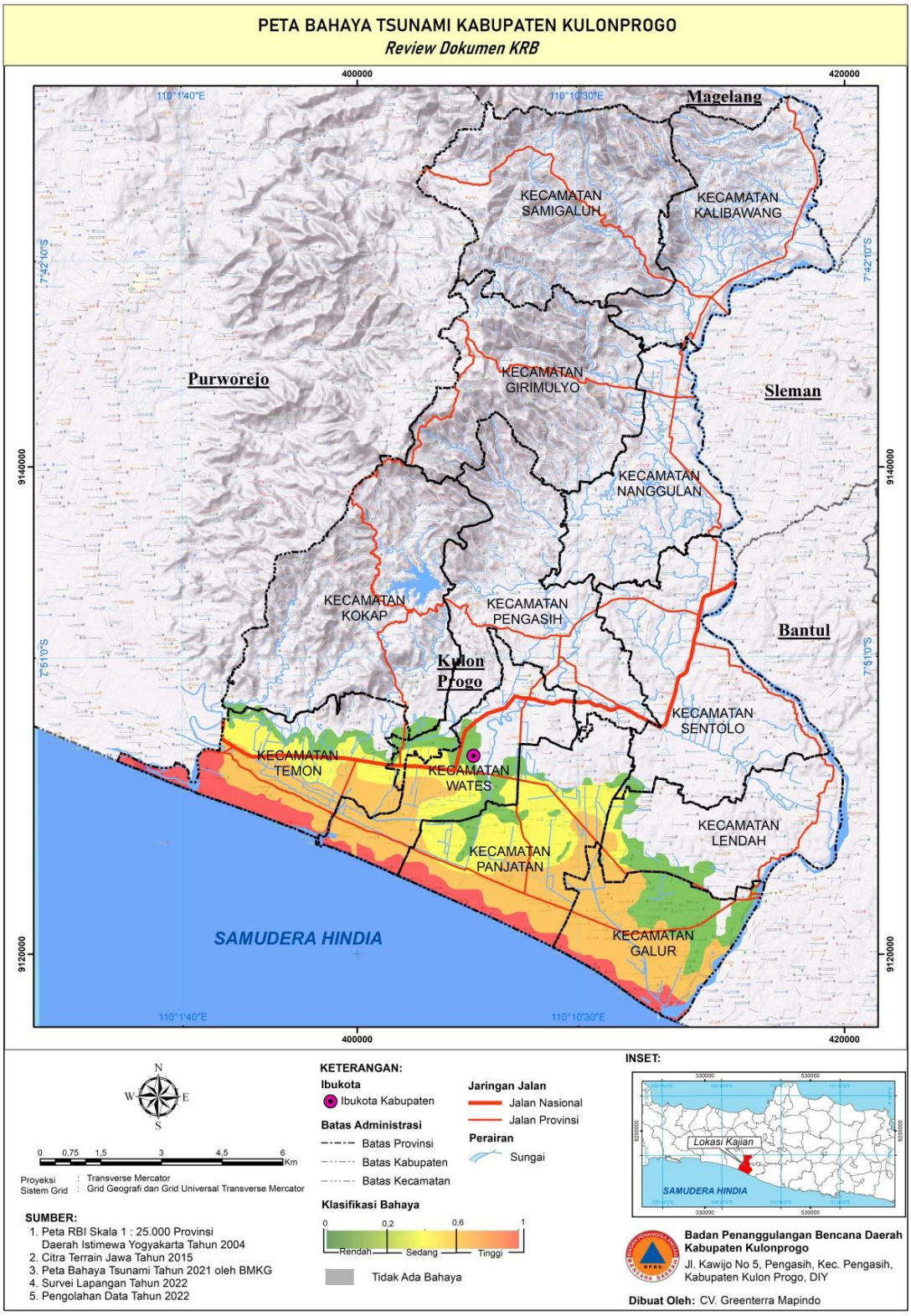


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.8

Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo

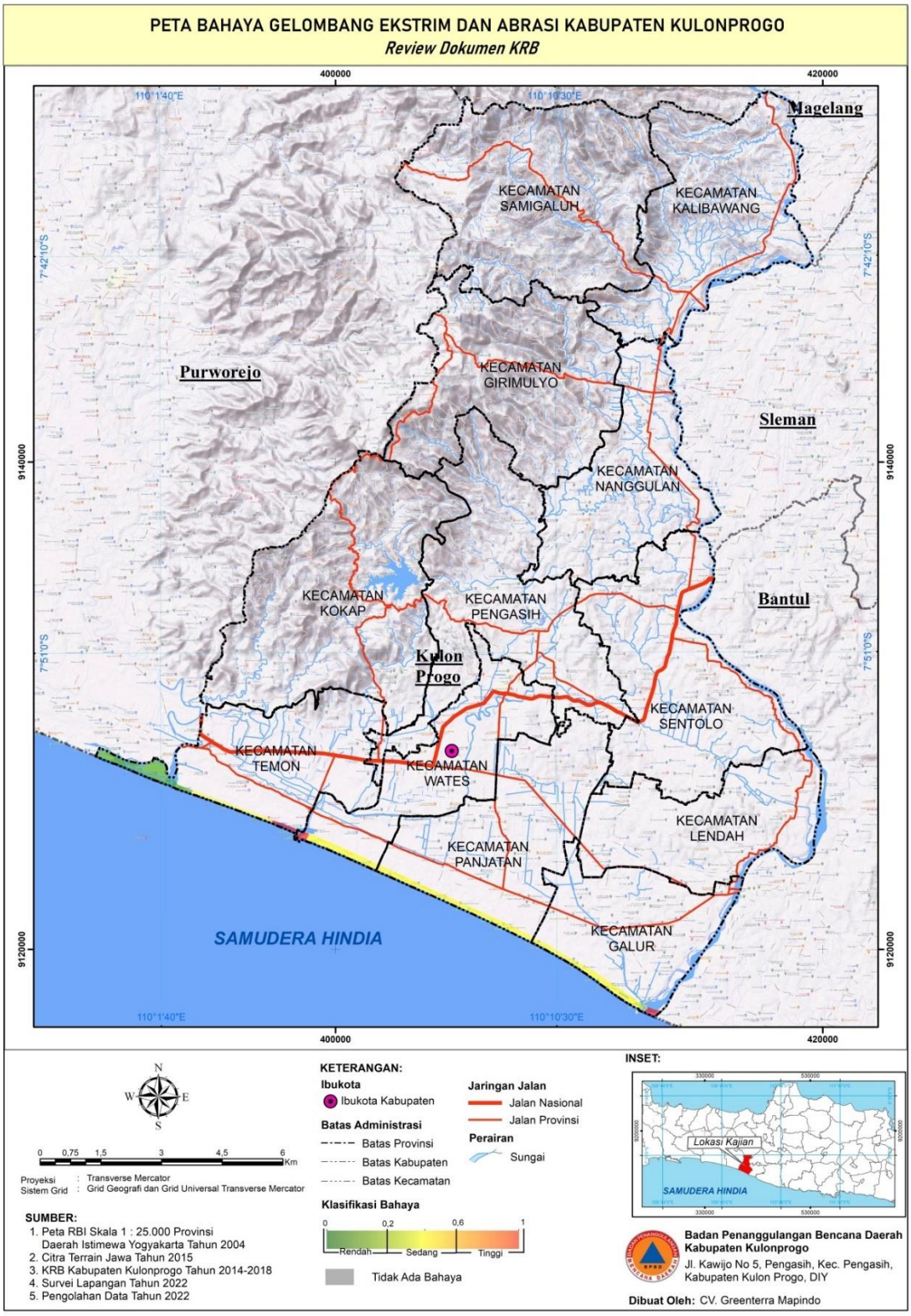
Tatanan geologi dan geomorfologi di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bentang lahan pesisir meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, dan Galur memiliki potensi bahaya tsunami, banjir, liquifaksi, gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tsunami dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.9

Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo



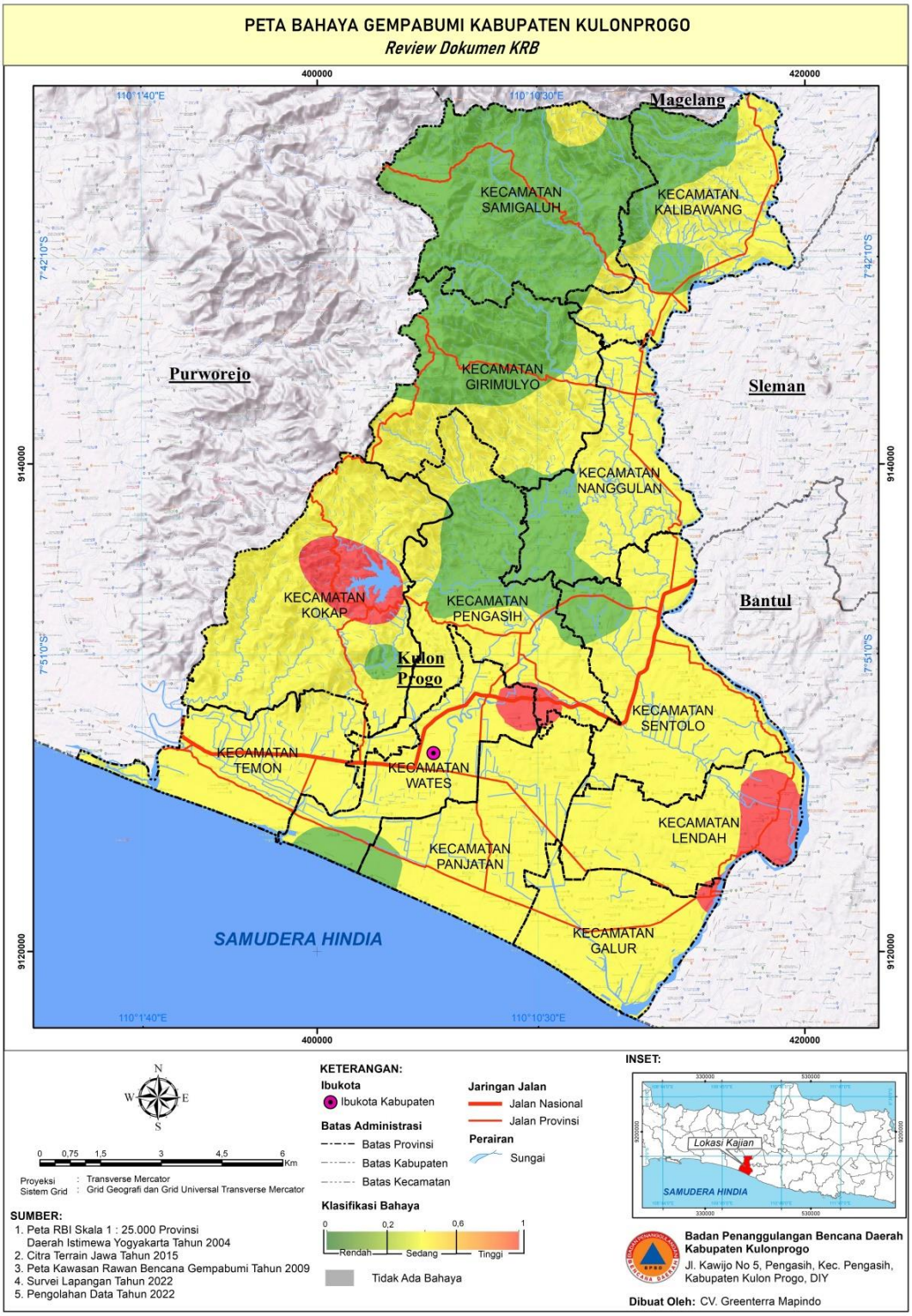
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.10

Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo

Tsunami adalah ancaman dengan probabilitas relatif rendah tetapi berdampak sangat tinggi terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengkajian dan modeling BMKG (2021) dengan skenario terburuk, potensi gempa bumi berkekuatan 8,8 M berpotensi memicu tsunami di selatan Pulau Jawa. Wilayah yang berpotensi terdampak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 Kapanewon dan 31 Kalurahan yang berpotensi terdampak tsunami akibat gempa bumi megathrust dengan waktu tiba gelombang tsunami berkisar 38 – 42 menit dengan ketinggian maksimum 18 – 22 meter dan landasan maksimal sejauh 7 km. Daerah yang berpotensi terlanda tsunami adalah daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kawasan strategis bagi pengembangan dan pembangunan Kulon Progo bagian selatan. Untuk meminimalkan dampak tsunami, di wilayah selatan sudah menginisiasi pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan berbagai pihak juga telah menyediakan layanan peringatan dini tsunami yang selalu diuji coba setiap jam 10.00 WIB pada tanggal 26 setiap bulannya. Pemerintah juga sudah menyusun dan mensosialisasikan SOP dan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi tingkat kabupaten untuk kemudian di breakdown di level Kalurahan; pemerintah juga sudah menyusun rencana kontigensi yang diuji dengan simulasi tsunami yang melibatkan berbagai pihak.

Secara geologi wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki keragaman yang sangat tinggi. Banyaknya struktur sesar di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan potensi bencana karena faktor geologis seperti gempa bumi menjadi semakin tinggi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut.



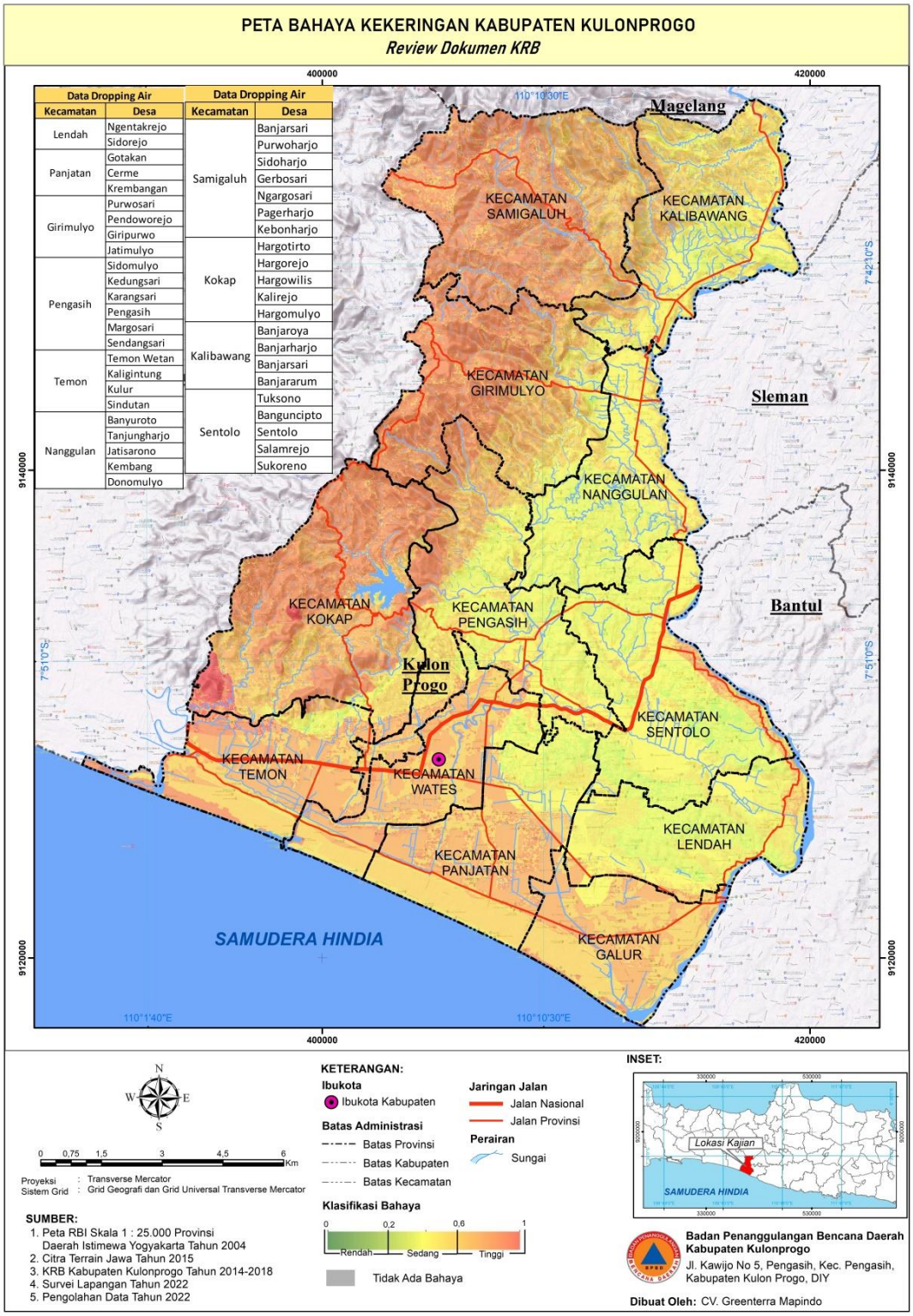
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.11

Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan kondisi karakteristik akuifer, pada periode musim kemarau beberapa wilayah di perbukitan menoreh yang meliputi Kapanewon Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap mengalami bencana kekeringan, sehingga pada puncak musim kemarau diperlukan upaya droping air untuk memenuhi

kebutuhan air bersih warga masyarakat terdampak. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kekeringan dapat dilihat pada peta berikut



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.12

Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo

Upaya dalam rangka menanggulangi bencana kekeringan dilakukan secara komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian sumber mata air yang digagas masyarakat, PAMSIMAS, SPAM Kalurahan, SPAM Mandiri Masyarakat, penambahan jaringan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. Dalam kondisi kekeringan parah dan panjang upaya dropping air bersih dilakukan dengan pelibatan kolaborasi berbagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten, BAZNAS, PMI, Perumda Air Minum Tirta Binangun dan lembaga lainnya.

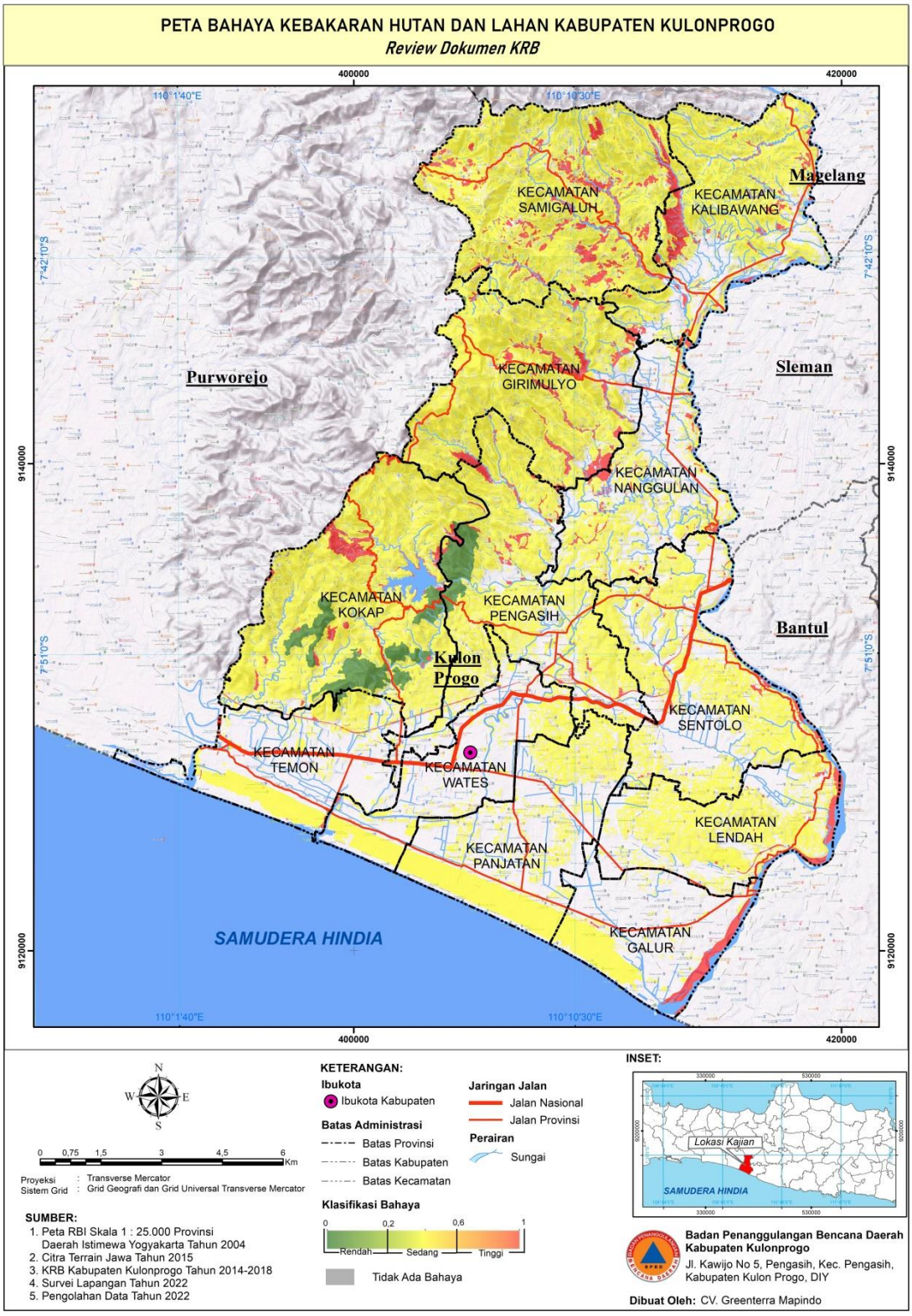
Ancaman bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat risiko bencana bervariasi dari tinggi hingga sedang.

Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo, antara lain : fenomena cuaca panas, hujan lebat dan angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor terutama di wilayah perbukitan yang mempunyai potensi hujan lebat. Hujan disertai angin juga dapat disertai dengan kilat/petir bisa menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh selain itu dapat meningkatkan tinggi gelombang air laut. Penyebab terjadinya cuaca ekstrem ini antara lain akibat peningkatan aliran udara basah dari Asia menuju wilayah Jawa. Selain itu juga faktor siklon tropis Savannah, yang berdampak pada ketersediaan uap air melimpah dalam pembentukan awan hujan di wilayah Jawa.

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi antara lain disebabkan karena: kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi, kerusakan komponen dan kebocoran reaktor. Kejadian tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia berbahaya atau bahan radioaktif, kecelakaan industri atau kecelakaan transportasi yang menimbulkan korban tewas serta kerugian harta benda.

Di wilayah Kulon Progo ada beberapa potensi terjadinya bencana karena kegagalan teknologi antara lain: potensi banjir bandang akibat jebolnya tanggul Waduk Sermo yang bisa mengancam Wilayah Perkotaan Wates. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana tersebut, dapat dilakukan mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana, antara lain dengan : peningkatan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini, perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar, sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerjasama dengan instansi terkait, peningkatan standar keselamatan di bangunan dan Desa peralatan, antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain bangunan, pembuatan prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.

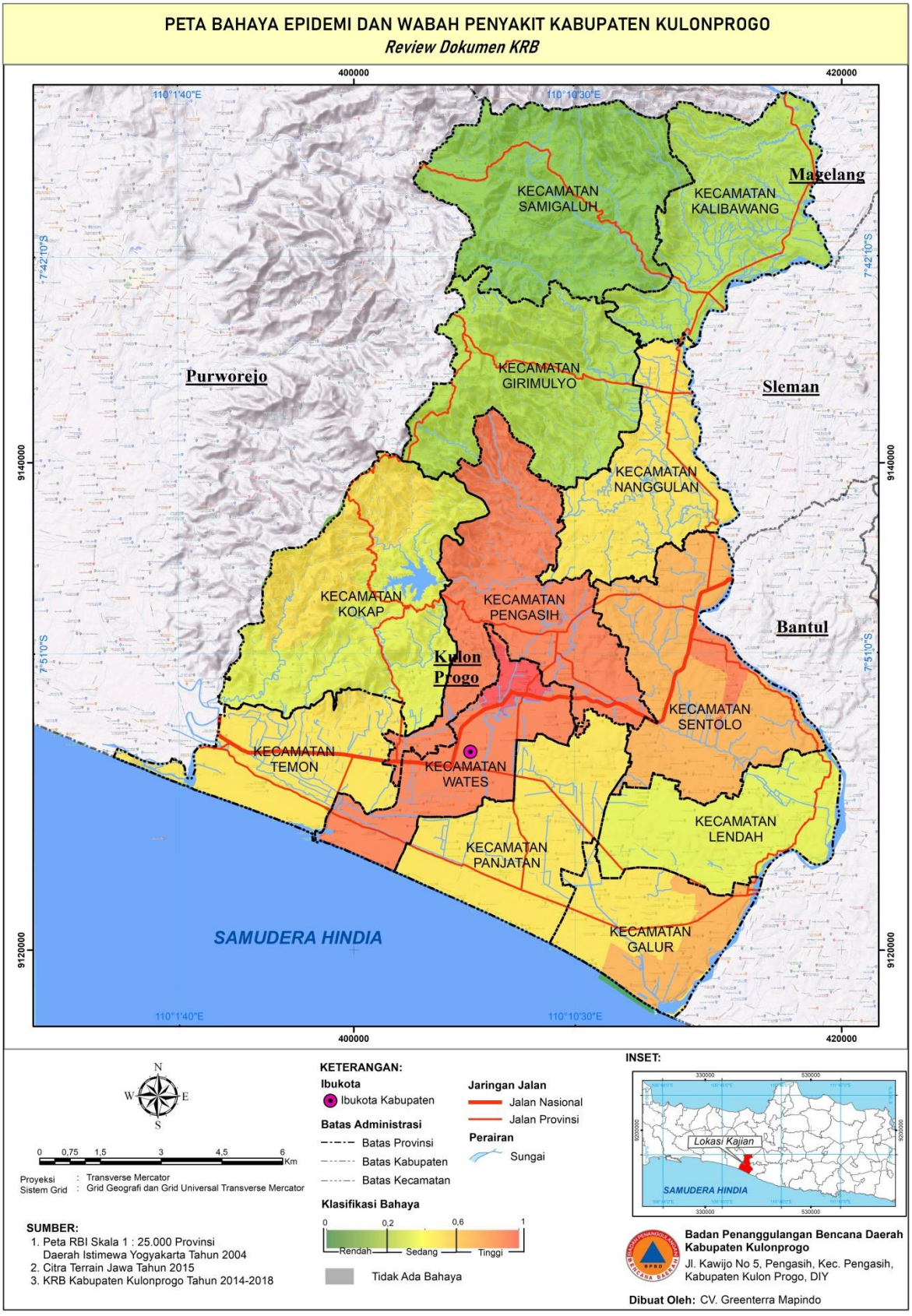
Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, epidemi, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi dapat dilihat pada peta – peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.13

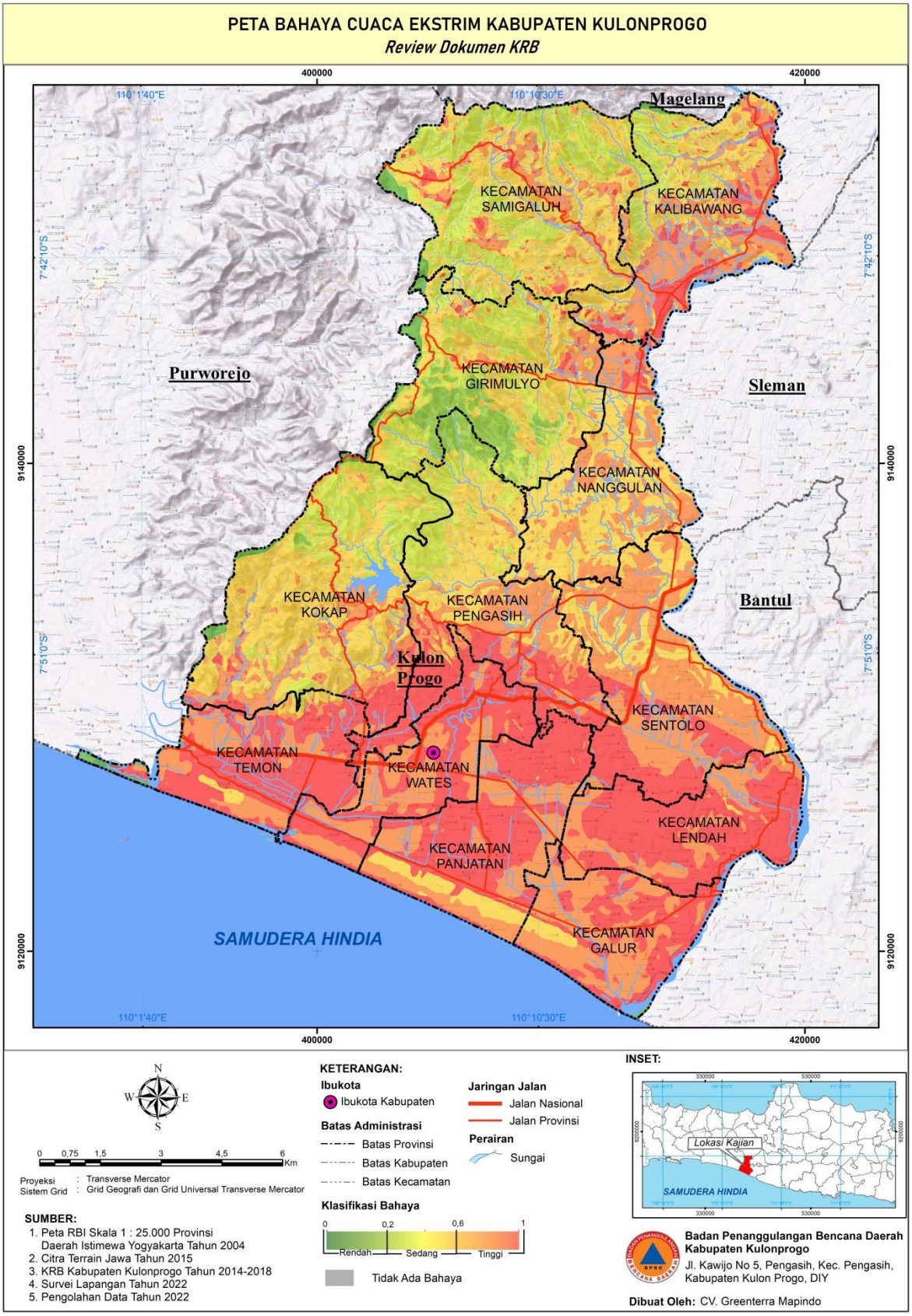
Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.14

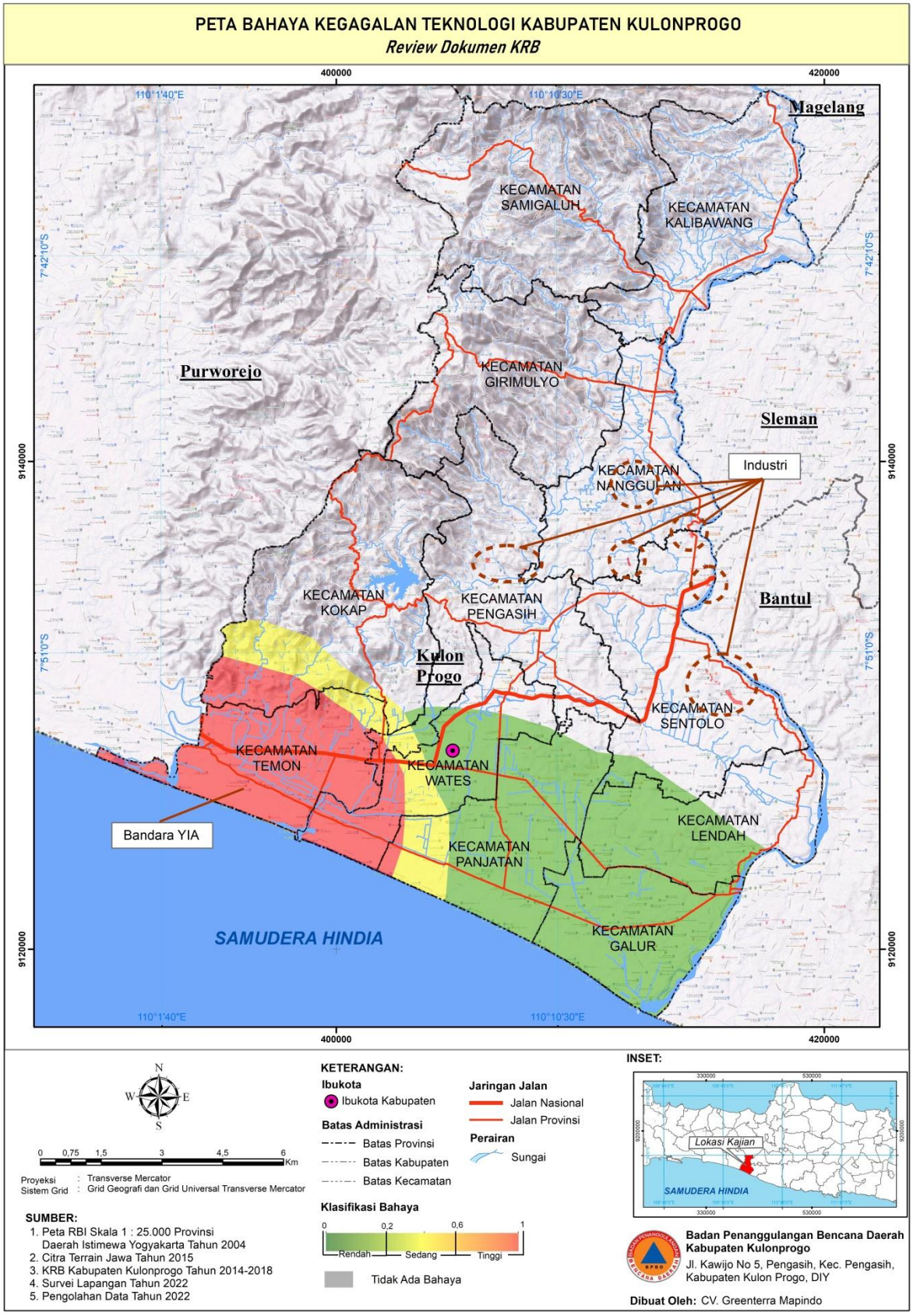
Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.15

Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.16

Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo

Dengan kondisi topografi dan geografi seperti di atas, hampir dipastikan tidak ada daerah yang benar-benar aman dari ancaman bencana, sehingga kejadian bencana di Kulon Progo hampir dipastikan selalu terjadi tiap tahun. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk Kulon Progo yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada kawasan yang memiliki satu ancaman bencana, namun lebih banyak daerah yang memiliki multi ancaman bencana. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2023 (jiwa)

No	Kapanewon	Penduduk Yang Tinggal Di Wilayah Ancaman Bencana										
		Jumlah Penduduk	Longsor	Banjir	Kekeringan	Gempa	Tsunami	Cuaca Ekstrim	Kebakaran	Epidemi Wabah	Gelombang Ekstrim	Letusan Gunung Api
1	Temon	29.125	7714	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	9.414	0
2	Wates	48.948	0	48.948	48.948	48.948	26.630	48.948	48.948	48.948	3.526	0
3	Panjatan	38.784	0	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	13.097	0
4	Galur	32.749	0	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	13.851	12.997
5	Lendah	41.108	0	41.108	41.108	41.108	18152	41.108	41.108	41.108	0	29.885
6	Sentolo	50.042	0	50.042	50.042	50.042	3378	50.042	50.042	50.042	0	26.683
7	Pengasih	52.529	31.567	35.934	52.529	52.529	4929	52.529	52.529	52.529	0	0
8	Kokap	36.115	36.115	0	36.115	36.115	17568	36.115	36.115	36.115	0	0
9	Girimulyo	24.621	24.621	5652	24.621	24.621	0	24.621	24.621	24.621	0	0
10	Nanggulan	30.883	24.345	30.883	30.883	30.883	0	30.883	30.883	30.883	0	15.458
11	Samigaluh	27.093	27.093	0	27.093	27.093	0	27.093	27.093	27.093	0	0
12	Kalibawang	29.877	29.877	29.877	29.877	29.877	0	29.877	29.877	29.877	0	29.877
	Total	**441.874**	**181.332**	**343.102**	**441.874**	**441.874**	**171.315**	**441.874**	**441.874**	**441.874**	**39.888**	**114.900**

Sumber data : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 lebih banyak didominasi oleh bencana hidrometerologi daripada bencana geologi. Bencana hidrometerologi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi terjadi dengan probabilitas yang cukup rendah. Untuk informasi kejadian bencana di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Kapanewon	JENIS BENCANA										KEBAKARAN					Jumlah Kejadian
		Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah longsor	L. Gunung	Gelombang	Cuaca Ekstrim / Angin Kencang	Kekeringan	Wabah Penyakit	Kegagalan	Konflik Sosial	Lahan	Gedung	Hutan	Pemukiman	Lain-lain	
1	Galur	2	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	3	1	0	3	0	19
2	Girimulyo	0	0	0	31	0	0	2	142	0	0	0	4	0	0	1	1	181
3	Kalibawang	8	0	0	12	0	0	16	159	0	0	0	7	0	0	5	0	207
4	Kokap	5	0	0	18	0	0	8	368	0	0	0	2	2	1	3	2	409
5	Lendah	1	0	2	1	0	0	9	0	0	0	0	1	1	0	5	0	20
6	Nanggulan	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	9

No	Kapanewon	JENIS BENCANA										KEBAKARAN					Jumlah Kejadian
		Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah longsor	L. Gunung	Gelombang	Cuaca Ekstrim / Angin Kencang	Kekeringan	Wabah Penyakit	Kegagalan	Konflik Sosial	Lahan	Gedung	Hutan	Pemukiman	Lain-lain	
7	Panjatan	7	0	0	0	0	0	13	21	0	0	0	5	1	0	3	0	50
8	Pengasih	1	0	0	6	0	0	16	16	0	0	0	8	1	0	6	3	57
9	Samigaluh	6	0	0	8	0	0	5	367	0	0	0	1	0	0	2	0	389
10	Sentolo	0	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	9	0	0	3	5	38
11	Temon	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	3	0	0	1	0	20
12	Wates	16	0	0	3	0	0	4	3	0	0	0	10	0	0	4	6	46
	JUMLAH	**48**	**0**	**2**	**81**	**0**	**0**	**110**	**1.086**	**0**	**0**	**0**	**53**	**7**	**1**	**40**	**17**	**1.445**

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu bentuk mitigasi bencana non struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu melalui pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana adalah desa/ kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan. Pengembangan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko – risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Sebaran desa rawan bencana dan progress pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Kulon Progo diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16

Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Desa Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh	Rincian Desa Tangguh		
					Utama	Madya	Pratama
1	Galur	7	7	7	7	-	-
2	Girimulyo	4	4	4	2	2	-
3	Kalibawang	4	4	4	3	1	-
4	Kokap	5	5	5	5	-	-
5	Nanggulan	6	6	2	-	-	2
6	Lendah	6	6	6	-	-	6
7	Panjatan	11	11	11	6	2	3
8	Pengasih	7	7	5	1	1	3
9	Samigaluh	7	7	7	5	2	-
10	Sentolo	8	8	4	-	-	4
11	Temon	15	15	15	4	1	10
12	Wates	8	8	8	5	-	3
Total		**88**	**88**	**78**	**38**	**9**	**31**

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu *stakeholder* yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah institusi pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah sebagai institusi yang setiap harinya didatangi oleh para siswa menjadi potensi dalam menanamkan nilai-nilai kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam skala besar. Banyaknya siswa yang datang ke sekolah menjadi institusi yang dapat menanamkan nilai-nilai siaga dalam menghadapi bencana lewat kurikulum yang ada. Data sebaran Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.17

Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

No	Tahun		
	2021	2022	2023
1	SMA Negeri 1 Lendah - Lendah	SMA Negeri 1 Temon - Temon	SDN Trayu Samigaluh
2	SMK Negeri 2 Pengasih - Pengasih	SMK Negeri 1 Kokap - Kokap	SDN Madigondo Wetan Samigaluh
3	SMK Negeri 1 Nanggulan - Nanggulan	SLB Dekso - Nanggulan	
4	SMA Negeri 1 Wates - Wates	MTsN 4 Girimulyo - Girimulyo	
5	SLB Kulon Progo – Panjatan	SMP N 1 Kokap - Kokap	
6	SMK Bopkri Sentolo - Sentolo	SMP N 2 Kokap - Kokap	
7	SMA Bopkri Sentolo - Sentolo	SMP N 3 Kokap - Kokap	
8	MAN 2 Kulon Progo - Wates		
9	SDN Niten – Girimulyo		
10	SDN 1 Giripurwo – Girimulyo		
11	SDN 2 Giripurwo – Girimulyo		
12	SDN Kepundung – Girimulyo		
13	SDN Ngesong – Girimulyo		
14	SDN Pringtali – Girimulyo		
15	SDN Wadas – Girimulyo		
16	SDN 1 Jonggrangan – Girimulyo		
17	SDN 2 Jonggrangan – Girimulyo		
18	SDN 1 Sokomoyo – Girimulyo		
19	SDN 2 Sokomoyo – Girimulyo		
Jumlah	**19**	**7**	**2**

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pada tahun 2021, kegiatan pembentukan SPAB yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo terpaksa ditunda karena anggaran tersebut menjadi bagian yang di-*refocusing* dan dialihkan untuk fokus penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihannya. Sementara itu, LSM Gerakan Swadaya Masyarakat bekerjasama dengan *Child Fund* memfasilitasi pembentukan SPAB di 11 sekolah sehingga upaya membangun edukasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih tetap bisa dilaksanakan ditengah keterbatasan anggaran selama masa Pandemi Covid-19.

2.1.1.2 Demografi

2.1.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data terbaru diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 adalah 446.192 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 221.249 jiwa dan perempuan sebanyak 224.943 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 156.775. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk paling besar terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -0,95 persen. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk mulai naik sebesar 0,16 persen dan kembali meningkat menjadi 0,58 persen di Tahun 2023. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Pada data jumlah keluarga memiliki tren meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah keluarga adalah 149.976, dan konsisten meningkat hingga mencapai 156.775 keluarga pada tahun 2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat g disebutkan: penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri oleh karena itu masih ditemukan data ganda (data ganda dapat terjadi karena elemen data nama sama atau bisa diartikan punya kependudukan lebih dari satu, data ganda karena perekaman KTP Elektronik di lebih dari satu tempat, juga data kematian umpan balik kerja sama dari lembaga lain misalnya BPS, dan PT. Taspen), selain itu kematian belum terlaporkan dan anomali lain yang kemudian dilakukan pembersihan data di level nasional, hal ini menyebabkan fluktuasi data penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1	2019	221.299	225.947	447.246	-0,19	149.976
2	2020	219.505	223.498	443.003	-0,95	152.251
3	2021	219.347	223.527	442.874	-0,03	153.404
4	2022	219.776	223.815	443.591	0,16	155.219
5	2023	221.249	224.943	446.192	0,58	156.775

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

Berdasarkan data penduduk menurut komposisi umur dapat diketahui pada tahun 2023 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami peningkatan jumlah terbesar dibandingkan kelompok umur lain, yakni 19.970 pada Tahun 2022 menjadi 24.546 jiwa pada Tahun 2023. Sedangkan penurunan jumlah penduduk terbesar terjadi pada kelompok umur >75 tahun dari semula 23.516 jiwa pada tahun 2022 menjadi 21.645 jiwa pada tahun 2023.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2021 ada 300.743 jiwa. Kemudian naik menjadi 303.633 jiwa pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 303.846 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19

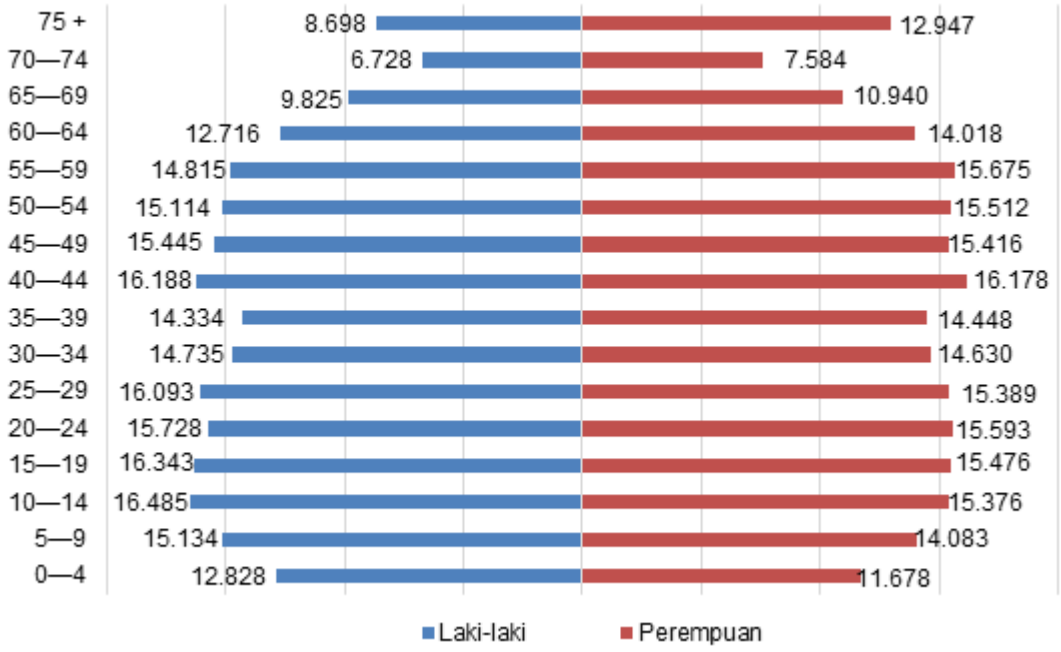
Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa)

Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	0 – 4	26.869	26.372	25.506	19.970	24.546
2.	5 – 9	31.193	30.322	29.933	29.111	29.217
3.	10 – 14	32.301	32.377	32.561	31.616	31.861
4.	15 – 19	32.909	31.299	31.065	31.574	31.819
5.	20 – 24	32.060	32.480	32.196	31.822	31.321
6.	25 – 29	29.631	30.860	31.666	31.574	31.482
7.	30 – 34	28.126	27.403	27.656	29.312	29.365
8.	35 – 39	31.849	31.787	30.829	28.578	28.782
9.	40 – 44	31.057	31.412	31.665	32.065	32.366
10.	45 – 49	30.671	30.280	30.589	30.703	30.861
11.	50 – 54	31.690	31.457	31.153	30.533	30.626
12.	55 – 59	28.530	28.167	28.725	30.553	30.490
13.	60 – 64	23.265	24.949	25.199	26.919	26.734
14	65-69	17.744	18.366	19.049	21.088	20.765
15	70-74	13.434	12.984	13.261	14.780	14.312
16	>75	25.678	22.488	21.821	23.516	21.645
TOTAL		**447.007**	**443.003**	**442.874**	**443.591**	**446.192**

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan kelompok umur serta jenis kelamin ditampilkan dalam piramida penduduk seperti pada gambar berikut ini. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang, jumlah penduduk muda dengan jumlah penduduk tua seimbang.



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2024 diolah

Gambar 2.17

Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,41%, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,59%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022. Sex ratio pada tahun 2023 sebesar 98,4 yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut sex ratio disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2019	221.299	225.947	447.246	97,94
2020	219.505	223.498	443.003	98,21
2021	219.347	223.527	442.874	98,12
2022	219.776	223.815	443.591	98,19
2023	221.249	224.943	446.192	98,4

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.2.2 Distribusi dan kepadatan penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2023 tidak berbeda signifikan dengan tahun 2022. Jumlah penduduk terbesar secara berurutan berada di Kapanewon Pengasih dengan jumlah 53.237 jiwa, Kapanewon Sentolo dengan jumlah 50.346 jiwa, kemudian Kapanewon Wates dengan jumlah 50.041 jiwa. Di tahun 2023, terjadi pertumbuhan penduduk di seluruh Kapanewon di

Kulon Progo pada rentang 0,22-1,9 persen, kecuali Kapanewon Samigaluh dan Kapanewon Kalibawang.

Tabel 2.21

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2019 – 2023

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
1	Temon	29.340	29.116	29.125	29.148	29.442	0,99
2	Wates	49.292	48.949	48.948	49.088	50.041	1,90
3	Panjatan	39.073	38.745	38.784	38.939	39.203	0,67
4	Galur	33.120	32.742	32.749	32.751	32.869	0,35
5	Lendah	41.453	41.083	41.108	41.241	41.385	0,34
6	Sentolo	50.497	49.959	50.042	50.150	50.346	0,38
7	Pengasih	52.174	52.457	52.529	52.784	53.237	0,85
8	Kokap	36.587	36.214	36.115	36.016	36.094	0,22
9	Girimulyo	25.140	24.689	24.621	24.647	24.712	0,26
10	Nanggulan	30.969	30.874	30.883	31.044	31.286	0,78
11	Samigaluh	28.579	28.143	28.093	27.959	27.848	-0,40
12	Kalibawang	30.783	30.032	29.877	29.824	29.729	-0,32
	Jumlah	**448.114**	**447.007**	**443.003**	**442.874**	**443.591**	**0,58**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

Kepadatan penduduk Kulon Progo tertinggi berada di Kapanewon Wates dengan angka 1.563,78 jiwa/km² atau setara dengan 3,89 kali lebih padat dibandingkan dengan Kapanewon Samigaluh yang memiliki kepadatan terendah yaitu 401,91 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kapanewon Wates merupakan pusat perkantoran, pelayanan, perbelanjaan dan hiburan di lingkup Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, kepadatan penduduk tertinggi selalu berada di Kapanewon Wates, kemudian Kapanewon Lendah dan Kapanewon Galur.

Tabel 2.22

Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2019 – 2023 (jiwa/km²)

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (Km²)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Temon	36,30	811,21	802,09	802,34	802,98	811,07
2	Wates	32,00	1539.85	1.529,66	1.529,63	1.534	1.563,78
3	Panjatan	44,59	876.79	868,92	869,79	873,27	879,19
4	Galur	32,91	1.004,88	994,90	995,11	995,17	998,75
5	Lendah	35,59	1.166,89	1.154,34	1.155,04	1.158,78	1.162,83
6	Sentolo	52,65	959,03	948,89	950,47	952,52	956,24
7	Pengasih	61,66	849,81	850,75	851,91	856,05	863,40
8	Kokap	73,80	497,16	490,70	489,36	488,02	489,08
9	Girimulyo	54,90	457,31	449,71	448,47	448,94	450,13
10	Nanggulan	39,61	782,44	779,45	779,68	783,74	789,85
11	Samigaluh	69,29	410,99	406,16	405,44	403,51	401,91
12	Kalibawang	52,96	578,74	567,07	564,14	563,14	561,35
	Jumlah	**586,26**	**762,85**	**755,64**	**755,42**	**756,65**	**761,08**

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi: PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2019-2023 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHB mencapai 11,99 triliun rupiah, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 11,66 triliun rupiah. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai di akhir Triwulan I 2020 turut mempengaruhi pencapaian PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hampir semua sektor mengalami penurunan, diakibatkan Pandemi Covid-19 ini, namun beberapa diantaranya justru naik dan dapat bertahan yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di tahun 2021, PDRB meningkat menjadi 12,64 triliun rupiah dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,3 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB mencapai 15,84 triliun Rupiah. Nilai PDRB berdasar ADHB 2019-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.23

PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.906,26	1.959,54	2.039,61	2.223,48	2.444,81
Pertambangan dan Penggalian	177,13	167,51	167,39	178,30	205,75
Industri Pengolahan	1.321,33	1.304,83	1.367,02	1.464,83	1.577,00
Pengadaan Listrik dan Gas	10,02	9,83	10,08	11,08	12,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,92	14,31	15,46	16,51	17,41
Konstruksi	2.388,77	1.962,14	2.146,80	2.279,42	2.365,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.483,24	1.485,15	1.544,66	1.750,48	1.871,58
Transportasi dan Pergudangan	906,193	902,88	1.151,84	1.760,35	2.374,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	413,19	393,21	453,00	542,97	597,42
informasi dan Komunikasi	514,09	601,32	721,86	781,71	829,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	348,69	329,35	352,14	406,90	455,93
Real Estate	362,48	388,22	395,80	420,56	444,05
Jasa Perusahaan	30,25	31,69	34,71	38,75	43,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	959,94	949,83	963,22	1.030,73	1.071,59
Jasa Pendidikan	612,04	633,96	680,72	716,48	772,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,74	189,18	204,17	222,16	248,28
Jasa Lainnya	393,49	331,35	394,07	470,66	515,70
Produk Domestik Regional Bruto	11.995,77	11.654,32	12.642,56	14.315,38	15.847,21

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022: Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK mencapai 8,77 triliun Rupiah. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 8,41 triliun Rupiah, namun pada tahun 2021 berhasil naik menjadi 8,77 triliun Rupiah. Di tahun 2022, PDRB ADHK kembali naik menjadi 9,41 triliun Rupiah, dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 9,95 triliun Rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.217.361,41	1.224.798,82	1.244.659,68	1.267.434,36	1.283.513,17
Pertambangan dan Penggalian	138.945,76	127.047,16	124.138,35	125.784,25	134.026,88
Industri Pengolahan	1.014.224,15	978.196,42	994.973,76	1.009.184,32	1.051.747,64
Pengadaan Listrik dan Gas	8.303,15	8.197,79	8.349,40	8.954,80	9.597,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.470,54	10.687,13	11.102,52	11.842,84	12.224,86
Konstruksi	1.704.371,62	1.390.052,96	1.433.221,13	1.491.300,10	1.565.354,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.099.456,71	1.081.956,29	1.098.825,80	1.169.494,77	1.215.412,22
Transportasi dan Pergudangan	668.049,09	651.567,49	693.723,00	1.017.891,32	1.207.621,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.822,72	281.608,50	311.059,94	351.872,13	378.148,11
informasi dan Komunikasi	516.723,85	605.440,28	735.781,09	747.103,90	780.944,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	230.093,40	218.869,56	221.835,50	233.938,71	257.892,43
Real Estate	284.164,30	297.389,32	300.477,79	307.735,05	317.209,90
Jasa Perusahaan	25.873,21	26.541,10	28.637,29	30.633,30	33.060,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	616.525,93	596.453,98	584.765,37	601.682,66	613.820,27
Jasa Pendidikan	495.437,51	501.576,54	523.426,68	529.605,49	548.759,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.336,66	144.683,25	150.893,09	157.662,00	165.990,05
Jasa Lainnya	321.590,44	269.249,50	312.929,90	357.235,82	376.630,47
Produk Domestik Regional Bruto	**8.770.750,46**	**8.414.316,11**	**8.778.800,29**	**9.419.355,82**	**9.951.954,64**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS Kulon Progo, pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo masih mengalami peningkatan hingga mencapai angka 13,49%. Angka ini relatif sangat tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten kota, provinsi bahkan angka pertumbuhan nasional. Bila dicermati secara rinci, pertumbuhan terbesar masih berasal dari sektor konstruksi yang masih mengalami peningkatan sebesar 68,64 % naik sekitar 10% bila dibandingkan tahun 2018. Kenaikan sektor konstruksi ini sejalan dengan aktivitas penyelesaian BIY yang ditargetkan beroperasi penuh pada 29 Maret 2020 serta pembangunan *underpass* JJLS yang diselesaikan pada Tahun 2019. Sektor lain yang

mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis dari 26,64% pada tahun 2018 menjadi 3,26% pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, perekonomian hampir di seluruh dunia mengalami perubahan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil analisis sementara, pada Tahun 2020, perekonomian di Kulon Progo mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam menjadi -3,45%. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan bahkan hingga level negatif seperti yang terjadi pada sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Sektor yang tumbuh pesat pada kondisi pandemi ini adalah jasa kesehatan, komunikasi dan informasi serta layanan transportasi dan pergudangan. Hal ini merupakan hasil *refocusing* anggaran pemerintah serta perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap jasa kesehatan serta berkembangnya aktivitas *work from home* yang membutuhkan media komunikasi dan informasi serta belanja online yang mendorong tumbuhnya sektor logistik yang melibatkan transportasi dan pergudangan.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Kulon Progo sudah menunjukkan peningkatan yang berarti terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami *rebound* dari -3,45% di tahun 2020 menjadi 4,37% di tahun 2021 dengan penyumbang terbesar adalah sektor Informasi dan komunikasi. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami peningkatan mencapai 6,57% dengan penyumbang terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan persentase mencapai 31,76%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65% pada kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, Transportasi dan Pergudangan memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 18,64%. Pertumbuhan tertinggi kedua terdapat pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 10,24%, disusul oleh jasa perusahaan sebesar 7,92%. Rincian laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2019-2023 dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.73	0.62	1.61	1.84	1.27
Pertambangan dan Penggalian	3.26	-8.56	-2.29	1.33	6.55
Industri Pengolahan	5.26	-3.49	0.95	2.13	4.22
Pengadaan Listrik dan Gas	8.06	-1.27	2.46	6.61	7.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.88	2.07	6.23	4.32	3.23
Konstruksi	68.64	-18.44	4.03	3.13	4.97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.19	-1.59	1.54	6.45	3.93
Transportasi dan Pergudangan	10.61	5.48	9.65	31.74	18.64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.22	-5.13	10.59	12.99	7.47
Informasi dan Komunikasi	5.56	17.17	17.40	5.11	4.53

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.02	-4.88	1.38	5.43	10.24
Real Estate	6.00	4.65	0.53	2.93	3.08
Jasa Perusahaan	7.75	2.58	7.90	6.97	7.92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	3.42	-3.26	-1.96	2.89	2.02
Jasa Pendidikan	4.56	1.24	4.36	1.18	3.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.61	18.27	4.22	4.56	5.28
Jasa Lainnya	6.56	-16.28	16.45	13.94	5.43
Produk Domestik Regional Bruto	**13.49**	**-3.45**	**4.37**	**6.58**	**5.65**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat sementara

3. Distribusi Persentase PDRB

Pada tahun 2019-2023, secara garis terjadi pergeseran dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Kulon Progo karena memiliki digeluti oleh mayoritas penduduk, kini telah digeser oleh sektor konstruksi yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 19,91%.

Tabel 2.26

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.89	16.69	16.13	15.53	15.43
Pertambangan dan Penggalian	1.48	1.39	1.32	1.25	1.30
Industri Pengolahan	11.01	11.07	10.81	10.23	9.95
Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
Konstruksi	19.91	16.67	16.98	15.92	14.93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.36	12.65	12.22	12.23	11.81
Transportasi dan Pergudangan	7.55	8.56	9.11	12.30	14.98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.44	3.35	3.58	3.79	3.77
informasi dan Komunikasi	4.29	5.11	5.71	5.46	5.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.91	2.81	2.79	2.84	2.88
Real Estate	3.02	3.29	3.13	2.94	2.80
Jasa Perusahaan	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	8.00	8.09	7.62	7.20	6.76
Jasa Pendidikan	5.10	5.39	5.38	5.01	4.87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.29	1.61	1.61	1.55	1.57

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Lainnya	3.28	2.83	3.12	3.29	3.25
Produk Domestik Regional Bruto	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

Tabel 2.27

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,9%	14,0%	14,2%	13,5%	12,9%
Pertambangan dan Penggalian	1,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Industri Pengolahan	11,6%	11,2%	11,3%	10,7%	10,6%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Konstruksi	19,4%	15,8%	16,3%	15,8%	15,7%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,5%	12,3%	12,5%	12,4%	12,2%
Transportasi dan Pergudangan	7,6%	7,4%	7,9%	10,8%	12,1%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,4%	3,2%	3,5%	3,7%	3,8%
informasi dan Komunikasi	5,9%	6,9%	8,4%	7,9%	7,8%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%
Real Estate	3,2%	3,4%	3,4%	3,3%	3,2%
Jasa Perusahaan	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	7,0%	6,8%	6,7%	6,4%	6,2%
Jasa Pendidikan	5,6%	5,7%	6,0%	5,6%	5,5%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,4%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%
Jasa Lainnya	3,7%	3,1%	3,6%	3,8%	3,8%
Produk Domestik Regional Bruto	**100,0%**	**95,9%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo

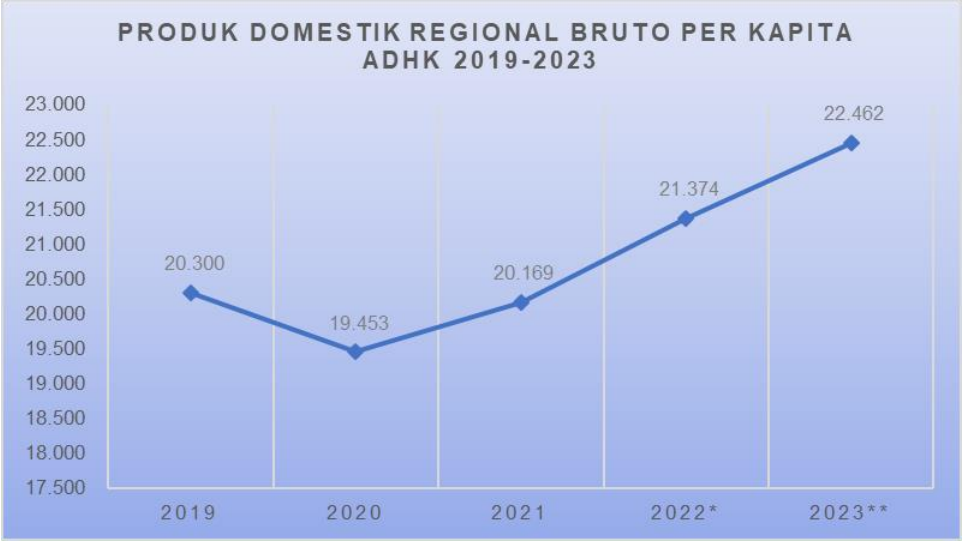
Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah

tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2019-2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB Per kapita mencapai 20.300 ribu rupiah, namun pada tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19 mengalami penurunan menjadi 19.453 ribu rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022 PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan menjadi 20.169 ribu rupiah dan 21.374 ribu Rupiah. Sedangkan di tahun 2023, PDRB per kapita mencapai 22.462 ribu rupiah.

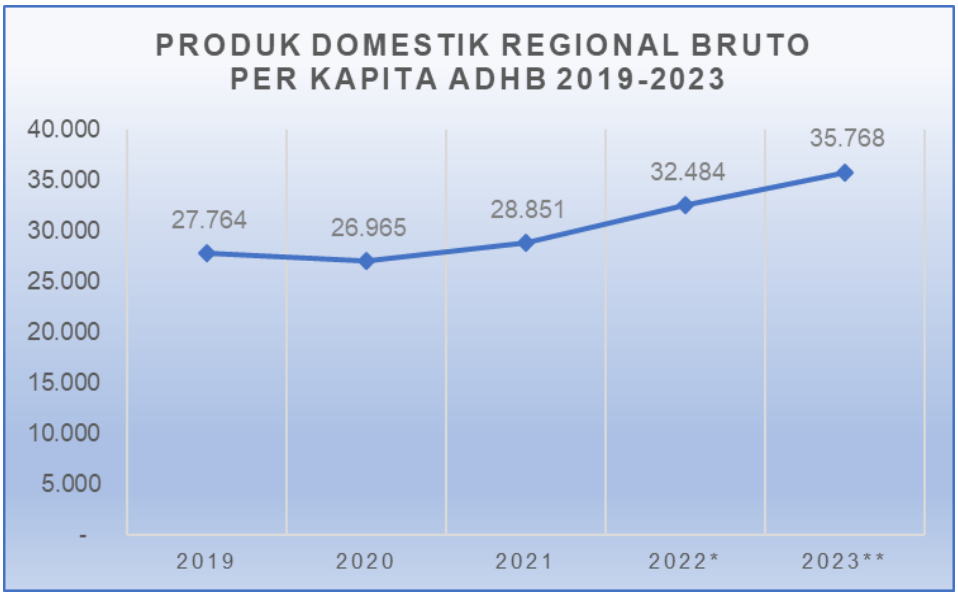


Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024
Keterangan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Gambar 2.18

PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023 (ribu Rupiah)

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Selama kurun waktu 2019-2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB turun menjadi 26 965 ribu rupiah, namun kembali naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 28,851 ribu rupiah. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan menjadi sebesar 32.484 ribu rupiah. Sedangkan di tahun 2023, PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi 35.768 ribu rupiah.



Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023
Keterangan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Gambar 2.19

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023 (ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil hitungan PDRB per kapita ADHB kabupaten/kota di DIY oleh BPS DIY menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah yang cukup besar. Sampai tahun 2023 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 122.951 ribu Rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB relatif besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Sementara Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi untuk tingkat kabupaten di wilayah Provinsi DIY mencatat PDRB per kapita sebesar 51.354 ribu Rupiah jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Kabupaten Sleman cukup besar yaitu 3 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB per kapita berada pada posisi 3 setelah Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Berikut ini nilai PDRB perkapita se-DIY.

Tabel 2.28

PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2019-2023 (ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kulon Progo	27.764	26.965	28.851	32.484	35.768
Bantul	25.725	26.556	28.356	31.158	33.694
Gunung Kidul	25.152	25.398	27.304	30.344	33.257
Sleman	38.553	40.568	43.560	47.739	51.354
Kota Yogyakarta	84.227	95.591	102.702	113.505	122.951

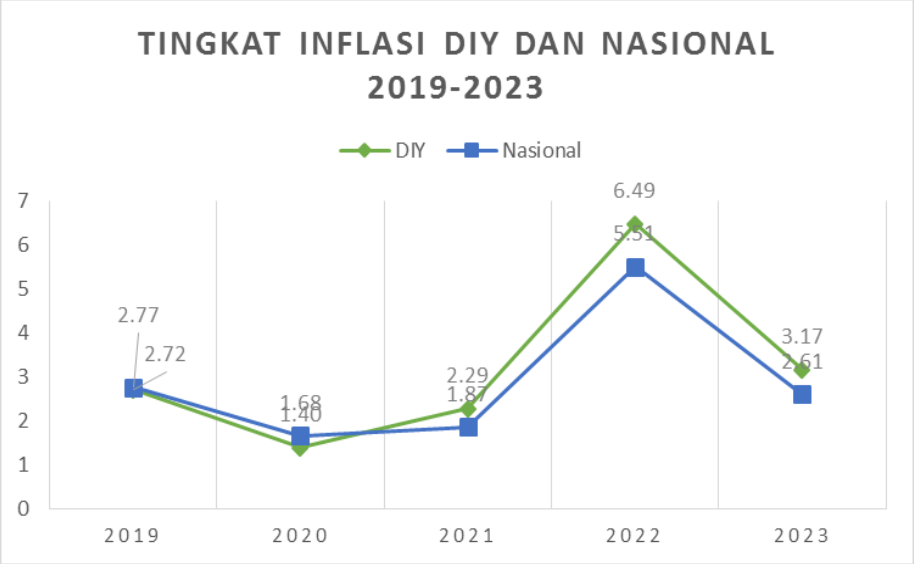
Sumber data : BPS DIY, 2024

Keterangan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

5. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan acuan nilai dari Kota Yogyakarta dikarenakan BPS belum menetapkan Kota Wates sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi. Laju inflasi *year on year* (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 3,17%. Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi paling tinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya mencapai 1,20% dengan andil 0,28%. Kedua kelompok kesehatan dengan inflasi 0,62% berikan andil 0,02%, dan ketiga adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 0,40% dan andil 0,02%. Untuk mengendalikan laju inflasi telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan program antara lain: operasi pasar, monev harga pasar terutama pada momentum menjelang hari raya keagamaan, tahun baru, dan libur panjang. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan sistem informasi terkait harga pangan yaitu SIKEPOKU (sistem informasi kebutuhan pokok Kabupaten Kulon Progo) dimana harga pokok dipantau setiap hari pada 6 pasar (Pasar Wates, Bendungan, Sentolo, Temon, Galur, Nanggulan).



Sumber data: BPS DIY, 2024

Gambar 2.20

Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

6. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 sebesar Rp416.870,00 naik dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp381.666,00. Garis kemiskinan sebesar Rp416.870,00 artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai konsumsi di bawah Rp416.870,00 selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah D.I Yogyakarta dan Nasional.

Garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 sebesar Rp416.870,00 per kapita per bulan. Jika dibandingkan tahun 2022 dengan garis kemiskinan sebesar Rp381.666,00 per kapita per bulan, maka terjadi kenaikan sebesar 9,22%. Pada waktu yang sama, kenaikan ini lebih rendah dibandingkan D.I Yogyakarta yang mencapai 9,84% namun di atas kenaikan nasional yang mengalami kenaikan sebesar 8,9%.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan namun menurun kembali di tahun 2022 dan semakin menurun di tahun 2023. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.29

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)					Penduduk Miskin									
						Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	333.781	353.807	360.202	381.666	416.870	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	381.538	405.613	418.265	445.511	488.340	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
Gunungkidul	301.125	319.851	325.907	350.739	382.249	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24	16,61	17,07	17,69	15,86	15,6
Sleman	382.868	411.610	422.933	450.763	491.652	90,17	99,78	108,93	98,92	97,5	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	495.562	533.423	556.674	601.905	662.267	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49
DIY	432.026	404.861	482.855	521.673	573.022	448,47	475,73	506,45	454,76	448,47	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.30

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	2,72	3,32	3,01	2,32	2,54	0,61	0,86	0,75	0,56	0,61
Bantul	1,87	1,85	2,24	2,11	1,79	0,43	0,43	0,54	0,50	0,44
Gunungkidul	2,58	2,68	2,98	2,63	2,71	0,53	0,63	0,76	0,67	0,60
Sleman	1,13	1,37	1,26	0,80	0,86	0,23	0,33	0,32	0,27	0,32
Kota Yogyakarta	0,85	1,19	1,07	1,18	1,34	0,20	0,20	0,21	0,13	0,18
D.I.Yogyakarta	**1,74**	**1,94**	**2,42**	**2,01**	**1,72**	**0,38**	**0,46**	**0,65**	**0,50**	**0,38**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 secara umum semakin kecil, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 18,01% dan kembali meningkat menjadi 18,38% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 16,39% di tahun 2022. Penuruan di tahun 2022 ini yaitu pada 1,99 persen poin merupakan penurunan terbesar baik di DIY maupun untuk Kulon Progo sendiri sepanjang waktu. Pada tahun 2023 penurunan juga terjadi namun dengan poin persen yang lebih kecil yaitu pada 0,75 persen poin menjadi 15,64%.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja. Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan dari 2,72 di tahun 2019 menjadi 2,54 di tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi namun nilai di 2019 dan 2023 berada pada angka yang sama yaitu 0,61.

7. Rasio Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Gini	Kriteria Oshima
2019	0.360	Ketimpangan Moderat
2020	0,383	Ketimpangan Moderat
2021	0,367	Ketimpangan Moderat
2022	0,380	Ketimpangan Moderat
2023	0,402	Ketimpangan Moderat

Sumber data: BPS DIY dan BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang semakin melebar. Besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang Kabupaten Kulon Progo yang lebih merata dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Gini ratio pada Tahun 2018 sebesar 0,365, turun dari angka 2017, sedangkan angka gini ratio pada Tahun 2019 sebesar 0,360. Pada Tahun 2020, rasio gini masyarakat di Kulon Progo selaras dengan nasional dan DIY sebagai dampak Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan menjadi 0,383. Pada Tahun 2021 rasio gini sempat menurun menjadi 0,367, namun meningkat lagi menjadi 0,380.

Tabel 2.32

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023

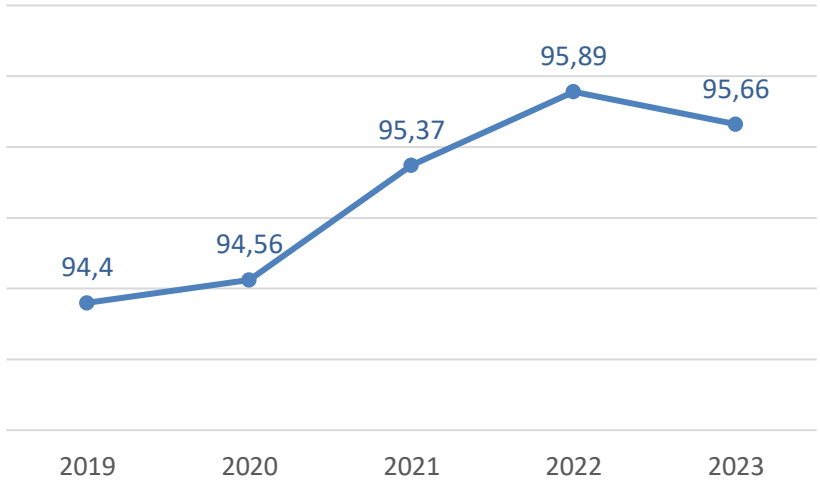
No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	0,360	0,383	0,367	0,380	0,402
2.	DIY	0,428	0,437	0,441	0,439	0,449
3.	Nasional	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388

Sumber data : BPS DIY, 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi dari tahun 2018 sampai dengan 2019 secara mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya anak yang berkebutuhan khusus (ABK) yang hingga usia lebih dari 15 tahun belum dapat membaca, dan/atau belum terbaharuinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca. Selanjutnya untuk Tahun 2020 mulai naik kembali. Mendasar pada data statistik terkait angka melek huruf yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY angka melek huruf pada tahun 2023 sebesar 95,66%, angka melek huruf dari tahun 2019-2023 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Sumber data: BPS DIY, 2024

Gambar 2.21

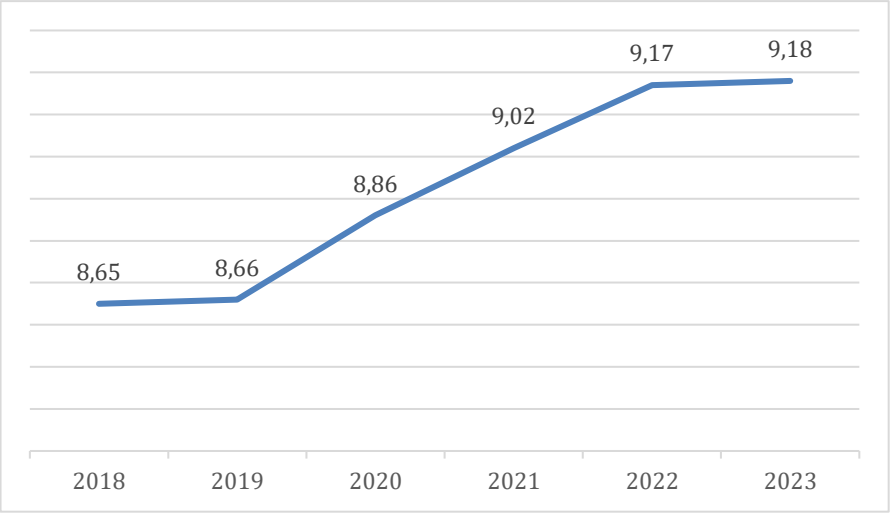
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Angka Melek Huruf yang turun secara umum disebabkan karena adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mana hingga usia lebih dari 15 tahun masih belum dapat membaca, dan/atau belum terbaruinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca. Selain itu di Kulon Progo juga terdapat buta aksara pada masyarakat usia non produktif. Mengingat Angka Harapan Hidup Kulon Progo yang cukup tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa meski tidak dapat membac, tetapi masyarakat usia non produktif yang buta aksara tersebut dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan berusia panjang.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tabel rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2024

Gambar 2.22

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023 (tahun)

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 8,65 tahun hingga pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,18 tahun. Angka 9,18 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 9,18 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

3. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM pada jenjang SD/MI pada tahun 2018 hingga tahun 2020 memiliki tren kenaikan dengan angka berturut turut yakni 92,77 persen, 92,79 persen dan 93,76 persen. Pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 93,73 persen dan kembali turun cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 88,17 persen. Akan tetapi pada tahun 2023 APM SD/MI kembali naik mencapai 89,09 persen.

APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya: (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum pada Tabel berikut. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.33

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Murni (%)							
1.	SD/MI (%)	92,77	92,79	93,76	93,73	88,17	89,09
2.	SMP/MTs(%)	93,46	93,71	95,01	95,22	79,90	92,64
Angka Partisipasi Kasar (%)							
1.	SD/MI(%)	94,09	94,97	95,08	95,11	95,16	93,32
2.	SLTP/MTs(%)	95,92	98,05	98,46	98,53	98,56	109,69
Angka partisipasi sekolah (%)							
1.	SD/MI(%)	90,71	90,71	93,94	93,98	94,00	99,46
2.	SLTP/MTs(%)	99,68	99,68	97,02	97,04	97,06	99,13

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

4. Angka Kelulusan

Capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Pada tahun 2019, Angka Kelulusan SMP masih belum mencapai 100%. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat, dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung. Sehingga pada 4 tahun terakhir, capaian angka kelulusan siswa SD dan SMP dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai 100%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

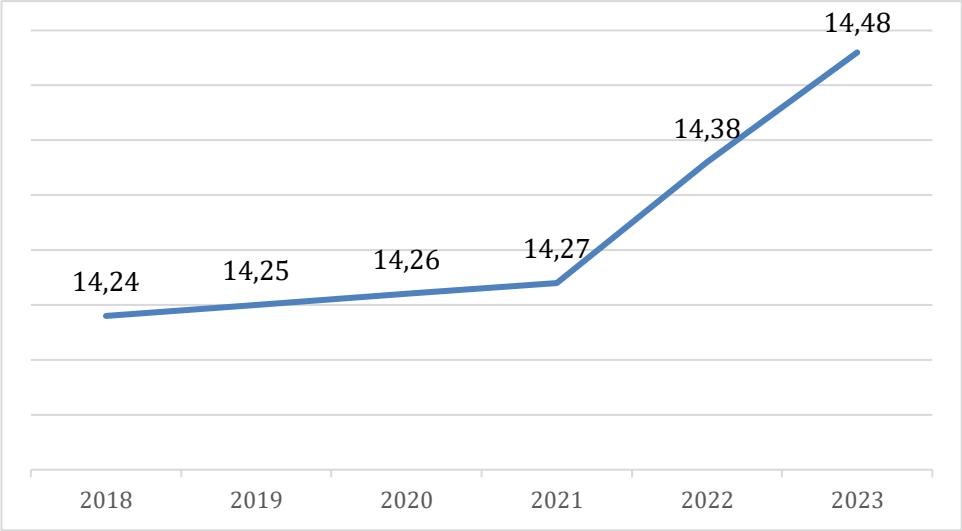
Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kelulusan SD (%)	99,98	100	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP (%)	99,87	99,93	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

5. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

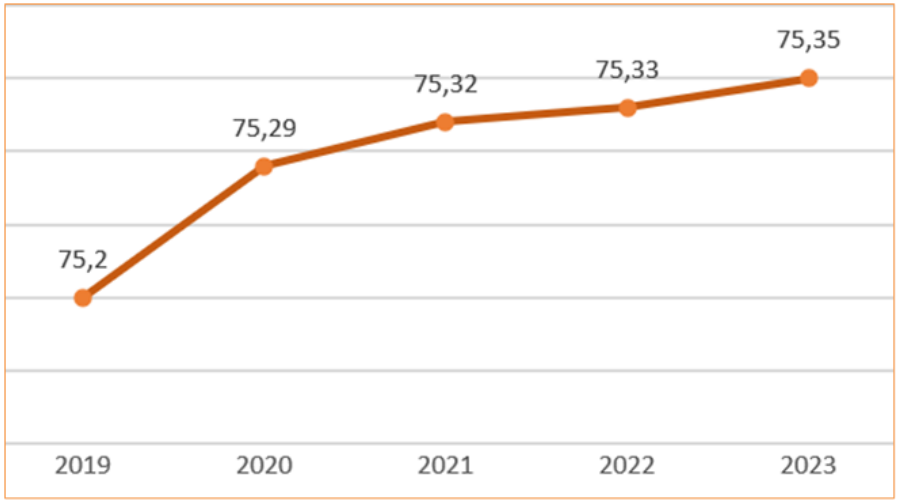
Gambar 2.23

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2018-2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018-2023 terus menunjukkan peningkatan terutama di 2 tahun terakhir.

6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup selalu meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 sebesar 75,35 masih di atas angka DIY sebesar 75,18 tahun.



Sumber data: BPS DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2.24

Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo (tahun)

7. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2019-2023 angka IPM Kabupaten Kulon Progo menunjukan tren meningkat. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2019-2023.

Tabel 2.35

Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,20	75,29	75,32	75,33	75,35
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,25	14,26	14,27	14,38	14,48
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,66	8,86	9,02	9,17	9,18
4.	Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)	10.275	10.041	10.069	10.511	10.723
	IPM	**74,44**	**74,48**	**74,73**	**75,48**	**75,82**

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Apabila dilihat pencapaian nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup stabil. Komponen IPM yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Komponen konsumsi riil per kapita mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 kembali melampaui capaian tahun 2019.

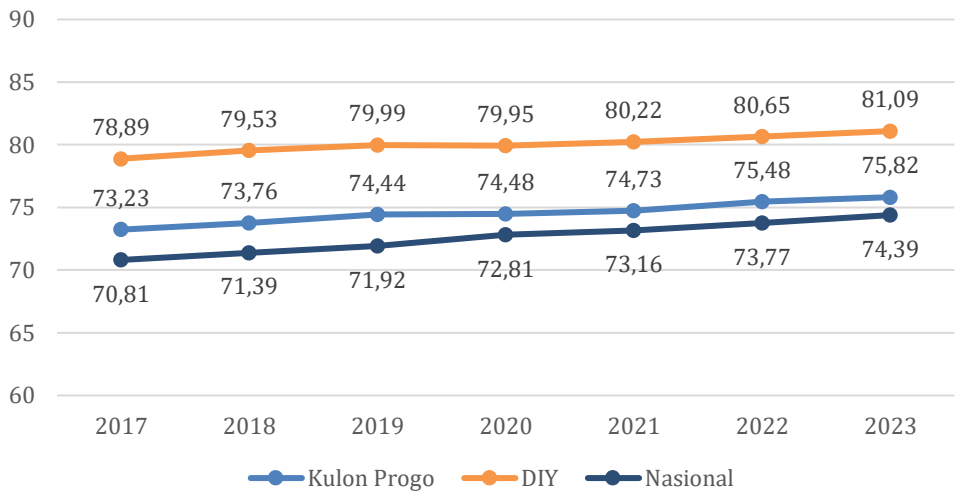
Sampai dengan tahun 2023 status pembangunan manusia kabupaten/ kota di DIY terbagi hanya menjadi 2 kategori, yaitu Sangat Tinggi dan Tinggi. Kategori Sangat Tinggi dicapai: Kota Yogyakarta (88,61), Kabupaten Sleman (84,86), dan Kabupaten Bantul (81,74), sedangkan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo (75,82) dan Kabupaten Gunungkidul (71,46) termasuk wilayah yang pencapaian kinerjanya tinggi. Berikut ini keterbandingan komponen IPM di DIY tahun 2023.

Tabel 2.36

Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2023

Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rp.000)	IPM
Kulon Progo	75,35	14,48	9,18	10.723	75,82
Bantul	74,64	15,61	9,79	16.524	81,74
Gunungkidul	74,76	13,39	7,32	10.065	71,46
Sleman	75,26	16,77	11,01	16.976	84,86
Yogyakarta	75,52	17,62	12,11	19.920	88,61
DIY	**75,18**	**15,66**	**9,83**	**14.924**	**81,09**

Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024



Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024

Gambar 2.25

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2017-2023

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY dan Nasional kurun waktu 2017-2023. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional. Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang kategori tinggi yaitu 75,82 pada tahun 2023 dibandingkan angka IPM pada tahun 2017 yang sebesar 73,23.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2019–2023 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.37

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2019	85,31	68,26	76,54
2020	86,07	70,16	77,88
2021	85,65	68,32	76,72
2022	87,15	70,99	78,83
2023	85,53	66,31	75,75

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Selama periode Agustus 2019-2023 menurut BPS Kulon Progo, TPAK cenderung fluktuatif. Tahun 2020 TPAK mengalami kenaikan sekitar 1 poin. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 TPAK baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Di tahun 2022, TPAK kembali naik dengan nilai total sebesar 78,83%, dan turun kembali di tahun 2023 sebesar 3,08 poin menjadi 75,75%. Nilai TPAK sebesar 75,75% mengandung arti ada sekitar 75 penduduk kategori angkatan kerja diantara 100 penduduk usia kerja. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini bisa dijelaskan karena pada umumnya laki-laki sebagai penanggung nafkah utama yang aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa.

Tabel 2.38

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	Kulon Progo	DIY	Indonesia
2019	76,54	72,72	69,39
2020	77,88	71,12	66,35
2021	76,72	73,52	74,20
2022	78,83	72,60	73,10
2023	75,75	74,08	73,90

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data di atas menurut BPS Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 TPAK Kabupaten Kulon Progo selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK DIY dan nasional. Tingginya TPAK Kabupaten Kulon Progo ini kemungkinan disebabkan karena selain sebagai daerah agraris, Kabupaten Kulon Progo juga sebagai wilayah dengan angka kemiskinan cukup tinggi sehingga penduduknya banyak yang terlibat aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang/ jasa walaupun dengan pendapatan yang relatif lebih rendah.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada periode Tahun 2019 – 2023, TPT Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah rata-rata TPT D.I Yogyakarta dan TPT nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kabupaten Kulon Progo jauh dibawah TPT Nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan cukup signifikan, dari 1,80% menjadi 3,71%. Kenaikan TPT ini juga terjadi baik pada tingkat DIY maupun tingkat Nasional sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Namun demikian pada tahun 2023, TPT Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,4 poin menjadi 2,40%.

Tabel 2.39

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	1,80	3,71	3,69	2,80	2,40

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bantul	3,06	4,06	4,04	3,97	3,78
Gunung Kidul	1,92	2,16	2,20	2,08	2,09
Sleman	3,93	5,07	5,17	4,78	4,47
Yogyakarta	4,80	9,16	9,13	7,18	6,07
DIY	**3,14**	**4,57**	**4,56**	**4,06**	**3,69**
Indonesia	**5,23**	**7,07**	**6,49**	**5,86**	**5,32**

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Capaian indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan upaya dalam pencapaiannya. Penilaian capaian TPB di Kulon Progo dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Penilaian pencapaian TPB didasarkan pada dua aspek yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang bersifat penilaian objektif terhadap suatu indikator TPB melalui persetujuan dalam rapat. Berdasarkan data yang terkumpul, dikelompokkan atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40

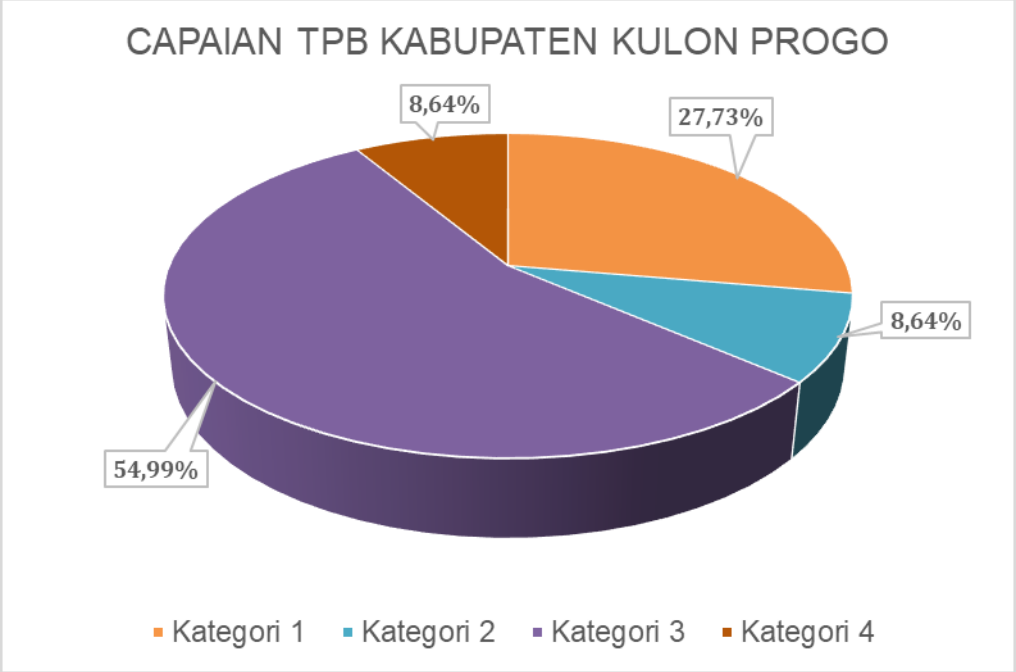
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KODE	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	TPB-1	12	3	7	2	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	TPB-2	5	1	3	2	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	TPB-3	3	1	30	0	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	TPB-4	9	2	0	2	13
TPB 5. Kesetaraan Gender	TPB-5	2	2	9	1	14
TPB. 6 Air Bersih	TPB-6	5	0	12	1	18
TPB 7. Akses Energi	TPB-7	0	0	1	1	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	TPB-8	4	2	10	3	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	TPB-9	2	0	8	3	13
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	TPB-10	3	1	7	0	11
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	TPB-11	6	1	5	1	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	TPB-12	2	0	3	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	TPB-13	2	0	0	0	2
TPB 14. Ekosistem Lautan	TPB-14	0	0	0	0	0
TPB 15. Ekosistem Daratan	TPB-15	1	0	2	1	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	TPB-16	3	5	11	2	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	TPB-17	2	1	13	0	16
Total		61	19	121	19	220

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Keterangan : Kategori 1: Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
Kategori 2: Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
Kategori 3: Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
Kategori 4: Indikator yang belum memiliki data

Ringkasan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan kategori pencapaian terhadap target indikator daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Gambar 2.26
Persentase Capaian Indikator TPB

Secara umum Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pencapaian indikator TPB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian jumlah indikator TPB yang telah mencapai target daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan dan mencapai target daerah baru mencapai 27,73 persen (61 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai ketentuan yang ada. Terdapat capaian TPB yang relatif rendah yaitu kategori 3 dan 4, hal ini dikarenakan tidak semua indikator menjadi kewenangan kabupaten sehingga tidak tersedia datanya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Pembangunan keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional.

a. Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni budaya melingkupi semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam yaitu kelompok seni tari, musik, kriya, rupa, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK), upacara adat, desa budaya, penyelenggaraan lomba budaya dan juga sarana prasarana seni budaya. Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41

Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2019-2023

No.	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Jenis Seni**						
	1. Seni Tari						
	a. Tradisional	357	366	366	366	352	Buah
	b. Kreasi baru	30	31	31	31	30	Buah
	2. Seni Musik						
	a. Diatonis	101	104	104	104	61	Buah
	b. Pentatonis	145	171	171	171	171	Buahi
	3. Seni Rupa						
	a. Lukis	8	9	9	9	6	Buah
	b. Pahat	-	-	-	-	-	Buah
	4. Seni Theater						
	a. Tradisional	153	153	153	153	153	Buah
	b. Modern	7	7	7	7	6	Buah
	Jumlah	**801**	**841**	**841**	**841**	**779**	**Buah**
2.	Jumlah Grup Kesenian	1.305	1.279	1.320	1.365	1.454	Grup
3.	Penyelenggaraan Lomba Unit						
	a. Banyaknya Lomba/Festival	12	19	24	16	13	Kali
	b. Jenis Lomba /Festival	10	13	5	5	5	Jenis
4.	Upacara Adat	85	93	75	80	15	Kel
5.	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	18	18	18	20	20	Kel
6.	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2	Unit
7.	Kesenian khas Kab. Kulon Progo	13	13	13	13	13	Buah
8.	Desa Budaya	15	15	16	16	21	Kalurahan

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kelompok/grup kesenian yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam mewadahi pelaku pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar tetap terpelihara sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung berkembangnya desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki grup kesenian yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019 sebanyak 1.305 grup, pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 jumlah grup kesenian menurun menjadi 1.279 grup, namun pada tahun 2021 jumlah grup kesenian bertambah lagi menjadi 1.320 grup, meningkat lagi menjadi 1.365 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 1.454 di tahun 2023. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah grup yang aktif dengan jumlah grup yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.

Di Kabupaten Kulon Progo, ada 13 ragam seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Seni Angguk Putri yang menjadi salah satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun seni unggulan lainnya meliputi Ketoprak, Jathilan, Incling, Keroncong, Reog, Oglek,

Hadrah/Sholawatan, Lengger Tapen, Wayang Tapeng, Panjidor, Krumpyung, dan Jabur. Selain itu budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga memiliki daya tarik wisata daerah.

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni lainnya seperti sendratari dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. perkembangan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat dengan adanya dukungan Dana Keistimewaan DIY. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan pemerintah maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya.

Tabel 2.42

Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	373	345	364	316	371
	a. Masa Prasejarah	17	11	11	4	3
	b. Masa Hindu-Budha	122	159	166	119	128
	c. Masa Islam	85	81	83	51	82
	d. Masa Kolonial/Perjuangan	123	77	86	127	139
	e. Tradisional	26	16	18	15	19
2.	Museum	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024

b. Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat lima tahun terakhir dan jumlah klub olahraga cenderung fluktuatif lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah organisasi olahraga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 46 organisasi, sedangkan jumlah klub olahraga menurun menjadi 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43

Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	42	42	45	45	46
2.	Jumlah Klub Olahraga	280	280	280	148	173

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga selain melalui pembinaan klub dan atlet olahraga juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat namun perlu peningkatan dari segi kualitasnya. Sampai dengan tahun 2023 telah tersedia gedung olahraga

sebanyak 92 unit meningkat satu gedung olahraga dibandingkan tahun 2019, dan lapangan olahraga sebanyak 1.185 unit dari 13 cabang olahraga berprestasi yang diminati masyarakat dan tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Data selengkapnya dapat dilihat sesuai pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon	Cabang Olah Raga													
		Sepak Bola	Bulu Tangkis	Voli	Tenis meja	Tenis Lapangan	Renang	Tinju	Panjat Tebing	Sepak Takraw	Voli Pantai	Dayung	Basket	Futsal	Jumlah
1	Temon	8	33	28	34	0	2	0	0	0	2	1	2	1	111
2	Wates	10	54	32	47	5	1	0	1	15	0	1	4	3	173
3	Panjatan	10	34	24	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102
4	Galur	6	16	10	10	2	0	0	0	2	0	0	0	0	46
5	Lendah	7	20	12	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
6	Sentolo	12	44	48	41	1	2	0	0	0	0	0	2	1	151
7	Pengasih	15	32	28	17	2	0	1	0	2	0	0	4	1	102
8	Kokap	3	17	23	43	0	0	0	0	0	0	1	2	0	89
9	Girimulyo	2	34	14	36	0	0	0	0	0	0	0	4	0	90
10	Nanggulan	4	10	22	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	50
11	Samigaluh	6	21	45	38	0	3	0	1	0	0	0	6	0	120
12	Kalibawang	4	20	26	27	1	0	1	0	1	0	0	0	0	80
	JUMLAH	95	335	312	369	11	8	2	2	20	2	3	28	6	1.193

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.45

Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gedung Olahraga	91	92	92	92	92

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan, telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit pelayanan publik yaitu

sejumlah 43 unit pelayanan yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 21 UPTD Puskesmas, 12 Kapanewon, Kelurahan Wates, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 bahwa nilai interval konversi hasil survei pada 25,00-64,99 kinerja unit pelayanan "Tidak Baik", nilai interval konversi hasil survei pada 65,00-76,60 kinerja unit pelayanan "Kurang Baik", nilai interval konversi hasil survei pada 76,61-88,30 kinerja unit pelayanan "Baik", dan nilai interval konversi hasil survei pada 88,31-100 kinerja unit pelayanan "Sangat Baik". Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei dimana nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 85,63, naik dari pencapaian Tahun 2022 dengan predikat "Baik".

Secara umum hasil survei kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.46

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun

No.	Perangkat Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1	BKAD	84,556	83,664	80,135	83,604	82,196
2	Dinas DUKCAPIL	82,959	83,111	86,452	88,392	89,254
3	UPT Pengujian Kend. Bermotor	85,200	79,058	78,856	78,924	82,745
4	Dinas NAKERTRANS	82,938	87,352	89,633	88,578	87,662
5	DPMPT	81,451	86,320	85,331	87,921	89,455
6	Dinas PERPUSSIP	86,209	87,482	84,2	86,959	87,654
7	Dinas Sosial PPPA	81,047	78,484	-	80,286	80,634
8	Bag. Adm Kesra SETDA	79,416	80,303	-	85,066	85,342
9	RSUD NAS	77,233	80,897	80,247	84,181	84,527
10	Kelurahan Wates	83,706	87,277	85,416	85,723	85,544
11	Kapanewon Kalibawang	80,233	81,730	81,199	87,274	90,952
12	Kapanewon Samigaluh	78,954	80,137	83,19	80,906	84,714
13	Kapanewon Girimulyo	86,984	93,832	89,466	83,576	90,632
14	Kapanewon Nanggulan	83,768	94,828	95,46	87,912	86,358
15	Kapanewon Sentolo	78,435	84,868	83,828	78,167	81,85
16	Kapanewon Pengasih	85,643	86,694	88,023	87,44	92,186
17	Kapanewon Wates	85,428	88,312	83,916	83,992	87,246
18	Kapanewon Kokap	85,576	85,034	81,689	81,113	83,964
19	Kapanewon Temon	84,038	82,170	81,974	82,536	90,861
20	Kapanewon Panjatan	85,303	82,499	91,575	87,811	85,137
21	Kapanewon Lendah	84,925	87,067	86,414	88,023	90,943

No.	Perangkat Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
22	Kapanewon Galur	80,728	86,611	83,084	82,679	86,108
23	Puskesmas Kalibawang	80,034	83,885	78,563	79,477	84,274
24	Puskesmas Samigaluh I	78,892	84,660	82,14	81,596	85,259
25	Puskesmas Samigaluh II	81,963	84,542	81,038	80,236	83,842
26	Puskesmas Girimulyo I	81,92	82,834	81,437	83,031	85,933
27	Puskesmas Girimulyo II	83,251	81,238	75,4	81,907	85,211
28	Puskesmas Nanggulan	81,188	81,506	82,452	81,699	84,934
29	Puskesmas Sentolo I	82,212	81,906	79,518	79,994	84,638
30	Puskesmas Sentolo II	85,283	79,569	76,812	80,148	83,618
31	Puskesmas Pengasih I	87,04	84,992	84,138	82,234	85,97
32	Puskesmas Pengasih II	83,457	85,306	83,694	81,541	85,382
33	Puskesmas Wates	87,219	82,281	79,032	81,382	82,954
34	Puskesmas Kokap I	88,229	83,916	74,774	81,696	84,804
35	Puskesmas Kokap II	86,943	80,123	78,493	81,641	83,783
36	Puskesmas Temon I	80,773	83,885	85,877	83,725	85,581
37	Puskesmas Temon II	79,998	88,788	82,664	83,417	84,934
38	Puskesmas Panjatan I	83,71	85,850	76,849	82,825	83,25
39	Puskesmas Panjatan II	84,273	83,360	81,881	84,656	83,287
40	Puskesmas Lendah I	80,067	79,765	81.169	82,843	84,49
41	Puskesmas Lendah II	83,028	82,876	80,279	83,38	85,504
42	Puskesmas Galur I	81,259	85,257	75,436	81,936	84,12
43	Puskesmas Galur II	81,65	82,668	80,253	80,11	84,527
	Kulon Progo	**83,00**	**84,115**	**82,487**	**83,268**	**85,63**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dilakukan oleh surveyor non ASN pada Unit Pelayanan Publik tersasar. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268 dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,63. Faktor pengungkit nilai IKM diantaranya adalah keberadaan Mall Pelayanan Publik dan digitalisasi layanan dengan penerapan SPBE sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, aman dan nyaman.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.47

Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Melek Huruf	%	94,4	94,56	95,37	95,89	95,66
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,66	8,86	9,02	9,17	9,18
3.	Angka Partisipasi Murni						
	- APM SD	%	92,79	93,76	93,73	88,17	89,09
	- APM SMP	%	93,71	95,01	95,22	79,90	92,64
4	Angka Partisipasi Kasar						
	- APK SD	%	94,97	95,08	95,11	93,45	93,32
	- APK SMP	%	98,05	98,46	98,53	100,04	109,69
5.	Angka Partisipasi Sekolah						
	- APS SD	%	90,71	93,94	93,98	99,72	99,46
	- APS SMP	%	99,68	97,02	97,04	99,59	99,13
6.	Angka Kelulusan						
	- Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100
	- Angka kelulusan SMP	%	99,93	100	100	100	100
7.	Angka melanjutkan						
	- Angka melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100	100	100
	- Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	100	100	100	100	100
8.	Angka Putus Sekolah						
	- SD	Orang	15	10	1	6	6
	- SMP	Orang	16	17	6	34	11
9.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,38	14,48
10.	Standar Kompetensi Pendidik						
	- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	86,98	89,40	89,45	89,61	89,8
	- Guru yang telah bersertifikat pendidik	%	75,85	76,71	76,73	76,81	60,79

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kemampuan membaca menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis ini tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf secara umum menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 94,4% menjadi sebesar 95,66% pada tahun 2023.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari 8,66 di tahun 2019, kemudian 8,86 di tahun 2020, 9,02 di Tahun 2021, menjadi 9,17 pada Tahun 2022 dan menjadi 9,18 di tahun 2023. Adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun disebabkan (1) adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan anak-anaknya melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, (2) adanya dukungan tertib administrasi oleh seluruh masyarakat, khususnya pada pembaharuan data pendidikan di dinas terkait, dan (3) adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat, baik pada pendidikan formal, maupun pada pendidikan non formal (Paket A, B atau C), serta adanya mutasi penduduk dari luar kabupaten ke dalam kabupaten.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM jenjang SD/MI pada Tahun 2019 sebesar 92,79 % dan pada tahun 2020 naik sedikit sebesar 93,76 %, pada Tahun 2021 menurun menjadi 93,73 %, pada tahun 2022 turun menjadi 88,17% dan naik lagi menjadi 89,09 di tahun 2023 . APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 93,71% dan tahun 2020 naik menjadi sebesar 95,01% dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 95,22, tahun 2022 turun menjadi 79,9% dan tahun 2023 naik lagi menjadi 92,64%. Kenaikan dan penurunan APM SMP/MTs disebabkan oleh (1) sebagian warga masyarakat telah menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, namun masih terdapat sebagian yang belum sesuai harapan (misalnya: siswa usia lebih dari 13 Tahun masih ada di SD/MI dan sederajatnya dan/atau siswa usia lebih dari 15 Tahun masih di SMP/MTs dan sederajatnya), hal ini dapat pula karena alasan tertentu, yakni kondisi/kebutuhan/ karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka kelulusan cenderung stabil dimana naik turunnya tidak lebih dari 1% atau berkisar di angka 99-100%. Pada Tahun 2020 hingga 2023, angka kelulusan SD maupun SMP mencapai 100%. Angka kelulusan umumnya dipengaruhi adanya perubahan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan cara pandang yang berbeda. Setingkat SD/MI saat ini menggunakan sistem tema (Tematik) dan pada Jenjang SMP/MTs menggunakan sistem mata pelajaran. Bobot soal tingkat daerah dan nasional pun berubah-ubah sesuai kebijakan yang ditetapkan, tentu dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman, serta karakteristik peserta didik di setiap daerah.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan yang lebih baik, dengan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 sebesar 14,25, tahun 2020 sebesar 14,26, tahun 2021 sebesar 14,17, tahun 2022 sebesar 14,38 dan tahun 2023 naik menjadi 14,48 berdasarkan data BPS. Peningkatan tersebut atas dukungan semua pihak, baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal, maupun non formal.

Pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019–2023 dilihat dari kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dengan capaian yang bervariasi yaitu tahun 2019 sebesar 86,98%, tahun 2020 naik sebesar 89,4%, tahun 2021 meningkat menjadi 89,45%, tahun 2022 meningkat menjadi 89,61% dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 89,8%.

Sedangkan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2018 sebesar 61,4%, tahun 2019 naik menjadi sebesar 75,85%, tahun 2020 sebesar 76,71%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 76,73%, dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi 76,81%.

Kedua hal di atas disebabkan belum terpenuhi guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan, dimana hampir setiap tahun terdapat guru pensiun berkisar 200-300 orang, namun belum diimbangi dengan adanya penambahan guru PNS sehingga upaya pemenuhan dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun sebagian GTT masih belum memenuhi kualifikasi S1/DIV sebagaimana yang dipersyaratkan, termasuk persyaratan dalam hal mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam hal penetapan Guru Profesional (telah mendapatkan sertifikat pendidik). Selain itu, terdapat sebagian Guru PNS (yang usianya melebihi 50 tahun) belum dapat mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah terakhirnya (misalnya DII-PGSD), hal ini disebabkan karena faktor usia, dan/atau semangat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.48

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	16.056	16.056	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	35.250	35.250	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	230	230	100	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Memperhatikan capaian SPM bidang Pendidikan tersebut maka semua jenis pelayanan mencapai target. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo sudah maksimal karena peran aktif dari semua entitas pendidikan yang ada di Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya penerapan SPM Pendidikan baik pada tingkat Kabupaten maupun satuan pendidikan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.49

Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2019–2023

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Jumlah pendidik SD/MI/ sederajat	3.482	3.365	3.740	3.384	3.618
1.2	Jumlah murid SD/MI/sederajat	36.585	36.563	32.687	35.069	35.069
1	**Rasio guru terhadap murid SD/MI**	**9,52**	**9,2**	**11,44**	**9,65**	**10,32**
2.1.	Jumlah pendidik SMP/MTs	1.553	1.531	1.474	1.429	1.659
2.2.	Jumlah murid SMP/MTs	17.572	18.264	15.414	18.640	16.929
2	**Rasio guru terhadap murid SMP/MTs**	**8,84**	**8,38**	**9,56**	**7,67**	**9,79**

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rasio guru terhadap murid, baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs sangat dipengaruhi pemenuhan guru pada satuan pendidikan serta pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Di Kulon Progo, melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, kenaikan/penurunan rasio lebih disebabkan pada faktor minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Kulon Progo. Pada tahun 2023 capaian rasio guru terhadap murid sebesar 10,32 pada SD/MI dan 9,79 pada SMP/MTs, angka menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yaitu pada setiap rombongan belajar/kelas terdapat 10 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SD/MI dan 10 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SMP/MTs. Hal ini berbeda dengan kondisi di daerah perkotaan, dimana setiap kelas memiliki peserta didik yang optimal. Namun kondisi Kabupaten Kulon Progo memiliki daerah pegunungan/perbukitan yang sulit dijangkau. Disana masih terdapat sedikit siswa, karena pertumbuhan penduduk yang kecil dan di sisi lain minat masyarakat untuk bersekolah cenderung ke daerah perkotaan, sehingga rasionya relatif kecil.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 30/A/2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.50

Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2022			2023		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.488	3.707	82,60	3.952	3.881	98,20
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.488	3.802	84,71	3.952	3.937	99,62
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	4.488	3.819	85,09	4.085	3.891	95,25
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.550	15.240	77,95	19.904	19.194	96,43
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	32.438	30.630	94,43	52.918	47.643	90,03
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	51.650	49.407	95,66	69.531	66.964	96,31
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	41.000	38.070	92,85	53.429	50.049	93,67
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.803	4.469	93,05	10.491	10.447	99,58
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2.520	2.415	95,83	3.954	3.934	99,49
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.424	1.272	89,33	1.562	1.410	90,27
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.300	3.177	96,27	4.779	4.078	85,33

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2022			2023		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.046	4.010	99,11	5.202	4.877	93,75

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2023 yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil tercapai 98,20 persen, pelayanan kesehatan ibu bersalin 99,62 persen, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercapai 95,25 persen, pelayanan kesehatan balita 96,43 persen, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 90,03 persen, pelayanan kesehatan pada usia produktif 96,31 persen, pelayanan kesehatan pada usia lanjut 93,67 persen, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 99,58 persen, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 99,49 persen, pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 90,27 persen, pelayanan kesehatan TB 85,33 persen dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tercapai 93,75 persen.

Beberapa kendala dalam pencapaian SPM antara lain:

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil baru mencapai 98,2 persen dari target 100 persen. Ketidak tercapaian target disebabkan karena migrasi masuk dan keluar, kunjungan pada triwulan III, adanya kehamilan tidak diinginkan.
2. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 99,62 persen masih belum mampu mencapai target SPM 100 persen. Target tidak tercapai akibat kelahiran terjadi saat ibu hamil masih di rumah atau pada saat menuju fasilitas pelayanan kesehatan (*brojol*).
3. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih belum mampu mencapai target SPM 100 persen. Pelayanan bayi baru lahir mengalami kendala terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah yang dilakukan penundaan pemberian imunisasi dan inisiasi menyusui dini. Kendala utama pada pelayanan kesehatan balita adalah balita yang tidak datang pada posyandu karena tidak ada yang mengantar. Kendala pada pelayanan kesehatan usia dasar adalah banyaknya jumlah anak sekolah dan tersebarnya lokasi sekolah, sedangkan pelayanan hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan tidak dapat didelegasikan kepada kader.
4. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100 persen. Hal ini disebabkan jadwal skrining kesehatan dilakukan pada jam aktif puskesmas di mana pada usia produktif, pada jam tersebut masyarakat sedang beraktivitas.
5. Pelayanan Kesehatan pada kelompok usia lanjut baru mencapai 93,67 persen akibat sebagian lansia sudah mengalami kesulitan mobilitas.
6. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar belum mencapai target 100 persen. Hal ini disebabkan warga yang memiliki tekanan darah tinggi dan tidak mengalami keluhan kesehatan tidak merasa “sakit” dan memerlukan pemeriksaan rutin.

7. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar baru mencapai 99,49 persen dari target 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas.
8. Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standar baru mencapai 70,5 persen dari target 100 persen. Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.
9. Pelayanan kesehatan TB baru mencapai 85,33 persen dari target 100 persen. Hal ini disebabkan masih banyak terduga TB yang tidak terjaring sebagai suspek sehingga tidak dapat didiagnosa sebagai pasien atau bukan.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai 93,75 persen. Hal ini akibat belum optimalnya pencatatan dan pelaporan SIHA di Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan ibu hamil dan populasi kunci terlaporkan ke Puskesmas setempat.
11. Secara umum pencapaian SPM di tahun 2023 belum tercapai namun 10 dari 12 SPM sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Solusi dan tindak lanjut:

1. Pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WA grup Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD.
2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.
3. Memperkuat pelayanan *ante natal care* (ANC) yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.
4. Pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang (SDIDTK) sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.
5. Menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan.
6. Mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan lansia.
7. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi dan DM ke fasyankes swasta dapat terlaporkan ke Puskesmas.
8. Membuat kartu pemantauan minum obat bagi ODGJ, melakukan Perawatan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Nursing (PHN), melakukan pendampingan pada ODGJ dan keluarganya serta melatih kader kesehatan jiwa.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,20	75,24	75,17	75,28	75,29
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	102,99	63,61	222,17	194,69	25,30
	Kematian Ibu	*Kasus*	*5*	*3*	*10*	*8*	*1*
	Kelahiran hidup	*Kali*	*4.855*	*4.716*	*4.501*	*4.901*	*3.728*
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	9,68	8,06	10,00	10,71	9,61
	Kematian Bayi	*Kasus*	*47*	*38*	*45*	*44*	*38*
	Kelahiran hidup	*Kali*	*4.855*	*4.716*	*4.501*	*4.901*	*3.728*

Sumber data : BPS DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat. BPS DIY menyatakan bahwa pada tahun 2019 usia harapan hidup Kulon Progo sebesar 75,20, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 75,24, di tahun 2021 menurun menjadi 75,17 lalu meningkat menjadi 75,28 tahun di 2022 dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 75,29. Tingginya usia harapan hidup tersebut di atas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain hal tersebut di atas juga didukung oleh stabilitas sosial politik dan keamanan.

Kematian ibu melahirkan pada tahun 2023 turun signifikan menjadi 1 orang, dengan seluruh kasus kematian ibu terjadi di fasilitas kesehatan lanjutan dan tidak terjadi di fasilitas kesehatan dasar. Jika dihitung dengan prevalensi maka angka kematian ibu adalah 25,30 per 100.000 kelahiran hidup (1 kematian dari 3.728 kelahiran hidup).

Kematian bayi pada tahun 2023 sebanyak 38 kasus. Jumlah kasus kematian bayi dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 47 kasus, tahun 2020 sebanyak 38 kasus, tahun 2021 naik menjadi 45 kasus, kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 44 kasus dan tahun 2023 turun kembali menjadi 38 kasus. Jika dihitung dengan prevalensi maka kasus kematian ibu mencapai 9,61 per 1.000 kelahiran hidup (38 kematian dari 3.728 kelahiran hidup).

Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi Bumilku yaitu aplikasi yang dapat menyediakan informasi keadaan ibu hamil mulai dari tingkat kesehatan sampai lokasi tempat tinggal ibu hamil dapat diakses oleh tenaga kesehatan dan pejabat yang berwenang. Aplikasi ini mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial atas pemanfaatan aplikasi berbasis GPS untuk membantu meningkatkan pelayanan pada ibu hamil. Untuk menekan angka kematian ibu, selain dengan meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ibu hamil harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan, dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan dirinya maupun kandungan.

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan aplikasi Bumilku menjadi Matahatiku yang mengembangkan penyediaan informasi keadaan ibu hamil hingga ke kondisi anak balita pasca

kelahiran. Aplikasi Matahatiku digunakan untuk memantau kondisi kesehatan dan gizi anak balita yang dilahirkan oleh ibu hamil yang sebelumnya terpantau dari aplikasi Bumilku.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan fluktuasi prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia bila dibandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 dan 2013. Prevalensi kanker mengalami penurunan berturut turut dari 2013 4,9 per mil ke 7,21 per mil di tahun 2018 dan menurun menjadi 1,2 per mil di tahun 2023. Diabetes melitus dari 2,3 persen menjadi 2,5 persen dan menurun menjadi 1,7 persen di tahun 2023. Hipertensi berdasarkan hasil pengukuran dari 27,3 per mil menjadi 34,7 per mil dan menurun menjadi 29,2 per mil. Stroke dari 15,43 per mil ke 33,7 per mil dan menurun menjadi 8,3 per mil (Kemenkes RI, 2014; Kemenkes RI, 2019; dan Kemenkes RI, 2024). Menurut data tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan prevalensi diabetes mellitus dan kanker yang melebihi prevalensi nasional. Demikian juga dengan di Kabupaten Kulon Progo.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi dengan status derajat kesehatan dengan ranking yang tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang rendah serta usia harapan hidup yang tinggi. Dengan tingginya jumlah lanjut usia, bisa menjadi masalah kesehatan lain apabila para lanjut usia (lansia) tidak dalam kondisi sehat pada masa tuanya. Dengan adanya perbedaan pengertian sakit antara stakeholder kesehatan dan masyarakat, dimana masyarakat baru menganggap “sakit” apabila sudah terganggu aktivitas fisiknya dan baru merasa perlu untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan. Hal ini akan menyebabkan upaya penanganan penyakit tidak menular terlambat. Penyakit tidak menular yang merupakan penyakit kronis dan membutuhkan masa waktu yang panjang sampai dengan munculnya gejala. Penyakit ini juga identik dengan “mahal”, karena untuk penentuan diagnosis memerlukan peralatan medis yang lebih canggih dan pengobatannya memerlukan waktu yang lama. Meskipun penyakit tidak menular merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan gaya hidup, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh masyarakat modern sekarang ini. Karenanya diperlukan upaya keras stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mereka mau melakukan deteksi dini. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan inovasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun strategi yang efektif dengan penyusunan kebijakan yang tepat untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak terdapat desa indigenous malaria. Indikator daerah tereliminasi yaitu daerah yang tidak ditemukan lagi desa dengan kasus malaria yang lebih dari 1‰ penduduk dan tidak ditemukan kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan surveilans yang baik.

Angka kematian ibu dan bayi masih cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 kasus kematian ibu dapat ditekan menjadi hanya 3 kasus, tahun 2021 kasus kematian meningkat menjadi 10 kasus lalu pada tahun 2022 menurun menjadi 8 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 1 kasus. Kematian bayi dari 47 kasus di tahun 2019 turun ke 38 kasus pada tahun 2020, naik menjadi 45 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi menurun menjadi 44 kasus dan kembali menurun menjadi 36 kasus di tahun 2023. Berdasar kasus AKI dan AKB yang fluktuatif, maka kematian ibu dan bayi harus terus diupayakan untuk penurunannya.

Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023, dari 21 Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi, seluruh puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna. Namun secara umum masih diperlukan perbaikan baik dari sisi fisik maupun dari kualitas pelayanan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah pada masyarakat. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah,, terdapat 10 klinik swasta sudah terakreditasi paripurna dan 6 klinik yang sedang dalam tahap persiapan survei akreditasi. Terdapat juga 39 tempat praktik mandiri dokter/ dokter gigi (TPMDG) dengan status 26 sudah pada tahap persiapan survei dan sisanya ditargetkan pada bulan Desember 2024 sudah terakreditasi secara keseluruhan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, kapasitas rawat inap untuk Kelas utama (VIP) sebanyak 13 tempat tidur, Kelas 1 sebanyak 29 tempat tidur, Kelas 2 sebanyak 28 tempat tidur, dan Kelas 3 sebanyak 83 tempat tidur. Untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit dengan standar Internasional RSUD Wates sudah selesai membangun gedung Medik Terpadu 4 lantai, Gedung Rawat Inap 4 lantai baru beserta fasilitasnya.

Selain RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki RSUD Nyi Ageng Serang. Sesuai konsep awal pendirian RSUD Nyi Ageng Serang, RSUD Nyi Ageng Serang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan kualitas pelayanan, sehingga didesain menjadi Rumah Sakit tanpa kelas. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang lebih mengutamakan privacy dalam pelayanan, maka dibangunlah ruang perawatan (bangsal) dewasa dengan beberapa tingkatan kelas perawatan.

Tabel 2.52

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2023

No.	Uraian Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah balita Bawah Garis Merah*	Balita	180	173	170	222	3.256	2.238
2	Jumlah balita Bawah Garis Merah yang ditangani*	Balita	180	173	170	222	2.238	2.238
3	Persentase balita bawah garis merah yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
4	jumlah balita yang ditimbang	Balita	21.868	19.366	21.868	20.242	21.868	19.178
5	Jumlah balita stunting	Balita	3.000	2.119	2.842	2.057	2.759	1.828
6	Jumlah ibu hamil dengan anemia	Orang	580	846	550	635	799	535
7	Jumlah ibu hamil	Orang	5.592	4.400	5.592	3.707	5.333	3.984
8	Jumlah bayi dengan BBLR	Bayi	340	327	330	270	397	308
9	Jumlah bayi	Bayi	5.110	3.875	5.110	3.819	4.960	3.844
10	Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif	Bayi	3.050	3.855	3.100	3.655	3.844	3.320
11	Jumlah balita kurus	Balita	793	1.019	657	1.105	1.150	1.545
12	Jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri)	Desa	33	38	33	85	46	66
13	Jumlah desa	Desa	88	88	88	88	88	88

No.	Uraian Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14	Jumlah kecamatan sehat	Kec.	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah desa STBM semua pilar	desa	40	25	50	51	68	64

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Pergantian definisi operasional

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan status gizi masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita stunting. Pada tahun 2023, terdapat perubahan definisi operasional balita bawah garis merah yang awalnya hanya balita dengan berat sangat kurang menjadi berat badan kurang berdasarkan berat badan/ umur. Hal ini mengakibatkan balita bawah garis merah meningkat dan mencapai sekitar 10% dari balita yang ditimbang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting antara lain:

- Intervensi gizi spesifik langsung kepada balita stunting
- Optimalisasi posyandu dan PAUD
- Peningkatan cakupan air bersih
- Penyediaan sanitasi layak
- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Upaya menurunkan jumlah ibu hamil dengan anemia dan meningkatkan capaian bayi dengan ASI eksklusif perlu ditingkatkan pemantauan minum tablet Fe (zat besi) bagi ibu hamil dan mencari inovasi untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif bagi bayi.

Pada tahun 2023 desa siaga aktif mandiri mengalami penurunan hingga mencapai 66 kalurahan. Beberapa desa belum termasuk dalam kategori desa siaga aktif, oleh karena keberadaan forum desa siaga yang kurang aktif serta keberadaan data-data pendukung belum terdokumentasi dengan baik, sehingga pada masa yang akan datang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo sudah termasuk dalam kategori Kecamatan Sehat. Jumlah kalurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 64 kalurahan. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kalurahan STBM adalah harus terpenuhinya 5 indikator sebagai indikator komposit. Indikator yang cukup berat adalah pencapaian indikator pada pilar ke 4 dan ke 5. Pilar ke 4 yaitu pengelolaan sampah, dimana masih ditemukan warga yang membakar sampah dan pilar ke 5 yaitu penggunaan SPAL. Dengan masih adanya kejadian tersebut, maka perlu meningkatkan sosialisasi sanitasi lingkungan pada masyarakat. Tingkat capaian kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.53

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2023

No.	Uraian Indikator	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) tertangani <24 jam	15	8	15	8	15	23

No.	Uraian Indikator	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)	15	8	15	8	15	23
3	Jumlah bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	5.082	2.802	5.082	2.802	4049	3991
4	Jumlah bayi	5.110	4.883	5.110	4.883	5.100	3.944
5	Jumlah Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI)	88	88	88	88	88	88
6	Jumlah Desa	88	88	88	88	88	88
7	Jumlah penderita Tuberkulosis yang diobati sembuh dan lengkap	581	234	581	234	299	256
8	Jumlah penderita Tuberculosis	830	262	830	262	590	286
9	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	3.500	3.620	3.500	3.620	4.113	5.119
10	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV	16.901	3620	16.901	3620	16.901	5.119
11	Jumlah Desa tidak memiliki kasus indigenous malaria	88	88	88	88	88	88
12	Jumlah kematian penderita DBD	1	6	1	6	1	0
13	Jumlah penderita DBD	105	213	105	213	155	76
14	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.470	4.771	23.470	4.771	10.492	10.447
15	Jumlah penderita hipertensi	40.112	40.112	40.112	40.112	29.237	31.658
16	Jumlah penduduk usia 18+ yang dilakukan pemeriksaan Indeks Massa Tubuh	11.500	86.923	11.500	86.923	173.027	116.233
17	Jumlah penduduk usia 18+	320.456	292.838	320.456	292.838	314.628	314.628
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	1.335	1.371	1.335	1.371	1.368	1.368
19	Jumlah sekolah	1.352	1.371	1.352	1.371	1.368	1.368
20	Jumlah desa/kelurahan mempunyai posbindu	84	88	84	88	88	88
21	Jumlah penderita ODGJ berat dilayani sesuai standar	1.515	1.207	1.515	1.207	1.441	1.410

No.	Uraian Indikator	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
22	Jumlah penderita ODGJ berat	2.804	1.207	2.804	1.207	1.555	1.562

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Untuk pencegahan dan pengendalian malaria, pada tahun 2023 terjadi kasus KLB malaria di 2 kalurahan yaitu Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, dan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap. Karena telah mendapatkan status eliminasi malaria, maka kenaikan kasus malaria menjadi kategori KLB. Kalurahan yang mengalami KLB terjadi di wilayah pelayanan 11 puskesmas. Berikut ini Kejadian Luar Biasa yang terjadi pada tahun 2020-2023.

Tabel 2.54

Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus

Tahun 2020-2023

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
Tahun 2020					
1	Januari	Suspek difteri	Kokap 2	Hargowilis	1
2	November	Keracunan Makanan	Sentolo 1	Sukoreno	7
3	November	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	5
4	Desember	Keracunan Makanan	Temon 2	Karangwuluh	15
Tahun 2021					
1	Februari	Keracunan Makanan	Temon I	Kulur	10
2	Maret	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	7
3	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Jangkaran	2
4	Desember	Keracunan Makanan	Lendah II	Gulurejo	2
5	Desember	Keracunan Makanan	Temon II	Sindutan (Temon II)	6
6	Desember	Chikungunya (suspect)	Temon I	Temon Wetan	46
7	Desember	Chikungunya	Sentolo I	Sentolo	33
8	Desember	Keracunan Makanan	Sentolo I	Sentolo	3
Tahun 2022					
1	Januari	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	2
2	April	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	45
3	Mei	Malaria	Samigaluh II	Gerbosari dan Ngargosari	56
4	Juli	Keracunan Makanan	Galur II	Kranggan	28
5	Oktober	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	81
6	Oktober	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	1
7	November	Malaria	Kokap I	Kalirejo	2
Tahun 2023					
1	Januari	Malaria	Samigaluh II	Pagerharjo	1
2	Februari	Keracunan makanan	Pengasih I	Sidomulyo	34
3	Februari	Malaria	Kokap II	Hargotirto	2
4	Maret	Muntaber/ diare	Lendah I	Jatirejo	11
5	Maret	Keracunan makanan	Samigaluh I	Sidoharjo	6
6	April	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	4
7	Mei	Keracunan makanan	Sentolo I	Sukoreno	54

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
8	Juni	Diare	Sentolo II	Tuksono	40
9	Juli	Leptospirosis	Nanggulan, Girimulyo I	Pendoworejo, Giripurwo, Tanjungharjo, Donomulyo, Wijimulyo, Jatisarono, Kembang	26
10	Juli	Diare	Wates	Triharjo	23
11	Juli	Pertusis	Wates	Bendungan	1
12	September	Keracunan makanan	Wates	Terbah	49
13	Oktober	Pertusis	Girimulyo I	Pendoworejo	4
14	Oktober	Keracunan makanan	Kokap II	Hargotirto	3
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Ngargosari	23
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Jatimulyo	
17	November	Keracunan makanan	Lendah II	Jatimulyo	
18	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	76
19	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	5
20	November	Keracunan makanan	Sentolo I	Kaliagung	7
21	Desember	Keracunan makanan	Nanggulan	Wijimulyo	62
22	Desember	Keracunan makanan	Kokap I	Hargorejo	16
23	Desember	Pertusis	Pengasih I	Sendangsari	6

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar KLB adalah keracunan makanan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan peran masyarakat melalui pengenalan makanan berisiko baik dari sisi jenis makanan, sumber makanan, cara pengolahan dan penyajian. Untuk mempermudah pemahaman maka perlu diupayakan pemahaman cara penyediaan dan konsumsi makanan yang baik meliputi bagaimana mendeteksi makanan yang baik dan aman, cara pengolahan makanan yang higienis dan aman, cara distribusi, cara penyimpanan, penyajian sampai cara konsumsi yang aman. Sanitasi tempat penyimpanan, pengolahan dan penyajian maupun konsumsi juga memegang peran yang sangat penting untuk antisipasi yang akan datang.

Di sisi lain adanya ancaman KLB penyakit menular baru yang kemungkinan berasal dari luar wilayah terlebih dengan adanya kemajuan wilayah dengan operasionalnya Bandara Internasional Yogyakarta sangat berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan kegawatdaruratan Kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang perlu diwaspadai seperti: EBOLA, Mers-Cov, SARS, Nipah, Hanta virus.

Tabel 2.55

Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2019- 2023

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	2,907	1,117	3,613	13,759	2,241
2	Angka kasus malaria	Kasus	13	5	16	59	10

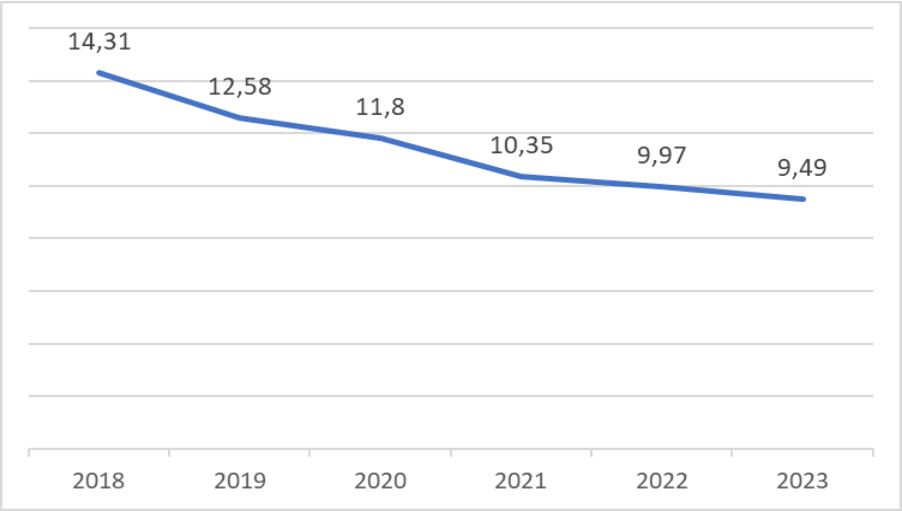
No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	447.246	447.506	442.838	428.816	446.192
4	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,0065	0,0058	0,00248	0,0065	0,0053
5	Jumlah pasien HIV/AIDS	Kasus	29	26	11	28	54
6	Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue	Kasus	194	316	213	231	76
7	Jumlah Penderita Diare	Kasus	7.914	4.768	2028	3.618	4.851
8	Jumlah Penderita TB	Kasus	311	247	205	270	282
9	Jumlah Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Kasus	858	22.351	12.354	1.190	26.308

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kejadian malaria dari tahun 2019 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020, namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 meningkat lagi, hal ini terjadi karena kasus impor dari luar daerah. Tahun 2023 kembali menurun tajam hingga mencapai 10 kasus atau dengan prevalensi 2,241 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2019 walaupun masih terdapat kasus tetapi sudah tidak ada lagi desa yang indigenous malaria. Prevalensi HIV maupun absolut kasus HIV/AIDS di Kulon Progo cenderung fluktuatif, sehingga kampanye informasi mengenai HIV/AIDS perlu ditingkatkan. Jumlah penderita TB, DBD, diare dan ISPA juga masih fluktuatif sehingga program pencegahan dan pengendalian penyakit perlu terus melakukan evaluasi.

Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan stunting, menurut WHO stunting menjadi permasalahan kesehatan jika prevalensinya 20 persen atau lebih. Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan target nasional balita stunting < 20%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Prevalensi stunting di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018-2023 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 14,31% pada tahun 2018 menjadi 9,49% pada tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.27
Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting yaitu:

a) Pelaksanaan Community Feeding Center (CFC) di Puskesmas Kalibawang dan Panjatan II;
b) Pelaksanaan Therapeutic Feeding Centre (TFC) di Puskesmas Galur II;
c) Sosialisasi dan Konseling PMBA (Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi kader, ibu hamil dan keluarga baduta;
d) Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis);
e) Pemberian Makanan Tambahan Balita Wasting;
f) Pendampingan balita gizi buruk oleh kader dan petugas;
g) Kunjungan rumah pada ibu hamil, bayi dan balita resiko tinggi (BBLR/PBLR);
h) Konseling laktasi;
i) Pelaksanaan ANC (Antenatal Care)Terpadu;
j) Pelaksanaan kelas ibu hamil;
k) Pemberian Vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas;
l) Pemberian obat cacing pada balita;
m) Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;
n) Eliminasi malaria;
o) Pendampingan balita diare minum Zinc;
p) Dusun Kabar (Kawasan Bebas Asap Rokok);
q) KTR (Kawasan Tanpa Rokok);
r) Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Deklarasi STBM;
s) Pemeriksaan kualitas air bersih;
t) Kesehatan reproduksi remaja;
u) Konseling catin (calon pengantin);
v) Penyegaran kader dalam pemantauan pertumbuhan balita;
w) Pendampingan petugas saat PSG di posyandu;
x) Dukungan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor.

Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar, khusus maupun rujukan, kesiapsiagaan bencana, pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan laboratorium, serta meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa indikator dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.56

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

No.	Uraian Indikator	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	36	36	36	36	38	38
2	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	37	38	37	38	38	38
3	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer	9	18	9	18	21	21
4	Jumlah puskesmas	21	21	21	21	21	21
5	Jumlah Puskesmas yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat di atas 81.26 (Sangat Baik)	21	20	21	20	21	21
6	Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21	21

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dan pengawasan Obat Makanan dan Bahan Adiktif (OMKABA) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut ini data sumber daya kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.57

Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan puskesmas	%	175	175	175	175	175
	Jumlah puskesmas	*Unit*	*21*	*21*	*21*	*21*	21
	Jumlah kecamatan	*kecamatan*	*12*	*12*	*12*	*12*	12
2	Cakupan puskesmas pembantu	%	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
	Jumlah puskesmas pembantu	*Unit*	63	63	63	63	63
	Jumlah kalurahan/ kelurahan	*Kalurahan/ kelurahan*	88	88	88	88	88
3	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per satuan balita	39,08	39,97	40,82	38,65	45,18

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Posyandu	*Unit*	960	960	960	959	957
	Jumlah Balita	*Jiwa*	24.567	24.018	23.514	24.808	21.182
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0210	0,0210	0,0225	0,0233	0,0024
	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	*Unit*	94	94	100	100	100
	Jumlah Penduduk	*Jiwa*	447.246	447.506	442.838	443.589	446.192
5	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0201	0,0201	0,0203	0,00209	0,00202
	Jumlah rumah sakit	*Unit*	9	9	9	9	9
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,254	0,254	0,030	0,029	0,057
	Jumlah dokter	*Jiwa*	114	114	134	127	254
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per satuan penduduk	2,200	2,270	2,190	2,26	0,121
	Jumlah tenaga medis	*Jiwa*	984	1016	970	972	538

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 331/A/2015 tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017. Ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal Primer, dimana Jalan Lokal Primer tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Jalan Lokal Primer I dan Jalan Lokal Primer II. Jalan Lokal Primer I merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kapanewon, ibukota kabupaten dengan pusat kalurahan, antar ibukota kapanewon, dan ibukota kapanewon dengan kalurahan, sedangkan Jalan Lokal Primer II merupakan jalan yang menghubungkan antar kalurahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Kulon Progo adalah 636,025 km, sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 672,620 km. Pada tahun 2024 dikeluarkan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan kabupaten, dimana dalam SK tersebut panjang dan jumlah ruas jalan Kabupaten berkurang dari yang semula 1.308,645 km yang terdiri dari Lokal Primer I dan Lokal Primer II menjadi 807,758 km tersebar di semua Kapanewon. Dengan adanya perubahan SK tersebut menjadikan banyak ruas jalan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten beralih menjadi kewenangan Kalurahan atau Kelurahan dan menjadi jalan Lingkungan. Realisasi penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

pada tahun 2019 - 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten adalah sebagai berikut.

Tabel 2.58

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Status Jalan			Kondisi				Total
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tahun 2019	LK I	Km	345.050	136.110	85.635	69.230	636.025
			%	54.25	21.40	13.46	10.88	100.00
		LK II	Km	242.215	208.850	90.050	131.525	672.620
			%	36.01	31.05	13.39	19.55	100.00
		Total LK I dan LK II	Km	587.265	344.940	175.685	200.755	1.308.645
			%	44.88	26.36	13.42	15.34	100.00
2	Tahun 2020	LK I	Km	297.312	147.522	102.378	88.813	636.025
			%	46.75	23.19	16.10	13.96	100.00
		LK II	Km	216.907	243.068	78.681	133.964	672.620
			%	32.25	36.14	11.70	19.92	100.00
		Total LK I dan LK II	Km	514.219	390.59	181.059	222.777	1.308,645
			%	39,294	29,847	13,836	17,023	100.00
3	Tahun 2021	LK I	Km	300.012	152.022	101.178	82.813	636.025
			%	47,17	23,90	15,91	13,02	100
		LK II	Km	240.907	249.368	60.101	122.244	672.620
			%	35,82	37,07	8,94	18,17	100
		Total LK I dan LK II	Km	540.919	401.390	161.279	205.057	1.308.645
			%	41,33	30,67	12,32	15,67	100
4	Tahun 2022	LK I	Km	302.642	150.331	100.235	82.818	636.025
			%	47,58	23,64	15,76	13,02	100
		LK II	Km	248.497	249.898	69.765	104.461	672.620
			%	36,94	37,15	10,37	15,53	100
		Total LK I dan LK II	Km	551.139	400.229	170.000	187.279	1.308.645
			%	42,12	30,58	12,99	14,31	100
5	Tahun 2023	LK I	Km	300.886	155.990	98.453	80.696	636.025
			%	47,31	24,53	15,48	12,69	100
		LK II	Km	256.315	247.291	67.378	101.636	672.620
			%	38,11	36,77	10,02	15,11	100
		Total LK I dan LK II	Km	557.201	403.281	165.831	182.332	1.308.645
			%	42,58	30,82	12,67	13,93	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 terjadi penurunan kondisi jalan dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) di Jalan kabupaten lokal primer I, dari 75,65 % menjadi 69,94%. Sedangkan pada jalan kabupaten lokal primer II terjadi kenaikan kondisi jalan dari 67,06 % menjadi 68,39%. Secara keseluruhan ada penurunan

kualitas jalan kabupaten dari 71,24 % kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2019 menjadi 69,14% kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2020. Total penurunan kondisi pada jalan kabupaten baik Lokal Primer I dan Lokal Primer II dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 sebesar 2,1 %, atau sepanjang kurang lebih 27.396 km. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan dikarenakan adanya refokusing kegiatan untuk penganggulangan Pandemi Covid-19. Penurunan ini terjadi khususnya pada jalan Lokal Primer I. Tahun 2021, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I naik dari 69,94% menjadi 71,07 %, dan Lokal Primer II naik menjadi dari 68,39 % menjadi 72,39%. Pada Tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantab dari 74,09 % menjadi 74,88%.

Peningkatan kualitas jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Kulon Progo disebabkan beberapa faktor, antara lain : Efektifitas dari program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga DPUPKP sehingga dengan dukungan anggaran yang ada baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD dapat meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Kulon Progo. Melihat faktor-faktor tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ada laju peningkatan kualitas jalan kabupaten di Kulon Progo.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait pengembangan wilayah maka untuk peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan kabupaten berupaya meraih dana dari APBD DIY, Dana Keistimewaan dan APBN (Anggaran Dana Alokasi Khusus). Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,32 km dengan kondisi baik 16,38 km (57,84%) dan kondisi sedang 11,54 km (40,75%). Jalan Provinsi sepanjang 175,140 km kondisi baik 81,89 km (46,76%), kondisi sedang 37,27 km (21,28%). Kondisi jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 2.59

Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	Km	%	Km	%	
1.	Nasional*	16,38	57,84	11,54	40,75	6,4	1,41	-	-	28,32
2.	Provinsi	67,42	46,18	39,14	24,40	43,58	25,27	4,3	4,15	154,44

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Data sementara

Kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan kualitas pada Tahun 2021. Terjadi penurunan kualitas Jalan Nasional kondisi mantap dari 100 persen pada Tahun 2020 menjadi 98,59 persen pada Tahun 2021. Untuk Jalan Provinsi kondisi mantap: dari 79,47 persen pada Tahun 2020 menjadi 70,31 persen pada Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 68,04 persen pada tahun 2022. Jumlah jembatan pada Tahun 2021 sebanyak 442 buah, meliputi 21 buah Jembatan Nasional, 77 buah Jembatan Provinsi dan Jembatan Kabupaten sebanyak 362 buah. Rincian kondisi jembatan secara detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak berat	Total Jembatan
1.	Nasional	unit	7	-	-	-	7
2.	Provinsi	unit	49	20	-	8	77
3.	Kabupaten	unit	90	58	7	2	157

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk pengembangan wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk terus ditingkatkan terutama untuk akses pada pusat pusat pertumbuhan seperti di sekitar Bandara YIA, pada kawasan peruntukan industri, kawasan dengan potensi pariwisata, dan juga perlu untuk memperbaiki akses jalan di wilayah pedesaan maupun pegunungan.

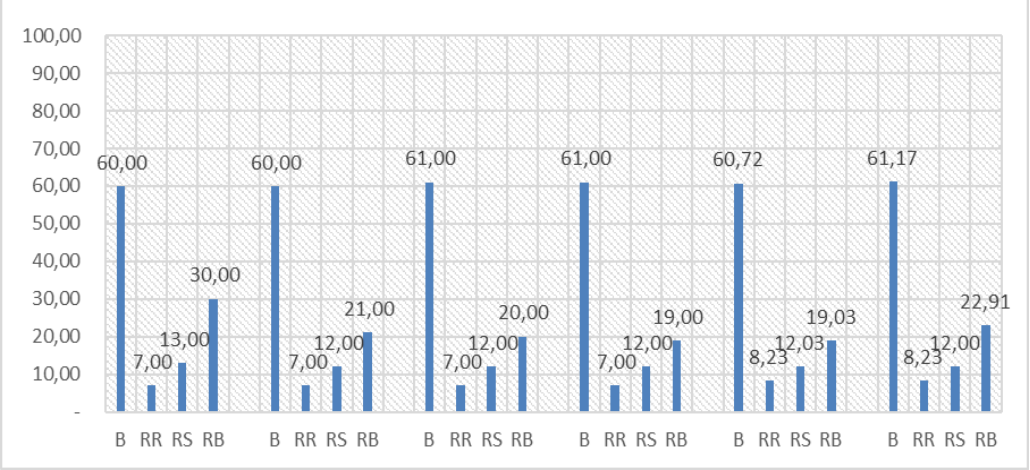
b. Sarana Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Upaya tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Untuk mencapai irigasi yang baik diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi berupa saluran, bangunan utama, dan bangunan pelengkap merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari prasarana tersebut didalamnya termasuk bangunan irigasi. Secara garis besar jaringan irigasi mencakup 5 macam bangunan irigasi yaitu: (i) Bangunan pengambilan (*intake*), (ii) Bangunan pembawa (saluran), (iii) Bangunan bagi dan sadap, (iv) Bangunan pengaturan dan pengukuran debit, (v) Bangunan pelindung dan pelengkap.

Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pusat kurun waktu 2019-2023 sebagian besar dalam kondisi baik dengan kondisi pada tahun 2023 sebesar 70% dalam kondisi baik sejak tahun 2019 dan tidak terdapat kondisi rusak berat. Sedangkan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebanyak 60,72% dalam kondisi baik. Kondisi rusak sedang pada tahun 2023 berada di angka 12,03% mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,03 % dan juga kondisi rusak ringan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,23% dari tahun 2022. Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pemerintah provinsi kondisinya relatif baik pada angka 80% dengan kondisi baik. Dalam kurun tahun 2019-2023 kondisi rusak sedang 5%, rusak ringan 10% dan rusak berat 5% berlangsung sama. Grafik kondisi masing masing saluran irigasi berdasar wilayah kewenangan dapat

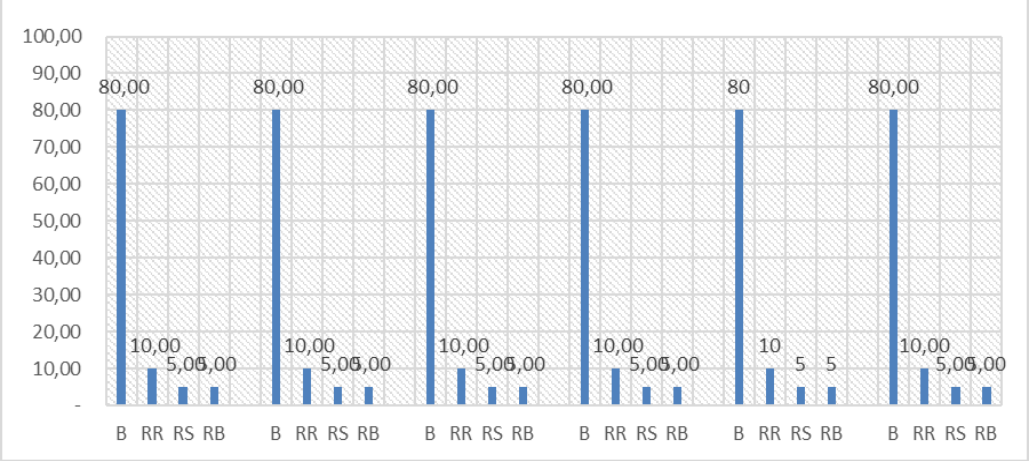
dicermati pada Gambar di bawah ini. Bila dibandingkan, nampak bahwa persentase kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawah provinsi dan pusat terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan dan pengembangannya mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian di Kulon Progo. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan setiap daerah irigasi berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing daerah irigasi sehingga fungsi dari saluran irigasi masih dapat dipergunakan.



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Gambar 2.28

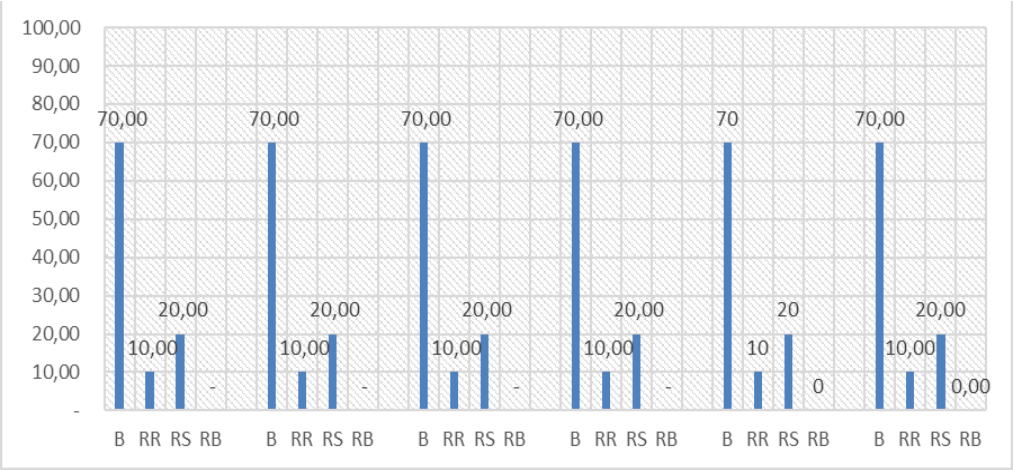
Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Gambar 2.29

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2018 – 2023



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Gambar 2.30

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2018 – 2023

Pada pengelolaan irigasi, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan (O & P) jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan O & P, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Namun demikian, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi antara lain:

1. Data jaringan irigasi pada saat ini kurang up to date dan belum mencakup seluruh wilayah daerah irigasi berdasar kewenangan.
2. Penyebaran penyimpanan data pada umumnya tidak tersimpan dalam satu kesatuan sehingga menyulitkan dalam akses dan updating.
3. Satuan ukuran data baik data kualitatif maupun data peta umumnya berbeda sehingga perlu upaya standarisasi atau pembakuan.
4. Ketersediaan SDM dan dana untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka pengelolaan irigasi dapat menjadi kurang optimal. Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan di Kabupaten Kulon Progo masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Waduk Sermo tercatat sebanyak 21 embung yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo yang dimanfaatkan untuk air baku, irigasi dan konservasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61

Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m^3)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
1.	Embung Blubuk	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	18.655	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	Kalurahan	
2.	Embung Bogor	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	6.000	Sungai	APBD KP Th 2015	Konservasi, Irigasi an air baku	THL	
3.	Embung Batur	Dusun Batur, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	8.900	Sungai	APBD DIY 2016	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	THL	
4.	Embung Kalibuko I	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	6.170	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi dan air baku	P3A	
5.	Embung Kayangan	Dusun Paingan, Kalurahan Sendangsari, Kap Pengasih	6.000	Sungai		Konservasi dan air baku	P3A	
6.	Embung Kedungromo	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.500	Sungai	APBN Th 2008	Konservasi	Kalurahan	
7.	Embung Penggung	Kalurahan Hargorejo, Kap. Kokap	4.000	Air Hujan	APBN Th 2013	Konservasi	Kalurahan	
8.	Embung Tangkisan I	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	35.000	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	
9.	Embung Tangkisan II	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	7.500	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m^3)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
10.	Embung Plampang	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	1.500	Air Hujan	APBD DIY Th 2015	Konservasi	Kalurahan	
11.	Embung Cikli	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	bendung kali penggung
12.	Embung Sambeng	Dusun Anjir, Kalurahan Hargowilis, Kap. Kokap	12.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	
13.	Embung Bibis	Dusun Klepu, Kalurahan Hargowilis, Kap Kokap	40.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	BBWS SO	
14.	Embung Jurug	Kalurahan. Sidorejo, Kap. Lendah	9.000	Sungai	APBD KP Th 2009 ; 2016	Konservasi, Irigasi	P3A	
15.	Embung Samigaluh	Kap. Samigaluh	6.523	Sungai	APBD DIY Th 2011-2012	Konservasi, irigasi dan air baku	P3A	
16.	Embung Krapyak	Kalurahan Banjaroya, Kap. Kalibawang	35.400	Sungai	APBD KP Th 2017	Konservasi, irigasi, air baku dan pariwisata	THL	
17.	Embung Tonogoro	Kalurahan Banjaroyo, Kap. Kalibawang	10.000	Air Hujan	APBD KP Th 2013	Irigasi dan Wisata	Warga	
18.	Embung Kleco	Kec. Girimulyo	8.000	Sungai	APBD KP Th 2015-2016	Wisata	Kalurahan	
19.	Embung Gorolangu	Kalurahan Sidoharjo, Kap. Samigaluh	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2018	Konservasi, Wisata	Kalurahan	
20.	Embung Talunombo	Kap. Pengasih	1.800	Air Hujan	APBD KP Th 2018	Pariwisata	THL	
21.	Embung Dlingseng	Ds. Banjaroya, Kap. Kalibawang	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2020	Konservasi, irigasi dan air baku	THL	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Keberadaan embung tersebut, selain dalam jangka pendek dapat dijadikan sumber air baku baik untuk irigasi maupu air minum, pada jangka panjang dapat menunjang keberlangsungan potensi air tanah di kawasan sekitar embung dan bagian hilirnya. Selain itu, dengan berkurangnya laju limpasan permukaan (*run off*) air hujan, maka potensi erosi, banjir dan tanah longsor dapat diminimalisir. Secara ekonomi, embung juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, bercocok tanam dan budidaya perikanan.

c. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dapat digunakan untuk mengetahui gambaran kinerja sektor irigasi di suatu daerah. Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara total seluruh panjang saluran irigasi di kabupaten yang terdiri baik kewenangan pusat, provinsi, kabupaten maupun kewenangan petani terhadap luasan daerah irigasi. Ada penambahan Nama Daerah Irigasi baru dan luasnya, tapi belum masuk di Permen, sudah diusulkan untuk perubahannya, untuk kewenangan Kabupaten ada penambahan panjang jaringan Irigasi Daerah Irigasi kecil sepanjang 212,5m di Tahun 2023, sehingga menjadi 193.529 m dan panjang Jaringan keseluruhan menjadi 457.941 m

Tabel 2.62

Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2023

No	Kewenangan Irigasi	Panjang saluran (m)	Luas area (Ha)
1	Pusat	73.749	7.167,50
2	Provinsi	65.654,00	1.853,00
3	Kabupaten	193.529,00	1.767,00
4	P3A	125.009,00	0
	Total	**457.941,00**	**10.787,50**

Sumber data : DPUPKP dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2023 diolah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya di bawah 1.000 Ha (DI Kecil) dan sebagaimana diatur dalam Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tabel di atas merupakan kondisi daerah irigasi serta saluran yang melayani daerah irigasi. Berdasarkan aturan tersebut, secara luasan seluruh daerah irigasi terbagi habis dalam 3 kewenangan yang berbeda yaitu pusat, provinsi dan kabupaten sehingga secara kewenangan P3A tidak diklasifikasikan dalam aturan tersebut. Sedangkan terkait saluran irigasi, acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang memberikan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier kepada P3A.

d. Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, Tuk Mudal, dan Sungai Progo. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri. Jumlah

pelanggan yang dilayani oleh PDAM terus meningkat tiap tahunnya tahun 2023 mencapai 30.220 SR. Gambar berikut menunjukkan tren peningkatan jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM.



Sumber data: PDAM Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

Gambar 2.31

Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun Tahun 2018-2023

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, masyarakat mengunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain bersumber dari : Sumur Gali, Mata Air, Waduk dan Sungai dengan kebutuhan air baku bervariasi sesuai karakteristik masyarakat yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut. Berdasarkan jumlah KK yang mempunyai akses terhadap air minum maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.63

Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	**Perpipaan**					
1.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM	31.436	32.931	35.711	37.576	40.416
2.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM	18.797	22.925	22.175	24.921	25.210
B	**Non Perpipaan Terlindungi**					
3.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Layak	56.515	92.835	84.297	74.870	84.914
4.	Jumlah KK dengan akses air minum terlindungi lainnya	n.a	21.579	19.486	17.307	n.a.
5.	Jumlah KK dengn akses air minum Isi Ulang	n.a	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
C	**Non Perpipaan Tidak Terlindungi**					
6.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Tidak Terlindungi	1.881	n.a	n.a	n.a	5.429
7.	Jumlah KK dengan akses air minum ke lainnya:sungai, danau, saluran irigasi, dll	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Jumlah	**108.629**	**170.270**	**160.073**	**154.674**	**155.969**

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo; PDAM; Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2024 (diolah).

Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan Pamsimas. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh Spamdes yang dikelola oleh Pamaskarta. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau daerah-daerah yang berada di wilayah utara karena topografi wilayahnya yang merupakan dataran tinggi yang menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan menjadi cukup mahal. Sampai dengan saat ini, PDAM mengelola enam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu: 1) SPAM Clereng yang melayani sebagian besar Wates kota dan Temon, sebagian Kapanewon Panjatan dan Pengasih serta sebagian kecil Kapanewon Kokap; 2) SPAM Kalibawang yang melayani Kalurahan Banjaroya dan Banjararum, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan; 3) SPAM Lendah melayani seluruh Kapanewon Galur dan Lendah, sebagian besar Kapanewon Panjatan, sebagian Kapanewon Pengasih, Sentolo, Temon, Wates serta sebagian kecil Kapanewon Kokap dan Nanggulan; 4) SPAM Salamrejo melayani Kalurahan Salamrejo, Sentolo, Sukoreno dan Tuksono di Kapanewon Sentolo; 5) SPAM Sentolo melayani seluruh Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Girimulyo, Pengasih dan Sentolo; 6) SPAM Sermo melayani seluruh Kapanewon Kokap, sebagian besar Kapanewon Temon, sebagian Kapanewon Pengasih, Wates, Sentolo serta sebagian kecil Kapanewon Panjatan.

Pada tahun 2019 terjadi perubahan metode pendataan terhadap akses air bersih masyarakat yaitu tidak lagi menggunakan baseline data KK namun menggunakan baseline data jumlah penduduk (jiwa). Sehingga data yang ditampilkan pada tabel di atas dilakukan melalui konversi jumlah penduduk ke jumlah KK dimana satu KK diasumsikan sama dengan 4 (empat) jiwa/penduduk. Selain itu pemanfaatan sumber air baku yang didata difokuskan hanya pada akses perpipaan dan non perpipaan. Akses perpipaan terdiri dari dua klasifikasi yaitu yang dilayani oleh PDAM dan yang dilayani oleh non PDAM meliputi jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes yang dikelola oleh Pamaskarta. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM berasal dari Sungai Progo, Waduk Sermo serta mata air Clereng. Sedangkan sumber air baku yang dimanfaatkan oleh jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes berasal dari mata air yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai tambahan, pada tahun 2019 juga dilakukan pemutakhiran data sehingga data sebelum dan sesudah tahun 2019 tidak dapat diperbandingkan secara linear. Namun demikian, pada tahun 2020 pengumpulan data yang dilakukan kembali per KK dan bukan per jiwa atau penduduk seperti yang dilakukan pada tahun 2019.

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2023 sebagian besar masyarakat Kulon Progo masih mengakses air bersih melalui jaringan non perpipaan 54,4 % menurun dari angka di 2022 yaitu sebesar 59,5% sedangkan untuk akses air bersih melalui jaringan perpipaan pada tahun 2023 sebesar 42,07% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 40,40%. Hal ini menunjukkan adanya tren kenaikan akses perpipaan dari waktu ke waktu yang dapat diasumsikan bahwa derajat keamanan dan kelayakan air semakin membaik. Peningkatan akses perpipaan ini secara signifikan merupakan kontribusi dari PDAM Tirta Binangun. Akses air bersih melalui jaringan perpipaan terutama di wilayah perkotaan meningkat menjadi 25,91% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 24,29%. Akses air bersih melalui perpipaan juga dilakukan oleh masyarakat melalui paguyuban Pamaskarta. Pada tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 16,16% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 16,11%. Jumlah pada tabel 2.69 yang melebihi data jumlah Kepala Keluarga menunjukkan bahwa pada beberapa rumah tangga memiliki lebih dari satu sumber air bersih. Hal ini wajar dilakukan mengingat beberapa sumber air yang ada belum mampu menyediakan air yang memenuhi sepanjang tahun.

Sebagai tambahan, pada tahun 2023 cakupan akses air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 96,52 %. Secara keseluruhan, 12 Kapanewon masih belum memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan (persentase dibawah 100%) dengan persentase terendah terdapat di Kapanewon Samigaluh sementara persentase tertinggi ada di kapanewon Wates. Seiring perkembangan kawasan samigaluh, perlu diprioritasan pengembangan akes layak dan berkelanjutan pada kawasan tersebut.

Tabel 2.64

Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah KK	Layanan Sarana Air Bersih			KK yang Memiliki Akses Air Minum Layak Dan Berkelanjutan	
			Non Perpipaan (KK)	Perpipaan (KK)			
				PDAM	Non PDAM	Jumlah	%
1	TEMON	10,295	4,580	1,129	2,566	3,695	35.89%
2	WATES	17,492	9,446	6,867	635	7,502	42.89%
3	PANJATAN	13,706	6,247	4,924	1,785	6,709	48.95%
4	GALUR	11,467	9,309	1,341	180	1,521	13.26%
5	LENDAH	14,457	10,488	2,985	166	3,151	21.80%
6	SENTOLO	17,582	8,431	5,529	2,512	8,041	45.73%
7	PENGASIH	18,529	7,417	7,853	1,027	8,880	47.92%
8	KOKAP	12,640	6,222	3,362	1,335	4,697	37.16%
9	GIRIMULYO	8,642	3,465	306	3,563	3,869	44.77%
10	NANGGULAN	10,921	4,149	2,838	2,915	5,753	52.68%
11	KALIBAWANG	10,443	3,395	3,219	2,524	5,743	54.99%
12	SAMIGALUH	9,792	1,839	63	6,002	6,065	61.94%
	JUMLAH	155,966	74,988	40,416	25,210	65,626	42.08%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2023.

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan, mulai Tahun 2013 PDAM Tirta Binangun telah mengembangkan usahanya melalui produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Air-Ku” yang merupakan terobosan yang digagas oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) melalui semangat “Bela Beli Kulon Progo”. Pada Tahun 2013, PDAM Tirta Binangun memulai dengan memproduksi AMDK kemasan gelas/cup ukuran 240 ml, kemudian mulai mengembangkan diversifikasi produk pada tahun 2015 dengan menambah produksi Air-Ku kemasan botol 600 ml. Selanjutnya pada tahun 2016 diproduksi Air-Ku kemasan galon 19 l, tahun 2018 menambah produksi Air-Ku kemasan gelas/cup 120 ml dan pada tahun 2019 mengeluarkan produk Air-Ku kemasan botol 330 ml. Tiap tahun produksi Air-Ku terus meningkat mengikuti permintaan

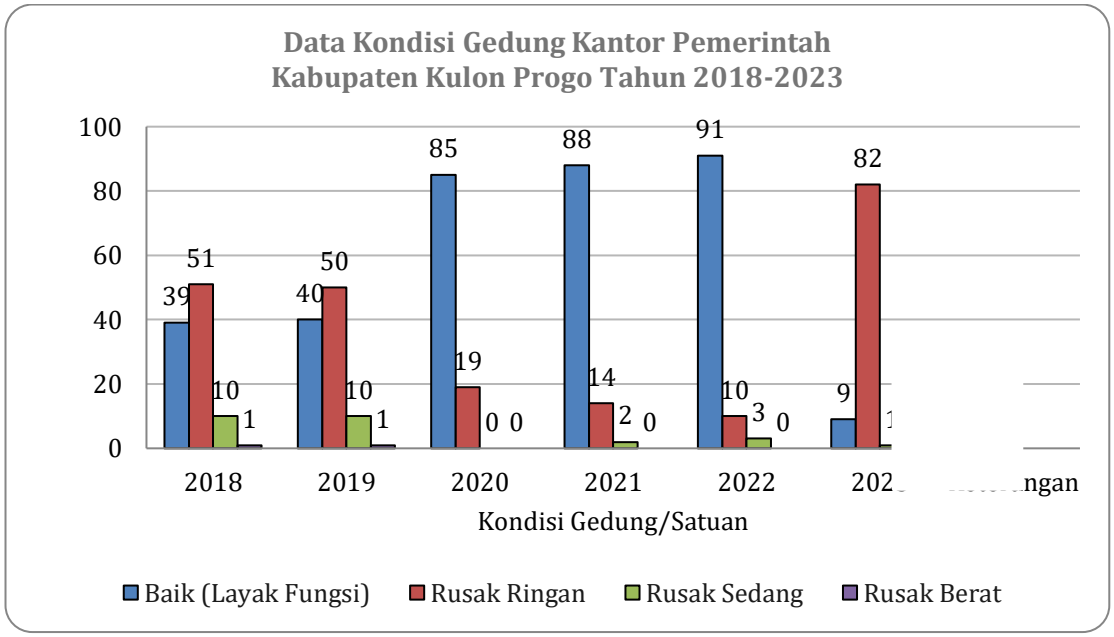
pasar. Permintaan pasar tersebut salah satunya dipengaruhi dengan adanya Surat Edaran Bupati yang mewajibkan semua kegiatan kedinasan harus menggunakan Air-Ku.

Tabel 2.65

Data Kondisi Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023

No.	Kondisi Gedung	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Baik (Layak Fungsi)	unit	39	40	85	88	91	9
2.	Rusak Ringan	unit	51	50	19	14	10	82
3.	Rusak Sedang	unit	10	10	-	2	3	1
4.	Rusak Berat	unit	1	1	-	-	-	4
	TOTAL	Unit	**101**	**101**	**104**	**104**	**104**	**96**

Sumber data : DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2023 (diolah)



Sumber data : DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2023 (diolah)

Gambar 2.32

Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023

2. Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/ Kepulauan,

RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait perencanaan tata ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dengan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 maka pengaturan untuk kawasan strategis Kabupaten dalam Rencana Rinci Tata Ruang sudah tidak ada lagi. Hal ini juga menjadi salah satu dinamika regulasi yang harus disesuaikan oleh Kabupaten dalam meninjau kembali terhadap rencana penyusunan dokumen tata ruang. Selain itu, lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama yang dihadapi. Target dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66

Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

NO	JENIS DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH (DOKUMEN)
1	RTRW	Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo	1
2	RDTR	Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta	1
3		Perkotaan Wates	1
4		Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	1
5		Kulon Progo Utara	1
6		Kulon Progo Tengah	1
7		Kulon Progo Selatan	1
Total dokumen			7

Adapun progress penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.67

Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2024

No	Dokumen Rencana Tata Ruang	2020	2021	2022	2023	2024
1	RTRW	- Konsultasi 3 ke TKPRD DIY - Rekomendasi Gubernur terbit - Pengajuan surat Pra Loket Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN	- Reviu PK RTRW dan substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Proses Pra Loket Persetujuan Substansi	- Klinik Pra Loket Persetujuan Substansi - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian substansi Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian Audit Tata Ruang (Indikasi Pelanggaran Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo)	- Klinik ke 5 dengan Kementerian ATR - Penyesuaian substansi revisi RTRW terkait dengan KP2B dan harmonisasi substansi dengan RTRW DIY 2023 – 2043 - Proses perbaikan dokumen sebagai tindaklanjut dari hasil asistensi dengan Kementerian ATR	- Finalisasi luasan KP2B pada substansi revisi RTRW - Proses perbaikan dokumen revisi RTRW
2	RDTR	- Rekomendasi BIG terbit atas RDTR Perkotaan Kokap dan Kalibawang - Pra-validasi KLHS untuk RDTR Perkotaan Kokap dan Kalibawang - Penetapan Delineasi/Batas Wilayah RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL	- Reviu substansi RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA, RDTR Perkotaan Kokap dan Kalibawang menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen	- Proses penyiapan pra-validasi KLHS, pengajuan pleno rekomendasi BIG dan persetujuan substansi untuk reviu RDTR Perkotaan Wates - Proses pengajuan validasi KLHS RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA dan persiapan pembahasan lintas sektor di Kemen ATR/BPN	- Penetapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta - Klinik ke-2 pra-loket RDTR Perkotaan Wates dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan	- Proses lanjutan perbaikan dokumen RDTR Perkotaan Wates - Proses lanjutan perbaikan dokumen RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur - Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Tengah beserta KLHSnya

No	Dokumen Rencana Tata Ruang	2020	2021	2022	2023	2024
		YOGYAKARTA (SK Bupati No. 422/A/2020)	ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Rekomendasi BIG terbit atas peta dasar RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA	- Proses penyusunan reviu RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur beserta KLHS-nya (pendetailan delineasi khusus wilayah Kabupaten Kulon Progo)	pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi - Klinik ke-1 pra-loket RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi - Proses penyusunan RDTR Kulon Progo Utara beserta KLHSnya	- Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Selatan beserta KLHSnya

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung/ tidak langsung serta penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Perwujudan pemanfaatan ruang yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program–program sektoral akan dipersandingkan dengan rencana pola dan struktur ruang untuk mendapatkan persentase kesesuaiannya. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari hasil evaluasi dari rata-rata struktur ruang dan pola ruang tersebut. Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2019–2023.

Tabel 2.68

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019–2023

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Struktur ruang	87,50	86,38	87,00	87,22	87,33
2.	Pola ruang	89,83	89,67	89,58	89,88	89,78
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,67	88,03	88,29	88,55	88,56

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data di atas, perwujudan struktur ruang dan pola ruang semakin meningkat. Program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana struktur ruang meliputi program perwujudan Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Prasarana Lainnya. Sedangkan program yang masih perlu didorong untuk mewujudkan rencana struktur ruang yaitu program perwujudan Sistem Jaringan Energi. Selanjutnya, program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana pola ruang meliputi program perwujudan Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta Kawasan Perikanan. Sedangkan program yang perlu didorong untuk mewujudkan rencana pola ruang yaitu program perwujudan Kawasan Perkebunan dan Kawasan Pertambangan.

Sebagai langkah percepatan, maka yang semula direncanakan akan menyusun 16 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten) kemudian melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan topografi dan karakteristik wilayah dirangkum menjadi 8 dokumen RDTR. Adapun perubahan penyusunan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
1	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	Tetap karena sedang berproses penyiapan pra-validasi KLHS, pengajuan pleno rekomendasi BIG dan persetujuan substansi di tahun 2022
2	RDTR Perkotaan Kokap	RDTR Perkotaan Kokap	Tetap karena sudah mendapatkan Rekomendasi BIG dan berproses untuk Pra-validasi KLHS

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
3	RDTR Perkotaan Kalibawang	RDTR Perkotaan Kalibawang	Tetap karena sudah mendapatkan Rekomendasi BIG dan berproses untuk Pra-validasi KLHS
4	RDTR Dekso	RDTR Kulon Progo Utara	Meliputi Kapanewon Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo (tidak termasuk delineasi RDTR BOP Borobudur dan RDTR Perkotaan Kalibawang)
5	RDTR Kawasan Agropolitan Kalibawang		
6	RDTR Perkotaan Samigaluh		
7	RDTR Perkotaan Girimulyo		
8	RDTR Perkotaan Nanggulan	RDTR Kulon Progo Tengah	Meliputi Kapanewon Kokap, Pengasih, Nanggulan (tidak termasuk delineasi RDTR Perkotaan Kokap dan RDTR Perkotaan Kalibawang)
9	RDTR Kawasan Minapolitan Nanggulan		
10	RDTR Perkotaan Sentolo	RDTR Kulon Progo Selatan	Meliputi Kapanewon Sentolo, Lendah, Galur dan Panjatan
11	RDTR Perkotaan Lendah		
12	RDTR Perkotaan Panjatan		
13	RDTR Perkotaan Galur		
14	RDTR Brosot		
15	RRTR Kawasan Strategis Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA	RDTR Kawasan Strategis Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA	Tetap karena sudah mendapatkan rekomendasi BIG atas peta dasar, proses pra-validasi KLHS dan persiapan pembahasan lintas sektor di Kemen ATR/BPN
16	RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur	RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur	Tetap karena sudah disusun oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 dan proses reviu pada tahun 2022

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo, rencana pola ruang dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung sebagian besar berada di daerah Pegunungan Menoreh, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun sempadan pantai. Untuk kawasan budidaya banyak terdapat di dataran maupun pesisir. Hasil analisis terhadap peta eksisting kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya adalah pertanian lahan kering yaitu seluas 12.542,38 ha atau sebesar 33,28%. Jika dibandingkan dengan peta rencana potensi pengembangan wilayah untuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 29.328 Ha maka arah pembangunan kawasan pertanian sudah sesuai dengan rencana namun keterwujudannya masih perlu didorong. Hal ini merupakan potret awal dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo sebagai basis komoditas pertanian. Untuk lebih jelasnya jenis peruntukannya pada kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.70

Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Peruntukan	Luas (ha)	%
1	Hutan Produksi	683,62	1,81
2	Hutan Rakyat	1.882,97	5,00

No	Jenis Peruntukan	Luas (ha)	%
3	Industri	3.565,81	9,46
4	Perdagangan	346,13	0,92
5	Perikanan Darat	831,27	2,21
6	Permukiman Perdesaan	7.560,92	20,06
7	Permukiman Perkotaan	1.778,96	4,72
8	Pertanian Lahan Basah	8.493,17	22,54
9	Pertanian Lahan Kering	12.542,38	33,28
	Total	**37.685,23**	**100,00**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012

Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah resapan air yaitu seluas 16.770,32 ha atau 79,35% dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah suaka alam yaitu seluas 109,13 ha atau 0,52%. Untuk lebih jelasnya luas tiap jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	278,58	1,32
2	Kawasan Sempadan Waduk	341,84	1,62
3	Pelestarian Alam	919,42	4,35
4	Resapan Air	16.770,32	79,35
5	Sempadan Pantai	579,54	2,74
6	Sempadan Sungai	2.136,51	10,11
7	Suaka Alam	109,13	0,52
	Total	**21.135,34**	**100,00**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012

Kegiatan audit tata ruang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian perwujudan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan baik rencana pola maupun struktur ruangnya. Perwujudan pemanfaatan ruang yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program–program sektoral akan dipersandingkan dengan rencana pola dan struktur ruang untuk mendapatkan persentase kesesuaiannya. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari hasil evaluasi dari rata-rata struktur ruang dan pola ruang tersebut. Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2018–2022.

Tabel 2.72

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019–2023

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Struktur ruang	87,50	86,38	87,00	87,22	87,33
2.	Pola ruang	89,83	89,67	89,58	89,88	89,78

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,67	88,03	88,29	88,55	88,56

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data di atas, perwujudan struktur ruang dan pola ruang semakin meningkat. Kontribusi terbesar dari perwujudan struktur ruang adalah perwujudan terhadap rencana pusat pelayanan kegiatan. Sebagian besar pusat kegiatan telah memiliki peran dan fungsi sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Sedangkan perwujudan terhadap rencana sarana prasarana meliputi jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya masih relatif moderat. Kontribusi terbesar dari perwujudan pola ruang adalah perwujudan terhadap rencana peruntukan kawasan lindung. Sedangkan untuk kawasan budidaya, ada beberapa peruntukan yang hingga saat ini perwujudannya masih rendah. Diantaranya yaitu kawasan peruntukan industri.

Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah paling sedikit 30 persen dari luas wilayah perkotaan dimana 20 persennya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10 persennya merupakan proporsi ruang terbuka hijau privat.

Persentase luasan RTH publik yang terwujud sampai dengan Tahun 2020 adalah 9,612 persen dengan penjabaran komponennya yaitu luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun seluas 247,81 Ha dan luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah perkotaan seluas 2.578,20 Ha. Pada Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan tanah tahap pertama untuk RTH dengan lokasi perencanaan di Teteg Kulon, Kelurahan Wates. Kemudian pada tahun 2020 dilanjutkan dengan pengadaan tanah tahap kedua. Rencananya pada Tahun 2020 tersebut juga akan dibangun fisik RTH namun anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan tersebut ditunda (di*refocusing*) akibat adanya Pandemi Covid-19. Sehingga capaian luasan RTH publik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 masih tetap. Adapun rincian luasan RTH publik di kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan capaian tersebut, pemerintah kabupaten masih terus berupaya mewujudkan penyediaan RTH publik melalui penataan bangunan dan lingkungan di wilayah perkotaan.

Tabel 2.73

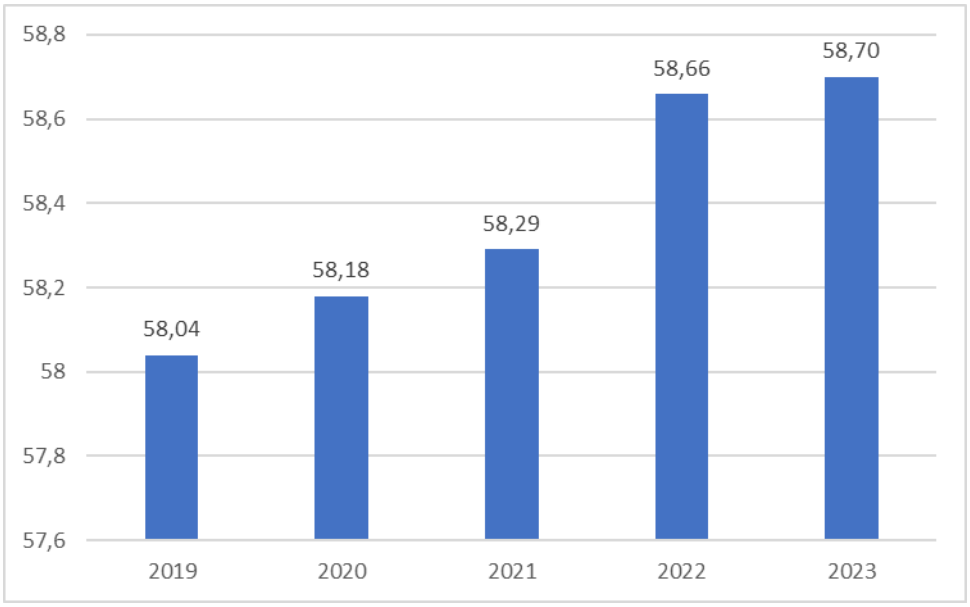
Luas RTH Publik Perkotaan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luasan RTH publik yang tersedia	247,81	247,81	247,81	247,81	247.81	247,81

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	2.578,20	2.578,20	2.578,20	2.578,20	2.578,20	2.578,20
3.	Luasan RTH publik (%)	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612	9,612

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan atau RTBL. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi perseorangan atau badan usaha dalam mendirikan sebuah bangunan gedung adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam rangka mewujudkan tertib pembangunan dan pemanfaatan ruang, maka Pemerintah Kabupaten rutin melakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung. Dalam kurun waktu Tahun 2018–2023, rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber data: DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2023 (diolah)

Gambar 2.33

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023

Rata–rata peningkatan rasio bangunan mempunyai IMB dari tahun ke tahun relatif landai hanya sekitar 0,19%. Pada Tahun 2023, rasio bangunan mempunyai IMB di Kabupaten Kulon Progo mencapai 58,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan memiliki IMB masih rendah. Pengawasan dan pengendalian IMB relatif lebih mudah untuk dilakukan terhadap bangunan yang baru berdiri dibandingkan bangunan yang sudah lama berdiri. Bagi bangunan baru yang belum memiliki IMB, maka Pemerintah Kabupaten mengenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan. Terdapat 3 (tiga) tahapan pemberian Surat Peringatan yaitu Surat Peringatan pertama, kedua dan

ketiga. Apabila hingga Surat Peringatan ketiga telah diberikan dan pihak yang bersangkutan tidak menindaklanjutinya maka penertiban akan diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk diambil langkah penindakan yang lebih tegas.

Tabel 2.74

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Bangunan IMB	Jumlah Seluruh Bangunan	Rasio
1	Temon	5,979	8,316	71,90
2	Wates	9,911	13,405	73,94
3	Panjatan	7,780	9,990	77,88
4	Galur	3,942	9,331	42,25
5	Lendah	7,974	11,070	72,03
6	Sentolo	8,042	13,035	61,70
7	Pengasih	8,463	13,449	62,93
8	Kokap	2,686	10,170	26,41
9	Girimulyo	2,451	7,672	31,95
10	Nanggulan	5,708	8,536	66,87
11	Kalibawang	3,966	9,040	43,87
12	Samigaluh	4,527	7,679	58,95
	Kab. Kulon Progo	71,429	121,693	58,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, DPMPT dan 12 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo terutama di perdesaan yang terletak di wilayah perbukitan seperti di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terletak di wilayah dataran rendah yang sebagian besar merupakan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi dan upaya penertiban terhadap IMB di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2023 sebanyak 6.818 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.75

Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2019-2023

No	Kapanewon	Jumlah Rumah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Galur	132	130	125	420	381
2	Girimulyo	885	848	838	610	546
3	Kalibawang	756	684	683	525	478
4	Kokap	1.421	1.379	1285	1155	796

No	Kapanewon	Jumlah Rumah				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Lendah	600	565	557	586	462
6	Nanggulan	683	325	306	527	486
7	Panjatan	754	740	729	349	306
8	Pengasih	991	657	621	1062	887
9	Samigaluh	786	724	658	1223	934
10	Sentolo	843	820	813	928	881
11	Wates	1	0	0	282	256
12	Temon	401	399	396	441	405
	TOTAL	**8.253**	**7.271**	**6.840**	**8.108**	**6.818**

Sumber data: DPUPKP, 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jumlah RTLH pada tahun 2023 sebanyak 6.818, mengalami penurunan 1.290 dibandingkan dengan tahun 2022. Peburunan terbesar yaitu di Kapanewon Kokap sebesar 359 dibandingkan dengan tahun 2022.

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni telah ditempuh bersama-sama baik oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan bansos RTLH bagi warga miskin, kemudian dari Pemerintah Provinsi melalui skema yang sama dengan target sasaran rumah warga yang berada di Kapanewon yang ditetapkan sebagai wilayah miskin. Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan DAK juga ikut andil dalam upaya peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain dari program/ kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan program “Bedah Rumah”. Program bedah rumah merupakan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan berasal dari APBD tetapi merupakan sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang memberikan sumbangan dalam rangka program bedah rumah ini antara lain berasal dari: CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, alokasi dari BAZDA maupun dari Paguyuban Pegawai Kristiani dan lain-lain. Terjadi kenaikan jumlah penanganan RTLH di tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebanyak 721 unit.

Tabel 2.76

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2023

NO	Sumber	Jumlah
1	APBD Kabupaten	300
2	APBD Provinsi (PK)	165
3	APBD Provinsi (PB)	16
4	BKK Arsitektur Jogja DAIS	70
5	Habitat Humanity	80
6	Baznas (Kesra)	55
7	BPD DIY (Kesra)	15
8	Kemensos	17
9	APBKal	3

NO	Sumber	Jumlah
10	UPK	1
	Jumlah	**722**

Sumber data: DPUPKP, 2024

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 terdapat 293,79 Ha kawasan kumuh yang perlu ditangani. Pada Tahun 2020 ada revisi SK Bupati mengenai penanganan kawasan kumuh yaitu SK Bupati Nomor 416/A/2020. Adapun rincian lokasi kawasan kumuh di perkotaan dan luasan pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.77

Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

(Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020)

No.	Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luasan Kumuh di SK (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2022 (Ha)	Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2023 (Ha)
1	Wates	Wates	19,67	18,44	0	18,44
		Giripeni	37,14	19,15	3,38	15,77
2	Sentolo	Banguncipto	1,81	0	0	0
		Sentolo	11,3	0	0	0
3	Galur	Brosot	4,56	0,72	0	0,72
4	Pengasih	Pengasih	16,74	0	0	0
		Margosari	0,38	0	0	0
		Tawangsari	18,74	18,74	0	18,74
		Sendangsari	24,13	9,21	0	9,21
5	Nanggulan	Wijimulyo	17,3	11,25	1,5	9,75
	Total		**151,77**	**77,51**	**4,88**	**72,63**

Sumber data: DPUPKP Kab Kulon Progo, 2024

Di dalam Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yaitu untuk kawasan permukiman kumuh dengan luasan 15 (lima belas) hektar atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi penanganan kumuh, kemudian untuk luasan diantara 10 – 15 Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan untuk luasan dibawah 10 (sepuluh) Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka sisa kawasan kumuh yang masih perlu ditangani sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu di Kalurahan Giripeni (Pedukuhan Sideman, Kedungpring dan Dobangsan), Kalurahan Sentolo (Pedukuhan Sentolo Lor), Kalurahan Tawangsari, Sendangsari dan Wijimulyo. Sedangkan untuk kawasan kumuh yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu di Kalurahan Brosot (Pedukuhan III Pulo dan Pedukuhan Bantengan Lor) serta Kalurahan Pengasih (Pedukuhan Dayakan) sudah dituntaskan pada tahun 2018-2019. Selanjutnya untuk kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten beberapa lokasi telah tuntas ditangani yaitu di Kelurahan Wates (Pedukuhan Wonosidi), Kalurahan Giripeni (Pedukuhan

Wetan Pasar), serta Kalurahan Banguncipto (Pedukuhan Ploso). Sedangkan dua Kalurahan yang masih perlu penanganan kumuh yaitu di Kalurahan Pengasih (RT 04/ RW 01) dan Margosari (Pedukuhan Kemiri).

Di Tahun 2021, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah seluas 74,26 Ha sehingga sampai dengan 2021 kawasan kumuh yang telah tertangani adalah sebesar 48,93%. Program Kotaku menjadi platform pendampingan untuk mempercepat penangan kekumuhan melalui perbaikan dan pengembangan PSU serta pendampingan sosial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara sarana prasarana dasar permukiman yang lebih baik, sehat dan nyaman. Penanganan permukiman kumuh harus terus diupayakan untuk pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi.

Pada tahun 2022 dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, namun demikian intervensi tersebut belum mampu melepaskan kawasan kumuh tersebut dari status kumuh berdasarkan indikator yang ada sehingga tidak terjadi pengurangan luasan kumuh atau pengurangan kumuh sebesar 0 (nol) Ha. Tahun 2023, penanganan kawasan kumuh dilakukan di Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates dan Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan dengan total luas wilayah yang ditangani adalah 4,88 Ha.

Tabel 2.78

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian**
1. Jumlah yang harus dilayani		1.610	3.110	+1.500	100%
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.610	3.110	+1.500	100%
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1.610	3.110	+1.500	100%
3	Jaringan perpipaan	1.610	3.110	+1.500	100%
4	Jaringan bukan perpipaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		447	447	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	447	447	0	100%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	447	447	0	100%
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	447	447	0	100%

Sumber: Laporan SPM Bidang PU Tahun 2022, DPUPKP Kulon Progo; 2023

Tabel 2.79

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		3	3	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi bagi Korban Bencana	3	3	0	100%
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
Presentase Penerima Layanan Dasar		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Terlayani**	**Jumlah Yang belum Terlayani**	**Total Pencapaian (%)**
Jumlah yang harus dilayani		1	1	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	**Jumlah total yang harus dilayani**	**Jumlah total yang Terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	**Persentase capaian mutu 100%**
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2	Subsidi Uang Sewa	0	0	0	100%
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	1	1	0	100%

Sumber: Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan perda dan perbup dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat, sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun Capaian Peningkatan Keamanan dan Lingkungan pada kurun waktu Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.80

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelanggaran yang ditegakkan	558	586	695	613	370
2.	Jumlah pelanggaran	558	586	695	613	370
3.	Jumlah Anggota Sat Linmas	3.968	3.968	3.968	3.968	3.807
4.	Jumlah Linmas yang pernah dibina	3.968	3.968	3.968	3.968	3.807
5.	Jumlah Patroli	455	457	447	478	456

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah pelanggaran pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2019-2023 jumlah linmas yang pernah dibina sudah sama dengan jumlah linmas yang ada. Jumlah Anggota Satlinmas pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 dikarenakan anggota satlinmas yang sudah berusia lanjut sudah tidak aktif, dan anggota satlinmas yang meninggal dunia tanpa ada pergantian/ pembaruan personil.

Khusus untuk patroli, intensitas pelaksanaan setiap tahunnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan partai politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas yang sangat penting yaitu :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana,
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Membantu upaya pertahanan negara.

Di Kabupaten Kulon Progo baru ada 3.807 orang personil linmas, sedangkan jumlah Rukun Tetangga ada 4.478, sehingga masih kekurangan sebanyak 424 orang personil linmas, artinya baru tercapai sebesar 95,01%. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selama periode tahun 2019-2023, jumlah lembaga politik, ormas, LSM dan OKP fluktuatif dari tahun ke tahun, namun pada 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat penambahan dari tahun 2022 yakni terdiri dari parpol, ormas, LSM, dan OKP sebanyak 6 lembaga.

Tabel 2.81

Jumlah Kegiatan Politik, Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	10	1	1	4	5
2	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat pembinaan	Lembaga	123	89	119	139	145
3	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP	Lembaga	123	89	133	139	145

Sumber data: Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2024

Peraturan teknis terkait sub urusan kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pencapaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Nasional					Realisasi Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	(9)	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	*Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) (km2)*	-		*469*	*496*	*496*	*496*	*496*	*100*	*100*	*100*	200	200
	Luas Kabupaten (km2)	*586,28*	-	*586,28*	*586,28*	*586,28*	586.28	586.28	*586,28*	*586,28*	*586,28*	586.28	586.28
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/Kota	80%		80%	80%	80%	17.06%	17.06%	17,06%	17,06%	17,06%	34,12%	34,12%
2	*Jumlah kasus kebakaran yang tertangani*	-	-	-	-	-	-	-	*27*	*26*	*36*	39	118
	Jumlah kasus kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	*27*	*26*	*36*	39	118
	Tingkat waktu tanggap *(Response Time Rate)*	75%	-	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3	*Jumlah Satgas Damkar yang memiliki standar kualifikasi*	-	-	-	-	-	-	-	*5*	*5*	*5*	*5*	4
	Jumlah Satgas Damkar keseluruhan	-	-	-	-	-	-	-	*17*	*17*	16	16	28
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	-	85%	85%	85%	85%	85%	29,41%	29,41%	31.25%	31.25%	17,86%
4	*Jumlah WMK yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai (3000-5000 L)*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	1	2	2
	Jumlah WMK dalam lingkungan/kawasan berpotensi kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	1	2	2
	Jumlah Mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90%	-	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah mencapai 100%. Sedangkan pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran baru mencapai 96,79%. Jenis Pelayanan lain yang sudah mencapai 100% adalah terkait warga yang telah memperoleh informasi rawan bencana. Sedangkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih berada di 99,72%. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak mencapai target dikarenakan masih kurangnya personil aparatur.

Tabel 2.83

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	99,72
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96,79

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo, 2024.

2.1.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan sosial yang belum memadai, SDM yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Di sisi lain permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana membutuhkan penanganan secara serius. Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Data PPKS menurut kapanewon di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Jenis PPKS	Temon	Wates	Panjatan	Galur	Lendah	Sentolo	Pengasih	Kokap	Girimulyo	Nanggulan	Kalibawang	Samigaluh
1	Anak Balita Keluarga Miskin	9	2	4	9	0	6	32	0	0	2	0	0
2	Anak Keluarga Miskin	37	60	63	98	43	63	111	95	6	39	40	12
3	Lanjut Usia Miskin	279	319	226	328	310	437	624	349	85	129	157	65
4	Anak Jalanan	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tuna Susila	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Gelandangan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
7	Pengemis	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Pemulung	3	2	0	1	2	4	0	0	2	3	2	0
9	Korban Penyalahgunaan	2	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Korban Tindak Kekerasan	1	1	3	23	6	3	1	0	0	2	0	1
11	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1	2	0	17	2	0	0	0	0	2	0	0
12	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	12	50	98	86	10	20	46	19	10	31	58	12
13	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	106	180	195	201	195	159	173	61	59	76	62	49
14	Anak Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	3	3	2	0	2	11	0	0	0	1	0
	JUMLAH	**452**	**622**	**598**	**769**	**572**	**695**	**998**	**524**	**162**	**286**	**320**	**139**

Sumber data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemberdayaan sosial dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama (KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.85

Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2019-2023

No.	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Penerima (tahun)					Satuan
			2019	2020	2021	2022	2023	
a.		**Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**						
1	KABUPATEN	RTLH APBD	-	250	-	-	-	KK
		RTLH Mensos	-	-	-	-	-	KK
		RTLH BAZDA	32	23	-	-	-	KK
		RTLH APBDes	-	-	-	-	-	KK
		RTLH CSR/PNPM/dll	100	1	-	-	-	KK
		Bansos Lanjut Usia Terlantar (LUT)	719	-	-	-	263	Orang
		Bansos Balita	97	72	74	100	86	Orang
		Bansos Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	126	-	-	-	...	orang
		Bansos Yatim (kesra)	-	-	-	-	200	Anak
		Bansos Disabilitas Cacat Berat (CB)/ Cacat Sedang (CS)	193	-	-	-	...	Orang
		Bansos Psikotik	1	19	-	20	22	Orang
		Bansos Panti (23 panti)	1.054	528	789	703	131	Orang
		Permakanan Bencana APBD (Alam)	762	148	89	371	98	KK
		Pemakaman Bencana CBP	-	-	-	0	...	Orang
		Pemakaman Jenazah	4	7	5	3	...	orang
		Penderes	8	19	7	16	...	Orang
		BPNT APBD	-	4.633	4.184	4.364	4.400	KPM
		Bansos BTT Covid-19	-	10.039	-	-	-	KPM
		Droping Air	n.a	1.900	-	0	-	KK
2	DIY	Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	-	-	-	-	-	Orang
		Permakanan	-	-	-	-	-	Orang
		Kursi Roda	47	-	-		64	Orang
		Alat Bantu Lainnya	87	-	-		-	Orang
		RTLH PU	-	-	-	-	-	KK
		Droping Air	n.a	2.500	1.500	-	50	KK

No.	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Penerima (tahun)					Satuan
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	APBN	Asistensi Sosial Lanjut Usia (Atensi LU)	85	85	-	168	75	Orang
		Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Atensi PD)	-	-	-	53	448	Orang
		Asistensi LKS	-	-	-	-	131	Orang
		Asistensi Kunjungan DPR	-	-	-	-	78	Orang
		Program Rehabilitasi Sosial Anak (PROGRESA)	-	40	-	-	-	Orang
		Yatim Piatu	-	-	-	256	283	Orang
		Rastra/ BPNT/ Sembako	49.515	47.690	43.176	48.000	48.040	KPM
		Program Keluarga Harapan (PKH)	30.006	29.597	30.326	36.000	32.477	KPM
		Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	31	-	-	-	-	Orang
		Jumlah A	82.937	93.151	80.150	87.414	86.816	
b.		**Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial**						
1	KABUPATEN	Bansos Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1	-	20	-	-	Kelompok
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas	-	-	-	96	220	orang
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Penyandang Disabilitas	-	-	-	5	-	kelompok
2	DIY	Usaha Ekonomi Produktif Graduasi Program Keluarga Harapan (UEP Graduasi PKH)	179	-	178	199	-	Orang
		Bantuan pengembangan UEP PKH Graduasi Tahun 2018 di Tahun 2021 (pengembangan)	-	-	24	119	-	orang
		Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (UEP KTK PM)	-	-	-	-	-	
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) DIY Pengembangan	-	-	-	10	-	kelompok

No.	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Penerima (tahun)					Satuan
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	APBN	Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Terlantar (UEP LUT)	85	-	-	-	-	
		Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH)/Perkotaan	600	-	-	-	-	Orang
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) APBN L / DSM	200	-	-	-	-	orang
		Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) PERDESAAN	300	-	-	-	-	orang
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong	-	-	-	-	-	Orang
		Jumlah B	1.365	-	222	418	220	orang
		Jumlah Total A +B	84.302	93.151	80.372	87.832	87.056	Orang

Sumber data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa tahun 2023 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah tersalurkan kepada 87.056 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi maupun dari dana APBN.

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan bentuk program yang bervariasi. Pada tahun 2019, program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) berganti menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT), dan pada tahun 2021 berganti menjadi program bantuan sembako. Pada tahun 2023, program sembako ini telah menjangkau 48.040 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan untuk program keluarga harapan (PKH) telah menjangkau sebanyak 32.477 KPM.

Permasalahan sosial lainnya yang sulit diprediksi atau diperkirakan secara tepat seperti bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya, untuk itu diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana.

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang bertugas di Kulon Progo sebanyak 155 orang, dan yang dilakukan verifikasi pada tahun 2023 sebanyak 127 tagana yang aktif. Tagana adalah relawan yang membantu dalam mengevaluasi dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Dikarenakan kondisi geografis Kulon Progo yang merupakan perbukitan kapur dan wilayah dataran rendah yang rawan akan terjadinya bencana maka untuk bisa menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat apabila terjadi bencana dan berdampak kepada masyarakat maka bantuan bisa disalurkan melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Kawasan Siaga Bencana (KwSB) yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ada 11 KSB dan 4 KwSB di wilayah kabupaten Kulon Progo.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif- alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah Pekerja Sosial profesional dan atau TKSK dan atau relawan sosial yang tersedia dan aktif dari Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.86

Tingkat Keaktifan Pekerja Sosial Profesional/TKS/Relawan Sosial di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	PSKS	JUMLAH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	IPSM	15	15	15	211	293
2	Komda Lansia	-	-	-	21	21
3	TAGANA	155	155	155	155	127
4	KPK/TKSK	88	88	88	88	88
5	Pendamping dan Operator PKH	117	57	105	104	99
6	Fasilitator / Supervisor SLRT	94	91	82	88	
7	Pendamping ASLUT/ASODK	34	6	-	1	-
8	Tenaga Pelopor Perdamaian	10	10	10	10	8
9	Satgas Kesetiakawanan Sosial	20	20	20	-	-
10	Forum Panti	23	23	23	27	26
11	Forum WKSBM	30	30	30	16	16
12	Forum Orsos	22	17	16	10	-
13	Karang Taruna	31	31	54	54	101
14	LK3	1	1	1	1	1
15	Pendamping KUBE	20	20	20	4	-
16	Dunia Usaha	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**600**	**564**	**619**	**778**	**777**

Sumber data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2023 tingkat keaktifan Pekerja Sosial Profesional/ Relawan Sosial di kabupaten Kulon Progo sebanyak 777 orang. Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal itu dikarenakan PSKS Komda Lansia sudah tidak ada dan PSKS Dunia Usaha sudah berpindah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disamping juga karena keterbatasan anggaran pembinaan, ketentuan tentang hibah yang membatasi, serta dicabutnya beberapa alokasi anggaran APBN melalui Kemensos RI dalam pembinaan PSKS.

Pencapaian yang cukup memberikan harapan besar dalam penanganan PMKS adalah dengan telah diterapkannya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai Tahun 2018 dan Tahun 2019-2022 melanjutkan program tersebut. Dengan dilaksanakannya SLRT maka fasilitator yang ada di setiap kalurahan di Kabupaten Kulon Progo akan siap untuk menjangkau PMKS dan merujuknya ke berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial semakin membaik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kedisabilitasan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Salah satu permasalahan yang perlu penanganan segera adalah penemuan mayat tidak dikenal. Pada saat akan dimakamkan ada penolakan dari warga desa setempat dikarenakan jenazah tidak memiliki identitas dan dianggap bukan warga desa tersebut. Ke depan perlu ada kesepakatan dengan pemerintah kalurahan tentang kesediaan menerima jenazah tidak dikenal pada pemakaman di wilayahnya. Solusi jangka panjangnya perlu pengadaan pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) peningkatan sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pekerja sosial profesional, orsos, LSM, dan Karang Taruna untuk ikut serta dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial; (2) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kalurahan dalam rangka pengembangan model pelayanan sosial pada skala yang lebih besar hingga skala kapanewon dan kabupaten; (3) peningkatan cakupan dan pilihan media informasi yang dapat diakses masyarakat luas terutama penduduk miskin dan sosialisasi dan promosi pada dunia usaha di bidang media massa dalam rangka peningkatan dukungannya; dan (4) peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, LSM, dan anggota legislatif yang terkait dalam rangka peningkatan anggaran bidang kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan penanganan masalah-masalah sosial yang tidak diskriminatif.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) adapun Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.87

Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social diluar panti	100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

Sumber data: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024, peran perempuan dan laki laki di bidang ketenagakerjaan secara berurutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.88

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan
1	Petani/ pekebun	52.866	56.418	51.888	55.141	45.114	48.830	43.619	47.446	41.284	13.751
2	Wiraswasta	33.031	25.755	33.116	25.699	30.560	19.551	31.710	20.042	26.970	3.117
3	Karyawan swasta	28.785	22.639	29.979	23.609	28.556	20.706	24.605	20.042	22.234	1.716
4	Buruh harian lepas	12.485	4.446	13.083	4.526	12.174	4.184	11.387	3.978	11.678	984
5	Pegawai Negeri Sipil	4.633	3.454	4.504	3.488	4.256	3.538	3.793	3.359	3.773	472

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

Menurut data di atas, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini

memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG di kabupaten/kota se-DIY selama kurun waktu 5 tahun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.89

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	94.77	95,07	95,09	95,54	95,27
2.	Bantul	95.05	95,12	95,19	95,36	95,54
3.	Gunungkidul	95.18	84,73	85,31	85,82	85,93
4.	Sleman	84.62	96,20	96,25	96,36	96,40
5.	Kota Yogyakarta	96.04	98,16	98,32	98,48	98,47
6.	DIY	98.09	94,80	94,88	94,99	94,93

Sumber Data: BPS, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.90

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di DIY

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	71,68	71,45	71,41	72,27	71,68
2.	Bantul	65,29	64,78	65,27	65,03	70,35
3.	Gunung Kidul	75,34	75,53	76,7	77,93	77,3
4.	Sleman	80,4	81,25	81,31	81,65	79,94
5.	Kota Yogyakarta	71,06	71,05	73,18	75,5	75,7
6.	DIY	73,59	74,73	76,57	76,87	78,46

Sumber Data: BPS DIY, 2024

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kabupaten Kulon Progo yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2019 sampai 2023. Dari data di atas, terlihat bahwa IDG kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi. Meningkat di tahun 2022 namun kembali menurun di tahun 2023. Apabila dilihat dari data pilah gender di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023, terdapat 8 orang perempuan atau 20 persen yang menjadi anggota DPRD, sedangkan untuk jumlah ASN perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.291 orang atau 59,52 persen dari total ASN sebanyak 5.529 orang, untuk ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural terdapat 196 orang atau 42,79 persen dari total 458 orang ASN yang menduduki jabatan struktural, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2023
Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA	13	-	13
S1	17	8	25
S2	2	-	2
Jumlah	**32**	**8**	**40**

Sumber Data: BPS Kulon Progo, 2024

Tabel 2.92
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jabatan	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.363	3.274	4.637
Fungsional Umum	690	354	1.044
Struktural			
- Eselon IV	130	140	270
- Eselon III	99	52	151
- Eselon II	27	3	30
Jumlah	**2.238**	**3.291**	**6.132**

Sumber data: BKPP Kabupaten Kulon Progo, 2024

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang Tahun 2023 terdapat kasus 43 kasus kekerasan yang ditangani. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayaninya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama Tahun 2020-2023 seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.93

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023

Jenis Kasus	Jumlah Korban berdasarkan jenis layanan dari Jejaring PK2PA khusus untuk kasus baru			
	2020	2021	2022	2023
Perempuan	54	32	27	42
Anak	98	81	62	43
Jumlah Korban	152	113	89	85
KDRT	-	23	27	33

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sedangkan dilihat dari tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Korban Kekerasan terhadap Perempuan	54	54	32	27	42
2	Korban Kekerasan terhadap Anak	77	98	81	62	43
3	Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	131	152	113	89	85
4	Jumlah Kasus KDRT	51	26	23	27	33
	Jumlah Keluarga	**149.976**	**154.796**	**152.833**	**154.674**	**156.775**
	Persentase kasus KDRT (%)	**0,034**	**0,017**	**0,015**	**0,017**	**0,021**

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024 ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki tren menurun selama empat tahun terakhir. Namun kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami kenaikan menjadi 33 kasus.

Jenis kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 42 kasus naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 27 kasus sedangkan jenis kekerasan terhadap anak adalah 43 kasus turun dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 62 kasus. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2023 ada 33 kasus naik dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 27 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin menurun. Jumlah korban tersebut sebenarnya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melapornya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, perundungan atau bullying, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga

dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS DIY sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kulon Progo	1,80	3,71	3,69	2,80	2,40
2	Kab. Bantul	3,06	4,06	4,04	3,97	3,78
3	Kab. Gunung Kidul	1,92	2,16	2,20	2,08	2,09
4	Kab. Sleman	3,93	5,07	5,17	4,78	4,47
5	Kota Yogyakarta	4,80	9,16	9,13	7,18	6,07
	DIY	**3,35**	**4,57**	**4,46**	**4,06**	**3,69**
	Indonesia	**5,30**	**5,23**	**6,49**	**5,86**	**5,32**

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Kulon Progo kurun waktu tahun 2020-2023 dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2021 sedikit menurun dari 3,71 persen menjadi sebesar 3,69 persen dan tahun 2023 menjadi 2,40 persen. Angka 2,40 peren mengandung arti dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo terdapat sekitar 3 orang yang masuk kategori penganggur. Pada periode 2019–2023, TPT Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah TPT D.I Y dan TPT nasional,. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kabupaten Kulon Progo jauh dibawah TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional.

Penurunan pengangguran pada kurun waktu 2021 – 2023 disebabkan peningkatan investasi dan efek multiplier keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.96

Data Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk usia kerja	341.293	345.971	350.568	355.095	355.488
2	Angkatan kerja	261,216	269.426	268.964	279.905	269.268

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Penganggur	4.710	10.005	9.920	7.824	6.455

Sumber: BPS Sakernas 2019 – 2024 (diolah)

Tabel 2.97

Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kulon Progo	99,81	96,28	96,31	97,20	97,60
2	Kab. Bantul	96,89	95,93	95,95	96,03	96,22
3	Kab. Gunungkidul	98,08	97,84	97,37	97,92	97,91
4	Kab. Sleman	96,07	94,9	94,83	95,22	95,53
5	Kota Yogyakarta	95,19	90,84	90,87	92,82	99,75
6	Provinsi DIY	96,86	95,42	95,44	95,94	96,31

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2023 (diolah)

Setelah Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, persentase penduduk bekerja Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari 96,28 menjadi 97,60 pada tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota se DIY, rata-rata persentase penduduk bekerja di Kabupaten Kulon progo menempati urutan kedua setelah Kabupaten Gunungkidul yaitu 97,44 persen. Data angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Maksimum SD	78.658	81.318	70.764	88.355	73.595
2	SMP	50.448	45.639	49 919	57.166	49.229
3	SMA Umum	34.611	36.662	39 719	42150	42.333
4	SMA Kejuruan	60.886	62.684	69 227	68.124	78.357
5	Diploma	6.813	6.624	8 499	6.262	6.916
6	Universitas	21.550	23.705	30 836	17.848	18.838
	Jumlah	**256.632**	**269.426**	**268 964**	**279.905**	**269.268**

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2023 (diolah)

Dari tahun 2019-2022, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan maksimum SD masih mendominasi, namun tahun 2023 beralih pada lulusan SMA kejuruan. Hal ini menunjukkan bahwa bonus demografi angkatan kerja telah dialami di Kabupaten Kulon Progo. Dengan fenomena tersebut, perlu segera diambil langkah antisipasi agar tidak ada penambahan jumlah pengangguran, salah satunya dengan meningkatkan ketrampilan dan kompetensi lulusan SMA kejuruan serta memperkuat mental dan karakter agar siap menghadapi tantangan dan persaingan di dunia kerja dunia industri.

Tabel 2.99

Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Umur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	15 – 19	8.291	10.890	9.736	8.135	10.978
2	20 – 24	16.038	17.294	16.405	17.330	25.287
3	25 – 29	25.863	25.111	25.581	24.489	24.571
4	30 – 34	26.332	25.896	26.884	25.998	26.517
5	35 – 39	24.965	26.387	26.452	28.650	23.047
6	40 – 44	27.345	29.693	30.325	30.597	24.904
7	45 – 49	27.447	29.800	29.969	30.013	26.998
8	50 – 54	21.375	27.479	26.908	28.190	25.951
9	55 – 59	23.483	24.903	24.717	24.868	25.298
10	60 – 64+	46.611	49.581	51.973	61.635	55.717
	Jumlah	**252.966**	**256.632**	**269.420**	**279.905**	**269.268**

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2024

Angkatan kerja usia produktif yaitu berumur 25-54 tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kondisi pada tahun 2023 angkatan kerja usia produktif sebanyak 151.988 orang atau sebesar 56,44 persen dari keseluruhan golongan umur angkatan kerja dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang berjumlah 167.937 orang atau 60,00 persen. Jumlah angkatan kerja usia 60 tahun ke atas pada tahun 2023 sebesar 55.717 orang atau 20,69 persen, hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian penduduk di usia ini untuk tetap bekerja merupakan pilihan untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2.100

Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Lowongan Kerja	Pencaker	Penempatan	Penempatan Berdasarkan Lokasi			Rasio Penempatan terhadap Pencaker
				AKL (Lokal DIY)	AKAD (Antar Daerah)	AKAN (Antar Negara)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 4/3*
2019	14.873	4.028	3.231	2.281	407	543	0,80
2020	5.583	4.548	3.241	2.893	225	123	0,71
2021	7.348	4.676	3.242	3.065	177	-	0,69
2022	9.261	4.233	3.592	3.321	181	90	0,85
2023	8.823	4.268	3.458	3.115	94	249	0,81

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2022 (diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah lowongan kerja belum sepenuhnya bisa terpenuhi karena belum adanya *link and match* antara pencari kerja dan perusahaan. Salah satu Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mendorong lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud *link and match* antara *output* lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

Tabel 2.101

Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK>100	TK 50-99	TK 25-49	<25	<10	
2019	12	14	35	76	168	**305**
2020	22	14	36	76	166	**314**
2021	22	14	36	83	166	**321**
2022	22	20	36	83	166	**327**
2023	22	20	36	83	166	**327**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2024

Hubungan industrial diperlukan agar komunikasi antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja dapat terjalin dengan baik. Bagi tenaga kerja yang sudah memasuki dunia usaha harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu perlindungan tenaga kerja dalam dunia usaha adalah hubungan industrial karena masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan dengan konsekuen. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 2.102

Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	PP	PKB	SP/SB	Bia BIPARTIT	PHI/PHK	TK Korban PHK
2019	32	13	18	10	1	1
2020	29	14	18	10	1	6.127
2021	29	14	18	10	1	4
2022	35	16	15	11	1	114
2023	41	16	10	11	-	116

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023.

Tahun 2023 perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) meningkat sebanyak 6 perusahaan, juga perusahaan memiliki Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) berkurang 5 perusahaan dibanding tahun 2022 karena Serikat Pekerja (SP) tersebut belum memperbarui izin.

Tabel 2.103

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah pekerja (orang)	Kepesertaan BPJS (orang)	Persentase
2019	14.627	10.789	73,76%
2020	15.560	12.877	82,76%
2021	16.818	14.103	83,86%
2022	17.133	17.074	99,65%
2023	15.488	15.488	100%

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2023.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah bentuk perlindungan kepada pekerja. Dari tahun ke tahun kepesertaan BPJS ketenagakerjaan mengalami kenaikan, yaitu tahun 2019 persentase kepesertaan BPJS 73,76 persen pekerja, terdapat 8.444 yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, dari 17.133 pekerja di perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 17.074 pekerja.

Pada tahun 2023 persentase kepesertaan BPJS sudah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja meningkat. Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara produk domestik regionsl bruto (PDRB) atas harga berlaku dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Data produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104

Data Produktivitas Tenaga Kerja 2019-2023

Produktivitas	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kulon Progo	47,60	45,25	48,80	52,61	60,30
Kab. Bantul	46,86	44,67	49,23	51,85	58,66
Kab. Gunungkidul	42,87	48,62	44,52	50,15	54,39
Kab. Sleman	73,05	68,36	70,46	82,20	94,69
Kota Yogyakarta	157,38	159,15	161,80	171,54	219,71
DIY	66,07	64,96	67,05	73,94	84,45

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Target yang akan dicapai adalah pengurangan angka pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan produktivitas dengan mengadakan pelatihan ketrampilan baik yang dilakukan di UPT Balai Latihan Kerja maupun lainnya. Pelatihan dilakukan kepada pencari kerja juga tenaga kerja mandiri untuk melakukan diversifikasi usaha.

2.1.3.2.2 Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, dengan capaian pada Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.105

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr)	3.479	3.407	3.420	3.461	3.361

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	102,27	100,80	161,09	102,65	78
		Cadangan pangan pemerintah (ton)	4,5	4,55	4,55	14,55	24,22
		Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton)	1.631,5	1.780	2.537,50	2.602	2.650
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	91,52	91,52	91,45	91.52	91,55
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan(%)	100,59	100,66	99,38	99.43	99,44
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,60	92,60	92,82	92.1	92,53
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	70,59	100	98	98	98
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kalurahan)	36	36	0	0	0

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari 6 (enam) indikator kinerja urusan pangan di atas, ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu cadangan pangan yang dikelola pemerintah. Cadangan pangan ideal di Kulon Progo adalah sebesar 120 ton (berdasarkan Perda DIY nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Instruksi Gubernur nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota). Saat ini cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 24,22 ton beras.

Capaian ketersediaan energi sebesar 3.361 kkal/kap/hari, ini sudah jauh melampaui standar yaitu 2.100 kkal/kap/hari. Capaian ketersediaan protein mengalami kenaikan tahun 2022 menjadi 78 gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan protein (56 gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 mencapai 92,53, di atas standar nasional sebesar 90. Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada Tahun 2023 adalah 98. Dari 100 sampel produk sayuran dan pangan segar ada 2 sampel mengandung residu pestisida dan zat kimia.

Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2023 dilakukan fasilitasi/pendampingan desa rawan pangan agar tidak menjadi desa rawan pangan sehingga mulai tahun 2021, semua desa di Kulon Progo memiliki ketahanan pangan. Kondisi tahun 2023 tetap, tidak ada desa rawan pangan di Kulon Progo. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.106

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019–2023

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
1.	Temon	0	0	0	0	0	
2.	Wates	0	0	0	0	0	

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
3.	Panjatan	0	0	0	0	0	
4.	Galur	0	0	0	0	0	
5.	Lendah	0	0	0	0	0	
6.	Sentolo	0	0	0	0	0	
7.	Pengasih	0	0	0	0	0	
8.	Kokap	1	1	0	0	0	2020 : Kalirejo
9.	Girimulyo	0	0	0	0	0	
10.	Nanggulan	0	0	0	0	0	
11.	Kalibawang	0	0	0	0	0	
12.	Samigaluh	2	2	0	0	0	2020 : Banjarsari, Kebonharjo
	Jumlah	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemerintah melakukan intervensi dengan kegiatan pemberdayaan rawan pangan melalui aksi Desa Mandiri Pangan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat menuju ketahanan pangan. Intervensi terutama dilakukan di 10 desa yang merupakan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kulon Progo. Desa-desa tersebut adalah Sendangsari, dan Sidomulyo di Kapanewon Pengasih; Desa Demangrejo dan Kaliagung di Sentolo; Desa Kebonharjo, Purwoharjo dan Banjarsari di Samigaluh; serta Desa Kalirejo, Hargotirto dan Hargowilis di Kapanewon Kokap.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, diantaranya melalui fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan bantuan kepada 2 kelompok tani/ kelompok lumbung berupa bantuan gabah untuk mengisi lumbung mereka. Masing – masing kelompok mendapatkan 1,5 ton gabah kering giling (GKG). Gabah ini selanjutnya dikelola oleh kelompok agar dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok di saat mereka belum panen padi. Kelompok penerima adalah KT Marsudi Mulyo, Menggungan, Tawangsari, Pengasih dan KWT Langgeng Makmur, Botokan, Jatirejo, Lendah. Selain itu ada fasilitasi pemberdayaan pekarangan untuk KWT (Kelompok Wanita Tani). Tahun 2023, ada alokasi sebanyak 17 kegiatan pemberdayaan pekarangan untuk 17 KWT di Kulon Progo. Fasiilitasi kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten, APBD DIY, Dana keistimewaan dan juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Kementerian Pertanian. KWT penerima fasilitasi Lumbung Mataraman diharapkan mampu menghasilkan panenan dari pekarangan dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih, dengan harapan setelah panenan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, kelebihan dari hasil panen dapat di pasarkan melalui pasar tani. Berbagai produk pangan segar maupun pangan olahan dipasarkan di pasar tani yang dilaksanakan di wilayah masing-masing baik secara gabungan beberapa KWT maupun sendiri-sendiri yang umumnya dilaksanakan di akhir pekan.

KWT penerima fasilitasi Lumbung Mataraman juga memperoleh fasilitas pelatihan. Pelatihan dilaksanakan di lokasi masing-masing KWT dengan peserta adalah seluruh anggota KWT. Materi pelatihan diantaranya Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kulon Progo, Teknis Persemaian dan

Budidaya Tanaman di Pekarangan, Hama dan Penyakit Tanaman serta cara pengendaliannya, Teknik Pemeliharaan Ayam Kampung.

Program penyuluhan pertanian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2019 - 2023 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.107

Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No.	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok tani	1.410	1.469	1.506	1.542	1.584	1.590	1616
a.	Kelas Pemula	171	179	192	189	177	134	148
b.	Kelas Lanjut	483	482	480	490	528	477	493
c.	Kelas Madya	654	684	715	735	743	824	820
d.	Kelas Utama	102	124	119	128	136	155	155
2.a.	Jumlah petani/buruh tani	139.228	139.785	138.922	139.710	139.710	141,919	142,619
b.	Jumlah keanggotaan dlm kelompok tani	72.800	73.183	74.189	76.516	76.560	78,725	79,425
c.	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani (%)	63,27	52,29	52,26	53,4	54,79	55,47	55,69

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah kelompok tani pada tiap kelasnya. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 jumlah kelompok tani mengalami fluktuasi dikarenakan adanya penumbuhan kelompok baru dan kenaikan kelas kelompok. Di sisi lain, banyak penumbuhan kelompok tani baru, terutama kelompok wanita tani (KWT). Sehingga di tahun 2023, jumlah kelompok tani mengalami peningkatan dari 1.590 di 2022 menjadi 1.616 di 2023.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem.Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.108

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi-padian	21,5	21,5	21,6	20,3	21,30

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.	Umbi-umbian	1,8	1,8	1,9	2,5	1,90
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,00
4.	Minyak dan Lemak	3,0	3,0	3,0	3,0	3,93
5.	Buah/Biji Berminyak	0,8	0,8	0,9	0,9	0,96
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,00
7.	Gula	1,5	1,5	1,5	1,5	1,44
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0	30,0	30,00
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Total	**92,6**	**92,6**	**92,82**	**92,1**	**93,53**

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (*dietary score*)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Melihat skor pangan harapan kabupaten Kulon Progo menunjukan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum mencapai angka standar 100. Tahun 2023 ini, skor PPH mencapai 93,53 Faktor pendorong tercapainya PPH adalah: kegiatan sosialisasi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) di setiap pertemuan kelompok wanita tani, dengan harapan anggota KWT (ibu-ibu) bisa mengimplementasikan menu - menu B2SA di keluarga mereka. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak – anak dan remaja kurang menyukai menu - menu sesuai Isi Piringku (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman - B2SA) dan banyak yang menyukai menu siap saji yang nutrisinya kurang lengkap.

2.1.3.2.3 Pertanahan

Sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pertanahan terutama terkait dengan administrasi pertanahan baik di tingkat nasional, regional dan sektoral sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Capaian kinerja layanan urusan pertanahan dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Jumlah lahan bersertifikat terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan capaian 78,05% menjadi 96,89% di tahun 2023. Selanjutnya, cakupan jumlah aset Pemda yang bersertifikat terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 27,60% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 45,54%. Asset Pemda yang belum bersertifikat sebagian besar berupa jalan dan daerah/saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Tabel 2.109

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lahan bersertifikat	ha	45.766	46.755	50.756	53.806	56.806
2	Jumlah lahan yang seharusnya bersertifikat	ha	58.628	58.628	58.628	58.628	58.628
3	Persentase lahan bersertifikat	%	78,05	79,75	86,57	91,78	96,89
4	Jumlah aset Pemda bersertifikat	bidang	263	279	299	324	434

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah aset Pemda yang seharusnya bersertifikat	bidang	953	953	953	953	953
6	Persentase lahan Pemda bersertifikat	%	27,60	29,28	31,37	34,00	45,54

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Urusan pertanahan merupakan salah satu unsur keistimewaan yang membedakan Pemda DIY dengan Provinsi yang lain, yaitu pada status kepemilikan tanahnya. Selain tanah milik masyarakat dan tanah Negara, terdapat tiga status kepemilikan tanah lainnya yaitu tanah Kasultanan (*Sultan Ground*), tanah Kadipaten (*Paku Alam Ground*) dan tanah Kalurahan. Menurut Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan disebutkan bahwa Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Sebaran dan status kepastian hukum tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Kalurahan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110

Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan (bidang)		Tanah Kadipaten (bidang)		Tanah Desa (bidang)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
1	Temon	-	-	36	25	405	32
2	Wates	-	-	110	10	194	32
3	Pengasih	121	189	-	-	370	65
4	Lendah	112	26	-	-	212	4
5	Nanggulan	102	11	-	-	408	77
6	Kokap	92	8	-	-	183	68
7	Kalibawang	205	47	-	-	279	40
8	Girimulyo	254	51	-	-	127	200
9	Samigaluh	305	139	-	-	334	48
10	Sentolo	137	27	-	-	369	11
11	Panjatan	-	-	88	13	225	12
12	Galur	-	-	368	104	319	17
Total Kabupaten		**1.328**	**498**	**602**	**152**	**3.425**	**606**
		1.826		**754**		**4.051**	

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024
Keterangan : SS: Sudah Bersertifikat; BS: Belum Bersertifikat

Tanah Kasultanan banyak tersebar di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo, sedangkan tanah Kadipaten tersebar di wilayah selatan antara lain meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Apabila dilihat berdasarkan status kepastian hukumnya, baik tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa masih belum semua bidang tanah bersertifikat sampai dengan tahun 2023. Maka, dalam rangka menjamin kepastian hukum dari tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Kalurahan, Pemerintah DIY melalui Dana Keistimewaan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk percepatan pendaftaran atau pengurusan sertifikat tanah – tanah tersebut.

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kulitas air dihitung berdasarkan parameter Derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Padatan tersuspensi total (TSS), Nitrat (NO3-N), Total fosfat (T-Phosphat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Sampel kualitas air diambil pada 9 titik sungai yaitu 1) Sungai Serang, 2) Sungai Papah, 3) Sungai Papak, 4) Sungai Sudu, 5) Sungai Nagung, 6) Sungai Tedunan/Gede, 7) Sungai Tinalah, 8) Sungai Ngrancah, dan 9) Sungai Pening. Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO2 dan NO2 yang diambil di kawasan perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Dalam perkembangannya perhitungan IKLH terus mengalami penyempurnaan. Pada tahun 2009-2011 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Pada tahun 2012-2014 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu

hijau *(green issues)* dan isu coklat *(brown issues)*. Isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2016-2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodelogi perhitungan IKA. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodelogi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat perubahan parameter ukur dan kategori indeks sesuai peringkat nilai. Pada peraturan tersebut terdapat kebijakan baru yang menjadikan jumlah parameter penilaian pada tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya.

IKLH tahun 2018-2022 dihitung berdasarkan : (1) data hasil pemantauan kualitas air pada Sungai Serang dengan 7 parameter; (2) pemantauan kualitas udara pada kawasan transportasi, permukiman, industri dan perkantoran; dan (3) data hasil analisis secara spasial tutupan lahan/hutan dan data tabular ruang terbuka hijau.

Perhitungan target dan realisasi IKLH tahun 2023 berbeda dengan perhitungan IKLH tahun 2022.Perhitungan IKLH tahun 2022 masih menggunakan formulasi/rumus lama, IKA dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Serang dengan 7 parameter, IKU diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara di 4 lokasi yaitu kawasan permukiman, transportasi, industri dan perkantoran. Sedangkan perhitungan IKLH tahun 2023 dihitung menggunakan formulasi / rumus baru, nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air pada 9 sungai dengan 8 parameter, IKU diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara di 13 lokasi. IKL dihitung menggunakan data spasial / peta deliniasi.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan formulasi sebagai berikut:

IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)

Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beserta angka indeks dari ketiga parameter IKLH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.111

IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
1.	2019	40	93,17	66,11	66,40
2.	2020	38,33	92,91	74,10	69,01
3.	2021	38	92,15	73,32	68,69
4.	2022	36	91,30	69,55	66,01
5.	2023*)	50,61	90,74	53,51	67,50

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

*) Perhitungan IKLH Tahun 2023 menggunakan formulasi/rumus baru

Sedangkan capaian IKLH Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target RPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.112

Capaian IKLH Tahun 2023

Indikator	Target	Capaian	Persentase
Indeks Kualitas Air (IKA)	35,00	50,61	144,6
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,00	90,74	104,3
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,56	53,51	82,88
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,53	67,50	107,95

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

Capaian IKLH Tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKLH sudah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor pendorong tercapainya IKLH adalah nilai realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang memenuhi target.

Persentase capaian Indeks Kualitas Air tahun 2023 yaitu 50,61 (nilai kategori 'Sedang'). Pemantauan kualitas air sungai untuk penentuan IKA dilakukan sebanyak 2 (dua) periode yang menggambarkan musim penghujan (bulan Maret) dan musim kemarau (bulan September). Akan tetapi pemantauan pada bulan September 2023 masih berada pada musim kemarau dikarenakan adanya pergeseran musim pada tahun 2023. Musim kemarau membuat air sungai tidak tercampur dengan sedimen sehingga membuat air lebih jernih.Debit air yang menurun pada musim kemarau membuat air sungai menjadi lebih pelan dan mencegah bercampurnya air dengan sedimen.. Lokasi pemantauan di 9 (sembilan) lokasi yaitu : Sungai Serang, Sungai Papah, Sungai Papak, Sungai Sudu, Sungai Nagung, Sungai Tedunan/Gede, Sungai Tinalah, Sungai Ngrancah, dan Sungai Pening. Parameter yang diuji ada 8 (delapan) yaitu : pH, DO, TSS, Total Phosphat, Nitrat, COD, BODs, dan Fecal Coliform.

Realisasi atau capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2023 yaitu 90,74 (kategori "sangat baik"). Lokasi pemantauan kualitas udara berada di 13 lokasi yaitu DLH Kabupaten Kulon Progo, Perumahan Kasatriyan Giripeni, sekitar PT. Aneka Sinendo Sentolo, Kantor Cabang BRI Karangnongko, Perumahan Gondangdia Margosari, Kawasan Peruntukan Industri Tuksono, Perempatan Ngeplang Sentolo, Pertigaan Brosot, Jalan Ngentakrejo Lendah, Jalan Plono, Perempatan Dekso Kalibawang, Perempatan Kenteng Nanggulan, Jalan sekitar Kiskendo Jatimulyo.

Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu aspek untuk mengukur nilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Perhitungan IKU Kabupaten Kulon Progo menggunakan 2 parameter yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang mnggunakan bahan bakar bensin sedangkan SO2 mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Realisasi IKL (Indeks Kualitas Lahan) belum memenuhi target yang ditetapkan (capaiannya 82,88%).Hal ini disebabkan karena data Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diinput adalah data yang sudah dideliniasi oleh DPTR Kabupaten Kulon Progo. Karena keterbatasan dalam kemampuan mendeliniasi sehingga data yang diperoleh juga terbatas (belum menggambarkan kondisi tutupan lahan yang sebenarnya yang kemungkinan lebih besar dari datanya).

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Demikian juga setiap

usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo akan menimbulkan masalah lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Untuk meminimalkan dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan UKL/UPL juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan atau kegiatan/ pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungannya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan / atau kegiatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan pengawasan langsung dilakukan oleh personil DLH yang mendatangi langsung lokasi usaha/ kegiatan, sedangkan kegiatan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan dokumen maupun pengawasan yang dilakukan bersama dengan OPD lain.

Selain melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan juga dilaksanakan penanganan kasus lingkungan yang merupakan laporan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan tersebut. Pada Tahun 2023 terdapat 10 laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya timbulan sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya pengurangan sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan pengurangan sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan sumber daya alam dalam pengelolaan sampah dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi pengelolaan sampah, pelatihan pengolahan sampah dengan budidaya maggot, Gropyok Sampah dan Grebeg Sampah yang didanai oleh Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023. Selain itu pemerintah daerah mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah di setiap desa, dan kepada pelaku usaha dihimbau menerapkan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor. 510/4022 Tahun 2020. Tabel berikut ini merupakan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan pengelolaan sampah.

Tabel 2.113

Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

No.	Kapanewon	2021		2022		2023	
		Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
1	Temon	1	-	5	-	6	1
2	Wates	13	4	16	5	17	5
3	Panjatan	21	-	21	-	22	
4	Galur	1	1	3	1	3	1
5	Lendah	3	-	5	-	5	
6	Sentolo	9	2	13	2	13	3
7	Pengasih	28	1	29	1	29	1
8	Kokap	6	-	7	-	7	
9	Girimulyo	5	-	5	-	5	
10	Nanggulan	6	2	7	2	7	2
11	Kalibawang	6	-	6	-	6	
12	Samigaluh	2	1	6	1	6	1
	JUMLAH	**101**	**11**	**123**	**12**	**126**	**14**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

Jumlah kelompok masyarakat pengolah sampah sebagaimana tabel di atas selama periode 2021-2023 terus mengalami peningkatan, bank sampah yang semula 101 unit pada Tahun 2021 bertambah menjadi 123 pada Tahun 2022 dan bertambah lagi menjadi 126 pada tahun 2023. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari 11 unit pada Tahun 2021 bertambah menjadi 15 pada Tahun 2022 namun pada tahun 2023 berkurang menjadi 14 unit. Dengan kondisi tersebut perlu terus dilakukan upaya untuk mendorong agar kelompok-kelompok pengolah sampah dapat aktif dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok pengolah sampah di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/pelatihan bidang lingkungan hidup kepada bank sampah, sekolah, perumahan, perkantoran, dan puskesmas baik oleh pemerintah maupun diinisiasi oleh masyarakat.

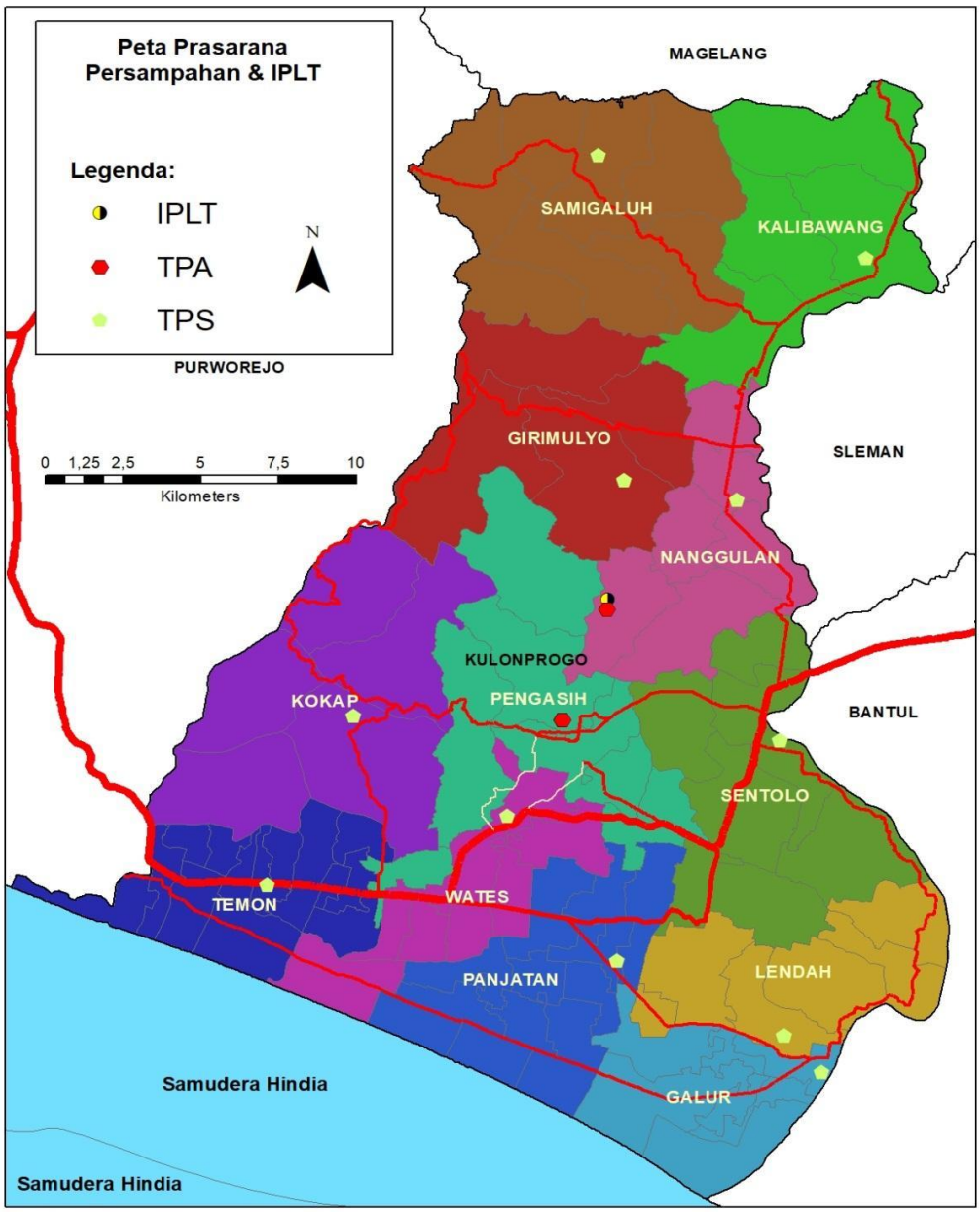
Pelayanan persampahan di Kabupaten Kulon Progo sudah mencakup semua Kapanewon dengan luas area pelayanan 233,6 km2 atau 39,84% dari luas area kabupaten 586,3 km2. Artinya pelayanan persampahan telah mencakup semua kapanewon namun luas area pelayanan tidak sesuai dengan luas Kabupaten Kulon Progo. Belum semua kalurahan di Kabupaten Kulon Progo terjangkau oleh pelayanan persampahan, pelayanan masih terbatas pada wilayah perkotaan di tiap kapanewon. Pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo berasal dari berbagai sumber sampah. Sumber sampah yang terlayani meliputi kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan komersial, industri, rumah makan, rumah sakit, sekolah, pasar, terminal, taman publik dan jalan umum.

Berdasarkan hasil evaluasi jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 jumlah timbulan sampah sebesar 80.033,09 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah

sampah yang terkelola sebesar 37.008,07 ton/tahun atau 46,24% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 24.843,80 ton/tahun atau 31,04 % dan Penanganan Sampah sebesar 12.164,27 ton/tahun atau 15,2 %. Data tersebut sesuai dengan Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo yang telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penanganan akhir sampah di Kabupaten Kulon Progo dilakukan di TPA Banyuroto. Untuk mengoptimalkan operasional TPA Banyuroto dilakukan dengan membangun Instalasi Pemrosesan akhir sampah selain landfill, yaitu pembangunan instalasi pengolahan sampah termal. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan persampahan komprehensif yang telah disusun pada tahun 2022. Berdasarkan dokumen tersebut wilayah pelayanan persampahan Kulon Progo tidak lagi terbagi menjadi wilayah aerotropolis dan non aerotropolis namun menjadi satu kesatuan layanan. Berdasarkan hasil kajian tersebut direncanakan dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Kawasan TPA Banyuroto yang melayani seluruh wilayah Kulon Progo. Berdasarkan dokumen tersebut kebutuhan lahan TPA di banyuroto meningkat pesat hingga 22 hektar sampai tahun 2043 apabila pelayanan persampahan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya kebutuhan lahan di TPA adalah dengan optimalisasi pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, optimalisasi pemilahan sampah di TPS/TPS3R sehingga sampah yang dikirim ke TPA hanya tinggal residu saja yang berkisar 20% dari timbulan sampah di sumber sampah. Pengembangan TPS3R agar mampu mengolah sampah hingga residunya juga perlu terus dilakukan. Residu Sampah dari TPS3R diharapkan tidak dikirim ke TPA sehingga beban pemrosesan akhir TPA dapat berkurang signifikan.



Gambar 2.34
Peta Prasarana Persampahan dan IPLT Kabupaten Kulon Progo

Pertambahan penduduk yang pesat serta perubahan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat dan beragam jenisnya. Timbulan sampah yang tidak terangkut atau tidak segera ditangani akan menyebabkan bau yang tidak sedap, kotor dan mengganggu pemandangan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit. Telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat yakni menghendaki kualitas lingkungan yang sehat, namun di lain pihak tidak mau berkompromi apabila lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan lahan pengolahan sampah. Ini yang sering dikenal sebagai NIMBY (*not in my backyard*) *syndrome*. Keadaan ini jika tidak ditangani secara memadai, dapat menimbulkan gangguan dan kerugian pada lingkungan yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat (*public health*). Selain pertumbuhan alami, adanya berbagai kegiatan strategis di Kulon Progo seperti bandara dan

pengembangan kawasan industri akan semakin meningkatkan timbulan sampah yang harus ditangani. Sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan pemrosesan sampah pada segmen hulu dengan upaya mengurangi sampah, mengembangkan bank sampah, pembangunan TPS 3R di setiap kawasan serta TPST pada kawasan strategis. Upaya ini akan membantu dalam mengurangi timbulan sampah dan dampaknya secara luas kepada masyarakat. Struktur sarana persampahan sebagaimana tergambar pada gambar di atas.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo terbagi di 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Lingkungan Hidup terkait pengurangan sampah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai kewenangan penanganan sampah. Telah terdapat Komitmen bersama antar perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah. Pengelolaan persampahan terintegrasi dari hulu-hilir dilaksanakan secara kolaboratif melalui program/kegiatan pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, meliputi intervensi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, di masyarakat/sekolah, di KSM Pengelola TPS 3R dan di TPA Banyuroto.

Pada tahun 2024 sedang dilaksankaan pembahasan Raperda Kelembagaan, salah satu yang dibahas adalah penggabungan UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2024 terdapat 4 lokus TPS 3R di Perkotaan Wates yang menjadi pilot project pengelolaan sampah, harapannya di 4 lokasi TPS 3R ini sampah sudah selesai tertangani dan hanya benar-benar residu yang masuk ke TPA Banyuroto. Sedangkan di TPA Banyuroto pada tahun ini juga dibangun tempat pemrosesan sampah thermal berupa hanggar beserta peralatannya yaitu mesin pilah dan insenerator. Upaya-upaya pengadaan peralatan baik di TPS 3R maupun di TPA Banyuroto dibarengi upaya-upaya pengingkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009). Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya pihak-pihak yang saling terkait untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta, karena masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prestasi yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.114

Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Nama	Prestasi	Institusi Pemberi Penghargaan
1	DLH Kulon Progo	Juara I PPID Award Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Kategori Setda/ Setwan/ Dinas/ Badan	Bupati Kulon Progo
2	SD Negeri 1 Sentolo	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
3	SD Negeri Mejing Kalibawang	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
4	SD Negeri Kalirejo Samigaluh	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
5	SD Muhammadiyah Wonopeti Galur	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
6	SD Negeri 2 Kanoman Panjatan	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
7	SD Negeri Ngentakrejo Lendah	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
8	SD Negeri Semen Sentolo	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
9	SD Negeri Giripeni Wates	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
10	SD Negeri Kembang Nanggulan	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
11	MTs N 1 Kulon Progo	Sekolah Adiwiyata Kategori SMP/Mts sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
12	SMP Negeri 2 Samigaluh	Sekolah Adiwiyata Kategori SMP/Mts sederajat Tingkat Kabupaten	Bupati Kulon Progo
13	SD N Kranggan Galur	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat DIY	Gubernur DIY
14	SD N 2 Giripurwo Girimulyo	Sekolah Adiwiyata Kategori SD/MI sederajat Tingkat DIY	Gubernur DIY
15	SMP N 1 Pengasih	Sekolah Adiwiyata Kategori SMP/Mts sederajat Tingkat DIY	Gubernur DIY
16	MAN 3 Kulon Progo	Sekolah Adiwiyata Kategori SMA/MA/SMK sederajat Tingkat DIY	Gubernur DIY
17	SMA N 1 Sentolo	Sekolah Adiwiyata Kategori SMA/MA/SMK sederajat Tingkat DIY	Gubernur DIY
18	SD N Kalimenur	Sekolah Adiwiyata Kategori SMP/Mts sederajat Tingkat Nasional	Kementerian LHK RI
19	MTS 2 Kulon Progo	Sekolah Adiwiyata Kategori SMP/Mts sederajat Tingkat Nasional	Kementerian LHK RI
20	Kota Wates	Penghargaan Adipura kategori Kota Kecil	Presiden RI

Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2023

2.1.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan akurasi data, mulai tahun 2014 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program KTP-el. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat. Pada tahun 2021 rasio penduduk berKTP mencapai 98,43, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah perekaman tidak dapat dilaksanakan

secara maksimal. Pada tahun 2022, rasio penduduk ber KTP meningkat menjadi 98,8% seiring menurunnya dampak pandemi Covid-19 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 99,32%. Data jumlah penduduk ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	**Rasio penduduk ber KTP per satuan wajib KTP**	**99,06**	**98,43**	**98,8**	**99,32**
	a. Jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah ber KTP	342.819	337.272	338.560	342.125
	b. Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	346.076	342.669	342.669	344.474

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

Layanan pencatatan sipil adalah layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, dan pengesahan pengakuan anak. Layanan ini merupakan upaya melakukan tertib administrasi untuk pengakuan kewarganegaraan. Indikator layanan catatan sipil dapat dilihat dari 2 indikator yaitu: rasio bayi berakte dan rasio perkawinan berakte nikah. Rasio bayi berakte dari tahun 2018 sampai dengan 2022 secara umum menunjukkan peningkatan yaitu dari 98,25% pada tahun 2018 meningkat menjadi 98,51% pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 sudah mencapai 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116

Layanan Catatan Sipil Tahun 2019–2023

Pelayanan Akta Catatan Sipil	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
Rasio bayi berakte	**99,22**	**98,51**	**93,88**	**100**	**100**	**Persen**
a. Jml bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran	4.835	4.944	4.539	5.594	5.446	Orang
b. Jml keseluruhan bayi lahir	4.873	5.019	4.835	5.594	5.446	Orang
Rasio perkawinan berakte nikah	**94,52**	**93,65**	**92,23**	**94,27**	**95,67**	**Persen**
a. Jumlah pasangan nikah berakte nikah	143	125	248	152	110	Pasangan
b. Jumlah pasangan nikah bersurat nikah	2.465	1.843	2.942	2.503	2.432	Pasangan
c. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	2.608	1.968	3.190	2.655	2.542	Pasangan
d. Akta Perceraian	18	21	25	18	13	Pasangan
e. Akta Kematian	8.012	6.633	8.132	5.119	4.476	Orang
f. Pengakuan dan pengesahan anak	3	3	2	9	3	Orang
g. Pengangkatan Anak	10	8	12	17	15	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan. Pemerintah Desa dituntut lebih

profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117

Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa) dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Jenis Bantuan	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Alokasi Dana Desa	74.760.286.000	67.991.810.496	67.381.014.000	66.905.865.901	68.437.004.702
Bagi hasil pajak dan retribusi	11.362.633.000	7.440.234.929	9.628.009.533	11.778.750.925	10.341.727.086
Jumlah	**86.122.919.000**	**75.432.045.425**	**77.009.023.533**	**78.684.616.826**	**78.778.731.788**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada kalurahan berupa alokasi dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2019 akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021 karena refocusing alokasi untuk penanganan Covid-19 dan kembali naik pada tahun 2022 dan 2023. Bagi hasil pajak dan retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Pada tahun 2023, bagi hasil pajak dan retribusi mengalami penurunan, sedangkan Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan.

Sarana prasarana perkantoran kalurahan sangat mendukung dalam kelancaran menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat. Belum semua kondisi gedung kantor kalurahan dalam kondisi baik. Kondisi gedung kantor kalurahan dapat diketahui dalam tabel berikut.

Tabel 2.118

Kondisi Kantor Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon	Tahun 2023		
		Baik	Sedang	Rusak ringan
1	Temon	9	6	0
2	Wates	5	1	1
3	Panjatan	6	4	1
4	Galur	5	2	0
5	Lendah	5	1	0
6	Sentolo	6	2	0
7	Pengasih	5	2	0
8	Kokap	4	1	0
9	Girimulyo	4	0	0
10	Nanggulan	3	1	2

No.	Kapanewon	Tahun 2023		
		Baik	Sedang	Rusak ringan
11	Samigaluh	5	1	1
12	Kalibawang	3	0	1
	Jumlah	**60**	**21**	**6**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi kantor kalurahan pada tahun 2023 yang baik ada 60, kondisi sedang ada 21 dan kondisi gedung kantor kalurahan rusak ringan ada 6 kalurahan. Ditetapkannya Perda dan Perbup sebagai dasar menjalankan pemerintahan kalurahan belum mampu mengoptimalkan kinerja pemerintahan kalurahan. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang dilakukan oleh aparat pengawasan kabupaten. Hasil pelaksanaan pengawasan tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.119

Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan

Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	Jenis Obyek Pemeriksaan	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
1.	2019	Jumlah Rekomendasi	426
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	105
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
2.	2020	Jumlah Temuan	297
		Jumlah Rekomendasi	426
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	105
3.	2021	Jumlah Temuan	122
		Jumlah Rekomendasi	80
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	138
4.	2022	Jumlah Temuan	70
		Jumlah Rekomendasi	126
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
5.	2023	Jumlah Temuan	87
		Jumlah Rekomendasi	143
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan Laporan Hasil Review (LHR) masih terdapat banyak temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kalurahan. Untuk tahun 2023 cenderung naik dibandingkan tahun 2022. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dilaksanakan bekerjasama dengan TNI bertujuan untuk melakukan pembangunan desa secara terpadu antara TNI, aparat pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujud kemanunggalan TNI dengan masyarakat, terpenuhinya sarana prasarana desa serta terjaganya stabilitas keamanan di masyarakat. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa

(TMMD) Reguler Ke-117 dilaksanakan di Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (Sengkuyung) tahun 2023 tahap I dilaksanakan di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap tahap III di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo. Kegiatan Karya Bakti TNI dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh. Dari pelaksanaan Karya Bakti TNI ini partisipasi masyarakat dan swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat juga cukup tinggi namun pada tahun 2022 tercatat menurun dan kembali naik di tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Dana (Rp.)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dana Program					
	TMMD	675.000.000	1.525.000.000	875.000.000	875.000.000	1.835.000.000
2.	Swadaya					
	TMMD	247.080.000	957.010.000	514.388.500	331.200.000	880.775.000
3.	Persentase Swadaya Masyarakat	36,55%	62,75%	58,78%	37,85%	47,99%

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat dari tahun ke tahun meningkat, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan karena pandemi Covid 19.

Lembaga ekonomi kalurahan yang mempunyai peran dalam menggiatkan perekonomian kalurahan adalah pasar desa. Pengelolaan pasar desa ini terus dilakukan pembinaan agar keberadaannya juga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kalurahan. Pasar desa yang telah mendapat pembinaan dan jumlah lembaga ekonomi kalurahan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121

Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2020-2023

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah BUMDes kondisi baik	51	57	52	55	53	52	56	56
2	Jumlah BUMDes seluruhnya	87	87	87	87	87	87	87	87
3	Pasar desa Kondisi baik	22	22	22	23	23	23	22	23
4	Pasar desa Seluruhnya	31	32	32	32	32	31	31	31

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data sementara tahun 2024

Tabel 2.122

Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon		Kalurahan	Nama Pasar	Luas (m^2)	Jml Pedagang (orang)	Kondisi
1	Temon	1	Temon Kulon	Kaligondang	498	75	kurang
		2	Kulur	Cikli	1000	68	Baik
		3	Glagah	Glagah	500	80	kurang
2	Panjatan	4	Krembangan	Krembangan	3150	25	Baik
		5	Panjatan	Panjatan	323	34	Baik
3	Lendah	6	Gulurejo	Gegulu	1.500	7	kurang
4	Sentolo	7	Tuksono	Nyonyol	2.520	186	Baik
		8	Srikayangan	Panjul	300	16	Kurang
		9	Salamrejo	Watuombo	1.400	90	Baik
		10	Sentolo	Sentolo	5000	300	Baik
5	Pengasih	11	Kedungsari	Milir	1.588	90	Baik
		12	Margosari	Gunung Gondang	1306	44	Baik
		13	Sendangsari	Sanur	3.175	12	Baik
6	Kokap	14	Hargorejo	Kokap	1.700	95	Baik
		15	Hargorejo	Sidodadi	700	15	Kurang
		16	Kalirejo	Gunung Ijo	1455	0	off
7	Girimulyo	17	Jatimulyo	Cublak	1.000	57	Baik
		18	Jatimulyo	Jonggrangan	1.000	57	Baik
		19	Jatimulyo	Pringtali	1.000	32	Kurang
8	Nanggulan	20	Donomulyo	Mudal	2894	166	Baik
		21	Kembang	Kembang	2899	28	Baik
		22	Wijimulyo	Krambilan	850	200	Kurang
		23	Banyuroto	Gunung Gamping	1.000	82	Baik
9	Samigaluh	24	Banjarsari	Tuk Bujel	675	22	Baik
		25	Banjarsari	Bendo	1162	25	Baik
		26	Sidoharjo	Munggang Rejo	700	23	Baik
		27	Pagerharjo	Plono	1.600	200	Baik
10	Kalibawang	28	Banjararum	Degan	400	50	Baik
		29	Banjarasri	Boro	1.200	57	Baik
		30	Banjarharjo	Demangan	200	40	Baik
		31	Banjaroyo	Jagalan II	4000	83	Baik

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data sementara tahun 2024

Pembinaan BUMDes Tahun 2020 dititikberatkan pada penyempurnaan badan hukum BUMDes, kelembagaan/pengurus, pengelolaan keuangannya. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dititik beratkan pada pengelolaan usaha nya dengan mendorong BUMDes membuka usaha baru non jasa keuangan, dengan cara memfasilitasi permohonan proposal ke Kementrian maupun kerjasama dengan pihak lain. Jumlah BUMDes yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.123

BUMDes se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

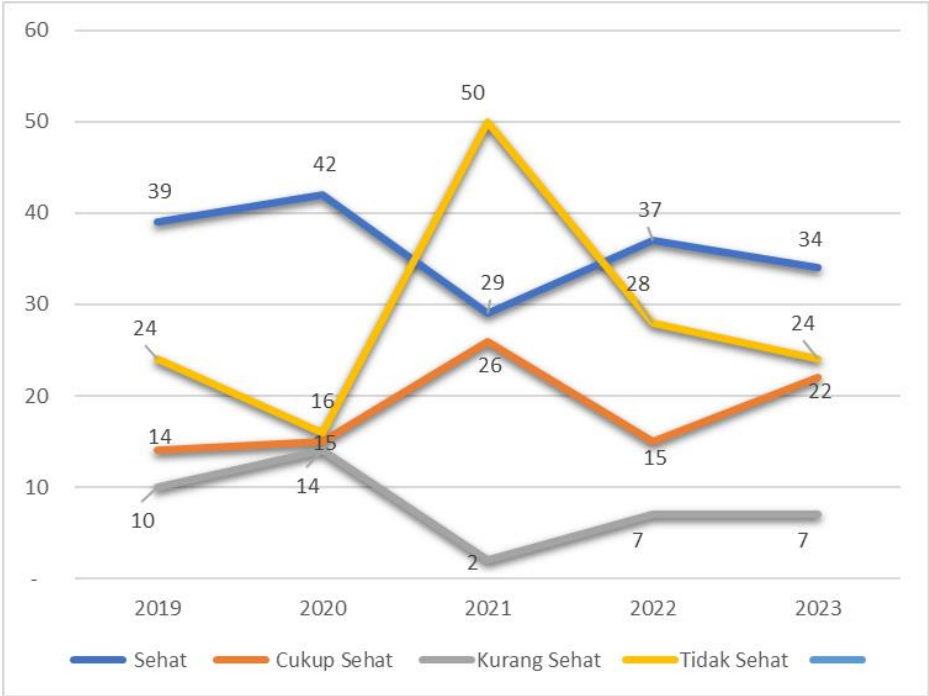
No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
1	Temon	Jangkaran	Binangun Sejahtera
2		Sindutan	Binangun Sindutan
3		Palihan	Binangun Sempulur
4		Glagah	Perumdes Kalurahan Glagah
5		Kalidengen	Binangun Sejahtera
6		Plumbon	Binangun Lancar
7		Kedundang	Binangun Kartika Utama
8		Demen	Perumdes Kalurahan Demen
9		Kulur	Binangun Bangkit Mandiri
10		Kaligintung	Binangun Dina Karya
11		Temon Wetan	Binangun Sejahtera
12		Temon Kulon	Binangun Anugrah
13		Kebonrejo	Binangun Sejahtera
14		Janten	Binangun Sejahtera Utama
15		Karangwuluh	Binangun Manunggal sejahtera
16	Wates	Karangwuni	Binangun Mitra Sejahtera
17		Sogan	Binangun Sumrigah Sogan
18		Kulwaru	Binangun Lestari
19		Ngestiharjo	Binangun Artha Jaya
20		Bendungan	Binangun Mekar Asri
21		Triharjo	Binangun Asri
22		Giripeni	Perumdes Kalurahan Giripeni
23	Panjatan	Garongan	Binangun Barokah
24		Pleret	Binangun Lancar Pleret
25		Bugel	Binangun Karya Murti
26		Kanoman	Binangun Kanoman
27		Depok	Binangun Sejahtera
28		Bojong	Binangun Dana Raharja
29		Tayuban	Binangun Sido Ono
30		Gotakan	Binangun Karya Raharja
31		Panjatan	Binangun Mandiri
32		Cerme	Binangun Sejahtera
33		Krembangan	Binangun Artha Mandiri
34	Galur	Banaran	Binangun migunani
35		Kranggan	Binangun Makaryo
36		Nomporejo	Binangun Ngudi Makmur
37		Karangsewu	Binangun Berdikari
38		Tirtorahayu	Binangun Tirta arta Tirtorahayu
39		Pandowan	Binangun Sejahtera
40		Brosot	Perumdes Binangun Arta Kemuning
41	Lendah	Wahyuharjo	Binangun

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
42		Bumirejo	Bumi Rahayu
43		Jatirejo	Binangun Jati Unggul
44		Sidorejo	Binangun Dadi Maju
45		Gulurejo	Binangun Murakabi
46		Ngentakrejo	Karya Binangun Jaya
47	Sentolo	Demangrejo	Binangun Lancar
48		Srikayangan	Binangun Mujur
49		Tuksono	Binangun Tuksono
50		Salamrejo	Binangun Dana Reja Mandiri
51		Sukoreno	Binangun Artha Guna Mandiri
52		Kaliagung	Binangun Mitra Agung
53		Sentolo	Mandiri Sejahtera Sentolo
54		Banguncipto	Binangun Cipta Mandiri
55	Pengasih	Tawangsari	Binangun Tawangsari
56		Karangsari	Binangun Karangsari
57		Kedungsari	Lestari Mandiri
58		Margosari	Binangun Lumintu
59		Pengasih	Binangun Berkah Asih
60		Sendangsari	Binangun Sendang Artha
61		Sidomulyo	Cipta Makmur
62	Kokap	Hargomulyo	Binangun Mulia Abadi
63		Hargorejo	Binangun Makmur Mandiri
64		Hargowilis	Binangun Lestari
65		Kalirejo	Binangun Sejahera Abadi
66		Hargotirto	Binangun Mulyo
67	Girimulyo	Jatimulyo	Binangun Mulyo Sejati
68		Giripurwo	Binangun Giripurwo
69		Pendoworejo	Binangun Dana Utama
70		Purwosari	Binangun Purwosari
71	Nanggulan	Banyuroto	Binangun Mekar Jaya
72		Donomulyo	Binangun Sejahtera Mulya
73		Wijimulyo	Binangun Mitra Sejahtera
74		Tanjungharjo	Binangun Sejahtera
75		Jatisarono	Binangun Jatimara
76		Kembang	Binangun Kusuma
77	Samigaluh	Kebonharjo	Babar Anyar
78		Banjarsari	Binangun Ajar
79		Purwoharjo	Binangun Maju
80		Sidoharjo	Binangun Mandiri
81		Gerbosari	Binangun Sejahtera
82		Ngargosari	Binangun Sejahtera
83		Pagerharjo	Binangun Pagerharjo
84	Kalibawang	Banjararum	Binangun Arta Arum

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
85		Banjarasri	Binangun Asri Sejahtera
86		Banjarharjo	Artha Sejahtera
87		Banjaroyo	Binangun Mitra Menoreh

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Lembaga ekonomi desa BUMDes yang telah terbentuk di 87 kalurahan tersebut, pembinaan dari pemerintah daerah berupa peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pendampingan penyelesaian permasalahan BUMDes dan monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUMDes. Dari hasil monitoring dan evaluasi laporan BUMDes dapat diketahui tingkat kesehatan BUMDes, meskipun laporan keuangan ini masih *unaudited*, namun bisa disajikan sebagai gambaran umum kondisi BUMDes. Kondisi BUMDes tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data : Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 2.35

Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023

Menurut Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rata-rata kalurahan (desa) di Kabupaten Kulon Progo sudah masuk dalam Desa maju menurut indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Indikator dari dimensi sosial yaitu dari kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Dari dimensi ketahanan ekonomi yaitu keragaman produksi masyarakat Kalurahan, ketersediaan pusat perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Sedangkan dari dimensi ekologi yaitu kualitas lingkungan dan potensi/ kerawanan bencana alam.

Indeks Desa Membangun tingkat kabupaten merupakan rata-rata Indeks Desa Membangun tiap kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Indeks Desa Membangun lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa -sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan Kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Berikut perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 dari 87 kalurahan yang menggambarkan peningkatan kualitas kehidupan desa di Kabupaten Kulon Progo yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah desa kategori mandiri yang makin bertambah dari 3 desa pada Tahun 2019 menjadi 33 desa pada Tahun 2022, di sisi lain desa berkembang menurun dari 63 desa pada Tahun 2019 menjadi 9 desa pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9 desa berkembang, 33 desa mandiri dan 45 desa maju dan pada Tahun 2023 terdapat 52 desa Mandiri, 35 desa maju dan tidak ada desa berkategori Berkembang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Kategori IDM	2019	2020	2021	2022	2023
Mandiri	3	4	13	33	52
Maju	21	40	48	45	35
Berkembang	63	43	26	9	0

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal tahun 2020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan *rebranding* nama program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Bangga Kencana merupakan program untuk memberdayakan keluarga menjadi keluarga yang berkualitas (tentram, mandiri,dan bahagia) melalui upaya: 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 2) Pengaturan Kelahiran, 3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, 4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, 5) Pengelolaan Kependudukan.

Upaya sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dimana batas minimal wanita 21 tahun dan untuk laki laki minimal 25 tahun masih perlu diintensifkan lagi karena masih banyak terdapat kasus pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Angka pernikahan usia dini tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125

Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2023

Kapanewon	2020		2021		2022		2023	
	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
Temon	297	8	264	11	280	4	296	1
Wates	198	5	176	2	186	3	147	9
Panjatan	289	17	263	7	225	0	212	8
Galur	199	8	195	4	197	1	171	5
Lendah	263	9	232	7	210	3	197	5
Sentolo	306	6	307	4	261	5	297	12
Pengasih	349	9	326	10	308	6	307	9
Kokap	241	10	251	1	208	2	208	5
Girimulyo	182	3	183	3	169	0	138	6
Nanggulan	135	4	132	4	143	4	174	3
Samigaluh	179	11	173	6	172	10	153	4
Kalibawang	139	7	170	6	144	3	130	5
Jumlah	**2.777**	**97**	**2.672**	**65**	**2.503**	**41**	**2.430**	**72**

Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan berupa layanan antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana bersama mitra kerja melalui kegiatan Bakti Sosial menjaring akseptor Kulon Progo (BAKSO MENTOR KBKu) dan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat selalu terjaga. Kepesertaan KB Aktif ditunjukkan dengan nilai prevalensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan Tahun 2020. Namun prevalensi tahun 2022 mengalami penurunan, dari jumlah peserta KB aktif tahun 2021 sebanyak 45.319 PUS dari jumlah PUS sebanyak 60.840 atau sebesar 74,51%, dan persentase ini menurun menjadi sebesar 61,82% di tahun 2022. Tahun 2023 Prevalensi kembali naik menjadi 69,26% dari PUS peserta KB Aktif sebanyak 43.687 dan Pasangan usia subur 63.079, sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.126

Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PUS peserta KB Aktif (PA)	44.451	44.944	45.329	38.068	43.687
2	Pasangan usia subur (PUS)	60.601	59.893	60.840	61.576	63.079
	Prevalensi	**73,35**	**75,04**	**74,51**	**61,82**	**69,26**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Capaian Peserta KB Aktif (PA) pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69,26%, di mana sebagian besar masih didominasi oleh KB wanita. Dari gambaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa minat dan kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB masih kurang, walaupun sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya pandemi covid 19 sejak tahun 2020 capaian peserta KB Pria metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) semakin turun, hal ini disebabkan

beberapa faskes tidak melayani KB MKJP dan dialihkan ke metode lain yaitu pil, suntik dan kondom. Selama Pandemi Covid-19 advokasi dan KIE dari rumah ke rumah menjadi andalan para kader untuk mendapatkan peserta KB Baru. Langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan reward bagi peserta KB pria metode MOP, masih belum dapat mengoptimalkan capaian target, namun telah terjadi peningkatan prevalensi dari tahun 2022 ke tahun 2023. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi calon peserta KB Pria utamanya berbasis kelompok/komunitas terus ditingkatkan.

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani (*unmet need*) merupakan potensi bagi calon peserta KB. Tahun 2023 di Kabupaten Kulon Progo terdapat unmet need sebesar 11,48%. Jumlah ini belum mencapai target nasional sebesar 9%. Penyebab capaian ini antara lain PUS bukan peserta KB (*unmet need*) usia 45 tahun keatas sudah sulit diajak ber KB karena sudah merasa tidak produktif lagi padahal masih ada kemungkinan hamil. Sementara itu penurunan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah pasangan usia subur dan peningkatan bukan peserta KB (*unmet need*), sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.127

PUS Bukan Peserta KB (*Unmet Need*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasangan usia subur (PUS)	Pasangan	60.601	59.895	60.840	61.576	63.079
2	PUS bukan peserta KB *(Unmet Need)*	Orang	5.709	4.929	5.409	13.050	7.239
	- Ingin anak tunda (IAT)	Orang	2.601	2.289	2.406	8.934	1.809
	- Tidak ingin anak lagi (TIAL)	Orang	3.108	2.640	3.003	4.575	5.430
3	Persentase	Persen	9,42	8,23	8,89	21,19	11,48

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga. Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.128

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	601	449	450	360	330
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	12.807	9.395	8.989	3.324	5.129
3	Kelompok BKB	Kelompok	324	291	291	290	290
4	Kelompok BKR	Kelompok	122	135	135	139	142
5	Kelompok BKL	Kelompok	122	137	137	149	155
6	PIK KRR	Kelompok	36	62	63	63	64

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Cakupan kepesertaan keluarga yang mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) sangat dinamis perkembangan tiap tahunnya menandakan kepesertaan anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan tersebut juga dinamis. Selama masa pandemi covid kegiatan di kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS sempat berhenti beberapa kali, menyesuaikan kondisi saat itu, Namun seiring berjalannya waktu kegiatan dapat kembali berjalan dengan menerapkan prokes serta dalam kelompok kecil dan waktu yang singkat.

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKS. Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan dengan mengeluarkan anggota yang sudah tua dan tidak aktif dalam kegiatan dari kelompok dan juga penurunan minat dari peserta KB aktif dalam mengikuti kelompok UPPKS. Demikian juga untuk data kelompok BKB, BKR, dan BKL. Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang dapat mempraktikan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari resiko pergaulan bebas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKS adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKS dengan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen pengelolaan kelompok serta mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS “AKU Sejahtera” dari Perwakilan BKKBN DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta pendampingan dalam pelatihan keterampilan.

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS semakin menurun baik jumlah maupun persentasenya. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya program dari sektor lain yang turut menyasar keluarga. Namun demikian kualitas anggota UPPKS yang ada adalah yang terbaik, karena anggota kelompok yang sudah tidak aktif lagi akan dikeluarkan. Dengan demikian, yang terdaftar sebagai anggota adalah benar benar aktif sebagai anggota kelompok UPPKS.

Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana, sejak tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis kegiatan program Bangga Kencana secara lengkap mulai dari PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS dan sektor pembangunan lainnya di tingkat kampung (Pedukuhan/Desa). Hingga tahun 2018, di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk 23 Kampung KB (10 Kampung KB di antaranya di desa stunting). Di tahun 2019 jumlah Kampung KB bertambah 3 lokasi, yakni Desa Banjararum, Desa Gulurejo dan Desa Sukoreno. Untuk tahun 2020 hingga 2022 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terpaksa dibatasi dan belum ada penambahan kampung KB. Pada tahun 2022 terbit Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang ditindaklanjuti dengan Perbup 77 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Amanat dalam peraturan perundangan tersebut adalah setiap Kalurahan/Kelurahan membentuk Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Bangga Kencana

serta pembangunan sektor terkait. Pembentukan Kampung KB diawali dengan pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja.

Tabel 2.129

Jumlah Kampung KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Kapanewon	Jumlah
1	Temon	15
2	Wates	7
3	Panjatan	11
4	Galur	7
5	Lendah	6
6	Sentolo	8
7	Pengasih	7
8	Kokap	5
9	Girimulyo	4
10	Nanggulan	6
11	Samigaluh	7
12	Kalibawang	4
	Jumlah	**87**

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kampung KB, di setiap Kampung KB telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB yang disahkan dengan Keputusan Bupati. Untuk Kampung KB yang pertama (Kampung KB Tegiri 2, Desa Hargowilis) disahkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 102/A/2016. Sementara untuk 2017 Pokja Kampung KB dikuatkan dengan Keputusan Bupati 355/A/2017. Sedangkan untuk 2018 yang menyasar pada Desa Stanting juga dikuatkan dengan Keputusan Bupati No 358/A/2018. Selanjutnya dalam rangka memperkuat penanganan stanting di Kulon Progo, Bupati Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Bupati No 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting di Daerah.

Pada Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 362/A/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Kulon Progo, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri no 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang intensifikasi kampung keluarga berkualitas. Sehingga yang semula kampung Keluarga Berencana berganti menjadi Kampung Berkualitas. Adapun tujuan dibentuknya kampung berkualitas adalah untuk penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil/melahirkan dan kematian bayi, menurunkan angka *unmet need*, meningkatkan kepesertaan keluarga berencana, serta menurunkan angka kemiskinan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui kampung Keluarga Berkualitas (kampung KB).

Di Kampung KB, selain dikembangkan berbagai kegiatan program Bangga Kencana bersama lintas sektor juga dikembangkan Rumah Data Kependudukan. Rumah Data Kependudukan yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB. Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenalkan pada masyarakat luas sebagai “Rumah Dataku” tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.

Di Kabupaten Kulon Progo saat ini telah memiliki 10 Rumah Data Kependudukan, yakni di Kampung KB Kalurahan Hargowilis, Kalurahan Kalirejo, Kampung KB Kalurahan Triharjo, Kampung KB Kalurahan Kedungsari, Kampung KB Kalurahan Sendangsari, Kampung KB Kalurahan Gerbosari dan Kampung KB Kalurahan Kaliagung, Kalurahan Donomulyo, Kampung KB Kalurahan Giripurwo dan Kampung KB Kalurahan Bugel.

Selanjutnya dalam rangka mensosialisasikan program Bangga Kencana pada masyarakat khususnya pada siswa di sekolah, telah dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan yang berbasis di SMP dan SMA. Di Kabupaten Kulon Progo saat ini baru terbentuk 2 (dua) Sekolah Siaga kependudukan (SSK) yakni di SMP N 1 Galur yang dibentuk pada tahun 2018 dan SMA N 1 Pengasih yang dibentuk pada tahun 2019. Di masing-masing SSK selain telah mengintegrasikan materi Pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran, juga telah membentuk pojok kependudukan yang menempati satu ruang tertentu di sekolah yang bersangkutan. Sosialisasi program Bangga Kencana juga dilakukan melalui kelompok Saka Kencana Krida Kependudukan. Di Kulon Progo, pangkalan Saka Kencana tersebut ada di SMA N 1 Pengasih.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

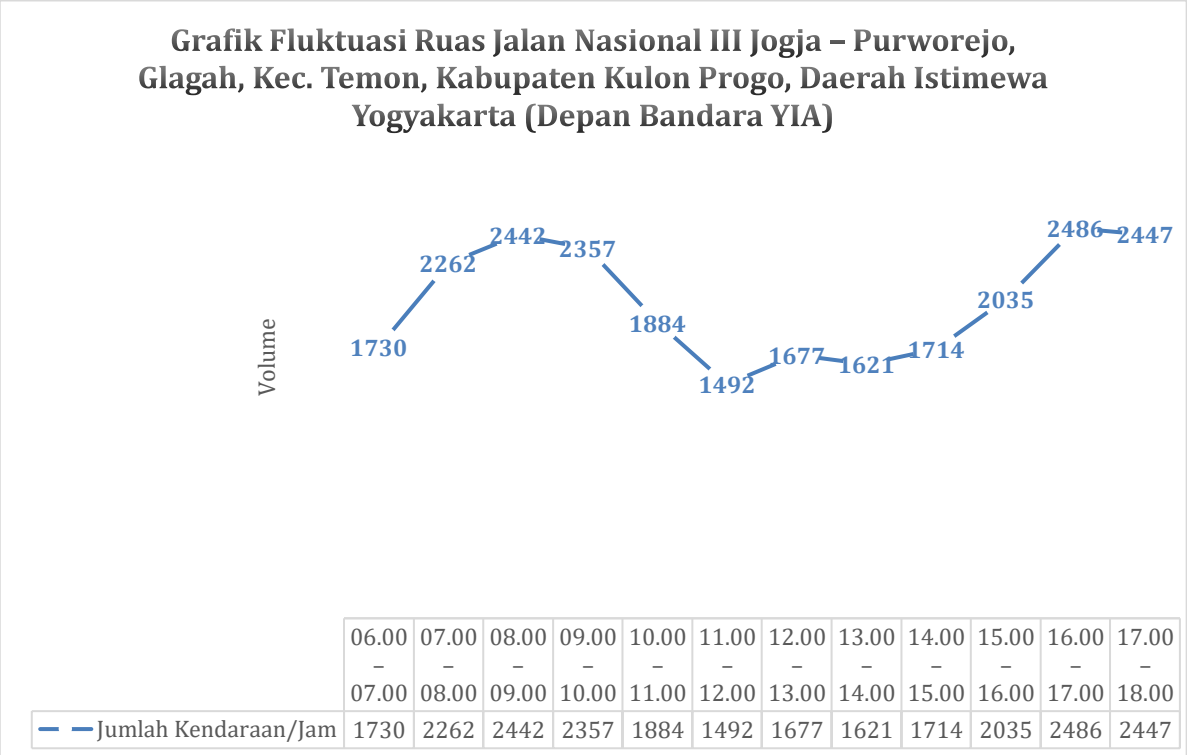
No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Sepeda Motor Roda 2 dan 3**	**161.499**	**164.663**	**166.478**	**172.974**	**177.063**	Unit
	a. Sepeda motor roda 2 (plat hitam)	159.928	163.081	164.883	171.380	175.527	Unit
	b. Sepeda motor roda 3 (plat hitam)	359	366	364	388	340	Unit
	c. Sepeda motor roda 2 (plat merah)	1.189	1.197	1.202	1.184	1.167	Unit
	d. Sepeda motor roda 3 (plat merah)	23	19	29	22	29	Unit
2.	**Mobil Penumpang Bukan Umum (plat hitam)**	**15.002**	**15.886**	**16.695**	**17.686**	**18.234**	unit
	a. Sedan	1.696	1.804	1.717	1.739	1.652	unit
	b. Jeep	708	730	768	780	799	unit
	c. Minibus < 8	12.486	13.220	14.086	15.038	15.631	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	112	132	124	129	152	unit
	e. Bus > 30	-	-	-	-	-	unit
3.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat hitam)**	**5.122**	**5.296**	**5.427**	**5.656**	**5.601**	unit
	a. Pick Up	3.710	3.900	4.058	4.267	4.236	unit
	b. Truck	1.412	1.396	1.369	1.389	1.365	unit

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.	**Mobil Penumpang Umum (plat kuning)**	**234**	**196**	**173**	**181**	**189**	unit
	a. Sedan	-	-	-	-	-	unit
	b. Jeep	-	-	-	-	-	unit
	c. Minibus < 8	28	30	31	33	38	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	189	158	133	137	137	unit
	e. Bus > 30	17	8	9	11	14	unit
5.	**Mobil Barang Bukan Umum (plat kuning)**	**448**	**415**	**394**	**407**	**384**	unit
	a. Pick Up	11	13	12	12	11	unit
	b. Truck	437	402	382	395	373	unit
6.	**Mobil Penumpang Umum (plat merah)**	**283**	**273**	**282**	**297**	**288**	unit
	a. Sedan	2	1	1	2	2	unit
	b. Jeep	9	6	9	8	4	unit
	c. Minibus < 8	264	259	262	273	269	unit
	d. Mikrobus 9 - 10	8	7	10	9	9	unit
	e. Bus > 30	0	0	0	5	4	unit
7.	**Mobil Barang Umum (plat merah)**	**64**	**61**	**67**	**69**	**75**	unit
	a. Pick Up	44	43	44	43	51	unit
	b. Truck	20	18	23	26	24	unit
	JUMLAH	**182.652**	**186.790**	**189.516**	**197.270**	**201.834**	**unit**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Peningkatan kepadatan lalu lintas harian rerata (LHR) juga akan terjadi sebagai akibat beroperasinya Bandara YIA dan fasilitas pendukungnya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar potensi ini tidak memperbesar angka kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo.

Berikut ini adalah grafik fluktuasi volume lalu lintas yang terjadi pada Ruas Jalan Nasional III Jogja – Purworejo, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Depan Bandara Internasional Yogyakarta) selama 12 jam.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Gambar 2.36

Fluktuasi Volume Lalu Lintas Jalan Nasional

Berdasarkan pemantauan lalu lintas harian (LHR) pada simpang pintu masuk ke BIY, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke dalam area bandara melalui pintu masuk tersebut adalah sejumlah 689/jam kendaraan persentase 75% berasal dari arah Wates. Jumlah tersebut didominasi oleh kendaraan ringan dengan jumlah kendaraan dari pendekat A sejumlah 308 kendaraan/jam dan 117 kendaraan/jam dari pendekat C. Bila dicermati, jumlah kendaraan yang berbelok ke arah bandara sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melaju lurus dengan kisaran 1% dari arah Purworejo dan 6% dari arah Wates dari jumlah total kendaraan 21.768 kendaraan/jam. Berdasarkan rasio belok jalan simpang BIY yang saat ini belum memiliki perlengkapan isyarat pengatur lalu lintas diperoleh nilai sebesar 0,94 dengan persentase sebesar 80% berbelok ke arah Wates dengan jumlah total kendaraan keluar dari ruas tersebut sejumlah 618 kendaraan/jam. Dengan rasio belok dan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar hampir berimbang, maka dapat diperkirakan bahwa pada saat kondisi bandara beroperasi penuh, akan diperlukan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran dan mengantisipasi kemacetan pada pintu masuk tersebut.

Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.131 di bawah. Lokasi kecelakaan yang paling sering terjadi di Ruas Jalan Jogja-Wates Km 19 – 20 Sukoreno Kapanewon Sentolo dan Jalan Wates – Purworejo Km 8 – 11 Kapanewon Temon. Korban kecelakaan didominasi oleh remaja dan pelajar dengan penyebab kecelakaan paling banyak didominasi oleh *human error*, minimnya keterampilan, kelelahan, rendahnya etika berkendara serta kurangnya pemahaman akan aturan berlalu lintas.

Tabel 2.131

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumah Kecelakaan	kejadian	685	592	615	958	877
2	Kerugian Materiil	rupiah	11.783.850	106.400.000	196.150.000	273.665.000	559.225.500
3	Jumlah Korban	orang	1.189	957	1.064	1.625	1.494
	- Meninggal	orang	70	34	68	89	62
	- Luka Berat	orang	7	1	3	0	1
	- Luka Ringan	orang	1.112	922	993	1.536	1.431

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Polres Kulon Progo, 2023

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau *Volume Capacity Ratio*, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Dari 25 ruas jalan kabupaten yang diukur VC Rationya rata-ratanya adalah 0,29. Angka VC Ratio semakin kecil berarti semakin tinggi tingkat pelayanan jalannya. 25 ruas jalan kabupaten yang diukur terletak di Kapanewon Wates, Temon, dan Sentolo tersebut memiliki tingkat pelayanan jalan rata-rata A dan B. Tingkat pelayanan jalan didasarkan pada faktor-faktor: kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, dan keamanan. Nilai A berarti: arus bebas, volume rendah, dan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki, sedangkan nilai B berarti: arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, volume menggunakan jalur untuk luar kota, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.132

VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
I	**Kapanewon Wates**		
1.	Jl. Sudibyo	0,21	A
2.	Jl. Jogoyudan	0,2	A
3.	Jl. Ksatrian - Margosari	0,13	A
II.	**Kapanewon Temon**		
1.	Mlangsen – Pripih	0,12	A
2.	Mlangsen – SP Palihan	0,15	A
3.	Demen – Girigondo	0,15	A
III.	**Kapanewon Sentolo**		
1.	Kentheng - Cangakan	0,21	A
2.	Dudukan - Sp Ngenthakrejo	0,1	A
3.	Ps Sentolo - Ngelo	0,36	A
IV.	**Kapanewon Lendah**		
1.	Maesan – Cangkring	0,05	A
2.	Kecamatan Lendah - Degolan	0,07	A

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
3.	Kecamatan Lendah - Sidorejo	0,04	A
4.	Botokan - Kecamatan Lendah	0,1	A
V	**Kapanewon Kokap**		
1.	Kokap – Kalirejo	0,03	A
2.	Kalirejo - Sangon	0,04	A

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2023		2023
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	1.114	1.134	1.196	1.270	1.392	n/a	buah	32
2	Cermin Tikungan	40	40	60	72	111	110	Unit	101
3	Traffic Light (APILL)	7	23	23	24	1	22	Unit	118
4	Warning Light	1	1	1	15	5	15	Unit	7
5	Guard Rail (Pagar Pengaman)	3.572	3.672	3.872	4.192		30.988	meter	16
6	Lampu Penerangan Jalan Umum	2.755	2.840	3.447	3.542	3.687	19.122	Ttik	19

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan (desa) yang menjadi kewenangan kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan kalurahan juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan Kalurahan bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Beberapa upaya yang dicoba dikembangkan adalah menginisiasi kemungkinan penyelenggaraan pelayanan LPJU dengan mekanisme KPBU. Namun hingga saat ini penyelenggaraan pelayanan LPJU melalui mekanisme KPBU tersebut belum terealisir karena masih dalam tahap kajian.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara topografis merupakan wilayah yang banyak memiliki perbukitan sehingga kontur jalan yang ada juga mengikuti kondisi tersebut sehingga terdapat banyak tanjakan maupun tikungan. Cermin tikungan sangat dibutuhkan pada kondisi jalan yang berkelok untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Gap antara kebutuhan akan marka dan marka yang ada secara eksisting masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pemenuhannya.

Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraannya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan,tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Pada saat ini yang mendesak untuk dipasang APILL adalah pada Perempatan Janti, Nanggulan yang merupakan pertemuan antara Ruas Jalan Provinsi Sentolo-Dekso-Klangon, Ruas Jalan Dengok-Janti, dan Ruas Jalan Kabupaten Puskesmas Janti-Plugon, serta pertigaan di depan kantor DPUPKP Kabupaten Kulon Progo yang merupakan akses jalan penghubung sebagai pengganti akses jalan pada perlintasan sebidang di Jalan Diponegoro yang direncanakan akan segera ditutup. Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati.

Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardrail*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing / jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan yang ada masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena baru tersedia sekitar 10% dari jumlah kebutuhan.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada lima. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Untuk menunjang keselamatan lalu lintas jalan terutama pada malam hari dibutuhkan lampu penerang jalan umum (LPJU). Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi sedangkan jalan Kalurahan yang menjadi kewenangan Kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU dari Dinas Perhubungan. Kebutuhan LPJU

yang merupakan kewenangan Kalurahan (PJU Lingkungan) dilakukan pemenuhannya dengan menggunakan alokasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

Secara umum, perlengkapan dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain dari alokasi anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo juga diharapkan dapat dipenuhi dari sumber pendanaan yang lain seperti Dana Keistimewaan, APBD DIY, juga dari APBN melalui satker Kementerian Perhubungan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Jumlah penumpang angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Moda	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penumpang AKDP	orang/th	193.279	98.591	106.538	12.070	10.107
2	Penumpang AKAP	orang/th	124.754	21.784	14.271	287.878	262.345
3	Penumpang Angkutan Pedesaan	orang/th	99.473	94.738	92.968	82.525	73.560
	Jumlah	orang/th	417.506	215.113	213.777	382.473	346.03

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024, diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis baik jumlah penumpang baik AKAP, AKDP, maupun angkutan perdesaan dikarenakan kondisi pandemi yang menyebabkan turunnya pergerakan masyarakat. Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada lesunya usaha angkutan umum. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.135

Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2019	2020	2021	2022	2023
1	A 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP ***(Kop. Manunggal, Kop. Harapan)***	45	15	20	30	34
2	2	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-Karangwuni-Glagah-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
3	3	Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-Glagah-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
4	4	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Kulwaru-Jetis-PP	-	-	-	-	-
5	B 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2019	2020	2021	2022	2023
6	2	Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-PP	-	-	-	-	-
7	3	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP	-	-	-	-	-
8	4	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-Ngentakrejo-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
9	C 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kutogiri-Plelen PP ***(Kop.Adhikarta,)*** √	-	-	-	-	-
10	2	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kalibiru/Kalingiwo-PP ***(Kop. Adhikarta)*** √	-	-	-	-	-
11	3	Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-Kedungrejo-PP ***(Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
12	D 1	Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-Pripih-Sangon-PP ***(Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)***	2	-	-	-	-
13	2	Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-Kebonrejo-PP ***(Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
14	3	Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP	-	-	-	-	-
15	4	Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-Kokap-PP ***(Kop. Mandiri)*** √	13	12	6	12	13
16	5	Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP ***(Kop. Yosawa)*** √	-	-	-	-	-
17	6	Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-Sidowayah-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
18	7	Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
19	E 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
20	2	Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP ***(Kop. Menoreh)***	2	2	2	-	-
21	3	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP ***(Perorangan)***	-	-	-	-	-
22	4	Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP ***(Kop. Yosawa)***	-	-	-	-	-
23	F 1	Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP ***(Kop. Menoreh)***	-	-	-	-	-
24	2	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP ***(Kop. Adhikarta)***	12	8	6	11	-
25	3	Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP ***(Kop. Asri)***	-	-	-	-	8
26	4	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-Gorolangu-PP	-	-	-	-	-
27	5	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-Gorolangu-PP ***(Kop. Menoreh)***	1	-	-	-	-
28	6	Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-PP/Perintis ***(Kop. Adhikarta)***	-	-	-	-	-
29	7	Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP	-	-	-	-	-
30	8	Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP	-	-	-	-	-
31	9	Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-Bendungan-PP ***(Kop. Adhikarta)*** √	-	-	-	-	-
32	10	Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP***(Kop. Manunggal)***	-	-	-	-	-
33		Sentolo-Brosot-PP ***(Kop. Tugu Potlot)***	-	-	-	-	-
		Jumlah	**75**	**37**	**34**	**53**	**56**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Selain trayek di atas, terdapat trayek pendukung Bandara berupa Shuttle Damri. Adapun rute dan pelayan shuttle Damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136

Rute Layanan *Shuttle* Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta

Layanan Shuttle Bandara	
1	Imogiri – Terminal Palbapang - YIA
2	Stasiun Wojo - YIA
3	Grand Inna Hotel, Jogja - YIA
4	Hotel Sahid Jaya - YIA
5	Terminal Condong Catur - YIA
Rute DAMRI KSPN Borobudur	
1	Borobudur-Salaman-Purworejo-YIA

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Dalam rangka memenuhi prasarana perhubungan maka diperlukan terminal yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Tabel 2.137

Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo

No.	Terminal	Fungsi	Luas	Kondisi
1	Wates	Tipe B	7.910	Telah menjadi kewenangan DIY
2	Brosot	Tipe C	700	Baik
3	Sentolo	Tipe C	1.000	Cukup baik
4	Kenteng	Tipe C	1.664	Cukup baik
5	Jagalan	Tipe C	1.000	Baik
6	Jangkaran			Ditutup

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Mengenai kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang yaitu fasilitas utama dan penunjang, prosentase jumlah fasilitas yang ada masih jauh dibawah jumlah fasilitas yang ideal dimana semua Terminal Tipe C memerlukan rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu. Untuk terminal Tipe C Kenteng, selain rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu juga diperlukan rehabilitasi Pos TPR.

Dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo, khususnya terkait jaringan transportasi darat, Nampak jelas bahwa wilayah kabupaten dilintasi oleh jaringan rel kereta api. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, hingga tahun 2023, terdapat 27 perlintasan sebidang antara jaringan jalan dan rel kereta api. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 lokasi telah ditutup, 3 lokasi dijaga dinas perhubungan, 3 lokasi dijaga PT KAI sedangkan sisanya tidak jaga. Upaya penutupan perlintasan sebidang terus

dilakukan, yang terakhir pada tahun 2017 penutupan dilakukan di Sentolo yang merupakan perlintasan jalur kereta api dengan ruas jalan propinsi Sentolo-Pengasih yang berujung pada jalan nasional. Akses pengganti dilakukan dengan membangun jembatan *fly over* Ngelo. Perlintasan sebidang Teteg Wetan telah dilakukan penutupan pada tahun 2022 dan telah dilakukan akses pengganti yaitu *Underpass* Kemiri. Sedangkan untuk perlitasan Teteg Kulon (Jln Moh Dawam) akan dilakukan sekaligus dengan perlintasan di Dukuh Karangsari, setelah selesai pembangunan *flyover* Triharjo- RSU Wates yang saat ini sedang dalam proses review DED dan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah disusun. Rencana pembiayaannya akan diusulkan untuk dapat didanai dari dana keistimewaan DIY, sebagai perwujudan dari SRS Pusat Kota Wates.

Tabel 2.138

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023

No.	Jenis	Satuan	Jumlah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkutan Barang	unit	7.372	5.965	5.983	5.871	5.413
2	Angkutan Penumpang	unit	579	384	370	334	413

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Selain faktor sarana dan prasarana jalan, kendaraan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran lalu lintas jalan. Dalam rangka meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas, kelaikan kendaraan terutama kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang perlu untuk diuji secara berkala dengan tepat waktu. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, saat ini UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan migrasi dari penggunaan buku hasil uji manual menjadi penggunaan smart card yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan pembayaran, saat ini juga sudah dilaksanakan sistem pembayaran non tunai yang bisa dilakukan menggunakan QRIS Bank BPD DIY maupun dengan aplikasi pembayaran non tunai lainnya. Dari Tabel Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2023 diketahui bahwa jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 202, 2022, dan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun tahun sebelumnya untuk angkutan barang, dan terjadi kenaikan untuk angkutan penumpang pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

Dampak Pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di sektor perhubungan antara lain penurunan omzet pelaku usaha bidang transportasi. Omzet kendaraan online, ojek pangkalan, dan tukang becak turun 60%-70% paska Pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas operasional sektor transportasi penurunan omset pelaku usaha bidang transportasi. Omzet kendaraan online, ojek pangkalan, dan tukang becak turun 60%-70%. Penurunan aktivitas operasional sektor transportasi, dampak terbesar dirasakan oleh kelompok rentan yaitu pekerja di sektor transportasi darat (tukang parkir, driver kendaraan online, driver ojek pangkalan, tukang becak). Penghasilan yang sangat menurun membuat kelompok ini sangat perlu mendapatkan bantuan pemerintah.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya tersedianyan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Cakupan layanan menara telekomunikasi pada tahun 2019–2023 belum memenuhi zona *cell plan*. Hal tersebut diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139

Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah zona terisi dalam *cell plan* menara telekomunikasi	63	64	72	98	98
Jumlah zona seharusnya dalam *cell plan* menara telekomunikasi	120	120	118	140	140
Persentase (%)	**52,50**	**58,18**	**61,02**	**70**	**70**

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat calon lokasi menara oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan di lapangan dan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Kecepatan akses informasi masih terkendala dengan keterbatasan ketersedian bandwidth. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo kapasitas bandwitdh terus mengalami peningkatan, Pada Tahun 2019 ketersediaan bandwith telah meningkat menjadi 250 Mbps, dan pada Tahun 2020 kapasitas *bandwidth* telah mencapai 2.200 Mbps meskipun pada Tahun 2021 sedikit menurun menjadi 2.000 Mbps. Pada tahun 2022 berhasil dipertahankan pada 2.000 Mbps. Dan pada tahun 2023 ini kapasitas *Bandwidth* meningkat kembali jadi 2.200 Mbps.

Tabel 2.140

Kapasitas *Bandwith* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Kapasitas *Bandwidth* (Mbps)
2019	250
2020	2.200
2021	2.000
2022	2.000
2023	2.200

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dengan kondisi yang ada dan melihat adanya kebutuhan pelayanan internal maupun kepada masyarakat, maka direncanakan untuk secara bertahap akan dipenuhi dengan pengadaan jaringan Fiber Optik maupun peningkatan kapasitas *Bandwidth*.

Tabel 2.141

Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
5	Inspektorat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
6	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	Gedung Arsip	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
10	Dinas Perdagangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
11	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
12	Dinas Lingkungan Hidup	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
17	Dinas Pertanian dan Pangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	UPTD BLK	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
19	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	UPTD PKB	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
20	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
22	Dinas Kebudayaan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
27	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
28	Sekretariat DPRD	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
29	Rumah Dinas Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
30	Rumah Dinas Wakil Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
31	Kapanewon Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
32	Kapanewon Galur	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
33	Kapanewon Girimulyo	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
34	Kapanewon Kalibawang	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
35	Kapanewon Kokap	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
36	Kapanewon Lendah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
37	Kapanewon Nanggulan	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
38	Kapanewon Panjatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
39	Kapanewon Samigaluh	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
40	Kapanewon Pengasih	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
41	Kapanewon Sentolo	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
42	Kapanewon Temon	Metrolink Fiber Optik	ISP
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
43	RSUD Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
44	RSUD Nyi Ageng Serang	Metrolink Fiber Optik	ISP

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.142

Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Jumlah Kalurahan	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
1.	17	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2.	71	Wireless	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Untuk infrastruktur jaringan internet sudah terpenuhi di seluruh perangkat daerah meskipun belum maksimal. Jaringan internet di perangkat daerah lingkup kabupaten sudah menggunakan infrastruktur jaringan fiber optik, akan tetapi ada juga yang masih berupa Metrolink Fiber Optik, yaitu di RSUD Nyi Ageng Serang dan di 12 kapanewon. Pada 12 kapanewon, infrastruktur jaringan yang digunakan berupa Metrolink Fiber Optik dan wireless. Metrolink Fiber Optik digunakan untuk akses pelaksanaan kegiatan di sekretariat, sedangkan wireless digunakan untuk jaringan SIAK dan distribusi jaringan internet kalurahan.

Jaringan internet desa di Kabupaten Kulon Progo sudah terjangkau pada 66 kalurahan berupa wireless yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY, 20 kalurahan sewa pihak ketiga, dan ada 1 kalurahan dan 1 kelurahan yang sudah terdapat jaringan internet berupa jaringan fiber optic dan wireless yang terkoneksi dari Dinas Kominfo.

Selain ketersediaan bandwith, kecepatan dan kelancaran akes informasi pada perangkat daerah juga dipengaruhi oleh perangkat jaringan Local Area Network (LAN) yang digunakan oleh perangat daerah banyak yang belum memenuhi spesifikasi minimal sehingga masih diperlukan upgrade perangkat jaringan internet.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, perlu adanya kerangka acuan

pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Kulon Progo. Tahapan implementasi pengembangan komponen TIK menuju smart city dilakukan secara paralel dan fleksibel sesuai kebutuhan dan potensi lokal daerah, meliputi: penataan sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Implementasi smart city Kabupaten Kulon Progo harus memperhatikan karakteristik potensi lokal pengembangan kabupaten cerdas. Implementasinya dilakukan secara bertahap, paralel, dan fleksibel sesuai kebutunan dan orioritas daerah yang mencakup semua urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan yang masing-masing urusan pemerintahan tersebut didukung oleh unsur penunjang urusan pemerintahan.

Dalam rencana induk *(masterplan) smart city,* rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pembangunan dan pengembangan Smart City harus sejalan dengan rencana pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum. Implementasi Smart City terdiri dari enam komponen yaitu: tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Implementasi gagasan kabupaten cerdas (*smart city*) memerlukan monitoring dan evaluasi berkala agar lebih terarah dan berkelanjutan. Untuk itu Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo mengevaluasi perkembangan implementasi smart *city*. Berikut disampaikan hasil evaluasi Smart City tahun 2022.

Tabel 2.143

Capaian Dimensi dan Sub Dimensi Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Dimensi dan Sub Dimensi Smart City	Jumlah Program	Jumlah Realisasi	Jumlah belum Realisasi	Realisasi (%)
1	*Smart Governance meliputi:*	20	19	1	95.00
	- Pelayanan publik (Public Service)				
	- Manajemen birokrasi yang efisien (Bureucracy)				
	- Efisien kebijakan publik (Public Policy)				
2	*Smart Branding meliputi:*	6	6	0	100.00
	- *Tourism Branding*				
	- *Business Branding*				
	- *City Appearance Branding*				
	- *Culture Branding*				
3	*Smart Economy meliputi:*	14	12	2	85.71
	- *Industri berdaya saing (Industry)*				
	- *Kesejahteraan rakyat (Welfare)*				
	- *Transaksi keuangan (Transaction)*				
4	*Smart Living meliputi:*	16	13	3	81.25
	- *Harmonisasi tata ruang (Harmony)*				
	- *Pelayanan kesehatan (Health)*				
	- *Ketersediaan sarana transportasi (Mobility)*				
5	*Smart Society meliputi:*	8	7	1	87.50

No.	Dimensi dan Sub Dimensi Smart City	Jumlah Program	Jumlah Realisasi	Jumlah belum Realisasi	Realisasi (%)
	- *Interaksi masyarakat yang efisien (community)*				
	- *Ekosistem belajar yang efisien (Learning)*				
	- *Sistem keamanan masyarakat (Security)*				
6	*Smart Environment meliputi:*	2	1.5	0.5	75.00
	- *Program proteksi lingkungan (Protection)*				
	- *Tata kelola sampah dan limbah (Waste)*				
	- *Tata kelola energi yang bertanggung jawab (Energy)*				
	Jumlah/Nilai	**66**	**58.5**	**7.5**	**75.00**

Sumber data : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2024

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada hasil evaluasi mandiri tingkat kematangan SPBE pada tahun 2023 sebesar 3,72 nilai ini meningkat jika dibandingan tahun 2022 sebesar 3,45. Namun demikian jika dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota ditambah Provinsi DIY sendiri, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi ketiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144

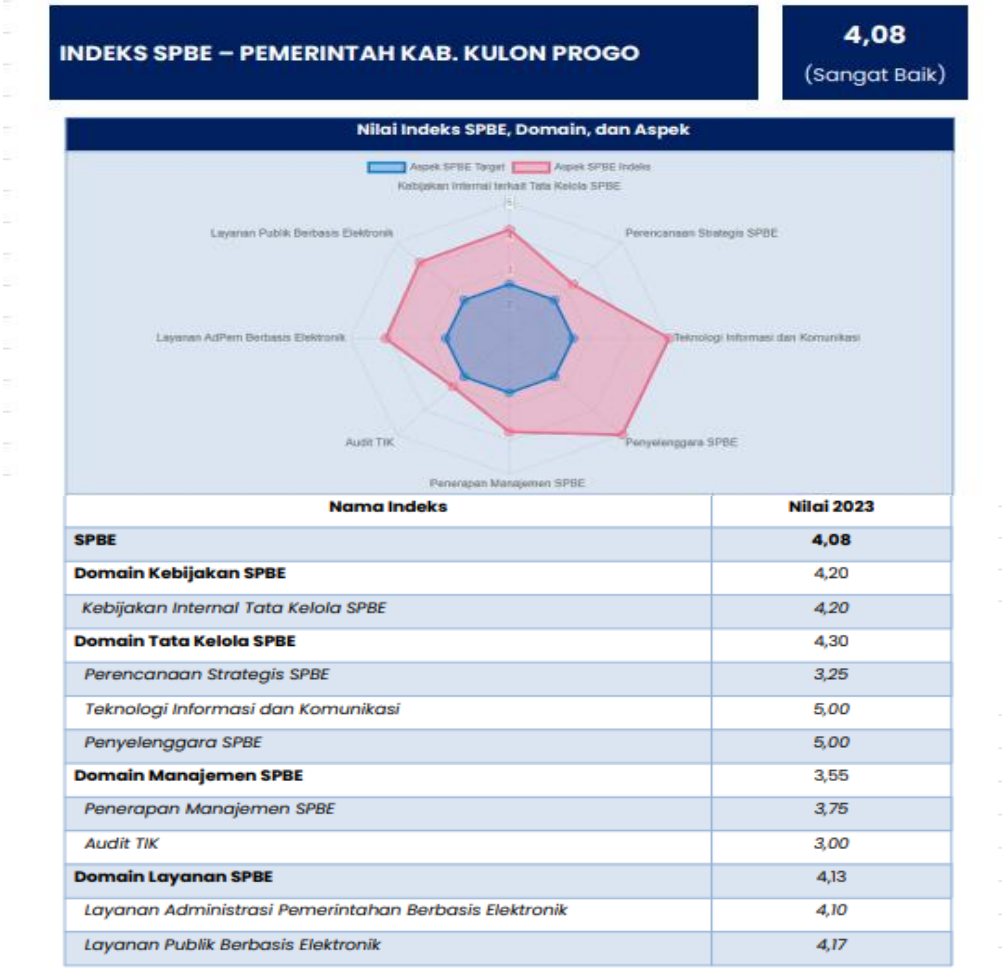
Indeks SPBE Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	3,72	Sangat Baik
2	Pemda Daerah Istimwa Yogyakarta	4,22	memuaskan
3	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
4	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik
5	Pemerintah Kabupaten Sleman	4,29	memuaskan
6	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	2,84	Baik

Tabel 2.145

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	2021	2022	2023
	3.22	3.45	4,08
	(Baik)	(Baik)	(Sangat Baik)
Nama Indeks	**Nilai**	**Nilai**	**Nilai**
SPBE	3.22	3.45	4,08
Domain Kebijakan SPBE	3.5	3.6	4,20
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.5	3.6	4,20
Domain Tata Kelola SPBE	3.7	3.9	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	2.75	3.25	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.5	4.5	5,00
Penyelenggara SPBE	4	4	5,00
Domain Manajemen SPBE	1	1.45	3,55
Penerapan Manajemen SPBE	1	1.13	3,75
Audit TIK	1	2.33	3,00
Domain Layanan SPBE	3.69	3.88	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.6	3.7	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.83	4.17	4,17



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**4,08**
Domain Kebijakan SPBE	4,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,20*
Domain Tata Kelola SPBE	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	*3,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,55
Penerapan Manajemen SPBE	*3,75*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,10*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,17*

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2023

Gambar 2.37

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

Evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo untuk masing-masing domain sebagai berikut: Domain Kebijakan SPBE, meliputi 1 aspek yaitu kebijakan internal tata kelola dengan nilai 4,20. Domain tata kelola SPBE dengan nilai 4,30 yang terdiri dari 3 aspek yaitu perencanaan strategis SPBE nilai 3,25. Teknologi informasi dan komunikasi nilai 5,00, penyelenggaran nilai 5,00. Domain manajemen SPBE dengan nilai 3,55 yang terdiri dari 2 aspek yaitu penerapan manajemen SPBE nilai 3,75 dan pelaksanaan audit TIK nilai 3,00. Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,13 terdiri dari 2 aspek yaitu Layanan administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai 4,10, dan Layanan publik berbasis elektronik dengan nilai 4,17.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri SPBE sebagaimana tabel diatas, untuk domain Manajemen SPBE masih memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan domain lainnya. Domain Manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek penilaian yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Adapun indikator yang dinilai masih kurang/ lemah dari aspek Penerapan Manajemen SPBE yaitu masih kurangnya perencanaan dan pengaturan dalam kebijakan internal dalam Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan. Sedangkan untuk aspek Audit TIK, indikator yang dinilai masih kurang/ lemah yaitu belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi. Dalam pelaksanaann kegiatan, PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2021 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Layanan PPID dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, via telepon, website PPIDKu, serta program LAPOR dan audiensi dengan Bupati Kulon Progo dalam acara Kamis Pagian Bupati Kulon Progo langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Pedoman Standar yang telah ditetapkan melalui Standard Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Kulon Progo, acuan SOP tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010. Sebagai badan Publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk PPID beserta 42 PPID Pembantu yang berada disetiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 243 Tahun 2011 dan telah direvisi dengan SK Bupati Nomor 215 Tahun 2013 dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 186 tahun 2017 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 244/B/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2019, dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 265/A/2020

tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan:

1. Penganugerahan Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.
2. Penghargaan Top Digital Award 2021 dalam Kategori Top Digital Implementation 2021 dari Majalah IT-Works Jakarta.
3. Penghargaan menuju Smart City untuk Kategori Dimensi Smart Governance 2021 dari Kementerian Kominfo RI.
4. Penganugerahan Terbaik II Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jumlah Koperasi dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami tren pertumbuhan positif. Pertambahan paling sedikit terjadi pada tahun 2021 dan 2023 yaitu masing-masing sebanyak 2 koperasi. Pada tahun 2022, jumlah koperasi bertambah sebanyak 9 koperasi dan terdapat 2 koperasi yang berpindah badan hukum Provinsi dan 2 koperasi berpindah badan hukum Nasional sehingga total jumlah koperasi pada tahun 2022 sebanyak 282 koperasi. Koperasi yang berpindah badan hukum merupakan koperasi yang memiliki jumlah anggota yang cukup banyak sehingga jumlah anggota yang terhitung pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah koperasi bertambah sebanyak 2 koperasi. Pertambahan tersebut berasal dari sasaran penyuluhan perkoperasian sebanyak 20 kelompok masyarakat dan 20 koperasi siswa yang terdapat 2 koperasi yang mendapat pengesahan badan hukum.

Tabel 2.146

Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi	Unit	267	274	276	282	284
2	Jumlah anggota	Orang	76.025	78.545	76.984	72.284	75,771
3	Jumlah simpanan	Rp.000	145.059.989	165.636.467	175.264.813	179.451.455	185,320,806
4	Jumlah modal sendiri	Rp.000	144.529.815	139.834.403	147.979.434	156.278.704	161,022,926
5	Jumlah modal luar	Rp.000	197.878.289	222.321.748	232.937.212	238.505.273	248,402,799
6	Volume usaha	Rp.000	238.633.899	234.276.660	268.172.376	255.777.326	335,433,161
7	Jumlah SHU	Rp.000	7.177.774	5.381.272	5.885.049	6.278.332	6,114,797
8	Jumlah aset	Rp.000	343.220.367	363.858.421	380.768.255	394.253.546	408,610,440

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari indikator lain seperti jumlah simpanan, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, volume usaha, jumlah SHU, dan jumlah aset memiliki tren positif dari tahun 2019-2023 khususnya jumlah simpanan, jumlah modal luar. Volume usaha mengalami penurunan pada tahun 2022 yang disebabkan oleh koperasi berpindah badan hukum menjadi badan hukum provinsi dan badan hukum nasional sehingga volume usahanya tidak dihitung pada ranah kabupaten. Tahun 2023 jumlah SHU terjadi penurunan dikarenakan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2023 oleh koperasi meningkat sehingga berdampak pada jumlah SHU yang menurun.

Data perkembangan koperasi aktif Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.147

Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Kapanewon	2019			2020			2021			2022			2023		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1.	Temon	23	27	85,18	23	27	85,18	23	27	85,19	20	28	71,43	20	28	71.43
2.	Wates	62	69	89,85	61	68	89,70	60	67	89,55	49	66	74,24	50	67	74.63
3.	Panjatan	8	11	72,72	8	11	72,72	8	11	72,73	7	12	58,33	7	12	58.33
4.	Galur	11	16	68,75	11	16	68,75	12	17	70,59	13	18	72,22	13	18	72.22
5.	Lendah	14	15	93,33	14	15	93,33	14	15	93,33	11	15	73,33	11	15	73.33
6.	Sentolo	19	22	86,36	19	22	86,36	20	23	86,96	15	22	68,18	15	22	68.18
7.	Pengasih	34	36	94,44	37	39	94,87	38	40	95,00	32	41	78,05	32	41	78.05
8.	Kokap	19	19	100	22	22	100	22	22	100	23	25	92,00	24	26	92.31
9.	Girimulyo	7	9	77,78	7	9	77,78	8	10	80,00	6	9	66,67	6	9	66.67
10.	Nanggulan	12	14	85,71	13	15	86,67	12	14	85,71	12	15	80,00	12	15	80.00
11.	Kalibawang	12	13	92,30	12	13	92,30	12	13	92,31	9	14	64,29	9	14	64.29
12	Samigaluh	14	16	87,50	15	17	88,23	15	17	88,24	13	17	76,46	13	17	76.47
	Jumlah	235	267	88,01	242	274	88,32	244	276	88,41	210	282	74,47	212	284	74.65

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tahun 2019 jumlah koperasi aktif sejumlah 235 koperasi dari 267 koperasi. Jumlah koperasi aktif terus meningkat pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 244 dari 276 koperasi atau 88,41 persen koperasi merupakan koperasi aktif. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya Dinas Koperasi dan UKM melalui kegiatan pendampingan terhadap koperasi pasif. Pada Tahun 2022 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 210 koperasi aktif dari total koperasi sebanyak 282 koperasi atau 74,47 persen koperasi yang termasuk koperasi aktif. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi yang menjelaskan bahwa kriteria koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha yang melayani anggota.

Pada Tahun 2023 jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 2 koperasi atau sebesar 74,65 persen. Tidak terjadi perubahan koperasi pasif menjadi aktif pada tahun 2023 yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian.

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2.148

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Sektor Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	1.731	3.484	3.546	3.591	5,564
2.	Industri Pengolahan	18.682	18.677	17.295	17.611	18.765
3.	Bangunan	258	146	127	127	129
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran :					
	a. Hotel dan Restoran	467	641	614	642	648
	b. Pedagang Pasar	7.975	8.062	7.897	9.097	9,455
	c. Pedagang di luar pasar	10.325	10.436	10.944	11.477	13,369
	d. Pedagang Kaki Lima	713	713	1.560	1.560	2,995
5.	Pengangkutan dan Komunikasi	189	47	585	606	545
6.	Jasa-jasa	390	288	359	321	535
	Jumlah	40.775	42.493	42.927	45.032	52.005

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah UMKM Kulon Progo dari tahun 2019-2023 memiliki tren perkembangan positif setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dari tahun 2022, terjadi penambahan wirausaha baru sebanyak 6.973 wirausaha. Minat berwirausaha masyarakat yang tinggi seiring dengan perkembangan perekonomian di Kulon Progo menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan UMKM di Kulon Progo.

Tabel 2.149

Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitasi Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi	Pertumbuhan (%)	Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	1.811	16,39	50.009.996.000	19,7
2020	2.348	29,65	54.950.000.000	9,8
2021	3.223	37,27	64.655.000.000	17,66
2022	5.859	81,79	77.570.000.000	19,97
2023	8.236	40,57	100.552.671.111	29,63

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2024

Jumlah omzet UMKM yang mendapatkan fasilitasi mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2019-2023. Hal tersebut didukung dengan pendampingan terhadap UMKM yang lebih intensif melalui Dana Alokasi Khusus dari APBN disertai oleh adanya daya dorong pemerintah daerah, antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, serta pendampingan kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi. Pada tahun 2023 jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022, akan tetapi pada jumlah omzetnya terdapat kenaikan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 terdapat program subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Kulon Progo, sehingga pelaku usaha mikro dapat meminjam uang kepada bank dengan bunga yang lebih rendah.

Tabel 2.150

Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA)

Menurut Kapanewon Tahun 2019-2023

No.	Kapanewon	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Temon	1	6	6	6	6
2.	Wates	11	16	16	16	16
3.	Panjatan	-	-	-	-	-
4.	Galur	2	3	3	3	3
5.	Lendah	-	-	-	-	-
6.	Sentolo	2	2	2	2	2
7.	Pengasih	-	2	2	2	2
8.	Kokap	-	-	-	-	-
9.	Girimulyo	1	1	1	1	1
10.	Nanggulan	1	2	2	2	2
11.	Kalibawang	-	-	-	-	-
12.	Samigaluh	1	1	1	1	1
	Jumlah Total	19	33	33	33	33

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sampai dengan tahun 2023 terdapat 33 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon. Toko Milik Rakyat (ToMiRa) merupakan kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern berjejaring/waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa. Diharapkan keberadaan ToMiRa mempunyai dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM Kulon Progo. Mulai Tahun 2021 tidak terdapat *Take Over* ToMiRa dikarenakan terdapat kebijakan dari Pemerintah Kabupaten bahwa perlu dilakukan moratorium terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sehingga tidak dilakukan *Take Over* mulai Tahun 2021.

Tabel 2.151

Persentase Koperasi, UMKM, BPR Aktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Jenis	RUMUS		Tahun									
				2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
1	Persentase Koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi	x100 %	235 / 267	88,01	242 / 274	88,32	244 / 276	88,40	210 / 282	74,46	212 / 284	74,65
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif / Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	x100 %	34.763 / 34.763	100	42.493 / 42.493	100	42.927 / 42.927	100	45.032 / 45.032	100	52,005 / 52,005	100

No.	Jenis	RUMUS		Tahun									
				2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil / Jumlah seluruh UKM	x100 %	39.902 / 40.730	97,66	41.659 / 42.493	98,03	42.791 / 42.927	99,68	44.890 / 45.032	99,68	51,994 / 52.005	99,97

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Pada Tahun 2022 persentase koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 13,94 persen yang disebabkan oleh koperasi tidak melakukan RAT selama 3 tahun berturut sesuai dangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 25 Tahun 2015. Tahun 2023 jumlah koperasi aktif kembali meningkat sebanyak 2 koperasi yang merupakan koperasi baru.

UKM non BPR/LKM dan BPR/LKM secara keseluruhan memiliki tingkat keaktifan 100 persen. Pada tahun 2022 persentase usaha mikro tidak mengalami peningkatan atau tetap sebesar 99,68 persen. Pada tahun 2023 persentase usaha mikro kembali mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 99,68 persen menjadi 99,97 persen.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.956.281 juta rupiah dengan target yang ditetapkan sebesar Rp11.767.965. Nilai investasi Tahun 2023 didomonasi oleh nilai dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12.953.881 juta rupiah atau 92,81 persen dari total realisasi sedangkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1.002.400 juta rupiah atau 7,19 persen.

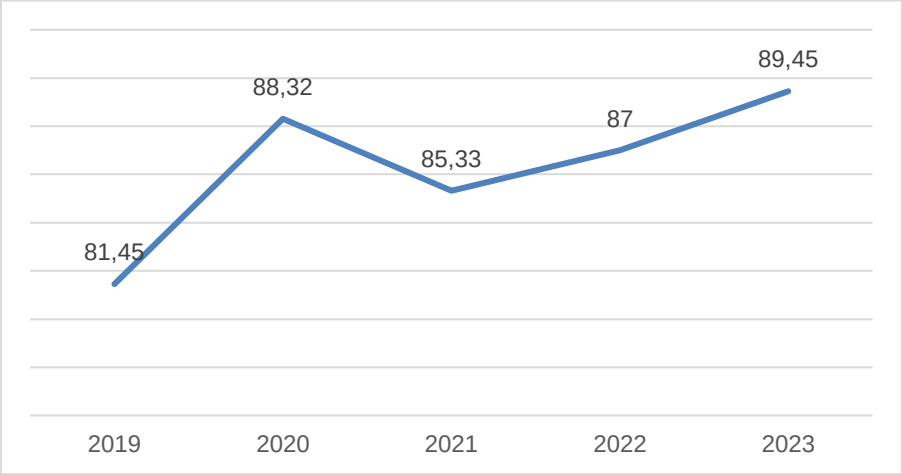
Tabel 2.152

Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)

No	Nilai investasi PMA/PMDN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Target	1.410.809	11.047.968	11.247.965	11.467.965	11.767.965
2	Realisasi	10.867.965	12.753.698	13.195.659	13.646.501	13.956.281
	PMA	*892.618*	*925.636*	*943.834*	*964.995*	*1.002.400*
	PMDN	*9.975.347*	*11.828.062*	*12.251.825*	*12.681.506*	*12.953.881*

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2024

Nilai investasi Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Triwulan IV untuk modal dari Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor industri lainnya serta sektor pertambangan. Sedangan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor pariwisata (Perhotelan dan Restoran), disusul sektor Jasa lainnya. Jumlah investasi PMA dan PMDN ditampilkan dalam tabel berikut:



Sumber: DPMPT, 2024

Gambar 2.38

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pada tahun 2018 (dimulainya OSS dan *soft launching* MPP) nilai IKM adalah 79,15 persen, di Tahun 2019 (setelah MPP dan OSS berjalan) adalah 81,45 persen, di Tahun 2020 realisasi IKM (setelah MPP diresmikan oleh Menteri PANRB) adalah 86,32 persen, di tahun 2021 realisasi IKM adalah 85,09 persen dan di tahun 2022 ini mencapai 87 persen. Nilai IKM tersebut menunjukan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Hasil IKM menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) dan *Online Single Submission* (OSS) dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Tabel 2.153

Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Izin	2,500	16,829
2	Jumlah pengajuan perizinan	Izin	3,000	16,829
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	10	12
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	10	12
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	600	897
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	600	897
	Capaian	%	86,67	100

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2024

Capaian jumlah perizinan di tahun 2023 adalah 673,16 persen dari target. Jumlah perizinan yang dikeluarkan berdasarkan sektor kegiatan atau proyek adalah 15.932 perizinan berusaha melalui OSS RBA, 549 perizinan non berusaha melalui si Cantik dan 348 perizinan non berusaha melalui SimBG. Sehingga total untuk perizinan yang diterbitkan adalah sebanyak 16.829 izin.

Perizinan berusaha melalui OSS terdiri dari 83 persen perizinan resiko rendah, 10 persen menengah rendah, 6 persen resiko menengah tinggi dan 1 persen adalah resiko tinggi. Sedangkan

berdasarkan skala usaha terdiri dari 95 persen usaha mikro, 4 persen usaha kecil,1 persen usaha menengah dan 0 persen usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebagian besar izin yang masuk bergerak pada usaha mikro dan belum ada investor dengan skala usaha besar.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP dalam meningkatkan pelayanan publik antara lain:

1. Mal Pelayanan Publik sebagai penyelenggaraan pelayanan publik terpadu, baik instansi vertikal, horizontal maupun BUMD/BUMN dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
2. Pelayanan perizinan melalui Si Cantik telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang merupakan satu-satunya daerah di DIY dan Pelayanan perizinan di Kapanewon melalui Si Peri Manis Kapanewon (Sistem Perizinan Mendekat, Akuntabel, Normatif, Integrative melalui Si Cantik di Kapanewon.
3. Verifikasi dan Validasi OSS sudah terintegrasi dan diterbitkan melalui SuratKu
4. Sticker Reklame sudah menggunakan *Quick Response Code* (QR-Code), atau perizinan reklame melalui scan *barcode*.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan.Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.154

Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Organisasi pemuda	16	16	16	19	19
2	Organisasi Olahraga	42	42	45	45	46
3	Klub Olahraga	280	280	280	148	173
4	Kegiatan Pemuda	6	4	4	4	2
5	Kegiatan Olahraga	4	5	6	8	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.155

Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	27	28	45	45	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	21	21	32	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	27	28	28	32	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	16	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2019 cukup membanggakan. Sebagai catatan tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan Porda DIY karena masih kondisi Pandemi Covid-19. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali, ditunjukkan pada tabel di bawah ini. PORDA DIY dilaksanakan setiap dua tahun sekali, di tahun gasal. Namun karena pandemi covid, porda tahun 2021 dilaksanakan mundur di tahun 2022. sehingga tahun 2023 tidak dilaksanakan. PORDA mendatang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Tabel 2.156

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.157

Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	16	16	17	9

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	12	8	8	15	9

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Walaupun ditahun 2023 mengalami penurunan dalam pengiriman pemuda yaitu 9 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.1.3.2.13 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Permasalahan ini kemudian diantisipasi dengan memroyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Kulon Progo serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS. Pelaksanaan urusan Statistik di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah disusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024 dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 416/C/2022. Kemudian juga telah dibentuk Tim Forum Satu Data Kabupaten Kulon

Progo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 45/C/2024, dengan Bappeda selaku koordinator, BPS Kabupaten Kulon Progo selaku pembina data sektoral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku pembina data geospasial dan Dinas Kominfo selaku walidata sektoral serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku walidata geospasial. Kemudian sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral telah pula disusun Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Bupati Nomor 050/2269 tanggal 4 Juli 2023 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik. Capaian urusan Statistik sampai dengan akhir tahun 2023 telah tersusun 8 rekomendasi statistik, dan 31 metadata kegiatan terdiri dari 20 instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 4 instansi vertikal. Rekomendasi Statistik dan metadata kegiatan merupakan salah satu unsur penilaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sosial (EPSS) yang hasilnya adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2023 IPS Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai 2,00 dengan predikat Cukup.

2.1.3.2.14 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara bertahap.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam, jumlah kelompok seni budaya sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.365 kelompok mencakup kelompok seni tari, musik, kriya, rupa, pertunjukan, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK). Upacara adat masih kental dalam kehidupan masyarakat, antara lain upacara suran, bersih dusun, saparan, sadranan, dll. Peninggalan sejarah dan purbakala juga cukup bervariasi, mulai dari peninggalan prasejarah, peninggalan periode klasik (Hindu, Budha), peninggalan periode Islam, periode kolonial maupun perjuangan.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kulon Progo dilaksanakan untuk bisa memfasilitasi seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kesenian menjadi even tahunan seperti Sendratari Sugriwo Subali, Menoreh Art Festival, Nglarak Blarak dan Jemparingan. Juga dilakukan pendampingan atau pembinaan pada kesenian yang menjadi ciri khas diantaranya Seni Angguk Putri. Seni Angguk Putri dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi senam khas Kulon Progo yaitu senam angguk.

Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya melalui fasilitasi di kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi yaitu gelar upacara adat dan tradisi. Setiap tahun juga dilaksanakan upacara Nyadran Agung yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, upacara ini disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di perantauan. Upacara adat dan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Kulon Progo antara lain nyadran, saparan, jamasan, wiwitan, rebo pungkasan, ngguyang jaran, merti bumi, sedekah laut, malam suronan, baritan, muludan, anggoro kasih, tawu sendang, gumbregi, ruwatan, punden damarwulan dan sebagainya.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya dari masa lalu (*intangible*) berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.

Upaya pelestarian budaya dilakukan juga dengan pengembangan desa budaya dan rintisan desa budaya. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan dapat berkembang menjadi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya. Berikut data Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang Sampai dengan Tahun 2023:

Tabel 2.158

Data Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
1.	Pagerharjo	Samigaluh	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
2.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
3.	Banjarharjo	Kalibawang	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
4.	Sidorejo	Lendah	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
5.	Sukoreno	Sentolo	Kalurahan Budaya (Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya)
6.	Glagah	Temon	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
7.	Sendangsari	Pengasih	Kalurahan Budaya (Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya)
8.	Jatimulyo	Girimulyo	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
9.	Brosot	Galur	Kalurahan Budaya
10.	Hargomulyo	Kokap	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
11.	Bugel	Panjatan	Kalurahan Budaya

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
12.	Tuksono	Sentolo	Kalurahan Budaya (Kalurahan Mandiri Budaya)
13.	Sogan	Wates	Kalurahan Budaya
14.	Tayuban	Panjatan	Kalurahan Budaya
15.	Kalirejo	Kokap	Kalurahan Budaya (Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya)
16.	Kaliagung	Sentolo	Kalurahan Budaya
17.	Gerbosari	Samigaluh	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
18.	Banjararum	Kalibawang	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
19.	Pendoworejo	Girimulyo	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
20.	Jatisarono	Nanggulan	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
21.	Purwosari	Girimulyo	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
22.	Tirtorahayu	Galur	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
23.	Pengasih	Pengasih	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
24.	Gulurejo	Lendah	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
25.	Kaligintung	Temon	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
26.	Giripeni	Wates	Kalurahan Budaya
27.	Giripurwo	Girimulyo	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
28.	Hargotirto	Kokap	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
29.	Hargowilis	Kokap	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
30.	Jatirejo	Lendah	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
31.	Depok	Panjatan	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
32.	Tawangsari	Pengasih	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
33.	Purwoharjo	Samigaluh	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
34.	Banguncipto	Sentolo	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
35.	Demangrejo	Sentolo	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
36.	Salamrejo	Sentolo	Kalurahan Budaya
37.	Ngargosari	Samigaluh	Kalurahan Budaya
38.	Hargorejo	Kokap	Kalurahan Budaya
39.	Sentolo	Sentolo	Kalurahan Budaya
40.	Kebonharjo	Samigaluh	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
41.	Ngentakrejo	Lendah	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
42.	Karangsewu	Galur	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
43.	Pleret	Panjatan	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
44.	Banjarasri	Kalibawang	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang
45.	Sidoharjo	Samigaluh	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
46.	Kalidengen	Temon	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
47.	Kranggan	Galur	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
48.	Nomporejo	Galur	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
49.	Margosari	Pengasih	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
50.	Sidomulyo	Pengasih	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh
51.	Banjaroya	Kalibawang	Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Dalam pengembangan kebudayaan terhadap desa/ kalurahan, yang semula Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya meningkat menjadi di Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang. Selanjutnya dengan pendampingan yang lebih intensif, Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang meningkat menjadi Desa/ Kalurahan Budaya. Jumlah Desa/ Kalurahan budaya dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan karena sebagian kalurahan tersebut sudah meningkatnya statusnya menjadi Desa mandiri Budaya yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya taun 2020 & Keputusan Gubernur DIY nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya tahun 2021. Data Perkembangan. Data perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.159

Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang,

Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2019-2023

Kategori	Kondisi pada tahun-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rintisan Desa/ kalurahan budaya kategori berkembang	21	26	30	35	30
Desa/ kalurahan budaya	15	13	9	9	10
Desa/ kalurahan mandiri budaya	0	2	7	7	8
Total	36	41	46	51	48

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2024;

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta terjangkau.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.160

Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kunjungan perpustakaan	176.479	93.191	102.822	299.127	180.902
2.	Jumlah populasi yang harus dilayani	430.220	432.220	442.838	443.361	446.192
3.	Jumlah buku	56.184	56.499	56.649	59.322	60.344
4.	Jumlah perpustakaan terstandar	33	38	43	78	217
5.	Jumlah perpustakaan seluruhnya	621	621	621	616	633

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan secara umum fluktuatif. Peningkatan kunjungan disebabkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, makin gencarnya promosi melalui bazar dan penambahan jumlah pengunjung secara daring (melalui internet). Perlu diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan juga diperhitungkan melalui layanan perpustakaan keliling. Pada tahun 2023, pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dikarenakan menurunnya volume operasional motor pintar.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah buku dari tahun 2019 hingga tahun 2022 selalu menunjukkan peningkatan. Penambahan buku pada tahun 2023 sebanyak 1.022 buah. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya program prioritas pengadaan buku untuk menambah koleksi khususnya perpustakaan keliling. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.161

Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2019-2023

No	Judul/Kelompok	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umum	3.672	3.756	3.759	3.695	3.831
2	Filsafat	2.850	2.865	2.868	2.882	2.903
3.	Agama	6.907	6.951	6.951	6.977	6.996
4.	Ilmu–ilmu Politik	9.366	9.418	9.421	9.627	9.805
5.	Bahasa	1.841	1.845	1.845	1.858	1.858
6.	Ilmu Murni	3.732	3.772	3.772	3.581	3.786
7.	Ilmu Terapan	10.978	10.982	10.991	10.957	11.029
8.	Kesenian	3.017	3.029	3.029	2.988	3.102
9.	Sastra	11.031	11.083	11.213	11.159	11.392
10.	Sejarah dan Geografi	2.790	2.798	2.800	2.915	2.973
11.	Non Buku (Peta)	75	75	75	75	75
12.	Non Buku (Globe)	3	3	3	3	3
13.	Non Buku (*E-Book*)	2.280	2.380	2.480	2.605	2.705
	Jumlah	**55.762**	**58.957**	**59.207**	**59.322**	**60.422**

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2024

Hal yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat baca masyarakat adalah keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar. Jumlah perpustakaan keseluruhan yang dilaksanakan pembinaan sebanyak 616 perpustakaan. Dari 616 perpustakaan tersebut sebagian besar

belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Pada tahun 2019 ada 33 perpustakaan yang memenuhi standar, pada tahun 2020 meningkat menjadi 38 perpustakaan, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 43 perpustakaan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 78 perpustakaan dan tahun 2023 meningkat menjadi 217 perpustakaan.

Jumlah Pustakawan yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat pada tahun 2023 masih sama dengan jumlah pada tahun 2022. Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kulon Progo tetapi juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.162

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pustakawan	11	11	13	12	12
2	Jumlah tenaga teknis	7	6	4	5	5
3	Jumlah penilai bersertifikat	2	2	2	2	2

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.2.17 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada unit kerja dan kalurahan. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan kalurahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing-masing unit kerja dan kalurahan tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan.

Tabel 2.163

Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	58	70	80	94	94
2.	Jumlah unit kerja	94	94	94	94	94
3.	Jumlah kalurahan yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	47	55	73	87	87
4.	Jumlah kalurahan	87	87	87	87	87

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.164

SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Capaian kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Arsiparis	12	15	14	13	13
2	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	140	140	213	132	312

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kearsipan yang ada jumlahnya sangat terbatas. Untuk Tenaga Arsiparis (jabatan fungsional) terdapat penurunan 1 orang dari tahun sebelumnya dari 14 personil menjadi 13 personil, dengan perincian 4 orang di perangkat daerah dan 9 orang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum dapat melaksanakan pembinaan maupun pendampingan secara serentak untuk seluruh Perangkat Daerah, sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat daerah dilaksanakan secara bergantian dan bertahap.

Kegiatan bidang kearsipan lainnya berupa akuisisi arsip statis dari masyarakat dan PD maupun pendokumentasian even maupun dokumen kearsipan. Sampai saat ini arsip statis yang mengandung nilai historis ini berupa arsip tekstual, foto dan peta. Adapun arsip dimaksud diantaranya:

1. Keberadaan Pabrik Gula Sewugalur Tahun 1917;
2. Arsip keberadaan situs geoheritage bekas tambang Mangaan di Kliripan kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap berupa arsip tekstual, arsip foto, dan peta yang saat ini tengah direstorasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
3. Kunjungan Presiden Soekarno ke Pabrik Garam di Pantai Trisik pada September 1951;
4. Pabrik Nila Bulurejo;
5. Arsip Gempa Jogja;
6. Arsip pendirian Bandara Internasional Yogyakarta berupa tekstual dan foto;
7. Arsip perangkat daerah lainnya.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.165

Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

No.	Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi ikan budidaya (ton)	16.658	16.666,03	16.699	16.714	16.803,44
2.	Produksi ikan tangkap (ton)	2.025	2.125,57	2.190,06	2.190,35	2.183,85

No.	Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
	Total produksi (ton)	18.683	18.791,61	18.889	18.905	18.987,00
	Target (ton)	15.923	16.537	17.154	17.614	18.813,00
	Persentase (%)	117,33	113,63	110,11	107,33	100,93

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2023

Total produksi ikan tahun 2023 tercapai 18.987 ton atau 100,93% dari target kinerja daerah yang ditetapkan yaitu 18.813 ton dan meningkat 0,44% dibandingkan dengan produksi ikan tahun 2022 sebesar 18.889 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 tercapai 16.803 ton atau 100,62% terhadap target produksi sebesar 16.763 ton dan meningkat 0,53% dibandingkan dengan produksi Tahun 2022 sebesar 16.714 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 tercapai 2.183,85 ton, menurun 6,5 ton dari tahun 2022 (2.190,35 ton).

Total produksi ikan budidaya sebesar 16.803,44 ton terdiri dari produksi ikan dari kolam sebanyak 13.813,21 ton yang merupakan produksi utama produksi perikanan budidaya. Kemudian diikuti produksi ikan dari tambak sebanyak 2.990,13 ton udang vaname. Sedangkan produksi ikan lainnya berasal dari sawah atau mina padi dan karamba sebesar 0,1 ton ikan nila. Produksi perikanan tangkap tahun 2023 yaitu sebesar 2.183,85 ton. Produksi tangkap laut naik 16,57% dari Tahun 2022 yaitu dari 729,66 ton menjadi 850,53 ton, sedangkan untuk tangkap perairan umum turun 8,72% dari 1.460,69 ton menjadi 1.333,31 ton. Penurunan perikanan tangkap di perairan umum disebabkan oleh banyaknya ikan invasif *red* devil di Waduk Sermo yang mengakibatkan turunnya minat nelayan untuk menangkap ikan di Waduk Sermo. Kendala dalam perikanan budidaya yaitu pembudidayaan ikan di Kabupaten Kulon Progo ini masih berskala kecil, yang letaknya tersebar dan masih bersifat individual dan belum ada manajemen yang tersentra.

Kondisi topografi dan geografi Kabupaten Kulon Progo menyebabkan adanya beberapa ancaman bencana alam antara lain ancaman kekeringan terutama di kawasan Pegunungan Menoreh yaitu di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Kapanewon Pengasih. Ketersediaan air pada kemarau sangat kurang untuk usaha budidaya perikanan dan di sisi lain pengaturan air irigasi diutamakan untuk mendukung pola tanam. Kendala lainnya yaitu ketersediaan benih (kualitas, kuantitas, kontinuitas) dan tingginya harga pakan pabrikan sehingga margin keuntungan pembudidaya ikan sangat minim. Lebih lanjut lagi, kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar ketika ketika mengalami kegagalan dalam memasarkan produk perikanan yang berupa ikan segar. Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan peningkatan daya saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah lain bahkan dengan negara lain. Dari sisi pembudidaya ikan ada keterbatasan mengakses kebutuhan pasar. Sebagai upaya peningkatan produk dan perluasan pasar maka pada program Sembako (BPNT) yang bersumber dari dana APBD maka Pokdakan mensuplai lele untuk dapat dibagikan ke masyarakat penerima manfaat tersebut melalui kerjasama dengan eWarong.

Kendala lain yang dihadapi daerah yakni relatif masih rendahnya pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.166

Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2019-2023

No.	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Potensi Lahan Budidaya Ikan	Hektar	22.759	22.759	22.759	22.759	22.759
2.	Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan	Hektar	132,94	140,18	138,19	138,5	138.5
3.	Persentase Pemanfaatan	Persen	0,58	0,62	0,61	0,61	0,61

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas memang terjadi peningkatan pemanfaatan lahan dari 0,58 persen pada Tahun 2019 hingga berturut-turut mencapai 0,61 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian capaian pemanfaatan potensi lahan untuk usaha perikanan masih di bawah angka 1 persen. Sehingga dari data tersebut kemungkinan berkontribusi terhadap belum optimalnya produksi perikanan di Kabupaten Kulon Progo.

Pada usaha perikanan tangkap, produksi dari laut belum optimal diantaranya disebabkan:

1. Belum operasionalnya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Karangwuni disebabkan jalur keluar masuk pendaratan ikan tertutup oleh sedimentasi pasir yang tinggi di muara sungai serang yang menyebabkan kapal tidak bisa keluar masuk pelabuhan;
2. Belum sempurnanya pembangunan breakwater (pemecah gelombang) membuat nelayan tidak bisa melaut / mendarat dengan aman;
3. Nelayan Kulon Progo merupakan nelayan kecil yang dengan menggunakan Perahu Motor Tempel (PMT) yang hanya dapat melakukan penangkapan ikan di laut dengan jarak maksimal 1 – 4 mil;
4. Ketergantungan nelayan dengan cuaca dan gelombang laut. Pada tahun 2023, cuaca buruk dan gelombang pasang mengakibatkan beberapa kejadian kecelakaan laut nelayan;
5. Abrasi pantai yang cukup tinggi membuat pantai lebih curam dan menyulitkan nelayan mendaratkan perahunya.

Tabel 2.167

Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Capaian Produksi Ikan terhadap target(%)	117,33	113,63	110,11	107,33	100,93
	Jumlah Produksi Ikan(Ton)	18.683	18.791,61	18.889,00	18.905	18.987
	Target Daerah(Ton)	15.923	16.537	17.154,00	17.614	18.813
2	Capaian Konsumsi Ikan terhadap target(%)	100,63	100,86	102,79	102,00	100,00
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)Kg/Kap/Tahun	27,03	27,1	28,78	30,60	31.00*)
	Target Daerah (Kg)Kg/Kap/Tahun	26,86	26,87	28,00	30,00	31,00
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	9,38	16,13	12,9	35,48	23,68
	Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n	3	5	4	11	9
	Jumlah kelompok nelayan	32	31	31	31	38

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	4,55	5,23	4,89	3,86	4,48
	Jumlah produksi Ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	849,4	983,96	923,87	729,67	850,53
	Jumlah produksi ikan didaerah	18.683	18.791,61	18.889,00	18.905	18987,29
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	0,091	0,106	0,099	0,079	0,092
	Jumlah tangkapan ikan	849	983,96	923,87	729,67	850,53
	80% dari tangkapan maksimum lestari (WPP573)	929.330	929.330	929.330,00	929.330,00	929.330,00

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2023

**data sementara*

Angka konsumsi ikan pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan 7,6 persen dari Tahun 2021 yaitu dari 28,78 kg/kap/tahun menjadi 30,97 kg/kap/tahun. Angka Konsumsi Ikan tahun 2023 diperkirakan mencapai 31,00% (angka sementara) meningkat 0,09% dari tahun 2022. Hal tersebut menunjukan kinerja pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh pemangku kepentingan terkait terhadap peningkatan gizi masyarakat mulai konsumsi ikan menunjukkan prestasi yang baik. Diharapkan generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting dan upaya memperbaiki kualitas kader penerus bangsa.

Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor 188/00466 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 10 Desa/ Kalurahan Maritim yang tersebar di 4 kapanewon, yaitu di Kapanewon Galur: 2 kalurahan, Kapanewon Panjatan: 3 kalurahan, Kapanewon Temon: 4 kalurahan, dan Kapanewon Wates: 1 kalurahan. Penetapan desa/kalurahan Maritim ini adalah untuk pemberdayaan dan peningkatan potensi desa di wilayah pesisir pantai termasuk masyarakatnya yang bergerak di Bidang Kelautan dan Perikanan melalui dana BKK Dana Keistimewaan DIY.

Prioritas penggunaan BKK Desa/Kalurahan Maritim adalah peningkatan kesejateraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dengan usaha kelautan dan perikanan seperti usaha perikanan tangkap, usaha budidaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Melalui pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat di Kulon Progo yang terintegrasi hulu - hilir dan profesional dengan keunggulan, keunikan dan kearifan lokal mempunyai daya ungkit yang lebih kuat dalam mendorong arus balik Among Tani ke Dagang Layar sehingga akan ada nilai tambah dan peningkatan pendapatan di wilayah perdesaan. Sejalan dengan hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berusaha menangkap tradisi ini dengan mengupayakan kegiatan Gerakan Membangun Kelautan dan Perikanan dengan Semangat Gotong Royong (GERBANG SEGORO).

Inovasi “Gerbang Segoro” merupakan Gerakan membangun sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membangkitkan semangat berbudidaya ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah dan penangkapan ikan di laut, sebagai wujud untuk meningkatkan gizi keluarga, serta mengembangkan

ekonomi masyarakat, yang bernafaskan Cecikal, Bebakal dan Tetinggal, dengan maksud produk perikanan dengan skala rumah tangga dihasilkan tidak hanya dijual segar, namun harus bisa diolah dan dikemas untuk dipasarkan dengan nilai jual ekonomis lebih tinggi.

Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong dilaksanakan secara bertahap dan atau pararel mulai dari:

1. Tahap Cecikal atau Penumbuhan dalam rangka memperkuat sistem pengembangan usaha perikanan secara utuh hulu – hilir melalui penguatan kelembagaan kelompok perikanan, pengadaan prasarana dan sarana produksi, sekolah lapang dan temu usaha untuk mendukung berfungsinya sistem pengembangan usaha perikanan secara utuh, efektif dan efisien
2. Tahap Bebakal atau Pengembangan dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok perikanan dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui: penguatan kapasitas pelaku / pengelola dan penguatan hilirisasi produk untuk mendukung meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok perikanan serta tersedianya dukungan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Tahap Tetinggal atau Kemandirian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk komoditas hasil perikanan melalui: MoU dukungan pemerintah dan regulasi kebijakan, penguatan permodalan dan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pengembangan pusat ekonomi daerah untuk mendukung meningkatnya produksi & produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan, konsumsi pangan serta teraplikasi-nya teknologi inovatif spesifik perikanan hulu-hilir.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Tabel 2.168

Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Glagah	485.804	332.360	352.010	606.500	682.322
2	Pantai Congot	70.159	60.577	48.725	78.873	115.075
3	Pantai Trisik	31.732	8.739	6.901	12.234	23.133
4	Waduk Sermo	124.026	91.875	76.034	101.340	75.799
5	Goa Kiskendo	14.346	4.925	4.166	7.474	6.998

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Puncak Suroloyo	13.671	9.992	7.484	9.461	10.649
7	WA Nglinggo	62.060	30.551	44.568	25.934	200
8	WA Tritis	5.000	4.407	3.496	2.329	641
9	Kawasan Menoreh Barat	72.439	26.215	7.103	6.698	5.733
10	Kawasan Jatimulyo	7.802	21.324	28.734	41.793	22.817
	Jumlah	**887.039**	**590.965**	**579.221**	**892.636**	**943.367**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah kunjungan wisata pada destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah tahun 2019 sebanyak 887.039 orang, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 590.965 orang, atau menurun sebesar 33,38 persen. Kunjungan wisata pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak dari pandemi covid 19 yaitu penutupan obyek wisata untuk membatasi pergerakan manusia (wisatawan). Dengan dibukanya kembali obyek wisata secara terbatas menjadi momentum bagi wisatawan untuk melepas kejenuhan, namun demikian pada tahun 2021 kunjungan wisata masih mengalami penurunan menjadi 579.221 orang. Pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah kunjungan wisata sebesar 54,11 persen dari tahun sebelumnya. Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,68 persen. Tren kunjungan pada destinasi pantai meningkat, dan penurunan terjadi pada destinasi wilayah pegunungan. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, yaitu kondisi medan yang cukup terjal sehingga wisatawan enggan untuk datang kembali.

Selanjutnya perkembangan pendapatan daerah dari retribusi pariwisata tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.169

Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Pendapatan Per Tahun (Rp.000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Retribusi Pariwisata	4.683.049	3.340.090	3.304.329	5.126.499	5.581.290
2	Lain-lain PAD yang Sah	59.813	4.800	4.800	5.000	6.000
	Total Pendapatan Retribusi Pariwisata	**4.742.862**	**3.344.890**	**3.304.329**	**5.131.499**	**5.587.290**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**237.876.805**	**161.400.585**	**103.828.354**	**308.158.513**	**324.058.666**
	Persentase (%)	**1,99**	**2,07**	**3,18**	**1,66**	**1,72**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pendapatan retribusi dari sektor pariwisata tahun 2019 mencapai Rp4.742.862.000,00 atau naik sebesar 17,42% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, sebesar Rp3.344.890.000,00 atau menurun sebesar 29,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 meskipun secara total PAD menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun proporsi pendapatan retribusi dari sektor

pariwisata naik menjadi 3,18%. Pada tahun 2021 secara periode lima tahunan merupakan anggaran terkecil namun jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo capaiannya tertinggi yaitu sebesar 3,18%. Pendapatan retribusi dari sektor pariwisata tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan. Penyumbang PAD tersebar di sektor pariwisata adalah retribusi wisata Pantai Glagah yaitu sebesar Rp 3.639.402.000,00 atau 70,92% dari total PAD. Sedangkan pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar 8,88% dengan persentase terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat 0,06% dibandingkan tahun 2022.

Berikut data kunjungan wisatawan pada 5 kabupaten/kota se DIY pada tahun 2018-2023:

Tabel 2.170

Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY

(Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2019-2023

No	Kabupaten /Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Kulon Progo	41.753	1.994.417	0	966.432	9	906,292	2,014	1,559,424	11.459	1.912.147
2.	Bantul	4.871	8.007.795	252	2.265.171	57	2,819,691	129	5,419,499	2.360	5.772.527
3.	Gunung Kidul	19.191	3.661.612	3.453	1.978.146	42	1,937,627	709	3,106,063	4.680	3.713.142
4.	Sleman	233.005	10.145.104	24.044	4.226.075	41	5,162	65,302	7,105,769	179.543	7.826.400
5.	Yogyakarta	252.682	3.963.919	37.008	1.329.562	26	827	62,261	2,658,606	n/a	n/a
	Total	**551.502**	**27.772.847**	**64.757**	**10.765.386**	175	5,669,599	130,415	19,849,361	198,042	19,224,217

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Khusus untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2022 sejumlah 2.014 dan tahun 2023 sejumlah 11.459 atau meningkat 468,96. Peningkatan jumlah wisatawan disebabkan karena Pemerintah Daerah menyelenggarakan beberapa atraksi wisata budaya di destinasi wisata dan peran serta masyarakat melalui inovasi paket wisata pada desa wisata juga meningkat.

Selain obyek wisata yang beretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga berkembang wisata non retribusi, yaitu desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan wisata non retribusi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam dan budaya setempat.

Desa wisata di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 24 desa wisata. Berikut data beberapa potensi desa wisata di Kulon Progo:

Tabel 2.171

Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
1	Girimulyo	Jatimulyo	Caving Goa Kiskendo dan Sumitro, Bird Watching, Kuliner Kopi Sulingan, Agro Salak
	`	Purwosari	Goa Kidang Kencana, Air Terjun, budaya, agro
		Pendoworejo	Pronosutan View, Bendung Kayangan
2	Kalibawang	Banjarasri	Sport Tourism (paralayang wisata), live in Dolan Deso, Wisata Religi Sendangsono

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
		Banjaroya	Ritual, Ziarah, Makam Kyai Krapyak, Makam Pengikut P. Diponegoro, Kesenian Strek, Embung Banjaroya, Agrowisata Durian
		Banjararum (Dekso)	River Tubbing
3	Kokap	Kalibiru	Hutan Wisata Kalibiru, Alam Perbukitan Menoreh, Outbond
		Sermo-Hargowilis	Waduk Sermo, Alam Perbukitan Menoreh
		Hargomulyo	Sendang Pengilon
		Hargotirto (Segajih)	Live In, Tracking, Susur Sungai, Pembuatan Gula Merah
		Hargorejo	Ex Tambang Mangaan Kliripan
4	Lendah	Sidorejo	Bendungan Sapon, Budaya, Batik, Blangkon, Kerajinan Kembang Kering, Outbound di Tepi Sungai Progo
		Gulurejo	Sentra Industri Batik
		Jatirejo	Bukit Cubung, Wisata Religi Makam Kyai Landoh
5	Panjatan	Pleret/ Sawah Surjan	Wisata Edukasi Sawah Surjan, Pantai Mlarangan Asri
6	Samigaluh	Nglinggo - Pagerharjo	Treking, Menyadap Nira Aren, Lengger Tapeng, Petilasan Linggo Manik, Gagak Roban, Dalem Tunu, Buto Sinjang/Offroad
		Sidoharjo/ Menoreh	Panorama Menoreh, Grojogan/Curug Sidoharjo, Coffee Tour
		Purwoharjo / Tinalah	Goa, Latar Belakang Sejarah Diponegoro, Budaya, Wisata Edukasi, Camping Ground
		Widosari (Ngargosari)	Puncak Widosari, Pemandangan Alam di Ketinggian, Melihat Sunset dan Sunrise
		Gerbosari	Puncak Suroloyo, Agrowisata Krisan
7	Sentolo	Sukoreno	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
		Tuksono	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
8	Temon	Glagah	YIA, Pantai Glagah, Pantai Congot, Hutan Mangrove
9	Galur	Banaran	Pantai Trisik, Konservasi Penyu, Batik Alam

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata adalah dengan menyelenggarakan Lomba Gelar Potensi Desa Wisata. Kegiatan ini salah satunya agar desa wisata memiliki daya saing yang kompetitif, baik dari paket wisata yang dijual maupun pengembangan kelembagaannya. Hal ini terbukti efektif untuk mendorong pengembangan desa wisata menjadi lebih baik dan tentu saja berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa/kalurahan. Selain itu dampak diadakannya lomba gelar potensi desa wisata adalah diraihnya penghargaan tiga kali berturut-turut dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu Desa Wisata Tinalah (2021), Desa Wisata Widosari (2022) dan Desa Wisata Hargotirto (2023).

Perkembangan jumlah pengunjung pada desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola masyarakat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.172

Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Wisata	411.296	-	-	97.746	140.587
2	Non Desa Wisata	797.506	375.467	330.680	571.056	839.652
	Jumlah	**1.208.802**	**375.467**	**330.680**	**668.802**	**980.239**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang dikelola masyarakat pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah kunjungan sebesar 46,56% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat untuk mempromosikan pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisata di Kulon Progo cukup berhasil. Desa wisata dapat menyajikan paket-paket wisata yang menarik minat wisatawan, baik dengan menjual destinasi wisata maupun kearifan lokal, baik seni budaya, serta adat tradisi masyarakat setempat.

Pelayanan terhadap wisatawan merupakan hal yang sangat penting. Pemandu wisata menjadi salah satu ujung tombak pelayanan yang langsung menyentuh kepada kebutuhan wisatawan akan informasi. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang dikelola masyarakat. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan pemandu melalui sertifikasi pemandu wisata.

Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang dikelola masyarakat. Usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan pemandu melalui sertifikasi pemandu wisata. Berikut data pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.173

Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Pemandu Wisata	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemandu Wisata Bersertifikat (orang)	62	72	91	90	90
2	Pemandu Wisata Non Sertifikat (orang)	65	16	39	40	40
	Total	**127**	**88**	**130**	**130**	**130**

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023

Perkembangan pariwisata pada masa pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun tetap memberikan *multiplier effect* terhadap usaha-usaha jasa pariwisata yang mengajukan ijin legalitas bertanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Hal tersebut merupakan komitmen menjamin pelayanan usaha jasa bagi konsumen (wisatawan). Berikut ini tabel usaha jasa pariwisata yang bertanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.174

Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berijin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2022

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	**Jasa Perjalanan Wisata**					
1	Biro Perjalanan Wisata	3	5	7	8	13
2	Agen Wisata	7	8	8	8	8
II	**Jasa Makanan dan Minuman**					
1	Restoran	1	1	5	7	30
2	Jasa Boga	10	12	15	15	15
3	Rumah Makan	10	14	14	15	74
III	**Penyediaan Akomodasi**					
1	Hotel non Bintang	3	4	6	6	15
IV	**Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**					
1	Karaoke	1	1	1	1	0
2	Gelanggang Renang	1	1	1	1	1
3	Salon dan spa	-	1	1	1	0
V	**Penyelenggaraan Pertemuan, Insentif, Konverensi dan Pameran**					
1	MICE	7	8	8	9	9
	Total	**43**	**55**	**66**	**71**	**165**

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Usaha jasa pariwisata yang berizin mengalami peningkatan yaitu dari 71 usaha jasa tahun 2021 meningkat menjadi 165 usaha jasa di tahun 2022 atau meningkat 132%. Peningkatan terbanyak pada usaha jasa pariwisata sektor jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi. Hal ini merupakan salah satu dampak keberadaan BIY.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya sektor pariwisata, dengan penghapusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Untuk perizinan berbasis risiko tersebut dilakukan penilaian Tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, sehingga dikategorikan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berikut data Usaha Jasa Pariwisata yang ber-NIB tahun 2023 :

Tabel 2.175

Data Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB tahun 2023

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah
1	49425 (Angkutan Darat Wisata)	3
2	55110 (Hotel Bintang)	2
3	55120 (Hotel Melati)	4
4	55130 (Pondok Wisata)	8

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah
5	55191 (Penginapan Remaja/Youth Hostel)	4
6	55193 (Villa)	4
7	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya)	4
8	55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya)	19
9	56101 (Restoran)	35
10	56102 (Rumah/Warung Makan)	301
11	56103 (Kedai Makanan)	908
12	56104 (Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap)	62
13	56109 (Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya)	10
14	56210 (Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu)	1
15	56290 (Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu)	3
16	56301 (Bar)	2
17	56303 (Rumah Minum/Kafe)	8
18	56304 (Kedai Minuman)	55
19	56306 (Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap)	4
20	74130 (Aktivitas Desain Komunikasi Visual)	1
21	74201 (Aktivitas Fotografi)	9
22	79111 (Aktivitas Agen Perjalanan Wisata)	1
23	79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata)	20
24	79911 (Jasa Informasi Pariwisata)	1
25	79912 (Jasa Informasi Daya Tarik Wisata)	1
26	79921 (Jasa Pramuwisata)	2
27	79990 (Jasa Reservasi Lainnya)	3
28	82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice))	1
29	82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event))	2
30	90011 (Aktivitas Seni Pertunjukan)	3
31	90012 (Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan)	3
32	90029 (Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya)	1
33	90040 (Aktivitas Operasional Fasilitas Seni)	1
34	90090 (Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya)	2
35	93219 (Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya)	2
36	93229 (Daya Tarik Wisata Alam Lainnya)	1
37	93231 (Wisata Agro)	2
38	93239 (Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya)	3
39	93244 (Kolam Pemancingan)	1
40	93292 (Karaoke)	1
41	96121 (Rumah Pijat)	9
	Jumlah	**1.507**

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2023

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui

pelatihan serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata dengan fasilitasi sertifikasi. Fokus prioritas destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah Kawasan Pantai Glagah - Congot mengingat lokasi tersebut berdekatan dengan Bandara Internasional Yogyakarta, sehingga diharapkan dapat menarik calon wisatawan dari penumpang di bandara tersebut.

2.1.3.3.3 Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.176

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023

No.	Kondisi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Padi dan Palawija (ton)	230.785,59	228.635,04	205.435,67	199.904,88	204.988,50
2	Produksi Sayuran dan Buah-buahan semusim (ton)	72.989,87	87.570,94	76.851,69	78.642,78	92.609,80
3	Produksi Buah-buahan dan sayuran tahunan (ton)	82.284,17	98.396,08	101.906,11	103.548,8	99.872,40
4	Produksi Biofarmaka (ton)	15.404,46	13.636,95	13.962,57	15.224,02	14.961,99
5	Produksi Perkebunan (ton)	119.012,63	106.760,06	139.997,02	107.181,32	97.797,80
6.	Populasi ternak besar (ekor)	54.025	55.001	55.865	55.106	55.252
7.	Populasi ternak kecil (ekor)	142.093	146.739	151,545	169.112	203.873
8.	Populasi unggas (ekor)	4.517.779	5.618.986	6.159.278	5.759.630	5.777.612
9.	Produksi daging (kg)	12.704.791	14.412.205	13,315,067	12.765.210	16.041.420
10.	Produksi telur (kg)	10.293.985	16.273.026	11.995.213	11.468.959	15.255.870
11.	Konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)	21,30	23,84	21,75	22,37	26,50

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2023, 7 dari 11 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, sedangkan ada 4 indikator yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produksi padi dan palawija pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5.083,62 ton (2,54%) dibanding Tahun 2022. Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan karena perawatan tanaman on farm intensif dan dengan pemupukan seimbang. Adanya pengendalian hama penyakit tanaman dengan gerakan pengendalian yang rutin dilaksanakan sehingga hama penyakit tidak berkembang biak yang dapat menurunkan produksi.Produksi tanaman buah sayuran semusim juga mengalami peningkatan sebesar 13.967,02 ton atau 17,76%, Peningkatan produksi terutama pada sayuran bawang merah dan cabai merah. Adanya penambahan luas tanam dan panen komoditas bawang merah dan cabai merah sebagai kontributor utama dalam peningkatan produksi di kelompok ini.

Produksi tanaman buah dan sayuran tahunan mengalami penurunan produksi, yaitu 3.676,4 ton (3,55%). Penurunan produksi terutama pada komoditas nangka, pisang, melinjo, petai dan jengkol. Komoditas biofarmaka mengalami sedikit penurunan produksi, yaitu 262,03 ton (1,72%) terutama pada jahe, dan lempuyang.

Komoditas perkebunan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 9.385,52 ton (8,75%) terutama pada komoditas kelapa dan tebu. Penurunan kelapa karena terjadi peningkatan produksi gula kelapa. Berarti banyak pengambilan nira kelapa dibandingkan dijadikan buah kelapa. Komoditas perkebunan yang lain cenderung stabil produksinya.

Populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas mengalami peningkatan. Populasi ternak besar mengalami peningkatan sebesar 146 ekor. Kondisi peternakan yang sudah mulai stabil dan penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD (Lumpy Skin Diseases) sudah terkendali, sehingga peternak kembali bersemangat untuk membudidayakan ternaknya.

Populasi ternak kecil meningkat sebesar 34.761 ekor . Dari 5 jenis ternak kecil yang utama, semua mengalami kenaikan. Peningkatan populasi terjadi pada ternak kecil disebabkan karena penyebaran penyakit mengalami penurunan. Wabah PMK tidak signifikan pengaruhnya terhadap populasi ternak kecil.

Populasi unggas mengalami peningkatan. Akhir tahun 2023, peternak banyak yang melakukan peremajaan unggasnya sehingga jumlah unggas meningkat. Adanya peningkatan populasi unggas menyebabkan produksi telur juga meningkat di tahun 2023. Terjadi peningkatan produksi telur sebesar 3.786.911 kg. Produksi daging juga meningkat di tahun 2023, seiring dengan kondisi peternakan sudah stabil dan kondusif, wabah penyakit sudah terkendali. Produksi daging tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3.276.210 kg.

Tabel 2.177

Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023

No.	Kapanewon	Jumlah Penyakit per Kapanewon				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Samigaluh	656	397	171	531	549
2	Kalibawang	535	580	285	331	378
3	Nanggulan	475	560	130	238	615
4	Girimulyo	658	474	315	291	530
5	Sentolo	393	414	128	357	934
6	Pengasih	751	551	398	900	1.250
7	Kokap	674	533	376	358	364
8	Lendah	1.048	491	204	563	607
9	Wates	1.130	694	179	246	952
10	Temon	412	300	144	236	2.052
11	Panjatan	675	505	193	1.035	4.862
12	Galur	812	430	496	894	513
	Jumlah	**8.219**	**5.929**	**3.019**	**5.981**	**13.606**

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Penyakit hewan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Tahun 2023 jumlah penyakit hewan sejumlah 13.606 penyakit sedangkan tahun 2022 sejumlah 5.981 atau meningkat sebanyak 7.625 penyakit (127,49%). Sebaran penyakit hewan tertinggi ada di Kapanewon Panjatan, Temon dan Pengasih.

Tabel 2.178

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2021-2023

Keterangan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Produktivitas Padi	66,26 ku/ha	67,15 ku/ha	69,22 ku/ha
Produktivitas Jagung	64,36 ku/ha	66,83 ku/ha	67,86 ku/ha
Produktivitas Kedelai	15,75 ku/ha	10,85 ku/ha	16,35 ku/ha
Produktivitas Ubi Kayu	256,59 ku/ha	257,21 ku/ha	211,74 ku/ha
Produktivitas Kacang Tanah	14,78 ku/ha	14,88 ku/ha	15,23 ku/ha

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan mengalami kenaikan. Persentase kenaikan produktivitas tertinggi pada kedelai yaitu 50,69% atau disusul oleh kacang tanah sebesar 2,35%. Kenaikan produktivitas disusul oleh padi dan jagung. Empat komoditas ini mengalami kenaikan produktivitas karena adanya intensifikasi pada pertanaman, dengan adanya fasilitasi sarana produksi berupa pupuk dan benih. Peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan karena perawatan tanaman on farm intensif dan dengan pemupukan seimbang. Adanya pengendalian hama penyakit tanaman dengan gerakan pengendalian yang rutin dilaksanakan sehingga hama penyakit tidak berkembang biak yang dapat menurunkan produksi.

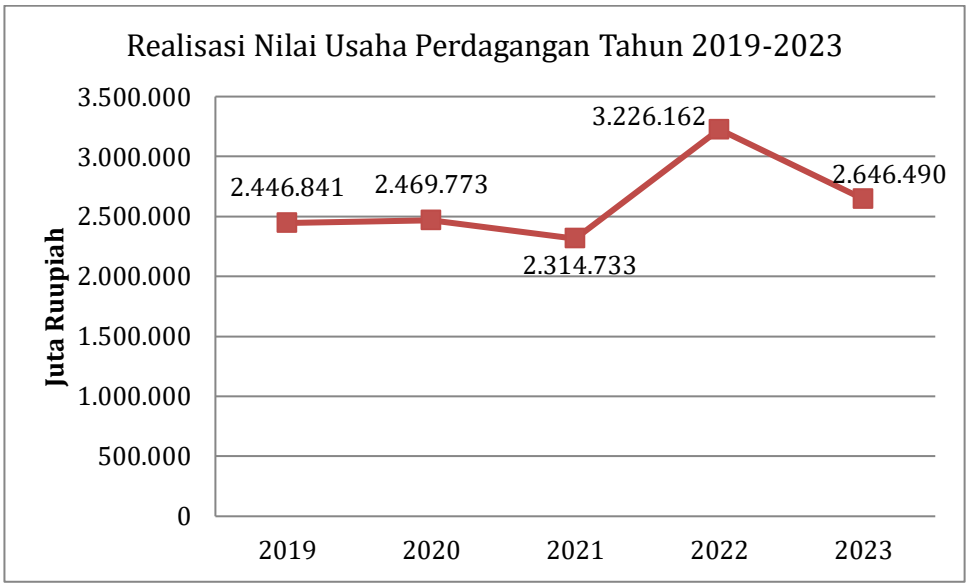
Untuk meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya, Pemerintah daerah memberikan dukungan/ fasilitasi sarana produksi berupa bibit dan pupuk, serta penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sarana prasarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi untuk komoditas tanaman pangan, alat dan mesin budidaya tanaman pangan. Dengan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pangan, maka ketahanan pangan daerah juga akan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pelestarian pertanian lahan surjan yang tersebar di wilayah Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Pengasih dan Kokap. Pertanian pada lahan surjan merupakan sistem pertanian tradisional di mana lahan pertanian dibuat bertingkat, bagian bawah untuk menanam padi dan bagian atas untuk menanam palawija/sayuran. Lahan pertanian yang demikian apabila dilihat dari atas tampak bergaris-garis seperti surjan, pakaian tradisional yang biasa dipakai orang Jawa. Garis-garis tersebut terbentuk dari alur-alur tinggi dan rendah. Alur yang rendah atau bagian bawah yang bersifat aquatic ditanami padi, sedangkan bagian alur yang lebih tinggi yang bersifat kering ditanami palawija atau sayuran. Sistem ini merupakan adaptasi terhadap topografi rendah dan mudah tergenang air. Lahan surjan diharapkan dibuat memanjang kearah barat-timur dengan tujuan tanaman yang dibudidayakan mendapatkan penyinaran matahari yang cukup.

Untuk mendukung kelestarian lahan surjan lewat Dana Keistimewaan, pada tahun 2023 ada 10 kelompok tani lahan surjan di kapanewon Temon, Wates dan Panjatan mendapat fasiltas jaringan irigasi sprinkler dan 10 kelompok tani diantaranya juga mendapat fasilitas saprodi untuk mendukung komoditas hortikultura (bawang merah). Disamping itu juga ada kegiatan SL-GAP (Sekolah Lapang *Good Agriculture Practices*) bawang merah lahan surjan. Pada Tahun 2023 ini juga telah dilakukan update data peta lahan surjan yaitu *by name by address* petani pemilik lahan surjan tersebut.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Nilai usaha perdagangan adalah jumlah omzet seluruh pelaku usaha dalam waktu 1 tahun. Perkembangan sektor perdagangan sampai dengan tahun 2023 memiliki tren pertumbuhan yang fluktuatif. Dibandingkan tahun 2022, nilai usaha perdagangan mengalami penurunan dikarenakan kondisi pertumbuhan kembali ke kondisi normal pasca pandemi.



Sumberdata : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Gambar 2.39

Capaian Nilai Usaha Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)

.

Tabel 2.179

Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Rakyat Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jenis Penerbitan			Total
		Kios	Los	Bango	
1.	2019	510	2.989	1.632	5.131
2.	2020	489	4.025	951	5.445
3.	2021	664	5.043	991	6.878
4.	2022	647	4.882	1.561	7.090
5.	2023	567	3.947	2.682	7.196

Sumberdata: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Penerbitan perizinan di pasar rakyat tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,50 % dibandingkan tahun 2022. Kenaikan total ini tidak signifikan karena untuk jumlah pedagang yang menempati kios dan los mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,36 % dan 19,15 %. Sementara untuk pedagang yang menempati arakan/dasaran/ bango mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 71,81 %.

Tabel 2.180

Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Mata Dagangan	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD
1	Arang Briket	Kg	663.050	4.869.700	3.737.506	2.103.142	152.460	151.918	2.431.916	985.845	1.488.516	1.064.580,2
2	Kerajinan serat alam	Pcs	82.375	266.627	74.858	418.324	35.250	208.830	142.466	2.403.198	256.756	825.284,2
3	Kerajinan Kayu	Pcs	638	19.504	275	11.447	285	11.933	315	13.190	330	13.018,9
4	The Mahkota Dewa	Kg	35.000	37.075	31.000	25.851	0	0	0	0	0	0
5	Gula Kristal	Ton	1.594.893	3.396.869	1.981.872	3.951.663	1.565.173	2.617.529	779.960	1.344.759	1.607.032,8	2.893.705,4
6	Synthetic wigs	Pcs	1.095.859	10.559.148	811.457	8.235.188	703.368	8.371.919	1.567.601	20.108.220	798.143	9.681.145
7	Sabut Kelapa	Kg	87.489	21.587	74.309	18.307	0	0	0	0	0	0
8	Traktor Tangan	Unit	171	328.850	2.111	349.842	5.751	316.444	5.851	323.537	111	235.480,4
9	Stagen	Pcs	12.300	21.738	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sarung Tangan	Pcs	0	0	0	0	1.624.331	620.013	1.532.372	651.035	1.233.558	633.495,7
11	Kerajinan Bambu	Pcs	0	0	0	0	13.464	96.645	14.964	103.928	21.009	192.853,1
				19.521.098		**15.113.764**		**12.395.231**		**25.933.712**		**15.539.563**

Jenis komoditi dan Negara tujuan ekspor disajikan di Tabel berikut ini.

Tabel 2.181

Jenis Komoditi dan Negata Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo tahun 2023

No.	Jenis Komoditi	Negara Tujuan
1.	Arang Briket	Mesir, Turki, Libanon, Uzbekistan, Iran, Amerika Serikat, Kuwait, Qatar, Jepang, UEA, Yunani
2.	Kerajinan Serat Alam	Belanda, Australia, Amerika Serikat, Perancis
3.	*Synthetic Wigs*	Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis
4.	Gula Kristal	Jerman, Chili, Cina, Jepang, Portugal, New Zealand, Swiss, Denmark, Australia, Amerika Serikat, Peru
5.	Kerajinan Kayu	Perancis
6.	Traktor Tangan	Brunei Darussalam, Panama, Timor Leste, Malaysia, Tanzania
7.	Sarung Tangan	Amerika Serikat, Korea Selatan
8.	Kerajinan Bambu	Australia, UEA

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah nilai ekspor mencapai US$15.539.563 atau turun sebesar 40% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar US$25.933.712. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya perekonomian negara tujuan ekspor produk rambut palsu (wig), terutama sejak Amerika Serikat mengalami resesi sehingga berpengaruh kepada sepinya permintaan produk. Di antara komoditas yang mengalami kenaikan ekspor cukup signifikan adalah gula kristal karena harga bahan baku gula kristal mengalami kenaikan signifikan pada triwulan ke empat.

Tabel 2.182

Data Ekspor Bersih Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Ekspor (Rp)	Nilai Impor (Rp)	EksporBersih (Rp)
2019	275.675.780.545	45.443.175.415	230.232.605.130
2020	218.323.043.176	42.351.274.960	175.971.768.216
2021	177.883.276.496	33.992.938.023	143.890.338.473
2022	374.531.845.396	49.380.832.117	325.151.013.279
2023	236.113.493.009	26.013.900.180	210.099.592.829

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai ekspor tahun 2023 mencapai Rp 236.113.493.009 sedangkan nilai impor tahun 2023 mencapai Rp 26.013.900.180 sehingga nilai ekspor bersih tahun 2023 sebesar Rp 210.099.592.829.

Tabel 2.183

Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	2019	18	6	6	30
2	2020	18	6	4	28

No.	Tahun	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Kurang	
3	2021	20	4	3	27
4	2022	25	0	2	27
5	2023	25	0	1	26

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Pasar Rakyat pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 27 pasar menjadi 26 pasar. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan status Pasar Ngebung. Dilihat dari kondisi fisiknya, jumlah Pasar Rakyat dengan kondisi baik adalah 25 pasar sedangkan untuk pasar dengan kondisi kurang berjumlah 1 yaitu Pasar Gejlik.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pedagang pasar rakyat yang menggunakan sarana perdagangan berupa kios, los dan bango. Pada tahun 2023 jumlah pedagang pasar rakyat mencapai 7.196 atau mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.184

Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Berdasarkan Sarana Perdagangan

Yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Pedagang			Jumlah
		Kios	Los	Bango/Pelataran	
1.	2019	755	3.245	3.737	7.737
2.	2020	739	3.214	3.337	7.330
3.	2021	671	5.005	3.206	8.882
4.	2022	647	4.882	1.561	7.090
5.	2023	567	3.941	2.682	7.196

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, 2024

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.185

Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat Tahun 2019 – 2023

No.	Rincian Pendapatan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PelayananPersampahan / Kebersihan	390.025.200	429.947.200	439.787.800	424.136.200	426.580.000
2	Retribusi Pelayanan Pasar	1.042.955.300	1.006.795.550	1.021.544.150	1.228.041.600	1.207.037.900
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	17.986.000	19.072.000	19.046.500	19.390.000	21.300.000
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	78.739.000	98.135.000	106.078.600	123.755.400	139.165.000
4	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	30.440.000	32.321.200	26.728.650	24.189.200	22.649.440
	Jumlah	**1.560.145.500**	**1.586.310.950**	**1.613.185.700**	**1.819.512.400**	**1.816.732.340**

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pendapatan sektor perdagangan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 2.780.060,00. Penurunan terjadi terutama pada retribusi pelayanan pasar berupa los karena berkurangnya jumlah pedagang yang menempati los. Sementara retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan retribusi tempat khusus parkir mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,85% dan 12,45%.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2023 diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 2.186

Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon ProgoTahun 2019-2023

No.	Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sentra	47	33	34	34	34
2.	Unit Usaha	16.905	15.481	15.589	15.847	15.962
3.	Tenaga Kerja (orang)	47.365	37.678	37.907	60.071	61.342
4.	Nilai Investasi (Rp.)	130.652.867.000	94.721.763.000	105.478.783	193.461.832.000	198.274.678.562
5.	Nilai Produksi (Rp.)	1.325.223.083.000	874.243.150.000	908.242.475.000	2.542.338.689.000	2.637.962.355.375
6.	Nilai Bahan baku/ Penolong (Rp.)	722.920.912.000	481.993.164.000	498.726.007.000	967.556.070.000	970.670.479.201
7.	Upah Tenaga Kerja (Rp.)	166.143.372.000	138.305.031.000	141.660.659.000	410.940.995.000	425.644.825.409
8.	Nilai Tambah (Rp.)	436.158.799.000	255.883.762.000	267.855.956.000	1.368.022.407.000	2.210.785.078.851

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor industri di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan terhadap tahun sebelumnya. Terdapat penambahan usaha industri baru di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 115 unit usaha, yaitu dari 15.847 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 15.962 unit usaha pada tahun 2023. Peningkatan jumlah unit usaha ini diikuti dengan peningkatan nilai investasi, nilai produksi, nilai bahan baku/penolong, upah tenaga kerja yang dibayarkan dan terakhir peningkatan nilai tambah dari Rp1.368 juta pada tahun 2022 menjadi Rp2.210 juta pada tahun 2023.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Untuk menyiapkan calon transmigran agar memiliki ketrampilan dan kesiapan menjadi transmigran yang handal dan mandiri di daerah tujuan transmigrasi, sebelum pemberangkatan

diberikan pelatihan berupa antara lain pelatihan Intensifikasi Lahan Pertanian (ILP) dan Pertukangan Kayu. Pelatihan kepada calon transmigran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selain itu juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta.

Melalui beberapa pelatihan tersebut diharapkan calon transmigran mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapat dimanfaatkan dan diterapkan di lokasi transmigrasi, sedangkan untuk menyiapkan calon transmigran sebelum pemberangkatan ke lokasi transmigrasi, telah dilaksanakan pembekalan mental calon transmigran.

Pada tahun 2020, tidak dilaksanakan pemberangkatan transmigrasi sebagai dampak dari antisipasi wabah Pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan kegiatan transmigrasi berupa penjajagan, cek lokasi, pemberangkatan, dan pemodalan calon transmigran tidak dapat direalisasikan yang mengacu pada surat edaran Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor B.676/PKT.04.01/IV/2020 tentang penundaan Transmigrasi Tahun 2020. Tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo tidak mendapat alokasi peserta transmigrasi sesuai surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Nomor: 595/08025 Tanggal 6 Agustus 2021. Pada Tahun 2023 diberangkatkan 2 kepala keluarga atau 7 jiwa ke UPT Salulisu, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Realisasi penempatan transmigran pada Tahun 2019 – 2023 terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.187

Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2019 – 2023

Tahun	Alokasi		Realisasi	
	KK	Lokasi	KK	Lokasi
2019	15	4	7	2
2020	10	3	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2	1	2	1
2023	2	1	2	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2024

Calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi mendapat bantuan sosial sebagai modal kerja dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang disalurkan kepada masing-masing Kepala Keluarga. Adapun bantuan sosial untuk modal kerja calon transmigran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Bantuan Untuk Modal Kerja Calon Transmigran Tahun 2019-2023

Tahun	KK	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokasi
2019	7	35.000.000,00	2
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	2	16.000.000,00	1
2023	2	20.000.000,00	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.189

Daftar Animo, Pendaftaran dan Penempatan Transmigran Tahun 2019-2023

No	Tahun	SUMATERA			KALIMANTAN			SULAWESI			JUMLAH		
		Animo	Pendaftaran	Penempatan	Animo	Pendaftaran	Penempatan	Animo	Pendaftaran	Penempatan	Animo	Pendaftaran	Penempatan
1	2019	39	33	-	22	14	-	24	19	7	85	66	7
2	2020	2	-	-	2	4	-	7	7	-	11	11	-
3	2021	2	2	-	3	3	-	12	12	-	17	17	-
4	2022	-	-	-	-	4	-	7	2	2	7	6	2
5	2023	3	3		5			5	5	2	13	8	2

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2020 animo transmigrasi berpindah dari Pulau Sumatera ke Pulau Sulawesi.

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut ini memperlihatkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Tabel 2.190

Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2019-2023

No.	Produk Hukum	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peraturan Daerah	10	12	15	14	9
2.	Peraturan Bupati	90	59	84	53	84
3.	Keputusan Bupati	440	406	511	528	518
4.	Instruksi Bupati	4	0	34	29	1
	Jumlah	**544**	**477**	**644**	**624**	**612**

Sumber data: Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo, 2024

Sebagaiman yang ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat penetapan 9 Peraturan Daerah, 84 Peraturan Bupati, 518 Keputusan Bupati, dan 1 Instruksi Bupati. Adapun target pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2024 adalah 4 Raperda Eksekutif, 3 Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan 2 Raperda inisiatif (legislatif).

Pembentukan Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah

adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Salah satu dinamisasi lingkungan adalah adanya peraturan baru yang bersifat khusus seperti halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi ini memberikan amanah lima bidang kewenangan pada Pemerintah Daerah DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam implementasinya Pemda DIY mengalirkan urusan keistimewaan khususnya bidang kebudayaan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Bertambahnya kewenangan pada hakikatnya menjadikan penambahan fungsi dan beban kerja yang perlu diwadahi dalam sebuah lembaga yang proporsional, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, 12 Kapanewon, dan BPBD. Rincian perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.191

Daftar Perangkat Daerah Tahun 2023

NO.	RUMPUN PD	PD / UNIT ORGANISASI
A	SEKRETARIAT DAERAH	Tipe B
B	SEKRETARIAT DPRD	Tipe B
C	INSPEKTORAT DAERAH	Tipe B
D	DINAS DAERAH	1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A 2. Dinas Kesehatan Tipe A 3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C 6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C 12. Dinas Perhubungan Tipe C 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C 14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B 16. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B 17. Dinas Perpustakaan dan kearsipan tipe C 18. Dinas Pariwisata Tipe B 19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B 20. Dinas Perdagangan Tipe B
E	BADAN DAERAH	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C
F	KAPANEWON	1. Kapanewon Temon 2. Kapanewon Wates 3. Kapanewon Panjatan 4. Kapanewon Galur 5. Kapanewon Lendah

NO.	RUMPUN PD	PD / UNIT ORGANISASI
		6. Kapanewon Sentolo 7. Kapanewon Pengasih 8. Kapanewon Kokap 9. Kapanewon Girimulyo 10. Kapanewon Nanggulan 11. Kapanewon Samigaluh 12. Kapanewon Kalibawang
H	LEMBAGA YANG MASIH DIBERLAKUKAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH PERANGKAT DAERAH		**40**

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Kulon Progo, 2024

Penetapan tipe Perangkat Daerah di atas sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kapanewon dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%. Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1.000.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh indeks RB 83,00 atau kategori A. Perolehan nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai RB General sebesar 72,58 dengan nilai RB Tematik sebesar 10,42. Nilai tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat RB Tematik. Penghitungan nilai indeks tahun 2023 terdiri atas 42 komponen yang terdiri dari 27 komponen RB General dan 15 RB Tematik.

Terkait dengan Survey Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
2. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan;
3. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan;
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi;

6. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan;
7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi;
8. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan;
9. Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan.

Perkembangan lembaga keuangan bank dan non bank serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung stabil. Dari sisi jumlah lembaga, terdapat peningkatan jumlah unit bank milik daerah di mana pada Tahun 2021 sejumlah 37 unit menjadi 38 unit pada tahun 2022 yakni dengan dibukanya kantor kas dan atau kantor cabang pembantu Perumda BPR Bank Kulon Progo maupun PT. Bank BPD DIY di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah BPR/BPRS juga menunjukkan peningkatan di akhir tahun 2023.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan unit-unit usahanya di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Perumda BPR Bank Kulon Progo, PT. Selo Adikarto, Perumda “Aneka Usaha” Kulon Progo, dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Sampai dengan Tahun 2023 Perumda BPR Bank Kulon Progo telah mengembangkan pelayanan keuangan melalui 1 kantor pusat, 14 kantor kas dan 1 *payment point* yang tersebar di 12 Kapanewon.

Tabel 2.192

Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lembaga keuangan, perbankan						
	a. Bank Pemerintah	24	47	40	38	36	PT Bank BRI : 25 unit, Bank Syariah Indonesia : 1 PT Bank BTN : 1 unit PT Bank Mandiri : 6 unit PT BNI 46 : 3 unit
	b. Bank Milik Daerah	29	34	37	38	37	1. PT Bank BPD DIY : -1 unit kantor cabang, -16 unit kantor cabang pembantu, -5 unit kantor fungsional; 2. Perumda BPR Bank Kulon Progo: 1 unit kantor pusat, 14 unit

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
							kantor kas, 1 unit payment point
	c. Bank Swasta	6	6	3	4	4	unit
	d. BPR/ BPRS	12	17	18	18	19	unit (di luar Perumda BPR Bank Kulon Progo)
	e. BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)	14	14	14	14	14	unit (lokasi ada di setiap kapanewon, Kapanewon Pengasih dan Kapanewon kokap masing-masing memiliki 2 unit)
	f. Pegadaian	5	6	6	6	6	unit
2	Jumlah Unit Usaha Daerah						
	a. Jumlah BUMD	4	4	4	4	4	unit (Perumda Air Minum Tirta Binangun, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, PT Selo Adikarto, Perumda BPR Bank Kulon Progo
	b. Jumlah Perumda	1	3	3	3	3	unit (Bidang Usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Bidang Perbankan, Unit PDAM)
	c. Jumlah PT	1	1	1	1	1	Unit (Bidang Usaha Asphalt Mixing Plant)
	d. Jumlah BPR	1	1	1	1	1	unit
	e. Jumlah PDAM	1	1	1	1	1	unit (terdapat 10 unit pelayanan PDAM yang berlokasi di kapanewon)
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PAD)						

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
	a. Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.769.012.274	3.290.093.371	1.562.300.300	2.200.759.322	2.400.000.000,00	Rp.
	b. Perumda Air Minum Tirta Binangun	-	-	2.287.779.886	686.853.143	1.264.209.811,00	Rp.
	c. BUKP	91.296.388,07	110.159.416,86	112.877.552,63	86.261.771	61.077.133,08	Rp.
	d. PT. Selo Adikarto	2.134.483.126	-	-	235.147.044	151.811.386,17	Rp.
	e. Perumda Aneka Usaha	478.407.192,25	603.044.076,50	300.000.000	198.588.612	8.569.254,00	Rp.

Sumber data: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

Jumlah lembaga keuangan bank dan non bank pada tahun 2023 adalah sebanyak 504 unit, terdiri dari 60 unit Bank Umum Konvensional, 1 unit Bank Umum Syariah, 32 unit Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, 3 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 11 Industri Keuangan Non Bank Konvensional, 397 unit lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari lokasi sebaran per wilayah kapanewon, Kalibawang merupakan wilayah dengan jumlah lembaga keuangan terbanyak, yaitu 115 lembaga keuangan. Sedangkan Panjatan dan Lendah merupakan dua wilayah Kapanewon dengan jumlah lembaga keuangan paling sedikit yaitu 27 lembaga keuangan. Dengan adanya persebaran lembaga keuangan di masing-masing kapanewon maka literasi keuangan masyarakat Kulon Progo akan semakin meningkat. Masyarakat menjadi lebih melek lagi terhadap perbankan dan juga tidak perlu jauh dari masing-masing tempat tinggal karena sudah tersebar di masing-masing kapanewon. Dengan peningkatan literasi perbankan di masyarakat maka akan meningkat kegiatan ekonomi masyarakat karena akses kredit ataupun transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan baik lagi. Pihak perbankan juga akan memperoleh pangsa pasar baru dengan membuka cabang di masing-masing kapanewon. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 2.203 dan 2.204 dimana setiap tahun posisi simpanan masyarakat dan juga penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Tabel 2.193

Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan

Tahun 2022

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	7		2		1		46	56
2	Wates	20	2	8	1	3	1	82	117
3	Panjatan	4		1				24	29
4	Galur	4		2		1		26	33
5	Lendah	4		2				25	31
6	Sentolo	9		3		1		41	54

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
7	Pengasih	4	1	3				59	67
8	Kokap	4		1				31	36
9	Nanggulan	3		3				27	33
10	Girimulyo	3		1				20	24
11	Samigaluh	3		2				36	41
12	Kalibawang	4		3		1		21	29
	JUMLAH	**69**		**31**		**7**	**1**	**438**	**550**

Tabel 2.194

Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan

Tahun 2023

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	3	0	3	0	2	0	27	35
2	Wates	2	0	1	0	0	0	15	18
3	Panjatan	3	0	3	0	1	0	20	27
4	Galur	3	0	1	0	0	0	34	38
5	Lendah	3	0	1	0	0	0	23	27
6	Sentolo	2	0	3	0	0	0	23	28
7	Pengasih	3	0	1	0	0	0	25	29
8	Kokap	3	0	3	1	0	0	52	59
9	Nanggulan	2	0	1	0	0	0	26	29
10	Girimulyo	9	0	2	0	1	0	32	44
11	Samigaluh	7	0	3	0	1	0	44	55
12	Kalibawang	20	1	10	2	6	0	76	115
	JUMLAH	**60**	**1**	**32**	**3**	**11**	**0**	**397**	**504**

Tabel 2.195

Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)

No	Jenis Simpanan	TAHUN				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Giro	230.636	238.155	315.375	275.562	223.151
2	Simpanan Berjangka	925.500	961.012	923.480	755.719	952.800
3	Tabungan	2.485.313	3.017.465	3.240.665	3.152.570	3.482.718
	JUMLAH	**3.641.449**	**4.216.631**	**4.479.519**	**4.183.850**	**4.658.669**

Sumber data: Bank Indonesia, 2023

Tabel 2.196

Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (juta Rupiah)

No.	Kriteria Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mikro	620.503	535.594	961.329	1.486.383	1.615.702
2	Kecil	445.244	488.756	595.747	569.272	526.873
3	Menengah	215.677	331.456	162.553	85.999	76.190
	JUMLAH	**1.281.424**	**1.355.807**	**1.719.629**	**2.141.654**	**2.218.764**

Sumber data: Bank Indonesia, 2023

Tabel 2.197

Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BUMD	Unit	4	4	4	4	4
2	Jumlah Unit Usaha	Unit	7	7	7	7	7
3	Penyertaan Modal (Akumulasi)	Rp.	113.677.897.077	138.751.570.811	148.145.843.058	166.704.777.590	177.577.969.993
4	Modal Sendiri	Rp.	138.641.598.048	160.500.384.915	144.542.757.098	163.585.825.912	176.353.156.668
5	Volume Usaha (Omzet)	Rp.	210.384.446.759	149.514.361.911	179.254.276.403	181.674.026.333	208.229.235.894
6	Laba Bersih Tahun Berjalan (EAT)	Rp.	9.849.127.016	1.003.896.466	6.180.892.553	6.905.229.639	9.009.579.124
7	Laba yang disetor (PAD)	Rp.	5.381.902.592	3.893.137.448	4.150.080.186	3.354.371.078	3.824.590.452
8	Aset	Rp.	593.275.647.340	643.960.702.600	660.036.753.422	714.750.445.301	743.528.868.814

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

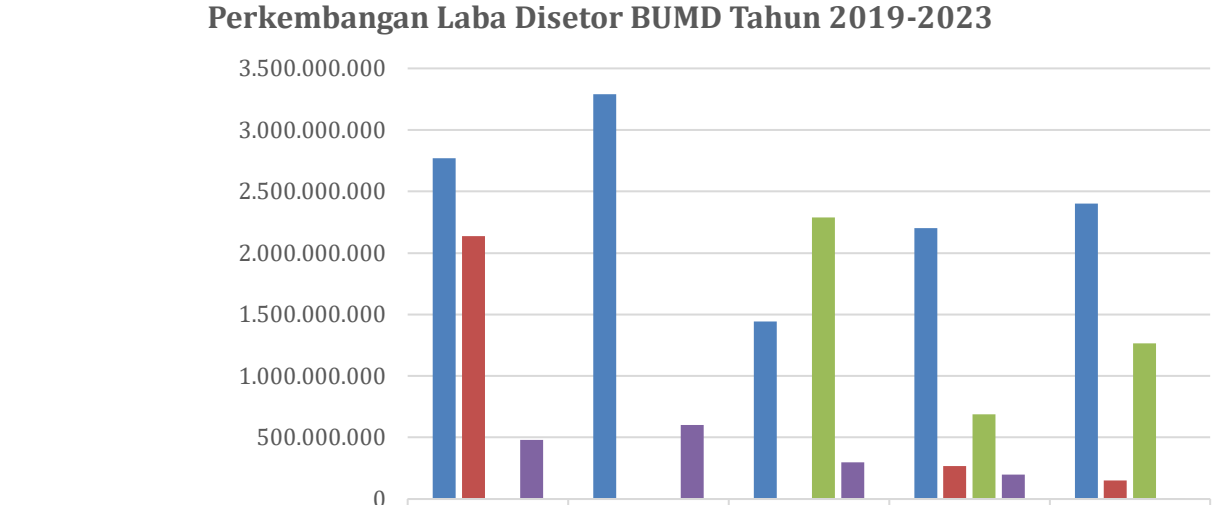
Data di atas merupakan data gabungan dari 4 (empat) BUMD Kabupaten Kulon Progo, yaitu Perumda BPR Bank Kulon Progo yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, PT. Selo Adikarto yang bergerak di bidang produksi dan penjualan Asphalt Mixing Plant (AMP), Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bergerak di sektor usaha perdagangan (SPBU/BBM), industri dan jasa (perbengkelan), dan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bergerak di bidang penyedia air bersih.

Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ke BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah tertinggi diberikan kepada Perumda BPR Bank Kulon Progo. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya amanah ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana Perumda BPR Bank Kulon Progo merupakan lembaga perbankan yang mengelola dana

masyarakat dengan aset lebih dari Rp300 miliar sehingga terdapat syarat minimum untuk nilai CAR (Capital Adequacy Ratio)/Rasio Kecukupan Modal yang harus dipenuhi, yaitu Rp. 50 Milyar. Sebagai implementasinya telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo, dimana di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang penetapan Modal Dasar Pemerintah Daerah pada PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo sejumlah Rp. 50 Milyar, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dalam bentuk penyertaan modal dan sudah terpenuhi pada tahun 2020.

Modal sendiri pada BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah berupa uang maupun aset serta adanya perubahan pada nilai ekuitas pada masing-masing BUMD. Setelah pada Tahun 2020 terjadi penurunan omzet dan laba BUMD yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 mulai terdapat kenaikan omzet pada BUMD. Pada PT. Selo Adikarto terdapat beberapa proyek konstruksi yang sudah dapat berjalan, akan tetapi pada tahun 2021 ini PT. Selo Adikarto belum dapat menyetorkan PAD atas laba tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai utang PT. Selo Adikarto kepada pemerintah daerah (sesuai hasil RUPS pada tahun 2020). Perumda Aneka Usaha mengalami penurunan omzet pada unit (SPBU), perbengkelan dan perdagangan umum. Selain itu juga dikarenakan berkurangnya pendapatan dari penyelenggaraan event-event yang sudah diprediksi. Perumda Air Minum Tirta Binangun merupakan BUMD yang tidak terdampak terhadap adanya Pandemi Covid-19. Hal ini terlihat pada kenaikan omzet dan laba pada masa Pandemi Covid-19 ini, meskipun ada kebijakan keringanan pembayaran bagi pelanggan Golongan RT A2, dan pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air yang diberlakukan pada Tahun 2020. Penurunan laba pada Perumda Air Minum Tirta Binangun cenderung disebabkan adanya peningkatan biaya penyusutan atas aset yang diserahkan sebagai tambahan penyertaan modal kepada Perumda. Pada tahun 2021 Perumda Air Minum Tirta Binangun pertama kali melakukan penyetoran Bagian Laba Yang diberikan kepada Pemerintah daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD atas laba tahun 2019 dan 2020. Omzet pada Perum BPR Bank Kulon Progo masih mengalami penurunan, hal ini dikarenakan perpanjangan kebijakan relaksasi pembayaran kredit dari nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19.

Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya gambaran kinerja BUMD Tahun 2018 - 2022, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



	2019	2020	2021	2022	2023
Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.769.012.274	3.290.093.371	1.444.824.324	2.200.759.322	2.400.000.000
PT. Selo Adikarto	2.134.483.126	0	0	268.170.002	151.811.387
Perumda Air Minum Tirta Binangun	0	0	2.287.779.886	686.853.143	1.264.209.811
Perumda Aneka Usaha Kulon Progo	478.407.192	603.044.077	300.000.000	198.588.612	8.569.254

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023

Gambar 2.40

Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2019-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laba disetor oleh BUMD paling besar diberikan oleh PD. BPR Bank Kulon Progo meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Selengkapnya perkembangan Lembaga BUMD pada Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.198

Lembaga BUMD Tahun 2023 (Unaudited)

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Modal (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
1	Bank Kulon Progo	1	60.000.000.000	78.563.316.466	49.029.265.277	4.616.771.515	2.400.000.000	605.699.597.831
2	PT. Selo Adikarto	1	32.149.300.000	5.006.333.918	49.742.713.545	471.335.157	151.811.387	42.265.292.464
3	Perumda Air Minum Tirta Binangun	1	75.428.669.993	80.699.431.127	46.976.370.357	3.986.674.971	1.264.209.811	82.651.630.445
4	Perumda Aneka Usaha	4	10.000.000.000	12.084.075.157	62.480.886.715	-65.202.519	8.569.254	12.912.348.074
	JUMLAH	**7**	**177.577.969.993**	**176.353.156.668**	**208.229.235.894**	**9.009.579.124**	**3.824.590.452**	**743.528.868.814**

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2023 (*unaudited*)

2.1.3.4.2 Pengawasan

Guna menjamin keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tata peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka fungsi pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten

Kulon Progo menjadi sangat penting. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 2.199

Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2019-2023

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Berkala / Reguler	44	52	86	40	27	54	40	19	34	28	13	17	35	23	30
2	Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Pemeriksaan Khusus / Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	0	0	0
4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	8	11	26	19	-	-	-	-	-	5	5	5	15	0	15
5	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	117	239	349	89	111	196	122	80	138	87	70	126	87	87	143
6	Pemeriksaan LKM Binangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
7	Reviu Laporan Keuangan OPD	43	-	197	42	-	214	42	-	-	42	42	42	42	0	0
8	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	0	0
9	Evaluasi SPIP	20	-	45	20	-	-	42	-	-	42	42	42	42	0	0
10	Evaluasi LkjIP	43	-	-	42	-	-	1	-	-	0	0	0	42	0	0
11	Reviu RKA	42	-	57	42	-	29	48	-	-	84	84	84	84	0	0
12	Reviu RKPD	1	4	6	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	0	0
13	Reviu Perubahan RPJMD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0
13	Reviu Perubahan Renstra OPD	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	0	0
14	Reviu DAK Fisik	27	-	-	27	-	-	27	--	-	27	27	27	27	0	0
15	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	42	-	96	42	-	-	42	-	-	**42**	**42**	**42**	**42**	**0**	**0**
	JUMLAH	**431**	**306**	**862**	**251**	**138**	**493**	**251**	**99**	**172**	**408**	**376**	**436**	**461**	**110**	**188**

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi, ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah

belum optimal. Pada tahun 2023, Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sejumlah 461. Akan tetapi jumlah temuan menurun dibandingkan tahun 2022, yaitu sejumlah 110. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dokumen-dokumen yang disusun dan menjadi obyek pemeriksaan sehingga jumlah temuan menurun. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemeriksaan reguler karena jumlah objek pemeriksaan yang paling banyak yaitu kalurahan dan perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pendampingan terhadap pemerintah kalurahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyelenggaran SPIP di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di tahun 2023, Kulon Progo mencapai nilai maturitas SPIP sebesar 3,152. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,09. Berikut ini adalah hasil penilaian SPIP dari 40 Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo yang diwujudkan dalam Indeks Maturitas SPIP.

Tabel 2.200

Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	OPD	Verifikasi Tim			
		Penetapan Tujuan	Struktur dan Proses	Pencapaian Tujuan	Nilai SPIP
1	Sekretariat Daerah	1,3	1,01	1,44	3,75
2	Sekretariat DPRD	1	1,04	1,35	3,39
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Perm	1,2	1,02	1,44	3,66
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1,2	0,9	1,44	3,54
5	Dinas Perhubungan	1,2	1,03	1,44	3,67
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,2	1,09	1,44	3,73
7	Dinas Kesehatan	1,2	1	1,44	3,64
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	1,066	1,35	3,416
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1,073	1,35	3,423
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2	0,98	1,44	3,62
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,2	1	1,44	3,64
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1,07	1,35	3,42
13	Dinas Pertanian dan Pangan	1,2	1,14	1,44	3,78

No.	OPD	Verifikasi Tim			
		Penetapan Tujuan	Struktur dan Proses	Pencapaian Tujuan	Nilai SPIP
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1,1	1,35	3,45
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	0,95	1,35	3,3
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	1,058	1,35	3,408
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1	1,086	1,35	3,436
18	Dinas Kebudayaan	1,2	0,84	1,35	3,48
19	Dinas Lingkungan Hidup	1,4	1,09	1,44	3,93
20	Dinas Pariwisata	1	0,96	1,44	3,4
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,2	0,87	1,35	3,51
22	Inspektorat Daerah	1,2	0,98	1,44	3,62
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,3	1,16	1,44	3,9
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1,2	1,12	1,44	3,76
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,2	1,06	1,35	3,6
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0,949	1,35	3,299
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,4	1,05	1,44	3,89
28	Satuan Polisi Pamong Praja	1,2	0,81	1,44	3,45
29	Kapanewon Wates	1,2	1,06	1,44	3,7
30	Kapanewon Temon	1	1,04	1,35	3,39
31	Kapanewon Panjatan	1	0,95	1,35	3,3
32	Kapanewon Galur	1,2	1,06	1,44	3,7
33	Kapanewon Sentolo	1,2	1,02	1,44	3,66
34	Kapanewon Lendah	1,2	1	1,44	3,64
35	Kapanewon Pengasih	1,2	1,07	1,44	3,71
36	Kapanewon Kokap	1,2	0,78	1,44	3,42
37	Kapanewon Nanggulan	1	0,975	1,35	3,325
38	Kapanewon Girimulyo	1,2	0,9	1,44	3,54
39	Kapanewon Samigaluh	1,2	0,93	1,44	3,57
40	Kapanewon Kalibawang	1	0,99	1,35	3,34
41	RSUD Wates -Dinas Kesehatan	1,2	0,93	1,44	3,67
42	RSUD Nyi Ageng Serang -Dinas Kesehatan	1,2	0,94	1,44	3,58

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai level maturitas “Terdefinisi” yakni memiliki rentang skor (3,0 ≤ skor < 4,0). Pada tingkat ini, seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa seluruh perangkat daerah telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan, akan tetapi belum efektif.

Tabel 2.201

Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LKjIP yang nilainya meningkat	PD	42	31	30	25	34
2	Jumlah perangkat daerah	PD	42	42	42	42	42
3	Jumlah obrik yang tidak ada temuan keuangan	Obrik	39	52	79	56	53
4	Jumlah obrik	Obrik	161	129	162	115	122
5	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rekom	318	198	134	117	145
6	Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	Rekom	378	429	250	172	173

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari hasil evaluasi terhadap LKjIP pada 42 Perangkat Daerah, di tahun 2023 terdapat 34 Perangkat Daerah yang nilainya mengalami peningkatan atau sebanyak 80,95% dari keseluruhan Perangkat Daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah dengan harapan kedepannya capaian dan laporan kinerja perangkat daerah lebih baik dari pelaporan sebelumnya.

Rasio obrik yang tidak ada temuan keuangan pada tahun 2023 sebesar 43,4%. Sedangkan pada tindak lanjut hasil pengawasan internal, 145 rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 173 rekomendasi yang dihasilkan, atau sebesar 83,8%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan sudah semakin membaik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan.

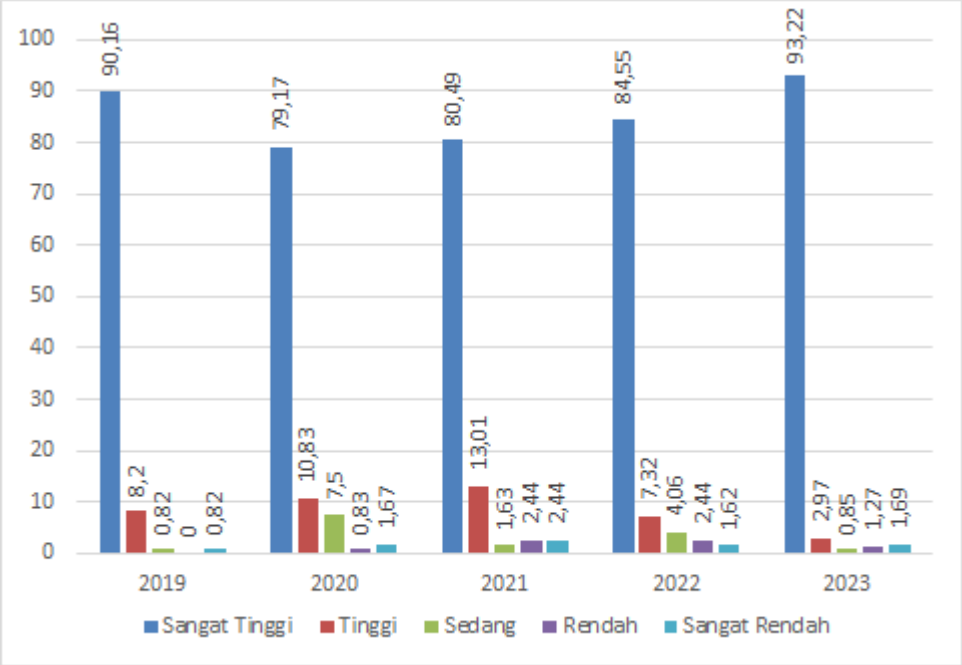
2.1.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akess dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator ketercapaian program yang diukur setiap tahunnya, ketercapaian program di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

*Keterangan: Kriteria Sangat Tinggi: 91%≤100%, Tinggi: 76%≤90%, Sedang: 66%≤75%, Rendah: 51%≤65%, Sangat Rendah: ≤50%. (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Gambar 2.41

Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tingkat ketercapaian program diukur dengan membandingkan target dengan capaian program, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercapaian program pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut berarti kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian outcome semakin bagus di setiap tahunnya.

2.1.3.4.4 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu tahun 2019-2023 semakin menurun.

Tabel 2.202

Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1	2019	6.239	9.188	- 2.949	67,90%
2	2020	6.231	9.340	-3.109	66,71%

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
3	2021	5.870	10.149	-4.279	57,84%
4	2022	5.660	9.591	-3.931	59,01%
5	2023	6.132	9.591	-3.459	63,93%

Sumber data : BKPP dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai selama 3 tahun dari 2019-2021 menurun. Hal ini disebabkan di satu sisi angka kebutuhan yang cenderung meningkat akibat perubahan dan pengembangan struktur kelembagaan perangkat daerah, pada sisi yang lain ketersediaan ASN makin berkurang. Pengurangan personil terjadi secara kontinyu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CASN yang sangat dibatasi oleh kuota formasi pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Meskipun adanya penambahan formasi CPNS, rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tetap masih besar yaitu sebesar 63,93% dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengikat kerjasama dengan Tenaga Non ASN yang ada tanpa melakukan Rekruitmen ulang dikarenakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang PPPK, bahwa pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat Tenaga Non ASN selain PPPK yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Tabel 2.203

Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2019-2023

No.	Tahun	PKN/ Diklatpim II		PKA/ Diklatpim III		PKP/ Diklatpim IV	
		Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim
1	2019	10	-	34	11	103	-
2	2020	15	-	57	7	146	4
3	2021	11	6	48	24	87	60
4	2022	11	4	47	10	74	28
5	2023	13	7	63	23	99	58

Sumber data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat struktural terutama dalam unsur pemenuhan Diklatpim. Sampai akhir 2023 diperhitungkan sejumlah 13 pejabat eselon II belum melaksanakan Diklatpim II atau yang sekarang disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)Tingkat II, 63 pejabat eselon III belum melaksanakan Diklatpim III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 99 pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2022 dimana Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV yang belum melaksanakan pelatihan kepemimpinan sebanyak 11 pejabat, 47 pejabat dan 74 pejabat.

Tabel 2.204

Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2019-2023

No.	Jabatan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	30	33	32	32	30
2.	Administrator (Eselon III)	151	153	155	153	151
3.	Pengawas (Eselon IV)	448	445	277	273	270
5.	Eselon V	0	0	0	0	0
4.	Pelaksana (JFU)	1.360	1189	1.135	1.117	1.029
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	4.250	4019	4.168	3.954	4.652
	Jumlah	6.239	5.839	5.769	5.529	6.132

Sumber data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas menunjukkan jumlah pejabat struktural dari eselon II sampai eselon IV dan jabatan fungsional umum dan tertentu dalam 5 tahun terakhir. Jumlah riil pejabat struktural tersebut masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya ada. Untuk eselon II dari kebutuhan 33 pejabat, per 31 desember 2020 sudah terpenuhi seluruhnya sebanyak 33 pejabat. Untuk eselon III dari kebutuhan sebanyak 153 pejabat juga sudah terisi 153 pejabat. Sedangkan untuk eselon IV yang seharusnya sesuai kebutuhan sebanyak 459 pejabat baru terisi 445 pejabat. Untuk Jabatan JFU dan JFT juga mengalami tren penurunan disebabkan kebijakan Pemerintahan Pusat terkait penerimaan CPNS yang dibatasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil kebijakan untuk merekrut Tenaga Kontrak (Non ASN) melalui rekrutmen resmi sebanyak 105 personil dan personil yang ada dipertahankan pada tahun 2019. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendapat formasi CPNS akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai di Pemkab Kulon Progo mengalami penurunan yang cukup berarti akibat pensiun dan mutasi. Hal ini mendorong pemkab untuk melakukan inovasi baik itu dengan mengoptimalkan sistem informasi maupun penyederhanaan kelembagaan. Pada tahun 2023, terdapat penambahan jumlah pegawai yaitu dari jabatan P3K yang mengisi jabatan di berbagai perangkat daerah.

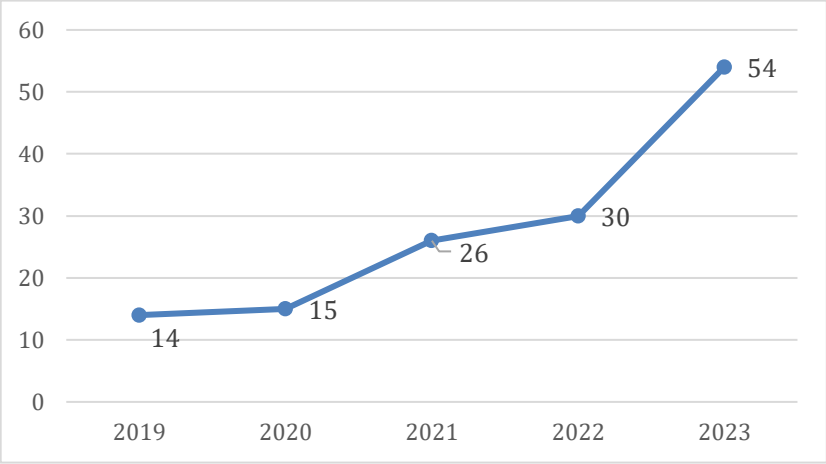
2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas inovasi berkelanjutan merupakan jawaban terhadap tantangan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dapat diatasi hanya dengan investasi dalam sistem pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi berkelanjutan dalam mengembangkan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, bersih, dan lebih kreatif menjadi salah isu utama negara berkembang. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan sebuah strategi pembangunan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi yang murah, mudah, dan ramah lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) lahir dari akal, cipta, rasa dan karsa mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk peradaban manusia. Otonomi daerah memberikan ruang aktualisasi kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat dengan diberikan kebebasan bertanggung jawab berupa kebebasan

berpikir, kebebasan berkarya, kebebasan berbicara, dan kebebasan berpendapat. Ruang kebebasan ini semestinya bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan sesuai kebutuhan dan keunggulan daerah masing-masing secara berkelanjutan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan dukungan sangat besar untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis IPTEK. Untuk itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan perlu mendorong peningkatan SDM produktif. Sebuah pepatah mengatakan bahwa anda tidak akan pernah menjadi besar kalau anda tidak tahu betapa besar potensi yang anda miliki. Kulon Progo menyimpan banyak potensi yang memiliki nilai ekonomis strategis jika diolah secara baik. Secara umum kualitas keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola berbagai potensi lokalnya. Banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar global, seperti produk berbasis kreativitas, seni, dan budaya. Pengolahan sumber daya lokal dengan nilai tambah (added chain) menjadi komoditas unggulan daerah dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan. Pemberian nilai tambah produk harus dapat meningkatkan kualitas produk supaya dapat diterima secara berkelanjutan, dan mengikuti tren pasar, sehingga pemerintah harus mampu bersikap responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman serta kondusif untuk berkreasi dan berinovasi.

Sebagai langkah penguatan karakter produk lokal berbasis masyarakat tersebut diwujudkan kegiatan berupa Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut seiring dengan tujuan penerapan IPTEK dan Inovasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk lokal yang berdaya saing. Animo masyarakat untuk mengikuti Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 2.42
Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Kreanova Menoreh
Tahun 2019-2023

Selain pelaksanaan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh memotivasi masyarakat dan pelajar mengembangkan inovasinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk mendorong inovasi pemerintahan maupun pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun

2019 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengertian inovasi daerah, tujuan inovasi, kriteria inovasi, inisiator, mekanisme pengusulan dan penetapan inovasi daerah.

Salah satu pengukuran kinerja inovasi pemerintahan adalah Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award (IGA).* Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam *Innovative Government Award* pada tahun 2018 memperoleh peringkat nasional ke-5 dengan predikat sangat inovatif. Pada tahun 2019, capaian ini meningkat menjadi peringkat nasional ke-2 dengan predikat Sangat Inovatif. Akan tetapi mulai tahun 2020, indeks inovasi daerah semakin menurun. Pada tahun 2020, indeks inovasi Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Sangat Inovatif ke-25. Pada tahun 2021, menjadi kabupaten inovatif pada urutan ke-37 dan pada tahun 2022 menjadi urutan ke-72 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Penurunan indeks inovasi daerah ini perlu menjadi perhatian bersama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncukan “Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo “ atau Gema Indahku. Melalui gerakan ini diharapkan dapat mendorong mendorong kolaborasi dan memotivasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi. Salah satu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah. salah satu bentuk perubahannya adalah dengan mewajibkan Perangkat Daerah, Kapanewon, BUMD, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas untuk mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati setiap 2 tahun anggaran. Perubahan Peraturan Bupati ini telah ditetapkan menjadi Peraturn Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2023, satuan inovasi yang berhasil diidentifikasikan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 195 satuan inovasi. Satuan inovasi ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 476/C/2023 tentang Satuan Inovasi Daerah Tahun 2023. Adapun Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mendapatkan nilai 58,44 dengan predikat Kabupaten Inovatif peringkat ke-46 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.

Adapun data capaian kinerja Kabupaten Kulon Progo dalam Innovative Government Award, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.205

Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award

No	Tahun	Skor IID	Peringkat Nasional	Predikat
1	2018	9.456	5	Sangat Inovatif
2	2019	18.090	2	Sangat Inovatif
3	2020	4.129	25	Sangat Inovatif
4	2021	56.64	37	Inovatif
5	2022	55.87	72	Inovatif
6	2023	58.44	46	Inovatif

Sumber data : Bappeda (diolah)

2.1.3.4.6 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2007-2012 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun mulai 2013 sampai dengan 2023 Kulon Progo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. Realisasi kinerja ini telah berimbang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY.

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dari target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2019-2023.

Tabel 2.206

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah realisasi pendapatan (milyar rupiah)	1.672,22	1.582,44	1.533,84	1.530,33	1.695,99
2.	Jumlah target pendapatan (milyar rupiah)	1.679,14	1.641,67	1.570,80	1.503,68	1.699,95
3.	Persentase realisasi pendapatan terhadap target	99,59	96,39	97,65	101,77	99,79
4.	Jumlah realisasi pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	237,88	254,42	307,15	308,15	324,05
5.	Jumlah target pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	231,4	217,55	246,60	265,27	308,44
6.	Jumlah realisasi belanja (milyar rupiah)	1.671,66	1.500,04	1.404,81	1.532,66	1.694,77
7.	Jumlah anggaran belanja (milyar rupiah)	1.771,95	1.702,95	1.657,35	1.669,93	1.818,99
8.	Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD) tepat waktu	8	8	8	8	14
9.	Jumlah dokumen keuangan daerah	8	8	8	8	14
10.	Jumlah PD tertib administrasi aset	42	42	42	42	40
11.	Jumlah PD	42	42	42	42	40

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan pada Tahun 2018-2019, pada Tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan dan meningkat lagi di tahun 2023. Berdasarkan hasil putusan pengadilan nomor PUT-008873.26/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 atas banding PT Angkasa Pura I terhadap PBB P2 Bandara YIA masa pajak tahun 2021 telah menimbulkan lebih bayar sebesar Rp20.223.126.004,00. Atas permohonan kompensasi yang dilakukan PT Angkasa Pura I, lebih bayar pajak PBB P2 masa pajak tahun 2021 dikompensasikan pada pajak PBB P2 masa pajak tahun 2023. Sehingga dari kewajiban PT Angkasa Pura I Bandara YIA sebesar Rp23.792.782.906,00, PT Angkasa Pura I tinggal membayar kekurangan sebesar Rp3.569.656.902,00. Oleh sebab itu capaian realisasi pendapatan daerah pada taahun 2023 menjadi 99,79%.

Penerbitan dokumen keuangan daerah sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dilaksanakan tepat waktu. Dokumen tersebut meliputi Raperda APBD, Perda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD. Dalam hal pengelolaan aset daerah semua SKPD telah memenuhi standar tertib administrasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.207

Jumlah SILPA Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) (Rp)	95.255.409.685,32	141.788.201.409.49	215.652.518.039,17	163.810.144.445,24	120.467.732.132,50
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.771.951.990.877,35	1.702.946.243.715,55	1.712.584.319.505,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5,38	8,32	12,59	9,81	6,62

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari data di atas menunjukkan persentase SILPA setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.208

Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan (Rp)	464.411.742.618,19	510.761.138.209,00	546.225.486.577	531.379.917.646
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	1.702.946.243.715,55	1.712.584.319.505,21	1.669.930.685.519,17	1.623.397.757.352
3	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD	27,27	29,82	32,71	32,73

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD tahun ini sekurang-kurangnya 20% dari total APBD. Anggaran belanja fungsi pendidikan sudah mencakup belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah.

Pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan tertuang dalam PMK No 84/PMK.07/2009, dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan data Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan tahun 2019-2023 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja urusan pendidikan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah di atas 20%.

Tabel 2.209

Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Urusan Kesehatan (Rp)	410.778.289.734,82	367.038.619.011,65	367.909.817.454	342.105.119.681
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	1.702.946.243.715,55	1.712.584.319.505,21	1.195.260.998.395	1.189.490.052.206
3	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD	24,12	21,43	30,78	28,76

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas menjelaskan alokasi belanja urusan kesehatan dari Tahun 2019-2023. Dalam peraturan menteri keuangan bahwa alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10% dalam APBD. Pada Tahun 2020 belanja kesehatan naik seiring dengan penurunan jumlah belanja infrastruktur sebagai dampak Pandemi Covid-19 karena kebijakan refocusing yaitu pengalihan sebagian belanja termasuk infrastruktur ke belanja kesehatan. Berdasarkan data Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja urusan kesehatan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah di atas 10%.

Tabel 2.210

Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (Rp)	173.983.193.673	173.813.129.789	289.946.877.441	321.716.270.540
2	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	25,92	26,80	19,29	22,63

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum minimal sebesar 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat tersedianya layanan publik di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah tahun 2020-2024 di atas dapat dilihat bahwa persentase Belanja Infrastruktur Daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.211

Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2019-2023 (Rp)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I	BELANJA	1.671.661.810.766,28	1.500.039.941.735,15	1.404.707.541.223,00	1.532.665.350.605,25	1.694.771.931.022,73

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Operasi	1.073.098.550.633,57	1.046.975.947.135,15	1.115.433.203.158,00	1.215.554.395.271,25	1.290.495.160.733,73
2	Belanja Modal	421.935.543.762,71	323.349.537.374,00	203.128.023.686,00	147.226.457.660,00	219.397.654.552,00
3	Belanja Tak Terduga	275.675.846,00	54.339.433.297,00	3.432.978.345,00	3.047.005.849,00	1.092.325.768,00
II	TRANSFER	176.352.040.524,00	75.375.023.929,00	82.713.336.034,00	166.837.491.825,00	183.786.789.969,00
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.393.985.452,00	7.440.234.929,00	11.402.009.234,00	11.778.750.925,00	10.289.880.760,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	165.958.055.072,00	67.934.789.000,00	71.311.326.800,00	155.058.740.900,00	173.496.909.200,00

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.212

Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan (Rp)	11.372.633.000,00	7.101.857.273,00	11.402.009.234	11.778.950.925	10.289.880.769
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.771.951.990.877,35	1.702.946.243.715,55	1.712.584.319.505,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903
3	Persentase belanja bagi hasil ke Kalurahan terhadap APBD	0,64	0,42	0,66	0,66	0,57

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah telah mengkoordinasikan semua perangkat daerah yang mengampu pajak dan retribusi terdiri dari :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Nyi Ageng Serang
4. RSUD Wates
5. DPUPKP
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kominfo
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Kebudayaan
10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
11. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12. Dinas Pertanian dan Pangan

13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Perdagangan

Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (*existing*), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain:

a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital
b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital
c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital
d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Kabupaten Kulon menindaklanjutinya dengan membuat peta jalan rencana aksi.

2.1.3.5 Fokus Keistimewaan

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan di Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi empat (4) urusan yaitu kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Pada Tahun 2019, alokasi total pagu BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp26.895.848.910,00 terealisasi sebesar Rp25.478.320.517,00 (94,73 persen), dengan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 99,92 persen. Untuk Tahun 2020 alokasi pagu anggaran meningkat sebesar Rp102.452.762.400,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp100.032.027.550,00 (97,64 persen), dan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 99,55 persen. Sedangkan pada tahun 2021, alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo sejumlah Rp. 44.084.557.787,00, realisasi sebesar Rp41.740.230.908,00 (94,68 persen), dengan kinerja fisik mencapai 99,61 persen. Tahun 2022 alokasi total pagu untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 62.620.117.764,00 dengan serapan mencapai sebesar Rp. 59.401.389.333,00 (94,86 persen) dan realisasi fisiknya mencapai 97,65 persen.

Alokasi BKK Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Perubahan Kedua Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Kulon Progo Urusan/Kewenangan (a) Kelembagaan, (b) Pertanahan, (c) Tata Ruang dan (d) Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 nomor 918/17579 adalah sebesar Rp98.833.371.769,00. Alokasi tersebut terdiri dari Urusan Kelembagaan sejumlah Rp3.088.691.400,00; Urusan Kebudayaan sejumlah

Rp78.148.581.431,00; Urusan Pertanahan sejumlah Rp2.389.841.700,00,- dan Urusan Tata Ruang sejumlah Rp15.206.257.238,00,-. Secara rinci alokasi Dana Keistimewaan di Kabupaten Kulon Progo pada masing-masing program disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.213

Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Program	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Kelembagaan	500.000.000	1.289.277.500	2.022.107.300	3.438.368.500	3.088.691.400
2.	Kebudayaan	18.624.838.500	93.604.771.950	39.232.907.187	53.537.121.889	78.148.581.431
3.	Pertanahan	2.687.536.700	3.170.804.000	2.283.952.800	3.071.831.000	2.389.841.700
4.	Tata Ruang	5.083.473.710	4,387,908.950	545.590.500	2.572.796.375	15.206.257.238
	Jumlah	26.895.848.910	102.452.762.400	44.084.557.787	62.620.117.764	98.833.371.769

2.1.3.5.1 Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan pada Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan terdiri atas:

a. Penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*), *Kapanewon/Kemantren*, dan Pemerintah Kalurahan;
b. Penyusunan regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Pengelolaan sumber daya manusia;
d. Peningkatan budaya pemerintahan; dan
e. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan.

Tahun Anggaran 2023 pagu keseluruhan Urusan Kelembagaan adalah sebesar Rp3.088.691.400,00. Realisasi keuangan mencapai Rp2.964.498.244,00 (95,98 persen), sedangkan capaian fisik adalah sebesar 100 persen untuk Urusan Kelembagaan. Secara rinci, pada tabel 2.226 berikut ini disajikan informasi masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan:

Tabel 2.214

Urusan Kelembagaan

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
URUSAN KELEMBAGAAN					**3.088.691.400,00**	**2.964.498.244,00**	**95,98**	**100,00**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					**3.088.691.400,00**	**2.964.498.244,00**	**95,98**	**100,00**
1	**BAPPEDA KULON PROGO**				**226.905.800,00**	**226.026.149,00**	**99,61**	**100,00**
A	**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**				**226.905.800,00**	**226.026.149,00**	**99,61**	**100,00**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				163.072.000,00	162.312.186,00	99,53	100,00
		1. Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024 = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		2. Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2025 = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		3. Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tahun 2023 = 2 dokumen	2	dokumen				100,00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan				63.833.800,00	63.713.963,00	99,81	100,00
		1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi dana keistimewaan se DIY = 4 dokumen	4	dokumen				100,00
2	**INSPEKTORAT KAB. KULON PROGO**				**143.000.000,00**	**125.206.258,00**	**87,56**	**100,00**
	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN				**143.000.000,00**	**125.206.258,00**	**87,56**	**100,00**
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan				143.000.000,00	125.206.258,00	87,56	100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Keistimewaan Semester I dan Semester II = 15 dokumen	15	dokumen				100,00
3	**BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KULON PROGO**				**661.795.600,00**	**593.938.162,00**	**89,75**	**100,00**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**				**432.880.000,00**	**383.034.391,00**	**88,49**	**100,00**
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				272.880.000,00	235.176.191,00	86,18	100,00
		1. Dokumen evaluasi perangkat daerah pengampu keistimewaan = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		2. Dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00
		3. Jumlah ASN yang memahami kelembagaan asli = 200 orang	200	orang				100,00
		4. Publikasi pelaksanaan kelembagaan asli = 1 media	1	media				100,00
	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Kabatan				160.000.000,00	147.858.200,00	92,41	100,00
		1. Dokumen Evaluasi Analisis Jabatan = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00
		2. Pengembangan SIM Analisa Jabatan = 1 Aplikasi	1	aplikasi				100,00
B	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**				**228.915.600,00**	**210.903.771,00**	**92,13**	**100,00**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				228.915.600,00	210.903.771,00	92,13	100,00
		1. Jumlah ASN Lingkup Pemkab Kulon Progo yang meningkat pemahamannya tentang Budaya Pemerintahan = 200 orang	200	orang				100,00
		2. Rencana Aksi Budaya Pemerintahan Perangkan Daerah/Unit Pelaksana Teknis = 1 laporan	1	laporan				100,00
		3. Pengadaan PIN Satriya = 3.500 buah	3500	buah				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan = 1 laporan	1	laporan				100,00
4	**BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. KULON PROGO**				**101.290.000,00**	**100.224.917,00**	**98,95**	**100,00**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**				**101.290.000,00**	**100.224.917,00**	**98,95**	**100,00**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				101.290.000,00	100.224.917,00	98,95	100,00
		1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan keistimewaan pada Kapanewon = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00
5	**KAPANEWON KAB. KULON PROGO (12 Kapanewon)**				**410.200.000,00**	**406.582.445,00**	**99,12**	**100,00**
A	**PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**				**410.200.000,00**	**406.582.445,00**	**99,12**	**100,00**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan				410.200.000,00	406.582.445,00	99,12	100,00
	Kapanewon Temon				35.000.000,00	34.751.300,00	99,29	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Wates				35.000.000,00	34.417.472,00	98,34	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
	Kapanewon Panjatan				35.000.000,00	34.806.986,00	99,45	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Galur				35.000.000,00	34.907.408,00	99,74	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Lendah				35.000.000,00	34.797.840,00	99,42	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Sentolo				31.800.000,00	31.631.820,00	99,47	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Pengasih				35.000.000,00	34.290.626,00	97,97	100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Kokap				35.000.000,00	34.795.749,00	99,42	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Girimulyo				35.000.000,00	33.947.378,00	96,99	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Nanggulan				35.000.000,00	34.863.226,00	99,61	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Samigaluh				35.000.000,00	34.998.110,00	99,99	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
	Kapanewon Kalibawang				28.400.000,00	28.374.530,00	99,91	100,00
		1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025 = 1 dokumen per kapanewon	1	dokumen per kapanewon				100,00
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen				100,00
6	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALDUK KB KAB. KULON PROGO**				**1.138.000.000,00**	**1.117.584.997,00**	**98,21**	**100,00**
A	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**				**1.138.000.000,00**	**1.117.584.997,00**	**98,21**	**100,00**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				1.138.000.000	1.117.584.997	98,21	100,00
		1. Tambahan Penghasilan Pengganti Pelungguh bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan di 3 Kalurahan Karangkopek = 12 bulan	12	bulan				100,00
		2. Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kalurahan = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00
		3. Peningkatan Kapasitas BPKal = 174 orang	174	orang				100,00
7	**BKPP KAB. KULON PROGO**				**207.500.000,00**	**201.236.801,00**	**96,98**	**100,00**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**				**207.500.000,00**	**201.236.801,00**	**96,98**	**100,00**
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota				207.500.000,00	201.236.801,00	96,98	100,00
		Jumlah ASN Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti Internalisasi Keistimewaan = 30 orang	30	orang				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
8	**DINAS KESEHATAN**				**100.000.000**	**94.231.254,00**	**94,23**	**100,00**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**				**100.000.000**	**94.231.254,00**	**94,23**	**100,00**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				100.000.000	94.231.254,00	94,23	100,00
		Inovasi Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Sentosa = 1 inovasi	1	inovasi				100,00
9	**DPMPTSP**				**100.000.000**	**99.467.261,00**	**99,47**	**100,00**
A	**PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**				**100.000.000**	**99.467.261,00**	**99,47**	**100,00**
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				100.000.000	99.467.261,00	99,47	100,00
		Inovasi Pelayanan Publik Si Peri Manis Kapanewon = 1 inovasi	1	inovasi				100,00

2.1.3.5.2 Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan terdiri atas:

a. perumusan dan penetapan regulasi /kebijakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan secara rinci peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan untuk peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota, Kalurahan dan Masyarakat;
c. perumusan dan penetapan mekanisme pelibatan masyarakat dan lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota;
d. perumusan dan penetapan pedoman teknis pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; dan
e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kebudayaan.

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk:

a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
c. mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Obyek Kebudayaan meliputi:

a. nilai-nilai budaya yaitu serangkaian nilai baik buruk yang diyakini oleh sekelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY, dengan cakupan tata nilai dan norma;
b. pengetahuan dan teknologi yaitu karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh komunitas dan masyarakat DIY, dengan cakupan permainan rakyat,olah raga, penanggalan tradisional, senjata, alat kesenian, pakaian dan tata rias, kain, kuliner, jamu, pertanian, sistem irigasi, sistem ekonomi, arsitektur, alat transportasi, dan kearifan tentang alam;
c. bahasa, yaitu sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat membentuk karakter masyarakat, dengan cakupan meliputi tradisi lisan, ekspresi lisan dan manuskrip;
d. adat istiadat, yaitu kebiasaan atau tradisi yang didasarkan pada nilai budaya DIY dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat DIY secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, dengan cakupan tata kelola lingkungan tata cara penyelesaian sengketa ritual; dan upacara adat;

e. tradisi luhur bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten, yaitu nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, seni, dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam masyarakat DIY, dengan cakupan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti; pawukon*; motif batik; grebeg, labuhan, sekaten; joglo, limasan; dan beksan serimpi, macapat;
f. benda, yaitu hasil/produk material dari cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam berbagai bentuk baik benda bernilai budaya DIY, maupun kategori cagar budaya, yang meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan serta koleksi museum yang dimiliki oleh DIY dengan cakupan objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya;
g. Seni ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya DIY maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, dengan cakupan seni pertunjukan; seni rupa; seni sastra; film; seni musik dan seni media.

Urusan Kebudayaan mendapatkan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp78.148.581.431,00, Realisasi keuangan mencapai Rp77.211.234.102,00 (98,80 persen), sedangkan capaian fisik adalah sebesar 99,97 persen untuk Urusan Kebudayaan. Secara rinci, pada tabel 2.227 berikut ini disajikan informasi masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan :

Tabel 2.215

Urusan Kebudayaan

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
URUSAN KEBUDAYAAN					**78.148.581.431**	**77.211.234.102**	**98,80**	**99,97**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**78.148.581.431**	**77.211.234.102**	**98,80**	**99,97**
1	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**670.750.000**	**651.705.876**	**97,16**	**100,00**
A	**ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**670.750.000**	**651.705.876**	**97,16**	**100,00**
i	*Pembinaan Jaga Warga*				*670.750.000*	*651.705.876*	*97,16*	*100,00*
		1. Pembentukan Jaga Warga = 250 kelompok	250	kelompok				100,00
2	**DINAS KOPERASI DAN UKM**				**221.590.000**	**220.584.552**	**99,55**	**100,00**
A	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**221.590.000**	**220.584.552**	**99,55**	**100,00**
i	*Pengembangan Industri Kreatif*				*221.590.000*	*220.584.552*	*99,55*	*100,00*
		Gebyar Greget UMKM Kulon Progo = 115 UMKM	115	UMKM				100,00
3	**DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO**				**33.723.410.996**	**33.336.712.256**	**98,85**	**100,00**
A	**KEGIATAN SEJARAH BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN**				**2.435.015.100**	**2.407.013.531**	**98,85**	**100,00**
i	*Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*				*772.000.000*	*769.326.876*	*99,65*	*100,00*
		1. Lawatan Sejarah = 150 orang	150	orang				100,00
		2. Lomba Cerdas Cermat Sejarah = 1 event	1	event				100,00
		3. Penulisan Sejarah Lokal = 2 dokumen	2	dokumen				100,00
		4. Peringatan Hari Besar Sejarah = 4 event	4	event				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		5. Testimoni Pejuang Bangsa = 1 event	1	event				100,00
ii	*Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra*				*1.229.982.100*	*1.216.670.794*	*98,92*	*100,00*
		1. Kompetisi Bahasa Sastra Kulon Progo = 1 Kali	1	kali				100,00
		2. Macapat = 12 Kali	12	kali				100,00
		3. Pentas Apresiasi Sastra = 3 kali	3	kali				100,00
		4. Pawiyatan (Pawiyatan Sinden, Pawiyatan Pranata Adicara dan Pamedarsabda) = 48 orang	48	orang				100,00
		5. KAMASUTRA (Kenangan Manis Bersama Teater dan Sastra) = 1 kali	1	kali				100,00
		6. Penyusunan Buku Antologi Macapat = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00
iii	*Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman*				*433.033.000*	*421.015.861*	*97,22*	*100,00*
		1. Lomba Cerdas Cermat Museum = 1 Kali	1	kali				100,00
		2. Wajib Kunjung Museum = 300 orang	300	orang				100,00
		3. Pameran Koleksi Museum = 1 event	1	event				100,00
B	**KEGIATAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**				**584.485.562**	**575.587.186**	**98,48**	**100,00**
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				*584.485.562*	*575.587.186*	*98,48*	*100,00*
		1. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) = 25 rekomendasi	25	rekomendasi				100,00
		2. Reinventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo = 1 Dokumen	1	dokumen				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		3. Edukasi Cagar Budaya = 100 orang	100	orang				100,00
		4. Pemeliharaan Cagar Budaya = 3 Cagar Budaya	3	cagar budaya				100,00
		5. Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Cagar Budaya Jembatan Duwet = 1 paket	1	paket				100,00
C	**KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA**				**4.199.483.234**	**4.012.154.831**	**95,54**	**100,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				*4.199.483.234*	*4.012.154.831*	*95,54*	*100,00*
		1. Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Budaya = 12 bulan	12	bulan				100,00
		2. Pembuatan Studio Musik = 1 paket	1	paket				100,00
		3. Pentas Band = 5 kali	5	kali				100,00
		4. Pentas Seni Tradisi = 32 kali	32	kali				100,00
		5. Pentas Kethoprak = 3 kali	3	kali				100,00
		6. Pentas Sendratari = 2 kali	2	event				100,00
		7. Pentas Wayang Wong = 1 kali	1	kali				100,00
		8. Art For Children = 5 kegiatan	5	kegiatan				100,00
		9. Art For Millenials = 5 kegiatan	5	kegiatan				100,00
		10. Kulon Progo Manekawarna = 3 hari	3	hari				100,00
		11. Pentas Musik Kolaborasi = 1 kali	1	kali				100,00
		12. Belanja Pengadaan Alat Musik Band = 44 Unit	44	unit				100,00
		13. Belanja Pengadaan Barang Bercorak Kesenian - Alat Musik = 4 set	4	set				100,00
D	**KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**				**844.957.200**	**838.588.026**	**99,25**	**100,00**

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				*844.957.200*	*838.588.026*	*99,25*	*100,00*
		1. Pengadaan Kostum Karawitan = 50 set	50	set				100,00
		2. Pengadaan Gamelan = 3 set	3	set				100,00
		3. Alat Musik Religi = 5 paket	5	paket				100,00
		4. Alat Musik Jathilan = 1 paket	1	paket				100,00
		5. Kostum Jathilan = 3 paket	3	paket				100,00
E	**KEGIATAN ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**25.659.469.900**	**25.503.368.682**	**99,39**	**100,00**
i	*Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya*				*1.562.282.200*	*1.561.302.104*	*99,94*	*100,00*
		1. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh = 37 Kalurahan	37	Kalurahan				100,00
		2. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang = 35 Kalurahan	35	Kalurahan				100,00
ii	*Pembinaan Lembaga Penggiat Seni*				*667.094.400*	*665.711.919*	*99,79*	*100,00*
		1. Sekolah Film = 1 kali	1	kali				100,00
		2. Pameran Seni Rupa Kulon Progo Annual Art = 1 kali	1	kali				100,00
		3. Pembinaan Seni Rupa = 0 kali	0	event				0,00
iii	*Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya*				*1.369.273.500*	*1.309.721.595*	*95,65*	*100,00*
		1. GSBY Jakarta = 1 event	1	event				100,00
		2. Misi Kebudayaan ke Makasar = 1 event	1	event				100,00
		3. Misi Kebudayaan ke Jawa Timur = 1 event	1	event				100,00
		4. Citra Budaya = 1 event	1	event				100,00
iv	*Penghargaan Seniman dan Budayawan*				*313.000.000*	*308.248.288*	*98,48*	*100,00*

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		1. Penerima Penghargaan Budaya = 8 orang	8	orang				100,00
v	*Festival Kebudayaan Yogyakarta*				*500.000.000*	*495.952.673*	*99,19*	*100,00*
		1. Pentas FKY = 2 event	2	event				100,00
		2. Pawai FKY = 1 event	1	organisasi				100,00
		3. Pasar Seni FKY = 2 event	2	event				100,00
vi	*Gelar Budaya Jogja*				*4.487.876.200*	*4.467.002.008*	*99,53*	*100,00*
		1. Festival Kethoprak = 1 event	1	event				100,00
		2. Festival Langen Carita = 1 event	1	event				100,00
		3. Festival Sendratari = 3 event	3	event				100,00
		4. Festival Teater = 1 event	1	event				100,00
		5. Festival Karawitan tingkat DIY = 1 event	1	event				100,00
		6. Menoreh Art Festival = 1 event	1	event				100,00
		7. Festival Langen Sekar Tingkat DIY = 1 event	1	event				100,00
		8. Lomba Lukis DIY-Kyoto = 300 orang	300	orang				100,00
vii	*Publikasi Seni dan Budaya Daerah*				*299.575.000*	*293.585.127*	*98,00*	*100,00*
		1. Siaran Media Elektronik = 2 Kali	2	kali				100,00
		2. Siaran pers = 3 kali	3	kali				100,00
		3. Kaleidoskop = 3 paket	3	paket				100,00
		4. Penyusunan Data Kebudayaan = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
viii	*Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi*				*887.053.400*	*885.514.402*	*99,83*	*100,00*
		1. Nyadran Agung = 1 kegiatan	1	kegiatan				100,00
		2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	4	kali				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		Indonesia (MLKI) Kulon Progo = 4 kali						
		3. Festival Musik Religi = 1 event	1	event				100,00
ix	*Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*				*1.662.842.200*	*1.643.395.102*	*98,83*	*100,00*
		1. Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja Wayang Kulit dan Wayang Golek = 1 event	1	event				100,00
		2. Pengiriman Wayang Wong ke DIY = 0 event	0	event				#DIV/0!
		3. Pergelaran Wayang Kulit dan Wayang Golek = 3 Kegiatan	3	kegiatan				100,00
		4. Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) = 4 dokumen	4	dokumen				100,00
		5. Gelar Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) = 1 event	1	event				100,00
		6. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Kulon Progo (DKKP) = 12 bulan	12	bulan				100,00
		7. Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda = 1 event	1	event				100,00
		8. Permainan Tradisional = 1 event	1	event				100,00
x	*Penyelenggaraan Even Penggiat Seni*				*2.993.227.200*	*2.965.034.277*	*99,06*	*100,00*
		1. Pentas Fasilitasi Seni Budaya = 90 kelompok	90	kelompok				100,00
		2. Parade Budaya Perbatasan = 3 kali	3	kali				100,00
		3. Sanja Budaya = 2 kali	2	kali				100,00
xi	*Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*				*10.917.245.800*	*10.907.901.187*	*99,91*	*100,00*
		1. Festival Upacara Adat Tingkat Kabupaten = 12 Kontingen	12	kontingen				100,00
		2. Pengiriman Kontingen Festival Upacara Adat ke DIY = 1 kali	1	kali				100,00
		3. Pentas Gadon = 6 kali	6	kali				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		4. Bimtek Ubo Rampe Upacara Adat = 75 orang	75	orang				100,00
		5. Merti Pedukuhan = 913 Padukuhan	913	Padukuhan				100,00
		6. Fasilitasi Upacara Adat = 15 kali	15	kali				100,00
4	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KULON PROGO**				**102.868.000**	**102.636.885**	**99,78**	**100,00**
B	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**102.868.000**	**102.636.885**	**99,78**	**100,00**
	Pengembangan Industri Kreatif	*Penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri kreatif = 50 orang*	*50*	*orang*	*102.868.000*	*102.636.885*	*99,78*	*100,00*
5	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO**				**3.547.621.400**	**3.485.995.347**	**98,26**	**100,00**
A	**PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**1.603.805.700**	**1.554.421.395**	**96,92**	**100,00**
	Pengembangan Lumbung Mataraman				*811.128.200*	*786.850.237*	*97,01*	*100,00*
		Pengembangan Lumbung mataraman = 5 KWT	5	KWT				100,00
		Kontes Kambing PE = 1 kali	1	kali				100,00
		Fasilitasi Pemasaran Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman = 14 Kelompok	14	kelompok				100,00
	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				*792.677.500*	*767.571.158*	*96,83*	*100,00*
		1. Fasilitasi saprodi budidaya Padi Lokal Menor = 4 kelompok	4	kelompok				100,00
		2. SL Iklim padi lokal menor berbasis pranoto mongso = 60 orang	60	orang				100,00
		3. Wiwitan = 300 orang	300	orang				100,00
		4. Pelestarian bawang merah unggul lokal Srikayang (Fasilitasi penangkar benih) = 1 kelompok	1	kelompok				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		5. Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi irigasi tersier untuk lahan cetak sawah baru = 1 kelompok	1	kelompok				100,00
B	**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**				**1.943.815.700**	**1.931.573.952**	**99,37**	**100,00**
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia				*1.943.815.700*	*1.931.573.952*	*99,37*	*100,00*
		1. Fasilitasi saprodi dan alsintan untuk kelompok tani lahan surjan = 10 kelompok	10	kelompok				100,00
		2. Sekolah Lapang GAP-GHP Bawang Merah = 40 orang	40	orang				100,00
		3. Sekolah Lapang Iklim Berbasis Pranoto Mongso = 60 orang	60	orang				100,00
		4. Lomba Intensifikasi Lahan Surjan = 1 kegiatan	1	kegiatan				100,00
		5. Validasi data lahan surjan = 1 paket	1	paket				100,00
		6. Sosialisasi Perbup Lahan Surjan = 1 paket	1	paket				100,00
6	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO**				**1.016.813.900**	**1.015.208.532**	**99,84**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**1.016.813.900**	**1.015.208.532**	**99,84**	**100,00**
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				*1.016.813.900*	*1.015.208.532*	*99,84*	*100,00*
		1. Grebeg Sampah = 6 Kapanewon	6	Kapanewon				100,00
		2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah = 300 orang	300	orang				100,00
		3. Gropyok Sampah = 6 Kapanewon	6	Kapanewon				100,00
		4. Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan Budidaya Maggot (BSF) = 55 orang	55	orang				100,00
		5. Hibah Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah = 36 Kelompok/Lembaga	36	kelompok				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
7	**DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO**				**32.219.444.415**	**31.847.267.168**	**98,84**	**99,92**
A	**KEGIATAN PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**19.610.321.174**	**19.381.634.158**	**98,83**	**99,88**
	Penyelenggaraan Atraksi Wisata Budaya				*19.610.321.174*	*19.381.634.158*	*98,83*	*99,88*
		1. Kiskendha Mrahaswara = 16 event	16	event				100,00
		2. Menoleh ke Menoreh = 1 event	1	event				100,00
		3. Romansa Pansela = 1 event	1	event				100,00
		4. Gerakan Sambanggo = 10 kali	10	kali				100,00
		5. Festival Paralayang Wisata = 1 event	1	event				100,00
		6. Pentas Atraksi Wisata Budaya = 56 kali	56	kali				100,00
		7. Penyusunan Masterplan dan DED Paralayang Banjarasri = 1 paket	1	paket				100,00
		8. Pembangunan Landmark Icon Pariwisata Kulon Progo = 1 paket	1	paket				100,00
		9. Rehap Amphiteater Kiskendha = 1 paket	1	paket				98,00
		10. Pembangunan kawasan Paralayang Banjarasri = 1 kawasan	1	kawasan				100,00
		11. Pembelian Tanah kawasan Paralayang Banjarasri = 1 unit	1	unit				100,00
		12. Karya Seni Instalasi = 5 paket	5	paket				100,00
		13. Klasik Progo World Class River = 1 event	1	event				100,00
		14. Uji dan Kajian Geolistrik Kiskendo = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		15. Uji dan Kajian Borlog Kiskendo = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		16. Sepekan Bendung khayangan = 1 event	1	event				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
B	**KEGIATAN ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**12.609.123.241**	**12.465.633.010**	**98,86**	**100,00**
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				*5.218.423.241*	*5.115.095.966*	*98,02*	*100,00*
		1. Festival Pacak Sepuran = 1 event	1	event				100,00
		2. Gelar Potensi desa Wisata = 1 event	1	event				100,00
		3. Menoreh Food Festival = 1 event	1	event				100,00
		4. Misi Pariwisata Budaya = 3 lokasi	3	lokasi				100,00
		5. Fasilitasi Homestay = 0 Homestay	0	homestay				#DIV/0!
		6. Pameran Ekonomi Kreatif = 1 event	1	event				100,00
		7. Festival Nglarak Blarak Wisata = 1 event	1	event				100,00
		8. Gladen Jemparingan Nasional = 1 event	1	event				100,00
		9. Bimtek Pengelola Pariwisata & Pelaku Wisata = 80 orang	80	orang				100,00
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				*7.390.700.000*	*7.350.537.044*	*99,46*	*100,00*
		1. Promosi melalui Media Luar Ruang = 5 paket	5	paket				100,00
		2. Pembuatan Film Pariwisata = 3 film	3	film				100,00
		3. Cetak bahan Promosi Pariwisata = 1 paket	1	paket				100,00
		4. Promosi melalui Media Elektronik = 12 kali	12	kali				100,00
		5. Fam Trip Difabel = 1 kegiatan	1	kegiatan				100,00
		6. Pengadaan Mobil Promosi Wisata = 1 unit	1	unit				100,00
		7. Wayang wisata istimewa = 14 kali	14	kali				100,00
		8. Pemilihan Dimas Diajeng = 1 event	1	event				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		9. Farmtrip Sambang Deso = 1 event	1	event				100,00
		10. Rally Foto Konservasi = 1 event	1	event				100,00
		11. Safari Pariwisata= 1 event	1	event				100,00
		12. Sumilir Gunung Kelir = 1 event	1	event				100,00
		13. Gebyar Music Istimewa = 1 event	1	event				100,00
		14. Asia Tri Jogja Festival = 1 event	1	event				100,00
8	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.196.082.720**	**5.110.883.425**	**98,36**	**100,00**
A	**KEGIATAN PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				**5.196.082.720**	**5.110.883.425**	**98,36**	**100,00**
	Pengembangan Budaya Bahari				*5.196.082.720*	*5.110.883.425*	*98,36*	*100,00*
		1. Sarana dan Prasarana untuk Pokdakan Wanita = 20 kelompok	20	kelompok				100,00
		2. Mina Surjan = 4 kelompok	4	kelompok				100,00
		3. Sarana dan Prasarana untuk Poklahsar = 8 kelompok	8	kelompok				100,00
		4. Rehab Gedung UPI untuk Poklahsar = 1 unit	1	unit				100,00
		5. Peralatan UPI untuk Poklahsar = 1 kelompok	1	kelompok				100,00
		6. Lomba Gerbang Segoro = 12 Kapanewon	12	Kapanewon				100,00
		7. Publikasi melalui media elektronik = 5 kali tayang	5	kali tayang				100,00
		8. Pembangunan TPI Congot = 1 unit	1	unit				100,00
		9. Pengkayaan Ikan Endemik Lokal = 237.500 ekor	237.500	ekor				100,00
		10. Penyusunan Buku Jaga Kaliku = 750 Eksemplar	750	eksemplar				100,00
		11. Sarana Pengawasan SDI = 6 kelompok	6	kelompok				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		12. Festival Jaga Kaliku = 12 Kapanewon	12	Kapanewon				100,00
		13. Festival Gerbang Segoro = 1 event	1	event				100,00
		14. Bantuan sarana penangkapan ikan = 3 kelompok	3	kelompok				100,00
		15. Rehab mushola dan aula pertemuan TPI Congot = 2 unit	2	unit				100,00
		16. Revitalisasi Pasar Ikan Sarwo Laris = 1 unit	1	unit				100,00
		17. Sarpras pendukung Pasar Ikan Sarwo Laris = 5 jenis	5	jenis				100,00
		18. DED TPI Trisik = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
9	**KAPANEWON TEMON**				**100.000.000**	**99.899.086**	**99,90**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.899.086**	**99,90**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.899.086*	*99,90*	*100,00*
10	**KAPANEWON WATES**				**350.000.000**	**347.006.260**	**99,14**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**97.006.260**	**97,01**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*97.006.260*	*97,01*	*100,00*
B	**KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**				**250.000.000**	**250.000.000**	**100,00**	**100,00**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	*Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) = 1 Kelurahan*	*1*	*Kelurahan*	*250.000.000*	*250.000.000*	*100,00*	*100,00*
11	**KAPANEWON PANJATAN**				**100.000.000**	**99.909.776**	**99,91**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.909.776**	**99,91**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.909.776*	*99,91*	*100,00*
12	**KAPANEWON GALUR**				**100.000.000**	**98.306.560**	**98,31**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**98.306.560**	**98,31**	**100,00**

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*98.306.560*	*98,31*	*100,00*
13	**KAPANEWON LENDAH**				**100.000.000**	**99.622.200**	**99,62**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.622.200**	**99,62**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.622.200*	*99,62*	*100,00*
14	**KAPANEWON SENTOLO**				**100.000.000**	**99.871.740**	**99,87**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.871.740**	**99,87**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.871.740*	*99,87*	*100,00*
15	**KAPANEWON PENGASIH**				**100.000.000**	**99.804.164**	**99,80**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.804.164**	**99,80**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.804.164*	*99,80*	*100,00*
16	**KAPANEWON KOKAP**				**100.000.000**	**99.940.193**	**99,940193**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.940.193**	**99,940193**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.940.193*	*99,940193*	*100,00*
17	**KAPANEWON GIRIMULYO**				**100.000.000**	**97.206.962**	**97,21**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**97.206.962**	**97,21**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*97.206.962*	*97,21*	*100,00*
18	**KAPANEWON NANGGULAN**				**100.000.000**	**99.995.120**	**100,00**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.995.120**	**100,00**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.995.120*	*100,00*	*100,00*
19	**KAPANEWON KALIBAWANG**				**100.000.000**	**99.980.000**	**99,98**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**99.980.000**	**99,98**	**100,00**

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*99.980.000*	*99,98*	*100,00*
20	**KAPANEWON SAMIGALUH**				**100.000.000**	**98.698.000**	**98,70**	**100,00**
A	**KEGIATAN ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				**100.000.000**	**98.698.000**	**98,70**	**100,00**
	Gelar Budaya Jogja	*Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 event*	*1*	*event*	*100.000.000*	*98.698.000*	*98,70*	*100,00*

2.1.3.5.3 Urusan Pertanahan

Urusan kelembagaan pada Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan meliputi:

a. inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengajuan peta bidang, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
b. inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengajuan peta bidang, dan pendaftaran Tanah Desa/Kalurahan;
c. pendaftaran pencatatan perubahan data Sertipikat Tanah Desa/Kalurahan;
d. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
e. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kalurahan;
f. pendampingan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
g. fasilitasi penanganan permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan;
h. pengawasan terhadap Tanah Kalurahan;
i. pengawasan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
j. pendampingan pemeliharaan dokumen Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan;
k. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan;
l. fasilitasi peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten; dan
m. penegasan batas kalurahan

Beberapa aktivitas yang dilakukan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk 100 bidang terealisasi 82 bidang;
b. Pendaftaran Tanah Desa untuk 122 bidang terealisasi 118 bidang;
c. Pengawasan pemanfataan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
d. Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR untuk pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
e. Penanganan permasalahan Tanah Desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penanganan pertanahan dapat dilakukan dengan sinkronisasi terhadap kegiatan pertanahan yang dilakukan di Kabupaten dengan memfokuskan pada tanah-tanah yang menjadi lingkup kegiatan urusan keistimewaan. Berikut ini data kondisi dan sebaran tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.

Tabel 2.216

Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022

No	Status Tanah	2021			2022		
		Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat	Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat
1	Kasultanan	1.399	1.399	366	1.399	1.399	366
2	Kadipaten	488	488	179	488	488	179
	JUMLAH	1.887	1.887	545	1.887	1.887	545

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2023

Tahun Anggaran 2023 pagu keseluruhan Urusan Pertanahan adalah sebesar Rp2.389.841.700,00. Realisasi keuangan mencapai Rp1.931.893.224,00 (80,84 persen), sedangkan capaian fisik adalah sebesar 92,84 persen untuk Urusan Pertanahan. Secara rinci, pada tabel 2.228 berikut ini disajikan informasi masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan:

Tabel 2.217

Urusan Pertanahan

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
URUSAN PERTANAHAN					**2.389.841.700**	**1.931.893.224**	**80,84**	**92,84**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					**2.389.841.700**	**1.931.893.224**	**80,84**	**92,84**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO**				**2.089.841.700**	**1.635.351.673**	**78,25**	**91,81**
A	**PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**				**1.762.216.700**	**1.321.980.831**	**75,02**	**90,29**
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				1.670.588.700	1.230.731.489	73,67	89,95
		Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 100 Bidang	100	bidang	478.297.800			82,00
		Pembuatan dan pemasangan patok = 950 patok	950	patok	82.110.000			100,00
		Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 122 bidang	122	bidang	329.920.300			96,72
		Pendaftaran ukur Tanah Desa = 50 bidang	50	bidang	354.683.900			80,00
		Identifikasi dan inventarisasi Tanah Kasultanan/Kadipaten/Tanah Desa = 3 Kapanewon	3	Kapanewon	185.076.700			100,00
		Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 1.000 sertifikat	1000	sertifikat	240.500.000			100,00
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				91.628.000	91.249.342	99,59	96,43
		Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo = 28 Kalurahan	28	Kalurahan	91.628.000			96,43

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
B	**PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**				**327.625.000**	**313.370.842**	**95,65**	**100,00**
	Penyiapan Bahan Petimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100.000.000	86.853.600	86,85	100,00
		Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo = 20 rekomendasi	20	rekomendasi	0			100,00
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				227.625.000	226.517.242	99,51	100,00
		Penanganan Permasalahan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo = 3 Kalurahan	3	Kalurahan	77.625.000			100,00
		Inventariasi dan Identifikasi Permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa = 87 Kalurahan dan 1 Kelurahan	88	Kalurahan & Kelurahan	150.000.000			100,00
2	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KULON PROGO**				**300.000.000**	**296.541.551**	**98,85**	**100,00**
A	**PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**				**300.000.000**	**296.541.551**	**98,85**	**100,00**
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				300.000.000	296.541.551	98,85	100,00
		Berita Acara Penegasan Batas Desa: a. Pembuatan peta batas desa = 5 Kalurahan b. Berita acara kesepakatan = 5 Kalurahan c. Pembuatan pilar batas desa = 5 Kalurahan d. Pemasangan pilar batas desa = 5 Kalurahan	5	Kalurahan di Kapanewon Wates				100,00

2.1.3.5.4 Urusan Tata Ruang

Urusan keistimewaan pada aspek tata ruang yang dimiliki meliputi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan terlebih dahulu menyusun kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY dengan tetap memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan ini, dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dirumuskan ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten, yaitu satuan ruang tanah kasultanan/kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana, dan/atau cagar budaya serta mempunya pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan. Sesuai dengan amanah Perdais 2/2017 pula, terdapat 18 Satuan Ruang Strategis Kasultanan/Kadipaten yaitu:

1. Satuan Ruang Strategis Kasultanan:
    a. Karaton;
    b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
    c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
    d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
    e. Masjid Pathok Nagoro;
    f. Gunung Merapi;
    g. Pantai Samas – Parangtritis;
    h. Kerto – Pleret;
    i. Kotabaru;
    j. Candi Prambanan - Candi Ijo;
    k. Sokoliman;
    l. Perbukitan Menoreh;
    m. Karst Gunungsewu; dan
    n. Pantai Selatan Gunungkidul.
2. Satuan Ruang Strategis Kadipaten:
    a. Puro Pakualaman
    b. Makam Girigondo
    c. Pusat Kota Wates
    d. Pantai Selatan Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo, dalam tipologi Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan memiliki satu SRS Kasultanan yaitu Perbukitan Menoreh, dan tiga SRS Kadipaten yaitu Makam Girigondo, Pusat Kota Wates, dan Pantai Selatan Kulon Progo. Amanah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi kasultanan dan kadipaten tersebut tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bentuk fasilitasi pemerintah daerah kepada kasultanan dan kadipaten tertuang di dalam Pasal 44 Perdais Nomor 2 Tahun 2017 dimana fasilitasi Pemda dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, memberikan bantuan dalam hal:

a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;

b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
c. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
d. pelaksanaan Penataan Ruang;
e. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
f. penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;
h. pengendalian pemanfaatan Ruang; dan
i. pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Daerah DIY memfasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan rencana induk. Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, aspek tata ruang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

a. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
c. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten yang berada dalam kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
e. pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
f. audit tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
g. pengenaan sanksi pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; dan
h. pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten

Beberapa dokumen tata ruang dan pendukungnya yang disusun pada tahun 2023 adalah:

a. Materi Teknis RDTR Kulon Progo Wilayah Utara (Raperkada Praloket);
b. KLHS RDTR Kulon Progo Wilayah Utara;
c. Peraturan BupatiRTBL Hargorejo.

Selain digunakan untuk penyusunan dokumen tata ruang, alokasi di Urusan Tata Ruang digunakan untuk:

a. Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih di SRS Perbukitan Menoreh;
b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan di SRS Perbukitan Menoreh;
c. Pengembangan kawasan Embung Tonogoro & Kleco di SRS Perbukitan Menoreh.

Berikut ini progres penyusunan Dokumen Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten:

Tabel 2.218

Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang

Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan

No	Jenis Dokumen Rencana Tata Ruang	Uraian	Alasan/Urgensi	Keterangan
1	Rencana Induk	SRS Kota Wates	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Perbukitan Menoreh	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2020
		SRS Pantai Selatan	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Makam Girigondo	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2021
2	RTBL Kawasan SRS Kota Wates	Kawasan Bulu Pengasih	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2015
3	RTBL Kawasan SRS Perbukitan Menoreh	Banjaroya	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi perbatasan	Belum disusun
		Tonogoro	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2015
		Nglinggo-Tritis	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2018
		Jatimulyo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Hargorejo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Sermo	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2017
4	RTBL Kawasan SRS Pantai Selatan	Karangwuni	Kawasan strategis ekonomi pelabuhan	Belum disusun
		Glagah	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Jangkaran	Kawasan strategis ekonomi	Belum disusun
		Banaran (Sekitar Trisik)	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Bugel	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
5	RTBL Kawasan SRS Makam Girigondo	Girigondo	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2017

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang(Kundha Niti Mandhala lan Niti Sasana) Kab. Kulon Progo, 2021.

Tahun Anggaran 2023 pagu keseluruhan Urusan Tata Ruang sebesar Rp15.206.257.238,00. Realisasi keuangan mencapai Rp14.760.302.096,00 (97,07%), sedangkan capaian fisik adalah sebesar 100% untuk Urusan Tata Ruang. Secara rinci, pada tabel 2.231 berikut ini disajikan informasi masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang :

Tabel 2.219

Urusan Tata Ruang

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
URUSAN TATA RUANG					**15.206.257.238**	**14.760.302.096**	**97,07**	**100,00**
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					**15.206.257.238**	**14.760.302.096**	**97,07**	**100,00**
1	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATENKULON PROGO**				**726.527.308**	**725.721.023**	**99,89**	**100,00**
A	**PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				**726.527.308**	**725.721.023**	**99,89**	**100,00**
	Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang				569.061.548	568.388.918	99,88	100,00
		Penyusunan Materi Teknis RDTR Kulon Progo Wilayah Utara = 1 Dokumen Raperkada (pra loket)	1	dokumen raperkada (pra loket)				100,00
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				157.465.760	157.332.105	99,92	100,00
		Peraturan Bupati RTBL Hargorejo = 1 Dokumen Perkada	1	dokumen perkada				100,00
2	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO**				**253.590.000**	**248.976.144**	**98,18**	**100,00**
A	**PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				**253.590.000**	**248.976.144**	**98,18**	**100,00**
	Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang				253.590.000	248.976.144	98,18	100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		KLHS RDTR Kulon Progo Wilayah Utara = 1 dokumen KLHS RDTR Kulon Progo Bagian Utara tervalidasi	1	dokumen KLHS RDTR Kulon Progo bagian utara tervalidasi				100,00
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PKP KABUPATEN KULON PROGO**				**8.942.918.470**	**8.729.756.303**	**97,62**	**100,00**
A	**PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				**8.942.918.470**	**8.729.756.303**	**97,62**	**100,00**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				8.942.918.470	8.729.756.303	97,62	100,00
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Hargotirto, Kokap = 65 SR	65	SR	448.864.100			100,00
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Ngargosari, Samigaluh = 65 SR	65	SR	450.000.000			100,00
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Purwosari, Girimulyo = 65 SR	65	SR	450.000.000			100,00
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Pendoworejo, Girimulyo = 55 SR	55	SR	380.000.000			100,00
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Banjararum, Kalibawang = 80 SR	80	SR	560.000.000			100,00
		Rehabilitasi jalan menuju kawasan objek wisata Bendung Khayangan = 725 m	725	m	2.400.000.000			100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		Rekonstruksi Jalan Pasar Bendo-Beku (Kawasan Makro Tonogoro) Lanjutan = 935 meter	935	meter	2.853.201.500			100,00
		Penyusunan review DED jalan menuju makam Girigondo = 1 dokumen	1	dokumen	1.400.852.870			100,00
		Identifikasi tanah jalan menuju Makam Girigondo = 1 dokumen	1	dokumen				100,00
		Rekonstruksi jalan menuju Makam Girigondo Tahap 1 = 150 meter	150	meter				100,00
4	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO**				**4.113.241.400**	**3.886.601.419**	**94,49**	**100,00**
A	**PEMANFAATAN RUANG SATUAN STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				**4.113.241.400**	**3.886.601.419**	**94,49**	**100,00**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				4.113.241.400	3.886.601.419	94,49	100,00
		1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pengembangan Durian Kawasan Embung Tonogoro:			896.111.600			
		a. Bimtek Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Durian = 2 kelompok	2	kelompok				100,00
		b. Bimbingan Teknis Penangkar Benih Durian = 1 kelompok	1	kelompok				100,00
		c. Gerakan Perawatan Tanaman Durian di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang = 1 paket	1	kelompok				100,00
		d. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Kampung Durian berupa bibit durian dan pupuk organik = 5 kelompok	5	kelompok				100,00
		e. Bantuan Saprodi untuk tanaman Tumpangsari (Dusun Kempong, Banjaroyo, Kalibawang) berupa Benih Cabai, Pupuk, dan Mulsa Plastik = 1 kelompok	1	kelompok				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		f. Sewa lahan dan penanaman tanaman semusim Kawasan Tonogoro, Banjaroya = 1 tahun	1	tahun				100,00
		g. Pembinaan pengembangan ternak di Kawasan Tonogoro, Banjaroya = 1 paket	1	paket				100,00
		2. Pengembangan Kawasan Agrowisata Embung Kleco, Girimulyo:						
		a. Gerakan Perawatan tanaman Durian di Kawasan Embung Mini Kleco, Giripurwo, Girimulyo = 1 paket	1	paket				100,00
		b. Pembangunan prasarana penunjang di kawasan Embung Mini Kleco berupa:						
		- Pembangunan jalan lingkungan 200 meter	200	meter				100,00
		- Pembangunan Gazebo = 3 unit	3	unit				100,00
		- Pembangunan Mushola = 1 unit	1	unit				100,00
		- Pembangunan Toilet 4 unit	4	unit				100,00
		- Instalasi Air Bersih = 1 paket	1	paket				100,00
		c. Saprodi untuk intensifikasi tanaman buah (Kelengkeng dan durian) berupa pupuk organik dan MKP/Booster = 3 dusun	3	dusun				100,00
		d. Festival buah : 1 event	1	event				100,00
		3. Pengembangan Agro Eduwisata Hargowilis: 1 paket	1	paket	1.586.568.600			100,00
		a. Budidaya dan Perawatan Komoditas Perkebunan (Kelapa) = 1 komoditas	1	komoditas				100,00
		b. Pengolahan komoditas kelapa (gula semut) = 1 komoditas	1	komoditas				100,00
		c. Budidaya Komoditas Tanaman Pangan = 0 komoditas	1	komoditas				100,00

NO	PROGRAM / NAMA OPD / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KELUARAN			ALOKASI (Rp)	REALISASI		
		TOLOK UKUR KEGIATAN	TARGET			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
			VOL	SATUAN				
		d. Budidaya Komoditas Tanaman Hortikultura = 3 komoditas	3	komoditas				33,33
		e. Budidaya Komoditas Peternakan Domba = 1 komoditas	1	komoditas				100,00
		f. Pengadaan Drone untuk Pertanian = 1 unit	1	unit				100,00
		4. Pengembangan Kambing PE di Kapanewon Jatimulyo = 2 kelompok	2	kelompok	300.807.100			100,00
		5. Fasilitasi bibit, saprodi dan sarpras budidaya kopi di perbukitan Menoreh = 6 kelompok tani	6	kelompok tani				100,00
		6. Festival Kopi = 1 Event	1	event				100,00
5	**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO**				**1.169.980.060**	**1.169.247.207**	**99,94**	**100,00**
A	**PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				**1.169.980.060**	**1.169.247.207**	**99,94**	**100,00**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1.169.980.060	1.169.247.207	99,94	100,00
		Rambu Lalu Lintas = 55 buah	55	buah				100,00
		Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) = 9 buah	9	buah				100,00
		Pagar Pengaman Jalan (guardrail) = 416 meter	416	meter				100,00
		Cermin Lalu Lintas = 26 buah	26	buah				100,00

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah dan iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut**.**

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan makanan sebesar 43,66 persen, angka tersebut lebih rendah dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan, namun persentasenya menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 46,13 persen. Adapun komposisi tingkat pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan selengkapnya dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)

No	Kelompok Makanan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	6,07	6,08	6,74	5,54	5,91
2	Umbi-umbian	0,50	0,52	0,70	0,57	0,56
3	Ikan/udang/cumi/kerang	1,60	1,70	1,69	1,83	1,30
4	Daging	1,92	1,74	2,16	2,48	2,42
5	Telur dan Susu	2,87	3,09	3,11	2,88	2,95
6	Sayur-sayuran	3,24	3,64	4,50	3,69	3,66
7	Kacang-kacangan	1,19	1,14	1,42	1,28	1,60
8	Buah-buahan	2,70	2,37	2,23	2,87	2,28
9	Minyak dan kelapa	1,17	1,32	1,52	1,75	1,34

No	Kelompok Makanan	2019	2020	2021	2022	2023
10	Bahan Minuman	1,90	1,80	2,14	1,84	1,72
11	Bumbu-bumbuan	0,71	0,73	0,91	0,93	0,79
12	Bahan makanan lainnya	0,83	0,86	0,96	1,00	0,96
13	Makanan dan Minuman Jadi	17,65	16,73	15,66	14,76	13,75
14	Rokok dan Tembakau	4,53	3,50	4,26	4,71	4,42
	Jumlah / Total	**46,88**	**45,22**	**48,01**	**46,13**	**43,66**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti oleh kelompok padi-padian, kelompok rokok dan tembakau, kelompok sayuran, dan kelompok telur dan susu. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kulon Progo pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu 4,42 persen walaupun terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu untuk konsumsi ikan masih sangat rendah, hanya berkisar 1,30 persen mengalami penurunan dibandingkan konsumsi ikan di tahun 2022.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

Pengeluaran konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 56,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan dapat dilhat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.221

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)

No	Kelompok Bukan Makanan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	23,21	22,68	25,45	24,61	25,99
2	Aneka Barang dan Jasa	13,19	12,98	12,12	13,18	11,65
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	2,84	2,77	2,18	2,04	2,11
4	Barang Tahan Lama	8,50	8,03	7,08	7,04	9,67
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3,08	3,45	4,05	4,99	4,54
6	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	2,30	4,86	1,11	2,01	2,38
	Jumlah	**53,12**	**54,78**	**51,99**	**53,87**	**56,34**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tingkat pengeluaran tertinggi pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 25,99 persen dan dikuti oleh Kelompok Aneka Barang dan Jasa sebesar 11,65 persen, sedangkan pengeluaran terendah pada Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala. Pada Tahun 2023 secara umum pengeluaran per kapita pada Kelompok Bukan Makanan mengalami peningkatan signifikan pada kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga.

Apabila dilihat rasio pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kulon Progo nilainya berfluktuatif, pada periode 2019-2023 rasio tertinggi dicapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,563. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.222

Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita sebulan	480.709	515.169	458.427	575.926	705.666
2	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan	904.901	940.502	881.689	1.069.000	1.252.450
3	Rasio	0,531	0,548	0,520	0,538	0,563

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2023 kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 88,56%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang. Nilai kesesuaian ruang merupakan perpaduan keterwujudan dan keselarasan pemanfaatan ruang yang setidaknya terdiri atas aspek struktur ruang dan pola ruang. Nilai tersebut merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang pada Lampiran II, nilai kesesuaian tata ruang Kabupaten Kulon Progo berada pada klasifikasi I yang merupakan tingkatan tertinggi dengan klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW. Rekomendasi berupa saran kebijakan dan Strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTRW.

Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tercantum dalam Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.223

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2023

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Struktur ruang	87,50	86,38	87,00	87.22	87,33
2.	Pola ruang	89,83	89,67	89,58	89.88	89,78
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,67	88,03	88,29	88.55	88,56

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dengan adanya beberapa proyek strategis nasional berupa pembangunan bandara, kereta bandara, jalan bebas hambatan serta penetapan kawasan strategis pariwisata nasional, konstelasi penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo sudah semestinya dilakukan penyesuaian. Proses perubahan Perda 1/2012 telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan telah dilakukan peninjauan kembali. Pada Tahun 2024 ini RTRW masih dalam proses pra loket dalam rangka persiapan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kemeterian ATR/BPN. Revisi RTRW beserta penataan ruang turunannya sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kulon Progo yang dengan adanya beberapa kegiatan strategis menjadi sangat pesat dan dinamis.

b. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri dengan harapan adanya badan usaha pengelola kawasan yang menaungi dan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan usaha yang akan melakukan usaha nya pada kawasan tersebut. Kawasan peruntukan industri telah direncanakan kurang lebih 10 tahun. Beberapa instrumen pendukungnya seperti peningkatan akses jalan dan regulasi kemudahan serta insentif penanaman modal telah dikeluarkan. Beberapa kegiatan industri dari berbagai sektor telah mulai berdiri namun hingga kini belum ada badan hukum yang menjadi pengelola kawasan. Kawasan peruntukan industri tersebut adalah:

a) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Lendah.
b) Kawasan Industri Temon di Kapanewon Temon berupa industri bahari dengan luas kurang lebih 500 Ha.
c) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kapanewon Nanggulan dengan luas 700 Ha
d) Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kapanewon.

c. Luas wilayah produktif

Penentuan wilayah produktif dilakukan melalui pendekatan pada lahan pertanian produktif karena penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh lahan pertanian. Hal ini memiliki relevansi dengan mata pencaharian penduduk Kulon Progo yang mayoritas berada pada sektor pertanian. Luas lahan pertanian produktif yang dimaksud meliputi lahan sawah, hutan rakyat dan perikanan budidaya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, persentase luas wilayah produktif Tahun 2018-2019 tidak dapat diperbandingkan secara linear dengan persentase luas wilayah produktif pada tahun-tahun sebelumnya karena mulai Tahun 2018 terjadi perubahan cara perhitungan dan penggunaan *baseline* data untuk menentukan luas kawasan sawah, hutan rakyat dan perikanan budidaya.

Tabel 2.224

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	31.375,30	31.375,30	31.375,30	31.431,76	31.529,30
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23
3.	Rasio (1./2.)	83,26	83,26	83,26	83,47	83,72

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada Tahun 2023, persentase wilayah produktif di Kabupaten Kulon Progo mencapai 83,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 83,72 persen dari wilayah budidaya diusahakan menjadi wilayah produktif yang bernilai ekonomis. Lahan sawah dimanfaatkan sepanjang tahun dengan ditanami padi, palawija serta terkadang diselingi dengan tanaman hortikultura dan buah-buahan. Kawasan hutan rakyat dimanfaatkan oleh penduduk dengan ditanami tanaman kayu jati, sengon dan akasia. Selanjutnya, kawasan perikanan budidaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan seperti udang vaname, ikan lele, ikan gurami dan ikan nila. Komoditas udang vaname merupakan komoditas utama usaha perikanan tambak serta menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Kulon Progo di bidang perikanan. Sedangkan untuk usaha perikanan kolam masih didominasi oleh ikan lele sebagai komoditas ikan konsumsi.

d. Jumlah orang yang terangkut di terminal

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal bus AKAP sangat fluktuatif demikian pula untuk AKDP. Pada Tahun 2020, dengan kondisi Pandemi Covid-19 terlihat penurunan yang sangat siginifikan baik mobilitas angkutan umum AKAP maupun AKDP serta pengguna layanan. Penurunan ini juga erat kaitanya dengan adanya upaya pembatasan pergerakan guna pencegahan penyebaran Virus Covid-19 terutama pada saat lonjakan mudik lebaran maupun saat liburan. Adapun data mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di terminal tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.225

Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2019-2023

TAHUN	Bus		Penumpang Bus	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2019	49.932	24.875	338.606	45.224
2020	29.620	14.883	110.506	15.966
2021	9.775	19.146	72.074	107.168
2022	31.400	10.846	287.878	12.070
2023	33.093	11.888	262.346	10.107

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024

e. Kondisi Jalan

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2023 untuk kondisi baik 42,58% sedangkan untuk kondisi sedang 30,83%. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.226

Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	km	%	Km	%	
1.	Nasional*	16,38	57,84	11,54	40,75	6,4	1,41	0	0	28,32
2.	Provinsi	67,42	46,18	39,14	24,40	43,58	25,27	4,3	4,15	154,44

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	km	%	Km	%	
3.	Kabupaten	557	42,58	403	30,82	166	12,68	182	13,93	1.308.645

*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka untuk mendukung keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) serta untuk menangkap peluang dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan BIY dengan KSPN Borobodur (Jalur Bedah Menoreh). Jalur ini juga diharapkan bisa menurunkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan membuka akses menuju potensi wisata serta kawasan produk unggulan Kulon Progo. Terbangunnya Jalan Bedah Menoreh diharapkan akan meningkatkan akses jalan menuju kawasan dengan potensi wisata yang terdapat di sepanjang jalur Bedah Menoreh. Selain itu dengan terbukanya akses jalan di Perbukitan Menoreh diharapkan dapat memperlancar distribusi produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kulon Progo.

f. Infrastruktur Strategis di Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa infrastruktur strategis yang diharapkan mampu mengembangkan wilayah secara signifikan. Bendung Kamijoro merupakan infrastruktur penyediaan air baku yang telah diresmikan pada Desember 2019 untuk antisipasi kebutuhan air baku bagi Kulon Progo khususnya kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang juga telah diresmikan pada Agustus 2020. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta selanjutnya didukung dengan peningkatan Rumah Sakit Wates bertaraf internasional, integrasi kereta bandara yang saat ini sedang dibangun dan rencana jalan tol Yogyakarta-BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA-Cilacap. Sebagai penunjang pariwisata, Badan Otorita Borobudur mengembangkan wisata di perbatasan Kulon Progo dengan basis wisata alam dengan pintu masuk utama dari Kulon Progo dan telah dibangun gerbang masuk di kawasan Klangon dengan nama Samudra Raksa. Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dari berbagai kawasan tersebut telah dirintis trayek armada angkutan dari DAMRI. Rencana pengembangan selanjutnya adalah pembangunan asrama haji serta penyelesaian jalur jalan lintas selatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Kejadian kejahatan dari tahun 2017 hingga 2023 cenderung fluktuatif. Meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan kurang tertibnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal kekerasan secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.227

Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pencurian biasa	44	58	26	41	31
2.	Jumlah pencurian hewan	0	1	10	n.a.	1
3.	Jumlah pencurian dengan kekerasan	4	6	-	n.a.	1
4.	Jumlah lainnya	463	468	79	n.a.	312
	Jumlah kejadian total	**511**	**533**	**115**	n.a.	345
	Jumlah kerugian (Rp)	**19.259.632**	**13.384.861**	**1.815.025.000**	**n.a.**	**8.632.794,99**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2023

Terkait dengan kejadian kejahatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 selain kasus pencurian (pencurian biasa, pencurian hewan, dan pencurian dengan kekerasan), juga terdapat juga kejadian kejahatan lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2023, adapun kejadian kejahatan lain yang dimaksud meliputi kasus perjudian, kasus penipuan, kasus penadahan, kasus penggelapan, kasus kesusilaan, kasus narkotika, kasus perampokan, kasus penganiayaan, kasus penculikan dan lain-lain.

Selain beberapa kejadian kejahatan yang disebutkan di atas, di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat kejadian-kejadian lain yang juga meresahkan masyarakat dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, seperti kasus begal dan kasus kejahatan jalanan lainnya. Berikut ini adalah data kasus kejahatan jalanan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 2.228

Data Kasus Kejahatan Jalanan DIY Tahun 2019-2023

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	MAPOLDA DIY	0	0	1	0	0
2.	POLRES KULON PROGO	0	6	2	6	2
3.	POLRESTA YOGYAKARTA	13	12	10	30	13
4.	POLRES SLEMAN	6	21	16	32	31
5.	POLRES BANTUL	0	15	21	4	21
6.	POLRES GUNUNGKIDUL	0	2	1	4	3
	Jumlah kejadian total	**19**	**50**	**51**	**76**	**70**

Sumber data : Jogja Dataku, 2024

Jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi di DIY dari tahun 2019 hingga 2022 selalu meningkat, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan akan tetapi jumlah kasus kejahatan jalanan cukup tinggi. Angka kejahatan jalanan di Kabupaten Kulon Progo fluktuatif dari tahun 2019-2023. Meskipun angka kasusnya lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, akan tetapi jumlah kasus kejahatan jalanan di Kulon Progo dari tahun 2019-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul dan DIY.

Dengan melihat kenyataan tersebut, kedepan diupayakan untuk meningkatkan patroli terpadu, meningkatkan pembinaan mental, dan menggiatkan pengamanan swadaya.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan pembangunan bandara di Kapanewon Temon. Demonstrasi pada tahun 2021 terjadi pada kategori demonstrasi politik yaitu tentang penegakan HAM Kasus Munir, dan demonstrasi ekonomi yaitu terkait penambangan pasir besi. Pada tahun 2022 kejadian demo hanya terjadi sekali, namun naik menjadi 9 kali di tahun 2023 dan didominasi oleh kejadian demo tentang ekonomi. Kejadian demo di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2023 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.229

Jumlah Demo Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Demonstrasi politik	1	0	1	0	2
2	Demonstrasi ekonomi	5	1	1	1	5
3	Demonstrasi mogok kerja	0	0	0	0	0
4	Demonstrasi agama	2	0	0	0	2
	Jumlah	**8**	**1**	**2**	**1**	**9**

Sumber data : Bakesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kulon Progo diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

Tabel 2.230

Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 14 tahun	89.494	94.537	89.212	89.988	88.117
15 - 64 tahun	299.618	278.793	297.076	302.018	296.615
65 +	58.134	53.090	56.995	59.336	58.321
Angka Beban Ketergantungan (%)	**49,27**	**52,96**	**49,21**	**49,44**	**49,37**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih jauh untuk mencapai bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Secara angka kondisi ini tercapai saat angka ketergantungan sudah berada di bawah 50 persen. Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai kondisi ini masih dibutuhkan waktu yang relatif lama. Pada Tahun 2023, angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 49,37% menurun dari tahun 2022 yang sebesar 49,44%. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial diantaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 5 Tujuan Daerah dengan 8 indikator dan 11 Sasaran Daerah dengan 16 indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.231

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	**Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**		**Gini ratio**	**Nilai**	**0,361-0,404**	**0,402**	**100**	***Sumber data: BPS*** **Realisasi 2023**
			Pertumbuhan ekonomi	**%**	**4,70-5,60**	**5,65**	**100**	***Sumber data: BPS*** **Realisasi 2023**
			Angka kemiskinan	**%**	**16,92-17,14**	**15,64**	**100**	***Sumber data: BPS*** **Realisasi 2023**
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)	Juta rupiah	33.0	35,77	100	*Sumber data: BPS* Realisasi 2023
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,64-2,92	2,40	100	*Sumber data: BPS* Realisasi 2023
2	**Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas**		**Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)**	**Nilai**	**75,66**	**75,82**	**100**	***Sumber data: BPS*** **Realisasi 2023**
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,15	9,18	100	*Sumber data: BPS* Realisasi 2023
			2. Harapan lama sekolah	Tahun	14,29	14,48	100	*Sumber data: BPS* Realisasi 2023
		Meningkatnya prestasi generasi muda	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	74,34	79,10	100	*Sumber data: Dinas Dikpora* Realisasi 2023
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,35	100	*Sumber data: BPS* Realisasi 2023
			2. Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,29	0,31	100	*Sumber data: Dinas Kesehatan* Realisasi 2023
			Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	**%**	**53,60**	**54,04**	**100**	***Sumber data: Dinas Kebudayaan*** **Realisasi 2023**
		Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	53,60	54,04	100	*Sumber data: Dinas Kebudayaan* Realisasi 2023
3	**Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan**		**Indeks Pembangunan Berkelanjutan**	**Nilai**	**74,38**	**76,16**	**100**	***Sumber data: DPUPKP, DLH, Dishub, BPBD, DPTR*** **Realisasi 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	49,27	51,46	100	*Sumber data: DPUPKP* Realisasi 2023
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,53	67,50	100	*Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup* Realisasi 2023
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,55	88,56	100	*Sumber data: DPTR* Realisasi 2023
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	%	97,16	97,16	100	*Sumber data: BPBD* Realisasi 2023
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**75,00**	**78,05**	**100**	***Sumber data: Bagian Organisasi*** **Hasil evaluasi tahun 2023**
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A	A	100	*Sumber data: Bagian Organisasi* Hasil evaluasi tahun 2023
			2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	100	*Sumber data: BKAD*
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,25	85,634	100	*Sumber data: Bagian Organisasi* Realisasi 2023
5	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan**		**Indeks ketertiban dan ketenteraman**	**Nilai**	**81,48**	**79,66**	**97,77**	***Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol*** **Realisasi 2023**
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100	100	100	*Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol* Realisasi tahun 2023
Rata-rata Capaian							**99,9**	
Predikat Kinerja							**ST**	

Capaian Kinerja RKPD sampai dengan tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.

Hasil rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah 99,9% dengan predikat sangat tinggi. Pada indikator tujuan daerah, 8 indikator memiliki predikat sangat tinggi. Pada indikator sasaran daerah, 16 indikator memiliki predikat sangat tinggi.

Penjabaran predikat kinerja atas tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.232

Predikat Kinerja Tujuan & Sasaran Daerah Berdasarkan Target RKPD Tahun 2023

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Tujuan daerah	%	Sasaran daerah	%	Total indikator	%
1	91% - 100%	Sangat tinggi	8	100	16	100	24	100
2	76% -90%	Tinggi	-	0	-	0	-	0
3	66% - 75%	Sedang	-	-	-	-	-	-
4	51%- 65%	Rendah	-	-	-	-	-	-
5	≤ 50%	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-
Jumlah			8	100	16	100	24	100

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

2.2.1. Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja RKPD tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2023, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2023:

Jumlah Program : 245
Jumlah Kegiatan : 575
Jumlah Sub Kegiatan : 1.189
Jumlah OPD : 40
Pagu Belanja Daerah : Rp1.818.996.970.903,00 (Perubahan kedua atas perubahan APBD)

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 99,91% dan kinerja anggaran sebesar 92,63%. Kinerja fisik dan kinerja anggaran memiliki predikat Sangat Tinggi. Data capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.233

Tingkat Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2023

Triwulan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD		Predikat*)	
	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Kinerja	Anggaran
Triwulan I	29,49	20,25	29,38	15,60	99,63	77,04	ST	T
Triwulan II	57,39	52,22	56,00	41,06	97,58	78,63	ST	T
Triwulan III	82,93	80,19	82,11	67,63	99,01	84,34	ST	T
Triwulan IV	100,00	100,00	99,91	92,63	99,91	92,63	ST	ST

*) Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 96,99%. Adapun kinerja program dalam RKPD triwulan IV tahun 2023, dari 245 program hanya

236 program yang memiliki Indikator Kinerja, sisanya ada 9 program yang baru muncul di tahun 2023 sehingga belum memiliki indikator. Dari 236 Indikator Kinerja Program terdapat 220 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 7 program dengan predikat kinerja Tinggi (T), 2 program dengan predikat Sedang (S), 3 program dengan predikat Rendah (R), dan ada 4 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat kinerja program RKPD triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.234

Predikat Kinerja Program RKPD Triwulan IV Tahun 2023

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Indikator Program RKPD	Persentase (%)
1	91% - 100%	Sangat tinggi	220	93,22
2	76% -90%	Tinggi	7	2,97
3	66% - 75%	Sedang	2	0,85
4	51%- 65%	Rendah	3	1,27
5	≤ 50%	Sangat Rendah	4	1,69
		Jumlah	236	100,00

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Realisasi keuangan dari anggaran belanja daerah triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp.1.684.924.519.712,78 atau sebesar 92,63% dimana secara lengkap anggaran dan realisasi keuangan triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.235

Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2023

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/ Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2023 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
s.d. 31 Des 2023	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	716.533.414.673,00	716.533.414.673,00	100	677.226.424.566,00	94.51	Belanja gaji dan tunjangan ASN dan P3K, TPG,Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/ Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2023 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	Belanja Barang dan Jasa	520.850.760.957,00	520.850.760.957,00	100	478.511.184.856,78,	91.87	• Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Nyi Ageng Serang yang direncanakan untuk kebutuhan mendadak / tidak dapat diprediksikan. menjadi Silpa BLUD 2023 yang akan digunakan untuk membangun gedung Haemodialisa pada tahun 2024. • Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 menyesuaikan dengan permohonan kepesertaan dari Kalurahan dan Dinas Sosial • Terdapat sisa belanja barang dan jasa BOS. • Belanja TCM untuk penderita TB tidak dapat direalisasikan karena adanya ketentuan dari Kemenkes yaitu Surat Kemenkes no PR.01.06/A/20648/2023 tentang Pembekuan Komponen Pengadaan Kartrid TCM dan Surat Kemenkes no PR.01.06/A/44079/2023 tentang Relokasi Anggaran Kartid TCM bersumber DAK NF TA 2023. • Belanja penerangan jalan umum sesuai dengan tagihan PLN • Belanja jasa pengukuran tanah karena belum terbitnya SPS dari Kantor Pertanahan. • Efisiensi belanja perjalanan dinas
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	1.962.404.000,00	1.962.404.000,00	100	1.556.758.500,00	79.33	Realisasi Subsidi bunga kredit kepada usaha kecil menengah sesuai dengan permintaan.

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/ Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2023 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	Belanja Hibah	104.760.713.524,00	104.760.713.524,00	100	102.913.282.099,00	98.24	sisa lelang belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada DPUPKP, Dinas Pendidikan dan Olahraga, DPTR, dan Perangkat Daerah lainnya
	Belanja Bantuan Sosial	21.662.900.000,00	21.662.900.000,00	100	19.059.088.500,00	87.98	• Belanja Bantuan Sosial BPNT APBD sesuai dengan hasil verifikasi • Penyediaan biaya personil beasiswa bagi siswa SMP bersumber dari dana Insentif Fiskal dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024.
	BELANJA MODAL	251.726.654.910,00	251.726.654.910,00	100	220.778.665.454,00	87.71	• Sisa lelang pengadaan belanja modal • Belanja modal yang bersumber dari dana Insentif Fiskal dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024
	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.434.580.258,00	14.434.580.258,00	100	1.092.325.768,00	7.57	• Penggunaan untuk penanganan darurat hidrometeorologi dan kekeringan • Tambahan pendapatan Treasury Deposit Facility Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dituangkan dalam BTT
	BELANJA TRANSFER	187.065.542.581,00	187.065.542.581,00	100	183.786.789.969,00	98.25	Alokasi DBH Pajak dan Retribusi kepada Kalurahan sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi.
	TOTAL	***1.818.996.970.903,00***	***1.818.996.970.903,00***	100	***1.684.924.519.712,78***	***92.63***	

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2024

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja triwulan IV tahun 2023 antara lain:

1. Capaian kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum optimal karena adanya kendala internal maupun eksternal serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya
2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga gap antara kinerja fisik dan keuangan masih tinggi

4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Perlunya melakukan pengendalian internal OPD agar lebih ditingkatkan sehingga kinerja fisik dan kinerja keuangan bisa selaras dalam pelaksanaannya;
2. Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke LPSE untuk kegiatan/sub kegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan;;
3. Perlunya inovasi kolaborasi dalam pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat

2.2.2. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut**:**

Tabel 2.236
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	**Pendidikan**																				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1.051.760,10**	**100**	**346.606,14**	**34,52**	**45.317,53**	**61,90**	**93.577,85**	**91,67**	**90.012,20**	**100**	**106.471,32**	**100,00**	**335.378,89**	**100,00**	**335.378,89**	**100,00**	**31,89**	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	1.216,14	12	257,00	3	62,94	3	60,54	3	52,51	3	62,09	12	238,08	12	238,08			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	5.777,04	12	1.058,09	3	251,56	2	256,43	3	235,78	3	213,68	11	957,45	11	957,45			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.414	1.029.553,26	12	342.387,98	3	44.814,54	3	92.586,29	3	88.974,21	3	105.080,53	12	331.455,56	12	331.455,56			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	6.132,54	1	1.435,96	-	4,42	-	354,17	-	345,45	1	724,01	1	1.428,04	1	1.428,04			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	56	332,45	14	58,00	3	21,56	3	9,20	3	7,52	5	16,32	14	54,61	14	54,61			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	428,51	4	133,51	1	6,08	1	40,47	1	16,88	1	66,39	4	129,82	4	129,82			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	431,66	12	108,97	3	10,95	3	25,28	3	22,98	3	26,87	12	86,08	12	86,08			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	155,00	2	20,00	-	7,20	-	7,27	2	2,87	-	0,08	2	17,43	2	17,43			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	2.426,27	21	585,78	9	90,59	4	115,76	4	209,66	4	100,93	21	516,94	21	516,94			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	495,00	10	127,45	-	-	-	1,81	10	52,51	-	47,73	10	102,05	10	102,05			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	237	1.473,39	240	206,51	-	17,97	-	58,03	-	39,78	240	65,97	240	181,76	240	181,76			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	1.121,57	39	195,57	23	29,71	2	52,67	-	35,24	14	66,72	39	184,34	39	184,34			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	144,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	165,10	7	14,70	-	-	7	-	-	14,70	-	-	7	14,70	7	14,70			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	220,12	1	16,62	-	-	-	9,92	1,00	2,10	-	-	1	12,02	1	12,02			
		Program Pengelolaan Pendidikan	**Presentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi**	**35,63**	**939.143,46**	**34,56**	**118.896,33**	**34.56**	**3.119,93**	**35.09**	**7.256,44**	**35,09**	**14.098,26**	**55,84**	**86.046,22**	**55,84**	**110.520,86**	**55,84**	**110.520,86**	**156,72**	**11,77**	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
			Presentase SD/ MI terakreditasi A	**66,03**		**65,22**		**65.04**		**66.67**		**66,67**		**60,76**		**60,76**	-	**60,76**				
			Presentase SMP/ MTs terakrditasi A	**73,75**		**70,00**		**69.14**		**69.14**		**69,14**		**67,47**		**67,47**	-	**67,47**				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	**87,31**		**86,80**		**88.37**		**88.67**		**88,64**		**87,71**		**87,71**	-	**87,71**				
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	*Jumlah PAUD Terakreditasi*																			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	150	25,14	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	28.339,64	13	2.440,60	-	19,19	-	64,85	-	615,90	13	1.329,60	13	2.029,54	13	2.029,54			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			5	265,97	-	1,77	-	1,75	-	3,86	5	258,29	5	265,68	5	265,68			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	830	569,00	830	139,21	-	19,71	-	1,19	-	58,38	830	52,87	830	132,15	830	132,15			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68.427	1.504,02	16.056	330,99	-	4,53	-	84,26	-	206,16	16.056	33,76	16.056	328,71	16.056	328,71			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	829	12.588,67	829	11.129,04	-	-	-	-	-	-	-	11.128,20	-	11.128,20	-	11.128,20			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.305	384,31	829	130,50	-	20,31	-	35,89	-	28,51	829	37,27	829	121,98	829	121,98			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidikdan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan PAUD	2.750	9.053,90	2.750	2.540,95	-	580,55	-	778,21	-	563,27	2.750	560,04	2.750	2.482,06	2.750	2.482,06			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.458	287,90	390	50,35	-	1,50	-	37,14	-	-	390	11,70	390	50,33	390	50,33			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi	3.319	1.356,30	814	304,88	-	11,25	-	149,96	-	100,91	814	24,67	814	286,79	814	286,79			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah PNF terkareditasi*																			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240	728,48	90	111,78		3,65	-	93,33	-	11,21	90	3,06	90	111,25	90	111,25			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	24.503,82	1	102,67	-	0,72	-	11,69	1	0,40	1	89,05	2	101,85	2	101,85			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35	12.517,67	35	475,31	-	-	-	-	-	-	30	472,81	30	472,81	30	472,81			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35	558,00	15	86,88	-	6,84	-	19,46	-	1,59	15	54,82	15	82,71	15	82,71			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikdan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidinkan Non Formal	353	363,80	353	71,23	-	15,53	-	20,48	-	15,55	353	19,55	353	71,11	353	71,11			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi	20	120,47	20	10,76	-	-	-	-	-	8,24	20	1,16	20	9,40	20	9,40			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	120	135,45	30	19,34	-	3,25	-	4,77	-	8,88	30	0,89	30	17,78	30	17,78			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	920	878,00	230	210,30	-	2,67	-	202,52	-	2,73	230	2,04	230	209,96	230	209,96			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah SD/ MITerakreditasi A*														-					
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			5	641,47	-	-	-	1,36	5	632,01	5	3,23	10	636,60	10	636,60			
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1	403,92	-	-	-	63,67	-	63,41	1	213,50	1	340,58	1	340,58			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	1	73.901,50	1	9.271,00	-	-	-	-	-	2.508,66	1	5.010,38	1	7.519,04	1	7.519,04			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6	1.311,00	3	381,14	-	-	-	-	-	87,27	3	227,37	3	314,65	3	314,65			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	21.748,00	12	3.312,85	-	-	-	152,06	-	660,08	12	1.910,70	12	2.722,84	12	2.722,84			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	525	1.579,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	140.250	21.020,96	35.250	3.233,15	-	3,54	-	1.108,75	-	1.390,66	35.250	721,88	35.250	3.224,83	35.250	3.224,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350	1.350,60	350	124,74	-	19,00	-	9,31	-	21,98	350	68,54	350	118,83	350	118,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	337	293.201,00	337	33.710,28	-	-	-	-	-	-	337	33.659,63	337	33.659,63	337	33.659,63			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12.000	3.200,50	3.000	427,70	-	-	-	-	-	379,06	3.000	30,91	3.000	409,97	3.000	409,97			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	377	1.635,50	337	118,15	-	-	-	-	-	58,07	337	54,68	337	112,75	337	112,75			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	337	4.047,36	337	1.226,82	-	22,12	-	308,45	-	40,01	337	819,38	337	1.189,96	337	1.189,96			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	30	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	310,50	2	103,50	-	-	-	-	-	88,83	2	0,00	2	88,83	2	88,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.485	42.552,62	3.076	7.363,68	-	1.916,78	-	2.253,78	-	1.488,85	**3.076**	1.392,68	3.076	7.052,09	3.076	7.052,09			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan kompetensi dan kualifikasa	796	3.549,10	3.076	383,48	-	12,32	-	24,32	-	198,89	**3.076**	126,83	3.076	362,37	3.076	362,37			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah SMP/MTs terakreditasi A*														-					
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	260	2.336,48	65	96,98	-	6,55	-	2,45	-	27,06	65	41,43	65	77,50	65	77,50			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16.000	2.818,40	4.000	421,15	-	3,96	-	160,82	4.000	130,29	4.000	92,37	8.000	387,45	8.000	387,45			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			4	424,43	-	-	-	1,15	2	4,60	2	410,81	4	416,56	4	416,56			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	72.992	29.641,05	18.248	3.053,01	-	34,88	-	819,41	-	1.146,65	18.248	600,98	18.248	2.601,92	18.248	2.601,92			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	520	1.398,66	130	63,00	-	22,52	-	3,75	-	8,65	130	21,69	130	56,60	130	56,60			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	65	183.607,20	65	21.172,37	-	-	-	-	-	-	65	19.309,40	65	19.309,40	65	19.309,40			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	60.964	2.539,14	337	308,47	-	14,19	-	58,14	-	197,27	337	20,26	337	289,86	337	289,86			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7	95.072,00	3	7.273,43	-	21,01		66,47		1.695,38	3	3.978,14	3	5.761,00	3	5.761,00			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat			2	410,61	-	-	-	-	-	96,58	2	225,35	2	321,93	2	321,93			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	208,72	-	-	-	-	-	45,48	1	106,13	1	151,61	1	151,61			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	62,48	-	-	-	-	-	14,93	2	34,83	2	49,76	2	49,76			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			13	1.697,43	-	2,27	-	148,22	-	410,41	13	878,00	13	1.438,90	13	1.438,90			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			2	420,14	-	-	-	-	-	97,67	2	227,90	2	325,57	2	325,57			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang UKS beserta Perabotnya			1	30,87	-	-	-	-	-	9,09	1	21,22	1	30,31	1	30,31			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya			3	849,95	-	3,48	-	67,78	-	174,11	3	480,92	3	726,29	3	726,29			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	33.120,00	3	1.146,19	-	1,56	-	58,17	-	237,22	3	641,76	3	938,70	3	938,70			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	240	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	270	61,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	909	1.281,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya 1 ruangan			1	594,56	-	-	-	72,14	-	107,34	1	321,76	1	501,25	1	501,25			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96	20.724,18	15	1.148,68	5	291,71	4	346,08	4	247,09	2,00	241,94	15	1.126,82	15	1.126,82			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	872	3.118,74	10	391,23	1	52,60	2	24,66	4,00	205,05	**3,00**	71,85	10	354,16	10	354,16			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter**	**100**	**2.070,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-					**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
		Pendidikan Berbasis Budaya	*Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas*																			
		Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal	12	2.070,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi**	**88,16**	**16.597,92**	**86,84**	**5.557,76**	**89,54**	**3.248,75**	**89,54**	**236,32**	**79,10**	**502,76**	**81,28**	**1.121,38**	**81,28**	**5.109,22**	**81,28**	**5.109,22**	**92,20**	**30,78**	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga*																			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	4.106,42	3	1.856,28	-	78,66	-	122,80	-	255,21	3	1.088,26	3	1.544,93	3	1.544,93			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	744	12.491,50	744	3.701,47	-	3.170,09	-	113,52	-	247,56	744	33,13	744	3.564,29	744	3.564,29			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi**	**80,21**	**5.112,57**	**68,75**	**813,10**	**100,00**	**201,46**	**100**	**9,70**	**100**	**417,67**	**100**	**180,08**	**100,00**	**808,91**	**100,00**	**808,91**	**124,67**	**15,82**	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organiasasi pemuda yang aktif*																			
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	28	4.734,80	7	743,08	-	201,46	-	-	-	369,18	7	170,37	7	741,01	7	741,01			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional*																			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	44,70	5	9,85	-	-	-	-	-	-	5	9,71	5	9,71	5	9,71			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	20	87,45	5	9,85	-	-	-	9,70	5	48,50	-	-48,50	5	9,70	5	9,70			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	320	245,92	80	50,32	-	-	-	-	80	-	-	48,50	80	48,50	80	48,50			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**367.359,03**	**100**	**103.528,90**	**34,52**	**16.019,42**	**61,90**	**20.988,88**	**91,67**	**21.775,71**	**100,00**	**21.612,39**	**100,00**	**80.396,40**	**100,00**	**80.396,40**	**100,00**	**21,88**	**Dinas Kesehatan**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	3.020	192.000,00	12	50.014,49	3	9.838,50	3	13.171,33	3	14.322,98	3	10.294,09	12	47.626,90	12	47.626,90			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honor bagi pengelola keuangan dan barang	4	1.176,00	12	295,00	3	-	3	63,89	3	64,05	3	128,10	12	256,04	12	256,04			Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	60,00	1	15,00	-	2,98	-	4,27	-	2,44	1	4,75	1	14,45	1	14,45			Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	4	600,00	1	413,32	1	95,14	-	124,00	-	94,23	-	92,58	1	405,95	1	405,95			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	200,00	1	90,34	-	10,41	-	25,63	-	25,36	1	17,99	1	79,39	1	79,39			Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*																			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	84	100,00	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD Wates	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4	320,00	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD NAS	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4	192,00	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.168,02	3	196,72	3	299,63	3	259,01	3	353,31	12	1.108,68	12	1.108,68			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.712,70	3	218,84	3	218,75	3	199,37	3	411,20	12	1.048,15	12	1.048,15			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.707,81	3	134,98	3	199,15	3	256,67	3	448,63	12	1.039,43	12	1.039,43			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.938,29	3	160,52	3	227,75	3	220,28	3	385,15	12	993,69	12	993,69			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	3.365,97	3	360,37	3	458,83	3	465,33	3	668,03	12	1.952,56	12	1.952,56			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalibawang)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.432,08	3	280,18	3	341,22	3	312,33	3	558,28	12	1.492,00	12	1.492,00			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.462,90	3	183,96	3	211,46	3	176,70	3	290,80	12	862,92	12	862,92			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.863,45	3	206,03	3	318,61	3	283,50	3	340,61	12	1.148,74	12	1.148,74			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.418,51	3	296,10	3	350,31	3	325,96	3	408,60	12	1.380,97	12	1.380,97			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	3.394,55	3	321,00	3	506,73	3	423,61	3	620,77	12	1.872,12	12	1.872,12			Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggulan)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.520,45	3	239,90	3	378,79	3	339,02	3	532,77	12	1.490,48	12	1.490,48			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.280,30	3	316,43	3	328,84	3	262,15	3	496,12	12	1.403,54	12	1.403,54			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.580,44	3	371,06	3	417,44	3	399,88	3	490,49	12	1.678,87	12	1.678,87			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.671,33	3	327,55	3	403,17	3	434,80	3	514,15	12	1.679,67	12	1.679,67			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.514,49	3	324,29	3	344,42	3	324,22	3	444,36	12	1.437,29	12	1.437,29			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.891,01	3	170,90	3	228,53	3	245,26	3	388,55	12	1.033,24	12	1.033,24			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	3.628,80	3	371,95	3	579,11	3	510,42	3	917,10	12	2.378,58	12	2.378,58			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.573,22	3	219,97	3	328,21	3	347,47	3	618,49	12	1.514,13	12	1.514,13			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	2.769,98	3	371,41	3	369,46	3	424,79	3	734,66	12	1.900,32	12	1.900,32			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	1.556,09	3	188,74	3	170,69	3	216,58	3	329,90	12	905,91	12	905,91			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas			12	4.119,77	3	624,95	3	681,24	3	665,58	3	674,87	12	2.646,65	12	2.646,65			Dinas Kesehatan (Puskesmas Wates)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	340,00	5	58,06	-	4,08	-	10,29	-	5,92	5	16,27	5	36,55	5	36,55			Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	260,00	1	45,55	-	8,17	-	7,95	-	11,52	1	17,11	1	44,75	1	44,75			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	1.300,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12	1.300,00	1	306,61	1	7,79	-	47,05	-	-		249,01	1	303,84	1	303,84			Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	2.100,00	1	414,71	1	110,02	-	84,75	-	118,01		50,67	1	363,44	1	363,44			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12	305,67	3	56,50	3	87,40	3	38,29		114,97	9	297,15	9	297,15			Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*													-	-					
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	0,028	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop	12	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Presentase Pemenuhan UKP UKM**	**88,46**	**560.020,57**	**75,64**	**59.106,23**	**57,59**	**5.755,35**	**63,22**	**8.397,85**	**80,03**	**12.317,64**	**82,09**	**23.026,94**	**82,09**	**49.497,78**	**82,09**	**49.497,78**	**92,80**	**8,84**	**Dinas Kesehatan**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar*																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21,54	160,00	5.310	167,03	-	7,66	-	102,90	-	15,95	3.984	35,54	3.984	162,04	3.984	162,04			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,75	160,00	5.100	45,33	-	0,34	-	12,19	-	11,99	3.956	12,53	3.956	37,05	3.956	37,05			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20,75	160,00	3.877	68,54	-	0,18	-	29,40	-	3,90	3.952	25,06	3.952	58,53	3.952	58,53			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84,864	160,00	21.216	79,31	-	1,51	-	2,55	-	73,34	19.974	0,32	19.974	77,73	19.974	77,73			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135,148	140,00	32.976	57,17	-	2,03	-	49,16	-	1,35	32.976	2,02	32.976	54,56	32.976	54,56			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253,867	140,00	59.725	55,22	-	8,35	-	9,61	-	14,67	59.725	10,84	59.725	43,47	59.725	43,47			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200,805	140,00	67.857	73,68	-	4,57	0	2,72	-	62,97	51.932	2,06	51.932	72,33	51.932	72,33			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan	20,012	140,00	4.883	33,94	-	8,36	-	16,64	-	2,25	4.883	2,92	4.883	30,17	4.883	30,17			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	10,500	140,00	2.562	484,98	-	2,41	-	36,94	-	431,16	2.562	12,15	2.562	482,67	2.562	482,67			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,853	140,00	1.440	36,27	-	1,44	-	2,83	-	9,25	1.410	21,65	1.410	35,17	1.410	35,17			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	120,00	3.350	1.630,10	-	8,45	-	12,63	-	8,54	3.350	134,60	3.350	164,22	6.700	164,22			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8,58		-		-		-	-	8,56	-	8,56	-	8,56			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	400,00	4.113	222,64	-	3,30	-	193,47	-	6,68	4.113	13,82	4.113	217,27	4.113	217,27			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					5,38		-		-		-		5,37		5,37		5,37			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	4	0,12			-		-	-	-	-	-		-	-	-	-			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	0,12	1	32,44	-	4,31	-	0,39	-	22,30	1	1,82	1	28,83	1	28,83			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana	4	0,12	1	28,56	-	-	-	16,44	-	1,82	1	9,03	1	27,30	1	27,30			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	0,12	1	10.328,04	-	12,78	-	126,18	-	102,04	1	4.126,10	1	4.367,11	1	4.367,11			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	120,00	1	70,45	-	12,63	-	34,68	-	4,95	1	17,54	1	69,81	1	69,81			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	120,00	1	955,96	-	32,54	-	887,01	-	7,56	1	20,89	1	948,01	1	948,01			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	120,00	1	50,98	-	4,44	0,00	10,85	-	17,55	1	15,03	1	47,86	1	47,86			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	120,00	1	158,29	-	9,31	-	9,34	-	14,46	1	38,26	1	71,37	1	71,37			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan keshatan khusus	4	120,00	1	24,98	-	3,38	-	8,34	-	8,13	1	4,92	1	24,77	1	24,77			Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	120,00	1	1.128,42	-	85,40	-	175,02	-	420,67	1	310,38	1	991,48	1	991,48			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	920,00	1	23.555,00	-	4.251,62	-	4.475,36	-	4.833,15	1	9.691,32	1	23.251,44	1	23.251,44			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	120,00	1	57,41	-	13,07	-	6,11	-	12,50	1	17,59	1	49,27	1	49,27			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	umlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas	4	120,00	3	42,60	-	2,39	-	9,94	-	3,34	3	15,42	3	31,09	3	31,09			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen operasional pelayanan kesehatan	4	2.200,00	1	3.098,80	-	17,14	-	13,84	-	12,82	1	2.235,60	1	2.279,41	1	2.279,41			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	4	120,00	1	444,47	-	69,25	-	46,53	-	18,45	1	306,65	1	440,89	1	440,89			Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / Kota	4	1400,00	1	774,382	-	5,45	-	6,23	-	18,05	-	654,77	-	684,49	-	684,49			Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)Massal	4	120,00	-	28,91	-	-	-	9,14	-	11,80	1	6,65	1	27,59	1	27,59			Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	120,0	1	339,96	-	54,55	-	102,42	-	75,01	1	103,42	1	335,40	1	335,40			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah KK yang dikunjungi	4	120,0	3.500	44,62	-	2,04	-	9,44	-	13,84	-	9,97	-	35,30	-	35,30			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4	120,0	4.564	571,51	-	83,64	-	80,07	-	292,37	4.564	91,08	4.564	547,17	4.564,00	547,17			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	10,57	-	-	-	5,24	-	1,05	-	4,21	-	10,50					Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)*													-						
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4	120,00	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	120,00	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	4	120,00	1	305,27	-	0,58	-	169,20	-	40,08	1	51,34	1	261,20	1,00	261,20			Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	4	120,00	1	35,05	-	5,76	-	15,56	-	6,25	1	7,43	1	35,01	1,00	35,01			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar*													-						
		Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	4	120,00	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	*% fasyankes pemerintah yang menyelenggarakan SIK Terintegrasi*													-						
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4	120,00	3	62,09	-	4,36	-	22,05	-	13,54	3	9,92	3	49,87	3,00	49,87			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			
		Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	4	120,00	1	170,46	-	-	-	-	-	0,45	1	144,40	1	144,85	1,00	144,85			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar*												-	-	-					
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	14	14.000,00	1	1.721,09	-	13,40	-	905,34	-	423,36	1	370,18	1	1.712,28	1,00	1.712,28			Dinas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alkes, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	300,00	1	147,81	-	26,74	-	36,50	-	34,72	1	46,94	1	144,91	1,00	144,91			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1	60,10	-	-	-	-	-	-	1	59,22	1	59,22	1,00	59,22			Dinas Kesehatan
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4	136,76	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas	Dokumen perencanaan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan (DAK fisik) 3 dokumen	4	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	40.000,00	2	888,71	-	4,87	1	66,39	1	219,67	2	578,24	4	869,18	4,00	869,18			Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40.000,00	1	6.698,42	-	973,65	-	508,53	1	2.659,92	1	2.354,69	2	6.496,80	2,00	6.496,80			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4	6.000,00	1	3.049,15	-	13,40	-	96,71	-	1.944,59	1	919,73	1	2.974,43	1,00	2.974,43			Dinas Kesehatan
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	10.000,00	1	1.253,57	-	-	-	73,95	-	441,12	1	516,75	1	1.031,82	1,00	1.031,82			Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan**	**50,41**	**484,58**	**47,12**	**653,96**	**59,90**	**12,47**	**59,90**	**336,36**	**59,97**	**212,04**	**67,65**	**61,89**	**67,65**	**622,76**	**67,65**	**622,76**	**134,20**	**128,52**	**Dinas Kesehatan**
			Presentase Desa Siaga Kategori mandiri	**46,59**		**39,77**		**61,36**		**61,36**		**61,36**		**75,00**		**75,00**		**75,00**		**160,98**		
			Presentase RT yang ber PHBS	**23,00**		**21,50**		**19,18**		**19,18**		**19,18**		**27,95**		**27,95**		**27,95**		**121,52**		
			Presentase posyandu strata purnama mandiri	**81,65**		**80,08**		**99,17**		**99,17**		**99,37**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**122,47**		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% Desa Siaga kategori mandiri*																			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	160.000,00	1	132,69	-	10,64	-	75,34	-	20,85	1	16,60	1	123,43	1,00	123,43			Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% Rumah Tangga yang ber PHBS*														-					
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	134,68	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% posyandu strata purnama mandiri*																			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	160,00	1	521,27	-	1,83	-	261,02	-	191,19	1	45,29	1	499,33	1,00	499,33			Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	**Presentase Sediaan Farmasi, alkes, makmin, sesuai standar**	**91,72**	**157.094,94**	**88,04**	**499,86**	**75,00**	**32,90**	**75,00**	**139,15**	**75,00**	**145,99**	**75,00**	**146,29**	**75,00**	464,33	**75,00**	**464,33**	**81,77**	**0,30**	**Dinas Kesehatan**
			Presentase Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi	**100**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
			Presentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT	**100**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
			Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	**70,00**		**70,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**142,86**		
			Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat	**96,88**		**82,14**		**80,77**		**78,79**		**88,46**		**85,71**		**85,71**		**85,71**		**88,47**		
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*% Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi*																			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	25,128	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikto Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	24.000,00	1	63,60	-	1,19	-	45,09	-	10,22	1	6,81	1	63,32	1,00	63,32			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*% produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat*																			
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4	24.000,00	1	178,83	-	2,11	-	47,36	-	52,96	1	54,57	1	157,00	1,00	157,00			Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*% PIRT yang mendapatkan seritifikat PIRT*																			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4	24.000,00	1	257,43	-	29,60	-	46,69	-	82,81	1	84,92	1	244,02	1,00	244,02			Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi*																			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	24.000,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Presentase Peningkatan kapasitas SDMK**	**69,96**	**709,70**	**54,53**	**1.315,40**	**64,08**	**17,98**	**64,08**	**318,66**	**70,95**	**499,19**	**90,32**	**351,58**	**90,32**	**1.187,41**	**90,32**	**1.187,41**	**129,10**	**167,31**	**Dinas Kesehatan**
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	**100**		**84,03**		**84,03**		**62,23**		**93,86**		**97,81**		**97,81**		**97,81**		**97,81**		
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	**81,82**		**54,55**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**122,22**		
			Presentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyanken yang dilakukan kredensialing	**28,05**		**25,00**		**-**		**-**		**18,99**		**73,16**		**73,16**		**73,16**		**260,82**		
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP*																			
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	108,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	113,924	1	31,35	-	9,95	-	5,50	-	8,26	1	7,36	1	31,08	1,00	31,08			Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*% nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu*												-							
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	1	165,16	-	-	-	8,26	-	62,02	1	88,76	1	159,04	1,00	159,04			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4	108,00	2.100	36,80	-	8,03	-	11,92	-	8,88	2.100	4,39	2.100	33,21	2.100,00	33,21			Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing*										-									
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4	120,00	-	1.082,09	-	-		292,98	-	420,03	1	251,07	1	964,07	1,00	964,07			Dinas Kesehatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**			**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,23**	**-**	**94,23**	**-**	**94,23**	**0,00**	**15,84**	**Dinas Kesehatan**
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan*																			
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	94,23	1	94,23	1,00	94,23			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**95.132,92**	**100**	**29.251,57**	**34,52**	**5.702,40**	**61,90**	**7.181,67**	**91,67**	**8.039,29**	**100,00**	**5.705,12**	**100,00**	**26.628,47**	**100,00**	**26.628,47**	**100,00**	**27,99**	**RSUD Wates**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.020	192.000,00	92	29.252	3	5.702,40	3	7.181,67	3	8.039,29	3	5.705,12	12	26.628,47	12,00	26.628,47			RSUD Wates
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase pemenuhan UKP UKM**	**88,46**	**560.020,57**	**75,64**	**170.526,23**	**53,62**	**25.770,72**	**63,22**	**30.045,41**	**80,03**	**49.818,38**	**82,09**	**59.536,35**	**82,09**	**165.170,86**	**82,09**	**165.170,86**	**92,80**	**29,49**	**RSUD Wates**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3.000,00	12	132.874,21	3	25.770,72	3	29.721,68	3	29.517,72	3	44.399,35	12	129.409,47	12,00	129.409,47			RSUD Wates
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													-							
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		40.000,00	12	37.652,03	3	-	3	323,73	3	20.300,66	3	15.137,00	12	35.761,39	12,00	35.761,39			RSUD Wates
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**25.228,74**	**100**	**12.076,00**	**34,52**	**1.821,24**	**61,90**	**2.455,74**	**91,67**	**2.754,95**	**100,00**	**2.232,53**	**100,00**	**9.264,46**	**100,00**	**9.264,46**	**100,00**	**36,72**	**RSUD Nyi Ageng Serang**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.020	192,00	147	12.076,00	3	1.821,24	3	2.455,74	3	2.754,95	3	2.232,53	12	9.264,46					RSUD Nyi Ageng Serang
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase pemenuhan UKP UKM**	**88,46**	**560.020,57**	**75,64**	**43.892,81**	**53,62**	**6.621,56**	**63,22**	**7.387,32**	**80,03**	**7.927,93**	**82,09**	**13.687,76**	**82,09**	**35.624,57**	**82,09**	**35.624,57**	**92,80**	**6,36**	**RSUD Nyi Ageng Serang**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Saki	4	3,00	1	43.892,81	-	6.621,56	-	7.387,32	-	7.927,93	1	13.687,76	1	35.624,57	1,00	35.624,57			RSUD Nyi Ageng Serang
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																				
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**35.916,52**	**100**	**8.557,74**	**34,52**	**1.625,94**	**61,90**	**2.104,61**	**91,67**	**2.065,94**	**100,00**	**2.249,09**	**100,00**	**8.045,58**	**100,00**	**8.045,58**	**100,00**	**22,40**	**Dinas PUP & KP**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	112,84	4	56,25	1	13,40	1	13,33	1	15,79	1	13,71	4	56,24	4,00	56,24			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	48	1.806,55	12	391,56	3	92,69	3	89,20	3	87,10	3	107,81	12	376,80	12,00	376,80			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92.00	496,16	12	381,64	3	92,89	3	99,15	3	92,89	3	92,97	12	377,89	12,00	377,89			Dinas PUP & KP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56.00	14.205,61	12	6.131	3	1.227,88	3	1.607,26	3	1.573,57	3	1.239,21	12	5.647,92	12,00	5.647,92			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	222,81	12	123,9	2	20,03	4	38,80	2	19,53	4	39,70	12	118,06	12,00	118,06			Dinas PUP & KP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	28,00	14	19,4	3	3,53	4	4,83	3	2,26	4	8,33	14	18,96	14,00	18,96			Dinas PUP & KP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*												-		-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	330,51	12	121	3	19,61	3	16,78	3	38,27	3	46,02	12	120,68	12,00	120,68			Dinas PUP & KP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	55,85	2	32,12	-	4,88	-	12,19	1	7,01	1	7,60	2	31,68	2,00	31,68			Dinas PUP & KP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	26,86	21	19,9	3	1,99	6	4,52	6	5,27	6	7,65	21	19,44	21,00	19,44			Dinas PUP & KP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*												-		-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16,00	117,50	86	153,46	6	-	-	51,34	77	68,50	5	32,85	88	152,69	88,00	152,69			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*												-		-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	668,31	34	30,82	7	8,68	12	7,30	11	7,45	4	7,38	34	30,82	34,00	30,82			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.085,40	3	477,35	-	-	-	-	-	20,65	3	454,52	3	475,17	3,00	475,17			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	3.546,29	42	619,3	7	140,35	11	159,90	12	127,64	12	191,33	42	619,23	42,00	619,23			Dinas PUP & KP
		Program Penyelenggaraan Jalan	**Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**75,69**	**246.925,64**	**73,39**	**91.535,40**	**72,70**	**961,64**	**72,70**	**24.175,87**	**73,34**	**29.444,22**	**73,39**	**23.603,49**	**73,39**	**78.185,22**	**73,39**	**78.185,22**	**96,96**	**31,66**	**Dinas PUP & KP**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-																			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3	860,00	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-			
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12	25.100,00	28,475	35.113	-	35,09	-	9.636,65	-	14.209,58	975	10.818,55	975,00	34.699,87	975,00	34.699,87			Dinas PUP & KP
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40,0	158.314,63	9,91	31.088	-	138,09	-	10.555,84	-	11.659,27	9.010	6.976,32	9.010,00	29.329,50	9.010,00	29.329,50			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	360	30.951,01	40	7.725	-	305,25	-	2.202,36	-	1.694,20	2	3.503,58	2,00	7.705,39	2,00	7.705,39			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,0	10.300,00	0,07	11.271	-	463,71	-	1.376,53	-	1.553,14	20	1.064,35	20,00	4.457,73	20,00	4.457,73			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara	200	4.350,00	100	1.255	-	17,38	-	348,83	-	67,08	3	799,69	3,00	1.232,98	3,00	1.232,98			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	60	10.300,00	-	4.355,78	-	-			-	-	1	101,00	1,00	101,00	1,00	101,00			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	30	4.350,00	-	101,38	-	-			-	-	1	100,92	1,00	100,92	1,00	100,92			Dinas PUP & KP
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	8	2.200,00	2	625,7	-	2,12	-	55,67	-	260,95	2	239,09	2,00	557,82	2,00	557,82			Dinas PUP & KP
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik**	**87,28**	**29.894,61**	**86,76**	**13.380,73**	**85,96**	**2.148,49**	**86,01**	**5.266,36**	**86,05**	**3.658,32**	**88,97**	**1.960,46**	**88,97**	**13.033,64**	**88,97**	**13.033,64**	**101,94**	**43,60**	**Dinas PUP & KP**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Perlunya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	1.016,06	12	425,46	3	19,77	3	314,30	3	66,93	3	21,23	12	422,24	12,00	422,24			Dinas PUP & KP
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	126	1.422,98	12	556,38	3	166,69	3	290,82	3	57,15	3	38,53	12	553,19	12,00	553,19			Dinas PUP & KP
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik*																			
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (km)	3,1	11.913,00	2	4.446,42	-	709,92	-	1.757,91	-	1.422,32	20	333,42	20,00	4.223,57	20,00	4.223,57			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	5,2	3.980	1,80	7.952,47	-	1.252,11	-	2.903,34	-	2.111,91	42	1.567,28	42,00	7.834,64	42,00	7.834,64			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	19,00	65.156,34		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Program Penataan Bangunan Gedung	**Presentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan terbtib administrasi**	**75,00**	**10.283,11**	**73,44**	**8.101,27**	**72,60**	**113,57**	**73,10**	**1.990,27**	**73,59**	**703,51**	**73,58**	**876,98**	**73,58**	**3.684,33**	**73,58**	**3.684,33**	**98,11**	**35,83**	**Dinas PUP & KP**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-																			
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9	8.800,00	8	7.996,31	-	87,37	-	1.960,52	-	679,09	8	852,46	8	3.579,44	8,00	3.579,44			Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SLMBG	800	2.923,58	180	104,96	45	26,20	71	29,76	-	24,42	160	24,52	276	104,89	276,00	104,89			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Presentase Uji Laboraturium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi**	**93,23**	**1.511,12**	**88,70**	**539,15**	**65,97**	**77,29**	**74,04**	**267,90**	**85,77**	**94,49**	**89,01**	**97,97**	**89,01**	**537,65**	**89,01**	**537,65**	**95,47**	**35,58**	**Dinas PUP & KP**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																				
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dukungan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	839	170.000,00	35	138,50	-	25,26	55	23,27	-	38,12	-	51,61	55	138,26	55,00	138,26			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													-							
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	225.743,35	12	400,66	1	52,03	3	244,63	3	56,37	5	46,36	12	399,39	12,00	399,39			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-												-							
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	370	861,32		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Presentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**	**88,92**	**8.031,73**	**88,66**	**4.203,90**	**87,14**	**87,68**	**88,66**	**2.347,96**	**88,67**	**1.052,36**	**88,73**	**714,25**	**88,73**	**4.202,25**	**88,73**	**4.202,25**	**99,79**	**52,32**	**Dinas PUP & KP**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	704	4.833,31	447	3.811,66	-	11,84	-	2.288,91	-	1.011,26	447	499,54	447	3.811,55	447,00	3.811,55			Dinas PUP & KP
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	680,00	1	392,24	-	75,84	-	59,05	-	41,10	1	214,70	1	390,70	1,00	390,70			Dinas PUP & KP
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (DAK)	2.972	21.270,38	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**94,35**	**10.397,33**	**94,12**	**4.607,52**	**93,92**	**5,34**	**94,25**	**2.650,60**	**94,25**	**1.471,35**	**96,52**	**479,87**	**96,52**	**4.607,16**	**96,52**	**4.607,16**	**102,30**	**44,31**	**Dinas PUP & KP**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	842	63.973,29	1.280	4.607,52	-	5,34	-	2.650,60	-	1.471,35	1.280	479,87	1.280	4.607,16	1.280,00	4.607,16			Dinas PUP & KP
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	2.000	4.000,00	-	-	-	-	-						-	-	-	-			
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK)	5.461	11.115,11	-	-	-	-	-						-	-	-	-			
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan SPAM (DAK)	24	7.119,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Keistimewaan	877	6.540,19	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas PUP & KP
			Perluasan Jaringan Perpipaan di Kalagung, Sentolo 1 Paket			-		-								-	-	-	-			
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	**Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**	**23,22**	**13.629,18**	**22,57**	**12.974,66**	**6,65**	**908,15**	**13,00**	**1.131,03**	**19,13**	**4.320,02**	**26,09**	**5.543,85**	**26,09**	**11.903,04**	**26,09**	**11.903,04**	**112,36**	**87,34**	**Dinas PUP & KP**
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	4	13.629,18	30	12.974,66	8	908,15	9	1.131,03	8	4.320,02	5	5.543,85	30	11.903,04	30,00	11.903,04			Dinas PUP & KP
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/?TPS-3R/TPS (DAK Fisik)	3.000	7.254,00	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	**Presentase penataan bangunan dan lingkungannya**	**73,08**	**5.105,22**	**69,23**	**1.705,09**	**61,22**	**296,56**	**67,35**	**500,99**	**67,35**	**248,85**	**73,47**	**657,28**	**73,47**	**1.703,67**	**73,47**	**1.703,67**	**100,53**	**33,37**	**Dinas PUP & KP**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwasata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya/Pertamanan	8	5.105,22	52	1.705,09	14	296,56	12	500,99	13	248,85	13	657,28	52	1.703,67	52,00	1.703,67			Dinas PUP & KP
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					-		-													
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani**	**46,10**	**11.203,03**	**43,76**	**10.241,95**	**43,14**	**34,90**	**43,14**	**2.232,01**	**43,52**	**4.114,95**	**44,28**	**3.463,57**	**44,28**	**9.845,43**	**44,28**	**9.845,43**	**96,05**	**87,88**	**Dinas PUP & KP**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-																			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60	10.070,52	34	10.145	8	30,97	-	2.188,91	26	4.108,33	-	3.420,49	34	9.748,70	34,00	9.748,70			Dinas PUP & KP
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	302,50	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin	280	820,00	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	-	-	1	96,97	-	3,93	-	43,10	1	6,62	-	43,08	1	96,73	1,00	96,73			Dinas PUP & KP
		Program Kawasan Permukiman	**Presentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani**	**8,26**	**17.422,67**	**6,62**	**4.743,88**	**-**	**49,33**	**5,23**	**4.553,11**	**5,95**	**96,96**	**10,57**	**44,27**	**10,57**	**4.743,67**	**10,57**	**4.743,67**	**127,97**	**27,23**	**Dinas PUP & KP**
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-																			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1.600	13.422,67	300	4.743,88	-	49,33	-	4.553,11	100	96,96	200	44,27	300	4.743,67	300,00	4.743,67			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400	4.000,00	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Perumahan	**Presentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat**	**84,22**	**2.343,30**	**76,54**	**1.183,77**	**74,64**	**137,08**	**74,33**	**432,12**	**73,75**	**510,31**	**73,82**	**97,14**	**73,82**	**1.176,65**	**73,82**	**1.176,65**	**87,65**	**50,21**	**Dinas PUP & KP**
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	12	2.050,00	5	973,88	-	133,12	2	391,81	-	349,77	3	97,14	5	971,84	5,00	971,84			Dinas PUP & KP
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																			
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	293,37	1	209,89	-	3,96	-	40,31	1	160,54	-	-	1	204,81	1,00	204,81			Dinas PUP & KP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati**	**100**	**2.000**	**25,00**	**8.942,92**	**-**	**30,10**	**-**	**1.485,66**	**-**	**5.034,33**	**25,00**	**2.179,67**	**25,00**	**8.729,76**	**25,00**	**8.729,76**	**25,00**	**436,49**	**Dinas PUP & KP**
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																			
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-	-	10	8.942,92	-	30,10	1	1.485,66	-	5.034,33		2.179,67	1	8.729,76	1,00	8.729,76			Dinas PUP & KP
		Kesatuan Bangsa Dan Politik					-															
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**7.076,50**	**100**	**1.740,65**	**34,52**	**334,74**	**61,90**	**445,07**	**91,67**	**397,87**	**100,00**	**328,16**	**100,00**	**1.505,83**	**100,00**	**1.505,83**	**100,00**	**21,28**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	140,79	12	35,0	3	7,42	3	6,50	3	5,38	3	9,50	12	28,80	12,00	28,80			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	157,05	12	61,5	3	12,92	3	18,30	3	13,55	3	16,06	12	60,83	12,00	60,83			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	605.137,84	12	1.475	3	268,02	3	371,62	3	351,02	3	259,40	12	1.250,06	12,00	1.250,06			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	*48*	*162,00*	12	37,8	3	10,13	3	8,50	3	9,40	3	9,23	12	37,25	12,00	37,25			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	56	7,25	14	3,13	3	0,95	4	0,93	3	0,95	4	0,30	14	3,13	14,00	3,13			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*												-		-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	45,39	4	13,7	1	2,62	1	3,87	1	3,28	1	3,72	4	13,49	4,00	13,49			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	59,80	12	15,01	2	1,96	4	3,10	3	3,05	3	5,10	12	13,20	12,00	13,20			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*												-		-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	10	17,00	2	6,69	1	2,99	-	2,19	1	1,09	-	0,33	2	6,61	2,00	6,61			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	11,25	21	3,88	4	1,06	5	1,60	4	0,30	8	0,90	21	3,86	21,00	3,86			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarnya pajak	36	221,41	9	66,32	3	18,14	2	22,09	2	7,70	2	17,78	9	65,71	9,00	65,71			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	136	86,95	34	22,96	6	8,54	9	6,36	3	2,14	16	5,85	34	22,89	34,00	22,89			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4	72,20	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan mebel	Jml paket mebel yang disediakan	3	13,65	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	5,32	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/rehabilitaso gedung kantor dan bangunan lainnya	Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1	8,94	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	2	14,00	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**100,00**	**2.807,11**	**100,00**	**414,34**	**100**	**81,77**	**100**	**97,67**	**100**	**90,28**	**100,00**	**138,85**	**100,00**	**408,56**	**100,00**	**408,56**	**100,00**	**14,55**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan org asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	520	875,00	130	129,33	33	30,58	33	26,50	33	27,43	31	43,38	130	127,89	130,00	127,89			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	48	528,56	12	109,97	3	23,24	3	26,07	3	31,34	3	28,24	12	108,90	12,00	108,90			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jml orang yang mengikuti kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan org asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1.440	875,00	150	175,04	37	27,94	37	45,10	37	31,50	39	67,22	150	171,77	150,00	171,77			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	**Persentase peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**80,00**	**1.399,36**	**80,00**	**915,31**	**80,00**	**100,05**	**78,13**	**85,61**	**80,00**	**665,27**	**80,00**	**59,49**	**80,00**	**910,41**	**80,00**	**910,41**	**100,00**	**65,06**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																				
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2.000	686,73	220	915,31	30	100,05	60	85,61	60	665,27	70	59,49	220	910,41	220,00	910,41			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jml org yg mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, BhinnekaTunggal Ika dan sejarahkebangsaan	400	429,29	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pembentukan danpenumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara	Jml kelg yg mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalamsemuaaspekke hidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara	200	283,33	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**71,33**	**163,44**	**54,26**	**117,43**	**2,88**	**25,66**	**21,28**	**27,46**	**37,93**	**34,54**	**54,48**	**28,14**	**54,48**	**115,80**	**54,48**	**115,80**	**76,38**	**70,85**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	1.440	40,06	2	117,43	-	25,66	-	27,46	2	34,54	-	28,14	2	115,80	2,00	115,80			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**80,00**	**3.727,13**	**80,00**	**18.797,15**	**-**	**29,46**	**80,00**	**884,99**	**80,00**	**20,90**	80,00	**17.858,83**	**80,00**	**18.794,18**	**80,00**	**18.794,18**	**100,00**	**504,25**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah org yg mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (200 org)	2.000	3.687,13	200	18.797	-	29,46	200	884,99	-	20,90	-	17.858,83	200	18.794,18	200,00	18.794,18			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sodial, dan Budaya	**Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**29,55**	**2.390,12**	**12,50**	**216,80**	**6,82**	**29,81**	**6,82**	**47,66**	**6,82**	**35,66**	**12,50**	**98,31**	**12,50**	**211,44**	**12,50**	**211,44**	**42,31**	**8,85**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan di daerah	600	1.624,35	385	216,80	30	29,81	60	47,66	90	35,66	205	98,31	385	211,44	385,00	211,44			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	765,77	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					-		**-**							-	-	-	-			
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**100**	**16.207,48**	**100,00**	**3.905,95**	**34,52**	**765,06**	**61,90**	**1.010,20**	**91,67**	**1.000,24**	**100,00**	**1.053,55**	**100,00**	**3.829,05**	**100,00**	**3.829,05**	**100,00**	**23,63**	**Satpol PP**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD, Satpam, Pramu kantor, Pengemudi) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	16,00	1.636,75	-	-	-	-	-	**-**	-	-		-	-	-	-	-			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	626	12	390,63	3	89,46	3	119,04	3	90,20	3	90,20	12	388,90	12,00	388,90			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	136	12	53,08	3	12,49	3	12,72	3	9,35	3	14,83	12	49,40	12,00	49,40			Satpol PP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	192	13.041,75	12	2.930,49	3	611,01		816,73	-	823,84	9	623,95	12	2.875,52	12,00	2.875,52			Satpol PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	193,49	12	55,89	3	13,43	3	10,36	3	18,02	3	13,95	12	55,76	12,00	55,76			Satpol PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	10,65	14	4,00	4	-	3	1,29	4	0,81	3	1,83	14	3,93	14,00	3,93			Satpol PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi*												-		-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	58	5	14,60	1	0,94	1	2,25	1	1,28	2	9,31	5	13,79	5,00	13,79			Satpol PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	55,24	4	28,31	1	2,22	1	3,38	1	6,55	-	7,79	3	19,93	3,00	19,93			Satpol PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasiperangkat daerah*														-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	24,80	2	7,00	1	0,54	1	3,30	-	1,75	-	1,20	2	6,79	2,00	6,79			Satpol PP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,70	21	4,00	9	-	4	1,11	4	-	4	2,80	21	3,91	21,00	3,91			Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*												-		-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	525	16	151,31	6	31,13	2	32,25	4	35,20	4	48,86	16	147,45	16,00	147,45			Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	128	703,63	41	15,75	2	2,13	30	0,40	6	-	3	13,02	41	15,54	41,00	15,54			Satpol PP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pengadaan pakaian, monev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai*												-		-					
		Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	96	57,60	-	-	-	-		0,00				-	-	-	-	-			Satpol PP
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	24,57	2	7,20	1	0,42	1	5,66	-	0,54	-	0,54	2	7,17	2,00	7,17			Satpol PP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	30,17	25	8,68	-	1,30	-	1,70	-	2,70	25	2,98	25	8,67	25,00	8,67			Satpol PP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	269,12	-	-	-	-		-	0	-		-	-	-	-	-			Satpol PP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlahpengadaan sarana dan prasarana perkantoran*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	145,00	3	210,00	-	-		-	2	9,99	1	198,97	3	208,96	3,00	208,96			Satpol PP
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20	85	1	25,00	-	-	1,00	-	-	-	-	23,33	1	23,33	1,00	23,33			
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Presentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum**	**100,00**	**6.293,67**	**96,81**	**1.983,29**	**95,74**	**464,14**	**96,35**	**486,04**	**96,72**	**499,12**	**95,01**	**500,56**	**95,01**	**1.949,87**	**95,01**	**1.949,87**	**95,01**	**30,98**	**Satpol PP**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	670	1.112,58	200,00	258,13	48	71,34	50	64,66	51	78,01	51	40,29	200	254,30	200,00	254,30			Satpol PP
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56	3.777,44	14	1.246,55	3	305,05	4	320,35	3	303,91	4	316,72	14	1.246,02	14,00	1.246,02			Satpol PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP*										-		-						
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	9,30	120	9,30	-	8,45	-	0,30	-	-	120	-	120	8,75	120,00	8,75			Satpol PP
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52	785,96	13	194,31	3	43,56	3	43,27	3	47,75	4	51,93	13	186,52	13,00	186,52			Satpol PP
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	48	659,96	12	274,99	3	35,75	3	57,46	3	69,45	3	91,62	12	254,28	12,00	254,28			Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase pembentukan kelompok jaga warga**	**100,00**	**1.551,72**	**26,77**	**670,75**	**2,68**	**-**	**2,68**	**55,67**	**16,06**	**133,82**	**26,77**	**462,21**	**26,77**	**651,71**	**26,77**	**651,71**	**26,77**	**42,00**	**Satpol PP**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah pembentukan jaga warga*																			
		Pembinaan Jagawarga	Pembentukan jaga warga	630	1.551,72	6250	670,75	1.250	-	625	55,67	3.125	133,82	1.250	462,21	6.250	651,71	6.250,00	651,71			Satpol PP
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					-															
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**10.383,46**	**100**	**2.040,15**	**34,52**	**338,96**	**61,90**	**425,02**	**91,67**	**405,46**	**100,00**	**733,50**	**100,00**	**1.902,94**	**100,00**	**1.902,94**	**100,00**	**18,33**	**BPBD**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5,00	29,74	1	5,84	-	2,13	-	0,88	-	2,44	1	0,32	1	5,78	1,00	5,78			BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	519,50	1	141,21	-	21,73	-	41,49	-	34,41	1	43,20	1	140,83	1,00	140,83			BPBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	4.731,94	12	1.136,11	3	230,51	3	301,23	-	282,59	6	195,70	12	1.010,03	12,00	1.010,03			BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	156,97	12	40,87	-	9,42	-	10,77	-	10,83	12	9,68	12	40,69	12,00	40,69			BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dabLaporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	105	13.85	14	3,62	3	0,11	3	0,14	4	1,62	4	1,61	14	3,48	14,00	3,48			BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*												-		-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	120,96	1	42,06	-	10,98	-	3,87	-	2,68	1	24,38	1	41,92	1,00	41,92			BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan tingkat daerah*												-		-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	54,57	2	7,00	-	1,89	-	1,49	2	1,28	-	2,15	2	6,81	2,00	6,81			BPBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.35	21	3,60	6	-	4	1,36	5	0,99	6	1,12	21	3,48	21,00	3,48			BPBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*												-		-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	3.874,17	24	399,55	-	-	1	6,57	-	0,36	23	391,00	24	397,93	24,00	397,93			BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sarana dan prasarana dalam kondisi baik*												-		-					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174	866,42	42	260,29	22	62,20	-	57,21	6	68,26	14	64,32	42	251,99	42,00	251,99			BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	**Presentase penanggulangan bencana**	**100,00**	**4.222,45**	**68,73**	**1.097,55**	**57,05**	**98,09**	**59,17**	**327,96**	**65,89**	**350,51**	**68,73**	**310,98**	**68,73**	**1.087,55**	**68,73**	**1.087,55**	**68,73**	**25,76**	**BPBD**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Prosentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan*																			
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	470	276,54	110	65,00	-	0,24	60	38,05	50	26,17	-	0,45	110	64,91	110,00	64,91			BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4	127,63	1	30,00	-	-	-	0,07	-	29,92	1	-	1	29,99	1,00	29,99			BPBD
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	76	63,82	14	15,00	-	-	14	14,97	-	-	-	-	14	14,97	14,00	14,97			BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	10	775,42	2	207,70	-	0,21	-	1,52	-	103,68	2	101,42	2	206,84	2,00	206,84			BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	170,18	200	40,00	-	4,35	-	0,68	-	18,27	200	16,52	200	39,82	200,00	39,82			BPBD
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1	103,00	1	103,00	-	1,13	-	101,61	-	-	1	-	1	102,73	1,00	102,73			BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Prosentase warga yang mendapat penyelamatan dan evakuasi*												-		-					
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	2.089,78	1	486,20	-	82,14	-	119,13	-	115,79	1	161,54	1	478,60	1,00	478,60			BPBD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	320	127,63	20	30,00	-	-	-	-	-	26,21	-	3,67	-	29,88	-	29,88			BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Prosentase regulasi pendukung penanganan bencana*												-		-					
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	93,17	1	27,74	1	5,92	-	3,77	-	3,88	-	13,85	1	27,41	1,00	27,41			BPBD
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana(R3P)	4	63,82	1	15,00	-	0,85	-	5,73	-	4,66	1	3,72	1,00	14,96	1,00	14,96			BPBD
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan	4	170,18	1	40,00	-	1,94	-	30,76	-	3,78	1	3,21	1,00	39,69	1,00	39,69			BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Prosentase warga yang tersosialisasi KIE*												-		-					
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1.200	161,29	300	37,91	-	1,33	100	11,67	150	18,14	50	6,59	300,00	37,73	300,00	37,73			BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Presentase pencegahan penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**60,42**	**1.810,55**	**38,54**	**2.817,38**	**31,25**	**65,52**	**35,42**	**2.293,23**	**38,54**	**219,44**	**38,54**	**232,71**	**38,54**	**2.810,90**	**38,54**	**2.810,90**	**63,79**	**155,25**	**BPBD**
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	4	21,27	1	5,00	-	0,35	-	1,01	-	2,52	1	1,01	1	4,89	1,00	4,89			BPBD
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	106,36	1	25,00	-	0,21	-	0,00		23,77	1	0,90	1	24,88	1,00	24,88			BPBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran*												-		-					
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800	127,63	200	30,00	-	0,21	100	14,90	100	13,55	-	1,18	200	29,85	200,00	29,85			BPBD
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20	63,82	5	15,00	-	0,21	-	0,00	5	14,53	-	0,22	5	14,96	5,00	14,96			BPBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran*												-		-					
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	1.448.93	1	672,35	-	61,63	-	217,57	-	164,22	1	227,71	1	671,12	1,00	671,12			BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	21,27	1	2.065,03	-	2,04	1	2.059,34	-	-	-	(1,17)	1	2.060,22	1,00	2.060,22			BPBD
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatankesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	4	21,27	1	5,00	-	0,87	-	0,40	-	0,85	1,00	2,86	1	4,99	1,00	4,99			BPBD
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		-	-		-		**-**													
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**13.472,04**	**100,00**	**3.215,26**	**34,52**	**624,19**	**61,90**	**944,08**	**91,67**	**838,12**	**100,00**	**706,32**	**100,00**	**3.112,71**	**100,00**	**3.112,71**	**100,00**	**23,10**	**DinsosPPPA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.473,28	12	359,12	3	66,06	3	121,50	3	85,21	3	84,41	12	357,18	12,00	357,18			DinsosPPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN*												-							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.877,17	12	2.458	3	501,20		699,40	-	690,37	9	490,59	12	2.381,56	12,00	2.381,56			DinsosPPPA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	209,62	14	49,23	3	12,21	4	12,78	3	11,04	4	12,96	14	48,99	14,00	48,99			DinsosPPPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	49,67	14	9,80	3	1,93	4	2,25	3	2,80	4	2,40	14	9,38	14,00	9,38			DinsosPPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*												-		-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	288,90	12	30,80	3	4,14	3	11,80	3	3,20	3	5,43	12	24,56	12,00	24,56			DinsosPPPA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*												-		-					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	60,38	2	9,71	1	1,63	-	2,23	1	3,06	-	2,29	2	9,21	2,00	9,21			DinsosPPPA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Tahunan, Monitoring Evaluasi Kinerja Dinas, LKPJ,LPPD LKjIP, Laporan SPM Triwulanan	84	74,19	11	8,69	5	3,09	2	1,57	2	1,59	2	1,58	11	7,83	11,00	7,83			DinsosPPPA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29	768,03	29	182,67	7	33,93	7	47,31	-	40,85		51,61	14	173,69	14,00	173,69			DinsosPPPA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	670,80	7	107,6	-	-	7	45,25	-	-	-	55,06	7	100,31	7,00	100,31			DinsosPPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	**Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial**	**100,00**	**58.366,50**	**100,00**	**1.527,28**	**100,00**	**27,75**	**75,75**	**442,70**	**100,00**	**354,17**	**100,00**	**557,19**	**100,00**	**1.381,82**	**100,00**	**1.381,82**	**100,00**	**2,37**	**DinsosPPPA**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*																			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462	2.109,82	462	467,34	-	-	-	-	462	307,04	-	26,76	462	333,80	462,00	333,80			DinsosPPPA
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	212,17	250	26,80	45	0,69	75	5,43	65	8,04	65	12,15	250	26,30	250,00	26,30			DinsosPPPA
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250	311,66	250	868,61	45	9,57	75	420,34	65	3,14	65	434,44	250	867,49	250,00	867,49			DinsosPPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24	112,21	24	12,34	-	-	24	-	-	11,27	-	-	24	11,27	24,00	11,27			DinsosPPPA
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.400	54.139,50	-	-	-	-			9	-	3	-	12	-	12,00	-			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	98,72	24	15,86	6	3,22	6	2,99	6	2,86	6	6,68	24	15,75	24,00	15,75			DinsosPPPA
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	200,53	30	25,70	-	-	-	-	-	-	30	23,81	30	23,81	30,00	23,81			DinsosPPPA
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	438,30	120	94,30	30	14,28	30	13,94	30	21,83	30	37,03	120	87,08	120,00	87,08			DinsosPPPA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial*																			
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	93,01	5	16,34	1	-	3	-	1	-	-	16,31	5	16,31	5,00	16,31			DinsosPPPA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase Perlindungan Sosial**	**27,78**	**5.103,83**	**32,80**	**15.424,11**	**33,28**	**3.171,41**	**33,80**	**3.352,53**	**31.89**	**3.450,24**	**31,13**	**3.411,82**	**31,13**	**13.386,01**	**31,13**	**13.386,01**	**112,06**	**262,27**	**DinsosPPPA**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Sosial*																			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (RT)	18.400	2.842,00	18.400	204,15	-	26,75	-	16,15	-	15,75	18.400	140,73	18.400	199,38	18.400,00	199,38			DinsosPPPA

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	40.000	2.261,83	40.000	159,81	-	12,15	-	40,32	-	30,71	40.000	72,02	40.000	155,21	40.000,00	155,21			DinsosPPPA
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan (KPM) Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	12	15.060,14	3	3.132,50	3	3.296,06	**3,00**	**3.403,78**	3	3.199,08	12	13.031,42	12,00	13.031,42			DinsosPPPA
		Program Penanganan Bencana	**Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial**	**100,00**	**184,93**	**100,00**	**136,40**	**100,00**	**38,24**	**100,00**	**27,66**	**100,00**	**25,02**	**100,00**	**44,02**	**100,00**	**134,94**	**100,00**	**134,94**	**100,00**	**72,97**	**DinsosPPPA**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial*																			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (KK) (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	760	127,45	160	30,04	40	12,88	45	0,04	30	-	45	17,11	160	30,04	160,00	30,04			DinsosPPPA
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia*												-		-					
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	57,48	12	13,74	-	-	12	8,02	-	1,59	-	3,60	12	13,21	12,00	13,21			DinsosPPPA
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksa	Jumlah Orang yang Melaksanaka	100	296,39	140	92,62	-	25,36	140	19,60	-	23,43	-	23,31	140	91,69	140,00	91,69			DinsosPPPA
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**58,26**	**49,74**	**58,26**	**49,74**	**9,66**	**3,76**	**42,71**	**20,19**	**48,66**	**10,76**		**14,46**	**-**	**49,16**	**-**	**49,16**	**0,00**	**98,83**	**DinsosPPPA**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*																			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	5,27	1	5,27	-	-	-	0,85	1	4,33	-	-	1	5,18	1,00	5,18			DinsosPPPA
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6	44,47	6	44,47	-	3,76	3	19,34		6,43	3	14,46	6	43,97	6,00	43,97			DinsosPPPA
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	**Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutama an gender**	**73,14**	**167,37**	**58,26**	**162,14**	**9,66**	**3,47**	**37,88**	**107,42**	**48,66**	**16,64**	**58,37**	**32,67**	**58,37**	**160,19**	**58,37**	**160,19**	**79,81**	**95,71**	**DinsosPPPA**
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*																			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	51,58	90	21,65	-	-	-	0,00	-	0,36	90	21,22	90	21,58	90,00	21,58			DinsosPPPA
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	115,78	4	140,49	-	3,47	2	107,42	1	16,27	1	11,45	4	138,60	4,00	138,60			DinsosPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**56,90**	**830,07**	**15,52**	**176,48**	**5,75**	**31,23**	**5,75**	**9,38**	**14,94**	**128,78**	**15,52**	**3,33**	**15,52**	**172,72**	**15,52**	**172,72**	**27,28**	**20,81**	**DinsosPPPA**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemenuhan Hak Anak*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9	830,07	9	176,48	2	31,23	2	9,38	3	128,78	2	3,33	9	172,72	9,00	172,72			DinsosPPPA
		Program Perlindungan Perempuan	**Presentase perlindungan perempuan**	**99,99**	**551,44**	**99,99**	**485,77**	**100,00**	**48,07**	**97,99**	**63,78**	**99,99**	**90,38**	**99,99**	**84,66**	**99,99**	**286,89**	**99,99**	**286,89**	**100,00**	**52,03**	**DinsosPPPA**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perlindungan Perempuan*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	551,45	3	124,33	1	10,41	1	4,99	1	13,51	-	8,87	3	37,78	3,00	37,78			DinsosPPPA
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	367,61	2	361,45	2	37,66	-	58,79	-	76,87	-	75,80	2	249,11	2,00	249,11			DinsosPPPA
		Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial**	**69,44**	**340,36**	**51,95**	**110,58**	**26,24**	**10,30**	**39,49**	**45,16**	**42,99**	**8,16**	**54,79**	**45,53**	**54,79**	**109,15**	**54,79**	**109,15**	**78,90**	**32,07**	**DinsosPPPA**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*																			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	45	43,00	45	12,99	10	0,89	20	4,37	15	1,12	-	6,36	45	12,74	45,00	12,74			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12	57,86	12	12,40	4	0,89	4	7,43	4	1,79	-	67,33	12	77,44	12,00	77,44			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas PSKS Ki	8	203,69	8	78,54	2	6,76	2	28,62	2	5,14	2	(28,16)	8	12,36	8,00	12,36			DinsosPPPA
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	35,80	1	6,64	-	1,75	1	4,75	-	0,12	-	-	1	6,62	1,00	6,62			DinsosPPPA
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100,00**	**85,26**	**100,00**	**41,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**16,72**	**100,00**	**23,92**	**100,00**	**40,65**	**100,00**	**40,65**	**100,00**	**47,68**	**DinsosPPPA**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*																			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	1	85,27	1	41,34	-	-	-	-	1	16,72	-	23,92	1	40,65	1,00	40,65			DinsosPPPA
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100**	**17.213,46**	**100**	**4.520,19**	**34,52**	**797,81**	**61,90**	**1.050,16**	**91,67**	**1.035,33**	**100,00**	**1.135,38**	**100,00**	**4.018,68**	**100,00**	**4.018,68**	**100,00**	**23,35**	**Disnakertrans**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	696,58	12	163,22	3	37,86	3	38,00	3	35,53		46,95	9	158,35	9,00	158,35			Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	648,72	12	151,21	3	35,20	3	45,53	3	35,23	3	35,23	12	151,19	12,00	151,19			Disnakertrans
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian administrasi keuangan*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	14.009,04	12	3.573	3	662,78	3	853,90	-	887,64	6	681,01	12	3.085,32	12,00	3.085,32			Disnakertrans
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dolumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	236,97	12	55,70	3	14,15	3	13,35	3	14,35	3	13,85	12	55,70	12,00	55,70			Disnakertrans
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	34,04	14	8,00	4	3,07	3	1,65	4	1,75	3	1,49	14	7,96	14,00	7,96			Disnakertrans

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah*												-		-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	110,62	6	26,00	1	3,91	2	8,59	2	6,23	1	7,25	6	25,97	6,00	25,97			Disnakertrans
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	340,31	12	76,08	3	3,68	3	13,03	3	6,92	3	52,43	12	76,06	12,00	76,06			Disnakertrans
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	34,04	2	8,00	-	2,12	-	2,00	2	2,77	-	1,04	2	7,93	2,00	7,93			Disnakertrans
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	29,78	21	7,00	6	3,59	4	1,54	5	0,58	6	1,29	21	7,00	21,00	7,00			Disnakertrans
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantorbatau Bangunan Lainnya yang Disediakan*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	165,71	8	55,85	-	-	3	25,86	-	-	5	25,12	8	50,98	8,00	50,98			Disnakertrans
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	559,63	20	147,06	6	28,54	6	36,06	6	35,67	2	43,51	20	143,78	20,00	143,78			Disnakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	112,00	1	214,35	-	-	-	-	-	-	1	213,72	1	213,72	1,00	213,72			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104	131,25	26	27,83	6	2,90	7	9,38	7	8,68	6	6,86	26	27,81	26,00	27,81			Disnakertrans
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evalausi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	28,78	1	7,00	-	-	-	1,27	-	-	1	5,64	1	6,91	1,00	6,91			Disnakertrans
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	75,00	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	**Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**	**50,79**	**542,60**	**47,30**	**132,16**	**40,16**	**28,08**	**38,64**	**26,92**	**38,64**	**34,65**	**34,55**	**42,14**	**34,55**	**131,79**	**34,55**	**131,79**	**68,03**	**24,29**	**Disnakertrans**
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang dicegah*																			
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	179,83	2	32,38	-	9,20	1	9,44	-	3,03	1	10,62	2	32,29	2,00	32,29			Disnakertrans
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19,00	31,46	18	10,01	2	2,31	4	1,62	8	4,40	4	1,58	18	9,92	18,00	9,92			Disnakertrans
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*																			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, danLKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6	331,20	6	89,76	2	16,57	2	15,86	2	27,21	-	29,94	6	89,58	6,00	89,58			Disnakertrans
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**presentase peserta pelatihan bersertifikasi**	**83,59**	**4.989,01**	**81,25**	**1.013,74**	**-**	**226,28**	**71,88**	**243,85**	**62,23**	**225,02**	**94,10**	**269,49**	**94,10**	**964,65**	**94,10**	**964,65**	**112,57**	**19,34**	**Disnakertrans**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*prosentase peserta pelatihan yang kompeten*																			
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	192	3.879,17	128	650,65	32	180,91	48	199,15	16	70,46	32	177,12	128	627,64	128,00	627,64			
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12	175,38	8	37,52	-	-	8	34,27	-	-	-	-	8	34,27	8,00	34,27			Disnakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*												-		-					
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	8	635,23	2	149,25	-	9,85	-	9,93	2	115,38	-	13,92	2	149,07	2,00	149,07			Disnakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*																			
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah	4	299,23	1	176,32	-	35,52	-	0,51	-	39,19	1	78,45	1	153,67	1,00	153,67			Disnakertrans
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	**Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun**	**1**	**213,17**	**1,00**	**133,98**	**-**	**3,20**	-	**38,48**	-	**51,94**	**1,00**	**36,40**	**1,00**	**130,02**	**1,00**	**130,02**	**100,00**	**60,99**	**Disnakertrans**
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun*												-							
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	213,17	1	95,65	-	1,06	-	14,18	-	51,60	1	27,43	1	94,27	1,00	94,27			Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	18	-	3	38,33	-	2,14	-	24,30	-	0,34	3	8,97	3	35,75	3,00	35,75			Disnakertrans
		Program Penempatan Tenaga Kerja	**Presentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**64,86**	**31.143,87**	**62,86**	**12.922,97**	**92,87**	**43,75**	**61,28**	**251,42**	**67,20**	**9.113,58**	**81,02**	**3.479,97**	**81,02**	**12.888,72**	**81,02**	**12.888,72**	**124,92**	**41,38**	**Disnakertrans**
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*																			
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	72	578,80	630	126,950	-	13,80	330	18,13	164	46,11	137	48,85	631	126,89	631,00	126,89			Disnakertrans
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520	30.266,20	1.820	12.707,01	-	22,42		224,17	1.360	9.019,54	853	3.408,77	2.213	12.674,89	2.213,00	12.674,89			Disnakertrans
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*												-		-					
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880	542,60	3.500	89,01	614	7,53	1.080	9,12	806	47,93	1.914	22,35	4.414	86,94	4.414,00	86,94			Disnakertrans
		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Presentase transmigrasi yang ditempatkan**	**100**	**942,69**	**100,00**	**183,40**	-	**31,33**	-	**21,83**	-	**11,67**	**100,00**	**118,24**	**100,00**	**183,07**	**100,00**	**183,07**	**100,00**	**19,42**	**Disnakertrans**
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase transmigran yang ditempatkan*																			
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	736,55	2	143,80	-	8,88	-	10,54	-	7,05	2	117,09	2	143,57	2,00	143,57			Disnakertrans
		Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapat Penyuluhan	100	206,14	100	39,60	50	22,45	50	11,29	-	4,62	-	1,14	100	39,50	100,00	39,50			Disnakertrans
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya**	**-**	**5.696,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			**-**	-	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00**	**Disnakertrans**
		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**-**																			
		Pengadaan Sarana Prasarana Budaya	Jumlah Sarana Prasarana Budaya	3	2.719,17	-	-	-	-	-	-	-	**-**			-	-	-	-			Disnakertrans
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**-**																			
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	12	2.977,10	-	-	-	-	-	-	-	**-**			-	-	-	-			Disnakertrans
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																				
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase perencanaan penataan ruang**	**90,74**	**3.757,46**	**57,01**	**1.469,95**	**13,89**	**75,85**	**13,89**	**271,27**	**47.22**	**288,53**	**57,01**	**735,25**	**57,01**	**1.370,90**	**57,01**	**1.370,90**	**62,83**	**36,48**	**Dispertaru**
			Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	**97,18**	-	**78,39**	-	**25,00**	-	**25,00**	-	**53,39**		**78,39**		**78,39**		**78,39**		**80,66**		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang*																			
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	72	214,40	1	351,72	-	29,08	1	90,23	1	114,60	-	114,93	2	348,85	2,00	348,85			Dispertaru
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	-	-	1	-	-	-						-	-	-	-	-			
			Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	-	1	-	-	-						-	-	-	-	-			
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	1.174,87		137,66	-	6,54		12,18	-	30,45	1	86,76	1	135,93	1,00	135,93			Dispertaru
			Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen)	-	0,00	1	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Perentase ketersediaan dokumen RTBL	100	230,40		54,16	-	-		7,66	-	17,58		27,88	-	53,12	-	53,12			Dispertaru
			Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket)	-		1	-	-	-	-	-			1	-	1	-	1,00	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang*												-		-					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	1.352	789,20	322	319,27	72	11,81	58	96,32	58	40,67	139	120,09	327	268,89	327,00	268,89			Dispertaru
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	97,18	1.705,20	3	332,10	-	16,40	-	41,28	-	47,50	3	211,93	3	317,10	3,00	317,10			Dispertaru
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang*												-		-					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.490	515,70	365	122,47	75	10,25	26	20,25	26	20,07	330	53,35	457	103,91	457,00	103,91			Dispertaru
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	425,50	1	100,00	-	-	-	0,00	-	-	1	98,43	1	98,43	1,00	98,43			Dispertaru
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	100	223,80	-	52,57	-	1,77		3,35	-	17,67		21,89	-	44,68	-	44,68			Dispertaru
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			5	-	-	-	-	-			5		5	-	5,00	-			
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**17.450,48**	**100**	**3.453,36**	**34,52**	**545,19**	**61,90**	**696,12**	**91,67**	**837,67**	**100,00**	**1.182,22**	**100,00**	**3.261,19**	**100,00**	**3.261,19**	**100,00**	**18,69**	**Dispertaru**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	165,10	1	38,77	-	11,57	-	14,13	1	6,77	-	5,77	1	38,24	1,00	38,24			Dispertaru
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	408,40	12	121,55	3	18,30	3	29,84	3	21,04	3	49,85	12	119,02	12,00	119,02			Dispertaru
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	13.165,26	12	2.108,12	3	405,42	3	557,25	-	555,06	6	424,12	12	1.941,85	12,00	1.941,85			Dispertaru
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	245,50	12	91,64	3	25,39	3	20,40	3	23,94	3	21,90	12	91,63	12,00	91,63			Dispertaru
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	56	27,70	14	20,00	3	6,65	3	-	4	9,60	4	3,74	14	19,98	14,00	19,98			Dispertaru
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*												-		-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	297,80	1	89,53	-	10,88	-	5,47	-	31,29	1	38,90	1	86,54	1,00	86,54			Dispertaru
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*												-		-					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	24,80	2	13,79	-	4,84	-	5,93	2	2,62	-	-	2	13,39	2,00	13,39			Dispertaru
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	26,20	21	10,42	6	4,19	4	1,87	5	2,16	6	2,14	21	10,37	21,00	10,37			Dispertaru
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*												-		-					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	1.548,20	2	429,85	-	-	2	-	-	18,10	-	409,52	2	427,62	2,00	427,62			Dispertaru
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	449,70	5	123,04	-	-	4	-	-	45,86	-	72,75	4	118,61	4,00	118,61			Dispertaru
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	4	411,00	1	105,00	-	-	1	-	-	7,93	-	96,80	1	104,73	1,00	104,73			Dispertaru
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prsasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	112	425,50	28	241,65	6	57,96	5	61,23	-	53,29	-	56,73	11	229,21	11,00	229,21			Dispertaru
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*												-		-					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24	255,30	6	60,00	-	-	6	-	-	60,00	-	-	6	60,00	6,00	60,00			Dispertaru
		Program Penatagunaan Tanah	**Presentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN**	**16,97**	**924,02**	**15,14**	**1.060,82**	**14,21**	**36,80**	**14,21**	**12,92**	**22,66**	**71,43**	**35,54**	**366,23**	**35,54**	**487,37**	**35,54**	**487,37**	**209,43**	**52,74**	**Dispertaru**
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	*16,97*	2.584,20	-	773,69	-	0,14		3,86	-	11,76		318,56	-	334,31	-	334,31			Dispertaru
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1	-	-	-	-	-			1	-	1	-	1,00	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/Kota	4	1.221,50	1	287,13	-	36,66	-	9,06	-	59,67	-	47,67	-	153,06	-	153,06			Dispertaru
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda**	**100,00**	**745,80**	**100,00**	**516,93**	**-**	**12,47**	**-**	**19,11**	**100,00**	**18,37**	**100,00**	**333,55**	**100,00**	**383,50**	**100,00**	**383,50**	**100,00**	**51,42**	**Dispertaru**
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda*																			
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	*745,80*	-	516,93	-	12,47		19,11	-	18,37		333,55	-	383,50	-	383,50			Dispertaru
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	7	-	-	-	-	-			7		7	-	7,00	-			
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	**Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan**	**100**	**40.917,03**	**100,00**	**1.780,39**	**-**	**12,97**	**40,95**	**517,03**	**96,98**	**558,64**	**100,00**	**572,01**	**100,00**	**1.660,65**	**100,00**	**1.660,65**	**100,00**	**4,06**	**Dispertaru**
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100	*40.917,03*	100	1.780,39	-	12,97	-	517,03	-	558,64	100	572,01	100	1.660,65	100,00	1.660,65			Dispertaru
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	**Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan**	**100**	**230,20**	**100,00**	**84,00**	**-**	**6,59**	**-**	**13,78**	**0,00**	**14,63**	**100,00**	**30,67**	**100,00**	65,67	**100,00**	**65,67**	**100,00**	**28,53**	**Dispertaru**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan*																			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	*230,20*	-	84,00	-	6,59	-	13,78	-	14,63		30,67	-	65,67	-	65,67			Dispertaru

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10	-	-	-	-	-			10		10	-	10,00	-			
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya**	**74,43**	**9.800,00**	**67,33**	**2.089,84**	**17,33**	**59,61**	**57,95**	**226,20**	**42,19**	**465,65**	**66,48**	**883,90**	**66,48**	**1.635,35**	**66,48**	**1.635,35**	**89,32**	**16,69**	**Dispertaru**
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN*																			
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	48,86	8.062,40	-	1.670,59	-	54,21		141,62	-	422,32		612,58	-	1.230,73	-	1.230,73			Dispertaru
			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten di BPN	-		100		-		-		-	-	100		100	-	100,00	-			
			Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa	-		950		-		-		-	-	100		100	-	100,00	-			
			Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN	-		122		-		-		-	-	122		122	-	122,00	-			
			Pendaftaran ukur tanah desa	-		50		-		-		-	-	50		50	-	50,00	-			
			Identifikasi dan verifikasi tanah kasultanan/ kadipaten/ tanah desa	-		3		-				-	-	3		3	-	3,00	-			
			Pendafataran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN	-		1.000		-				-	-	1.000		1.000	-	1.000,00	-			
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	461,20	1	91,63	-	-	-	11,39	-	7,56	1	72,30	1	91,25	1,00	91,25			Dispertaru
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa*												-		-					
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	100	400,00	-	100,00	-	-			-			86,85	-	86,85	-	86,85			Dispertaru
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	-	1	-	-	-	-	19,54	-	10,50	-	(30,04)	-	-	-	-			
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	12	757,60	3	227,63	-	5,40	-	53,65	-	25,27	3	142,20	3	226,52	3,00	226,52			Dispertaru
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	-	1	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-			
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	12	121,00	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-		Dispertaru
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati**	**100,00**	**2.000,00**	**25,00**	**726,53**	-	**3,19**	-	**138,92**	-	**392,10**	**25,00**	**191,52**	**25,00**	**725,72**	**25,00**	**725,72**	**25,00**	**36,29**	**Dispertaru**
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati*																			
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.553,00	-	569,06	-	1,32	-	109,04	-	272,61		185,42	-	568,39	-	568,39			Dispertaru
			Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Utara	-	-	1	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-	1,00	-			
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	741,00	-	157,47	-	1,87		29,87	-	119,50		6,09	-	157,33	-	157,33			Dispertaru
			Peraturan Bupati RTBL Hargorejo	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1		1	-	1,00	-			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	27	5.795,46	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dispertaru
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					-		-							-	-	-	-			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**7.982,31**	**100**	**2.789,87**	**34,52**	**567,36**	**61,90**	**622,24**	**91,67**	**865,54**	**100,00**	**528,94**	**100,00**	**2.584,08**	**100,00**	**2.584,08**	**100,00**	**32,37**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	48	53,00	12	52,92	3	12,94	3	14,04	3	11,51	3	10,88	12	49,37	12,00	49,37			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	48	138,00	1	132,25	-	21,18	-	42,58	-	36,40	1	29,86	1	130,02	1,00	130,02			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96	6.044,00	12	1.646,80	3	345,36	3	450,29	-	429,27	6	315,78	12	1.540,70	12,00	1.540,70			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adinistrasi pelaksanaan tugas ASN	4	54,00	12	41,48	3	10,05	3	10,30	3	9,95	3	10,73	12	41,03	12,00	41,03			Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	22,00	19	4,40	4	1,08	4	0,59	5	0,88	6	1,81	19	4,37	19,00	4,37			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi umum*												-		-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (4 paket)	4	28,00	4	19,38	2	8,51	1	3,62	1	4,18	-	1,91	4	18,22	4,00	18,22			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 laporan)	48	52,00	12	48,78	3	17,22	3	12,47	3	7,63	3	9,52	12	46,84	12,00	46,84			Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*												-		-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	130,00	2	35,28	-	8,77	-	10,22	1	9,00	1	7,17	2	35,16	2,00	35,16			Dinas Lingkungan Hidup
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP	84	22,00	21	11,64	8	3,18	4	2,70	5	2,70	4	3,04	21	11,62	21,00	11,62			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan orasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (7 unit)	12	61,00	16	134,00	7	45,56	-	1,10	-	-	9	83,53	16	130,19	16,00	130,19			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah*												-		-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit)	52	97,00	12	82,18	1	15,81	1	24,44	10	28,26	-	12,94	12	81,45	12,00	81,45			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit	4	426,00	2	555,58	-	63,83	-	44,87	1	322,06	1	39,68	2	470,43	2,00	470,43			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (50 unit)	275	823,00	50	25,19	20	13,87	21	5,02	5	3,71	4	2,10	50	24,70	50,00	24,70			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	6	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	8,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup**	**99,30**	**571,91**	**93,75**	**212,37**	**90,85**	**42,99**	**91,20**	**55,57**	**91,55**	**51,13**	**90,94**	**60,54**	**90,94**	**210,24**	**90,94**	**210,24**	**91,58**	**36,76**	**Dinas Lingkungan Hidup**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*																			
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10	88,09	10	143,8	-	27,05	-	41,40	-	28,20	10	46,77	10	143,42	10,00	143,42			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	1.500	217,12	375	68,61	50	15,95	75	14,17	150	22,93	100	13,77	375	66,82	375,00	66,82			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup**	**100,00**	**1.461,95**	**42,86**	**499,30**	**-**	**4,04**	**-**	**13,81**	**33,33**	**128,58**	**50,00**	**332,22**	**50,00**	**478,66**	**50,00**	**478,66**	**50,00**	**32,74**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun*																			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun	10	1.461,95	4	499,30	-	4,04	-	13,81	2	128,58	2	332,22	4	478,66	4,00	478,66			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup**	**100,00**	**1.799,16**	**100,00**	**2.315,29**	**100**	**158,99**	**100,00**	**108,48**	**100,00**	**1.382,89**	**100,00**	**476,42**	**100,00**	**2.126,78**	**100,00**	**2.126,78**	**100,00**	**118,21**	**Dinas Lingkungan Hidup**
			presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	**66,67**		**56,02**		**8,18**		**23,82**		**32,25**		**35,29**		**35,29**		**35,29**		**52,93**		
			Prosentase peningkatan pelayanan laboatorium lingkungan	**44,68**		**38,30**		**17,02**		**17,02**		**19,15**		**27,66**		**27,66**		**27,66**		**61,91**		
			presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	**100,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut*																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	421	1.015,80	7	1.936	-	127,11	4	85,46	-	1.363,53	3	193,86	7	1.769,96	7,00	1.769,96			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	18	108,00	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, penguijan parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	56,00	519,00	2	379,77	-	31,87	1	23,02	-	19,36	1	282,56	2	356,82	2,00	356,82			Dinas Lingkungan Hidup
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan*																			
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran da/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	6,00	20,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1,00	31,12		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan**	**52,13**	**131,47**	**100,00**	**42,46**	**17,10**	**7,83**	**11,98**	**5,16**	**40,00**	**19,44**	**52,68**	**9,85**	**52,68**	**42,28**	**52,68**	**42,28**	**101,06**	**32,16**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dan usaha/kegiatan yang diawasi, izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*																			
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	30	131,47	60	42,46	11	7,83	16	5,16	23	19,44	10	9,85	60	42,28	60,00	42,28			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100**	**69,08**	**100,00**	**19,85**	**100,00**	**5,14**	**80,00**	**3,77**	**100,00**	**5,49**	**100,00**	**5,38**	**100,00**	**19,79**	**100,00**	**19,79**	**100,00**	**28,65**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani*																			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24	69,08	15	19,85	3	5,14	3	3,77	12	5,49	-	5,38	18	19,79					Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	**Presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan**	**31,05**	**1.438,71**	**27,00**	**1.110,34**	**-**	**5,93**	**-**	**177,63**	**28,60**	**489,87**	**31,04**	**410,97**	**31,04**	**1.084,40**	**31,04**	**1.084,40**	**99,97**	**75,37**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pengelolaan sampah	*Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*																			
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	5,00	529,00	2	141,40	-	1,26	-	-	1	53,76	1	85,48	2	140,50	2,00	140,50			Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota 9 ton	76,00	651,71	9	822,59	-	3,51	-	32,51	-	436,11	9	325,49	9	797,62	9,00	797,62			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	15	146,35	-	1,16	5	145,12	10	-	-	0,00	15	146,28	15,00	146,28			Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyaraat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	96,00	82,00		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup**	**1,40**	**1.322,69**	**1,40**	**516,19**	**-**	**1,19**	**-**	**32,23**	**-**	**10,23**	**2,80**	**470,36**	**2,80**	**514,00**	**2,80**	**514,00**	**200,00**	**38,86**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola*																			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	700	379,34	1.675	516,19	-	1,19	-	32,23	-	10,23	1.675	470,36	1.675	514,00	1.675,00	514,00			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat**	**100,00**	**9.800,00**	**100,00**	**1.016,81**	**-**	**115,93**	**100,00**	**420,56**	**100,00**	**327,93**	**100,00**	**150,79**	**100,00**	**1.015,21**	**100,00**	**1.015,21**	**100,00**	**10,36**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Grebeg sampah*																			
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat	12	*561,56*	5	1.016,81	-	115,93	-	420,56	-	327,93	5	150,79	5	1.015,21	5,00	1.015,21			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**100,00**	**68,29**		**253,59**	**-**	**-**		**0,78**		**7,13**		**241,06**	**-**	**248,98**	**-**	**248,98**	**0,00**	**364,59**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Kegiatan penyusunan KLHS*																			
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	-	-	1	253,59	-	-	-	0,78	-	7,13	1	241,06	1	248,98	1,00	248,98			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	*Kegiatan konservasi*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemanfaatan Ruang Satan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan kulon Progo	1	68,29	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**16.686,51**	**100,00**	**4.178,69**	**34,52**	**760,00**	**61,90**	**1.058,42**	**91,67**	**904,90**	**100,00**	**1.029,80**	**100,00**	**3.753,12**	**100,00**	**3.753,12**	**100,00**	**22,49**	**Dinas Dukcapil**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	-	36	103,88	9	25,11	9	25,16	9	23,78	9	27,09	36	101,14	36,00	101,14			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	1.442,85	13	258,92	3	64,46	4	74,12	3	54,61	3	62,25	13	255,44	13,00	255,44			Dinas Dukcapil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*												-		-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48	13.193,60	12	3.109,85	3	583,15	3	792,96	3	774,06	3	578,05	12	2.728,21	12,00	2.728,21			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	298,80	12	54,00	3	12,68	3	11,23	-	10,73	6	18,54	12	53,17	12,00	53,17			Dinas Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (14 Laporan)	56	48,00	14	8,00	4	2,07	3	1,55	4	1,52	3	2,25	14	7,38	14,00	7,38			Dinas Dukcapil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*												-		-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	144,98	12	33,62	1	14,25		1,67	2	1,61	9	15,90	12	33,43	12,00	33,43			Dinas Dukcapil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan Penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	88,00	2	9,00	-	5,40	-	0,87	2	2,19	-	-	2	8,46	2,00	8,46			Dinas Dukcapil
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja SKPD,evaluasi Bulanan,Triwulan,Seemesteran,LKJIP,Laporan Tahunan dan Laporan SPIP	84	44,00	21	7,00	8	1,69	4	2,73	5	1,15	4	0,87	21	6,44	21,00	6,44			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah*												-		-					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	72,00	8	180,00	4	0,57	4	105,10	-	10,03	-	38,82	8	154,52	8,00	154,52			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja	16	527,76	11	111,73	-	38,51	6	35,14	-	1,34	5	29,63	11	104,62	11,00	104,62			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)	1	248,00		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*												-		-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Roda Dua)	12	45,00	9	65,90	-	9,65	3	5,18	6	16,34	-	34,02	9	65,19	9,00	65,19			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17	168,00	17	194,00	1	0,53	6	0,28	6	-	4	191,52	17	192,34	17,00	192,34			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara	340	7.033,92	5	38,28	1	1,92	-	2,44	3	3,06	1	30,86	5	38,28	5,00	38,28			Dinas Dukcapil
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit)	17	208,00			1		-												

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196	190,00	5	4,50	-	-	5	-	-	4,50	-	0,00	5	4,50	5,00	4,50			Dinas Dukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	**Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk**	**100,00**	**2.547,87**	**100,00**	**782,34**	**98,67**	**65,75**	**98,89**	**431,72**	**98,90**	**43,81**	**99,66**	**138,70**	**99,66**	**679,97**	**99,66**	**679,97**	**99,66**	**26,69**	**Dinas Dukcapil**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*																			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	**0,00**	3.663,61	48.000	717,04	18.769	48,34	16.479	419,98	17.940	15,89	19.346	131,62	72.534	615,82	72.534,00	615,82			Dinas Dukcapil
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4.860	251,00	2.303	41,30	2.135	12,92	2.086	11,07	2.090	9,23	1.895	7,07	8.206	40,29	8.206,00	40,29			Dinas Dukcapil
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Laporan Hasil Pendataan)	4	118,87	1	24,00	-	4,49	-	0,67	-	18,69	1	-	1	23,86	1,00	23,86			Dinas Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	**Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil**	**97,21**	**972,44**	**97,17**	**234,78**	**99,99**	**66,47**	**99,58**	**67,23**	**99,55**	**49,97**	**99,58**	**41,53**	**99,58**	**225,20**	**99,58**	**225,20**	**102,44**	**23,16**	**Dinas Dukcapil**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*																			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000	460,00	5.000	72,65	1.513	21,75	1.593	11,14	1.669	20,61	1.501	16,66	6.276	70,15	6.276,00	70,15			Dinas Dukcapil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	24.000	430,00	6.000	58,82	1.348	21,26	1.268	9,88	1.452	13,18	1.620	8,95	5.688	53,27	5.688,00	53,27			Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*												-		-					
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftran	600	832,00	145	103,31	36	23,46	40	46,20	46	16,18	39	15,93	161	101,78	161,00	101,78			Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Presentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100,00**	**2.632,77**	**100,00**	**98,50**	**27,78**	**6,92**	**44,44**	**39,00**	**63,24**	**27,40**	**100,00**	**24,09**	**100,00**	**97,41**	**100,00**	**97,41**	**100,00**	**3,70**	**Dinas Dukcapil**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*												-							
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cetak buku Agregat Kependudukan	12	336,00	182	40,00	-	3,85	180	18,16	1	8,85	1	8,85	182	39,70	182,00	39,70			Dinas Dukcapil
			Jilid Dokumen Kependudukan	350																		
			Entri Data Kependudukan	22.200																		
			Scan register akta kelahiran	24.000																		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*																			
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik	12	370,00	4	23,50	-	1,03	-	3,12	2	7,85	2	11,41	4	23,41	4,00	23,41			Dinas Dukcapil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	20		-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	4		-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-			
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	3	27,00	3	15,00	-	0,97	1	4,52	279	6,59	1	2,85	281	14,92	281,00	14,92			Dinas Dukcapil
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1		-	-	-	-			-			-	-	-	-	-			
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*												-		-					
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	195,00	2	20,00	-	1,08	2	13,21	-	4,11	-	0,98	2	19,38	2,00	19,38			Dinas Dukcapil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan**	**100,00**	**310,73**	**100,00**	**35,00**	**83,33**	**3,72**	**83,33**	**21,47**	**100,00**	**3,57**	**100,00**	**5,53**	**100,00**	**34,28**	**100,00**	**34,28**	**100,00**	**11,03**	**Dinas Dukcapil**
		Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kependuukan*																			
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	12	310,73	-	35,00	-	3,72	-	21,47	-	3,57		5,53	-	34,28	-	34,28			Dinas Dukcapil
			Laporan Profil Perkembangan Penduduk	4		-	-	-	-	-		-				-	-	-	-			
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			4	-	-	-	-		2		2		4	-	4,00	-			
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					-		-													
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**13.395,89**	**100,00**	**3.324,12**	**34,52**	**630,35**	**61,90**	**839,83**	**91,67**	**838,25**	**100,00**	**774,18**	**100,00**	**3.082,62**	**100,00**	**3.082,62**	**100,00**	**23,01**	**DPMD Dalduk & KB**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa persuratan, ATK,Cetak Penggadaan, Bahan bacaan,Jasa pegawai tidak tetap	48	952,75	12	18,89	3	9,41	3	0,30	3	0,20	3	7,57	12	17,49	12,00	17,49			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	12	103,32	3	25,29	3	24,75	3	21,39	3	28,91	12	100,35	12,00	100,35			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	175,59	3	28,34	3	51,69	3	41,39	3	54,16	12	175,57	12,00	175,57			DPMD Dalduk & KB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	149	13.180,24	12	2.721,19	3	517,53	3	695,28	-	727,10	6	561,44	12	2.501,35	12,00	2.501,35			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	320,79	12	59,37	3	15,34	3	14,33	3	0,97	3	28,65	12	59,28	12,00	59,28			DPMD Dalduk & KB
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	8	23,42	2	8,55	-	1,78	-	1,01	1	1,10	1	4,47	2	8,36	2,00	8,36			DPMD Dalduk & KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	129,41	12	38,46	3	3,18	3	5,83	2	3,44	4	15,28	12	27,74	12,00	27,74			DPMD Dalduk & KB
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	26,97	2	5,11	-	2,38	1	0,00	1	1,94	-	0,67	2	4,99	2,00	4,99			DPMD Dalduk & KB
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	47,47	12	10,90	3	1,51	3	1,20	3	2,72	3	5,38	12	10,81	12,00	10,81			DPMD Dalduk & KB
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	1	27,80	-	-	1	7,90	-	-		17,90	1	25,80	1,00	25,80			DPMD Dalduk & KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	282	664,98	72	143,45	16	18,89	20	36,30	18	36,28	18	48,11	72	139,58	72,00	139,58			DPMD Dalduk & KB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	148	-	57	11,50	25	6,71	8	1,25	12	1,72	12	1,63	57	11,31	57,00	11,31			DPMD Dalduk & KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Presentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**74,71**	**4.528,59**	**68,97**	**2.944,94**	**100,00**	**443,46**	**100,00**	**1.238,47**	**100,00**	**70,95**	**1,00**	**1.188,09**	**1,00**	**2.940,97**	**1,00**	**2.940,97**	**1,34**	**64,94**	**DPMD Dalduk & KB**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	396,37	3	1.250,69	1	204,42	2	2,24	-	50,15	-	990,38	3	1.247,19	3,00	1.247,19			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dan HasilFasilitasi BulanBhakti GotongRoyong Masyarakat	64	3.210,82	16	1.694,24	1	239,04	13	1.236,23	1	20,81	1	197,71	16	1.693,78	16,00	1.693,78			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaann Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	910,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Presentase penguatan kelembagaan desa**	**76,43**	**9.144,95**	**69,82**	**2.109,94**	**46,17**	**506,66**	**54,79**	**486,06**	**62,14**	**460,20**	**74,67**	**571,97**	**74,67**	**2.024,89**	**74,67**	**2.024,89**	**97,70**	**22,14**	**DPMD Dalduk & KB**
			Presentase peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	**89,62**		**82,80**		**47,91**		**67,62**		**80,21**		**87,26**		**87,26**		**87,26**		**97,37**		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	348	285,20	87	52,58	-	3,84	87	22,63	-	5,87	-	19,55	87	51,89	87,00	51,89			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219,60	87	19,79	-	2,41	-	1,91	-	2,70	87	12,70	87	19,71	87,00	19,71			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732,40	87	1.667,66	-	430,29	-	384,60	-	384,91	87	390,94	87	1.590,74	87,00	1.590,74			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	348	411,80	87	68,79	30	11,44	19	7,52	19	2,87	19	46,21	87	68,05	87,00	68,05			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324,60	40	54,56	7	13,19	7	14,22	10	8,08	16	16,42	40	51,90	40,00	51,90			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571,90	2	124,29	1	18,84	-	25,41	-	21,42	1	55,80	2	121,47	2,00	121,47			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179,80	87	41,62	-	6,97	-	0,00	87	15,20	-	18,82	87	40,99	87,00	40,99			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (13 Dokumen)	52	367,90	13	80,65	-	19,69		29,78	13	19,15	-	11,52	13	80,13	13,00	80,13			DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	**Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**65,52**	**1.875,00**	**31,03**	**300,00**	**19,54**	**-**	**19,54**	**-**	**19,54**	**50,37**	**25,29**	**246,17**	**25,29**	**296,54**	**25,29**	**296,54**	**38,60**	**15,82**	**DPMD Dalduk & KB**
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																				
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	1	300,00	-	-	-	-	-	50,37	1	246,17	1	296,54	1,00	296,54			DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli**	**91,67**	**4.984,41**	**42,53**	**1.138,00**	**58,33**	**230,37**	**58,33**	**231,22**	**66,67**	**335,75**	**66,67**	**320,24**	**66,67**	**1.117,58**	**66,67**	**1.117,58**	**72,73**	**22,42**	**DPMD Dalduk & KB**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																				
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kulon Progo)	Lurah dan Pamong Kalurahan yang memahami tentang Kelembagaan Asli	54	-	18	1.138,00	-	230,37	-	231,22	16,00	335,75	2	320,24	18	1.117,58	18,00	1.117,58			DPMD Dalduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		-			-		-													

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana**	**51,18**	**20.713,72**	**49,71**	**3.556,05**	**52,04**	**464,70**	**53,88**	**959,65**	**55,43**	**841,50**	**55,96**	**1.161,18**	**55,96**	**3.427,04**	**55,96**	**3.427,04**	**109,34**	**16,54**	**DPMD Dalduk & KB**
			Persentase Advokasi dan IKE Program KKBPK	**51,40**		**47,08**		**47,08**		**51,68**		**42,49**		**55,9**		**55,90**		**55,90**		**108,75**		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																				
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana	-	-	6	163,94	-	34,61	4	52,07	2	26,70	-	48,51	6	161,89	6,00	161,89			DPMD Dalduk & KB
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	1	150,00	-	5,75	-	2,05	-	70,20	1	71,42	1	149,43	1,00	149,43			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	1	156,00	-	31,17		46,74		31,19	1	46,78	1	155,88	1,00	155,88			DPMD Dalduk & KB
		Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	-	1	577,80	-	122,50	-	166,85	-	151,79	1	135,35	1	576,49	1,00	576,49			DPMD Dalduk & KB
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	1	80,00	-	9,04	-	21,53	1	43,17	-	5,98	1	79,72	1,00	79,72			DPMD Dalduk & KB
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Avokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24	4.669,42	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																				
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	1	6,00	1	1,20	-	1,80	-	1,20	-	1,80	1	6,00	1,00	6,00			DPMD Dalduk & KB
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	88	176,00	88	35,20	-	52,80	-	52,80	-	35,20	88	176,00	88,00	176,00			DPMD Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																				
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	-	-	1	37,80	-	6,23	-	9,16	-	10,60	1	11,81	1	37,80	1,00	37,80			DPMD Dalduk & KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	4.618	1.645,45	1.018	124,14	903	442,67	1.458	306,97	-	654,44	3.379	1.528,22	3.379,00	1.528,22			DPMD Dalduk & KB
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218,08	12	44,62	3	7,94	3	12,92	2	9,99	4	13,69	12	44,55	12,00	44,55			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	15.780,05	1	87,96	-	5,62	-	9,10	-	6,56	1	60,63	1	81,91	1,00	81,91			DPMD Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta orgnanisasi kemasyyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanadan pembinan kesertaan Ber-KB	8	46,08	2	18,485	1	3,37	-	3,12	1	4,20	-	7,70	2	18,39	2,00	18,39			DPMD Dalduk & KB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	-	-	1	9,00	-	-	-	2,98	-	2,98	1	2,98	1	8,95	1,00	8,95			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Terlaksanakannya Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di 12 Balai Penyuluh KB 9 Kali	-	-	26	403,00	-	77,93	-	135,87	26	123,15	-	64,88	26	401,82	26,00	401,82			DPMD Dalduk & KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Presentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**28,73**	**439,10**	**27,80**	**1.901,90**	**20,04**	**294,24**	**20,48**	**494,34**	**19,71**	**545,04**	**23,73**	**458,91**	**23,73**	**1.792,53**	**23,73**	**1.792,53**	**82,60**	**408,23**	**DPMD Dalduk & KB**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	20	360,00	-	-	-	0,90	20	248,79	-	2,00	20	251,69	20,00	251,69			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejateraan Keluarga (BKB. BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang	-	-	10	1.442,70	2	288,54	3	432,81	3	288,54	2	432,81	10	1.442,70	10,00	1.442,70			DPMD Dalduk & KB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4	703,49	1	56,52	-	5,07	-	21,71	-	7,06	1	22,46	1	56,30	1,00	56,30			DPMD Dalduk & KB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	703,49	1	42,68	-	0,63	-	38,93	-	0,64	1	1,64	1	41,84	1,00	41,84			DPMD Dalduk & KB
		Program Pengendalian Penduduk	**Indeks laju pertumbuhan penduduk**	**1,00**	**212,32**	**0,85**	**292,32**	**0,61**	**38,50**	**0,61**	**91,31**	**0,61**	**58,63**	**0,61**	**102,37**	**0,61**	**290,81**	**0,61**	**290,81**	**61,00**	**136,97**	**DPMD Dalduk & KB**
			Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	**2,10**		**1,80**		**1,48**		**1,48**		**1,48**		**1,48**		**1,48**						
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR)	**3,29**		**3,93**		**3,39**		**4,53**		**4,53**		**4,53**		**4,53**						
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lapoan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	1	64,20	-	12,35	-	14,58	-	16,41	-	20,60	-	63,95	-	63,95			DPMD Dalduk & KB
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah LaporanPencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	73,50	2	119,82	-	14,46	-	42,43	1	16,36	1	45,38	2	118,63	2,00	118,63			DPMD Dalduk & KB
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	1	72,00	-	6,00	-	24,00	-	18,00	1	24,00	1	71,99	1,00	71,99			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	48	138,82	12	36,30	3	5,68	3	10,30	3	7,86	3	12,40	12	36,24	12,00	36,24			DPMD Dalduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					-		-							-	-	-	-			
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**32.798,26**	**100,00**	**10.027,03**	**34,52**	**1.979,58**	**61,90**	**2.400,09**	**91,67**	**2.873,18**	**100,00**	**2.301,76**	**100,00**	**9.554,61**	**100,00**	**9.554,61**	**100,00**	**29,13**	**Dinas Perhubungan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	123,28	1	27,59	-	8,89	-	10,12	-	4,96	1	3,16	1	27,13	1,00	27,13			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	602,44	2	155,75	-	34,66	-	42,90	-	34,64	2	34,07	2	146,26	2,00	146,26			Dinas Perhubungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	48	13.876,66	12	3.392,89	3	635,51	3	1.071,48	-	847,20	6	682,98	12	3.237,17	12,00	3.237,17			Dinas Perhubungan
			Insentif retribusi	4		-	-	-	-							-	-	-	-			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	324,17	2	69,85	-	17,90	-	17,91	-	16,95	2	16,95	2	69,71	2,00	69,71			Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	56	77,37	14	16,67	3	5,01	4	5,23	3	3,77	4	2,51	14	16,52	14,00	16,52			Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	221,72	12	51,44	3	19,22	3	7,04	3	18,98	3	5,50	12	50,74	12,00	50,74			Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja tahun n+1 dan Perubahan Renja tahun n	8	55,69	2	12,00	-	6,11	-	2,53	1	3,22	1	-	2	11,87	2,00	11,87			Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja	72	94,49	16	20,36	4	5,43	4	5,12	4	6,85	4	2,76	16	20,16	16,00	20,16			Dinas Perhubungan
			LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja , penerapan SPIP Perangkat Daerah	-	-	2		-		2		-		-		2	-	2,00	-			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	101	95,96	20	58,68	3	0,49		19,95	1	-	16	36,09	20	56,53	20,00	56,53			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	48	17.317,18	77	6.219,79	20	1.246,35	18	1.217,81	20	1.935,71	19	1.516,66	77	5.916,53	77,00	5.916,53			Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil Penilaian Kinerja Pegawai fungsional	20	9,28	5	2,00	5	-	-	-	-	0,92	-	1,08	5	1,99	5,00	1,99			Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan**	**81,67**	**13.757,70**	**73,42**	**6.242,79**	**69,84**	**576,42**	**72,50**	**1.178,03**	**76,50**	**640,80**	**80,42**	**3.548,35**	**80,42**	**5.943,60**	**80,42**	**5.943,60**	**98,47**	**43,20**	**Dinas Perhubungan**
			Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan	**69,77**		**49,13**		**15,46**		**25,77**		**25,77**		**50,46**		**50,46**		**50,46**		**72,32**		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-																			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terkelolanya Sub Terminal/terminal tipe C	20	1.255,00	1	472,23	-	71,10		93,27	1	91,02	-	215,86	1	471,25	1,00	471,25			Dinas Perhubungan
			Rehab Ruang Tunggu dan Pos TPR Terminal Kenteng, Nanggulan	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1		1	-	1,00	-			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.242,00	4	305,18	2	92,23	-	56,54	-	57,92	2	97,33	4	304,01	4,00	304,01			Dinas Perhubungan
			Papan Informasi tarif parkir 5 buah	20		-		-				-				-	-	-	-			
			Kendaraan parkir	-		-		-				-				-	-	-	-			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-													-						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	4	334,19	12	127,99	-	1,14	-	55,88	-	1,81	12	65,05	12	123,89	12,00	123,89			Dinas Perhubungan
			Kalibrasi Alat PKB	4	-	9	-	-	-			-		9		9						
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau batrang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	827,17	3	589,45	-	194,45	1	228,78	-	72,06	2	50,16	3	545,45	3,00	545,45			Dinas Perhubungan
			Data load factor angkutan darat	4	-	-	-	-	-			-				-	-	-	-			
			Operasional bus sekolah	8	-	-	-	-	-			-				-	-	-	-			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar = 8530 kbwu diuji	-	1.225,00	8.530	209,20	1.652	32,53	1.400	122,05	1.738	20,54	3.735	10,74	8.525	185,86	8.525,00	185,86			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Cermin tikungan*																			
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	1.039,75	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Perhubungan
			Operasi Yustisi LLAJ	96		-	-	-	-			-				-	-	-	-			
			Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kewilayahan	120		-	-	-	-			-				-	-	-	-			
			Pengendalian Hari Besar	12		-	-	-	-			-				-	-	-	-			
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-																			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	1.414,48	6	679,12	-	83,67	-	114,94	-	84,64	6	374,56	6	657,81	6,00	657,81			Dinas Perhubungan
			Koordinasi permasalahan LLAJ	4	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	4	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	320	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Pengaturan persimpangan sebidang	48	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Survey lalu lintas	4	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Kajian studi evaluasi kinerja jalan dan simpang	4	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	1.039,75	3	253,09	-	25,87	1	123,59	-	38,20	2	65,06	3	252,72	3,00	252,72			Dinas Perhubungan
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	96	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kewilayahan	120	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
			Pengendalian Hari Besar	12	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-																			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	4	865,00	-	575,27	-	23,60		25,04		181,03		300,13	-	529,79	-	529,79			Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya APILL	-		7	-	2	-	2		2		1		7	-	7,00	-			Dinas Perhubungan
			Warning Lamp	-		1	-	-	-	-		1		-		1	-	1,00	-			
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rambu	-		300	-	75	-	65		100		60		300	-	300,00	-			
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Cermin Tikungan	-		4	-	1	-	-		2		1		4	-	4,00	-			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bahan/material LPJU	4	1.388,26	1	339,03	-	31,59	1	242,47	-	33,65	-	28,42	1	336,13	1,00	336,13			Dinas Perhubungan
			Lampu LED 90 watt 14 unit	40		14	-	-	-	14		-		-		14	-	14,00	-			
			Penggantian box KWH meter	28		7	-	-	-	7		-		-		7	-	7,00	-			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rambu Petunjuk Parkir	-	1.992,00	20	878,39	-	10,00	20	74,98	-	43,13	-	636,59	20	764,70	20,00	764,70			Dinas Perhubungan
			Tersedianya Cermin Tikungan	-		13	-	-	-	-	-	8		5		13	-	13,00	-			
			Tersedianya Rambu Lalu Lintas	-		38	-	-	-	-	-	12		26		38	-	38,00	-			
			Guardraill			204				-	-	48		156		204	-	204,00	-			
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya LPJU (titik)	-	2.102,60	173	1.797,50	-	5,37	-	37,96	-	12,06	116	1.700,46	116	1.755,86	116,00	1.755,86			Dinas Perhubungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-													-						
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	4	72,15	1	16,35	-	4,87	-	2,53	-	4,74	1	3,98	1	16,12	1,00	16,12			Dinas Perhubungan
			Rekomendasi Andalalin	4	-	1	-	-	-	-		-		1		1	-	1,00	-			
			Andalalin	4	-	1	-	-	-			-		-		-	-	-	-			
			Survey Lalu Lintas	4	-		-		-			-				-	-	-	-			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		**-**	**7.306,03**		**1.169,98**	**-**	**1,35**	**-**	**63,87**	**-**	**6,02**		**1.098,00**	**-**	**1.169,25**	**-**	**1.169,25**			**Dinas Perhubungan**
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																				
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Cermin Lalu Lintas	114	7.306,03	26	1.169,98	-	1,35	-	63,87	-	6,02	26	1.098,00	26	1.169,25	26,00	1.169,25			Dinas Perhubungan
			Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	43		416		-		-		-		-		-	-	-	-			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rambu Lalu Lintas	250		55		-		-		-		-		-	-	-	-			
			Pagar Pengaman Jalan/Guardrail	2.076		9		-		-		-		-		-	-	-	-			
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika														-	-	-	-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**16.371,97**	**100,00**	**3.187,61**	**34,52**	**622,57**	**61,90**	**792,17**	**91,67**	**840,61**	**100,00**	**787,26**	**100,00**	**3.042,61**	**100,00**	**3.042,61**	**100,00**	**18,58**	**Diskominfo**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	112,84	1	26,61	-	7,08	-	4,84	-	7,12	1	6,81	1	25,84	1,00	25,84			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	92	496,16	1	94,83	-	22,24	-	28,34	-	22,05	1	21,74	1	94,37	1,00	94,37			Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	56	14.205,61	12	2.600,44	3	517,27	3	693,59	-	718,34	6	551,72	12	2.480,92	12,00	2.480,92			Diskominfo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	222,81	12	52,27	3	12,45	3	14,02	3	13,30	3	12,45	12	52,22	12,00	52,22			Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi, Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56	28,00	14	7,89	4	2,37	3	2,50	3	0,45	4	2,47	14	7,79	14,00	7,79			Diskominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	330,51	1	77,93	-	13,72	-	12,29	10	11,14	-	24,47	10	61,62	10,00	61,62			Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	55,85	2	7,83	-	1,81	1	2,33	1	1,71	-	1,84	2	7,70	2,00	7,70			Diskominfo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	26,86	21	7,00	-	2,03	11	2,43	4	1,88	6	0,60	21	6,93	21,00	6,93			Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor aau bangunan lainya yang disediakan	16	117,50	4	8,83	4	7,92	-	-	-	0,85	-		4	8,77	4,00	8,77			Diskominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	668,31	36	278,64	9	34,70	9	31,47	9	40,08	9	164,98	36	271,23	36,00	271,23			Diskominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	9,54	1	2,25	-	0,99	-	0,18	-	0,82	1	0,18	1	2,17	1,00	2,17			Diskominfo
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	97,97	8	23,10	-	-	-	0,18	8	22,87	-		8	23,05	8,00	23,05			Diskominfo
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi**	**90,84**	**2.497,15**	**83,33**	**689,61**	**95,24**	**229,61**	**95,24**	**136,91**	**98,81**	**141,86**	**98,81**	**159,69**	**98,81**	**668,07**	**98,81**	**668,07**	**108,77**	**26,75**	**Diskominfo**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyebarluasan informasi daerah*																			
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	24	916,03	6	217,08	-	33,15	1	57,00	17	81,15	-	44,46	18	215,76	18,00	215,76			Diskominfo
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	96	1.581,13	24	472,53	6	196,46	6	79,91	6	60,72	6	115,22	18	452,31	18,00	452,31			Diskominfo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Presentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik**	**90,18**	**14.376,25**	**72,14**	**6.646,96**	**62,12**	**700,52**	**62,97**	**1.122,83**	**68,81**	**1.497,56**	**70,00**	**3.178,76**	**70,00**	**6.499,67**	**70,00**	**6.499,67**	**77,62**	**45,21**	**Diskominfo**
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan Infrastruktur TIK*																			
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	12.340,47	1	6.052,18	-	625,78	-	1.004,47	-	1.331,39	1	2.965,02	1	5.926,66	1,00	5.926,66			Diskominfo
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	16	1.551,64	5	458,59	-	37,83	1,00	80,72	2	143,76	2	181,03	5	443,34	5,00	443,34			Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	483,14	2	136,19	-	36,90	-	37,64	-	22,40	2	32,71	2	129,66	2,00	129,66			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					-		-													
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Presentase data sektoral yang dipublikasikan**	**100,00**	**1.274,18**	**94,53**	**304,34**	**96,65**	**27,99**	**46,56**	**102,53**	**104,59**	**80,75**	**100,00**	**84,86**	**100,00**	**296,12**	**100,00**	**296,12**	**100,00**	**23,24**	**Diskominfo**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data sektoral yang dipublikasi*																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24	1.274,18	4	304,34	-	27,99	-	102,53	3	80,75	1	84,86	4	296,12	4,00	296,12			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					-		-													
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Presentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan**	**64,36**	**91,12**	**41,56**	**344,47**	**42,39**	**4,92**	**42,39**	**6,40**	**44,08**	**266,97**	**49,17**	**64,66**	**49,17**	**342,96**	**49,17**	**342,96**	**76,40**	**376,39**	**Diskominfo**
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan*																			
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	168	38,46	42	24,25	10	2,80	10	2,85	10	8,26	12	10,12	42	24,03	42,00	24,03			Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12,00	-	2	320,22	-	2,12	-	3,55	-	258,72	2	54,54	2	318,93	2,00	318,93			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					-		-													
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**9.098,96**	**100,00**	**2.574,20**	**34,52**	**478,46**	**61,90**	**613,16**	**91,67**	**589,34**	**100,00**	**767,36**	**100,00**	**2.448,32**	**100,00**	**2.448,32**	**100,00**	**26,91**	**DiskopUMKM**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	157,51	3	46,36	-	8,07	-	10,58	-	8,23	3	11,38	3	38,26	3,00	38,26			DiskopUMKM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	12	86,19	3	20,00	3	26,18	3	20,00	3	20,00	12	86,19	12,00	86,19			DiskopUMKM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.296	7.464,71	12	1.884,42	3	369,90	3	507,03	-	500,18	6	392,16	12	1.769,27	12,00	1.769,27			DiskopUMKM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,30	12	37,42	3	9,34	3	9,43	3	9,43	3	9,23	12	37,42	12,00	37,42			DiskopUMKM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76	52,81	19	12,72	3	3,32	4	2,52	5	3,56	7	3,22	19	12,62	19,00	12,62			DiskopUMKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	67,06	5	16,16	-	3,19	-	4,69	-	4,02	5	4,13	5	16,03	5,00	16,03			DiskopUMKM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	156,18	12	48,45	3	13,05	3	1,49	3	14,07	3	19,26	12	47,87	12,00	47,87			DiskopUMKM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	152,00	2	37,919	-	8,67	-	11,74	2	8,69	-	8,76	2	37,86	2,00	37,86			DiskopUMKM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	51,72	21	12,46	8	2,91	4	2,61	5	3,61	4	3,21	21	12,34	21,00	12,34			DiskopUMKM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	*55,26*	9	112,22	-	-	3	13,21	-	-	6	98,79	9	112,00	9,00	112,00			DiskopUMKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	235,09	16	56,64	4	12,94	4	14,94	4	13,88	4	14,29	16	56,05	16,00	56,05			DiskopUMKM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123	155,12	21	223,24	9	27,06	6	8,74	2	3,68	4	182,91	21	222,40	21,00	222,40			DiskopUMKM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,76	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DiskopUMKM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DiskopUMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usahaa Mikro (UMKM)	**Presentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**5,67**	**457,27**	**3,67**	**1.546,95**	**(30,31)**	**26,64**	**(0,23)**	**302,34**	**15,70**	**490,77**	**30,84**	**316,70**	**30,84**	**1.136,45**	**30,84**	**1.136,45**	**543,92**	**248,53**	**DiskopUMKM**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)*																			
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	672	258,60	186	218,54	50	4,92	76	52,45	-	101,07	60	57,74	186	216,18	186,00	216,18			DiskopUMKM
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisai Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,000	89,34	39.000	50,21	-	8,30	33.000	12,73	4.100	15,35	1.900	13,66	39.000	50,03	39.000,00	50,03			DiskopUMKM
			Profil KUMKM	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	480	109,33	170	1.278,20	-	13,43	115	237,16	55	374,36	-	245,30	170	870,24	170,00	870,24			DiskopUMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	**Presentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**67,52**	**1.512,75**	**62,18**	**76,68**	**74,47**	**8,89**	**74,56**	**10,96**	**74,65**	**29,08**	**60,35**	**26,63**	**60,35**	**75,57**	**60,35**	**75,57**	**89,38**	**5,00**	**DiskopUMKM**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*																			
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463	903,87	136	41,48	-	3,34	2	6,37	78	16,13	56	15,07	136	40,91	136,00	40,91			DiskopUMKM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	52	608,88	13	35,20	3	5,55	3	4,59	4	12,95	3	11,57	13	34,65	13,00	34,65			DiskopUMKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Presentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi**	**98,46**	**800,00**	**95,24**	**564,26**	**75,29**	**54,60**	**86,88**	**202,41**	**92,86**	**239,03**	**93,15**	**56,85**	**93,15**	**552,88**	**93,15**	**552,88**	**94,61**	**69,11**	**DiskopUMKM**
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi*																			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.260	1.634,75	585	335,16	75	45,75	315	119,49	195	115,37	-	44,72	585	325,32	585,00	325,32			DiskopUMKM
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi*																			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	540	782,05	135	229,10	-	8,85	55	82,92	-	123,66	80	12,13	135	227,56	135,00	227,56			DiskopUMKM
		Program Pengembangan UMKM	**Persentase Pengembangan UMKM**	**2,39**	**801,13**	**1,49**	**438,27**	**0,55**	**133,67**	**0,67**	**75,71**	**1,67**	**141,93**	**1,67**	**66,34**	**1,67**	**417,66**	**1,67**	**417,66**	**69,87**	**52,13**	**DiskopUMKM**
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Pengembangan UMKM*																			
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.000	801,13	446	438,27	106	133,67	130	75,71	190	141,93	20	66,34	446	417,66	446,00	417,66			DiskopUMKM
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya**	**100,00**	**886,37**	**71,43**	**221,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220,58**		**-**	**-**	**220,58**	**-**	**220,58**	**0,00**	**24,89**	**DiskopUMKM**
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Capaian Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaan*																			
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	460	886,36	115	221,59	-	-	-	-	115	220,58	-	-	115	220,58	115,00	220,58			DiskopUMKM
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**10.960,42**	**100,00**	**2.988,08**	**34,52**	**558,38**	**61,90**	**683,79**	**91,67**	**660,24**	**100,00**	**700.883,24**	**100,00**	**702.785,65**	**100,00**	**702.785,65**	**100,00**	**6.412,03**	**DPMPTSP**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	367,60	12	127,64	3	17,33	3	33,44	3	23,91	3	30,89	12	105,57	12,00	105,57			DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	960,26	12	238,42	3	52,90	3	69,52	3	52,93	3	52,93	12	228,28	12,00	228,28			DPMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	7.922,12	12	1.925,91	3	390,32	3	502,63	3	501,05	3	380,21	12	1.774,21	12,00	1.774,21			DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaantugas ASN	48	205,92	12	48,36	3	12,19	3	12,30	6	11,93	-	11,93	12	48,34	12,00	48,34			DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,69	19	3,89	3	0,50	4	1,68	5	-	7	1,68	19	3,86	19,00	3,86			DPMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	105,94	5	24,93	2	8,83	1	7,39	1	5,95	1	1,89	5	24,05	5,00	24,05			DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	267,61	12	71,32	3	12,90	3	9,51	3	18,69	3	26,97	12	68,06	12,00	68,06			DPMPTSP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat waktu*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	149,34	2	36,47	-	6,76	-	11,89	2	10,53	-	7,18	2	36,36	2,00	36,36			DPMPTSP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	23,83	21	5,65	6	2,47	4	0,67	5	1,80	6	0,67	21	5,61	21,00	5,61			DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29	180,82	47	357,49	1	20,80	-	-	-	-	46	330,67	47	351,47	47,00	351,47			DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	336,64	16	99,62	6	24,61	4	24,67	3	24,56	3	25,78	16	99,62	16,00	99,62			DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direabilitasi	364	149,76	35	41,368	9	8,77	9	10,10	8,00	8,90	9	12,44	35	40,20	35,00	40,20			DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direabilitasi	4	210,18	-	7,00	-	-	-	-	-	-		700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	63,82		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	**Presentase pelayanan Penanaman Modal**	**87,88**	**1.328,62**	**86,67**	**626,82**	**100,00**	**155,15**	**100,00**	**173,68**	**100,00**	**215,01**	**100,00**	**72,67**	**100,00**	**616,51**	**100,00**	**616,51**	**113,79**	**46,40**	**DPMPTSP**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-																			
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	10.300	1.057,57	2.740	563,53	1.929	133,32	3.154	159,51	3.748	197,96	3.693	63,56	12.524	554,36	12.524,00	554,36			DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.700	228,05	600	52,68	21	17,73	24	12,59	538	14,53	481	7,53	1.064,00	52,37	1.064,00	52,37			DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40	43,00	10	10,62	1	4,10	-	1,58	10	2,52	1	1,58	12	9,77	12,00	9,77			DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasidan Sinkronisasi PenetapanPemberian Fasilitas/InsentifDaerah bagi KegiatanUsaha dari Pelaku Usaha	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Presentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100,00**	**152,81**	**-**	**72,24**	**-**	**12,75**	**76,00**	**16,76**	**100,00**	**25,26**	**100,00**	**16,18**	**100,00**	**70,95**	**100,00**	**70,95**	**100,00**	**46,43**	**DPMPTSP**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji Dimanfaatkan	8	152,81	2	72,24	-	12,75	1	16,76	-	25,26	1	16,18	2	70,95	2,00	70,95			DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**88,33**	**70,67**	**82,00**	**452,85**	**85,00**	**14,12**	**88,00**	**116,59**	**89,57**	**228,98**	**92,00**	**87,47**	**92,00**	**447,16**	**92,00**	**447,16**	**104,15**	**632,74**	**DPMPTSP**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	150	70,68	30	14,42	20	10,04	-	1,36	-	-	10	3,02	30	14,42	30,00	14,42			DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480	-	120	373,57	-	2,41	40	91,58	40	202,74	40	71,26	120	367,98	120,00	367,98			DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200	-	50	64,86	-	1,67	20	23,65	20	26,24	10	13,20	50	64,76	50,00	64,76			DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Presentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**100,00**	**1.679,57**	**100,00**	**162,69**	**50,00**	**33,82**	**50,00**	**35,15**	**100,00**	**88,37**	**100,00**	**2,52**	**100,00**	**159,86**	**100,00**	**159,86**	**100,00**	**9,52**	**DPMPTSP**
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-																			
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	1.076,16	1	162,69	-	33,82	-	35,15	1	88,37	-	2,52	1	159,86	1,00	159,86			DPMPTSP
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota	1	221,41	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMPTSP
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalamPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMPTSP
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	182,01	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	**Presentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal**	**40,00**	**627,80**	**25,00**	**309,77**	**40,00**	**20,11**	**30,00**	**41,66**	**28,57**	**43,29**	**24,00**	**199,25**	**24,00**	**304,31**	**24,00**	**304,31**	**60,00**	**48,47**	**DPMPTSP**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	12	627,80	5	309,77	-	20,11	1	41,66	1	43,29	3	199,25	5	304,31	5,00	304,31			DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**			**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**	**99,47**	**-**	**99,47**	**-**	**99,47**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DPMPTSP**
		Peningkatan Budaya Pemerintahan																				
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	99,47	1	99,47	1,00	99,47			DPMPTSP
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																				
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**14.244,14**	**100,00**	**3.761,86**	**34,52**	**639,04**	**61,90**	**964,02**	**91,67**	**898,53**	**100,00**	**807,41**	**100,00**	**3.309,00**	**100,00**	**3.309,00**	**100,00**	**23,23**	**Dinas Kebudayaan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	260,42	12	62,51	3	11,51	3	18,11	3	13,93	3	16,52	12	60,08	12,00	60,08			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	473,04	12	134,66	3	25,47	3	34,46	3	25,84	3	47,93	12	133,70	12,00	133,70			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	10.382,48		2.560,60	3	526,57	3	732,70	-	729,33	6	518,60	12	2.507,20	12,00	2.507,20			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	299,67	12	67,70	3	17,23	3	16,80	3	16,80	3	16,13	12	66,95	12,00	66,95			Dinas Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	27,51	14	6,10	3	-	4	-	3	2,84	4	3,07	14	5,91	14,00	5,91			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	132,51	12	30,04	3	2,31	3	3,96	3	6,56	3	17,14	12	29,97	12,00	29,97			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 paket)	20	63,96	12	14,46	3	1,45	3	3,36	3	5,60	3	3,79	12	14,20	12,00	14,20			Dinas Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,95	2	9,90	-	1,99	-	3,08	2	2,58	-	1,78	2	9,43	2,00	9,43			Dinas Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	27,30	21	6,00	8	1,70	4	0,84	5	1,78	4	1,55	21	5,87	21,00	5,87			Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	190	840,01	6	95,44	-	-	-	-	-	-	6	94,55	6	94,55	6,00	94,55			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53	320,27	17	72,51	4	5,45	4	22,62	5	17,42	4	24,42	17	69,91	17,00	69,91			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	7,45	-	3,58	-	-	-	1,50	1	2,37	1	7,44	1,00	7,44			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	32,85	15	6,91	4	-	4	1,60	6	1,00	1	4,31	15	6,91	15,00	6,91			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	75	1.383,89	1	687,60	-	41,79	-	126,48	-	73,34	1	55,27	1	296,87	1,00	296,87			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61	22,26	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kebudayaan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	156	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman**	**100,00**	**80.673,76**	**100,00**	**33.723,41**	**79,49**	**2.243,03**	**79,49**	**6.770,11**	**88,89**	**14.331,02**	**100,00**	**9.950,93**	**100,00**	**33.295,08**	**100,00**	**33.295,08**	**100,00**	**41,27**	**Dinas Kebudayaan**
			Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya	**69,17**		**63,04**		**66,51**		**53,34**		**61,40**		**63,18**		**63,18**		**63,18**		**91,34**		
			Cakupan pengelolaan taman Budaya	**100,00**		**96,93**		**46,05**		**105,58**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		**96,93**		
			Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	**39,27**		**30,41**		**30,44**		**30,49**		**30,46**		**31,09**		**31,09**		**31,09**		**79,17**		
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	32	1.621,00	9	772,00	1	75,56	1	60,52	6	359,57	1	273,67	9	769,33	9,00	769,33			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (20) Laporan	156	4,00	20	1.229,98	2	110,53	9	100,71	6	588,39	3	417,04	20	1.216,67	20,00	1.216,67			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman Yang Dibina dan Dikelola	20	1.172,00	1	433,03	-	105,42	-	121,22	1	175,27	-	19,11	1	421,02	1,00	421,02			Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	18.279,00	1	4.199,48	-	276,34	-	1.138,55	-	1.333,58	1	1.263,68	1	4.012,15	1,00	4.012,15			Dinas Kebudayaan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	8	7.165,00	2	1.562,28	-	-	1	795,75	1	765,55	-	0,00	2	1.561,30	2,00	1.561,30			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina	4	2.258,00	1	667,09	-	20,28	-	0,00	-	309,90	1	335,53	1	665,71	1,00	665,71			Dinas Kebudayaan
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	12	3.400,00	4	1.369,27	1	282,17	2	553,38	1	432,54	-		4	1.268,09	4,00	1.268,09			Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan Yang Mendapatkan Penghargaan	20	800,00	8	313,00	-	-	-	-	-	-	8	308,25	8	308,25	8,00	308,25			Dinas Kebudayaan
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	20	2.152,00	3	500,00	-	-		-	-	-	3	495,95	3	495,95	3,00	495,95			Dinas Kebudayaan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	8.138,00	8	4.487,88	-	63,71	3	1.125,75	4	2.621,92	1	655,62	8	4.467,00	8,00	4.467,00			Dinas Kebudayaan
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	12	7,20	9	299,58	2	68,72	-	12,46	3	152,03	4	60,38	9	293,59	9,00	293,59			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	300	1,850	75	887,05	-	369,02	-	-	-	89,12	75	427,38	75	885,51	75,00	885,51			Dinas Kebudayaan
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan Dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	20	6,08	8	1.662,84	-	656,58		45,50	6	498,35	2	442,96	8	1.643,40	8,00	1.643,40			Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan Event Penggiat Seni	24	7,76	3	2.993,23	-	145,64	-	498,16	2	1.305,84	1	1.015,39	3	2.965,03	3,00	2.965,03			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	324	1.939,00	5	10.917,25	-	15,53	2	2.130,43	2	5.542,91	1	3.219,03	5	10.907,90	5,00	10.907,90			Dinas Kebudayaan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*																			
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	120	11.884,00	30	584,49	-	53,54	-	187,67	-	156,04	30	178,33	30	575,59	30,00	575,59			Dinas Kebudayaan
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasaran Budaya	24	2.102,00	60	844,96	-	-	-	-	-	-	60	838,59	60	838,59	60,00	838,59			Dinas Kebudayaan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**13.824,98**	**100,00**	**4.017,44**	**34,52**	**636,68**	**61,90**	**1.108,20**	**91,67**	**996,71**	**100,00**	**1.126,94**	**100,00**	**3.868,54**	**100,00**	**3.868,54**	**100,00**	**27,98**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*layanan administrasi perkantoran*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi SUmber Daya Air dan Listrik	12	374,09	3	98,24	-	20,17	-	21,91	-	22,55	3	33,45	3	98,08	3,00	98,08			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	520,00	2	147,46	-	22,95	1	17,97	-	16,93	1	85,88	2	143,73	2,00	143,73			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	11.477,99	12	2.647,45	3	538,21	3	735,27	-	733,71	6	523,58	12	2.530,76	12,00	2.530,76			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	143,20	12	36,90	3	9,56	3	9,00	3	9,00	3	8,82	12	36,38	12,00	36,38			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	21,20	14	4,70	3	0,85	3	0,00	4	1,86	4	1,86	14	4,58	14,00	4,58			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*layanan koordinasi dan perjalanan dinas*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	104,00	5	22,97	1	5,72	1	5,66	2	6,36	1	4,12	5	21,86	5,00	21,86			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	126,36	2	26,78	-	2,07	1	15,96	-	6,97	1	-	2	25,00	2,00	25,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	10	23,00	2	5,00	-	1,21	-	0,54	2	2,14	-	0,98	2	4,88	2,00	4,88			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	24,66	21	5,16	8	1,06	6	1,66	4	1,17	3	1,15	21	5,04	21,00	5,04			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	*39*	*183,45*				-							-	-	-	-			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	39	183,45	47	599,54	4	-	7	72,36	1	85,18	35	420,49	47	578,02	47,00	578,02			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah aset yang dipelihara*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	599,00	11	137,65	-	28,07	-	29,50	-	42,61	11	36,16	11	136,33	11,00	136,33			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	78,36	1	237,82	-	5,83	-	197,79	1	27,01	-	5,64	1	236,27	1,00	236,27			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	104,11	212	34,21	6	-	201	0,00	5	29,98	-	4,18	212	34,16	212,00	34,16			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase realisasi pegawai mengikuti diklat*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	20,57	6	3,57	-	0,97	-	0,59	6	1,26	-	0,63	6	3,44	6,00	3,44			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	25,00	2	10,00	-	-	-	0,00	2	10,00	-	-	2	10,00	2,00	10,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	**Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan**	**49,65**	**787,13**	**49,18**	**300,37**	**39,36**	**65,95**	**46,98**	**30,96**	**50,51**	**123,10**	**57,13**	**76,69**	**57,13**	**296,71**	**57,13**	**296,71**	**115,07**	**37,70**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*																			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	106,23	1	34,39	1	11,81	-	1,08	-	3,42	-	17,01	1	33,32	1,00	33,32			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan perpustakaan*																			
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	440,96	1	126,94	-	33,31	-	21,46	1	32,74	-	39,23	1	126,74	1,00	126,74			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	54,75	4	18,00	-	12,16	-	1,36	-	2,89	4	0,66	4	17,07	4,00	17,07			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1.200	125,60	1.036	102,54	-	5,64	-	5,36	1.000	82,49	36	8,17	1.036	101,66	1.036,00	101,66			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4.800	59,58	1.500	18,50	50	3,03	150	1,71	450	1,56	850	11,62	1.500	17,92	1.500,00	17,92			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan**	**81,94**	**1.542,56**	**61,53**	**312,62**	**62,15**	**90,87**	**65,41**	**61,91**	**71,99**	**98,07**	**69,17**	**55,70**	**69**	**306,54**	**69,17**	**306,54**	**84,42**	**19,87**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*																			
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	56.400,0	381,51	13.400	87,00	2.000	15,16	5.400	34,62	3.000	14,22	3.000	19,71	13.400	83,71	13.400,00	83,71			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis*																			
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	73.500	863,00	18.000	173,40	5.000	54,36	4.000	21,77	6.000	66,39	3.000	28,85	18.000	171,37	18.000,00	171,37			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan arsip DInamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	298,07	5	52,22	-	21,35	-	5,52	5	17,45	-	7,14	5	51,46	5,00	51,46			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					-		-													
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**12.553,65**	**100,00**	**2.963,44**	**34,52**	**556,11**	**61,90**	**786,24**	**91,67**	**798,24**	**100,00**	**641,14**	**100**	**2.781,73**	**100,00**	**2.781,73**	**100,00**	**22,16**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	172,76	1	41,91	-	10,05	-	10,09	-	10,52	1	10,81	1	41,46	1,00	41,46			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	542,35	1	136,95	-	14,38	1	56,86	1	30,66	-	30,46	2	132,37	2,00	132,37			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (dokumen)*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	132	9,51	12	2.281,84	3	437,10	3	601,02	-	620,04	6	483,20	12	2.141,36	12,00	2.141,36			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	245,71	12	60,46	3	15,14	3	14,21	3	14,66	3	15,30	12	59,32	12,00	59,32			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	17,40	19	4,20	4	0,81	4	0,66	5	1,37	6,00	1,08	19	3,92	19,00	3,92			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	46,55	4	10,81	2	3,18	1	3,78	-	-	1	3,61	4	10,58	4,00	10,58			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	299,81	12	73,31	1	6,88	5	19,03	4	17,79	2	14,49	12	58,18	12,00	58,18			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (dokumen)*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renja PD, perubahan renja PD, renstra 2023-2026	10	16,60	2	4,00	-	1,45	-	0,70	2	0,53	-	0,71	2	3,39	2,00	3,39			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (Bulanan, Triwulan, Tahunan, Lakip, dan Profil Kinerja OPD), Laporan SPIP	84	146,57	22	35,57	9	10,45	4	9,12	5	3,82	4	1,50	22	24,90	22,00	24,90			Dinas Kelautan dan Perikanan
			Dokumen data statistik kelautan dan perikanan	-	-		-															
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset (unit)*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	4	572,08	6	51,95	-	-	6	28,02	-	-	-	23,78	6	51,79	6,00	51,79			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	196	513,03	54	129,21	7	39,29	11	24,00	7	26,72	22	32,29	47	122,29	47,00	122,29			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	79,02	1	125,86	1	13,92	-	16,78	-	70,59	-	23,51	1	124,80	1,00	124,80			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	67	650,90	60	7,38	4	3,45	5	1,98	51	1,53	-	0,42	60	7,38	60,00	7,38			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Produksi perikanan budidaya**	**16.910,00**	**3.495,42**	**16.763,00**	**1.721,95**	**4.459,78**	**74,83**	**8.560,43**	**1.231,63**	**12.715,00**	**60,81**	**16.803,44**	**331,95**	**16.803,44**	**1.699,22**	**16.803,44**	**1.699,22**	**99,37**	**48,61**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)*																			
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20	2.829,41	34	1.447,11	-	32,58	-	1.213,19	34	19,58	-	167,84	34	1.433,19	34,00	1.433,19			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)*																			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59	242,00	59	58,96	-	11,02	-	11,09		16,94	59	19,74	59	58,78	59,00	58,78			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	424,00	1	215,88	-	31,23	-	7,35	-	24,29	-	144,37	-	207,24	-	207,24			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Produksi perikanan tangkap**	**2.125,00**	**778,85**	**2.050,00**	**719,24**	**491,91**	**73,82**	**904,72**	**30,17**	**1.435,45**	**69,00**	**2.183,85**	**516,46**	**2.183,85**	**689,45**	**2.183,85**	**689,45**	**102,77**	**88,52**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)*																			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	200	267,74	50	567,29	25	8,73	-	9,52	-	44,56	25,00	477,70	50	540,51	50,00	540,51			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen*																			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80	159,11	41	62,93	41	52,91	-	2,02	-	3,88	-	1,43	41	60,23	41,00	60,23			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*																			
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	4	325,00	1	89,02	-	12,18	-	18,63	-	20,56	1,00	37,33	1	88,71	1,00	88,71			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Presentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar**	**70,42**	**943,43**	**42,25**	**441,95**	**39,44**	**22,54**	**40,14**	**38,29**	**41,55**	**262,68**	**44,37**	**115,43**	**44,37**	**438,94**	**44,37**	**438,94**	**63,01**	**46,53**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Produksi pengolahan ikan (kg)	**155.000**		**140.000**		**37.176**		**79.844**		**120.706**		**166.420**		**166.420**	-	**166.420**		**107,37**		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang*																			
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	376,63	70	85,00	-	8,24	-	19,33	70	39,99	-	16,01	70	83,57	70,00	83,57			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)*												-							
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang terfasilitsi	80	571,80	24	356,95	-	14,30	-	18,96	24	222,69	-	99,42	24	355,37	24,00	355,37			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	**Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan**	**92,59**	**421,10**	**91,67**	**56,68**	**92,59**	**3,61**	**92,59**	**42,85**	**92,59**	**-1,19**	**92,59**	**6,84**	**92,59**	**52,11**	**92,59**	**52,11**	**100,00**	**12,38**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)*																			
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	4	421,00	1	56,68	-	3,61	-	42,85	-	- 1,19	1	6,84	1	52,11	1,00	52,11			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase pengembangan budaya bahari**	**100,00**	**7.279,00**	**100,00**	**5.196,08**	**56,17**	**68,55**	**63,83**	**1.043,86**	**73,87**	**1.315,62**	**101,90**	**2.682,55**	**101,90**	**5.110,59**	**101,90**	**5.110,59**	**101,90**	**70,21**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	108	7.279,00	44	5.196	-	68,55	63,17	1.043,86	-	1.315,62	0	2.682,55	63	5.110,59	63,17	5.110,59			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																				
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**11.368,27**	**100,00**	**2.827,13**	**34,52**	**548,65**	**61,90**	**676,84**	**91,67**	**679,07**	**100,00**	**723,17**	**100,00**	**2.627,74**	**100,00**	**2.627,74**	**100,00**	**23,11**	**Dinas Pariwisata**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	947,35	12	77,31	3	21,18	3	21,42		20,87	6	13,14	12	76,61	12,00	76,61			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12	947,35	12	62,18	3	14,46	3	18,60	3	14,52	3	14,52	12	62,09	12,00	62,09			Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36	631,57	12	2.280,51	3	422,53	3	562,00	-	562,51	6	548,84	12	2.095,89	12,00	2.095,89			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	631,57	12	65,08	3	14,63	3	16,72	3	16,57	3	15,91	12	63,83	12,00	63,83			Dinas Pariwisata
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	631,57	18	2,98	3	1,53	4	0,00	5	1,28	6	-	18	2,81	18,00	2,81			Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	16	947,35	12	28,53	2	7,68	5	9,33	3	6,49	2	3,38	12	26,88	12,00	26,88			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	947,35	12	58,56	2	9,15	4	23,66	3	6,98	3	18,59	12	58,37	12,00	58,37			Dinas Pariwisata
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	947,35	2	3,39	-	0,60	-	1,41	1	0,95	1	0,30	2	3,26	2,00	3,26			Dinas Pariwisata
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	947,35	21	4,52	8	3,12	4	0,15	5	0,70	4	0,45	21	4,42	21,00	4,42			Dinas Pariwisata
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	28	1.894,71	7	124,56	7	25,57	-	0,30	-	-	-	95,96	7	121,83	7,00	121,83			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	631,57	15	86,01	6	22,19	3	15,51	3	35,80	3	7,80	15	81,30	15,00	81,30			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	631,57	4	4,81	-	-	-	-	4	3,63	-	-	4	3,63	4,00	3,63			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69	631,57	57	28,69	8	6,01	23	7,74	16	8,78	10	4,29	57	26,82	57,00	26,82			Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata**	**100,00**	**1.946,97**	**100,00**	**214,20**	**8,99**	**99,03**	**32,51**	**40,52**	**45,31**	**33,74**	**79,91**	**40,48**	**79,91**	**213,77**	**79,91**	**213,77**	**79,91**	**10,98**	**Dinas Pariwisata**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata*																			
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	3	76,75	1	65,17	1	0,92	-	1,81	1	8,75	3	76,65	3,00	76,65			Dinas Pariwisata
			Pameran (Manunggal Fair dan TTI/Trade Tourism/Invesment)	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-			
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	3	137,45	-	33,85	-	39,61	-	31,93	3	31,73	3	137,12	3,00	137,12			Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**100,00**	**9.386,92**	**75,00**	**4.728,65**	**75,00**	**491,64**	**75,00**	**806,76**	**75,00**	**864,87**	**87,50**	**2.151,62**	**87,50**	**4.314,89**	**87,50**	**4.314,89**	**87,50**	**45,97**	**Dinas Pariwisata**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah pengeloaan destinasi pariwisata*																			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8	4.693,46	8	2.673,84	2	17,21	3	226,64	2	413,93	1	1.641,86	8	2.299,63	8,10	2.299,63			Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan daya tarik wisata*																			
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang,Pemantapan Revitalisasi)	10	4.693,46	10	2.054,82	-	474,43	-	580,12	-	450,94	10	509,76	10	2.015,26	10,00	2.015,26			Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**23,47**	**3.864,65**	**18,95**	**1.572,19**	**18,57**	**83,94**	**17.93**	**486,76**	**17,91**	**855,81**	**18,69**	**139,10**	**18,69**	**1.565,61**	**18,69**	**1.565,61**	**79,63**	**40,51**	**Dinas Pariwisata**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar*																			
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200	1.932,33	50	1.413,61	30	77,69	-	437,01	-	796,82	-	95,81	30	1.407,33	30,00	1.407,33			Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140	1.932,33	35	158,57	-	6,25	20	49,75	15	59,00	-	43,29	35	158,28	35,00	158,28			Dinas Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah**	**100,00**	**8.066,06**	**100,00**	**12.609,12**	**60,00**	**575,94**	**80,00**	**1.837,70**	**80,00**	**4.789,26**	**120,00**	**5.251,03**	**120,00**	**12.453,93**	**120,00**	**12.453,93**	**120,00**	**154,40**	**Dinas Pariwisata**
			cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	**100,00**	**100.983,98**	**100,00**	**19.610,32**	**85,71**	**692,86**	**85,71**	**2.322,25**	**78,57**	**3.700,58**	**142,86**	**12.644,86**	**142,86**	**19.360,54**	**142,86**		**142,86**		
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*jumlah even pariwisata*																			
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya	30	4.033,03	30	19.610,32	5	692,86	10	2.322,25	7	3.700,58	8	12.644,86	30	19.360,54	30,00	19.360,54			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan even penggiat seni	12	4.033,03	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pariwisata
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah media promosi pariwisata*																			
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	10	50.491,99	10	7.390,70	2	538,35	4	942,33	4	3.040,42	-	2.819,53	10	7.340,64	10,00	7.340,64			Dinas Pariwisata
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	6	50.491,99	6	5.218,42	1	37,59	1	895,37	2	1.748,84	2	2.431,51	6	5.113,30	6,00	5.113,30			Dinas Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					-		-													
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Presentase peningkatan penyuluhan pertanian**	**45,87**	**4.629,22**	**44,51**	**706,97**	**29,52**	**101,47**	**41,35**	**244,62**	**41,35**	**209,14**	**45,33**	**109,03**	**45,33**	**664,26**	**45,33**	**664,26**	**98,82**	**14,35**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-																			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	48	2.139,20	12	302,40	-	74,64	-	96,66	-	87,09	12	38,75	12	297,14	12,00	297,14			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1.542	2.490,00	94	404,57	-	26,83	-	147,96	47	122,05	47	70,28	94	367,12	94,00	367,12			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura**	**0,24**	**1.590,50**	**0,42**	**250,00**	-	**23,92**	-	**50,55**	-	**95,53**	**-**	**78,12**	**-**	**248,12**	**-**	**248,12**	**0,00**	**15,60**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-																			
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan seluas 355 Ha	939	1.590,50	355	250,00	-	23,92	60,00	50,55	145	95,53	150	78,12	355	248,12	355,00	248,12			Dinas Pertanian dan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					-		-													
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi**	**99,70**	**2.687,67**	**99,32**	**803,35**	-	**13,17**	**89,08**	**321,51**	**85,09**	**134,05**	**102,28**	**292,73**	**102,28**	**761,47**	**102,28**	**761,47**	**102,59**	**28,33**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan Lainnya	16,00	568,00	4,00	139,97	-	8,37	-	6,64	0,00	115,53	4,00	8,20	4	138,74	4,00	138,74			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													-							
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	16	2.119,67	1	663,385	0	4,80	-	314,87	-	18,53	1	284,54	1	622,73	1,00	622,73			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani**	**32,00**	**9.002,64**	**50,00**	**3.547,62**	**30,00**	**51,85**	**30,00**	**277,06**	**30,00**	**2.060,05**	**30,00**	**1.097,04**	**30,00**	**3.486,00**	**30,00**	**3.486,00**	**93,75**	**38,72**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Presentase pelestarian lahan surjan	**9,43**		**3,77**		**1,89**		**5,66**		**5,66**		**5,66**		**5,66**		**5,66**		**60,02**		
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-							-												
		Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	4	1.200,00	3	811,13	-	9,74	-	54,86	-	141,11	3	581,14	3	786,85	3,00	786,85			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	-	-	1	792,68	-	9,09	-	57,97	-	290,41	1	410,11	1	767,57	1,00	767,57			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																				
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			1	1.943,816	-	33,02	-	164,23	-	1.628,53	1	105,79	1	1.931,57	1,00	1.931,57			
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	**Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan**	**96,59**	**390,00**	**95,45**	**50,08**	**100,00**	**5,44**	**100,00**	**4,79**	**100,00**	**4,37**	**100,00**	**30,68**	**100,00**	**45,28**	**100,00**	**45,28**	**103,53**	**11,61**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	**47,43**		**31,88**		**30,19**		**30,19**		**33,83**		**36,91**		**36,91**		**36,91**		**77,82**		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	16	390,00	4	50,08	-	5,44	-	4,79	-	4,37	4	30,68	4	45,28	4,00	45,28			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan**	**95,00**	**225,60**	**87,50**	**50,00**	**100,00**	**2,50**	**92,36**	**22,98**	**93,44**	**3,48**	**94,33**	**15,75**	**94,33**	**44,70**	**94,33**	**44,70**	**99,29**	**19,81**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	4	225,60	1	50,00	-	2,50	-	22,98	-	3,48	1	15,75	1	44,70	1,00	44,70			Dinas Pertanian dan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					-		-													
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**61.176,73**	**100,00**	**13.216,35**	**34,52**	**2.588,75**	**61,90**	**4.927,49**	**91,67**	**1.877,01**	**100,00**	**3.005,64**	**100,00**	**12.398,88**	**100,00**	**12.398,88**	**100,00**	**20,27**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	12	189,38	3	44,01	3	41,73	3	42,84	3	45,77	12	174,35	12,00	174,35			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	12	572,78	3	131,74	3	175,03	3	132,86	3	132,81	12	572,44	12,00	572,44			Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	-	12	11.432,52	3	2.275,70	3	4.546,94	-	1.537,92	6	2.342,06	12	10.702,61	12,00	10.702,61			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adimistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	-	12	86,10	3	21,08	3	21,53	3	21,53	3	21,30	12	85,43	12,00	85,43			Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 13 laporan	56	-	13	13,66	3	1,70	3	5,90	3	-	4	5,90	13	13,51	13,00	13,51			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	-	1	38,37	1	13,88	-	6,17	-	7,77	-	7,47	1	35,29	1,00	35,29			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	-	12	85,00	3	15,58	3	11,01	3	24,20	3	33,30	12	84,08	12,00	84,08			Dinas Pertanian dan Pangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	-	2	16,00	-	4,95	-	3,32	2	7,27	-	0,00	2	15,54	2,00	15,54			Dinas Pertanian dan Pangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan valuasi Kinerja Perangkat Daerah	92	-	22	101,34	9	24,21	3	30,59	6	16,15	4	14,56	22	85,51	22,00	85,51			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	-	5	40,67	5	8,55	5	1,80	-	-	-	28,37	10	38,72	10,00	38,72			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	572	-	141	307,21	24	36,86	39	52,07	39	70,88	39	117,19	141	277,00	141,00	277,00			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	-	5	249,63	-	-	4	15,88	-	-	1	232,54	5	248,41	5,00	248,41			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	-	2	75,00	-	10,08	2	14,65	-	15,59	-	17,18	2	57,49	2,00	57,49			Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	-	12	3,68	3	0,42	2	0,87	4	-	3	2,21	12	3,50	12,00	3,50			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	-	10	5,00	-	-	-	0,00	-	-	10	5,00	10	5,00	10,00	5,00			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian**	**14,00**	**10.221,72**	**13,44**	**5.405,90**	**13,65**	**142,53**	**13,85**	**2.137,60**	**13,85**	**987,98**	**13,85**	**1.888,34**	**13,85**	**5.156,45**	**13,85**	**5.156,45**	**98,93**	**50,45**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	-																			
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	8	2.505,00	2	741,13	-	30,27	-	570,82	-	38,91	2	98,39	2	738,39	2,00	738,39			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	-																			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	16	-	5	1.150,01	-	36,08	2	655,34	2	210,24	1	237,01	5	1.138,68	5,00	1.138,68			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	-	7	2.261,46	-	20,48	1	907,25	6	646,25	-	674,39	7	2.248,38	7,00	2.248,38			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	-	2	1.253,30	-	55,70	-	4,18	-	92,58	2	878,55	2	1.031,00	2,00	1.031,00			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	-	-	-		-	-		-	-			-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	2	-	-	-		-	-		-	-			-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan sertaSarana Pendukungnya yang Dibangun,Direhabilitasidan Dipelihara	3	-	-	-		-	-		-	-			-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Populasi ternak**	**214.105**	**10.222,00**	**182.634**	**4.294,68**	**11.480,00**	**176,15**	**11.284,00**	**991,55**	**117,05**	**1.324,36**	**170,19**	**1.571,73**	**170,19**	**4.063,79**	**170,19**	**4.063,79**	**0,08**	**39,76**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			produktivitas tanaman pangan	**53,51**		**50,55**		**49,75**		**47,70**		**47,81**		**50,71**		**50,71**		**50,71**		**94,77**		
			produktivitas tanaman perkebunan	**54,91**		**54,08**		**196,18**		**196,18**		**198,74**		**56,22**		**56,22**		**56,22**		**102,39**		
			produktivitas tanaman hortikultura	**131,17**		**130,57**		**90,16**		**118,55**		**130,84**		**139,12**		**139,12**		**139,12**		**106,06**		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,56**		**100,56**		**100,56**		**100,56**		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-																			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi	-	-	1	130,00	-	0,52	-	58,00	-	60,56	1	10,63	1	129,71	1,00	129,71			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	8	-	2	848,71	-	6,95	-	471,85	-	5,41	2	297,75	2	781,96	2,00	781,96			
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-																			
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	1.750	-	321	1.395,86	-	30,97	-	325,13	201	542,84	120	434,05	321	1.332,98	321,00	1.332,98			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	-	-	1	1.249,52	-	44,87	-	75,14	-	297,65	1	735,77	1	1.153,44	1,00	1.153,44			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	-	-	4	670,59	-	92,84	-	61,43	-	417,90	4	93,53	4	665,71	4,00	665,71			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Presentase kesehatan ternak dan kesmavet**	**5,22**	**1.645,89**	**6,01**	**2.956,19**	**2,14**	**114,18**	**2,93**	**1.589,15**	**2,95**	**523,37**	**0,19**	**438,70**	**0,19**	**2.665,39**	**0,19**	**2.665,39**	**3,64**	**161,94**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	**73,11**		**70,67**		**91,23**		**91,88**		**92,33**		**92,19**		**92,19**		**92,19**		**126,10**		
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	**5.040,00**		**4.320,00**		**1.292,00**		**2.679,00**		**4.234,00**		**9,73**		**9,73**		**9,73**		**0,19**		
			Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	**100,00**		**83,84**		**80,35**		**82,97**		**82,97**		**84,72**		**84,72**		**84,72**		**84,72**		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-																			
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16	-	3	200,00	-	4,66	-	12,20	-	129,85	3	3,31	3	150,02	3,00	150,02			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan	12	-	3	60,00	-	6,83	1	32,48	1	17,19	1	1,42	3	57,92	3,00	57,92			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	16	-	4	546,58	1	4,58	1	402,94	1	16,55	1	65,47	4	489,53	4,00	489,53			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menula	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	4	-	1	100,00	-	3,73	-	62,23	-	4,56	1	3,69	1	74,21	1,00	74,21			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DAK Non Fisik)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	-	12	1.819,91	1	67,00	3	996,39	4	318,25	4	315,14	12	1.696,78	12,00	1.696,78			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Penerapan Persyaratan Teknis untuk pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	16	-	4	132,70	-	23,05	1	30,83	1	32,02	2	44,52	4	130,42	4,00	130,42			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	-	1	97,00	-	4,33		52,09	-	4,95	1	5,15	1	66,52	1,00	66,52			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh**	**10,19**	**7.115,76**	**25,00**	**4.113,24**	-	**116,40**	-	**256,33**	-	**1.826,31**		**1.687,55**	**-**	**3.886,60**	**-**	**3.886,60**	**0,00**	**54,62**	**Dinas Pertanian dan Pangan**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																			
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4,00	7.115,76	1	4.113,24	-	116,40	-	256,33	-	1.826,31	1	1.687,55	1	3.886,60	1,00	3.886,60			Dinas Pertanian dan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																				
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**24.834,99**	**100,00**	**5.235,19**	**34,52**	**963,86**	**61,90**	**1.399,30**	**91,67**	**1.347,51**	**100,00**	**1.009,80**	**100,00**	**4.720,46**	**100,00**	**4.720,46**	**100,00**	**19,01**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	48	742,56	4	160,00	-	37,73	-	37,20	-	34,38	4	45,11	4	154,42	4,00	154,42			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	835,38	2	152,50	-	25,26	-	45,86	-	35,56	2	45,79	2	152,49	2,00	152,49			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720	18.462,35	12	4.265,77	3	816,07	3	1.096,56	-	1.057,37	6	811,63	12	3.781,62	12,00	3.781,62			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	393,10	12	93,18	3	19,34	3	19,80	3	19,65	3	19,23	12	78,02	12,00	78,02			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	51,05	19	14,90	3	1,74	4	2,68	3	5,25	9	4,81	19	14,48	19,00	14,48			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	106,74	5	22,75	2	8,26	1	4,32	1	6,07	1	3,69	5	22,34	5,00	22,34			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	324,87	2	60,09	-	5,60	-	18,31	-	14,02	2	19,57	2	57,49	2,00	57,49			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,63	2	6,60	-	2,27	-	2,01	2	1,45		0,43	2	6,15	2,00	6,15			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	37,13	21	8,00	8	1,34	4	1,45	5	1,54		3,24	17	7,56	17,00	7,56			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	2.506,14	11	137,62	-	-	11	113,51	-	-	3	23,04	14	136,55	14,00	136,55			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	54,50	1	54,50	-	-	-	7,06	1	46,90	-	0,00	1	53,96	1,00	53,96			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	116,03	24	25,72	7	9,97	7	5,15	8	8,27	2	2,32	24	25,72	24,00	25,72			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	371,28	2	52,24	-	-	-	4,16	2	46,38	-	-	2	50,54	2,00	50,54			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	649,74	25	147,81	5	36,29	4	31,72	10	47,85	6	30,95	25	146,81	25,00	146,81			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pegawai yang dinilai angka kreditnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	232,05	10	33,51	-	-	10	9,51	-	22,80	-	-	10	32,31	10,00	32,31			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan**	**41,67**	**11.359,59**	**25,93**	**7.188,22**	**22,22**	**275,27**	**22,22**	**380,65**	**22,22**	**1.268,31**	**26,92**	**1.597,88**	**26,92**	**3.522,13**	**26,92**	**3.522,13**	**64,60**	**31,01**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																				
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DokumenHasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangansi	15.904	549,45	3.826	155,13	900	40,03	900	28,88	900	21,68	1.908	61,17	4.608	151,76	4.608,00	151,76			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.802	404,00	2.588	147,38	525	39,60	695	21,20	644	21,23	724	60,38	2.588	142,41	2.588,00	142,41			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																				
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	5.876,15	5	5.762,10	-	17,99	-	68,76	2	977,69	3	1.062,51	5	2.126,95	5,00	2.126,95			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													-							
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	10	4.530,00	10	1.123,60	2	177,66	3	261,81	3	247,71	2	413,82	10	1.101,00	10,00	1.101,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	**Presentase Tabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**15,20**	**1.995,53**	**8,80**	**1.423,55**	**4,86**	**854,87**	**3,78**	**256,93**	**5,13**	**56,68**	**7,79**	**242,86**	**7,79**	**1.411,34**	**7,79**	**1.411,34**	**51,25**	**70,72**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Gula Pasir	**32,20**		**18,64**		**0,32**		**0,49**		**1,39**		**8,34**		**8,34**		**8,34**		**25,90**		
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Minyak Goreng	**7,57**		**4,38**		**0,48**		**0,46**		**2,50**		**3,24**		**3,24**		**3,24**		**42,82**		
		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota																				
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	144,00	464,10	26	916,46	6	834,92	7,00	26,49	6,00	15,08	7	34,11	26	910,60	26,00	910,60			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12,00	1.531,53	3	507,09	-	19,96	-	230,45	-	41,60	3	208,74	3	500,74	3,00	500,74			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	**Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah)**	**352,83**	**2.052,93**	**190,12**	**524,90**	**47.531,21**	**126,40**	**86.666,12**	**77,91**	**142.593,62**	**92,22**	**236.113.493.009**	**214,21**	**236.113.493.009**	**510,74**	**236.113.493.009**	**510,74**	########	**24,88**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan)*																			
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha Ekspor Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	120	*2.052,94*	90	524,903	-	126,40	50	77,91	20	92,22	20	214,21	90	510,74	90,00	510,74			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	**Presentase standardisasi dan perlindungan konsumen**	**95,11**	**389,77**	**62,41**	**102,94**	**19,92**	**27,95**	**7,96**	**36,34**	**43,35**	**19,95**	**56,51**	**18,50**	**56,51**	**102,74**	**56,51**	**102,74**	**59,42**	**26,36**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																				
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.700	389,77	4.915	102,94	2.151	27,95	860	36,34	1.663	19,95	1.420	18,50	6.094	102,74	6.094,00	102,74			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																				
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**jumlah industri baru tahun ke n**	**175,00**	**13.281,68**	**115,00**	**4.404,54**	**27,00**	**415,95**	**59,00**	**567,03**	**89,00**	**1.724,52**	**115**	**1.523,94**	**115,00**	**4.231,45**	**115,00**	**4.231,45**	**65,71**	**31,86**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
			persentase sentra industri aktif	**52,94**		**35,29**		**-**				**47,06**		**47,06**		**47,06**						
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	24	928,20	6	344,42	1	154,48	1	93,93	3	72,89	1	19,62	6	340,93	6,00	340,93			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	96	11.402,09	24	3.831,23	7	205,89	5	429,20	5	1.560,59	7	1.500,24	24	3.695,91	24,00	3.695,91			Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	76	951,41	19	228,89	6	55,58	4	43,90	8	91,05		4,08	18	194,61	18,00	194,61			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya**	**100,00**	**250,00**	**71,43**	**102,87**	**-**	**-**	**-**	**3,84**	**71,43**	**0,84**	**71,43**	**97,96**	**71,43**	**102,64**	**71,43**	**102,64**	**71,43**	**41,05**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																				
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	70	250,00	50	102,87	-	-	-	3,84	50	0,84	-	97,96	50	102,64	50,00	102,64			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**68.464,45**	**100,00**	**20.587,34**	**34,52**	**2.835,66**	**61,90**	**4.530,85**	**91,67**	**4.408,56**	**100,00**	**7.040,64**	**100,00**	**18.815,71**	**100,00**	**18.815,71**	**100,00**	**27,48**	**Sekretariat Daerah**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	2.706,71	12	583,84	3	149,81	3	143,88	3	120,69	3	164,62	12	578,99	12,00	578,99			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	5.286,55	12	1.353,92	3	91,56	3	449,39	3	378,01	3	426,54	12	1.345,50	12,00	1.345,50			Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	1.190,50	9	372,11	-	93,37	-	76,41	-	93,77	9	79,28	9	342,84	9,00	342,84			Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	2.860,20	12	954,63	3	142,88	3	207,14	3	110,29	3	335,07	12	795,38	12,00	795,38			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	472,77	12	52,92	3	11,34		15,12	-	15,12	-	11,34	3	52,92	3,00	52,92			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	25,77	4	6,00	-	-	-	-	2	2,64	2	2,64	4	5,28	4,00	5,28			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	249,16	8	52,95	-	0,27	8	1,44	-	48,01	-	1,00	8	50,72	8,00	50,72			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	2.400,00	12	600,00	3	147,63		181,06	-	77,31	-	193,90	3	599,90	3,00	599,90			Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah6	10	58,41	2	13,95	-	5,99	-	4,88	2	2,15	-	0,69	2	13,71	2,00	13,71			Sekretariat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	144,41	21	37,52	6	9,88	6	9,41	4	9,57	5	8,26	21	37,12	21,00	37,12			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		544	38.278,31	12	9.138,57	3	1.721,49		2.324,21	-	2.289,95	9	1.688,50	12	8.024,15	12,00	8.024,15			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	663,84	12	172,35	3	35,75	3	47,50	3	38,80	3	44,03	12	166,08	12,00	166,08			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	42,29	14	11,00	3	2,97	4	2,95	3	-	4	4,87	14	10,79	14,00	10,79			Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atu Bangunan Lainnya yang Disediakan	198	*700,68*	78	2.937,67	-	-	32,00	214,53	10	7,85	36	2.676,85	78	2.899,23	78,00	2.899,23			Sekretariat Daerah
			Hibah barang untuk kejaksaan	-	-	176	-	-	-	-	-											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.761	845,85	411	281,09	102	57,87	102	48,14	102	84,26	105	67,19	411	257,46	411,00	257,46			Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangnan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	4.703,76	65	1.421,37	15	5,84	15,00	148,36	15	616,59	20	569,54	65	1.340,33	65,00	1.340,33			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlha Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	3.383,39	84	952,03	21	156,02	21,00	194,75	21	188,85	21	259,18	84	798,79	84,00	798,79			Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	25,47	2	7,00	-	-	-	-	-	-	2	6,40	2	6,40	2,00	6,40			Sekretariat Daerah
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	21,15	2	7,36	-	4,61	-	2,49	-	-	2	-	2	7,10	2,00	7,10			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi*																			
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48,00	2.542,71	12	1.224,396	3	137,34	3	375,94	3	200,49	3	379,15	12	1.092,93	12,00	1.092,93			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan												-							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		12	592,09	3	132,13	-	25,32	3	26,83	-	52,98	-	25,32	3	130,45	3,00	130,45			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	152,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	42,29	-	14,25	-	0,23	2	0,91	-	12,67		-	2	13,81	2,00	13,81			Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*																			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	329,98	2	56,44	-	9,04	-	14,75	-	-	2	31,21	2	55,00	2,00	55,00			Sekretariat Daerah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	398,03	7	112,43	1	12,88	1	29,48	-	22,75	5	39,05	7	104,17	7,00	104,17			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	347,50	5	91,39	1	13,55	-	11,28	1	35,81	3	26,01	5	86,65	5,00	86,65			Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100,00**	**16.875,85**	**92,43**	**4.727,90**	**46,85**	**581,30**	**65,11**	**1.193,40**	**67,92**	**960,25**	**105,82**	**1.773,91**	**105,82**	**4.508,85**	**105,82**	**4.508,85**	**105,82**	**26,72**	**Sekretariat Daerah**
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum*																			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.890	516,33	465	133,79	140	13,14	192	39,53	310	37,19	-	36,28	642	126,14	642,00	126,14			Sekretariat Daerah
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.910	600,34	470	171,17	3	9,74	333	106,08	141	27,19	204	25,86	681	168,88	681,00	168,88			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	2.167,95	8	823,73	1	89,72	5	182,32	1	68,70	4	454,68	11	795,43	11,00	795,43			Sekretariat Daerah
		Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlha Dokumen Tata Pemerintahan*												-							
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	21	850,33	5	240,77	4	43,88	1	141,45	-	10,50	-	36,48	5	232,30	5,00	232,30			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16	907,68	5	196,90	-	6,55	-	23,02	1	3,72	4	161,87	5	195,15	5,00	195,15			Sekretariat Daerah
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	1.076,19	3	282,27	-	15,54	-	15,20	-	30,34	3	210,71	3	271,79	3,00	271,79			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra*												-							
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44	5.358,07	11	1.289,10	-	242,69	1	240,29	2	431,27	8	292,19	11	1.206,45	11,00	1.206,45			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20	507,30	5	121,33	-	18,78	1	24,68	-	31,62	-	41,89	1	116,97	1,00	116,97			Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	40	4.718,60	10	1.404,15	-	83,82		417,69	2	317,24	8	512,58	10	1.331,32	10,00	1.331,32			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Fasilitasi Kerja Sama*												-							
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	*173,64*	4	64,71	3	57,43	-	3,15	1	2,48	-	1,37	4	64,43	4,00	64,43			Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**	**100,00**	**7.189,53**	**100,00**	**1.545,14**	**8,57**	**137,54**	**20,05**	**443,38**	**33,20**	**304,79**	**108,33**	**617,93**	**108,33**	**1.503,63**	**108,33**	**1.503,63**	**108,33**	**20,91**	**Sekretariat Daerah**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa*																			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	590	2.688,31	145	608,04	81	59,21	40	245,76	12	110,87	-	188,14	133	603,98	133,00	603,98			Sekretariat Daerah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	960	382,75	240	88,04	50	15,82	111	24,56	53	25,62	26	19,67	240	85,68	240,00	85,68			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16	318,98	5	108,18	-	4,32	-	28,21	2	12,15	3	60,25	5	104,94	5,00	104,94			Sekretariat Daerah
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.*																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	20	425,31	6	84,89	-	4,33	-	16,15	-	19,50	6	36,90	6	76,88	6,00	76,88			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8	425,31	2	115,00	-	6,25	-	34,55	-	48,76	2	19,58	2	109,14	2,00	109,14			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8	425,31	2	33,61	-	3,47		3,87	-	3,40	2	17,39	2	28,13	2,00	28,13			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijkan Perekonomian*																			
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48	596,25	12	168,21	-	18,95		49,65	5	-	7	96,33	12	164,93	12,00	164,93			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	620,48	5	136,7	-	5,44	1	3,53	3	11,82	1	112,69	5	133,48	5,00	133,48			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*																			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Failitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	425,27	3	51,30	-	8,53	-	11,65	1	8,61	2	20,96	3	49,75	3,00	49,75			Sekretariat Daerah
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	450,84	6	85,95	-	4,86	1	17,50	2	29,68	3	32,43	6	84,47	6,00	84,47			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	430,74	4	65,24	-	6,35	-	7,94	1	34,37	3	13,59	4	62,26	4,00	62,26			Sekretariat Daerah
		Keistimewaan Yogyakarta																				
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**92,00**	**4.793,13**	**91,75**	**763,09**	**0,00**	**109,88**	**33,33**	**183,60**	**33,33**	**264,14**	**92,68**	**136,54**	**92,68**	**694,16**	**92,68**	**694,16**	**100,74**	**14,48**	**Sekretariat Daerah**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	1.661,60	14	272,88	-	27,46	-	74,60	-	182,51	14	(49,40)	14	235,18	14,00	235,18			Sekretariat Daerah
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	1.200,00	1	101,29	-	19,45	-	16,37	-	71,77	1	(7,37)	1	100,22	1,00	100,22			Sekretariat Daerah
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8	731,53	2	160	-	18,40	-	55,50	-	-	2	73,96	2	147,86	2,00	147,86			Sekretariat Daerah
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan*																			
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20,00	1.200,00	5	228,92	1	44,57	-	37,12	-	9,86		119,35	1	210,90	1,00	210,90			Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**95.488,51**	**100,00**	**24.746,24**	**34,52**	**5.449,72**	**61,90**	**6.230,87**	**91,67**	**6.419,64**	**100,00**	**6.352,17**	**100,00**	**24.452,41**	**100,00**	**24.452,41**	**100,00**	**25,61**	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	858,59	12	183,11	3	44,78	3	41,52	3	37,72	3	43,83	12	167,85	12,00	167,85			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	1.554,74	12	342,71	3	78,88	3	70,65	3	103,87	3	79,89	12	333,29	12,00	333,29			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12	59,14	3	7,27	3	5,22	3	26,65	3	18,57	12	57,71	12,00	57,71			Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	120	8.817,90	12	1.973,762	3	398,67	3	544,57	-	554,14	6	401,44	12	1.898,81	12,00	1.898,81			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	278,46	4	51,06	1	12,23	1	8,15	1	18,15	1	12,37	4	50,90	4,00	50,90			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	37,13	14	8,00	4	-	3	3,34	4	0,14	3	4,48	14	7,95	14,00	7,95			Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	371,28	12	79,97	3	16,27	3	19,14	3	3,92	3	38,67	12	78,00	12,00	78,00			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	116,03	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	58,01	2	9,00	-	-	-	4,00	2	0,55	-	4,36	2	8,91	2,00	8,91			Sekretariat DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	32,49	21	7,00	8	-	4	-	5	0,66	4	6,28	21	6,94	21,00	6,94			Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20.200	*3.712,80*	748	453,70	500	107,45	-	-	-	-	248	338,34	748	445,79	748,00	445,79			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	280	2.784,60	77	122,32	18	28,97	18	19,43	23	41,91	18	24,03	77	114,34	77,00	114,34			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	139,23	1	830,12	-	151,44	-	98,75	-	301,14	1	258,05	1	809,38	1,00	809,38			Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	100	116,03	25	898,80	9	205,72	5	158,69	6	294,96	5	222,77	25	882,14	25,00	882,14			Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-																			
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	32,49	1	3,25	1	1,66	-	0,56	-	0,72	-	0,00	1	2,94	1,00	2,94			Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	243,67	12	5,04	6	0,84	2	0,84	2	-	2	0,42	12	2,10	12,00	2,10			Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																				
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	160	85.858,50	12	19.207,25	3	4.326,10	3	5.014,70	3	5.014,51	-	4.832,36	9	19.187,67	9,00	19.187,67			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	-	80	191,28	-	6,99	80	133,80	-	1,94	-	(0,00)	80	142,73	80,00	142,73			Sekretariat DPRD
		Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160	185,64	40	37,00	-	-	-	0,00	-	-	40	3,29	40	3,29	40,00	3,29			Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	-																			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40	2.181,27	6	283,72	3	62,44	-	107,52	3	18,66	-	63,05	6	251,67	6,00	251,67			Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	**Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**100,00**	**79.462,63**	**100,00**	**24.197,13**	**5,00**	**4.764,91**	**27,95**	**4.697,77**	**72,14**	**4.167,01**	**100,00**	**8.057,55**	**72,14**	**21.687,24**	**72,14**	**21.687,24**	**72,14**	**27,29**	**Sekretariat DPRD**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-																			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	11.059,37	6	1.712,38	1	-	1	608,92	1	465,72	3	415,85	6	1.490,49	6,00	1.490,49			Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32	8.811,52	3	393,18	-	104,60	-	128,68	1	11,53	2	115,37	3	360,19	3,00	360,19			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	2.306,58	5	1.008,41	-	-	2	399,23	-	61,27	3	521,63	5	982,12	5,00	982,12			Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32	6.961,50	11	3.975,32	2	1.176,68	3	1.074,08	3	669,93	3	986,74	11	3.907,42	11,00	3.907,42			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	-												-							
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52	2.312,13	14	454,56	3	112,42	4	183,85	3	5,16	4	119,31	14	420,74	14,00	420,74			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	8.679,22	28	2.365,74	6	406,39	6	287,23	9	483,24	7	566,91	28	1.743,77	28,00	1.743,77			Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	220	4.391,13	104	1.680,30	32	269,62	24	80,45	19	498,11	29	656,06	104	1.504,23	104,00	1.504,23			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20	8.261,00	8	1.438,25	3	292,81	-	115,19	7	5,16	-	773,57	10	1.186,73	10,00	1.186,73			Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	-												-							
		Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas/Bimtek/ Workshop/Lokakarya bagiPimpinan dan anggota DPRD	24	8.311,12	6	2.343,36	2	492,22	1	302,69	-	-	3	1.340,73	6	2.135,64	6,00	2.135,64			Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	208	3.399,77	398	1.471,36	3	421,96	152	218,74		316,66	243	490,07	398	1.447,43	398,00	1.447,43			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-																			
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24	11.208,34	6	2.082,47	-	207,19	1	543,38	3	626,55	2	514,66	6	1.891,77	6,00	1.891,77			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-																			
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	2.997,67	1	267,22	-	191,14	1	7,15	-	-	-	-	1	198,29	1,00	198,29			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	32	9.492,08	12	2.554,08	-	664,68	4	273,10	-	612,30	8	719,35	12	2.269,43	12,00	2.269,43			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	1.740,00	1	274,52	-	-	1	200,79	-	-	-	1,57	1	202,36	1,00	202,36			Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-												-							

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	20	3.786,35	5	868,89	1	9,59	1	274,30	1	261,18	2	269,76	5	814,83	5,00	814,83			Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																				
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1.150,73	4	121,46	1	49,19	1	0,00	1	0,05	2	55,63	5	104,88	5,00	104,88			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-												-							
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	16	3.773,20	8	1.185,63	-	366,43	-	0,00	-	150,16	8	510,34	8	1.026,92	8,00	1.026,92			Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**6.869,03**	**100,00**	**1.670,97**	**34,52**	**351,52**	**61,90**	**479,42**	**91,67**	**448,22**	**100,00**	**363,64**	**100,00**	**1.642,81**	**100,00**	**1.642,81**	**100,00**	**23,92**	**Kapanewon Temon**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	127,83	12	30,83	3	7,43	3	7,55	3	7,63	3	7,63	12	30,23	12,00	30,23			Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	467,99	12	83,71	3	19,50	3	25,56	3	19,26	3	19,26	12	83,58	12,00	83,58			Kapanewon Temon
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.338,68	12	1.370,75	3	284,45	3	393,20	-	387,14	6	279,89	12	1.344,68	12,00	1.344,68			Kapanewon Temon
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,35	4	36,75	1	9,75	1	9,75	1	8,63	1	8,63	4	36,75	4,00	36,75			Kapanewon Temon
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	18,58	14	4,00	4	1,50	3	0,94	3	0,94	4	0,59	14	3,96	14,00	3,96			Kapanewon Temon
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	81,14	5	18,76	2	6,59	1	5,54	1	3,45	1	3,14	5	18,72	5,00	18,72			Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	116,48	12	21,06	3	5,27	3	5,27	3	5,26	3	5,25	12	21,05	12,00	21,05			Kapanewon Temon
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22,64	2	4,90	1	2,09	-	0,89	1	0,76	-	1,06	2	4,81	2,00	4,81			Kapanewon Temon
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,53	21	2,80	6	1,25	6	0,50	5	0,49	4	0,49	21	2,73	21,00	2,73			Kapanewon Temon
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13	110,87	4	28,94	-	-	2	11,75	-	-	2	17,17	4	28,92	4,00	28,92			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	362,98	10	53,72	3	11,19	3	12,99	3	10,42	1	18,03	10	52,63	10,00	52,63			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliasi	7	49,89	1	2,35	-	-	-	-	1	2,35	-	-	1	2,35	1,00	2,35			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliasi	92	55,13	26	12,40	6	2,50	8	5,50	8	1,90	4	2,50	26	12,40	26,00	12,40			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**205,20**	**100,00**	**42,09**	**19,36**	**13,87**	**35,18**	**9,19**	**49,45**	**12,83**	**61,57**	**5,79**	**61,57**	**41,67**	**61,57**	**41,67**	**61,57**	**20,31**	**Kapanewon Temon**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28	70,55	8	20,22	3	5,59	1	3,31	3	7,37	1	3,91	8	20,18	8,00	20,18			Kapanewon Temon
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	97,75	8	13,84	3	6,65	3	4,02	1	1,65	1	1,16	8	13,48	8,00	13,48			Kapanewon Temon
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	*36,90*	12	8,02	3	1,63	3	1,85	3	3,81	3	0,72	12	8,01	12,00	8,01			Kapanewon Temon
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**82,72**	**100,00**	**19,50**	**40,00**	**4,31**	**40,00**	**6,27**	**40,00**	**4,47**	**100,00**	**4,40**	**100,00**	**19,45**	**100,00**	**19,45**	**100,00**	**23,52**	**Kapanewon Temon**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*22,00*	*82,72*	6	19,50	1	4,31	2	6,27	1	4,47	2	4,40	6	19,45	6,00	19,45			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**246,61**	**92,11**	**58,46**	**92,11**	**10,59**	**92,11**	**15,38**	**92,11**	**19,05**	**92,11**	**13,39**	**92,11**	**58,42**	**92,11**	**58,42**	**92,11**	**23,69**	**Kapanewon Temon**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	69,05	30	16,16	-	0,82	15	1,85	15	9,49	-	3,99	30	16,15	30,00	16,15			Kapanewon Temon
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	177,56	12	42,30	3	9,77	3	13,53	3	9,56	3	9,40	12	42,27	12,00	42,27			Kapanewon Temon
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**118,43**	**100,00**	**30,30**	**50,00**	**16,71**	**50,00**	**7,21**	**50,00**	**2,70**	**100,00**	**3,52**	**100,00**	**30,14**	**100,00**	**30,14**	**100,00**	**25,45**	**Kapanewon Temon**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*32*	*118,43*	7	30,30	2	16,71	2	7,21	2	2,70	1	3,52	7	30,14	7,00	30,14			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**15,59**	**98,94**	**19,16**	**100,00**	**-**	**100,00**	**34,75**	**100,00**	**34,75**	**100,00**	**14,56**	**Kapanewon Temon**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																				
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun*																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	*8*	*238,74*	2	35,00	1	-	-	15,59	-	19,16	1	-	2	34,75	2,00	34,75			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**-**	**33,33**	**-**	**66,67**	**99,90**	**100,00**	**-**	**100,00**	**99,90**	**100,00**	**99,90**	**100,00**	**23,79**	**Kapanewon Temon**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	100,00	-	-	-	-	1	99,90	-	-	1	99,90	1,00	99,90			Kapanewon Temon
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**10.628,32**	**100,00**	**2.475,48**	**34,52**	**543,79**	**61,90**	**682,84**	**91,67**	**603,05**	**100,00**	**533,52**	**100,00**	**2.363,21**	**100,00**	**2.363,21**	**100,00**	**22,24**	**Kapanewon Wates**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	338,00	13	83,46	4	36,48	3	11,34	3	11,58	3	23,44	13	82,83	13,00	82,83			Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656,15	12	139,51	3	32,30	3	42,60	3	32,30	3	32,30	12	139,51	12,00	139,51			Kapanewon Wates
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.736	8.183,66	12	1.879,97	3	377,69	3	504,25	-	507,53	6	382,38	12	1.771,84	12,00	1.771,84			Kapanewon Wates
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211,60	12	64,90	3	15,94	3	16,19	3	16,13	3	16,19	12	64,45	12,00	64,45			Kapanewon Wates
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	17,60	14	4,00	3	0,83	3	0,71	4	0,42	4	2,04	14	4,00	14,00	4,00			Kapanewon Wates
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70,00	4	15,28	-	4,28	-	5,33	-	2,07	4	3,52	4	15,20	4,00	15,20			Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152,08	12	36,77	3	8,55	3	7,11	3	12,49	3	8,54	12	36,70	12,00	36,70			Kapanewon Wates
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,00	2	5,28	-	2,74	-	2,17	2	0,36	-	0,00	2	5,27	2,00	5,27			Kapanewon Wates
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,68	21	4,00	3	0,50	4	0,48	4	0,48	10	2,53	21	4,00	21,00	4,00			Kapanewon Wates
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87	*534,46*	20	137,71	8	42,87	6	69,11	-	1,30	6	23,70	20	136,97	20,00	136,97			Kapanewon Wates
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*												-							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	247,80	14	59,02	4	12,09	2	18,01	3	13,44	5	13,47	14	57,02	14,00	57,02			Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55,00	2	20,60	-	-	-	0,00	-	-	2	20,59	2	20,59	2,00	20,59			Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	244	115,30	61	24,99	32	9,51	10	5,54	10	4,95	9	4,82	61	24,83	61,00	24,83			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**176,16**	**100,00**	**45,95**	**14,12**	**12,01**	**15,71**	**10,42**	**45,49**	**13,07**	**61,57**	**10,13**	**61,57**	**45,64**	**61,57**	**45,64**	**61,57**	**25,91**	**Kapanewon Wates**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	44,31	4	10,64	-	0,97	-	1,39	-	6,08	4	2,13	4	10,56	4,00	10,56			Kapanewon Wates
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	97,92	8	27,18	-	7,92	-	8,18	-	4,78	8	6,13	8	27,01	8,00	27,01			Kapanewon Wates
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*48*	*33,93*	12	8,14	3	3,13	3	0,86	3	2,21	3	1,88	12	8,07	12,00	8,07			Kapanewon Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**4.376,60**	**100,00**	**1.032,11**	**50,00**	**95,13**	**-**	**249,87**	**50,00**	**585,51**	**100,00**	**100,61**	**100,00**	**1.031,12**	**100,00**	**1.031,12**	**100,00**	**23,56**	**Kapanewon Wates**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	36	151,06	10	35,91	-	14,29	5	6,02	1	5,37	4	9,92	10	35,60	10,00	35,60			Kapanewon Wates
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*												-							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2.797,97	17	676,07	-	4,76	-	150,44	17	512,96	-	7,55	17	675,70	17,00	675,70			Kapanewon Wates
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	1.267,55	11	281,30	4	57,65	2	84,95	3	59,62	2	78,98	11	281,20	11,00	281,20			Kapanewon Wates
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160,01	12	38,82	-	18,43	6	8,46	3	7,57	3	4,16	12	38,63	12,00	38,63			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**2.820,36**	**92,11**	**663,67**	**92,11**	**171,91**	**92,11**	**177,64**	**92,11**	**172,31**	**100,00**	**141,53**	**100,00**	**663,39**	**100,00**	**663,39**	**100,00**	**23,52**	**Kapanewon Wates**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*																			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.261	2.564,32	324	600,39	204	163,00	56	170,14	10	135,00	54	131,99	324	600,14	324,00	600,14			Kapanewon Wates
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540	117,38	70	27,63	-	-		0,00	70	27,63	-	-	70	27,63	70,00	27,63			Kapanewon Wates
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11	138,66	6	35,64	-	8,90	2	7,50	1	9,68	3	9,54	6	35,61	6,00	35,61			Kapanewon Wates
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**72,82**	**100,00**	**25,00**	**40,00**	**9,84**	**-**	**1,52**	**80,00**	**7,18**	**100,00**	**5,98**	**100,00**	**24,53**	**100,00**	**24,53**	**100,00**	**33,68**	**Kapanewon Wates**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*32,00*	*72,82*	11	25,00	-	9,84	2	1,52	5	7,18	4	5,98	11	24,53					Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**2,77**	**50,00**	**8,34**	**98,94**	**24,55**	**100,00**	**- 1,24**	**100,00**	**34,42**	**100,00**	**34,42**	**100,00**	**14,42**	**Kapanewon Wates**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun*																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	*8*	*238,74*	2	35,00	-	2,77	-	8,34	-	24,55	2	(1,24)	2,00	34,42	2,00	34,42			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**350,00**	**33,33**	**27,85**	**33,33**	**250,00**	**66,67**	**97,01**	**100,00**	**- 27,85**	**100,00**	**347,01**	**100,00**	**347,01**	**100,00**	**82,62**	**Kapanewon Wates**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	*4*	*100,00*	1	100,00	-	27,85	-	0,00	1	97,01	-	(27,85)	1	97,01	1,00	97,01			Kapanewon Wates
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	*20*	*300,00*	5	250,00	-	-	-	250,00	5	-	-	-	5	250,00	5,00	250,00			Kapanewon Wates
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**6.541,84**	**100**	**1.714,48**	**34,52**	**349,83**	**61,90**	**474,40**	**91,67**	**440,29**	**100,00**	**362,28**	**100,00**	**1.626,80**	**100,00**	**1.626,80**	**100,00**	**24,87**	**Kapanewon Panjatan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	91,68	3	26,02	-	6,09	-	6,12	-	5,84	3	6,11	3	24,17	3,00	24,17			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	435,38	12	111,61	3	25,84	3	34,08	3	25,84	3	25,84	12	111,59	12,00	111,59			Kapanewon Panjatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.120	5.174,25	12	1.354,12	3	271,58	3	369,85	-	367,30	6	262,70	12	1.271,43	12,00	1.271,43			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	138,60	12	38,78	3	9,97	3	9,15	3	9,15	3	9,15	12	37,42	12,00	37,42			Kapanewon Panjatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	15,02	12	3,75	3	1,03	3	0,68	3	1,02	3	1,03	12	3,75	12,00	3,75			Kapanewon Panjatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	33,33	6	9,29	2	2,42	2	2,73	-	1,87	2	2,06	6	9,09	6,00	9,09			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	96,12	12	24,03	3	6,17	3	5,85	3	6,16	3	5,84	12	24,02	12,00	24,02			Kapanewon Panjatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*10*	10,56	2	3,23	1	1,36	1	1,28	-	0,54	-	(0,00)	2	3,18	2,00	3,18			Kapanewon Panjatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,19	12	2,91	3	-	3	2,88	3	-	3	-	12	2,88	12,00	2,88			Kapanewon Panjatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*18,00*	*189,20*	4	54,74	-	-	4	12,85	-	-	-	41,28	4	54,13	4,00	54,13			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	273,81	11	68,45	4	19,41	1	21,41	5	19,07	1	7,78	11	67,67	11,00	67,67			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	14,88	6	4,18	-	-	6	4,13	-	-	-	-	6	4,13	6,00	4,13			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	54,81	25	13,37	9	5,97	12	3,39	3	3,50	1	0,50	25	13,35	25,00	13,35			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**159,72**	**100,00**	**48,08**	**21,71**	**10,62**	**66,29**	**13,69**	**88,57**	**11,75**	**110,86**	**11,81**	**110,86**	**47,87**	**110,86**	**47,87**	**110,86**	**29,97**	**Kapanewon Panjatan**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	52,40	12	16,71	3	3,44	3	2,80	3	5,39	3	4,99	12	16,63	12,00	16,63			Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	82,89	6	23,4	1	4,73	2	9,15	1	4,32	2	5,09	6	23,29	6,00	23,29			Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan*																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	*33,12*	12	8,02	3	2,45	3	1,73	3	2,04	3	1,73	12	7,95	12,00	7,95			Kapanewon Panjatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**79,80**	**100,00**	**24,68**	**40,00**	**8,10**	**40,00**	**2,46**	**80,00**	**2,53**	**100,00**	**11,49**	**100,00**	**24,58**	**100,00**	**24,58**	**100,00**	**30,81**	**Kapanewon Panjatan**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	79,80	6	24,68	2	8,10	2	2,46	1	2,53	1	11,49	6	24,58	6,00	24,58			Kapanewon Panjatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**94,57**	**100,00**	**43,03**	**50,00**	**15,13**	**50,00**	**11,09**	**50,00**	**8,66**	**100,00**	**8,11**	**100,00**	**42,99**	**100,00**	**42,99**	**100,00**	**45,46**	**Kapanewon Panjatan**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan*																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	94,57	6	43,03	2	15,13	1	11,09	1	8,66	2	8,11	6	42,99	6,00	42,99			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**384,00**	**230,52**	**92,11**	**73,57**	**92,11**	**17,94**	**92,11**	**13,12**	**92,11**	**30,48**	**92,11**	**11,86**	**92,11**	**73,40**	**92,11**	**73,40**	**23,99**	**31,84**	**Kapanewon Panjatan**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	368	100,98	128	23,23	-	-	-	2,80	100	19,61	28	0,80	128	23,21	128,00	23,21			Kapanewon Panjatan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	129,54	4	50,34	1	17,94	1	10,32	1	10,87	1	11,06	4	50,19	4,00	50,19			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**5,45**	**50,00**	**10,90**	**98,94**	**16,35**	**100,00**	**2,11**	**100,00**	**34,81**	**100,00**	**34,81**	**100,00**	**14,58**	**Kapanewon Panjatan**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	8	238,74		-		-							-	-	-	-			Kapanewon Panjatan
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-	-	2	35,00	-	5,45	-	10,90	-	16,35	2	2,11	2	34,81	2,00	34,81			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**-**	**33,33**	**-**	**66,67**	**100,00**	**100,00**	**- 0,09**	**100,00**	**99,91**	**100,00**	**99,91**	**100,00**	**23,79**	**Kapanewon Panjatan**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	464,10	1	100,00	-	-	-	-	1	100,00	-	(0,09)	1	99,91	1,00	99,91			Kapanewon Panjatan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.360,96**	**100,00**	**1.580,56**	**34,52**	**325,21**	**61,90**	**412,02**	**91,67**	**419,13**	**100,00**	**359,87**	**100,00**	**1.516,23**	**100,00**	**1.516,23**	**100,00**	**20,60**	**Kapanewon Galur**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ,Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	48	123,40	12	29,21	3	6,68	3	5,92	3	7,41	3	8,94	12	28,96	12,00	28,96			Kapanewon Galur

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	247,01	12	55,80	3	12,92	3	17,04	3	12,92	3	12,92	12	55,80	12,00	55,80			Kapanewon Galur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.148	6.260,01	12	1.300,22	3	259,68	3	349,41	-	358,52	6	271,82	12	1.239,43	12,00	1.239,43			Kapanewon Galur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	158,88	12	38,76	3	9,57	3	9,54	3	9,60	3	9,60	12	38,31	12,00	38,31			Kapanewon Galur
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	13,18	14	2,71	3	-	3	1,40	4	-	4	1,25	14	2,65	14,00	2,65			Kapanewon Galur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*														-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	51,69	5	12,00	1	4,30	1	2,74	1	2,65	2	2,08	5	11,77	5,00	11,77			Kapanewon Galur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	103,43	12	23,10	3	5,87	3	5,86	3	5,65	3	5,65	12	23,03	12,00	23,03			Kapanewon Galur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*														-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	17,07	2	4,29	-	1,91	1	1,29	1	0,67	-	0,34	2	4,21	2,00	4,21			Kapanewon Galur
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	12,66	21	2,31	5	-	6	0,00	4	-	6	2,25	21	2,25	21,00	2,25			Kapanewon Galur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*												-							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	*71,00*	*45,60*	10	39,50	1	8,55	-	0,00	-	-	9	30,00	10	38,55	10,00	38,55			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	248,46	8	58,05	1	13,27	3	13,54	3	18,12	1	11,91	8	56,84	8,00	56,84			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya	29	34,15	2	3,60	-	-	-	0,00	2	3,58	-		2	3,58	2,00	3,58			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Banguan Lainnya dipelihara/direhabilitasi.	168	45,41	30	11,00	2	2,47	22	5,28	5	-	1	3,11	30	10,86	30,00	10,86			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**130,92**	**100,00**	**30,30**	**33,87**	**5,71**	**20,56**	**11,19**	**87,45**	**9,14**	**119,21**	**4,12**	**119,21**	**30,16**	**119,21**	**30,16**	**119,21**	**23,04**	**Kapanewon Galur**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TK kecamatan*																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	28	33,20	10	7,50	1	1,58	2	2,04	3	3,58	4	0,27	10	7,46	10,00	7,46			Kapanewon Galur
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	66,66	11	15,80	-	1,71	4	6,40	3	4,17	4	3,48	11	15,76	11,00	15,76			Kapanewon Galur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	31,06	12	7,00	3	2,41	3	2,75	3	1,40	3	0,38	12	6,93	12,00	6,93			Kapanewon Galur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**70,66**	**100,00**	**18,00**	**40,00**	**5,21**	**40,00**	**2,90**	**60,00**	**4,66**	**100,00**	**5,16**	**100,00**	**17,93**	**100,00**	**17,93**	**100,00**	**25,37**	**Kapanewon Galur**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24,00	70,66	10	18,00	3	5,21	1	2,90	3	4,66	3	5,16	10	17,93	10,00	17,93			Kapanewon Galur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**81,67**	**100,00**	**20,50**	**50,00**	**10,77**	**50,00**	**3,10**	**50,00**	**3,29**	**100,00**	**3,22**	**100,00**	**20,37**	**100,00**	**20,37**	**100,00**	**24,95**	**Kapanewon Galur**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	40	89,33	7	20,50	2	10,77	1	3,10	1	3,29	3	3,22	7	20,37	7,00	20,37			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**213,85**	**92,11**	**48,50**	**92,11**	**8,28**	**92,11**	**11,54**	**92,11**	**20,12**	**92,11**	**7,97**	**92,11**	**47,90**	**92,11**	**47,90**	**92,11**	**22,40**	**Kapanewon Galur**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinsai dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	630	73,71	85	12,50	-	-	-	0,21	85	11,85	-	0,40	85	12,45	85,00	12,45			Kapanewon Galur
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yag ditandatangani Sesuai Ketentuan Perundang Undangan	24	140,14	6	36,00	-	8,28	3	11,33	1	8,27	2	7,57	6	35,45	6,00	35,45			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**0,98**	**50,00**	**5,61**	**98,94**	**-**	**100,00**	**28,32**	**100,00**	**34,91**	**100,00**	**34,91**	**100,00**	**14,62**	**Kapanewon Galur**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-											-								
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan di Kapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74		-		-		-	-	-			-	-	-	-			Kapanewon Galur
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen hasil Penerapan Kkeistimewaan di Kapanewon .Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	-	-	2	35,00	-	0,98	-	5,61	-	-	2	28,32	2	34,91	2,00	34,91			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**38,12**	**33,33**	**-**	**66,67**	**60,19**	**100,00**	**-**	**100,00**	**98,31**	**100,00**	**98,31**	**100,00**	**23,41**	**Kapanewon Galur**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	400,00	1	100,00	-	38,12	-	0,00	-	60,19	1	-	1	98,31	1,00	98,31			Kapanewon Galur
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.434,92**	**100,00**	**1.672,38**	**34,52**	**367,67**	**61,90**	**471,06**	**91,67**	**461,65**	**100,00**	**361,98**	**100,00**	**1.662,36**	**100,00**	**1.662,36**	**100,00**	**22,36**	**Kapanewon Lendah**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Yang disediakan	48	138,36	12	29,09	3	4,72	3	6,53	-	7,78	6	10,01	12	29,04					Kapanewon Lendah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	445,89	12	111,61	3	25,84	3	34,08	-	25,84	6	25,84	12	111,61	12,00	111,61			Kapanewon Lendah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.064	5.778,49	12	1.306,59	3	274,06	3	380,34	-	375,00	6	270,68	12	1.300,08	12,00	1.300,08			Kapanewon Lendah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	168,15	12	39,25	3	9,40	3	9,60	3	9,42	3	9,83	12	38,25	12,00	38,25			Kapanewon Lendah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	168,15	14	4,00	3	1,00	4	0,67	3	-	4	2,21	14	3,88	14,00	3,88			Kapanewon Lendah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	16	87,82	3	19,49	-	6,54	-	5,73	-	5,12	3	2,01	3	19,39	3,00	19,39			Kapanewon Lendah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	126,08	12	26,00	3	6,91	3	5,11	3	7,06	3	6,89	12	25,97	12,00	25,97			Kapanewon Lendah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,50	2	6,20	-	2,11	1	0,99	-	1,37	1	1,65	2	6,12	2,00	6,12			Kapanewon Lendah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	18,98	21	4,00	3	0,25	4	0,49	4	0,81	10	2,37	21	3,91	21,00	3,91			Kapanewon Lendah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	120,00	4	18,91	3	14,96	-	0,00	-	-	1	3,90	4	18,86	4,00	18,86			Kapanewon Lendah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	392,88	9	85,19	3	17,36	2	24,40	4	20,38	-	21,43	9	83,57	9,00	83,57			Kapanewon Lendah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	54,00	2	9,35	-	-	-	0,00	1	5,66	1	3,35	2	9,01	2,00	9,01			Kapanewon Lendah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	59,67	23	12,70	2	4,52	9	3,11	5,00	3,21	7	1,81	23	12,66	23,00	12,66			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**226,59**	**100,00**	**51,90**	**34,67**	**12,00**	**42,67**	**18,78**	**-**	**13,73**	**133,10**	**7,00**	**133,10**	**51,51**	**133,10**	**51,51**	**133,10**	**22,73**	**Kapanewon Lendah**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	67,22	6	16,25	2	4,36	2	4,01	1	5,86	1	1,89	6	16,12	6,00	16,12			Kapanewon Lendah
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	118,64	6	25,65	1	5,71	2	11,49	1	5,19	2	3,10	6	25,48	6,00	25,48			Kapanewon Lendah
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-														-					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	40,73	12	10,00	3	1,93	3	3,27	3	2,69	3	2,01	12	9,90	12,00	9,90			Kapanewon Lendah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**68,52**	**100,00**	**18,81**	**40,00**	**3,18**	**40,00**	**5,94**	**40,00**	**4,80**	**100,00**	**4,82**	**100,00**	**18,75**	**100,00**	**18,75**	**100,00**	**27,36**	**Kapanewon Lendah**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	68,52	3	18,81	-	3,18	-	5,94	-	4,80	3	4,82	3	18,75	3,00	18,75			Kapanewon Lendah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**102,80**	**100,00**	**27,50**	**50,00**	**10,66**	**50,00**	**5,45**	**50,00**	**4,39**	**100,00**	**6,93**	**100,00**	**27,42**	**100,00**	**27,42**	**100,00**	**26,68**	**Kapanewon Lendah**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	112,89	6	27,50	2	10,66	1	5,45	-	4,39	3	6,93	6	27,42	6,00	27,42			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**247,87**	**92,11**	**60,50**	**92,11**	**8,40**	**92,11**	**15,21**	**92,11**	**24,42**	**92,11**	**12,19**	**92,11**	**60,22**	**92,11**	**60,22**	**92,11**	**24,29**	**Kapanewon Lendah**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	101,08	70	23,00	-	0,93	-	3,68	70	17,57	-	0,60	70	22,78	70,00	22,78			Kapanewon Lendah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	146,77	4	37,50	-	7,47	-	11,53	-	6,85	4	11,59	4	37,44	4,00	37,44			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**3,49**	**50,00**	**11,92**	**98,94**	**-**	**100,00**	**19,39**	**100,00**	**34,80**	**100,00**	**34,80**	**100,00**	**14,57**	**Kapanewon Lendah**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	8	238,74		-		-		-	-	-			-	-	-	-			Kapanewon Lendah
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	-	-	2	35,00	-	3,49	-	11,92	-	-	2	19,39	2	34,80	2,00	34,80			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**3,94**	**33,33**	**-**	**66,67**	**99,62**	**100,00**	**- 3,94**	**100,00**	**99,62**	**100,00**	**99,62**	**100,00**	**23,72**	**Kapanewon Lendah**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	3,94	-	0,00	-	99,62	1	(3,94)	1	99,62	1,00	99,62			Kapanewon Lendah
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah LaporanPembinaan Kelembagaan Adat dan Tradis	12	400,00		-		-			-	-			-	-	-	-			Kapanewon Lendah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.803,38**	**100,00**	**1.848,47**	**34,52**	**372,07**	**61,90**	**485,21**	**91,67**	**453,88**	**100,00**	**343,92**	**100,00**	**1.655,07**	**100,00**	**1.655,07**	**100,00**	**21,21**	**Kapanewon Sentolo**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	48	87,20	12	22,17	3	5,33	3	5,38	3	5,28	3	5,70	12	21,69	12,00	21,69			Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyeiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. (12 laporan)	48	213,90	12	55,80	3	12,92	3	17,04	3	12,92	3	12,92	12	55,80	12,00	55,80			Kapanewon Sentolo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orangyang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	5.669,00	12	1.409,61	3	276,90	3	355,70	-	336,35	6	255,58	12	1.224,53	12,00	1.224,53			Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	157,07	12	40,87	3	10,66	3	9,38	3	9,60	3	10,05	12	39,68	12,00	39,68			Kapanewon Sentolo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56	18,40	14	4,60	3	1,43	4	0,21	3	-	4	2,83	14	4,46	14,00	4,46			Kapanewon Sentolo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan)	48	121,92	12	27,42	1	6,86	3	6,83	5	7,16	3	6,53	12	27,39	12,00	27,39			Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	59,97	5	14,97	3	3,83	3	4,40	-	4,29	-	2,25	6	14,78	6,00	14,78			Kapanewon Sentolo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	27,52	2	6,88	-	4,24	-	0,00	1	2,48	1	-	2	6,72	2,00	6,72			Kapanewon Sentolo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,60	21	4,40	6	2,75	4	0,36	4	0,36	7	0,81	21	4,28	21,00	4,28			Kapanewon Sentolo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayarnya pajak perizinanya	40	299,28	10	74,31	3	19,71	2	15,45	2	20,74	3	16,55	10	72,45	10,00	72,45			Kapanewon Sentolo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara : 1 (satu) unit Gedung Bangunan Kantor	8	148,52	1	57,52	-	-	-	5,75	1	51,77	-	-	1	57,52	1,00	57,52			Kapanewon Sentolo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TJumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172	51,91	43	15,91	11	5,84	10	3,48	11	2,92	11	3,65	43	15,89	43,00	15,89			Kapanewon Sentolo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan (9 unit)	44	169,08	9	114,03	2	21,61	7	61,23	-	-	-	27,05	9	109,89	9,00	109,89			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**220,77**	**100,00**	**48,17**	**27,31**	**15,05**	**45,94**	**14,79**	**81,60**	**9,26**	**105,83**	**8,79**	**105,83**	**47,88**	**105,83**	**47,88**	**105,83**	**21,69**	**Kapanewon Sentolo**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32	57,51	8	12,58	3	3,96	2	3,05	1	3,01	2	2,50	8	12,53	8,00	12,53			Kapanewon Sentolo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	107,10	10	24,97	-	7,46	-	8,77	-	4,55	10	4,01	10	24,80	10,00	24,80			Kapanewon Sentolo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	56,16	1	10,62	-	3,62	-	2,96	-	1,70	1	2,27	1	10,56	1,00	10,56			Kapanewon Sentolo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**122,17**	**100,00**	**28,28**	**20,00**	**4,92**	**40,00**	**5,21**	**40,00**	**7,57**	**100,00**	**10,52**	**100,00**	**28,21**	**100,00**	**28,21**	**100,00**	**23,09**	**Kapanewon Sentolo**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	122,17	6	28,28	-	4,92	-	5,21	-	7,57	6	10,52	6	28,21	6,00	28,21			Kapanewon Sentolo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**92,63**	**100,00**	**23,16**	**50,00**	**9,26**	**50,00**	**4,57**	**50,00**	**4,23**	**100,00**	**4,98**	**100,00**	**23,04**	**100,00**	**23,04**	**100,00**	**24,88**	**Kapanewon Sentolo**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	92,63	7	23,16	-	9,26	-	4,57	-	4,23	7	4,98	7	23,04	7,00	23,04			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**264,46**	**92,11**	**69,11**	**92,11**	**14,08**	**92,11**	**16,42**	**92,11**	**23,71**	**92,11**	**14,67**	**92,11**	**68,88**	**92,11**	**68,88**	**92,11**	**26,04**	**Kapanewon Sentolo**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sisialisasi, konsultasai)wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	300	87,95	75	21,99	-	2,33	-	1,54	40	13,04	35	4,97	75	21,88	75,00	21,88			Kapanewon Sentolo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai peraturan perundang undangan	20	176,51	5	47,13	-	11,75	-	14,88	-	10,68	5	9,69	5	46,99	5,00	46,99			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**31,80**	**50,00**	**1,12**	**50,00**	**7,50**	**98,94**	**25,31**	**100,00**	**- 2,31**	**100,00**	**31,63**	**100,00**	**31,63**	**100,00**	**13,25**	**Kapanewon Sentolo**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8	238,74		-		-			-	-			-	-	-	-			Kapanewon Sentolo
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan keistimewaan yang disusun	-	-	2	31,80	-	1,12	-	7,50	-	25,31	2	(2,31)	2	31,63	2,00	31,63			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**26,24**	**33,33**	**-**	**66,67**	**99,05**	**100,00**	**- 25,42**	**100,00**	**99,87**	**100,00**	**99,87**	**100,00**	**23,78**	**Kapanewon Sentolo**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	26,24	-	0,00	-	99,05	1	(25,42)	1	99,87	1,00	99,87			Kapanewon Sentolo
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00		-		-			-	-			-	-	-	-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**6.969,62**	**100,00**	**1.598,77**	**34,52**	**319,94**	**61,90**	**433,59**	**91,67**	**421,27**	**100,00**	**336,44**	**100,00**	**1.511,24**	**100,00**	**1.511,24**	**100,00**	**21,68**	**Kapanewon Pengasih**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	83,86	12	25,23	3	4,59	3	7,02	3	4,94	3	6,07	9	22,63	9,00	22,63			Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	48	31,99	12	84,31	3	19,38	3	25,56	3	19,38	3	19,98	12	84,31	12,00	84,31			Kapanewon Pengasih
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	80	5.518,62	12	1.275,84	3	251,58	3	340,13	-	343,58	6	258,73	12	1.194,02	3	1,00			Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	152,00	12	38,54	3	9,69	3	9,14	3	9,38	3	9,60	12	37,80	3	1,00			Kapanewon Pengasih
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,00	14	3,42	3	0,54	4	0,47	3	1,12	4	1,22	14	3,35	3	1,00			Kapanewon Pengasih
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	119,80	12	30,15	5	7,54	-	7,50	4	7,57	3	7,54	12	30,15	12,00	30,15			Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (5 Paket)	12	62,00	5	14,24	3	3,87	3	4,67	-	2,97	-	2,63	6	14,14	6,00	14,14			Kapanewon Pengasih
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,70	2	6,92	-	1,30	-	1,11	2	2,79	-	1,58	2	6,78	2,00	6,78			Kapanewon Pengasih
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10,10	21	3,05	4	0,28	5	0,81	4	1,82	8	0,11	21	3,02	21,00	3,02			Kapanewon Pengasih
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	300,57	10	78,49	1	16,95	3	22,61	3	24,44	3	14,10	10	78,10	10,00	78,10			Kapanewon Pengasih
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	206,00	9	11,84	2	4,22	3	2,55	3	3,27	1	1,79	9	11,83	9,00	11,83			Kapanewon Pengasih
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara : 1 (satu) unit Gedung Bangunan Kantor	32	53,16		-		-		-	-	-			-	-	-	-			Kapanewon Pengasih
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (2 unit)	20,00	100,00	2	26,73	-	-	2	12,02	-	-	-	13,08	2	25,10	2,00	25,10			Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**182,76**	**100,00**	**36,74**	**27,30**	**11,46**		**10,30**	**80,29**	**9,53**	**107,30**	**5,10**	**107,30**	**36,38**	**107,30**	**36,38**	**107,30**	**19,91**	**Kapanewon Pengasih**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36	53,54	7	10,69	3	3,10	1	2,33	1	4,10	2	1,03	7	10,55	7,00	10,55			Kapanewon Pengasih
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	77,22	5	15,80	1	5,37	1	5,87	1	2,72	2	1,73	5	15,69	5,00	15,69			Kapanewon Pengasih
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	52,00	12	10,25	3	2,99	3	2,10	3	2,72	3	2,34	12	10,15	12,00	10,15			Kapanewon Pengasih
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**111,00**	**100,00**	**26,85**	**40,00**	**7,28**	**40,00**	**7,10**	**80,00**	**9,58**	**100,00**	**2,62**	**100,00**	**26,59**	**100,00**	**26,59**	**100,00**	**23,95**	**Kapanewon Pengasih**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	44	113,01	6	26,85	-	7,28	-	7,10	4	9,58	2	2,62	6	26,59	6,00	26,59			Kapanewon Pengasih
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**94,06**	**100,00**	**21,31**	**50,00**	**10,48**	**50,00**	**2,82**	**50,00**	**4,39**	**100,00**	**3,62**	**100,00**	**21,30**	**100,00**	**21,30**	**100,00**	**22,65**	**Kapanewon Pengasih**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	94,06	9	21,31	3	10,48	2	2,82	1	4,39	3	3,62	9	21,30	9,00	21,30			Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**238,46**	**92,11**	**56,83**	**92,11**	**9,30**	**92,11**	**17,98**	**92,11**	**16,74**	**92,11**	**12,14**	**92,11**	**56,16**	**92,11**	**56,16**	**92,11**	**23,55**	**Kapanewon Pengasih**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520	44,66	75	11,02	-	0,79	-	0,94	75	8,34	-	0,92	75	10,99	75,00	10,99			Kapanewon Pengasih
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120	193,80	7	45,81	2	8,51	1	17,05	2	8,39	2	11,22	7	45,17	7,00	45,17			Kapanewon Pengasih
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**3,88**	**50,00**	**-**	**98,94**	**30,68**	**100,00**	**- 0,27**	**100,00**	**34,29**	**100,00**	**34,29**	**100,00**	**14,36**	**Kapanewon Pengasih**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dukungan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	8	238,74		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	-	-	1	35,00	-	3,88	-	-	-	30,68	1	(0,27)	1	34,29	1,00	34,29			Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**-**	**33,33**	**-**	**66,67**	**99,80**	**100,00**	**-**	**66,67**	**99,80**	**66,67**	**99,80**	**66,67**	**23,76**	**Kapanewon Pengasih**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	-	-	-	1	99,80	-	-	1	99,80	1,00	99,80			Kapanewon Pengasih
		Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00		-		-			0	-			-	-	-	-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.608,69**	**100,00**	**1.654,84**	**34,52**	**311,43**	**61,90**	**443,65**	**91,67**	**399,50**	**100,00**	**306,22**	**100,00**	**1.460,80**	**100,00**	**1.460,80**	**100,00**	**19,20**	**Kapanewon Kokap**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	104,00	12	23,86	3	4,36	3	6,94	3	5,19	3	7,11	12	23,60	12,00	23,60			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	347,42	12	83,71	3	19,38	3	25,56	3	19,38	3	19,38	12	83,69	12,00	83,69			Kapanewon Kokap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.923,59	12	1.353,35	3	250,02	3	339,52	-	332,65	6	239,39	12	1.161,58	12,00	1.161,58			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	154,20	12	37,23	3	9,08	3	8,63	3	9,76	3	8,85	12	36,31	12,00	36,31			Kapanewon Kokap
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan	65	18,00	14	4,00	4	0,98	3	1,05	3	1,47	4	0,45	14	3,95	14,00	3,95			Kapanewon Kokap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	38,00	12	12,45	3	2,80	3	3,84	3	4,08	3	1,59	12	12,31	12,00	12,31			Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	48	93,38	12	25,38	3	5,73	3	6,57	3	6,57	3	6,51	12	25,37	12,00	25,37			Kapanewon Kokap
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	2	28,00	2	7,00	-	1,88	-	2,11	2	2,36	-	0,54	2	6,88	2,00	6,88			Kapanewon Kokap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	16,00	14	4,00	2	1,15	2	1,05	7	1,33	3	0,45	14	3,98	14,00	3,98			Kapanewon Kokap
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	13	106,00	4	34,84	-	-	3	27,58	-		1	7,00	4	34,58	4,00	34,58			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (9 Unit)	36	187,08	9	57,97	1	14,47	3	15,01	3	14,33	2	13,98	9	57,79	9,00	57,79			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	44,00	2	4,10	-	-	2	3,94	-	-	-	-	2	3,94	2,00	3,94			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	92	26,00	10	6,96	2	1,58	3	1,87	2	2,38	3	0,99	10	6,82	10,00	6,82			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan kapanewon**	**100,00**	**153,24**	**100,00**	**45,98**	**35,18**	**11,19**	**68,73**	**16,38**	**-**	**13,51**	**65,28**	**4,74**	**65,28**	**45,83**	**65,28**	**45,83**	**65,28**	**29,90**	**Kapanewon Kokap**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	40	63,41	6	15,92	2	4,86	2	7,33	2	3,41	-	0,30	6	15,90	6,00	15,90			Kapanewon Kokap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	82,66	8	21,12	1	3,52	3	6,76	3	7,70	1	3,06	8	21,04	8,00	21,04			Kapanewon Kokap
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-												-							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	31,99	12	8,94	3	2,81	3	2,29	3	2,40	3	1,38	12	8,88	12,00	8,88			Kapanewon Kokap
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**46,73**	**100,00**	**15,19**	**40,00**	**2,47**	**40,00**	**1,41**	**60,00**	**6,92**	**100,00**	**4,32**	**100,00**	**15,11**	**100,00**	**15,11**	**100,00**	**32,34**	**Kapanewon Kokap**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampinan Desa di wilayahnya	22	59,51	5	15,19	1	2,47	1	1,41	1	6,92	2	4,32	5	15,11	5,00	15,11			Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**77,74**	**100,00**	**21,97**	**50,00**	**9,46**	**50,00**	**5,42**	**50,00**	**3,54**	**100,00**	**3,51**	**100,00**	21,93	**100,00**	**21,93**	**100,00**	**28,22**	**Kapanewon Kokap**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	44	77,74	6	21,97	2	9,46	2	5,42	2	3,54	-	3,51	6	21,93	6,00	21,93			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**198,53**	**92,11**	**59,06**	**92,11**	**8,33**	**92,11**	**9,51**	**92,11**	**32,19**	**92,11**	**8,86**	**92,11**	**58,88**	**92,11**	**58,88**	**92,11**	**29,66**	**Kapanewon Kokap**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,sosialisai,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	62,00	40	18,00	-	-	-	0,28	40	17,67	-	-	40	17,95	40,00	17,95			Kapanewon Kokap
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	16	139,26	5	41,06	-	8,33	1	9,23	3	14,52	1	8,86	5	40,93	5,00	40,93			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**1,35**	**50,00**	**5,36**	**98,94**	**10,74**	**100,00**	**17,37**	**100,00**	**34,82**	**100,00**	**34,82**	**100,00**	**14,59**	**Kapanewon Kokap**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-	-		-		-							-	-	-	-			
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen laporan Pengendalian dan Evaluasi dana Keistimewaan	-	238,74	2	35,00	-	1,35	-	5,36	-	10,74	2	17,37	2	34,82	2,00	34,82			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**25,44**	**33,33**	**-**	**66,67**	**72,50**	**100,00**	**1,97**	**100,00**	**99,91**	**100,00**	**99,91**	**100,00**	**23,79**	**Kapanewon Kokap**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	25,44	-	0,00	1	72,50	-	1,97	1	99,91	1,00	99,91			Kapanewon Kokap
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**6.569,96**	**100,00**	**1.574,71**	**34,52**	**332,83**	**61,90**	**430,41**	**91,67**	**414,24**	**100,00**	**330,01**	**100,00**	**1.507,49**	**100,00**	**1.507,49**	**100,00**	**22,95**	**Kapanewon Girimulyo**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,00	12	25,50	3	5,91	3	5,95	3	5,63	3	6,58	12	24,07	12,00	24,07			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	318,57	12	83,71	3	19,38	3	25,56	3	19,38	3	19,38	12	83,71	12,00	83,71			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.232	5.270,42	12	1.296,66	3	266,18	3	357,68	-	349,36	6	259,14	12	1.232,36	12,00	1.232,36			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	129,00	12	39,00	3	9,87	3	8,50	3	9,49	3	10,40	12	38,26	12,00	38,26			Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan	56	16,18	14	3,49	3	1,47	4	0,00	3	1,37	4	0,62	14	3,47	14,00	3,47			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-												.							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	113,31	12	27,90	2	7,25	4	7,25	-	6,66	6	6,66	12	27,82	12,00	27,82			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	20	47,55	5	10,87	3	2,38	-	2,80	6	2,97	-	2,34	9	10,48	9,00	10,48			Kapanewon Girimulyo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	26,43	2	5,70	-	2,37	-	0,67		2,34	2	0,29	2	5,67	2,00	5,67			Kapanewon Girimulyo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,45	21	3,33	7	0,82	5	0,88		0,65	9	0,91	21	3,26	21,00	3,26			Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	239,69	10	66,67	-	15,30	3	20,06	6	15,54	1	15,75	10	66,64	10,00	66,64			Kapanewon Girimulyo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	36,59	9	4,31	4	1,90	3	1,06	2	0,85	-	0,35	9	4,16	9,00	4,16			Kapanewon Girimulyo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangdisediakan	-	265,78	-	7,59		-		-	-	-	1	7,59	1	7,59	1,00	7,59			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**145,05**	**100,00**	**36,20**	**30,60**	**11,44**	**39,92**	**10,92**	**39,40**	**8,03**	**84,12**	**5,46**	**84,12**	**35,85**	**84,12**	**35,85**	**84,12**	**24,72**	**Kapanewon Girimulyo**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	55,83	10	14,16	-	3,59	-	3,97	-	4,26	10	2,24	10	14,06	10,00	14,06			Kapanewon Girimulyo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	56,76	5	14,06	-	5,15	-	5,39	-	1,18	5	2,27	5	13,99	5,00	13,99			Kapanewon Girimulyo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	32,46	12	7,98	3	2,70	3	1,56	3	2,59	3	0,95	12	7,80	12,00	7,80			Kapanewon Girimulyo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**106,75**	**100,00**	**15,73**	**40,00**	**3,80**	**40,00**	**7,86**	**40,00**	**1,76**	**100,00**	**2,14**	**100,00**	**15,56**	**100,00**	**15,56**	**100,00**	**14,57**	**Kapanewon Girimulyo**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	106,75	1	15,73	-	3,80	-	7,86	-	1,76	1	2,14	1	15,56	1,00	15,56			Kapanewon Girimulyo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**102,93**	**100,00**	**21,02**	**50,00**	**6,95**	**50,00**	**6,51**	**50,00**	**1,20**	**100,00**	**6,19**	**100,00**	**20,84**	**100,00**	**20,84**	**100,00**	**20,25**	**Kapanewon Girimulyo**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	102,93	6	21,02	1	6,95	2	6,51	-	1,20	3	6,19	6	20,84	6,00	20,84			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**273,86**	**92,11**	**46,81**	**92,11**	**7,17**	**92,11**	**5,55**	**92,11**	**23,16**	**92,11**	**10,64**	**92,11**	**46,52**	**92,11**	**46,52**	**92,11**	**16,99**	**Kapanewon Girimulyo**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	148	71,33	37	13,55	-	-	-	-	37	8,82	-	4,70	37	13,51	37,00	13,51			Kapanewon Girimulyo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12	178,43	4	33,27	-	7,17	-	5,55	1	14,34	3	5,94	4	33,00	4,00	33,00			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**4,00**	**50,00**	**-**	**98,94**	**18,60**	**100**	**11,35**	**100,00**	**33,95**	**100,00**	**33,95**	**100,00**	**14,22**	**Kapanewon Girimulyo**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-	-		-		-													
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	2	35,00	-	4,00	-	-	-	18,60	2	11,35	2	33,95	2,00	33,95			Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**23,03**	**33,33**	**-**	**66,67**	**97,21**	**100,00**	**- 23,03**	**100,00**	**97,21**	**100,00**	**97,21**	**100,00**	**23,14**	**Kapanewon Girimulyo**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	23,03	-	-	-	97,21	1	(23,03)	1	97,21	1,00	97,21			Kapanewon Girimulyo
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.599,38**	**100,00**	**1.789,90**	**34,52**	**375,34**	**61,90**	**456,45**	**91,67**	**453,68**	**100,00**	**411,36**	**100,00**	**1.696,83**	**100,00**	**1.696,83**	**100,00**	**22,33**	**Kapanewon Nanggulan**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,10	12	23,10	3	5,64	3	5,65	3	5,64		5,55	9	22,48	9,00	22,48			Kapanewon Nanggulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	350,84	12	83,71	3	19,38	3	25,56	3	19,38		19,38	9	83,71	9,00	83,71			Kapanewon Nanggulan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	84	*6.220,13*	12	1.458,26	3	289,38	3	387,55	-	392,93	6	297,91	12	1.367,77	12,00	1.367,77			Kapanewon Nanggulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan barang	48	149,50	12	35,50	3	9,85	3	7,95	3	9,30	3	8,18	12	35,27	12,00	35,27			Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	16,00	14	4,00	3	0,88	4	1,12	3	0,90	4	1,09	14	3,99	14,00	3,99			Kapanewon Nanggulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	48	59,05	9	13,13	1	4,34	3	4,05	3	3,12	2	1,61	9	13,13	9,00	13,13			Kapanewon Nanggulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	91,80	12	20,79	3	4,98	3	5,38	3	4,98	3	5,38	12	20,73	12,00	20,73			Kapanewon Nanggulan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	29,00	2	6,00	-	1,84	1	1,96	1	1,51	-	0,68	2	5,99	2,00	5,99			Kapanewon Nanggulan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	16,00	21	4,00	2	-	4	1,70	5	0,90	10	1,39	21	3,99	21,00	3,99			Kapanewon Nanggulan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	405,50	4	24,44	2	16,74	-	-	-	-	2	7,35	4	24,09	4,00	24,09			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	195,50	9	46,99	1	14,54	3	12,98	3	11,00	2	7,96	9	46,48	9,00	46,48			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	16,45	19	45,99	3	2,99	3	-	3	-	10	42,18	19	45,17	19,00	45,17			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	164	60,00	12	12,00	3	4,76	3	2,53	3	4,02	3	0,69	12	12,00	12,00	12,00			Kapanewon Nanggulan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	54,00	2	12,00	-	-	-	-	-	-	2	12,00	2	12,00					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**210,36**	**100,00**	**52,00**	**16,57**	**22,71**	**32,54**	**8,86**	**82,64**	**15,87**	**117,69**	**4,22**	**117,69**	**51,66**	**117,69**	**51,66**	**117,69**	**24,56**	**Kapanewon Nanggulan**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	13	72,52	4	18,00	-	7,91	-	-	4	9,80	-	-	4	17,72	4,00	17,72			Kapanewon Nanggulan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efejtifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	94,00	8	23,50	-	7,38	4	7,90	-	4,74	4	3,44	8	23,46	8,00	23,46			Kapanewon Nanggulan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	49	43,85	12	10,50	3	7,42	3	0,96	3	1,33	2	0,78	11	10,49	11,00	10,49			Kapanewon Nanggulan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**81,35**	**100,00**	**21,00**	**40,00**	**8,35**	**40,00**	**1,21**	**60,00**	**7,70**	**100,00**	**3,69**	**100,00**	**20,95**	**100,00**	**20,95**	**100,00**	**25,76**	**Kapanewon Nanggulan**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24	81,35	6	21,00	2	8,35	2	1,21	2	7,70	-	3,69	6	20,95	6,00	20,95			Kapanewon Nanggulan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**89,83**	**100,00**	**24,00**	**50,00**	**10,28**	**50,00**	**7,24**	**50,00**	**3,37**	**100,00**	**3,07**	**100,00**	**23,95**	**100,00**	**23,95**	**100,00**	**26,66**	**Kapanewon Nanggulan**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdataan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	96,12	11	24,00	3	10,28	4	7,24	3	3,37	1	3,07	11	23,95	11,00	23,95			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**383,14**	**92,11**	**52,00**	**92,11**	**7,57**	**92,11**	**14,15**	**92,11**	**16,06**	**92,11**	**13,46**	**92,11**	**51,24**	**92,11**	**51,24**	**92,11**	**13,37**	**Kapanewon Nanggulan**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	420	82,00	50	9,50	-	-	-	0,92	50	5,51	-	2,92	50	9,35	50,00	9,35			Kapanewon Nanggulan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	48	262,13	6	42,50	-	7,57	6	13,24	-	10,55	-	10,54	6	41,89	6,00	41,89			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**6,45**	**50,00**	**9,25**	**98,94**	**9,25**	**100,00**	**9,91**	**100,00**	**34,87**	**100,00**	**34,87**	**100,00**	**14,60**	**Kapanewon Nanggulan**
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																				
		Penyelenggaraan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	8	238,77	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Kapanewon Nanggulan
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																				
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	35,00	-	6,45	-	9,25	-	22,81	2	(3,65)	2	34,86	2,00	34,86			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**0,45**	**33,33**	**0,37**	**66,67**	**100,00**	**100,00**	**- 0,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**23,81**	**Kapanewon Nanggulan**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	100,00	1	100,00	-	0,45	-	0,37	-	100,00	1	(0,81)	1	100,00	1,00	100,00			Kapanewon Nanggulan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.797,17**	**100,00**	**1.719,11**	**34,52**	**350,94**	**61,90**	**533,06**	**91,67**	**429,98**	**100,00**	**369,97**	**100,00**	**1.683,95**	**100,00**	**1.683,95**	**100,00**	**21,60**	**Kapanewon Samigaluh**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penjnjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan	48	79,08	12	18,77	3	6,88	3	3,38	3	3,84	3	4,19	12	18,30	12,00	18,30			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	166,52	12	55,80	3	12,92	3	17,04	3	12,92	3	12,92	12	55,80	12,00	55,80			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	5.338,09	12	1.298,60	3	269,43	3	363,37	-	364,80	6	272,70	12	1.270,31	12,00	1.270,31			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	152,00	12	39,63	3	10,16	3	9,75	3	9,88	3	9,84	12	39,63	12,00	39,63			Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	100	16,00	14	4,00	3	0,94	3	1,29	4	0,34	4	1,38	14	3,95	14,00	3,95			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	54,69	1	13,70	1	6,75	-	1,31	-	4,29	-	1,34	1	13,69	1,00	13,69			Kapanewon Samigaluh
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	110,46	12	27,62	3	6,86	3	7,10	3	6,51	3	7,10	12	27,56	12,00	27,56			Kapanewon Samigaluh
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100	28,00	2	7,00	-	1,31	-	2,28	-	3,02	2	0,39	2	6,99	2,00	6,99			Kapanewon Samigaluh
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	12,00	21	3,96	5	0,97	4	1,17	5	0,87	7	0,92	21	3,94	21,00	3,94			Kapanewon Samigaluh
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunn lainnya yang di sediakan	129	661,00	50	109,09	6	16,49	2	56,49	-	-	42	30,54	50	103,52	50,00	103,52			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31	385,82	7	72,42	4	13,51	-	26,12	1	13,88	2	18,69	7	72,19	7,00	72,19			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	11	682,51	2	47,26	1	1,25	-	40,60	-	-	1	4,95	2	46,81	2,00	46,81			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	48	65,13	38	21,28	-	3,49	8	3,15	9	9,61	21	5,00	38	21,24	38,00	21,24			Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100,00**	**194,14**	**100,00**	**47,99**	**20,19**	**8,06**	**33,24**	**20,17**	**68,10**	**14,05**	**103,49**	**5,66**	**103,49**	**47,94**	**103,49**	**47,94**	**103,49**	**24,69**	**Kapanewon Samigaluh**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	40	80,04	10	19,97	1	3,54	4	7,05	3	6,25	2	3,12	10	19,96	10,00	19,96			Kapanewon Samigaluh
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	28	82,21	7	19,80	-	2,82	3	9,50	2	5,26	2	2,17	7	19,76	7,00	19,76			Kapanewon Samigaluh
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di lakukan	16	31,88	12	8,22	3	1,70	3	3,62	3	2,54	3	0,36	12	8,22	12,00	8,22			Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**119,81**	**100,00**	**30,48**	**40,00**	**6,69**	**40,00**	**7,27**	**60,00**	**7,73**	**100,00**	**8,77**	**100,00**	**30,45**	**100,00**	**30,45**	**100,00**	**25,41**	**Kapanewon Samigaluh**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	8	119,81	5	30,48	1	6,69	1	7,27	2	7,73	1	8,77	5	30,45	5,00	30,45			Kapanewon Samigaluh
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**129,62**	**100,00**	**32,42**	**50,00**	**12,02**	**50,00**	**8,99**	**50,00**	**6,37**	**100,00**	**4,98**	**100,00**	**32,37**	**100,00**	**32,37**	**100,00**	**24,97**	**Kapanewon Samigaluh**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	40	129,62	10	32,42	3	12,02	4	8,99	1	6,37	2	4,98	10	32,37	10,00	32,37			Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**270,45**	**92,11**	**60,40**	**92,11**	**9,68**	**92,11**	**15,36**	**92,11**	**25,34**	**92,11**	**10,02**	**92,11**	**60,38**	**92,11**	**60,38**	**92,11**	**22,33**	**Kapanewon Samigaluh**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240	82,53	60	22,24	-	-	-	6,39	60	15,85	-	-	60	22,24	60,00	22,24			Kapanewon Samigaluh
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20	187,92	5	38,16	1	9,68	-	8,97	-	9,49	4	10,02	5	38,15					Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**35,00**	**50,00**	**7,65**	**50,00**	**6,30**	**98,94**	**21,12**	**100,00**	**- 0,08**	**100,00**	**35,00**	**100,00**	**35,00**	**100,00**	**14,66**	**Kapanewon Samigaluh**
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																				
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	8	204,00	2	35,00	-	7,65	1	6,30	-	21,12	1	(0,08)	2	35,00	2,00	35,00			Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**27,17**	**33,33**	**-**	**66,67**	**98,70**	**100,00**	**- 27,17**	**100,00**	**98,70**	**100,00**	**98,70**	**100,00**	**23,50**	**Kapanewon Samigaluh**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya jogja	4	400,00	1	100,00	-	27,17	-	-	-	98,70	1	(27,17)	1	98,70	1,00	98,70			Kapanewon Samigaluh
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**7.323,58**	**100,00**	**1.806,83**	**34,52**	**374,96**	**61,90**	**462,81**	**91,67**	**436,44**	**100,00**	**347,24**	**100,00**	**1.621,44**	**100,00**	**1.621,44**	**100,00**	**22,14**	**Kapanewon Kalibawang**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,21	12	27,17	3	5,22	3	8,49	3	6,78	3	5,93	12	26,43	12,00	26,43			Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	235,83	12	57,88	3	9,62	3	21,46	3	13,56	3	13,14	12	57,79	12,00	57,79			Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.316	6.061,05	12	1.495,69	3	284,54	3	384,21	-	370,08	6	275,17	12	1.314,00	12,00	1.314,00			Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	136,33	12	40,43	3	10,17	3	10,05	3	10,05	3	10,15	12	40,42	12,00	40,42			Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	15,91	14	4,00	3	0,36	4	1,41	3	-	4	2,22	14	3,99	14,00	3,99			Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	65,30	4	15,50	1	6,20	1	4,23	1	4,33	1	0,65	4	15,41	4,00	15,41			Kapanewon Kalibawang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	85,24	12	21,11	3	5,58	3	5,10	3	5,37	3	5,05	12	21,09	12,00	21,09			Kapanewon Kalibawang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,84	2	7,00	-	1,08	-	2,04	1	2,75	1	1,13	2	6,99	2,00	6,99			Kapanewon Kalibawang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,91	21	4,00	4	0,94	5	0,32	4	0,61	8	2,13	21	4,00	21,00	4,00			Kapanewon Kalibawang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9,00	215,38	3	34,49	1	23,71	-	-	-	-	2	8,21	3	31,92	3,00	31,92			Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	307,42	8	76,13	2	17,56	2	20,83	2	22,92	2	14,69	8	76,01	8,00	76,01			Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	26,29	1	6,09	1	6,09	-	-	-	-	-	-	1	6,09	1,00	6,09			Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144	64,76	21	17,35	5	3,88	6	4,65	7	-	2	8,77	20	17,29	20,00	17,29			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan**	**100**	**180,77**	**100**	**42,71**	**63,42**	**7,69**	**93,92**	**14,92**	**89,67**	**11,24**	**131,58**	**8,46**	**131,58**	**42,30**	**131,58**	**42,30**	**131,58**	**23,40**	**Kapanewon Kalibawang**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	114	64,42	12	15,04	3	2,48	3	4,89	3	4,07	3	3,48	12	14,92	12,00	14,92			Kapanewon Kalibawang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	78,20	9	18,86	2	3,20	3	6,23	2	4,42	2	4,98	9	18,82	9,00	18,82			Kapanewon Kalibawang
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	38,14	12	8,81	3	2,01	3	3,80	6	2,75	-	-	12	8,56	12,00	8,56			Kapanewon Kalibawang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100,00**	**103,62**	**100,00**	**25,47**	**40,00**	**5,71**	**40,00**	**6,59**	**60,00**	**6,36**	**100,00**	**6,54**	**100,00**	**25,20**	**100,00**	**25,20**	**100,00**	**24,31**	**Kapanewon Kalibawang**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48	103,62	12	25,47	3	5,71	3	6,59	3	6,36	3	6,54	12	25,20	12,00	25,20			Kapanewon Kalibawang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**100,00**	**81,51**	**100,00**	**23,10**	**50,00**	**7,84**	**50,00**	**4,99**	**50,00**	**3,85**	**100,00**	**6,35**	**100,00**	**23,03**	**100,00**	**23,03**	**100,00**	**28,26**	**Kapanewon Kalibawang**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							-													
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47	81,51	8	23,10	3	7,84	2	4,99	-	3,85	3	6,35	8	23,03	8,00	23,03			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100,00**	**215,62**	**92,11**	**69,45**	**92,11**	**15,13**	**92,11**	**7,33**	**92,11**	**38,86**	**92,11**	**7,98**	**92,11**	**69,31**	**92,11**	**69,31**	**92,11**	**32,14**	**Kapanewon Kalibawang**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440	83,98	65	27,58	-	-	-	-	65	26,80	-	0,75	65	27,55	65,00	27,55			Kapanewon Kalibawang
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	92	131,64	6	41,87	3	15,13	3	7,33	-	12,06	-	7,23	6	41,75	6,00	41,75			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**100,00**	**238,74**	**100,00**	**28,40**	**50,00**	**1,76**	**50,00**	**1,80**	**98,94**	**24,60**	**100,00**	**0,22**	**100,00**	**28,37**	**100,00**	**28,37**	**100,00**	**11,89**	**Kapanewon Kalibawang**
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																				
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan urusan kelembagaan yang disusun	8	238,74	2	28,40	-	1,76	-	1,80	1	24,60	1	0,22	2	28,37	2,00	28,37			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100,00**	**420,00**	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**6,90**	**33,33**	**16,59**	**66,67**	**-**	**100,00**	**76,49**	**100,00**	**99,98**	**100,00**	**99,98**	**100,00**	**23,80**	**Kapanewon Kalibawang**
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	100,00	-	6,90	-	16,59	1	-	-	76,49	1	99,98	1,00	99,98			Kapanewon Kalibawang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**18.230,96**	**100,00**	**4.730,19**	**34,52**	**970,09**	**61,90**	**1.366,48**	**91,67**	**1.272,75**	**100**	**1.025,97**	**100,00**	**4.635,28**	**100,00**	**4.635,28**	**100,00**	**25,43**	**Inspektorat Daerah**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	239,00	12	61,43	3	11,66	3	19,11	3	13,27	3	12,93	12	56,98	12,00	56,98			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	485,00	12	114,03	3	26,45	3	34,69	3	26,45	3	26,45	12	114,03	12,00	114,03			Inspektorat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4	15.196,15	12	3.986,92	3	830,37	3	1.124,83	-	1.112,64	6	833,14	12	3.900,98	12,00	3.900,98			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	243,00	12	57,00	3	14,25	3	14,25	3	14,25	3	14,25	12	57,00	12,00	57,00			Inspektorat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	15,50	14	3,48	3	1,19	4	1,00	3	0,54	4	0,72	14	3,45	14,00	3,45			Inspektorat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	89,00	5	20,00	2	4,03	1	5,37	1	5,55	1	4,92	5	19,87	5,00	19,87			Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	284,00	12	61,26	3	14,28	3	10,52	3	15,35	3	20,98	12	61,13	12,00	61,13			Inspektorat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	138,30	2	33,30	1	7,90	-	10,31	1	6,51	-	8,53	2	33,25	2,00	33,25			Inspektorat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	144,45	21	34,90	4	8,78	4	9,12	4	8,10	9	8,87	21	34,87	21,00	34,87			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	380,00	15	99,99	-	-	10	72,00	-	-	5	27,00	15	99,00	15,00	99,00			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76	669,00	19	190,17	4	45,55	5	41,59	6	46,06	4	54,23	19	187,42	19,00	187,42			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	98,46	3	22,25	-	-	1	22,25	1	-	1	-	3	22,25	3,00	22,25			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	712	59,60	178	12,00	33	3,18	40	1,43	79	3,65	26	3,68	178	11,94	178,00	11,94			Inspektorat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*													-						
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	80,00	2	10,00	1	1,84	-	0,00	1	5,39	-	2,63	2	9,86	2,00	9,86			Inspektorat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	118,00	3	23,45	1	0,60	1	0,00	1	15,00	-	7,65	3	23,26	3,00	23,26			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Presentase peningkatan penyelenggaraan pengawasan**	**99,05**	**3.081,81**	**86,93**	**902,09**	**94,20**	**217,89**	**95,98**	**156,33**	**94,30**	**237,40**	**94,54**	**277,94**	**94,54**	**889,55**	**94,54**	**889,55**	**95,45**	**28,86**	**Inspektorat Daerah**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah laporan pengawasan internal*																			
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	412	1.091,72	87	338,27	36	139,52	18	65,70	15	62,95	18	70,03	87	338,21	87,00	338,21			Inspektorat Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	313,92	5	76,98	-	4,14	2	10,13	-	15,35	3	47,23	5	76,86	5,00	76,86			Inspektorat Daerah
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168	580,22	42	164,03	9	35,93	7	28,43	26	52,96	-	46,43	42	163,75	42,00	163,75			Inspektorat Daerah
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.223	871,04	345	248,37	45	27,61	62	42,47	138	86,93	100	79,36	345	236,37	345,00	236,37			
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu*																			
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	47	230,62	15	74,45	3	10,68	6	9,61	1	19,20	5	34,88	15	74,37	15,00	74,37			Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**Presentasen peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**100,00**	**807,07**	**86,90**	**209,16**	**100,00**	**48,90**	**60,71**	**24,40**	**100**	**60,48**	**100**	**68,44**	**100,00**	**202,22**	**100,00**	**202,22**	**100,00**	**25,06**	**Inspektorat Daerah**
		Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah laporan pendampingan dan asistensi*																			
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	344	95,23	1	58,40	-	25,62	-	10,77	-	19,36	1	2,41	1	58,16	1,00	58,16			Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	168	92,01	42	6,01	-	4,51	42	0,00	-	-	-	1,50	42	6,01	42,00	6,01			Inspektorat Daerah
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	619,02	4	144,76	1	18,77	1	13,63	1	41,12	1	64,53	4	138,05	4,00	138,05			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**95,83**	**562,54**	**75,00**	**143,00**	**-**	**5,31**	**-**	**-**	**100,00**	**7,71**	**98,15**	**112,19**	**98,15**	**125,21**	**98,15**	**125,21**	**102,42**	**22,26**	**Inspektorat Daerah**
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																				
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	72	562,54	15	143,00	-	5,31	-	-	15	7,71	-	112,19	15	125,21	15,00	125,21			Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**16.680,31**	**100,00**	**4.253,31**	**34,52**	**810,05**	**61,90**	**1.106,60**	**91,67**	**1.137,01**	**100,00**	**1.023,99**	**100,00**	**4.077,65**	**100,00**	**4.077,65**	**100,00**	**24,45**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	251,01	12	60,65	-	14,34	-	17,98	-	16,06	12	11,02	12	59,40	12,00	59,40			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	641,32	12	188,30	-	39,70	-	59,13	-	29,78	12	58,96	12	187,57	12,00	187,57			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188	13.550,13	12	3.275,93	3	665,11	3	900,80	-	895,78	6	681,90	12	3.143,59	12,00	3.143,59			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	256,09	1	56,72	-	14,67	-	13,99	-	13,58	1	14,23	1	56,47	1,00	56,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	170,16	14	41,30	4	9,61	4	10,99	3	6,67	3	14,00	14	41,27	14,00	41,27			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	124,67	4	29,23	1	4,78	1	7,84	2	3,23	-	10,61	4	26,46	4,00	26,46			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dan Konsultasi SKPD	48	297,81	12	175,66	3	13,93	3	29,12	3	27,64	3	88,43	12	159,11	12,00	159,11			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu*														-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	173,95	2	43,15	-	9,36	-	12,18	2	8,37	-	12,94	2	42,86	2,00	42,86			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	48,91	21	12,25	6	4,45	6	1,90	5	3,47	4	2,28	21	12,10	21,00	12,10			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27	170,17	14	132,65	3	-	6	15,87	-	79,36	5	32,90	14	128,14	14,00	128,14			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108	595,61	12	146,67	3	26,70	3	32,75	3	37,83	3	44,82	12	142,10	12,00	142,10			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	40,42	1	16,53	-	2,94	-	0,00	-	2,94	1	10,27	1	16,14	1,00	16,14			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	226,01	12	44,56	3	3,61	3	3,38	2	6,76	4	21,71	12	35,46	12,00	35,46			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	8,51	1	2,00	-	0,31	-	0,00	-	0,54	1	0,90	1	1,75	1,00	1,75			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	125,55	35	27,72	1	0,54	-	0,67	28	5,00	6	19,04	35	25,25	35,00	25,25			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Capaian perencanaan pembangunan daerah**	**100,00**	**4.421,38**	**100,00**	**1.244,17**	**-**	**170,74**	**25,00**	**425,18**	**40,00**	**305,32**	**100,00**	**298,58**	**100,00**	**1.199,83**	**100,00**	**1.199,83**	**100,00**	**27,14**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Presentase konsistensi perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah	**99,75**		**99,73**		**29,40**		**56,00**		**82,11**		**99,91**		**99,91**		**99,91**		**100,16**		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*																			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	2.429,43	3	734,57	-	85,42	-	271,44	2	168,37	1	184,09	3	709,31	3,00	709,31			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	178,45	3	43,36	1	6,15	-	6,23	-	10,55	2	16,67	3	39,60	3,00	39,60			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah*																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	17	565,60	3	83,52	-	16,52	1	18,49	-	18,43	2	24,74	3	78,18	3,00	78,18			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi daerah*																			
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	41	959,06	11	314,87	4	46,85	3	111,22	2	95,38		54,16	9	307,61	9,00	307,61			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	289,22	12	67,86	3	15,80	3	17,80	3	12,59	3	18,94	12	65,13	12,00	65,13			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Presentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu**	**100,00**	**2.834,09**	**100,00**	**916,89**	**16,67**	**183,45**	**33,33**	**168,80**	**85,00**	**122,68**	**100,00**	**417,04**	**100,00**	**891,98**	**100,00**	**891,98**	**100,00**	**31,47**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	**100,00**		**100,00**		**16,67**	**-**	**33,33**		**83,33**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
			Presentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	**100,00**		**100,00**		**16,67**		**33,33**		**71,43**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*																			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	460,87	6	111,98	1	19,41	1	34,99	3	22,75	1	33,87	6	111,03	6,00	111,03			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	411,45	6	91,95	1	22,01	1	24,31	3	14,50	1	28,09	6	88,90	6,00	88,90			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	601,81	8	144,81	1	33,29	2	31,30	4	21,83	1	56,41	8	142,83	8,00	142,83			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrakstruktur dan Kewilayahan*																			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	375,51	7	261,02	1	37,31	1	23,10	3	15,90	2	176,64	7	252,95	7,00	252,95			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahanyang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	356,88	7	155,20	1	19,52	1	25,99	3	22,09	2	82,79	7	150,39	7,00	150,39			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA*																			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	324,34	6	76,93	1	26,75	1	15,13	3	13,96	1	20,15	6	76,00	6,00	76,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26	303,23	6	75,01	1	25,17	1	13,96	3	11,66	1	19,09	6	69,88	6,00	69,88			
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase perencanaan keistimewaan**	**100,00**	**1.403,74**	**100,00**	**226,91**	**0,00**	**-**	**25,00**	**44,64**	**100,00**	**117,31**	**100,00**	**64,07**	**100,00**	**226,03**	**100,00**	**226,03**	**100,00**	**16,10**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	**100,00**		**100,00**		**25,00**		**50**		**75,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*																			
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	16	742,46	4	63,83	1	-	1	25,52	-	42,61	2	(4,42)	4	63,71	4,00	63,71			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Rencana Proram dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Se-DIY	16	661,28	4	163,1	-	-	-	19,13	-	74,70	4	68,49	4	162,31	4,00	162,31			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Capaian inovasi daerah**	**138,00**	**1.231,48**	**124**	**263,57**	**187**	**32,82**	**187**	**34,91**	**187**	**43,76**	**190**	**122,12**	**190**	**233,60**	**190,00**	**233,60**	**137,68**	**18,97**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Capaian Penelitian Dan Pengembangan	**7,00**		**6**		**-**		**-**		**-**		**6**		**6**		**6,00**		**85,71**		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi daerah yang masih eksis*																			
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	72	270,20	18	63,55	10	17,63	2	0,00	4	10,05	2	28,55	18	56,23					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	19	961,28	4	200,02	-	15,19	-	34,91	-	33,71	4	93,57	4	177,37					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**129.691,53**	**100**	**33.949,97**	**34,52**	**5.180,88**	**61,90**	**5.801,43**	**91,67**	**6.096,70**	**100,00**	**8.562,29**	**100,00**	**25.641,29**	**100,00**	**25.641,29**	**100,00**	**19,77**	**BKAD**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	403,30	12	90,77	3	17,79	3	16,59	3	13,64	3	15,31	12	63,32	12,00	63,32			BKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144	836,92	12	250,61	3	55,79	3	68,41	3	57,47	3	60,63	12	242,29	12,00	242,29			BKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	280	123.808,37	12	31.436,92	3	4.742,83	3	5.406,25	3	5.810,10	3	7.317,51	12	23.276,69	12,00	23.276,69			BKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan barang	4	419,62	12	103,88	2	17,59	3	25,88	4	25,65	3	34,10	12	103,22	12,00	103,22			BKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*						-													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	552,03	12	303,50	3	43,82	3	56,43	3	24,48	3	110,01	12	234,74	12,00	234,74			BKAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	259,54	12	63,21	3	16,40	3	12,86	3	12,75	3	15,93	12	57,95	12,00	57,95			BKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,87	2	15,66	-	3,07	-	4,07	2	5,69	-	2,38	2	15,21	2,00	15,21			BKAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	62,84	21	14,84	7	4,98	5	1,84	4	3,68	5	3,87	21	14,38	21,00	14,38			BKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56	135,18	12	34,10	3	8,42	3	9,55	3	8,98	3	6,93	12	33,88	12,00	33,88			BKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	94,43	12	22,77	3	5,34	3	6,24	3	6,42	3	4,18	12	22,18	12,00	22,18			BKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	287	1.666,18	94	707,77	16	217,92		50,57	32	45,86	46	371,98	94	686,33	94,00	686,33			BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	156	581,04	36	180,35	10	35,44	36	31,01	-	51,24	-	57,43	46	175,12	46,00	175,12			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	418,58	2	607,33	-	-	2	92,33	-	9,80	-	502,49	2	604,61	2,00	604,61			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	428	299,63	30	73,27	5	11,49	9	19,41	5	20,93	11	14,54	30	66,37	30,00	66,37			BKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pedidikan dan pelatihan	12	72,00	3	45,00	-	-	3	0,00	-	-	-	45,00	3	45,00	3,00	45,00			BKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan pengelolaan anggaran**	**100,00**	**804.462,39**	**100,00**	**202.583,71**	**100,00**	**66.124,47**	**100,00**	**58.003,51**	**100,00**	**36.660,95**	**100,00**	**25.113,05**	**100,00**	**185.901,98**	**100,00**	**185.901,98**	**100,00**	**23,11**	**BKAD**
			Cakupan pengelolaan perbendaharaan	**95,68**		**94,97**		**69,81**		**76,88**		**94,94**		**97,72**		**97,72**		**97,72**		**102,13**		
			Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	**100,00**		**100,00**		**-**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan yang terselesaikan*																			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis	48,00	672.958,07	12	173.496,91	3	65.394,40	3	53.301,33	0	34.328,34	-	20.472,83	6	173.496,91	6,00	173.496,91			BKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	8,00	79.362,37	12	14.434,58	3	52,09	3	245,00	0	-	-	795,23	6	1.092,33	6,00	1.092,33			BKAD
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	8,00	47.515,09	2	13.569	-	537,51	0	4.283,88	0	1.967,89		3.500,59	-	10.289,88	-	10.289,88			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%)*																			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	48	1.261,12	12	292	-	22,96	-	12,00	8	137,09	4	105,78	12	277,83	12,00	277,83			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8	497,03	2	117,46	-	-	-	1,60	-	110,28	2	-	2	111,88	2,00	111,88			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	16	426,17	4	98,88	-	2,44	-	0,99	4	31,51	-	63,65	4	98,59	4,00	98,59			BKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	340	313,82	85	72,67	43	13,70	-	8,59	-	10,02	42	30,12	85	62,42	85,00	62,42			BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan*																			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah	504	723,44	126	178,12	42	36,62	42	43,05	42	33,51	-	49,03	126	162,21	126,00	162,21			BKAD
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8	50,44	2	11,88	1	-	-	3,03	1	5,39	-	3,13	2	11,55	2,00	11,55			BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	448	386,92	16	90,23	3	12,58	3	17,07	3	17,46	7	37,59	16	84,69	16,00	84,69			BKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian atas penerbitan anggaran kas dan SPD	13.840	103,44	12	24,36	3	-	3	4,49	3	5,76	3	12,70	12	22,96	12,00	22,96			BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan*																			
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	349,12	2	80,23	-	38,52	2	41,62	-	-	-	(0,00)	2	80,14	2,00	80,14			BKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68	87,20	17	18,00	4	-	4	7,88	5	-	4	9,98	17	17,86	17,00	17,86			BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	672	107,06	168	24,84	42	3,01	42	8,18	42	6,01	42	6,69	168	23,89	168,00	23,89			BKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.016	321,09	504	75,09	126	10,63	126	24,81	126	7,69	126	25,72	**126**	68,85	126,00	68,85			BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Presentase penerimaan pajak daerah**	**100,00**	**17.176,43**	**100,00**	**5.481,82**	**17,39**	**888,84**	**41,11**	**1.289,71**	**67,67**	**789,45**	**84,34**	**2.313,92**	**84**	**5.281,92**	**84,34**	**5.281,92**	**84,34**	**30,75**	**BKAD**
			Presentase capaian pendapatan daerah	**86,22**		**73,01**		**40,68**		**46,86**		**60,57**		**195,15**		**195**		**195,15**				
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah*																			
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	848	579	212	235	38	28,01	48	43,78	63	60,20	63	99,82	212	231,81	212,00	231,81			BKAD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	65	677,17	29	259	7	48,61	8	28,50	7	27,49	7	131,59	29	236,20	29,00	236,20			BKAD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya data obyek pajak, subyek pajak daerah tahun n	32	10.436,25	8	2.559,51	-	507,32	2	758,02	4	585,80	2	650,08	8	2.501,22	8,00	2.501,22			BKAD
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1.412.508	3.968,23	353.127	2.025	352.407	247,60	240	374,53	240	54,79	240	1.271,87	353.127	1.948,79	353.127,00	1.948,79			BKAD
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8	363,55	2	61,89	-	6,72	-	16,43	1	5,83	1	22,18	2	51,15	2,00	51,15			BKAD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	8	400,23	2	86,18	-	27,42	-	31,01	1	13,81	-	8,60	1	80,85	1,00	80,85			BKAD
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	7	339,02	2	75	-	17,00	-	21,58	1	20,52	-	14,44	1	73,55	1,00	73,55			BKAD
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	16	412,65	4	181	2	6,16	-	15,86	-	21,01	2	115,34	4	158,36	4,00	158,36			BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Cakupan pengelolaan barang milik daerah**	**100**	**1.082,90**	**100**	**1.117,55**	**83,33**	**227,81**	**100,00**	**199,20**	**100**	**394,77**	**100,00**	**264,43**	**100,00**	**1.086,22**	**100,00**	**1.086,22**	**100,00**	**100,31**	**BKAD**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah*																			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD	12	72,77	3	97,87	1	5,40	-	2,38	2	4,80	-	83,37	3	95,96	3,00	95,96			BKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	8	218,87	2	709,28	-	186,95	-	171,77	1	288,26	1	41,15	2	688,13	2,00	688,13			BKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlh dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	240,94	6	137	1	8,84	1	18,11	2	22,11	2	81,77	6	130,83	6,00	130,83			BKAD
		Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	8	410,50	2	116,76	1	23,87	1	2,60	-	70,74	-	18,57	2	115,77	2,00	115,77			BKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	16	139,88	4	56,30	-	2,75	-	4,34	2	8,86	2	39,58	2	55,53	2,00	55,53			BKAD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**391.496,78**	**100**	**100.317,08**	**34,52**	**14.480,59**	**61,90**	**30.227,10**	**91,67**	**23.598,44**	**100,00**	**31.665,94**	**100,00**	**99.972,06**	**100,00**	**99.972,06**	**100,00**	**25,54**	**BKPP**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*																			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	430,00	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-			BKPP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	260,00	1	68,98	-	15,96	-	14,00	-	12,64	1	16,29	1	58,89	1,00	58,89			BKPP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			1	112,0	-	25,84	-	34,15	-	25,95	1	25,97	1	111,91	1,00	111,91			BKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*umlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*											*6*	-							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	388.764,83	12	99.583	3	14.377,96	3	29.962,95		23.403,79	3	31.533,44	9	99.278,14	9,00	99.278,14			BKPP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	262,35	12	52,35	3	12,75	3	13,20	3	12,98	4	13,20	13	52,13	13,00	52,13			BKPP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	39,50	14	9,93	3	2,52	4	3,27	3	1,00	4	2,92	14	9,72	14,00	9,72			BKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	290,00	12	69,71	3	10,56	3	16,63	-	17,05	6	16,97	12	61,21	12,00	61,21			BKPP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	63,00	1	17,05	-	5,84	-	6,64	9	1,97	-	2,14	9	16,59	9,00	16,59			BKPP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*												-							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	72,51	2	9,52	-	1,92	-	3,55	12	2,82	-	0,30	12	8,59	12,00	8,59			BKPP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21,59	21	3,59	8	1,07	4	0,45	5	1,75	4	0,27	21	3,54	21,00	3,54			BKPP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*													-						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	718,00	20	78,55	-	-	9	51,29	-	-	3	24,53	12	75,82	12,00	75,82			BKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*												-							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14	365,00	15	88,77	6	20,74	-	13,31	7	14,34	2	27,22	15	75,61	15,00	75,61			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	60,00	1	197,72	-	-	-	94,97	-	99,42	1		1	194,39	1,00	194,39			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	84,00	22	19,59	6	5,42	7	6,68	7	4,73	-	2,69	20	19,53	20,00	19,53			BKPP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	53,00	4	6,00	-	-	4	6,00	-	-	-		4	6,00	4,00	6,00			BKPP
		Program Kepegawaian Daerah	**Cakupan Pengembangan Aparatur**	**45,41**	**20.971,08**	**44,90**	**4.465,32**	**22,92**	**356,73**	**35,19**	**1.235,14**	**56,45**	**1.813,05**	**64,38**	**675,78**	**64,38**	**4.080,70**	**64,38**	**4.080,70**	**141,77**	**19,46**	**BKPP**
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	**85,44**		**81,46**		**79,04**		**79,27**		**79,89**		**79,47**		**79,47**		**79,47**		**93,01**		
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	**99,98**		**99,97**		**83,33**		**83,33**		**94,51**		**113,58**		**113,58**		**113,58**		**113,60**		
		Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN*																			
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang dibina	100	202,00	100	52,52	20	6,09	150	15,78	202	9,95	2	17,07	374	48,89	374,00	48,89			BKPP
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	70	138,00	70	15,05	-	-	-	2,62	68	10,37	-	0,00	68	12,99	68,00	12,99			BKPP
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	80	110,00	64	63,64	25	2,68	28	1,89	7	51,91	37	5,97	97	62,46	97,00	62,46			BKPP
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	3	12.508,47	3	2.828,17	-	56,60	-	1.002,39	1	1.468,23	2	206,94	3	2.734,15	3,00	2.734,15			BKPP
		Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat*												-							
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanan Mutasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	300	285,00	230	48,61	54	8,92	26	9,78	19	6,84	149	15,76	248	41,30	248,00	41,30			BKPP
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan Kenaikan Pangkat PNS	700	310,00	700	55,78	900	21,68	-	6,67	222	13,27	-	12,85	1.122	54,46	1.122,00	54,46			BKPP
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	26	2.000,00	4	543,33	1	105,60	2	46,04	2	199,27	2	143,37	7	494,28	7,00	494,28			BKPP
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*												-							

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 ÷ 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya workshop Pengendalian Penilaian Angka Kredit JF	27	97,00	27	11,82	-	-	-	0,00	-	-	27	11,22	27	11,22	27,00	11,22			BKPP
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5	582,50	5	125,00	1	54,28	-	25,60	3	4,39	1	18,87	5	103,14	5,00	103,14			BKPP
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*																			
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	3.267,50	2	501,77	-	79,62	-	29,59	-	9,08	2	199,01	2	317,31	2,00	317,31			BKPP
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1.075,60	1	138,72	-	8,58	-	54,88	-	23,41	1	35,22	1	122,10	1,00	122,10			BKPP
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	395,00	1	80,91	-	12,68	1	39,89	-	16,33	-	9,50	1	78,40	1,00	78,40			BKPP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan**	**100,00**	**994,29**	**100,00**	**207,50**	**-**	**-**	**-**	**-**			**100**	**201,24**	**100,00**	**201,24**	**100,00**	**201,24**	**100,00**	**20,24**	**BKPP**
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase penyelenggaraan diklat keistimewaan*																			
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewan Kabupaten/Kota	Terlatih/terdidiknya Pejabat Administrator (Eselon III) & Pengawas (Eselon IV) untuk mengikuti Diklat Keistimewaan	210	994,29	1	207,50	-	-	-	-	-	-	1	201,24	1	201,24	1,00	201,24			BKPP
							Rata-rata capaian kinerja (%)									**99,91**	**93,17**					
							Predikat kinerja									**ST**	**ST**					

I. Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

II. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1. Capaian kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum optimal karena adanya kendala internal maupun eksternal serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya
2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga gap antara kinerja fisik dan keuangan masih tinggi
4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat

III. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
1. OPD agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan ROPK yang telah disusun;
2. Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jada sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk apabil ada kendala dalam pelaksanaan pengadaan / tender ;
3. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY dan Kementerian/Lembaga;
4. Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi pengendalian Monevku

IV. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
1. Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPD 2023-2026;
2. Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. OPD agar melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan yang telah selesai dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.
4. OPD agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal serta memperhitungkan dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di tahun 2025. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah memerlukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilhasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu, masa kini, dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi), sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan keadaan perekonomian dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya akan menunjukkan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2023 mencapai 9.951,95 miliar rupiah, naik sekitar 532,59 miliar rupiah (5,65%) dibandingkan tahun 2022. Untuk melihat lebih jelas perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.43
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 merupakan capaian yang tertinggi dengan nilai 13,49 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ini diantaranya dipengaruhi oleh pembangunan bandara baru. Sehingga hal ini berimplikasi pada tingginya pertumbuhan sektor konstruksi dan konstruksi transportasi dan pergudangan. Sektor Konstruksi pertumbuhannya naik di 2019 disebabkan karena berbagai jenis kegiatan masih berjalan di Kabupaten Kulon Progo, diantaranya pembangunan bandara Yogyakarta International Airport, pembangunan jalan jalur lintas selatan, pembangunan jalan bedah Menoreh, pembangunan pengendalian banjir wilayah selatan serta pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Namun pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kulon Progo terkontraksi lebih dalam daripada DIY, yaitu mencapai -3,45 persen dan pada tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Di tahun 2021 kinerja perekonomian Kulon Progo yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Di tahun 2022, kinerja perekonomian semakin meningkat di angka 6,57 persen. Dan di tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,65 persen.

Pemerataan ekonomi juga tidak terlepas dampaknya terhadap kemiskinan serta ketimpangan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 secara umum semakin kecil, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 18,01% dan kembali meningkat menjadi 18,38% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 16,39% di tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 15,64% di tahun 2023.

Menurut analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perubahan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo antara lain: pandemi global Covid-19 yang berdampak pada

perubahan perilaku aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk. Masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (hampir miskin) jika pendapatannya tetap atau hanya meningkat sedikit sehingga akhirnya menjadi miskin. Secara umum kemiskinan tinggi berada dikawasan terisolir yaitu dikawasan lereng pegunungan dan pantai yang mempunai sumberdaya rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan DIY yang pada tahun 2023 berada pada 11,04% dan persentase nasional pada 9,36%.

Fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo juga banyak dipengaruhi oleh inflasi yang mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan secara signifikan pada tahun 2023 sebesar Rp416.870,00 naik dari tahun 2022 yang sebesar Rp381.666,00. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan per kapita per bulan.

Gini Rasio merupakan salah satu metode untuk menunjukan adanya ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan/ pemerataan ekonomi. Angka Gini Rasio Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 sebesar 0,367, pada tahun 2022 adalah 0,380 dan meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan DIY yang pada tahun 2023 mencapai 0,449. Tahun 2023 pemerataan pendapatan di Kulon Progo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 terlihat dari meningkatnya indeks gini. Nilai Gini Rasio yang semakin meningkat menunjukkan kurang meratanya pendapatan penduduk di suatu wilayah. Permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan memiliki keterkaitan erat. Dengan kondisi masyarakat yang semakin sejahteranya/ terangkatnya maka akan mengurangi perbedaan/ gap pendapatan antar penduduk sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan juga akan turut menurunkan gini rasio di daerah.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 adalah sebesar 75,82, angka ini meningkat 0,36 dari tahun 2022 dengan angka 75,46. Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo berada di bawah DIY yang pada tahun 2023 mencapai angka 81,09. Meskipun demikian Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada nilai 72,91.

Dimensi pembentuk IPM yakni dimensi pengetahuan, dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi standar hidup layak. Menurut analisis BPS, indikator usia harapan hidup pada dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang tertinggi di DIY, sedangkan pada dimensi pengetahuan capaian Kabupaten Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota di DIY.

Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan nilai budaya untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan peraturan daerah tentang Pendidikan Karakter dengan mengembangkan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa berdasar nilai keagamaan, kebangsaan, kemataraman dan kepramukaan. Pembangunan SDM masyarakat yang berbudaya ini diperlukan juga untuk menyiasati adanya dampak global beroperasinya BIY agar SDM di Kabupaten Kulon Progo tetap memegang teguh budaya lokal yang ada bahkan menjadikan budaya lokal sebagai daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung di Kabupaten Kulon Progo. Dengan peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya maka akan memperkuat modal kerja dan kesempatan warga masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Di sisi lain aparatur pemerintah di Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya aparatur perlu ditambah dari sisi kuantitas untuk mencapai jumlah ideal, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik.

3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selayaknya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas. Penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi fokus yang utama, mengingat keberadaan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo tentu akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan efisien. Tata kelola pelayanan publik dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah

4. Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesinambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesinambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar kawasan stasiun Wates dan Stasiun Kedundang.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada lima. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pada pengelolaan irigasi, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan tersebut, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi mulai dari data yang kurang update dan kurang tertata dengan bai, hingga ketersediaan SDM dan pembiayaan untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau

mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kulitas air dihitung berdasarkan parameter Derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Padatan tersuspensi total (TSS), Nitrat (NO3-N), Total fosfat (T-Phosphat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO2 dan NO2. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Nilai IKLH tahun 2023 di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dengan komponen IKA meningkat dari 36 menjadi 50,61, IKU menurun dari 91,30 menjadi 90,74, dan IKTL menurun dari 69,55 menjadi 53,51. Setelah dilihat lebih mendalam, peningkatan nilai IKLH ini disebabkan karena tingginya IKA. Nilai IKA meningkat signifikan pada tahun 2023 akibat terjadinya *el nino* di mana musim kemarau semakin panjang dan air sungai yang diambil sample nya belum menyerap limbah yang ada di dalam tanah karena curah hujan belum banyak.

5. Masih Tingginya Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum merupakan isu strategis yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat, terutama akibat dari pembangunan BIY dan rencana pembangunan jalan tol. Penanganan potensi kerawanan di masyarakat dapat dilakukan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Fokus dari pelaksanaan SPM ini adalah kegiatan pembinaan kegiatan politik daerah yang dilaksanakan 4 kali pada tahun 2022. Jumlah partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang telah dibina mencapai 139 organisasi atau seluruh organisasi yang ada di Kulon Progo telah menerima pembinaan. Dengan dibinanya seluruh organisasi tersebut, maka diharapkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang tentram dan tertib dapat tercipta.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum juga dapat terjadi dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Peraturan daerah yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketertiban justru dapat menjadi potensi pelanggaran dan kerawanan. Untuk meminimalisir hal ini, maka dilakukan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam SPM.

2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas **Pengembangan Kawasan Aerotropolis** dengan sasaran daerah:
   a. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      a) Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas.
      b) Sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal
      c) Belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta
      d) Masih terbatasnya akses sarana air bersih, pengolahan limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga.
      e) Infrastruktur saluran irigasi masih belum optimal
      f) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti APILL, rambu, marka, *guardrail,* dan LPJU masih belum optimal
      g) Belum optimalnya fasilitas prasaran, sarana, dan utilitas
      h) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal
   b. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      a) Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW
      b) Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW
      c) Belum ditetapkannya RDTR
2. Prioritas **Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.** Untuk melanjutkan penurunan kemiskinan ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan hal tersebut, namun di dalamnya terdapat permasalahan sebagai berikut:
   a. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri
   b. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, pengetahuan, dan motivasi berwirausaha
   c. Akses dan kemampuan pemasaran UMKM masih terbatas
   d. Belum optimalnya kegiatan ekspor kerajinan
   e. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan belum optimal
   f. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pada kegiatan industri ekspor
   g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan lembaga keuangan
   h. Kurangnya daya tarik objek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan
   i. Pemasaran pariwisata yang belum optimal
   j. Belum optimlanya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata
   k. Masih kurangnya usaha jasa pariwisata yang bersertifikat
   l. Kemampuan pengelolaan BUMDes masih di bawah standar
   m. Belum optimalnya daya saing produk industri
   n. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani
   o. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian

p. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani

3. Prioritas **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan sasaran daerah:
   a) Meningkatnya kulitas pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      (1) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
      (2) Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan masih kurang.
      (3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf
      (4) Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Kulon Progo
      (5) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai SPM
   b) Meningkatnya prestasi generasi muda, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      (1) Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga
      (2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
      (3) Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo
   c) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      (1) Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
      (2) Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi;
      (3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
      (4) Budaya makan ikan oleh masyarakat masih rendah
   d) Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      (1) Belum optimalnya pengembangan/ pelestarian seni dan budaya serta pengembangan nilai-nilai luhur budaya.
      (2) Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya
      (3) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya
4. Prioritas **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan**, dengan sasaran meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Memiliki permasalahan sebagai berikut:
   a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah;
   c. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
   d. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
   e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai;
   f. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing masing Perangkat Daerah belum merata;
   g. Peran lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal dalam pembangunan
   h. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi meliputi:
      1. Masih rendahnya kondisi sarana prasarana kebencanaan dalam rangka pemenuhan SPM
      2. Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam mengungkit kinerja daerah
      3. Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah
   i. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, permasalahan yang dihadapi yaitu keberadaan PKL masih menempati lokasi fasilitas umum

seperti trotoar, dan kawasan pedestrian alun-alun wates, sehingga dapat mengganggu ketertiban aktivitas umum.

5. Prioritas **Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Memiliki permasalahan sebagai berikut:
   a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air
   b. Menurunnya kualitas udara
   c. Pengelolaan sampah belum optimal

2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang dihadapai saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan antara lain:

a. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang. Standar kompetensi pendidik juga belum memberikan daya dukung pada IPM, hal ini mengingat capaian pemenuhan kualifikasi akademik (S1/DIV) belum optimal atau yang berarti belum mencapai 100 persen. Capaian tahun 2018 sebesar 84,52%, tahun 2019 naik sebesar 86,98%, tahun 2020 naik sebesar 89,4%, tahun 2021 meningkat menjadi 89,45%, dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi 89,61%. Berdasarkan capaian tersebut maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendidik. Kendala yang dihadapi selama ini dari sisi motivasi tenaga pendidik yang memasuki/menjelang purna tugas, pada kondisi itu untuk meningkatkan kapasitasnya sangatlah sulit. Di sisi yang lain, selaras dengan kebijakan nasional, bahwa sertifikasi profesi dilakukan bertahap, tidak secara bersama atau dengan kuota tertentu, sehingga ada jeda juga ada jarak waktu yang membuat seluruh pendidik mengantri melakukan sertifikasi profesinya
c. Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf. Capaian angka melek huruf secara umum mengalami fluktuasi dari 94,4% di tahun 2019 menjadi 95,89% di tahun 2022, namun menurun menjadi 95,66% di tahun 2023. Angka melek huruf yang belum mencapai 100% masih menjadi permasalahan, sehingga diperlukan upaya aktif baik pemerintah serta masyarakat untuk dapat mewujudkan Kulon Progo bebas buta huruf.
d. Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga,
e. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Kulon Progo.
f. Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemenuhan IPM yang optimal antara lain: belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai SPM, dalam pemenuhannya perlu adanya peran dari semua pihak, oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, maupun masyarakat (baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun tidak). Standar sarana dan prasarana tersebut tidak membedakan satuan pendidikan negeri maupun

swasta, namun keseluruhan, mengingat peserta didik yang dilayani adalah warga negara yang memiliki hak yang sama.

2. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih dihadapi hingga tahun 2023 dapat diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni:

a. angka kematian ibu,
b. angka kematian bayi, dan
c. angka harapan hidup.

Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan angka tertinggi ke dua di DIY di bawah Kota Yogyakarta, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kendala yang dihadapi adalah:

- Masih adanya keterlambatan pihak keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan
- Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di rumah sakit
- Masih kurangnya kepedulian ibu dan pihak keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi:

a. Meningkatkan edukasi pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi.
b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
c. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Kohort Elektronik” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
d. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
e. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas
f. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
g. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Jampersal meliputi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
h. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
i. Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam mendukung penanganan ibu hamil terutama bumil yang berisiko tinggi.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kawasan yaitu perbukitan, dataran dan pesisir. Kondisi topografi tersebut berpengaruh pada perbedaan aksesibilitas wilayah. Secara umum, perkembangan dan aksesibilitas wilayah masih didominasi pada wilayah daratan (Wates, Pengasih, Sentolo, dan Lendah) dan pesisir (Temon, Panjatan, dan Galur). Daerah perbukitan yang kurang berkembang, selain disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan tingginya nilai infrastruktur juga disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai subyek pembangunan di daerah tersebut yang terbatas. Kawasan perbukitan yaitu di Kapanewon Samigaluh (Kalurahan Banjarsari, Purwoharjo dan Kebonharjo), dan Kapanewon Kokap (Kalurahan Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto) merupakan kantong-kantong kemiskinan yang harus dibedah dengan infrastruktur yang bisa meningkatkan aksesibilitas untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian wilayah. Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan yang cukup signifikan dikarenakan adanya refokusing kegiatan untuk penganggulangan Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap secara keseluruhan menjadi 69,14%. Penurunan ini terjadi khususnya pada jalan Lokal Primer I yang mengalami penurunan lebih besar daripada jalan Lokal Primer II. Tahun 2021 seiring dengan peningkatan alokasi untuk pemeliharaan jalan, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik menjadi 72,01%. Pada tahun 2022 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik lagi menjadi 72,7%. Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,32 km dengan kondisi baik 16,38 km (57,84%) dan kondisi sedang 11,54 km (40,75%). Jalan Provinsi sepanjang 175,140 km kondisi baik 81,89 km (46,76%), kondisi sedang 37,27 km (21,28%).

Pada tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantab untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantab dari 74,09 % menjadi 74,88%.

Selain penyediaan jalan, diperlukan sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Selanjutnya dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang berlokasi di Kulon Progo, diperlukan sarana transportasi yang dapat mempercepat perjalanan manusia dan barang dari wilayah penumpang atau barang yang akan melalui BIY, maupun sebaliknya dari BIY ke

wilayah di sekitar Yogyakarta. Selain dengan dibangun dan dioperasikannya Kereta Bandara, upaya meningkatkan aksesibilitas BIY juga direncanakan dengan membangun jalur Tol Solo-Yogyakarta-BIY Kulon Progo. Meskipun banyak manfaat yang akan diperoleh dengan rencana pembangunan tol tersebut, ada beberapa konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pembangunan tol akan berpengaruh terhadap infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, terutama infrastruktur jalan dan sumber daya air. Beberapa kemungkinan yang akan muncul sebagai dampak dari pembangunan jalan tol yaitu: tertutupnya akses masyarakat pada titik persinggungan antara Jalan Provinsi / Jalan Kabupaten/ Jalan Lingkungan dengan trase tol, terhambatnya saluran irigasi dan drainase pada titik persinggungannya dengan trase tol, peningkatan kerusakan jalan yang meliputi jalan di sekitar lokasi proyek maupun jalan yang dilalui oleh armada pengangkut bahan material, serta dampak sosial di masyarakat. Sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah beberapa kali melakukan kordinasi dengan beberapa instansi terkait mengenai rencana pengendalian dan penanganan dampak pembangunan Jalan Tol.

Selain itu, aspek infrastruktur lainnya yang masih terdapat permasalahan adalah penyediaan prasarana sarana utilitas (akses penyediaan sarana air bersih, pengolahan limbah domestik, pengelolaan sampah rumah tangga) yang masih terbatas jumlahnya. Pada Tahun 2023 cakupan layanan akses air bersih di Kabupaten Kulon Progo mencapai 100%. sebagian besar masyarakat Kulon Progo masih mengakses air bersih melalui jaringan non perpipaan yaitu sebesar 57,92% sedangkan untuk akses air bersih melalui jaringan perpipaan sebesar 42,08%. Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan Pamsimas. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, yang juga tergabung dalam Pamaskarta. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau permukiman yang berada di wilayah utara karena topografi kawasan yang ekstrem menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumahnya menjadi besar, sehingga perlu dukungan dari segi pendanaan diluar APBD Kabupaten, baik APBD Provinsi, Danais, APBN, hibah, maupun pendanaan lainnya.

Untuk peningkatan layanan air minum di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Pemda DIY telah menginisiasi pembangunan SPAM Kamijoro dengan menggunakan skema KPBU. SPAM Kamijoro yang mengambil air baku dari Sungai Progo akan melayani kebutuhan air minum untuk wilayah Bantul dan Kulon Progo. Rencana penggunaan air minum di Kulon Progo yang berasal dari Bendung Kamijoro yaitu untuk melayani YIA dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Terkait dengan pemanfaatan air dari SPAM Kamijoro tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan yaitu besarnya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan pembangunan jaringan distribusi utama menuju area layanan.

Kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebesar 61,17% dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan 8,23%, rusak sedang 12% dan rusak berat 22,91%. Bila dibandingkan dengan kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan provinsi dan pusat, saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawahnya, terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, saluran Irigasi yang masih berupa saluran tanah, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan, peningkatan menjadi saluran permanen dan pengembangannya, mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian dan swasembada pangan di

Kulon Progo. Sektor pertanian yang merupakan soko guru perekonomian masyarakat secara luas harus diprioritasikan dengan membangun sinergi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan di sektor irigasi yaitu masih minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani pemakai air tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi. Dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, komisi irigasi terkait, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Adapun tugas dari Komisi Irigasi antara lain merumuskan rencana kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi, memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi, ikut merumuskan rencana tata tanam, merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi, memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi, sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan Kalurahan dapat menjadi sasaran program Prasarana Sarana Utilitas.

Pada Sub Urusan Penataan Ruang, diketahui bahwa penataan ruang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Berdasarkan pada keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah belum optimalnya aspek perencanaan tata ruang sehingga menyebabkan aspek – aspek yang lain juga belum bisa berjalan dengan optimal. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012. Namun, dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo belum semuanya terwadahi dalam Perda tersebut dan saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang dalam proses reviu RTRW. Beberapa permasalahan yang menyebabkan aspek perencanaan tata ruang belum berjalan dengan optimal adalah

a. Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW

Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dalam 5 (lima) tahun belakangan ini cukup signifikan merubah arah pembangunan Kulon Progo antara lain keberadaan BIY, Kawasan Penyangga KSPN Borobudur, rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – BIY Kulon Progo, pengembangan kawasan Aerotropolis, pembangunan SPAM Regional Kamijoro, rencana pembangunan Bendung Bener sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk Kabupaten Kulon Progo, rencana pembangunan TPST dan SPALDT Kawasan Aerotropolis, pembangunan jalur Temon – Borobudur (Jalur Bedah Menoreh), pembangunan jalur kereta api pendukung BIY serta pengembangan kawasan strategis budaya sosial Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

b. Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW

Proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) RTRW telah dimulai sejak Tahun 2016 dan dalam perjalannya telah melewati dua kali pergantian regulasi yang terkait PK (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021) dan dua kali pergantian regulasi terkait substansi dalam rangka penetapan RTRW (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No.16 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021) sehingga Kabupaten Kulon Progo harus menyesuaikan kembali dokumen PK dan substansi RTRW. Hingga 2022, capaian penyelesaian untuk proses penetapan reviu RTRW sedang dalam proses verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian substansi Lahan Sawah yang Dilindungi dan penyelesaian Audit Tata Ruang sebagai syarat untuk dapat masuk ke tahapan pembahasan lintas sektor atau proses Loket di Kementerian ATR/BPN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi reviu RTRW;

c. Belum ditetapkannya RDTR

Sebagai langkah pendetailan terhadap rencana umum tata ruang kabupaten atau RTRW, perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR). RDTR ini nantinya merupakan dokumen tata ruang yang operasional terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada perijinan sehingga informasi terkait ruang untuk berinvestasi bisa langsung diperoleh melalui dokumen RDTR ini dan menjadi landasan bagi dikeluarkannya ijin berinvestasi di daerah. Sampai dengan saat ini, belum ada satupun RDTR yang ditetapkan karena proses penetapan RDTR hierarki dengan proses penetapan RTRW. Beberapa RDTR yang sudah tersusun antara lain RDTR Kawasan Sekitar BIY, RDTR Perkotaan Wates, RDTR Perkotaan Kalibawang dan RDTR Perkotaan Kokap. Landasan regulasi bagi kepastian berinvestasi khususnya di kawasan sekitar BIY merupakan hal yang paling ditunggu oleh para investor. Namun hal tersebut masih terkendala dengan belum ditetapkannya RDTR. Untuk menjembatani hal tersebut, penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang terkait ijin berinvestasi masih dilakukan melalui sidang TKPRD.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum optimalnya fasilitas PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas) di perumahan dan kawasan permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

(1) Terjadinya genangan air maupun banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, kondisi bangunan yang tidak memadai dan tidak terpelihara dengan baik;
(2) Kemacetan lalu lintas disebabkan penanganan jaringan jalan yang tidak terpadu dengan kawasan sekitarnya;
(3) Masih terbatasnya prasarana dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air bersih yang belum memadai dan merata, penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum ditangani secara terpadu, fasiltas PJU yang masih terbatas serta perlunya perbaikan kualitas jalan lingkungan dalam rangka memperlancar mobilitas penduduk.

Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya dapat melangsungkan kegiatannya dengan nyaman. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, baseline jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.818 unit tersebar di 12 kapanewon (tabel 2.75) pada tahun 2023. Dengan intervensi dari berbagai pihak, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan tiap tahunnya.

b. Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

Keberadaan kawasan permukiman kumuh terutama di wilayah perkotaan masih belum tertangani secara optimal. Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 terdapat 293, 79 Ha kawasan kumuh yang tersebar di kecamatan Wates, Sentolo, Galur, Pengasih, dan Nanggulan yang perlu ditangani dan telah dilakukan penanganan. Pada Tahun 2020 terbit SK Bupati Nomor 416/A/2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan bahwa luas kawasan Kumuh di Kabupaten Kulon Progo adalah 151,78 Ha. Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengurangan luasan kumuh sehingga sisa luasan kumuh adalah 77,51 Ha. Pada tahun 2023, dilakukan intervensi di 2 kalurahan yaitu Kalurahan Giripeni seluas 3,38 Ha dan di Kalurahan Wijimulyo seluas 1,5 Ha sehingga di tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang tersisa adalah 72,63 Ha.

5. Perhubungan

Beberapa permasalahan yang terjadi pada urusan perhubungan yaitu:

1) Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi. Kecelakaan didominasi oleh kalangan produktif dan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas.
2) Pembangunan di wilayah Kulon Progo saat ini semakin pesat, namun banyak pelaku usaha belum melengkapi usahanya dengan dokumen analisis dampak lalu lintas.
3) Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu lalu lintas, marka jalan, cermin tikungan, delineator, pagar pengaman jalan (*guardrail*) dan LPJU belum sesuai dengan yang seharusnya ada.
4) Keterbatasan infrastruktur informatika dalam mendukung sektor transportasi. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang memiliki kemampuan lebih baik dan memiliki manfaat yang lebih

banyak kepada masyarakat umumnya dan terutama dalam mendukung kelancaran pergerakan internal dan eksternal penduduk/masyarakat baik barang, jasa, maupun data. Untuk menyelesaikan hal tersebut perlu dicari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut dalam jangka panjang. Solusi bukan hanya menambah kapasitas jalan akan tetapi harus di dorong untuk mengimplementasikan *Intelligent Transportation System* (ITS) yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ATCS (*Area Traffic Control System*) dengan memanfaatkan teknologi *Traffic Light* terkini yang didukung dengan teknologi komunikasi dan informatika.

5) Pemenuhan penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Fasilitas utama berupa Fasilitas tempat parkir kendaraan di Terminal Ngeplang, Sentolo kurang optimal, sehingga dipandang perlu untuk diperbaiki.
6) Melihat dari latar belakang tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kulon Progo yg didominasi oleh kalangan remaja dan pelajar. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo. Diperlukan solusi yaitu penyediaan transportasi angkutan bagi pelajar di kalangan Kabupaten Kulon Progo yaitu keberadaan Bus Sekolah untuk menekan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.
7) Setelah pandemi covid kepadatan transportasi mulai meningkat, seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang memadati jalan raya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sendiri tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan raya sehingga terjadilah kemacetan lalu lintas. Kemacetan terutama terjadi berada di kawasan perkotaan Wates yang menjadi pusat perekonomian. Dimana area ruas jalan Wates terdapat kawasan pertokoan, tempat kuliner yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendatangi ruas jalan Wates tersebut. Di depan kawasan pertokoan maupun kuliner digunakan untuk area parkir kendaraan bermotor yang berdekatan dengan tepi jalan raya sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kurangnya lahan parkir menjadikan perlunya solusi untuk menentukan lokasi kantong parkir di kawasan perkotaan wates. Sempitnya ruas jalan perkotaan wates menjadikan parkir tepi jalan umum menjadi tidak ideal lagi. Semestinya untuk area parkir dibuatkan kantong-kantong parkir.
8) Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat termasuk dikalangan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas sehingga dibutuhkan contoh atau figur sebagai agen disiplin berlalu lintas dikalangan pelajar
9) Status jalan kabupaten di Kulon Progo adalah kelas III dimana konstruksinya hanya dapat menopang beban kendaraan dengan tonase tidak lebih dari 6 ton. Masih banyak kegiatan angkutan barang/ material yang melintas di jalan kabupaten dengan tonase melebihi yang sudah ditentukan sesuai kelas jalannya, dimana selain melanggar aturan juga memicu tingginya laju kerusakan jalan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan penindakan (yustisi) terhadap kendaran angkutan barang/ material yang melebihi tonase yang diperbolehkan.
10) Semakin banyaknya angkutan tambang yang beroperasi di beberapa kapanewon di Kabupaten Kulon Progo (8 kapanewon), serta adanya proyek rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kabupaten Kulon Progo, dan juga rencana mulainya pengoperasian Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini tentunya menambah resiko

keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat berujung pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

11) Masih banyaknya kendaraan angkutan barang/ umum yang menghindar dari pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan dan penindakan (yustisi) di lapangan. Banyak kendaraan angkutan barang/umum menghindar dari kegiatan operasi yustisi dengan cara mencari jalan lain yang tidak terawasi, selain itu juga banyak kendaraan angkutan barang/umum yang berhenti pada 500m - 1km sebelum lokasi operasi yustisi dan menunggu hingga operasi yustisi selesai beroperasi. Kondisi ini tentunya menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan angkutan barang/ umum menjadi tidak efektif karena masih banyak kendaraan angkutan barang/ umum.
12) Belum adanya pusat kegiatan masyarakat yang murah dan rekreatif di Kabupaten Kulon progo.

6. Lingkungan hidup

a. Kualitas dan kuantitas air masih fluktuatif

Berdasarkan hasil uji kualitas air, capaian IKA Tahun 2023 berada dalam kategori “sedang” dan berhasil mencapai target serta meningkat dari tahun 2022. Pemantauan kualitas air sungai untuk penentuan IKA dilakukan sebanyak 2 (dua) periode yang menggambarkan musim penghujan (bulan Maret) dan musim kemarau (bulan September). Akan tetapi pemantauan pada bulan September 2023 masih berada pada musim kemarau dikarenakan adanya pergeseran musim pada tahun 2023. Musim kemarau membuat air sungai tidak tercampur dengan sedimen sehingga membuat air lebih jernih.Debit air yang menurun pada musim kemarau membuat air sungai menjadi lebih pelan dan mencegah bercampurnya air dengan sedimen.. Lokasi pemantauan di 9 (sembilan) lokasi yaitu: Sungai Serang, Sungai Papah, Sungai Papak, Sungai Sudu, Sungai Nagung, Sungai Tedunan/Gede, Sungai Tinalah, Sungai Ngrancah, dan Sungai Pening. Parameter yang diuji ada 8 (delapan) yaitu : pH, DO, TSS, Total Phosphat, Nitrat, COD, BODs, dan Fecal Coliform. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yaitu : (1) Membangun SPALDT kawasan dan menambah jumlah IPAL Comunal; (2) Pendampingan tata kelola SPALDT dan IPAL Comunal; (3) membangun embung di wilayah genangan banjir atau di perbukitan; (3) Penanaman pohon disekitar mata air; (5) Melakukan kajian penyebab menurunnya kualitas air; dan (6) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada.

b. Menurunnya kualitas udara

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara pada tahun 2023 berada pada kategori Sangat Baik, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Kulon Progo memicu berkurangnya ruang terbuka hijau yang menjadi faktor menurunnya kemampuan alam dalam mengubah CO2 menjadi oksigen. Penyebab lain, menurunnya kualitas udara yaitu meningkatnya kandungan pencemar terutama di kawasan transportasi. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan aktifitas ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara diantaranya : (1) Menambah Ruang terbuka Hijau

(RTH) baik oleh Pemda maupun Pemkal; (2) Melanjutkan konservasi pantai selatan dan jalan kabupaten; dan (3) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada.

c. Pengelolaan sampah belum optimal

Berdasarkan hasil evaluasi jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 jumlah timbulan sampah sebesar 80.033,09 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola sebesar 37.008,07 ton/tahun atau 46,24% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 24.843,80 ton/tahun atau 31,04 % dan Penanganan Sampah sebesar 12.164,27 ton/tahun atau 15,2 %. Data tersebut sesuai dengan Neraca Pengelolaan Sampah tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo yang telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Pengurangan Sampah sudah melebihi target yang ditetapkan, namun untuk kegiatan Penanganan sampah belum memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah yaitu: (1) Pembentukan atau penguatan KSM ditingkat Kalurahan minimal 1 (satu); (2) Pembentukan atau penguatan Bank Sampah & TPS3R ditingkat Kalurahan minimal 1 (satu) dengan dimulai dari Kalurahan yang paling ramai; (3) Penguatan kelembagaan atau manajemen sarana prasarana berupa sosialisasi, pendampingan, bimtek, dan penguatan sarpras di tingkat kalurahan; (4) Penguatan peran Pemerintah Kalurahan dari APBKAL; dan (5) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada. (6) Terlaksananya Piloting Project Pengurangan Sampah Terintegrasi di 2 (dua) KSM. Piloting Project ini bagian dari pelaksanaan inovasi daerah “GEBER MERIAH” Gerakan Bersama Sinergi Kolaborasi Pengelolaan Sampah Rumah TanggaTerintegrasi di Kabupaten Kulon Progo. Suatu gerakan bersama yang melibatkan semua stakeholder terkait dalam rangka mengelola sampah yg terintegrasi, terkonvergensi dari hulu sampai ke hilir.

7. Pertanahan

a. Belum optimalnya data base tentang pemanfaatan lahan/ tanah.

Ketersediaan database pertanahan terkait objek dan subjek tanah, kelas, status dan titik koordinat lahan/tanah belum seluruhnya terinventarisir dan terkelola secara menyeluruh dan terpadu sehingga tak jarang memicu terjadinya sengketa tanah.

b. Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga.

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pensertifikatan tanah warga masih belum optimal. Selama ini berbagai program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BPN (program Prona).

8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan. Pada tahun 2023 rasio penduduk ber-KTP per satuan wajib KTP baru mencapai 99,32%, atau sejumlah 342.125 jiwa dari total penduduk wajib KTP 344.474 jiwa. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan peran serta

aktif masyarakt untuk kegiatan jemput bola agar kepemilikan dokumen kependudukan lebih meningkat.

b. Masih kurangnya perangkat PC komputer untuk pengoperasian SIAK & Rekam Cetak KTP-el, diperlukan penggantian perangkat untuk Rekam & Cetak KTP el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kapanewon se Kabupaten Kulon Progo. Dukungan terhadap sarana prasarana SIAK yang terus menerus dan berkelanjutan sangat dibutuhkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo sudah menerapkan SIAK Terpusat.
c. Keterbatasan SDM untuk operasional pelayanan Adminduk. Penambahan personil untuk petugas pelayanan yang mempunyai kompetensi dan keahlian di Bidang Pencatatan Sipil, Kependudukan, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat diperlukan.
d. Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Diperlukan tempat arsip dokumen hasl pelayanan Adminduk yang memadai. Kemampuan dalam pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil masih terbatas. Upaya yang dilakukan dengan melakukan digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara komprehensif tahun 2023 terdapat sebanyak 85 korban kekerasan. Telah dilakukan penanganan.pendampingan dan penjangkauan dan juga pencegahan perkawinan anak.
b. Sulitnya mendeteksi kasus KDRT dan penelantaran anak kecuali yang terlaporkan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
c. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan. Ditambah dengan masih adanya kejahatan jalanan yang dilakukan anak, dan munculnya kerentanan TPPO baik sebagai lokasi asal, transit, maupun tujuan.
d. Perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari pencegahan maupun menanganan KtPA dan dibutuhkan optimalisasi koordinasi lintas daerah terkait perlindungan perempuan dan anak khususnya penanganan KTpA maupun TPPO.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pasal 76 mengamanatkan bahwa kabupaten atau kota diwajibkan memiliki unit perlindungan perempuan dan anak. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, maka Kabupaten Kulon Progo akan membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
f. Implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di OPD maupun kalurahan belum optimal. Dari 87 kalurahan baru 14 kalurahan yang diinisiasi sebagai kalurahan sadar gender. Belum semua OPD menyusun anggaran yang dilampiri dengan analisa *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).
g. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan seperti Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan belum optimal dari segi kualitas produk, pengemasan, legalitas usaha, maupun promosi pemasaran.

10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adanya persepsi di kalangan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya usia 45 tahun keatas merasa sudah tidak produktif lagi sehingga enggan menggunakan alat kontrasepsi modern. Kecenderungannya pasangan usia subur menggunakan kontasepsi tradisional (KB alamiah) yang menyebabkan prevalensi KB aktif menurun. Hal ini terbukti dengan *total fertility rate* (TFR) yang angkanya 1,48.

11. Sosial

a. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 masih tergolong tinggi dengan capaian 15,64% walaupun turun dari tahun 2022 yakni 16,39%.
b. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemeringkatan warga miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial. Perbaikan yang mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kapanewon dan tingkat kalurahan/ kelurahan. Peran TKPK Kapanewon dan Kalurahan dalam pendataan adalah dengan mengoptimalkan musyawarah kalurahan dan kelurahan dalam pembahasan data penerima bantuan sosial.
c. Pembiayaan urusan sosial baik logistik kebencanaan, konsumsi piket tagana, dan sarana prasarana pendukung layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) belum terbiayai sepenuhnya dari APBD.

12. Tenaga Kerja

a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.

   Rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya diantaranya minimnya ketrampilan/keahlian, penguasaan teknologi dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan melaksanakan program unggulan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja.
b. Rendahnya pengetahuan dan motivasi berwirausaha.

   Penduduk usia kerja yang sudah merintis usaha belum mampu mengembangkan usahanya karena kurangnya motivasi dan keterbatasan pengetahuan berwirausaha.
c. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen.

   Sebagian perusahaan masih kurang tertib dalam melaksanakan norma ketenagakerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka meminimalkan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
d. Masih kurangnya kesesuaian antara kebutuhan (kesempatan kerja) dengan ketersediaan tenaga kerja.

   Peluang kerja / kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi tertentu belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Solusi pemecahan masalah ini adalah dengan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud

link and match antara output lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Akses dan kemampuan pemasaran UMKM baik offline maupun online yang masih terbatas
UMKM di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang potensial. Volume usaha koperasi maupun omset UMKM setiap tahun selalu naik, akan tetapi dampak dari pandemi covid 19 yang berlangsung dari Tahun 2019 hingga 2021 menyebabkan pelaku UMKM tidak mempunyai penghasilan dan tidak mampu memenuhi kewajiban baik angsuran kredit usaha maupun perpajakan. Dampak lain dari pandemi covid 19 adalah pemasaran produk UMKM yang lebih mengarah pada digital marketing atau pemasaran secara online, namun tidak semua UMKM memahami cara memasarkan produk yang dimiliki secara online. Pada Tahun 2023 telah terjadi peningkatan jumlah umkm dan asset maupun omzetnya yang cukup signifikan, yakni umkm bertambah sebanyak 2.377, omzet meningkat sebesar 29,63% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan produktivitas, diperlukan pendampingan yang lebih oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam fasilitasi pemasaran kepada UMKM baik secara offline maupun online.

b. Pengembangan permodalan KUMKM yang belum optimal.
Selama tahun 2023 Koperasi dan UMKM mengalami permasalahan khususnya terkait permodalan. Ditengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berlangsung banyak UMKM baik yang berasal dari para pekerja yang terdampak pandemi Covid 19 yang beralih menjadi UMKM maupun UMKM yang terdampak langsung adanya Pandemi Covid 19 masih kesulitan dalam akses permodalannya. Begitu pula dengan koperasi-koperasi yang ada di Kulon Progo. Di sisi lain, terdapat KUMKM yang belum mampu mengakses kredit permodalan pada perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan fasilitasi akses permodalan dengan Program KerisKu (subsidi bunga pinjaman UMKM) bekerjasama dengan Bank Kulon Progo.

c. Lemahnya manajemen kelembagaan Koperasi dan manajemen usaha UMKM
Masih lemahnya manajemen kelembagaan KUMKM ditandai dengan peningkatan jumlah koperasi aktif yang belum signifikan. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 2 koperasi atau sebesar 74,65 %. Tidak terjadi perubahan koperasi pasif menjadi aktif pada tahun 2023 yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian. Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, penyusunan data KUMKM, peningkatan pengawasan kepada koperasi, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

14. Penanaman Modal

a. Belum optimalnya kegiatan ekspor kerajinan, selama ini hasil kerajinan di kirim ke luar daerah dan dilakukan finishing dan pelabelan di luar daerah. Sehingga harga produk masih tetap rendah dan belum dapat mengangkat ekonomi perajin. Saat ini Kabupaten Kulon Progo hanya

sebagai penonton berkaitan dengan kegiatan Eksport. Produk-produk UMK Kulon Progo saat ini dijual ke Bantul, Sleman, Semarang dan Bali untuk selanjutnya di eksport sehingga Kabupaten Kulon Progo tidak mendapatkan bagi hasil cukai export. Hal ini secara tidak langsung merugikan pelaku usaha UMK Kulon Progo. Dengan adanya terminal ekspor di Kulon progo diharapkan akan mengurangi masuknya container sampai ke tempat produksi sehingga akan menghindari kerusakan jalan desa. Disamping itu dengan dibangunnya terminal ekpor akan menjadi sarana dan tantangan bagi pelaku usaha untuk bangkit dan terpacu untuk siap ekspor secara mandiri dari Kulon Progo. Solusi yang diberikan adalah Pembangunan terminal export untuk menfasilitasi kebutuhan pelaku usaha agar mampu melakukan eksport langsung dari Kulon Progo sehingga menekan biaya dan harapannya meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

b. Belum tersedianya media promosi berupa video dan buku promosi sebagai media informasi yang up to date sebagai langkah awal meningkatkan kepeminatan investor. Video ini juga diharapkan dapat di putar di ruang-ruang strategis seperti di lobby hotel-hotel berbintang yang ada di Kulon Progo, ruang tunggu Bandara Internasional Yogyakarta (yang terletak di kawasan Aerotropolis), stasiun Kereta Api, kantor layanan baik pemerintah maupun swasta dan area publik lainnya sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi tentang berbagai informasi potensi Kulon Progo. Solusi yang diberikan adalah pembuatan video dan buku promosi potensi Kulon Progo.
c. Dengan telah disepakatinya proses RDTR kawasan bandara pada lintas sektor yang pada saat ini dalam proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian terhadap potensi dan peluang investasi kawasan aerotropolis untuk menarik calon investor. Pada saat ini kajian investasi yang ready to offer atau IPRO sebagai media informasi investasi yang informatif dan implementatif masih sangat terbatas. Sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak dapat membantu mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada, karena syarat untuk dapat dipromosikan merupakan kajian investasi yang sudah IPRO. Disisi lain, dengan adanya kajian IPRO akan memberikan kemudahan kepada calon investor untuk menentukan pilihan investasi, hal ini disebabkan investor menginginkan kepastian proyek investasi. Solusi yang diberikan adalah pelaksanaan Kajian Pengembangan Investasi di Kawasan Aerotropolis.
d. Terbatasnya ketersediaan ruang yang representative untuk gerai di MPP seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan layanan public. Belum tersedianya tempat yang representatif untuk penerimaan kunjungan kerja Pemerintah Daerah, kurangnya sarana dan media pemasaran produk UMK yang mudah dijangkau dan berkesinambungan serta belum adanya pusat temu bisnis yang murah dan terjangkau bagi start up, investor yang ingin mengembangkan investasinya di Kulon Progo. Solusi yang diberikan adalah DED Pengembangan MPP dengan memanfaatkan Ex GOR untuk mewujudkan komplek layanan terpadu untuk: 1) Layanan satu pintu dan terintegrasi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal. BUMN, BUMD dan swasta 2). UMK Center 3). Lounge Pemerintah Daerah
e. Belum terkodefikasinya data perizinan dan investasi yang dilengkapi dengan penyediaan analisa data perizinan berusaha secara jelas dan rinci dalam satu buku yang menggambarkan perkembangan kegiatan usaha penyebaran per Kapanewon dan per Kalurahan, sektor, skala

usaha, tingkat risiko, nilai invesatasi, penyerapan tenaga kerja. sehingga dapat disajikan hasil analisis yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membuat rencana kebijakan terkait pengembangan Kawasan, termasuk didalamnya membuat kebijakan pengembangan Kawasan Aerotropolis. Solusi yang diberikan adalah dengan penyusunan Buku Satu Data Perizinan

f. Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha sehingga belum dapat berkontribusi secara optimal dalam membantu percepatan investasi. Solusi yang diberikan adalah Perlunya forum investasi sebagai media optimalisasi peran asosiasi sebagai wadah dan motor penggerak bagi seluruh anggota profesi serta diharapkan mampu memperkuat kolaborasi asosiasi dan pemerintah

Solusi yang diberikan adalah pengawalan percepatan realisasi investasi telah dibentuk Tim Percepatan Investasi Daerah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 285/A/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 3 Agustus 2020. Tugas Tim Percepatan Investasi Daerah antara lain adalah: merumuskan kebijakan investasi di Kabupaten Kulon Progo, memberikan pertimbangan atau masukan tentang investasi yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo kepada bupati, mengoordinasikan petunjuk dan arahan bupati serta menginisiasi dan menyusun terobosan percepatan realisasi investasi, melakukan kajian dan analisis permasalahan/ kendala yang dihadapi investor, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan/ kendala untuk percepatan investasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

15. Kebudayaan

Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. belum optimalnya pengembangan/ pelestarian seni dan budaya serta pengembangan nilai-nilai luhur budaya. Permasalahan tersebut terjadi karena dengan berbagai macam jenis dan kelompok kesenian yang ada, baru beberapa yang bisa menjadi unggulan dan kelompok yang aktif sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Implementasi nilai-nilai luhur budaya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari masyarakat. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Dukungan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan digunakan untuk pelestarian seni dan tradisi, pertunjukan seni khas Kulon Progo, dan pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo. Diharapkan ke depan terdapat pengembangan wisata berbasis budaya.
b. Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya menjadi permasalahan tersendiri. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pelestarian dan perlindungan cagar budaya akan mempersulit tercapainya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya. Dari dua permasalahan tersebut diatas maka perlu diambil langkah-langkah ke depan agar peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya,

adat istiadat dan tradisi semakin terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang profesional, berkarakter dan berbudaya.

Jumlah kalurahan budaya dan rintisan kalurahan budaya sampai dengan tahun 2022 ada 18 kalurahan budaya dan 30 rintisan kalurahan budaya kategori berkembang dan 47 rintisan kalurahan budaya kategori tumbuh dari 87 kalurahan. Dari rintisan kalurahan budaya kategori tumbuh menjadi rintisan kalurahan budaya kategori berkembang perlu adanya kriteria penilaian yang harus dipenuhi, begitupun dari rintisan kalurahan budaya kategori berkembang menjadi kalurahan budaya. Sehingga perlu pendampingan yang cukup baik guna meningkatkan status budaya pada suatu kalurahan, termasuk pendampingan terhadap grup grup kesenian. Masih banyak grup kesenian yang belum melaksanakan kegiatan secara rutin dan memiliki kelengkapan administratif. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible) dan kelestariannya.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang terdaftar ada 371 buah. Dari 371 buah tersebut 146 buah yang sudah diterbitkan SK Bupati, dan ada 267 buah dengan kondisi baik. Untuk itu perlu dilakukan upaya pelestarian cagar budaya. Belum dimilikinya museum sebagai wahana pengamanan peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*). Saat ini hanya ada museum (rintisan)/ Balai Agung dengan kapasitas ruang penyimpanan terbatas.

c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya. Kedepan akan lebih diprioritaskan pada pendampingan agar bisa ada kemandirian di masyarakat dalam mengembangkan keragaman seni dan budaya. Sampai dengan tahun 2023 ada 1.454 grup kesenian dimana baru ada 65 grup yang dapat dipenuhi sarana prasarananya oleh pemerintah daerah.

16. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan
b. Sampai dengan tahun 2023, jumlah organisasi olahraga ada 46 organisasi olahraga. Akan dilakukan pembinaan secara berjenjang dengan pendampingan intensif bekerjasama dengan KONI, NPC, dan FORMI. Sedangkan organisasi pemuda yang aktif ada 19 organisasi. Kegiatan kepemudaan yang selama ini dilakukan melalui Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), maupun kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia, maupun kegiatan lainnya seperti: kegiatan anti narkoba, kewirausahaan, ataupun kepemimpinan.
c. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Gedung olahraga yang dimiliki sebanyak 92 unit, dan sarana olahraga sebanyak 1.193 unit, jumlah klub olahraga 173 klub. Jumlah gedung dan sarana olahraga ini belum sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperlukan sebuah kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhannya.

17. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Makin tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam.

Ke depan akan ditingkatkan kerjasama lintas sektor, antara pemerintah dan masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan. Belum optimalnya pemenuhan SPM layanan dasar yang berkaitan dengan warga yang terdampak akibat penegakan perda/ perkada

b. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan.

   Hal ini dapat dilihat pada kesertaan masyarakat dalam Linmas yang dari tahun ke tahun belum ada kenaikan yang signifikan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fungsi linmas. serta pengadaan seragam linmas.

c. Masih adanya aktivitas yang meresahkan masyarakat (kejahatan jalanan, begal, dan tawuran pelajar)

   Maka diperlukan upaya koordinasi lintas sektor (Polres, Kodim, tokoh masyarakat) dan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai antisipasi dini. Sinergitas lintas sektor dalam cipta kondisi wilayah sangat diperlukan guna menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat

d. Secara umum, permasalahan pada substansi kebencanaan adalah pada masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana mulai dari bangunan kantor, kebutuhan pemenuhan SPM pos pemadam kebakaran yang seharusnya ada di 12 kapanewon namun baru ada di Wates dan Nanggulan, kebutuhan peningkatan sistem informasi kebencanaan, dan kebutuhan peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan pusdalops yang masih rendah.

e. Selain sarana prasarana, dalam mitigasi bencana dibutuhkan juga kajian penyusunan dokumen rencana kontinjensi seperti kebutuhan pasca bencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) untuk setiap jenis bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

18. Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan pelayanan publik belum bisa sepenuhnya optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

(1) Faktor SDM pelaksana. SDM adalah faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sisi kuantitas, adanya kebijakan moratorium menyebabkan jumlah SDM saat ini jauh dari jumlah ideal pastinya akan berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dari sisi kualitas bahwa belum semua SDM yang ada memahami sepenuhnya tentang konsep pelayanan publik yang seharusnya diaplikasikan.

(2) Perubahan kebijakan yang dinamis berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan.

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 nilai rata-rata atas hasil SKM adalah sebesar 84, 115. Pada tahun 2021, nilai IKM sebesar 82,487. Sementara pada tahun 2022 tercapai nilai rata-rata 83,268. Pada tahun 2023, capaian sudah pada 85,634 dan mencapai target

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh kategori BB dengan nilai 78,05. Perolehan nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 75,24. Pada tahun 2023, Pemkab Kulon Progo berhasil mencapai nilai indeks 83,00 atau kategori A. Perolehan nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai RB General sebesar 72,58 dengan nilai RB Tematik sebesar 10,42. Nilai tahun 2023 ini tidak dapat diperbandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya karena pada

tahun sebelumnya tidak ada penilaian RB Tematik. Secara umum, penilaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

a. Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam menyelesaikan isu strategis dan mengungkit kinerja daerah, perlunya updating secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan yang menghambat kinerja organisasi, dan penguatan atas sistem manajemen SDM yang belum sepenuhnya optimal.

   Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

   Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal.

b. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam mengukur tingkat/indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268 dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,63.

c. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

   Indikasi permasalahan ini adalah adanya tren temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal. Keterbatasan pemahaman SDM atas urgensi SPIP dan implementasinya menjadi faktor penyebab permasalahan ini. Hal ini ditunjang dengan kondisi SDM terbatas dengan beban tugas *multitasking* yang dialami oleh sebagian besar OPD.

   Dari permasalahan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah maupun belum optimalnya kualitas pelayanan publik, apabila tidak direncanakan dan ditindaklanjuti dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah.

d. Untuk melakukan transformasi sebagaimana mandat presiden tentang reformasi birokrasi, ada tiga poin yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan arahan tersebut, yaitu penyetaraan

jabatan, perubahan struktur organisasi, dan transformasi sistem kerja yang didukung oleh SPBE. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu:

(1) Kelengkapan jabatan fungsional masih dalam proses penyesuaian, hal ini akibat dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Permen PAN & RB no 1 tahun 2023 yang baru saja terbit.

(2) Peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang masih tumpang tindih.

(3) Implementasi Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan sanksi PNS belum optimal, terutama terkait dengan pemberian tambahan penghasilan pegawa (TPP). Hal ini akibat dari pemberian TPP yang belum sesuai standar dari BPK dan alokasi pembiayaan untuk TPP juga belum maksimal.

e. Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu *memperoleh* WTP berturut-turut mulai tahun 2013-2022. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 2.220) ditunjukkan dengan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan pada Tahun 2018-2019, namun pada Tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. Hal ini akan menimbulkan keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja pembangunan.

Selain itu dinamika kebijakan pemerintah seperti ketentuan pengelolaan BUMD, Dana transfer, dan Aset serta dinamika implementasi penganggaran dari OPD turut menjadi penyumbang permasalahan ini. Peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan *Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.*

Telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daearah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (*existing*), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah. Ditargetkan pada tahun 2022 masuk Propemperda 2022 dan diundangkan pada akhir tahun 2023

f. Keterbatasan dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dikarenakan belum lengkapnya aturan turunannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan belum bisa dilaksanakan karena aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis belum ada sehingga belum dapat *diimplementasikan*.

Keterlambatan terbitnya regulasi teknis perencanaan tahunan sehingga menghambat proses perencanaan tahunan.

g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

   Kurangnya kapasitas bisa dilihat dari kurangnya ketaatan dan ketertiban pengelola terhadap *peraturan* yang berlaku. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola Badan Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Desa.

h. Belum optimalnya pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Solusi yang ditempuh pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Hal ini masih dapat dilihat dari fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

i. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian.

   Produk-produk kebijakan bidang perekonomian masih sangat sederhana dan kurang komprehensif dalam menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan di bidang perekonomian. Hal tersebut disebabkan belum terlibatnya seluruh pihak pemangku kepentingan, antara lain akademisi/pakar yang relevan dan kapabel di bidang perekonomian. *Langkah* yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan bidang perekonomian. Misalnya regulasi/kebijakan pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan lokal dari aspek budidaya (*on-farm*), pengolahan pasca panen dan pemasaran (*off-farm*). Perlunya regulasi penggunaan produk lokal.

19. Pangan

a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

   Pada tahun 2023 penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan sebesar 95,53. Angka ini masih di bawah standar konsumsi pangan yang beragam bergizi dan seimbang dan aman yaitu 100. Untuk mencapai angka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   - Sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di tingkat kabupaten untuk ibu – ibu anggota KWT (Kelompok Wanita Tani).
   - **P**eningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan fasilitasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini merupakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dengan menanam berbagai macam komoditas pangan. Fasilitasi sebanyak 40 KWT untuk optimalisasi lahan pekarangan semakin ditingkatkan di tahun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang masih terdampak akibat Covid-19.
   - **C**apaian ketersediaan energi pada tahun 2023 sebesar 3.361 kkal/kap/hari. Sedangkan capaian ketersediaan protein adalah 78 gr/kap/hr dan capaian ketersediaan energi dan protein 2019 – 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 2.108 Bab II.
   - **In**dikator kualitas konsumsi pangan ditunjukan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Kulon Progo 2019 – 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.108 Bab II.

b. Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan pemerintah ideal di Kulon Progo berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota), serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan adalah sebesar 120 ton. Namun sampai dengan Tahun 2023 cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 24,2 ton. Pada Tahun 2023 telah dianggarkan untuk cadangan pangan sebesar 10 ton beras dan ke depan terus akan dianggarkan untuk pemenuhan stok cadangan pangan, sedangkan tahun 2023 juga dianggarkan untuk cadgan pangan sebesar 10 ton..

c. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani.

   Pada tahun 2023 persentase petani yang sudah menjadi anggota kelompok tani meningkat dari 55,47% menjadi 55,58%, dengan ini penyuluh memiliki peran penting untuk mendorong petani untuk menjadi anggota kelompok tani. Keberhasilan penyuluh dalam meningkatkan jumlah petani yang masuk menjadi anggota kelompok tani/ kelompok wanita tani karena optimalisasi SDM penyuluh lapangan, termasuk penyuluh swadaya di masyarakat..

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Peran bumdes dan lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal terhadap pembangunan.
b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintah kalurahan.

21. Statistik

a. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan

   Pengelolaan data di perangkat daerah, kalurahan dan provinsi menuju Satu Data Indonesia harus dilakukan pemetaan dan pengisian data mulai dari kalurahan. Data sektoral yang dikelola belum mampu dikelompokkan berdasarkan wilayah kalurahan dan kapanewon. Kedepan perlunnya integrasi data kabupaten yang telah terintegrasi dengan aplikasi data DIY "Dataku" dan data.go.id.

b. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1 sehingga menjadi masalah. Hal ini kemudian diantisipasi dengan menyusun analisis ekonomi makro dan analisis PDRB untuk acuan perencanaan pembangunan.

22. Kearsipan

a. Belum semua OPD dan kalurahan menata arsip secara kontinyu, karena tidak punya petugaas khusus menata arsip, dan kekurangan personil untuk menata arsip tekstual. Sedangkan untuk arsip digitalnya juga belum dikelola pengarsipannya. Belum diterapkannya aplikasi kearsipan (SRIKANDI).
b. Minimnya koleksi arsip statis di LKD serta minim aksesibilitasnya.
c. Terbatasnya sarpras kearsipan di LKD maupun OPD

23. Komunikasi dan Informatika

a. Infrastruktur Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika masih perlu ditingkatkan

Masih terbatasnya cakupan jaringan intranet berbasis fiber optik yang dapat dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk Perangkat Daerah induk belum mencapai 100%, masih tersisa 15% yang belum terfasilitasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berbasis fiber optik, sedangkan untuk kantor kalurahan, baru tersambung kisaran 19%. Kantor UPTD dan Puskesmas masih belum dapat terlayani jaringan intra pemerintah. Untuk meningkatkan layanan koneksi internet diperlukan biaya investasi yang tidak sedikit, terutama pada pengembangan infrastruktur jaringan intranet berbasis fiber optik. Infrastruktur jaringan *Local Area Network* (LAN) Perangkat Daerah juga belum sepenuhnya dilakukan *upgrade* perangkat aktif sesuai standar, sehingga perlu dilakukan desain ulang topolog jaringan LAN tersebut, serta *upgrade* perangkat aktif untuk mengatasi masalah *bottleneck* koneksi yang selama ini dirasakan. Selain itu, dari sisi keamanan informasi, belum tersedianya *Firewall* pada sisi *network* (saat ini baru tersedia *firewall* khusus ke arah *server farm* dengan kapasitas kecil), menimbulkan masalah baru. Kondisi perangkat *enduser existing* yang masih banyak menggunakan perangkat dengan *Operating System* (OS) yang sudah usang maupun OS bajakan/cracking/tidak *original*, mengakibatkan *IP gateway* terdeteksi melakukan *abuse* oleh beberapa server yang dituju. Hal ini mengakibatkan IP gateway Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akhirnya terblokir oleh beberapa aplikasi Pemerintah Pusat. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan penggantian perangkat *enduser* dengan OS yang terbaru, serta memasang *firewall* pada sisi network.

b. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah

Pengelola informasi daerah berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ cyber, maupun media luar ruang. Pengelolaan informasi daerah salah satunya dilakukan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang merupakan pengelola informasi di setiap Perangkat Daerah.

24. Perpustakaan

a. Target kunjungan tahun 2023 pengunjung ke perpustakaan sejumlah 145.000 orang, dan terealisasi jumlah kunjungan 180.902 orang, tetapi kalau di bandingkan data kunjungan tahun sebelumnya ada penurunan pengunjung. Permasalahanya adalah kurang optimalnya dukungan dari sarana dan prasarana yang ada. Kurangnya fasilitas pendukung layanan diantaranya fasilitas untuk ruang anak dengan dukungan APE (Alat Permainan Edukatif), Ruang Diskusi, Komputer , Gazebo, Ruang Lakstasi, Gudang , Kantin, Rak Buku Kekhasan Kulon Progo, Rak Display Produk TBIS, Kamar mandi pengunjung untuk disabilitas , Desain Interior Pelayanan Perpustakaan yang kurang menarik. Selain itu untuk kunjungan perpustakaan digital ikulon progo sampai saat ini juga belum sesuai harapan. Kunjungan semakin menurun karena koleksi yang terbatas, sehingga perlu penamban koleksi yang sesuai kebutuhan pemustaka dan perkembangan jaman, dan konten lokal yang membedakan dengan layananan pustaka digital spt e perpusnas yang lebih lengkap koleksinya.

b. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan perpustakaan. Jumlah perpustakaan keseluruhan yang dilaksanakan pembinaan sebanyak 633 perpustakaan. Dari jumlah Tahun 2023 sebanyak 42 perpustakaan untuk melaksanakan akreditasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga jumlahnya 120 perpustakaan yang sudah terakreditasi. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui lomba perpustakaan, bimtek perpustakaan, monitoring, serta akreditasi perpustakaan. Upaya pembinaan perpustakaan terkendala dengan tidak adanya anggaran untuk pemberian stimulan berupa anggaran untuk pemberian buku ataupun sarana lain kepada perpustakaan kalurahan ataupun perpustakaan sekolah selaku binaan perpustakaan.
c. Pengelolaan perpustakaan kalurahan belum optimal dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Penanganan Kemiskinan Ekstrem terhadap sepuluh kalurahan, dengan program pemenuhan akses layanan dasar pendidikan, melalui Program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) merupakan upaya mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Peran perpustakaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik melalui menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui program TPBIS yang ada di kelurahan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu menurunkan angka kemiskinan. Solusi dari permasahan ini adalah dengan pembinaan pengelolaan managemen perpustakaan, pendampingan, sosialisasi TPBIS kepada masyarkat serta alokasi anggran setiap tahunnya, baik untuk SDM pengelola perpustakaan, pengadaan buku dan anggaran kegiatan TPBIS melalui APBkal.
d. Pengembangan bahan pustaka yang belum optimal, karena terbentur anggaran, baik pengadaan untuk koleksi kantor maupun koleksi yang digunakan untuk pelayanan keliling. Disebutkan dalam SNP jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota sebesar 0,025 per kapita per tahun. Sehingga pengadaan koleksi dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan dari saran masukan masyarakat yang paling banyak.
e. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah masih perlu ditingkatkan, sesuai rekomendasi Kajian Tingkat kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2023 perlu meningkatkan sosialisasi terkait minat baca, meningkatkan promosi perpustakaan melalui kegiatan dengan masyarakat sehingga TGM meningkat.
f. Belum semua permintaan layanan perpustakaan keliling dapat terpenuhi karena terbatasnya SDm dan sarana angkutan, dalam hal ini mobil keliling. Untuk motor pintar (layanan keliling menggunkakan motor) tidak dapat diteruskan karena 3 (tiga) unit motor pintar dihapus dan belum ada gantinya. Solusinya pihak sekolah dapat melalukakn pinjaman dengan metode Book loan.
g. Adanya risiko buku yang dipinjam tidak kembali dikarenakan berbagai alasan, diantaranya keteledoran datau ketidakdisiplinan pemustaka dalam mengembalikan buku, sehingga diperlukan media utk penagihan berupa pemeberitahuan habis masa pinjam dan penagihan. media yang digunakan berupa seperangkat hp dan pulsa.

25. Pertanian

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Usaha Dinas Pertanian dan Pangan dalam menghadapi luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan dan untuk mempertahankan kecukupan pangan terutama beras, antara lain dengan:

- Meningkatkan produktivitas lahan eksisting, agar produksi masih dapat terjaga untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Kulon Progo meskipun luas lahan berkurang.
- Melindungi dan mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 188 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, kondisi pada saat itu lahan LP2B Kulon Progo seluas 5.029 ha. Dengan terbitnya Peraturan Daerah DIY Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTRW DIY, di pasal 61 ayat (4) bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kabupaten Kulon Progo seluas 11.033,89 ha, yang nantinya luasan tersebut akan dicantumkan di RTRW Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya akan disusun peraturan daerah Kulon Progo tentang LP2B.
- Melaksanakan kegiatan cetak sawah baru, sampai dengan Tahun 2023 telah tercapai cetak sawah seluas 340 hektar. Sedangkan di 2024 akan ada cetak sawah sebesar 25 ha.

b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai.

Masih belum meratanya sarana prasarana menjadikan inefisiensi waktu, biaya serta tenaga dalam berusaha tani baik *on-farm* maupun *off-farm*. Dalam usaha tani tingginya biaya tenaga kerja, ketersediaan sarana produksi, pengolahan pasca panen belum memadai, panjangnya rantai pemasaran dari produsen ke konsumen menyebabkan keuntungan yang didapat oleh petani minim.

Upaya yang dilakukan adalah dengan fasilitasi sarana produksi, peralatan panen dan pasca panen, bimbingan teknis serta pendampingan dan pemberdayan kelompok, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan.

Pada tahun 2024 direncanakan pengembangan dan pemanfaatan varietas unggulan local Padi Menor 100 Ha di Kapanewon Nanggulan (5 Desa : Wijimulyo (lokasi Semaul Undong), Tanjungharjo, Banyuroto, Jatisarono dan Kembang) berupa bantuan benih, pupuk organik.

c. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani.

Petani di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah berusia lanjut sehingga adopsi teknologi menjadi sulit dilakukan. Solusinya adalah perekrutan petani milenial melalui kegiatan pelatihan, fasilitasi demplot dan pengolahan. Saat ini sudah terbentuk asosiasi petani milenial di Kulon Progo. Harapan dengan adanya asosiasi ini penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian segera dapat terwujud dengan merata. Sehingga efisiensi waktu, biaya dan tenaga dapat tercapai dan memberikan hasil pertanian yang optimal bagi petani.

d. Masih adanya penyakit hewan menular.

Dibutuhkan peran serta dari petugas dan penyuluh peternakan dalam memberikan pemahaman kepada peternak akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lokasi peternakan serta akan terus diupayakan peningkatan palayanan kesehatan hewan. peningkatan kewaspadaan dan

kesadaran masyarakat tentang peningkatan kesehatan hewan. Pengawasan Kesehatan hewan yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan penyakit hewan menular.
- Pengawasan lalu lintas ternak bersinergi dengan Dinas Perhubungan, TNI dan POLRI.
- Pemantauan peredaran obat hewan.
- Pengendalian penyakit antraks.
- Sosialisasi penyakit hewan strategis.
- Pengadaan obat-obatan.
- Pelayanan Kesehatan hewan.

26. Pariwisata

a. Kurangnya daya tarik obyek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan.
   Untuk meningkatkan daya tarik dilakukan dengan meningkatkan aksesibiltas dan sarana prasarana pendukung di obyek wisata secara bertahap dengan mengedepankan inovasi dan melakukan kerjasama dengan stakeholder yang terkait. Selain itu dilakukan pemetaan obyek-obyek wisata untuk menggali dan menentukan keunggulan masing-masing obyek sebagai daya tarik wisata. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kebutuhan dasar wisatawan di tiap obyek wisata. Selain itu meningkatkan jaringan komunikasi di setiap obyek wisata. Fokus prioritas destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah penataan sarana dan prasarana pantai Glagah yang merupakan obyek wisata strategis dan lokasi yang dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY).
b. Pemasaran pariwisata yang belum optimal.
   Pemasaran pariwisata melalui beberapa media baik cetak, elektronik maupun teknologi informasi dan juga atraksi wisata masih belum optimal, sehingga jangkauan dan kualitas penyebaran informasinya masih terbatas. Diperlukan adanya inovasi dalam kegiatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat di era digital dan juga penyelenggaran atraksi wisata yang mampu menjadi ikon atau daya tarik wisata di Kulon Progo. Atraksi wisata budaya terus dilakukan khususnya pada destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
   Pemasaran pariwisata dapat ditingkatkan dengan jalinan kerjasama dengan penyedia jasa pariwisata secara lebih intens;
c. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata.
   Solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk pelaku wisata antara lain : pelatihan dasar pariwisata, pengelolaan desa wisata, pengelolaan pemandu wisata, pengelolaan usaha homestay/pondok wisata, pengelolaan toilet dan sanitasi di destinasi wisata, pemasaran digital, serta pemandu wisata outbond/trekking/budaya/paralayang. Selain itu juga upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata melalui fasilitasi dan lomba gelar potensi desa wisata;
d. Masih kurangnya usaha jasa pariwisata yang bersertifikat.

Sebagian besar usaha jasa pariwisata belum tersertifikasi, sehingga dilakukan fasilitasi untuk sertifikasi usaha jasa pariwisata, antara lain pada hotel non bintang, jasa boga, restoran dan restoran/rumah makan.

27. Kelautan dan Perikanan

a. Keterbatasan air

Ketersediaan air sebagai media utama budidaya ikan merupakan faktor utama dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Kondisi topografi dan geografi Kabupaten Kulon Progo menyebabkan adanya beberapa ancaman bencana alam antara lain ancaman kekeringan terutama di kawasan Pegunungan Menoreh yaitu di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Kapanewon Pengasih. Ketersediaan air pada musim kemarau sangat kurang untuk usaha budidaya perikanan terlebih pengaturan air irigasi saat ini diutamakan untuk mendukung pola tanam. Perlunya pengaturan air yang tidak hanya mendukung pola tana, namun juga kepada pembudidaya ikan. Solusinya yaitu dengan mengusulkan revisi Perda no 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi agar mencantumkan pembudidaya ikan sebagai salah satu pengguna/pemanfaat air irigasi.

b. Pembudidayaan ikan di Kabupaten Kulon Progo ini masih berskala kecil, yang letaknya tersebar dan masih bersifat individual dengan belum ada manajemen tersentra. Solusinya yaitu penguatan kelembagaan kelompok perikanan dalam mendukung hilirisasi produk hasil perikanan.

c. Keterbatasan kemampuan produksi benih ikan yang berkualitas

Pola perbenihan ikan di Kulon Progo masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan pemijahan alami. Dalam pengembangan ketersediaan benih ikan yang berkualitas dan kontinyu proses pembenihan dilaksanakan di UPT Perbenihan Perikanan dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR). Produksi benih ikan dari UPT Perbenihan Perikanan dan UPR baru mencapai kurang lebih 30% dari total kebutuhan benih ikan sebesar 150 juta ekor di Kulon Progo. Solusi dari permasalahan ini diantaranya pelatihan perbenihan, peningkatan sarana prasana UPR dan UPT Perbenihan Perikanan, Renovasi peningkatan sarana dan prasarana UPR dan UPT Perbenihan Perikanan.

d. Tingginya harga pakan ikan tidak seimbang dengan harga jual produk/ikan

Besarnya ketergantungan petani pada pakan ikan pabrikan hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, di sisi lain ketersediaan bahan baku pakan ikan sulit di dapatkan. Solusinya adalah penggunaan pakan alternatif dan efisiensi penyediaan pakan pabrikan.

e. Budaya makan ikan masih rendah

Tingkat konsumsi makan ikan Kulon Progo Tahun 2021 sebesar 28,78 kg/kap/tahun masih jauh dari target konsumsi makan ikan nasional sebesar 55,16 kg/kap/tahun. Perlu dilakukan gerakan memasyarakatkan makan ikan kepada masyarakat Kulon Progo, himbauan menu ikan pada acara/event kedinasan, dan pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan baik segar maupun olahan. Dalam rangka pemenuhan protein hewani maka Pokdakan menyuplai e-Warong untuk kebutuhan BPNT Lokal (APBD) berupa ikan lele 1,5 kg per penerima manfaat atau rumah tangga.

f. Banyak kelompok perikanan yang mengalami stagnasi

Jumlah kelompok perikanan yang ada saat ini adalah 459 kelompok, namun hanya 253 kelompok yang aktif dan berkembang, sisanya mengalami stagnasi karena dampak pandemic Covid-19. Terhadap hal tersebut salah satu solusi yang akan dilaksanakan adalah dengan melaksanakan revitalisasi kepengurusan kelompok perikanan, penguatan kelembagaan dan pelatihan SDM serta fasilitasi sarana produksi.

28. Perdagangan

a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera.

   Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera terhadap alat timbangannya masih cukup rendah. Walaupun terdapat peningkatan terhadap alat UTTP yang bertanda tera sah namun masih banyak potensi UTTP yang belum dilakukan tera ulang. Maka perlu dilakukan penyuluhan kepada pelaku usaha khususnya pedagang di luar pasar tentang kemetrologian.

b. Pasar Rakyat masih kurang representatif.

   Dari 27 pasar rakyat pada Tahun 2022 yang mempunyai kondisi baik 25 pasar, kondisi sedang 0 pasar, dan kondisi kurang baik 2 pasar. Solusinya adalah peningkatan kapasitas dan sarana prasarana dan perlindungan pasar rakyat dengan Perda Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda tersebut bertujuan untuk perlindungan kepada pasar rakyat, koperasi dan UMKM, mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, koperasi, dan UMKM dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yakni dengan penguatan database dan peningkatan manajemen pengelolaan pasar rakyat agar sesuai standar kenyamanan dan meningkatkan daya saing dibandingkan toko-toko modern melalui kerjasama kemitraan dan pembinaan pasar rakyat. Namun terkait upaya peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pasar rakyat tidak bisa optimal, dibuktikan dengan masih adanya pasar dengan status kurang baik, yaitu Pasar Ngebung dan Pasar Gejlik. Hal ini dikarenakan status tanah pasar milik perorangan. Sementara untuk pasar-pasar yang lain, saat ini sedang dilakukan penertiban administrasi status tanah dan ijin penggunaan tanah untuk pasar rakyat ke Pakualaman dan Kasultanan.

   Adanya perkembangan peraturan sebagaimana Perda 16 tahun 2021 yang didalamnya terdapat ketentuan Pasar Rakyat harus dilengkapi minimal 16 item sarana pendukung , maka penilaian pasar mulai tahun 2023 menggunakan parameter baru dengan mempertimbangkan item tersebut. Kondisi 27 pasar rakyat saat ini apabila dinilai menggunakan parameter baru maka secara umum yang masuk kategori kondisi baik 6 pasar, kondisi sedang 16 pasar, kondisi kurang 5 pasar. Oleh karenanya, masih perlu peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pasar rakyat. Untuk Pasar Wates, meski secara umum kondisinya baik namun masih memerlukan perbaikan utamanya pada topi-topi di seputaran bangunan pasar dan sarana pengelolaan limbah (drainase los daging). Selain Pasar Wates, yang perlu segera di tangani adalah Pasar Jombokan, Pasar Pripih dan Pasar Kasihan.

c. PKL yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih menempati lokasi fasilitas yang bukan peruntukkannya maka perlu dilakukan penataan PKL perkotaan Wates untuk membuat lokasi yang diperuntukkan bagi PKL.

d. Mayoritas pelaku usaha berorientasi ekspor belum melakukan ekspor mandiri. Beberapa diantara pelaku usaha produk potensi ekspor Kulon Progo saat ini sudah merasa nyaman dengan kerjasama menjadi suplayer kepada eksportir yang ada di luar daerah. Hal ini terjadi karena mereka menjalin kerjasama sudah sekian lama sehingga kemudian menghilangkan semangat untuk berkembang lebih besar lagi. Dinas terus mendorong pelaku usaha produk ekspor untuk mampu melakukan ekspor mandiri dengan membangkitkan semangat dan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, temu usaha, dan mengikutkan di berbagai kegiatan pameran.

29. Perindustrian

a. Ketergantungan bahan baku industri pada hasil pertanian.

Industri di Kulon Progo didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum. Bahan baku industri tersebut sangat tergantung pada hasil pertanian maupun ketersediaan di alam apabila ketersediaannya terbatas maka bisa mempengaruhi kondisi usaha para pengrajin. Solusinya adalah diversifikasi industri serta peningkatan kerjasama bahan baku dengan daerah lain baik regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya diperlukan adanya identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal untuk memenuhi permintaan bahan baku industri.

b. Belum optimalnya daya saing produk industri

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kulon Progo cukup besar, dengan jumlah IKM pada Tahun 2022 sebanyak 15.847 unit, sedangkan jumlah sentra sama dengan tahun sebelumnya yakni sejumlah 34 sentra. Untuk meningkatkan daya saing produk, dilakukan pemberdayaan IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan Sentra IKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, serta melakukan upaya digitalisasi pengelolaan IKM dan Sentra IKM.

30. Transmigrasi

Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan informasi kepada pendaftar calon transmigran mengenai potensi lokasi transmigrasi di luar Sumatera melalui penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan pelayanan ketransmigrasian, serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah DIY dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam penyelesaian masalah transmigrasi.

31. Persandian

a. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) belum dilaksanakan secara maksimal

Sistem Kendala terbesar penerapan SMKI adalah pada spesifikasi infrastruktur TI yang tidak sesuai standar (Kriteria Data Center) Penerapan keamanan informasi menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara sistem elektronik, namun OPD belum memiliki kesadaran untuk menerapkan Sistem Keamanan Informasi secara baik dan benar. Hal ini menyebabkan berkurangnya nilai indeks keamanan informasi atau Indek KAMI. Nilai indeks KAMI 2023 dinas

Komunikasi dan Informatika masuk pada kategori sistem elektronik Tinggi berada pada skor 391 dari total nilai maksimal 645 atau sebesar 60,62 % dengan tingkat kematangan II (pemenuhan kerangka kerja dasar).

b. Proses pengamanan Informasi belum bisa dilaksanakan dari tahap awal perancangan sistem informasi. Penanganan keamanan informasi seringkali dilaksanakan pada saat ada insiden keamanan informasi (respon terhadap insiden). Penerapan keamanan belum bersifat prefentif karena keterbatasan SDM dan peralatan/ tools untuk melakukan identifikasi kerawanan keamanan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2023, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2019-2023

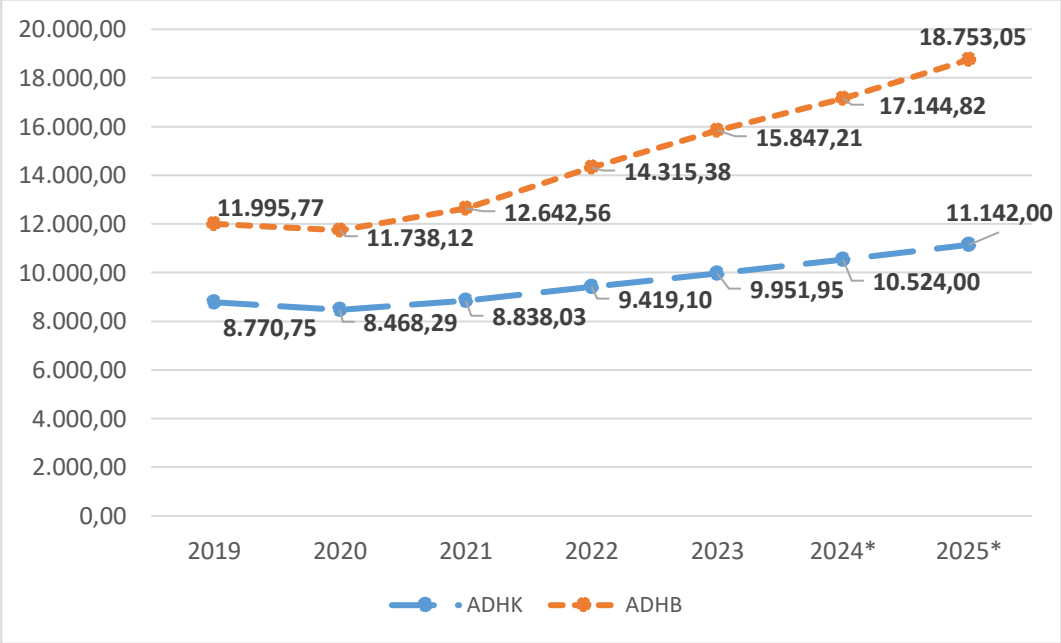
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK pada posisi 8.770,75 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8.468,29 miliar Rupiah. Penurunan nilai PDRB ADHK ini terjadi pada setiap komponen penyusun PDRB ADHK. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo mulai meningkat seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat menjadi sebesar 8.838,14 miliar Rupiah, selanjutnya pada tahun 2023 PDRB ADHK mengalami peningkatan lagi menjadi 9.951,95 miliar Rupiah.

Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo menurun dari 11.995,77 di tahun 2019 menjadi sebesar 11.738,12 miliar Rupiah di tahun 2020. Penurunan nilai PDRB ini disebabkan oleh masa pandemi sebagai dampak meluasnya wabah Covid-19 selama tahun 2020. Pada tahun 2021, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat, nilai PDRB ADHB meningkat menjadi sebesar 12.642,56 miliar Rupiah. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi masyarakat mulai normal dan PDRB meningkat menjadi 14.315,38 miliar Rupiah dan kembali meningkat signifikan menjadi 15.847,21 miliar Rupiah di tahun 2023. Kenaikan PDRB Kabupaten Kulon Progo di masa mendatang diproyeksikan banyak disumbang dari sektor Transportasi dan Pergudangan, seiring makin meningkatnya aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga diprediksi akan meningkat dengan mulai beroperasinya beberapa hotel berbintang

terutama yang berada di sekitar BIY. Selain itu Sektor Jasa Lainnya juga makin meningkat seiring dibukanya kembali akses pariwisata yang akan mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hal-hal di atas, proyeksi PDRB ADHB dan ADHK oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 adalah pada 17.144,82 miliar Rupiah dan 10.524 miliar Rupiah. Sedangkan untuk Tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat menjadi 18.753,05 miliar Rupiah untuk PDRB ADHB dan 11.142,00 miliar Rupiah untuk ADHK.

Selengkapnya nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.1

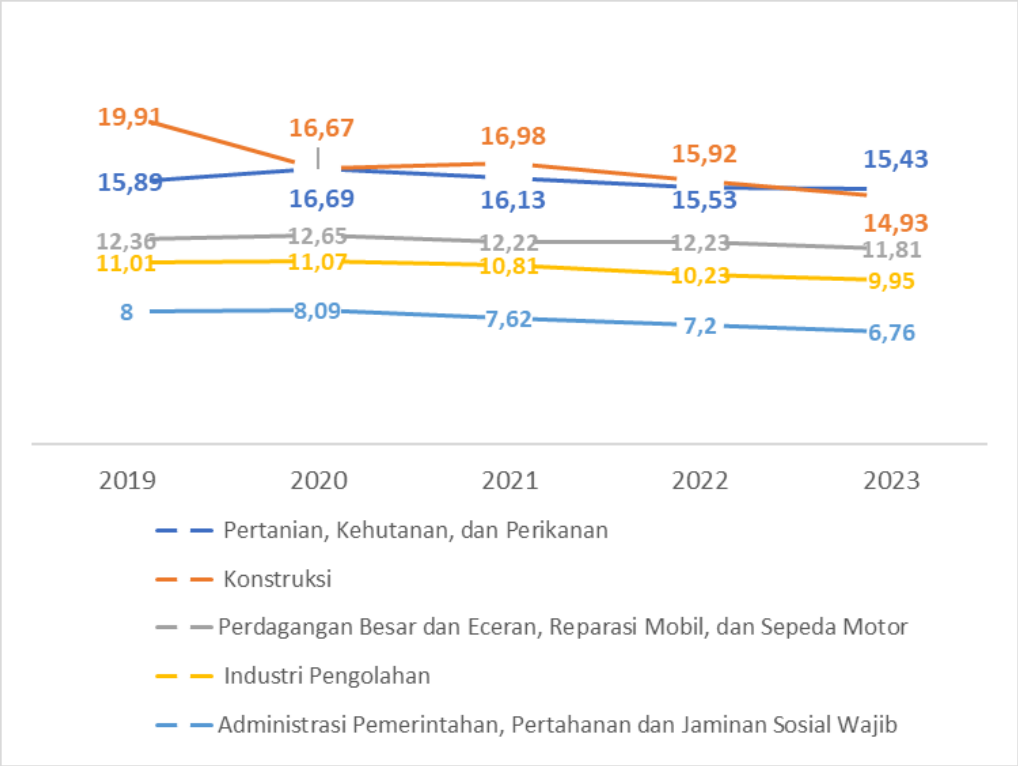
PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo

Tahun 2019-2023, Proyeksi 2024 dan 2025 (miliar rupiah)

Selama periode 2019-2023 struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo selalu didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, yaitu Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Namun mulai tahun 2021 terjadi pergeseran kategori penyokong perekonomian Kabupaten Kulon Progo yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menggeser lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi kelima. Kondisi demikian ini tetap berlanjut pada Tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi perubahan di mana pada 5 posisi teratas adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan.

Terdapat 2 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2023 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian, dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

Keduanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,43% dan 14,98%. Berikut perkembangan kontribusi 5 terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019 sampai dengan 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

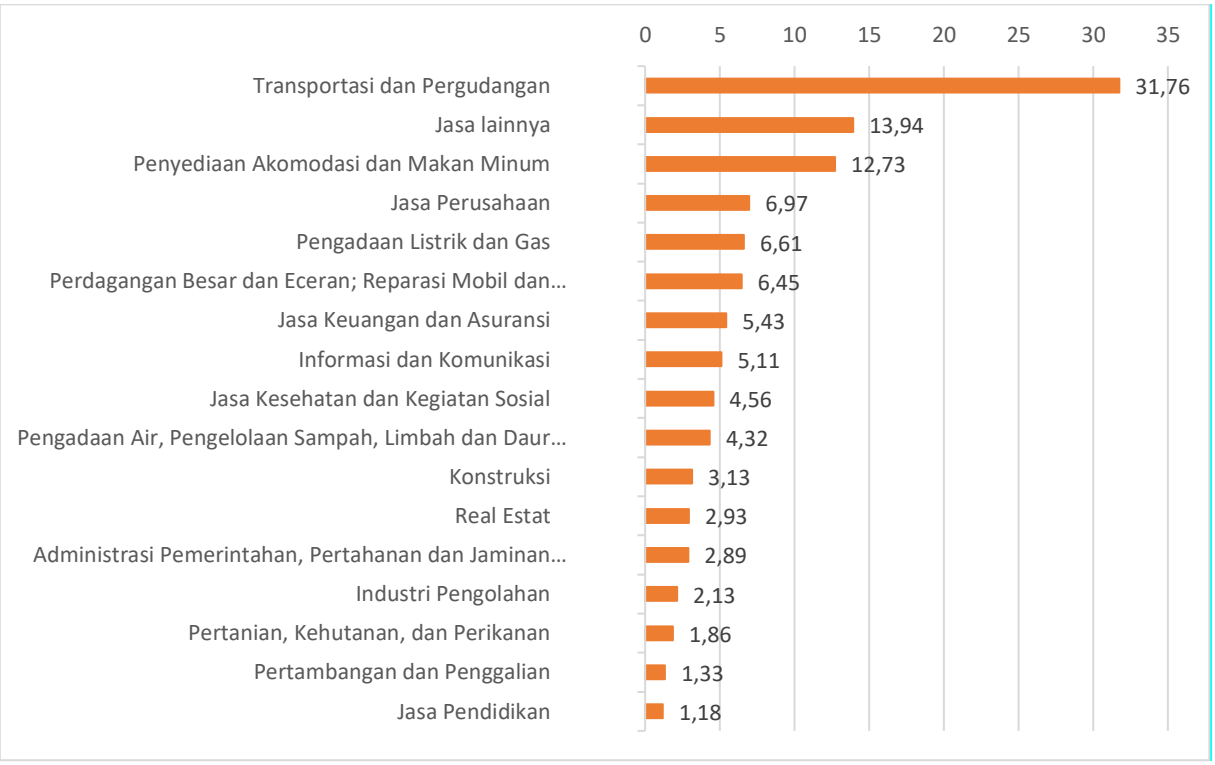
Gambar 3.2
Kontribusi Lima Sektor Terbesar pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2019-2023 (%)

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 8,47 triliun rupiah, atau mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 8,77 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -3,45%. Angka ini merosot tajam dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai puncaknya hingga 13,49%. Hampir semua sektor di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 mengalami penurunan, kecuali sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (18,27%) dan sektor Informasi dan Komunikasi (17,17%). Hal ini sangat terkait dengan meningkatnya jasa kesehatan dan kebutuhan jasa telekomunikasi akibat perubahan proses kerja dan kegiatan masyarakat, termasuk pendidikan yang mengedepankan model daring (online).

Pada tahun 2023, aktivitas perekonomian semakin meningkat setelah pemulihan pasca Covid-19 pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten yang terjadi mulai tahun 2021. Tercatat pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 5,65%. Pertumbuhan positif ini terjadi pada banyak sektor yang mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah Transportasi dan

Pergudangan (18,64%), Jasa Keuangan dan Asuransi (10,24%), kemudian berikutnya sektor Jasa Perusahaan (7,92%), disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (7,18%). Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada Gambar 3.3.

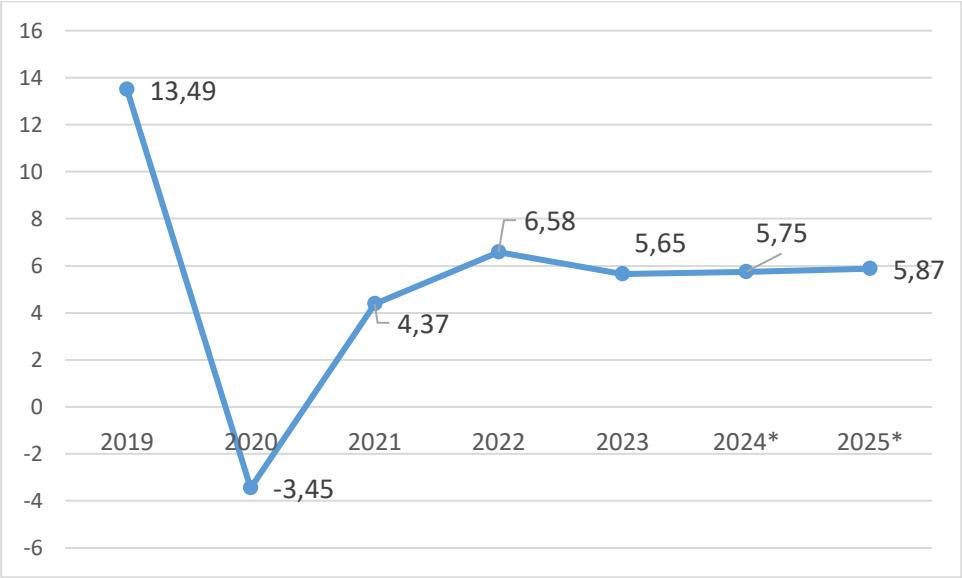


Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 3.3
Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2023
Menurut Lapangan Usaha (%)

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang mengalami rebound dari posisi -3,45% menjadi 4,37%, dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2022 namun kembali mengalami perlambatan menjadi 5,65% pada tahun 2023.

Nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sektor konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo mulai mengalami perlambatan akibat telah selesainya pembangunan BIY dan infrastruktur pendukungnya. Sektor lain yang mulai mengambil alih peran sebagai pemilik laju pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, terutama selama 2 tahun terakhir. Namun sektor Konstruksi diprediksi masih akan tumbuh seiring dengan akan dibangunnya trase Tol Solo-Yogya-BIY di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2024, Pemkab Kulon Progo memproyeksikan nilai pertumbuhan ekonomi akan mengalami penguatan pada 5,75 persen, kemudian pada tahun 2025 diproyeksikan akan kembali naik menjadi 5,87 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.4

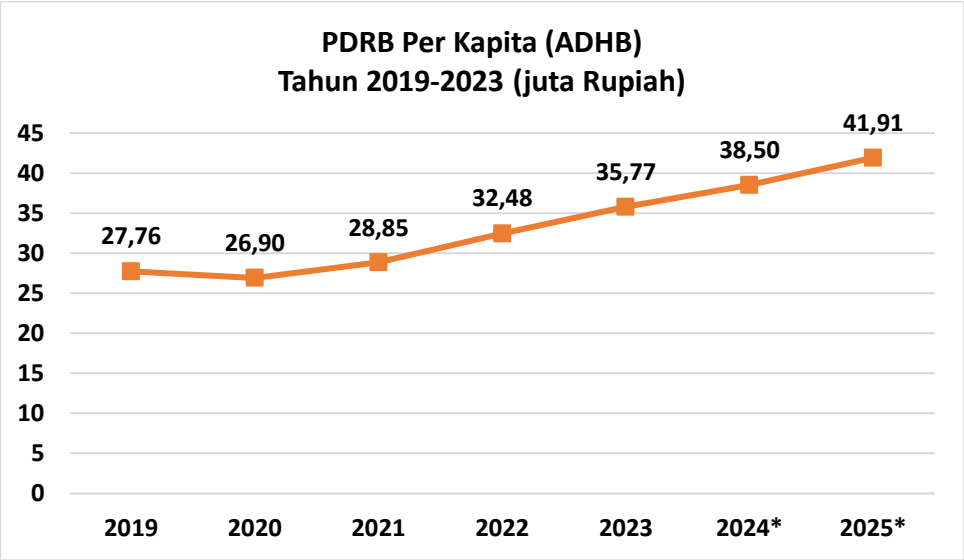
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2020-2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 27,88 juta rupiah, sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26,82 juta rupiah akibat pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,6 juta rupiah. Kemudian berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 31,69 juta rupiah di tahun 2022 dan 35,77 juta rupiah di tahun 2023. Pemkab Kulon Progo memproyeksikan pada tahun 2024 nilai PDRB per kapita ADHB akan mencapai 36,81 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sepanjang 2019-2023 dan proyeksi 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

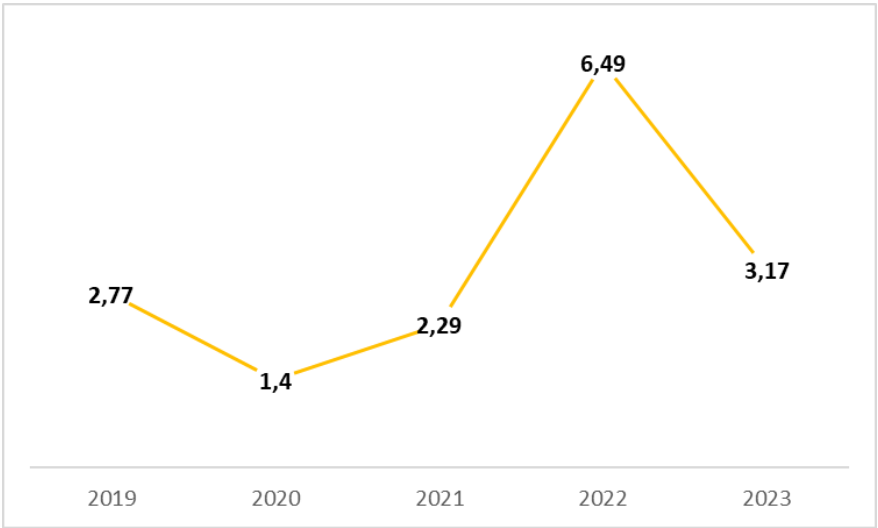
*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.5

PDRB Per Kapita ADHB tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025 (juta rupiah)

3.1.4 Inflasi

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo menggunakan acuan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta. Selama tahun 2019 hingga 2023, laju inflasi cenderung stabil di bawah tiga persen walaupun sempat menurun di tahun 2020 menjadi 1,4% karena lesunya perekonomian. Laju inflasi meningkat tajam di tahun 2022 menjadi 6,49%. Kenaikan ini bersamaan dengan peningkatan laju inflasi nasional dan di daerah-daerah lain. Kenaikan inflasi pada tahun 2022 disebabkan antara lain permintaan yang tinggi untuk penyediaan jasa transportasi udara, jasa wisata dan pendidikan selain kenaikan harga komoditas seperti bahan bakar minyak. Pada tahun 2023, inflasi berhasil diredam dan menjadi 3,17%.



Sumber: BPS, 2024

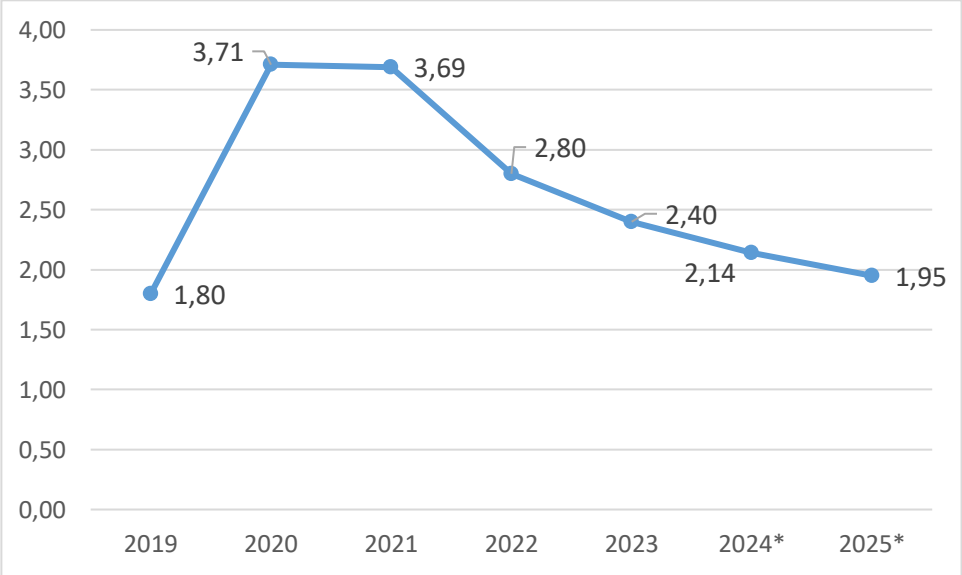
Gambar 3.6

Laju Inflasi IHK DIY (%) Tahun 2019-2023

3.1.5 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2019-2023 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional. Tahun 2019 angka TPT Kulon Progo berada pada 1,8% namun meningkat hingga puncaknya pada tahun 2020 yaitu 3,71%. Selanjutnya TPT Kulon Progo mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 3,69% lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2,80% dan terus menurun menjadi 2,40% pada tahun 2023. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2023 yaitu pada 2,64%-2,92%.

Penurunan TPT Kulon Progo pada tahun 2023 bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kulon Progo dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan sebesar 13 ribu penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Kesempatan kerja di Kulon Progo juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kulon Progo diharapkan terus mengalami penurunan. Hal ini mendasari proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo yang menurun menjadi 2,14% pada tahun 2024 dan kemudian menurun lagi menjadi 1,95 persen pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

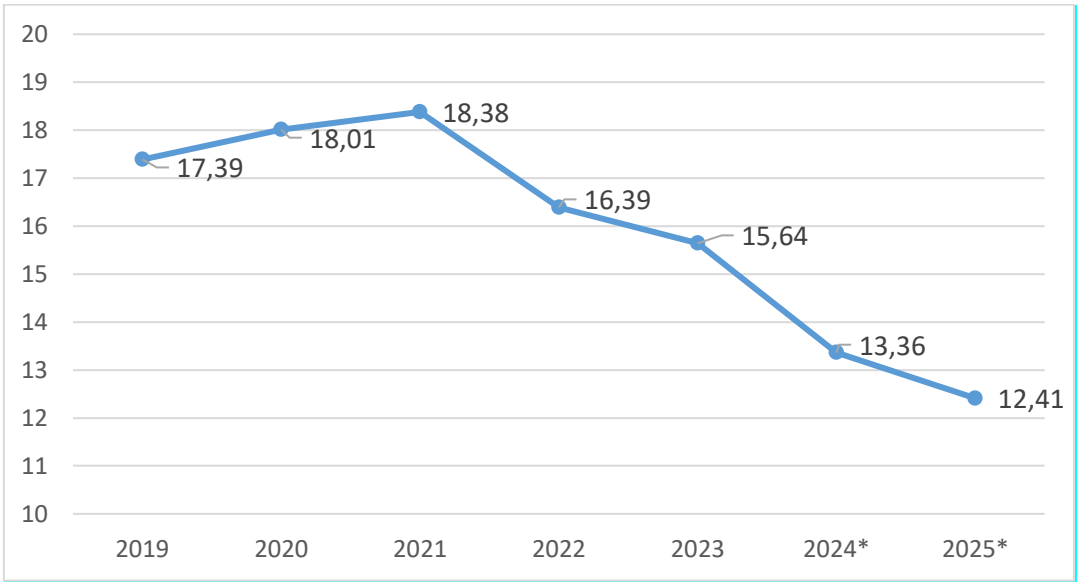
Gambar 3.7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.6 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Persentase penduduk miskin Kulon Progo di tahun 2019 tercatat sebesar 17,39%, setelah itu pada tahun 2020 dan 2021 terus terjadi peningkatan dengan masing-masing menjadi sebesar 18,01% dan 18,38%. Namun penurunan tajam terjadi di tahun 2022 yakni menjadi 16,39% di mana hal tersebut juga telah melampaui proyeksi sebelumnya hampir sebesar 1 persen poin. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas

masyarakat dan dunia usaha pasca Covid-19, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun hingga menjadi 15,64% pada tahun 2023. Proyeksi oleh Pemkab Kulon Progo, pada tahun 2024 angka kemiskinan akan mengalami penurunan menjadi 13,36% kemudian menurun lagi menjadi 12,41 persen pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

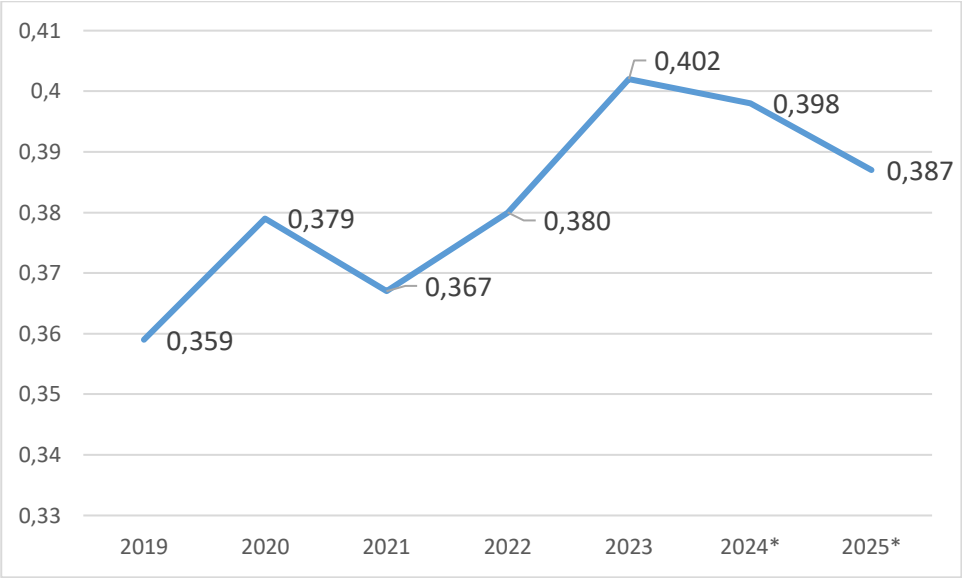
Gambar 3.8

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2023 memiliki trend meningkat, namun pada tahun 2024 diproyeksikan rasio ini akan menurun dan kemudian terjadi trend menurun. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2018 khususnya proyek BIY dan infrastruktur pelengkap mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti rugi, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, masyarakat yang berdomisili di lokasi yang jauh dari proyek konstruksi mempunyai tingkat pengeluaran yang relatif sama dari periode sebelumnya. Oleh karenanya maka nilai Rasio Gini sedikit meningkat yang berarti kesenjangan sedikit melebar.

Secara umum, terjadinya penguatan pada sisi ekonomi yang terindikasi dengan tingkat pertumbuhan positif pada semua sektor perekonomian, diharapkan pada semua pelaku ekonomi dapat meningkatkan pengeluarannya sehingga pada tingkat ketimpangan antar kelompok yang terinidkasi pada nilai Rasio Gini dapat menurun secara gradual. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang terus tumbuh positif, serta adanya upaya pemerintah meningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka diproyeksikan nilai Rasio Gini juga mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 Rasio Gini diproyeksikan akan menurun dari 0,402 pada tahun 2023 menjadi 0,398 pada tahun 2024 dan 0,387 pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024;

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo.

Gambar 3.9

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

a. Nilai besaran pajak/ retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang besaran pajak dan retribusi perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terlalu membebani.
b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.
c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/ retribusi.
d. Meningkatkan daya tarik pada destinasi wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak dan retribusi
c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi
d. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi
e. Peningkatan amenitas pada destinasi wisata
f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/ retribusi
c. Edukasi pajak/ retribusi terhadap wajib pajak
d. Mengintensifkan penagihan pajak/ retribusi daerah
e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perizinan
f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
g. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (pariwisata)
h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
i. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
j. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah,** terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
   b. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi pemanfaatan aset dari BLUD yang masanya tidak tahunan, serta retribusi perizinan tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak,

Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah selain pelayanan kesehatan, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah. (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022).

2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Transfer antar daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/ kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/ Walikota melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:**

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2021 s.d. 2025 Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD 2024	Proyeksi RKPD Tahun 2025
1	2	4	5	6	7	7
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**307.154.342.135,73**	**308.159.760.929,32**	**324.053.666.353,00**	**339.425.088.390,00**	**393.198.757.938,00**
4.1.01	Pajak daerah	94.479.215.907,05	106.215.334.889,95	96.702.294.157,00	119.230.092.600,00	157.572.292.540,00
4.1.02	Retribusi daerah	8.137.201.740,16	11.115.781.343,00	12.060.319.478	14.135.066.057,00	210.732.864.508,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.245.310.189,67	15.652.122.473,42	18.348.267.703	19.474.878.002,00	17.819.305.307,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	191.292.614.298,85	175.176.522.222,95	196.942.785.015	186.585.051.731,00	7.074.295.583,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.274.276.302.007,00**	**1.215.582.521.346,00**	**1.363.943.254.999,00**	**1.353.567.236.410,00**	**1.059.655.709.320,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.139.961.191.737,00	1.045.394.295.432,00	1.148.566.329.071,00	1.152.222.683.000,00	853.117.670.000,00
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**972.693.432.737,00**	**914.534.208.432,00**	**989.612.296.071,00**	**1.025.669.019.000,00**	**726.564.006.000,00**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD 2024	Proyeksi RKPD Tahun 2025
1	2	4	5	6	7	7
4.2.01.02	**Intensif Fiskal**	**71.381.762.000,00**	**42.707.212.000,00**	**54.259.365.000,00**	**24.064.817.000,00**	**24.064.817.000,00**
4.2.01.05	Dana Desa	95.885.997.000,00	88.152.875.000,00	104.694.668.000,00	102.488.847.000,00	102.488.847.000,00
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**134.315.110.270,00**	**170.188.225.914,00**	**215.376.925.928,00**	**201.344.553.410,00**	**206.538.039.320,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**48.299.419.000,00**	**6.494.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**936.000.000,00**	**936.000.000,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.100.000.000,00	6.494.000.000,00	8.000.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	41.199.419.000,00	-	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.629.730.063.142,73**	**1.530.236.282.275,32**	**1.695.996.921.352,00**	**1.693.928.324.800,00**	**1.453.790.467.258,00**

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang sangat cepat khususnya di beberapa kawasan strategis menuntut adanya percepatan di berbagai bidang baik penyiapan SDM, infrastruktur pendukung hingga antisipasi dampak pembangunan, diantaranya: telah beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Pembangunan lanjutan Jalur Temon-Borobudur, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur di Kulon Progo harus diantisipasi agar masyarakat dapat berperan serta, menyiapkan produk-produk lokal yang berkualitas sehingga masyarakat pada kawasan tersebut dapat berkembang dan terangkat bersamaan dengan pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana tahun anggaran 2025 adalah pengembangan kawasan aerotropolis, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang

terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan Dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya dan belanja modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai masing-masing belanja sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan ASN struktural/ fungsional, THR dan gaji ketigabelas ASN, serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut juga meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah dan DPRD, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran jaminan kesehatan baik bagi ASN, Kepala Daerah, maupun DPRD.

Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/ anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan untuk membiayai subsidi bunga pinjaman produktif masyarakat kepada Bank Kulon Progo. Program ini sudah dimulai dari tahun 2022, dan masih akan berlanjut hingga tahun 2025.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2025 kebijakan belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, organisasi yang memiliki surat keterangan terdaftar, atau institusi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ditujukan untuk belanja prioritas program/ kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2021 s.d. 2025 dituangkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2021 s.d. 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Proyeksi RKPD Tahun 2025
1	2	5	5	6	7	7
5.1	**Belanja Operasi**	**1.115.704.992.163,05**	**1.215.304.344.269,25**	**1.290.495.160.734,00**	**1.384.798.758.191,00**	**1.216.507.935.030,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	635.655.347.075,00	672.476.780.974,00	678.458.018.981,00	765.097.645.636,00	655.477.189.087,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	391.671.833.706,05	445.206.662.652,25	488.479.999.973,00	483.482.624.162,00	499.752.625.947,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	548.800.000,00	1.556.758.500,00	1.574.647.500,00	1.746.484.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	74.168.109.382,00	80.132.735.643,00	102.941.294.780,00	117.366.340.893,00	42.786.235.496,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.209.702.000,00	16.939.365.000,00	19.059.088.500,00	17.277.500.000,00	16.745.400.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**202.257.018.228,00**	**146.013.665.289,02**	**219.397.654.552,00**	**198.002.305.555,00**	**76.348.256.515,00**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.432.978.345,00**	**3.047.005.849,00**	**1.092.325.768,00**	**4.834.440.793,00**	**4.800.000.000,00**
5.4	**Belanja Transfer**	**178.559.333.034,00**	**166.837.491.825,00**	**183.786.789.969,00**	**188.309.759.866,00**	**188.342.690.915,00**
TOTAL JUMLAH BELANJA		**1.424.664.917.806,15**	**1.499.994.321.770,05**	**1.531.202.507.232,27**	**1.290.495.160.734,00**	**1.485.998.882.460**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya; penerimaan pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah meliputi: penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merencanakan penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp7.500.000.000,00, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo; dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sebesar Rp4.500.000.000,00 sesuai Propem Perda yang sedang dibahas.

Tabel 3.3

Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 s.d. 2025

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
6.1	**Penerimaan pembiayaan**					
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	141.751.867.567,49	216.356.832.129,17	165.115.934.206,00	101.779.861.137,00	49.208.415.202,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	106.921.625,00	0	0,00	10.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**141.858.789.192,49**	**216.356.832.129,17**	**165.115.934.206,00**	**111.779.861.137,00**	**49.208.415.202,00**
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**					
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	55.236.834.436,00	50.116.372.343,00	45.873.192.403,00	19.762.921.532,00	17.000.000.000,00
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	10.000.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**55.236.834.436,00**	**50.116.372.343,00**	**45.873.192.403,00**	**29.762.921.532,00**	**17.000.000.000,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**59.392.529.731,00**	**86.621.954.756,49**	**119.242.741.803,00**	**82.016.939.605,00**	**32.208.415.202,00**

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen RPD 2023-2026 disusun tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran daerah beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
					Realisasi	Target	Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4
					2023	2023 (P-RKPD)	2024 (RPD)	2024 (RKPD)	2025 (RPD)	2025 (RKPD)	2026 (RPD)
1	**Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**		**1. Gini Rasio**	**Nilai**	**0,402**	**0,361-0,404**	**0,359-0,399**	**0,359-0,399**	**0,357-0,394**	**0,357-0,394**	**0,355-0,390**
			2. Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**5,65**	**6,59-6,74**	**5,19-5,75**	**5,19-5,75**	**5,52-5,90**	**5,52-5,90**	**5,61-6,10**
			3. Angka Kemiskinan	**%**	**15,64**	**15,51-15,98**	**16,34-16,56**	**16,34-16,56**	**15,6-15,98**	**14,12-15,12**	**13,62-14,62**
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)	juta rupiah	35,77	33,00	32,27	32,27	33,67	41,91-66,64	35,07
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,40	2,64-3,42	2,13-3,17	2,13-3,17	2,08-2,92	2,08-2,60	2,00-2,67
2	**Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya**		**1. Indeks Pembangunan Manusia**	**Nilai**	**75,82**	**75,66**	**75,68**	**75,68-75,9**	**76,00**	**76,00-76,23**	**76,29**
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	9,18	9,15	9,25	9,25	9,35	9,35	9,44
			2. Harapan Lama Sekolah	tahun	14,48	14,29	14,30	14,30	14,31	14,63-15,72	14,32
		Meningkatnya prestasi generasi muda	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	79,10	74,34	78,85	78,85	79,64	79,64	83,99
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	tahun	75,35	75,31	75,35	75,35	75,39	75,50-79,75	75,42
			2. Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,31	0,29	0,31	0,31	0,33	0,33	0,36
			2. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	**%**	**54,04**	**53,60**	**58,96**	**58,96**	**64,24**	**64,24**	**67,75**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
					Realisasi	Target	Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4
					2023	2023 (P-RKPD)	2024 (RPD)	2024 (RKPD)	2025 (RPD)	2025 (RKPD)	2026 (RPD)
		Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	54,04	53,60	58,96	58,96	64,24	64,24	67,75
3	**Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan**		**Indeks Pembangunan Berkelanjutan**	**Nilai**	**76,16**	**74,38**	**74,98**	**74,98**	**75,58**	**77,22**	**76,25**
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	51,46	49,27	50,46	50,46	51,63	51,63	52,85
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	67,50**	62,53	62,84	62,84	63,15	67,73-70,23	63,46
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,56	88,55	88,60	88,60	88,65	88,65	88,70
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Nilai	97,16	97,16	98,01	98,01	98,86	98,86	100,00
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**78,05**	**75,00**	**77,00**	**77,00**	**79,00**	**79,00**	**81,00**
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	A	A	A	A	A	A	AA
			2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTF	WTP	WTP
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,634	84,25	84,50	84,50	84,75	85,65	85,00
5	**Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan**		**Indeks Ketertiban dan Ketenteraman**	**Nilai**	**79,66**	**81,48**	**83,59**	**83,59**	**86,27**	**86,27**	**89,85**
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.2 Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema Pembangunan pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025, Tema Pembangunan Rancangan Akhir RKPD DIY 2025, dan isu strategis Rancangan RPJPD Kulon Progo 2025-2045.

4.2.1 Tema RKPD Tahun 2025

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Kulon Progo tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, serta Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "**Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 prioritas nasional (PN) yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2025, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, yaitu **"Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif".** Sektor unggulan dimaksudkan bahwa

pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan. Kreatif dan inovatif merupakan kemampuan untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru/ berbeda. Ekonomi inklusif dimaksudkan bahwa peningkatan kesejahteraan dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan DIY Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2025, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 adalah:

"Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif"

Kawasan pertumbuhan adalah kawasan yang memiliki fasilitas serta kemudahan, sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan. Kawasan pertumbuhan yang menjadi sasaran dalam tema pembangunan di Kulon Progo adalah Kawasan Aerotropolis, Kawasan Perbukitan Menoreh, Kawasan Pansela, dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

1.Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2.Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3.Perluasan akses dan kesempatan

Tema Pembangunan tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah *"**Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin"*** yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni: 1). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; 2). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari; 7). Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri; dan 8). Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

4.2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu strategis yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan fokus pembangunan pada tahun 2025. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Permasalahan daerah terkait kemiskinan dan pemerataan ekonomi yakni dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disertai dengan makin melebarnya ketimpangan pendapatan antar warga yang ditandai dengan semakin tingginya koefisien gini

pada tahun 2023. Hal tersebut seiring dengan kualitas penanganan kemiskinan yang belum akurat seperti data kemiskinan yang perlu diperbaiki, rendahnya produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi yang belum optimal serta optimalisasi sumber daya dan akses ekonomi yang belum signifikan.

2. Permasalahan daerah terkait kebencanaan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan ditandai rendahnya kondisi sarana prasarana kebencanaan dalam rangka pemenuhan SPM serta penataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang belum terkelola dengan baik sehingga sering menimbulkan ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban dalam aktivitas kesehariannya. Kulon Progo juga merupakan wilayah risiko tinggi terhadap bencana;
3. Permasalahan daerah terkait kualitas sumber daya manusia berupa masih rendahnya angka melek huruf dimana salah satunya dipengaruhi dari belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat. Di sisi lain prestasi generasi muda di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih jauh yang diakibatkan dari sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.
4. Permasalahan daerah terkait daya dukung lingkungan hidup terutama dalam hal belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya beban pencemaran lingkungan
    a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air
    b. Menurunnya kualitas udara
    c. Pengelolaan sampah belum optimal
5. Permasalahan daerah terkait pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo yakni Kualitas jalan yang masih terbatas, sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal serta belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta.
6. Permasalahan daerah terkait tata kelola pelayanan publik yang berindikator belum optimalnya kualitas pelayanan publik serta belum optimalnya pengelolaan penunjang administrasi pemerintahan meliputi pengawasan, kapasitas aparatur negara, serta manajemen keuangan.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal
2. Sumber daya manusia belum kompetitif
3. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelayanan infrastruktur wilayah
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah
5. Masih tingginya potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum

Selanjutnya untuk menjawab mewujudkan tema tersebut ditetapkan 5 prioritas pembangunan yaitu:

1. **Pengembangan Kawasan Aerotropolis**

    Prioritas ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan kawasan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta sebagai pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, pengembangan ekonomi

kawasan sekitarnya. Prioritas ini juga upaya untuk meningkatkan akses wilayah di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan; (b) Meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai; (d) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; (e) Meningkatkan kinerja layanan transportasi; (f) Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan; (g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta (h) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Fokus kerja pada prioritas ini adalah pembangunan atau rehabilitasi jalan akses menuju kawasan pusat pertumbuhan, pengadaan tanah untuk fasilitas umum, pembangunan LPJU dan rambu-rambu lalu lintas, penyediaan IPAH (instalasi pemanenan air hujan), serta pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi.

2. **Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan**

Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari suatu ide dan/ atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual. Potensi ekonomi kreatif perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kulon Progo.

Fokus pengembangan ekonomi kreatif antara lain melalui program peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku UKM dan IKM, program peningkatan pemasaran online, program pemanfaatan GSR, Embung Tonogoro, Pusat Kuliner dan Pusat Souvenir Glagah

Tujuan prioritas ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Program penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara kolaboratif dengan berbasis lokus, yaitu kalurahan yang menjadi kantong kemiskinan. Fokus kerja pada prioritas ini antara lain adalah pemberdayaan sektor pertanian, cetak sawah baru, pengembangan perikanan budidaya, pembangunan sarana prasarana destinasi wisata prioritas, pemberdayaan masyarakat pada lokasi wisata prioritas, pengembangan IKM, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, program perlindungan sosial dilakukan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dengan fokus pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Lokal, fasilitasi terhadap penerima bantuan sosial disertai dengan edukasi, pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, pemberian bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan.

3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan daerah yakni masih rendahnya angka melek huruf; belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat; serta menjawab isu strategis daerah yakni sumber daya manusia yang belum kompetitif apabila dibandingkan dengan daerah lain baik di dalam DIY ataupun dengan sebagian kecil wilayah lain di Indonesia.

Fokus prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih ditekankan pada upaya-upaya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta berbagai kebijakan manajemen SDM dan berbagai pelatihan keterampilan yang diperlukan masyarakat Kulon Progo dan disesuaikan dengan kemajuan jaman.

4. **Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan**

   Prioritas ini ditujukan untuk:

   a. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
   b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah serta optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
   c. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
   d. Mewujudkan *good governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   e. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

5. **Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**

   Prioritas ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan memadukan aspek kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup dengan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Fokus pada prioritas ini antara lain melalui program Pengendalian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Persampahan; Peningkatan kapasitas SDM tangguh bencana; dan pengadaan sarpras penanganan bencana.

   Selain itu, fokus kerja pada prioritas ini adalah penyelesaian pembangunan jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah dan kalurahan prioritas, penyelesaian regulasi penataan ruang, peningkatan sarana prasarana kerja, dan Peningkatan Inovasi Daerah.

Tabel 4.2

Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan Daerah
1.	Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	● Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan ● Pengembangan kawasan aerotropolis	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program penguatan daya saing lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
2.	SDM belum kompetitif	● Peningkatan kualitas sumber daya manusia ● Pengembangan kawasan aerotropolis	● Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat ● Meningkatnya prestasi generasi muda ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Program peningkatan kualitas sumber daya manusia
3.	Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelayanan infrastruktur wilayah	● Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan ● Pengembangan kawasan aerotropolis	● Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup ● Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang ● Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Program percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
4.	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	● Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel ● Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
5.	Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

4.2.3 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah ***"Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin".*** Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sudah ditetapkan tujuan dan sasaran pokok pembangunan, adapun tujuannya adalah ***"Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*** sedangkan sasaran-sasaran pokok RPJPD adalah:

1. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab** ditandai oleh hal-hal berikut:
   a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
   b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat masyarakat Kulon Progo, serta menguatnya jati diri dan kepribadiannya.
2. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin** ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
   a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain yang maju, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
   b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
   c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah. Sektor pertanian, dalam arti luas dan pariwisata yang didukung oleh sarana

dan prasarana yang andal menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, jasa serta pertambangan yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
e. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.

3. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang demokratis, berlandaskan hukum** ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
   a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
   b. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi di Kulon Progo.
   c. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
   d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
   e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.
4. **Terwujudnya Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu** ditandai oleh hal-hal berikut:
   a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksananya pelaksanaan pembangunan daerah.
   b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen pemerintahan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
5. **Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,** ditandai oleh hal-hal berikut:
   a. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kawasan Industri; Agropolitan; Jalur Jalan Lintas Selatan; Pembangunan Pelabuhan penangkapan Ikan Samodra; kemungkinan pembangunan Bandara, Pangkalan Angkatan Laut Nasional, Penambangan pasir besi dan pabrik baja; Meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di kota dan pedesaan, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah .

b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman, sehat dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga.
c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
d. Sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, air minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
e. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

6. **Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo Asri dan Lestari,** ditandai hal-hal sebagai berikut:
   a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah, sehat dan nyaman.
   b. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya sesuai dengan fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara seimbang, dan lestari. Kawasan yang berfungsi Lindung diutamakan di kawasan hutan dan sepanjang kawasan bukit Menoreh.
   c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta modal pembangunan.
   d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
7. **Terwujudnya wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri,** ditandai hal-hal sebagai berikut:
   a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam rangka membangun ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan Nasional secara berkelanjutan, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
   b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan yang didukung oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
   c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
8. **Terwujudnya Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional,** ditandai hal-hal sebagai berikut:
   a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional maupun nasional.
   b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kerjasama daerah, regional, nasional dan Internasional dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.
   c. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional maupun global
   d. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun Luar Negeri di Kabupaten Kulon Progo.

RKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Tahun 2005-2025, dengan penekanan pembangunan tahap keempat ***ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.*** Penegasan tersebut menunjukkan posisi RKPD Tahun 2025 ini sangat strategis dalam proses pencapaian visi jangka panjang daerah. Rumusan tema pembangunan 2025 yaitu "**Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif"** telah selaras dengan penekanan pembangunan pada lima tahun keempat RPJPD 2005-2025. Penekanan prioritas adalah pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan.

4.2.4 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 mengacu pada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY tahun 2023-2026. Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2023-2026 adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
3. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel; dan
11. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Selanjutnya, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD 2023-2026. Tema pembangunan 2025 yaitu "**Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif"** selaras dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam RPD 2023-2026 dengan tetap memperhatikan dinamika perubahan kondisi lingkungan yang terjadi pada tahun 2025. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2023-2026 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Keselarasan Tujuan dan Sasaran pada RPD 2023-2026 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2025
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Gini Rasio	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB)	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
	2.Pertumbuhan Ekonomi		2. Tingkat pengangguran terbuka	
	3. Angka Kemiskinan			
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
			2. Harapan Lama Sekolah	
		2. Meningkatnya prestasi generasi muda	Cakupan prestasi generasi muda	
		3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	
			2. Indeks Keluarga Sehat	
	2. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	
Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	1. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2025
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2. Pengembangan kawasan aerotropolis
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Optimalisasi tata kelola pemerintahan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Optimalisasi tata kelola pemerintahan
			2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	
			3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.2.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 mencantumkan tujuan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 adalah:

1. Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat
2. Mengecilnya ketimpangan wilayah
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik

Adapun sasaran pembangunan tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Keselarasan prioritas pembangunan dalam RKPD Kulon Progo 2025 dengan RPJMD DIY 2022-2027 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027

Tujuan Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027	Indikator	Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027		Prioritas Pembangunan 2025
		Sasaran	Indikator	
Terwujudnya kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI=Inclusive Growth Index)	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
	Indeks Kebahagiaan	Penghidupan Ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 2. Pendapatan Per Kapita (Rp Juta) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Inflasi	
		Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada kawasan belum maju	1. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	1. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Demokrasi Indonesia	Optimalisasi tata kelola pemerintahan
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Optimalisasi tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.2.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025

Sampai dengan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini disusun, tema indikatif pembangunan DIY tahun 2025 yang bersumber dari Rancangan Akhir RKPD DIY tahun 2025 adalah:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2025 telah selaras dengan prioritas pembangunan DIY pada tahun 2025. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2025 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2025

No	Prioritas Pembangunan DIY 2025	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2025
1.	Penurunan tingkat kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pengembangan kawasan aerotropolis
3.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
5.	Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.2.7 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2025

Pada RKP tahun 2025, terdapat 8 prioritas nasional (PN) yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 dengan Prioritas Nasional 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Keselarasan Prioritas Nasional pada RKP 2025 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2025

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2025
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	• Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan • Pengembangan kawasan aerotropolis
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Optimalisasi tata kelola pemerintahan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan	• Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026.

Adapun untuk tahun 2025 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada tahap masa reses III tahun 2022/ 2023 dan reses I tahun 2023/ 2024, terdapat 4.038 usulan permasalahan yang disampaikan dari 40 anggota DPRD (legislatif) kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (eksekutif). Berbagai usulan permasalahan tersebut disampaikan secara resmi melalui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.

Usulan permasalahan tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yakni:

1. Sekretariat Daerah: 104 usulan permasalahan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 27 usulan permasalahan
3. Dinas Kesehatan: 51 usulan permasalahan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 11 usulan permasalahan
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 16 usulan permasalahan
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: 49 usulan permasalahan
7. Dinas Kebudayaan: 38 usulan permasalahan
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 5 usulan permasalahan
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian: 43 usulan permasalahan
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 385 usulan permasalahan
11. Dinas Koperasi dan UMKM: 29 usulan permasalahan
12. Dinas Pertanian dan Pangan: 509 usulan permasalahan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan: 45 usulan permasalahan
14. Dinas Pariwisata: 36 usulan permasalahan
15. Dinas Lingkungan Hidup: 46 usulan permasalahan
16. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman: 2.459 usulan permasalahan
17. Dinas Perhubungan: 181 usulan permasalahan
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 3 usulan permasalahan

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Prioritas pengembangan kawasan aerotropolis merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata.

2. Prioritas pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Prioritas optimalisasi tata kelola pemerintahan merupakan usulan permasalahan di OPD Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Prioritas peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.3.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yaitu:

a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam menyusun dokumen awal Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025.
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Kulon Progo melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025.
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPD.
e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Kulon Progo.
f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang lebih baik.

4.3.2 Permasalahan dan Rekomendasi DPRD

1.3.2.1 Permasalahan

1. Keuangan Daerah

   Permasalahan Keuangan Daerah yang dihadapi pemerintah daerah yakni diantaranya: pendapatan daerah belum mencapai target terutama pendapatan transfer hanya mencapai 99,89% dan pendapatan lain-lain daerah yang sah hanya tercapai 99,67%. Hal lain yang perlu

diselesaikan juga adalah kurangnya pembinaan pengendalian dan pengawasan BUMD supaya optimal dalam melayani dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada pemerintah daerah. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/ retribusi

2. Belanja Daerah

   Permasalahan Belanja Daerah yang dihadapi pemerintah daerah yakni antara lain target belanja operasi 2023 tidak tercapai (93,19%), belanja modal juga tidak tercapai hanya di 87,71% serta Belanja Tidak Terduga juga tidak tercapai (7,57%). Sedangkan terkait program dan kegiatan, permasalahan daerah yang diajukan oleh DPRD adalah:

   a. Masih relatif tingginya angka kemiskinan daerah dibandingkan daerah lain
   b. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah
   c. Tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi
   d. Peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak signifikan
   e. Pemerataan akses sosial ekonomi masyarakat belum optimal

1.3.2.2 Rekomendasi

1. Untuk permasalahan daerah yang terkait kebijakan pendapatan daerah, DPRD Kulon Progo merekomendasikan:
   a. perlunya menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
   b. peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan dan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi
   c. optimalisasi manajemen BUMD yang sehat, inovatif dan berdaya saing
   d. peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah yag lebih baik
   e. perlunya optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah
   f. peningkatan koordinasi secara administratif dengan pemerintah DIY maupun pusat supaya mendapatkan sumber pendapatan yang ditargetkan baik DTU, DTK, DID, DBHCHT dan dana lainnya.
   g. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan inovasi daerah untuk meraih pendapatan daerah yang lebih banyak.
   h. pengoptimalan pemanfaatan proyek strategis nasional di daerah sebagai upaya untuk memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
2. Untuk permasalahan daerah yang terkait kebijakan belanja daerah, DPRD Kulon progo merekomendasikan perlunya system pengalokasian pendanaan pembangunan agar lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Adapun pendekatan program dan kegiatan perlu direkomendasikan melalui pendekatan program prioritas yang difokuskan pada:

a. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial melalui program penanganan kemiskinan ekstrem dan program pengembangan ekonomi kreatif
b. Pemantapan pembangunan infrastruktur melalui program perwujudan kawasan aerotropolis dan program peningkatan kelestarian lingkungan hidup
c. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah
d. Optimalisasi tata kelola pelayanan publik melalui program peningkatan tata kelola pelayanan publik.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam RKPD ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Adapun usulan program/ kegiatan melalui sumber dana APBN dan APBD DIY belum ada kepastian sampai dengan Rancangan RKPD ini disusun. Usulan dengan sumber dana APBN, dilakukan secara terpusat melalui aplikasi perencanaan e-musrenbang untuk program/ kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan aplikasi perencanaan KRISNA-DAK untuk usulan program/ kegiatan prasarana fisik dengan sumber pembiayaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

5.1. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo (APBD Kabupaten)

Program Kegiatan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 ini, merupakan hasil dari rekapitulasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Secara lebih rinci, usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**301.142.385.972,00**							**327.659.696.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**291.753.470.672,00**							**313.822.196.400,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**291.753.470.672,00**							**313.822.196.400,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**250.560.842.057,00**						**-**	**256.358.680.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	334.792.083,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.887.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	308.905.083,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	246.459.301.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	251.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3414 Orang/bulan	244.936.622.020,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		250.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.448.078.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	74.600.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian*	-			2 Dokumen	33.992.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	19.603.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	14.389.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adminnistrasi umum*	-			2 Dokumen	202.789.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.257.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	144.532.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			10 Aset	1.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	1.617.293.004,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	1.676.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	343.199.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		426.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.274.093.092,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang aset milik daerah*	-			3 Laporan	412.674.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	427.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	249.096.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		272.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.854.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	153.724.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase PNF Terakreditasi dan PAUD Terakreditasi Persentase SD/MI Terakreditasi A Persentase SMP/MTs Terakreditasi A Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan***	**-**			**35,27 persen 65,76 persen 72,5 persen 87,15 -**	**41.192.628.615,00**						**-**	**57.463.516.400,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah SD/MI Terakreditasi A*	-			242 Sekolah	23.721.887.815,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	38.757.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	5.882.014.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	1.316.501.910,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3000 Peserta Didik	415.111.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				488 Orang	6.607.762.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		6.647.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1199 Orang	157.141.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				335 Satuan Pendidikan	125.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				694 Orang	151.671.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	25.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	49.710.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	3.030.303.905,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				450 Orang	450.276.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	687.717.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35200 Peserta Didik	3.259.583.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		4.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.466.575.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah SMP/MTs Terakreditasi A*	-			58 Sekolah	12.223.916.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	12.335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	5.383.174.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	1.526.024.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	210.801.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18853 Peserta Didik	2.620.298.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		2.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3700 Peserta Didik	515.537.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				780 Orang	1.002.816.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				872 Orang	106.717.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				67 Satuan Pendidikan	62.525.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				160 Orang	48.085.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				3 Konten Digital	29.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				67 Orang	29.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	43.182.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	41.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	301.884.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				677 Orang	281.644.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah PAUD Terakreditasi*	-			301 Sekolah	4.784.270.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF	-	5.882.359.300,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				372 Peserta Didik	50.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1609 Orang	3.235.409.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		3.334.359.300,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	72.904.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				825 Satuan Pendidikan	157.155.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				825 Orang	186.052.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	9.605.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	29.224.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				350 Orang	414.338.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	118.535.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				825 Satuan Pendidikan	460.345.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF		465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*jumlah PNF Terakreditasi*	-			11 Lembaga	462.553.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF	-	488.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				230 Peserta Didik	210.271.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23 Orang	75.134.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10.724.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	85.933.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				22 Orang	18.132.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		18.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	62.357.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.388.915.300,00**							**13.837.500.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.786.475.400,00**							**12.137.500.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Presentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda Berprestasi***	**-**			**76.04 %**	**1.005.758.000,00**						**-**	**1.137.500.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional*	-			83.33 %	99.660.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 Orang	50.244.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	37.162.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	12.253.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi pemuda yang aktif*	-			68.75 %	906.097.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	906.097.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Presentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi***	**-**			**87.97 %**	**6.780.717.400,00**						**-**	**11.000.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga*	-			3 Unit	2.174.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet, Peserta Didik, dan Masyarakat Kulon Progo	-	3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	2.174.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet, Peserta Didik, dan Masyarakat Kulon Progo		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional*	-			75.95 %	4.606.067.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				744 Orang	4.606.067.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.602.439.900,00**							**1.700.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter***	**-**			**100 persen**	**1.602.439.900,00**						**-**	**1.700.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Persentase Industri Kreatif yang Dikembangkan*	-			100 persen	151.116.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				1 Unit	151.116.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal*	-			1 Laporan	1.451.323.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan	-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	1.451.323.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**123.747.255.841,00**							**94.758.464.229,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**97.161.142.786,00**						**-**	**62.990.100.690,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	105.921.500,00			-	-	-	-	115.122.304,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	57.721.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.782.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	48.199.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.339.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	95.238.083.296,00			-	-	-	-	60.860.289.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1428 Orang/bulan	94.956.264.196,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.517.534.145,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	251.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		321.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	30.119.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.500.732,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	241.717.650,00			-	-	-	-	305.148.206,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.785.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.622.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	177.932.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		189.525.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	158.013.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				61 Unit	158.013.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	423.532.024,00			-	-	-	-	472.863.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	423.532.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		472.863.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	993.875.316,00			-	-	-	-	1.076.676.678,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	387.312.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		428.974.524,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	606.562.916,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		647.702.154,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**26.403.878.655,00**						**-**	**31.562.396.008,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.650.774.525,00			-	-	-	-	3.978.134.887,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	163.809.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		329.618.399,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	755.873.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		610.349.289,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.638.195.125,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.858.829.953,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	92.896.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.337.246,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.710.082.130,00			-	-	-	-	27.530.908.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3881 Orang	50.890.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3937 Orang	25.035.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3891 Orang	20.478.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.492.558,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19194 Orang	16.418.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.261.638,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47643 Orang	113.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.501.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66964 Orang	15.610.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.447.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50049 Orang	173.228.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.911.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10447 Orang	16.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.101.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3934 Orang	187.647.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		233.585.539,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1410 Orang	9.445.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.047.914,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4078 Orang	74.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		202.856.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4877 Orang	136.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		158.152.324,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	4.990.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.642.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	71.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.686.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	35.408.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.592.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	554.025.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		686.338.923,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	88.563.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.668.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50.959.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.602.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	149.735.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.988.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	19.458.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.546.176.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	56.100.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.548.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				21 Unit	11.065.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.226.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	138.372.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		374.803.187,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	385.931.430,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.769.879,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	26.401.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.990.636,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	22.005.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.894.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	425.970.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		449.205.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				336 Orang	43.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.755.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				141 Orang	12.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.463.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	335.370.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		407.570.834,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	9.270.000,00			-	-	-	-	13.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	9.270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.752.000,00			-	-	-	-	39.921.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				40 Unit	28.502.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.918.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.002.492,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**107.867.000,00**						**-**	**143.226.248,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.651.200,00			-	-	-	-	42.363.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	22.651.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.363.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.580.800,00			-	-	-	-	94.056.204,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				49 Orang	28.847.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.713.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.733.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.343.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.635.000,00			-	-	-	-	6.806.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				21 Orang	4.635.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.806.250,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**23.894.700,00**						**-**	**26.257.000,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	21.094.700,00			-	-	-	-	23.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	21.094.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	2.800.000,00			-	-	-	-	2.601.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				32 produk Unit	2.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.601.500,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**50.472.700,00**						**-**	**36.484.283,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.673.000,00			-	-	-	-	15.176.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	18.673.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.176.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.799.700,00			-	-	-	-	21.308.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	31.799.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.308.100,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES						**132.500.000.000,00**							**136.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**132.500.000.000,00**							**136.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**132.500.000.000,00**							**136.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**45.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	45.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				446 Orang/bulan	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**-**			**84 %**	**132.500.000.000,00**						**-**	**91.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Operasional dan Pelayanan RSUD Wates*	-			12 Bulan	132.500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Sekitarnya	-	91.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	132.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Sekitarnya		91.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
		RSUD NYI AGENG SERANG						**30.523.700.000,00**							**31.527.900.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.523.700.000,00**							**31.527.900.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**30.523.700.000,00**							**31.527.900.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**30.523.700.000,00**						**-**	**31.527.900.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.523.700.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	31.527.900.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	30.523.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.527.900.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
		PUSKESMAS GALUR I						**1.337.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.337.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.337.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.337.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.337.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.337.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS GALUR I
		PUSKESMAS GALUR II						**994.642.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**994.642.400,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**994.642.400,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**994.642.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	994.642.400,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	994.642.400,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	PUSKESMAS GALUR II
		PUSKESMAS GIRIMULYO I						**1.009.659.261,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.009.659.261,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.009.659.261,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.009.659.261,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.009.659.261,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.009.659.261,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Pendoworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
		PUSKESMAS GIRIMULYO II						**1.394.521.724,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.394.521.724,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.394.521.724,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.394.521.724,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.394.521.724,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.394.521.724,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
		PUSKESMAS KALIBAWANG						**2.240.488.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.240.488.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.240.488.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.240.488.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.240.488.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.240.488.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
		PUSKESMAS KOKAP I						**1.515.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.515.400.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.515.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.515.400.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.515.400.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.515.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP I
		PUSKESMAS KOKAP II						**950.041.822,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**950.041.822,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**950.041.822,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**950.041.822,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	950.041.822,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	950.041.822,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP II
		PUSKESMAS LENDAH I						**1.246.540.405,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.246.540.405,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.246.540.405,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.246.540.405,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.246.540.405,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.246.540.405,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH I
		PUSKESMAS LENDAH II						**1.332.750.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.332.750.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.332.750.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.332.750.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.332.750.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.332.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH II
		PUSKESMAS NANGGULAN						**2.345.896.786,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.345.896.786,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.345.896.786,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.345.896.786,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.345.896.786,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.345.896.786,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
		PUSKESMAS PANJATAN I						**1.500.300.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.300.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.500.300.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.500.300.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.500.300.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.500.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
		PUSKESMAS PANJATAN II						**1.582.595.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.582.595.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.582.595.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.582.595.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.582.595.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.582.595.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
		PUSKESMAS PENGASIH I						**1.818.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.818.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.818.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.818.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.818.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.818.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
		PUSKESMAS PENGASIH II						**1.699.464.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.699.464.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.699.464.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.699.464.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.699.464.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.699.464.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
		PUSKESMAS SAMIGALUH I						**1.650.258.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.650.258.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.650.258.800,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.650.258.800,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.650.258.800,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.650.258.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
		PUSKESMAS SAMIGALUH II						**1.074.595.993,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.074.595.993,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.074.595.993,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.074.595.993,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.074.595.993,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	1.074.595.993,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
		PUSKESMAS SENTOLO I						**2.561.978.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.082.978.400,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.082.978.400,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.082.978.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.082.978.400,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.082.978.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**479.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**479.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**479.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	479.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	479.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
		PUSKESMAS SENTOLO II						**1.563.466.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.563.466.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.563.466.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.563.466.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.563.466.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.563.466.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
		PUSKESMAS TEMON I						**2.021.364.156,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.021.364.156,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.021.364.156,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.021.364.156,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.021.364.156,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.021.364.156,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON I
		PUSKESMAS TEMON II						**868.368.166,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**868.368.166,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**868.368.166,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**868.368.166,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	868.368.166,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	868.368.166,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON II
		PUSKESMAS WATES						**2.744.381.355,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.744.381.355,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.744.381.355,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.744.381.355,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.744.381.355,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.744.381.355,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	PUSKESMAS WATES
		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**105.354.509.193,00**							**314.997.288.417,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105.354.509.193,00**							**314.997.288.417,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**83.825.214.993,00**							**264.070.488.417,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.742.970.776,00**						**-**	**10.552.300.291,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			24 Laporan 4 Dokumen	78.218.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	70.970.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	52.188.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		43.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	26.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		27.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			12 Dokumen 92 Orang	6.477.118.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah	-	7.268.088.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	6.330.095.812,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		7.108.648.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	121.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		132.170.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	25.472.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		27.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	106.048.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	117.887.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106.048.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		117.887.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			35 unit	50.534.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	239.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	50.534.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		239.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			12 Laporan	883.984.064,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	1.000.003.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	417.508.516,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		459.297.777,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57.151.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		71.652.691,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.324.248,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		469.053.238,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			20 unit	1.147.068.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	1.856.349.985,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	698.891.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		863.528.842,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	395.157.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		930.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	53.019.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		62.821.143,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**10.076.491.400,00**						**-**	**42.577.205.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan*	-			5 Unit 304 Lembaga	697.791.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo	-	18.641.615.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				304 Lembaga	359.738.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		610.175.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	338.053.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		18.031.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun dan Direhabilitasi*	-			2,5 KM	9.378.700.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo	-	23.935.590.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	3.856.351.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		19.415.504.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,5 KM	5.522.349.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		4.520.086.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**471.571.600,00**						**-**	**2.184.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	-			130 SR	471.571.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga Masyarakat Kulon Progo	-	2.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				130 SR	471.571.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga Masyarakat Kulon Progo		2.184.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**3.884.472.700,00**						**-**	**3.960.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*	-			3 unit	3.884.472.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo	-	3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				3 Unit	3.884.472.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo		3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**2.127.670.400,00**						**-**	**10.356.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar umlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara*	-			172 Rumah Tangga 1 Unit	2.127.670.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Umum	-	10.356.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	281.403.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Umum		345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				172 Rumah Tangga	1.846.266.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Umum		10.011.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**4.843.702.600,00**						**-**	**2.472.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	-			1 Dokumen 180 Dokumen	4.843.702.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo	-	2.472.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.697.598.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	146.104.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**2.098.961.000,00**						**-**	**1.531.944.426,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata*	-			48 Kawasan	2.098.961.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kawasan Pertamanan	-	1.531.944.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				48 Kawasan	2.098.961.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kawasan Pertamanan		1.531.944.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**37.252.336.413,00**						**-**	**167.876.038.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jembatan yang Dibangun* *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* *Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi dan Dipelihara secara berkala* *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* *umlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* *umlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	-			1 Jembatan 807 Km 6,35 Km 40 Km 7 Dokumen 30 Jembatan	37.252.336.413,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jalan Kabupaten	-	167.876.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				7 Dokumen	740.323.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jalan Kabupaten		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.250 KM	1.439.946.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		2.602.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4.8 KM	18.135.574.013,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Jalan Kabupaten		120.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.575 KM	1.656.957.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		31.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				30 Jembatan	1.099.589.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		1.103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	5.802.785.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		2.603.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				807 KM	530.949.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Jalan Kabupaten		553.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	7.846.211.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Jalan Kabupaten		7.850.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**575.538.104,00**						**-**	**561.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* *umlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*	-			75 Orang 220 Paket Pekerjaan	148.765.204,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				75 Orang	148.765.204,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	426.772.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				220 Paket Pekerjaan	426.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**-**	**-**			**-**	**13.751.500.000,00**						**-**	**22.000.000.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*	-			6 Dokumen	13.751.500.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Satuan Ruas Strategis Keistimewaan	-	22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				6 Dokumen	13.751.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Satuan Ruas Strategis Keistimewaan		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**21.529.294.200,00**							**50.926.800.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.426.248.600,00**						**-**	**1.412.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*	-			1 Dokumen	64.912.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Rawan Bencana	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	64.912.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Rawan Bencana		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*	-			3 unit rumah	169.736.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Rawan Bencana	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	169.736.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Rawan Bencana		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	-			3 Dokumen	1.191.599.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1.191.599.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rumah Susun dan Rumah Khusus		1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**3.737.810.000,00**						**-**	**8.432.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	-			175 Unit	3.737.810.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni	-	8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				172 Unit Rumah	3.737.810.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni		8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**			**-**	**16.365.235.600,00**						**-**	**41.082.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*	-			70 Lokasi	16.365.235.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	41.082.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				70 Lokasi	16.265.399.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		41.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				3 Laporan	99.836.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		82.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**7.285.811.894,00**							**6.782.833.354,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.007.961.194,00**							**6.782.833.354,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.007.961.194,00**							**6.782.833.354,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**4.951.055.594,00**						**-**	**4.293.359.754,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*	-			25 dokumen	15.213.100,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.345.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.868.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan*	-			74 laporan	3.141.297.800,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	3.439.214.308,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	3.085.677.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		3.379.321.308,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	51.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		55.893.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah monev pegawai dan diklat*	-			27 -	11.546.300,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	78.018.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	11.546.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		9.018.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi*	-			4 dokumen	15.631.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	26.612.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	15.631.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		26.612.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran*	-			2 unit	996.700.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	84.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	846.804.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		64.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	149.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	-			29 laporan	574.694.794,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	458.536.896,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67.060.802,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		52.404.864,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	14.105.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		15.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	493.528.792,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		390.632.032,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			95 unit	195.972.600,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	195.978.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	175.976.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		175.978.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				79 Unit	19.995.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum***	**-**			**97,87 %**	**2.056.905.600,00**						**-**	**2.489.473.600,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan trantibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas*	-			26 Laporan	1.467.154.800,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	-	1.998.456.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14 Dokumen	1.195.380.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo		1.673.398.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	271.774.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo		325.058.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP*	-			25 Laporan	589.750.800,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	-	491.017.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	355.021.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		293.047.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13 Laporan	234.729.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		197.970.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**277.850.700,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**277.850.700,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**277.850.700,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Prosentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*	-			100 %	277.850.700,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga														
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				934 Orang	277.850.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.439.431.716,00**							**3.758.356.998,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.439.431.716,00**							**3.758.356.998,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.439.431.716,00**							**3.758.356.998,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.804.825.116,00**						**-**	**1.762.483.884,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.209.600,00			-	-	-	-	8.857.486,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.571.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.843.030,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.638.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.014.456,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.388.479.940,00			-	-	-	-	1.300.309.846,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.353.686.540,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.252.564.319,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	32.396.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.997.876,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.396.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.747.651,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.356.800,00			-	-	-	-	23.014.026,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.356.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.014.026,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.661.200,00			-	-	-	-	21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.661.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.210.148,00			-	-	-	-	211.050.204,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.727.412,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.901.972,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.340.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.014.799,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	118.142.736,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.133.433,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.907.428,00			-	-	-	-	198.252.322,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	176.045.628,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		176.354.687,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	19.861.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.897.635,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**945.817.500,00**						**-**	**1.050.667.838,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	36.936.400,00			-	-	-	-	40.803.525,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	36.936.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.803.525,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	322.725.300,00			-	-	-	-	357.835.008,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				2 Unit	14.068.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.545.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	49.614.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.574.930,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	203.991.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		224.967.110,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	55.050.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.747.718,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	521.487.700,00			-	-	-	-	578.791.884,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	485.132.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		546.633.061,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	36.355.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.158.823,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	64.668.100,00			-	-	-	-	73.237.421,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	8.654.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.908.296,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	36.259.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.792.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	19.754.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.536.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**688.789.100,00**						**-**	**945.205.276,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	623.025.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-	-	872.183.724,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	591.352.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		764.576.474,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	6.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.607.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				18 Unit	24.953.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	23.997.200,00			-	-	-	-	26.901.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	23.997.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.901.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	41.766.700,00			-	-	-	-	46.120.552,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	28.134.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.061.835,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	13.632.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.058.717,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**18.809.006.339,00**							**20.495.084.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.994.731.039,00**							**20.017.464.900,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**17.994.731.039,00**							**20.017.464.900,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**3.701.546.239,00**						**-**	**3.564.561.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	27.207.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	42.658.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.682.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		18.546.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.524.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		24.112.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 77 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	2.841.725.887,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	2.801.535.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	2.781.997.487,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		2.728.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	49.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		58.916.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	10.503.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		14.619.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	44.782.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	44.782.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	0,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	386.384.652,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	386.384.652,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	401.446.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP	-	212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	401.446.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial***	**-**			**63,61 %**	**91.617.500,00**						**-**	**94.732.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 7.2% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*	-			100 %	6.641.600,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lembaga	-	10.560.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	6.641.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lembaga		10.560.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 92.8% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial*	-			100 %	84.975.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial	-	84.172.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	12.101.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		12.056.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	9.704.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		15.719.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	63.170.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		56.397.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial***	**-**			**100 %**	**611.781.400,00**						**-**	**491.623.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Dukungan sebesar 99 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	601.544.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial	-	464.288.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				462 Orang	429.135.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		79.519.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	29.626.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		55.209.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				250 0	52.030.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		87.197.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	26.101.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		62.458.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		28.578.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	15.855.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		29.238.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	36.796.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		122.089.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	10.236.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga	-	27.335.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	10.236.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga		27.335.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Perlindungan Sosial***	**-**			**29,48 %**	**13.392.729.700,00**						**-**	**15.708.924.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Perlindungan Sosial*	-			100 %	13.392.729.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial	-	15.708.924.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	103.177.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		756.462.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40000 Keluarga	138.080.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		599.403.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5104 Keluarga	13.151.472.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		14.353.059.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial***	**-**			**100 %**	**153.148.200,00**						**-**	**133.886.900,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 21 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	32.120.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan bagi korban bencana	-	35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	32.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan bagi korban bencana		35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 79 %Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial*	-			100 %	121.028.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB	-	98.879.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Kampung	3.489.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB		16.038.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	117.538.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB		82.841.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan***	**-**			**100 %**	**43.908.000,00**						**-**	**23.738.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	-			100 %	43.908.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1 makam	-	23.738.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	43.908.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1 makam		23.738.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**814.275.300,00**							**477.620.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**531.998.100,00**							**477.620.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender***	**-**			**68,35 %**	**111.952.000,00**						**-**	**93.159.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender*	-			100 %	50.252.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa dan GOW	-	46.585.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	50.252.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa dan GOW		46.585.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas*	-			100 %	61.699.800,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo	-	46.574.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				90 Orang	21.362.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo		14.410.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	40.336.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Industri Rumahan kab kulon progo		32.164.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perlindungan perempuan***	**-**			**99,99 %**	**248.205.200,00**						**-**	**153.461.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan*	-			100 %	112.847.300,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kapanewon	-	51.150.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	112.847.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kapanewon		51.150.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan*	-			100 %	135.357.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan	-	102.311.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	135.357.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		102.311.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Pemenuhan Hak Anak***	**-**			**46,55 %**	**171.840.900,00**						**-**	**231.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak*	-			100 %	171.840.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Gugus tugas kabupaten layak anak	-	231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	171.840.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Gugus tugas kabupaten layak anak		231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**282.277.200,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**282.277.200,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*	-			100 %	282.277.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				175 Orang	282.277.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**9.495.379.766,00**							**23.404.061.643,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.359.919.366,00**							**23.157.235.843,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**9.359.919.366,00**							**23.157.235.843,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.594.444.966,00**						**-**	**4.439.009.195,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja*	-			23 dokumen	20.631.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	16.710.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	14.255.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		8.912.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.376.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*capaian administrasi keuangan*	-			100 persen	3.049.232.436,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.760.103.195,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	2.992.044.436,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.689.138.995,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	51.646.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		62.051.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.541.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		8.912.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai*	-			1 dokumen	2.641.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.641.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah*	-			12 laporan	120.597.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	118.076.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	31.960.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		28.965.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	88.637.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		89.111.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			1 unit	15.948.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15.948.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	886.072.580,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	355.411.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	191.457.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		183.972.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	694.615.180,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		171.439.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			12 laporan	499.320.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	180.908.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	168.518.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		146.540.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	30.036.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		34.368.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**207.348.900,00**						**-**	**55.820.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun*	-			1 dokumen	207.348.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	55.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	180.731.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		55.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	26.617.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**1.045.206.900,00**						**-**	**10.310.863.200,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*prosentase peserta pelatihan yang kompeten*	-			6,43 persen	874.916.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kabupaten Kulon Progo	-	10.143.787.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				142 Orang	785.260.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kabupaten Kulon Progo		10.096.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	40.325.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	49.330.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kabupaten Kulon Progo		47.212.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*	-			1 Lembaga	142.740.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta	-	167.076.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	142.740.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta		167.076.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*	-			1 dokumen	27.549.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	27.549.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**3.393.219.500,00**						**-**	**8.209.467.048,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*	-			1920 orang	3.303.028.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo	-	8.067.387.048,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1590 Orang	109.078.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo		169.003.770,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				785 Orang	3.193.949.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo		7.898.383.278,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*	-			3840 orang	90.191.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo	-	142.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				4390 Orang	90.191.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo		142.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**119.699.100,00**						**-**	**142.076.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*	-			6 laporan	73.185.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perusahaan	-	86.106.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				6 Laporan	73.185.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perusahaan		86.106.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang dicegah*	-			2 perkara	46.513.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perusahaan	-	55.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	36.769.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perusahaan		55.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.744.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Perusahaan		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**135.460.400,00**							**246.825.800,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**135.460.400,00**							**246.825.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**135.460.400,00**						**-**	**246.825.800,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase transmigran yang ditempatkan*	-			100 persen	135.460.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo	-	246.825.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	135.460.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kulon Progo		246.825.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**33.161.214.493,00**							**27.843.780.040,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.081.464.400,00**							**1.778.940.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.081.464.400,00**							**1.778.940.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**-**	**-**			**-**	**4.081.464.400,00**						**-**	**1.778.940.000,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	4.081.464.400,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.778.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				19 Dokumen	4.081.464.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.778.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.845.888.500,00**							**3.127.590.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**382.428.800,00**							**876.930.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**328.915.200,00**						**-**	**703.780.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	159.176.300,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	159.176.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	169.738.900,00			-	-	-	-	558.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	169.738.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		558.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**29.392.700,00**						**-**	**62.150.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	29.392.700,00			-	-	-	-	62.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	29.392.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**24.120.900,00**						**-**	**111.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.120.900,00			-	-	-	-	111.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	24.120.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		111.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.463.459.700,00**							**2.250.660.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**9.463.459.700,00**						**-**	**2.250.660.000,00**	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	-			-	3.281.666.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.950.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				1 Objek	3.281.666.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.950.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	6.181.793.100,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				1 Laporan	1.127.611.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional														
			0				0 0	5.054.181.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19.233.861.593,00**							**22.937.250.040,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**19.233.861.593,00**							**22.937.250.040,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**13.876.757.993,00**						**-**	**16.019.330.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	74.331.300,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	66.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.659.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		16.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	53.671.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.189.545.333,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	14.201.765.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2520 Orang/bulan	12.099.342.033,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.084.765.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	78.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		102.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	11.603.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.793.500,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	16.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3.793.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	98.405.500,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.022.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		37.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	61.383.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		89.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.571.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.571.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	814.775.860,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	829.564.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	195.337.956,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		179.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	619.437.904,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		650.564.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	655.335.500,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	311.813.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	269.220.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				63 Unit	74.301.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**2.136.915.800,00**						**-**	**2.617.130.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	332.827.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	332.827.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.437.646.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1.287.265.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	150.381.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	366.442.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	917.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				37 Ekor	366.442.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		917.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.429.099.800,00**						**-**	**2.276.590.040,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	336.679.700,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	336.679.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.092.420.100,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.636.590.040,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	656.887.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		736.590.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		40,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	333.572.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	101.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**828.187.300,00**						**-**	**430.880.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	324.248.140,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	170.880.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	101.012.140,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	223.236.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.880.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	228.718.260,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	128.177.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	100.540.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	275.220.900,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	76.407.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan				1 Produk	198.813.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**112.423.800,00**						**-**	**416.480.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	112.423.800,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	416.480.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				926 Ha	112.423.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		416.480.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**850.476.900,00**						**-**	**1.176.840.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	850.476.900,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	1.176.840.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	381.033.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		536.840.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				96 Unit	469.443.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)						**9.651.539.574,00**							**14.581.921.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.859.488.829,00**							**8.601.500.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.859.488.829,00**							**8.601.500.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.011.236.329,00**						**-**	**4.171.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.662.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	48.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.293.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.496.098.647,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	2.810.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	2.380.094.547,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		2.685.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	80.927.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	35.076.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.316.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	52.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	124.010.832,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	425.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		275.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	124.010.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	321.148.250,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	401.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	176.686.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		205.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	119.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		158.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	24.811.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		38.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**1.415.398.200,00**						**-**	**2.019.500.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	572.676.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	679.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149.288.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		235.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	224.317.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		368.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	199.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		76.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	581.876.500,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	-	858.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				345 Layanan	333.184.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang		458.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	248.692.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	260.845.600,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	482.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	43.780.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		78.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				375 Dokumen	87.818.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		159.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	129.246.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		245.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**-**	**-**			**-**	**432.854.300,00**						**-**	**2.411.000.000,00**	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	432.854.300,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	-	-	911.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	432.854.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	-		703.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	-		208.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	0,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.792.050.745,00**							**5.980.421.900,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**4.792.050.745,00**							**5.980.421.900,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**168.377.345,00**						**-**	**336.578.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.402.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.402.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	195.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		195.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.374.445,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	80.678.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.374.445,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		80.678.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**-**			**-**	**63.368.700,00**						**-**	**82.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	63.368.700,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	63.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**1.614.405.900,00**						**-**	**2.069.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.614.405.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-	-	2.069.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				398 Dokumen	1.614.405.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		2.069.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**	**-**			**-**	**68.609.100,00**						**-**	**97.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.609.100,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	97.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	68.609.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		97.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**637.445.700,00**						**-**	**864.945.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	637.445.700,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	864.945.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	271.781.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		375.945.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				720 Dokumen	365.664.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		489.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
6.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.239.844.000,00**						**-**	**2.530.898.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	1.850.439.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	2.169.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				5 Dokumen	1.735.091.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		2.015.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				30 Dokumen	115.348.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		154.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	389.405.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	361.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		125.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	289.405.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		236.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**6.809.976.803,00**							**27.530.389.218,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.809.976.803,00**							**27.530.389.218,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.020.256.603,00**							**23.130.389.218,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**-**			**100 %**	**2.836.755.475,00**						**-**	**11.549.826.466,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	54.723.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	63.344.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	44.608.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		52.420.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.115.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		10.923.688,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	1.956.263.412,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	2.314.653.301,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.904.705.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		2.245.653.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	46.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		61.710.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.907.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		7.290.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			1 Dokumen	55.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	36.883.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		36.883.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	103.194.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	151.387.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		42.720.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.058.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		25.188.812,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.136.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		83.478.637,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			6 Unit	52.976.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	8.020.361.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		1.607.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		5.913.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	52.976.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		499.661.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan jasa penunjang*	-			24 Laporan	272.216.463,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	246.659.121,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	129.604.783,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		84.939.011,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.611.680,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		161.720.110,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	342.381.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	716.537.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	131.014.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		168.891.319,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	191.875.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		517.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	19.492.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		30.646.138,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup***	**-**			**64,29 %**	**50.763.000,00**						**-**	**51.882.985,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun*	-			2 Dokumen	50.763.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	51.882.985,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	50.763.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		51.882.985,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK***	**-**			**100 % 40,43 % 59,57 % 80 %**	**2.320.334.128,00**						**-**	**7.309.131.841,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut*	-			7 Dokumen	791.758.528,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	-	4.482.822.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	258.985.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		504.369.558,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		672.618.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				5 Dokumen	532.773.028,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		3.305.834.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan*	-			4 Laporan	1.528.575.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	2.707.790.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	1.528.575.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		2.707.790.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-	-	118.519.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		118.519.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup***	**-**			**1,40 Persen**	**424.987.000,00**						**-**	**810.878.409,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola*	-			2244 Unit	424.987.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	810.878.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		107.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2244 Unit	424.987.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		703.078.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasi pengawasan***	**-**			**50,11 Persen**	**27.095.600,00**						**-**	**53.781.046,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*	-			81 Laporan	27.095.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	53.781.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				81 Badan Usaha	27.095.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		53.781.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup***	**-**			**95,67 Persen**	**180.497.100,00**						**-**	**167.159.685,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	-			5 Lembaga	180.497.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	167.159.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				250 Orang	53.174.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		35.332.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	127.322.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		131.827.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup***	**-**			**100 Persen**	**22.874.500,00**						**-**	**31.198.640,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani*	-			15 Dokumen	22.874.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	-	31.198.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	22.874.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		31.198.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase peningkatan pengelolaan persampahan***	**-**			**28 Persen**	**156.949.800,00**						**-**	**3.156.530.146,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*	-			1 Laporan	156.949.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	3.156.530.146,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		3.048.240.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	156.949.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		108.289.676,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**789.720.200,00**							**4.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat***	**-**			**100 Persen**	**789.720.200,00**						**-**	**4.400.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat*	-			1 Laporan	789.720.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	-	4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	789.720.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.891.167.031,00**							**5.958.716.698,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.891.167.031,00**							**5.958.716.698,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.891.167.031,00**							**5.958.716.698,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Pesentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 Persen**	**4.074.701.781,00**						**-**	**4.713.769.698,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	19.280.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.896.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	5.384.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			616 orang	3.010.046.833,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	3.385.100.561,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				616 Orang/bulan	2.959.116.433,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		3.298.400.561,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	44.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		74.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.710.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.731.000,00			-	-	-	-	58.296.654,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	20.731.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.296.654,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			4 unit	70.408.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	388.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.414.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	44.994.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		146.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		62.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	517.933.548,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	413.796.567,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	109.987.944,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	14.603.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		413.796.567,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	393.342.104,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			17 unit	427.300.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	390.495.916,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	67.495.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	164.806.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	175.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		296.495.916,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	19.999.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	**-**			**100 persen**	**533.671.100,00**						**-**	**591.817.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	-			12 bulan	533.671.100,00			-	-	-	-	591.817.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	23.430.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.717.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	491.690.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		495.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2303 Laporan	18.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Presentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil***	**-**			**97,2 persen**	**147.316.700,00**						**-**	**318.130.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			12 bulan	104.439.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo	-	110.130.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	44.199.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo		130.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6000 Layanan	60.240.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kab. Kulon Progo		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksanananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			12 Bulan	42.876.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo	-	208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				135 Laporan	42.876.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kulon Progo		208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Prosentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan undefined***	**-**			**100 persen undefined undefined**	**110.789.100,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan*	-			12 bulan	48.715.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	48.715.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan*	-			3 Dokumen	40.628.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	13.628.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	27.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*	-			2 laporan	21.445.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				2 Laporan	21.445.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***	**-**			**100 persen**	**24.688.350,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	-			12 Bulan	24.688.350,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	24.688.350,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**8.841.967.707,00**							**8.688.970.558,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.422.447.707,00**							**8.688.970.558,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**171.256.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**-**	**-**			**-**	**171.256.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	171.256.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			0				0 0	171.256.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.885.085.607,00**							**8.050.580.558,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.617.039.330,00**						**-**	**4.665.047.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.205.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	-	21.349.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.287.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		7.735.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.918.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		13.614.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.092.466.482,00			-	-	-	-	3.874.264.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.030.835.482,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.779.980.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	55.447.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.636.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6.184.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.648.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	28.756.000,00			-	-	-	-	45.623.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.756.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.623.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.012.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.012.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	327.194.798,00			-	-	-	-	519.810.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.093.762,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.405.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.012.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	187.088.236,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.405.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.404.550,00			-	-	-	-	204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	125.227.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		157.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	20.176.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**2.138.247.077,00**						**-**	**2.310.533.008,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	2.138.247.077,00			-	-	-	-	2.310.533.008,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				87 Dokumen	29.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	1.827.089.177,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.685.313.008,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				87 Dokumen	34.480.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				40 Laporan	24.890.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	65.511.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	30.182.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				13 Dokumen	106.333.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**	**-**			**-**	**1.129.799.200,00**						**-**	**1.075.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.129.799.200,00			-	-	-	-	1.075.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	278.673.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	851.125.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**366.106.100,00**							**438.390.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**57.764.400,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.764.400,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	23.764.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	34.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**208.341.900,00**						**-**	**207.290.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	97.212.700,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	97.212.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.370.200,00			-	-	-	-	111.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	34.370.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	68.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	8.759.000,00			-	-	-	-	31.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	8.759.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**99.999.800,00**						**-**	**111.100.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	99.999.800,00			-	-	-	-	111.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	44.774.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	55.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.419.520.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.419.520.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.419.520.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	1.419.520.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				0 Dokumen	1.419.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**15.742.934.443,00**							**20.885.973.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.742.934.443,00**							**20.885.973.800,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**15.742.934.443,00**							**20.885.973.800,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**9.798.412.943,00**						**-**	**14.439.205.900,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			21 dokumen	30.512.700,00			-	-	-	-	41.555.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.937.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	14.575.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.635.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	3.242.758.730,00			-	-	Laporan keuangan	-	3.662.691.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3.173.131.530,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		3.570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.973.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		72.518.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14.653.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan keuangan		20.173.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			5 dokumen	2.045.500,00			-	-	JFT Penguji Kendaraan Bermotor	-	2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	2.045.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	JFT Penguji Kendaraan Bermotor		2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum PerangkatDaerah*	-			12 laporan	78.583.900,00			-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi dan Konsultasi	-	92.034.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.747.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi dan Konsultasi		31.869.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.836.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat ,Koordinasi dan Konsultasi		60.164.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			8 unit	68.242.700,00			-	-	-	-	4.111.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	68.242.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.111.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah*	-			6 Laporan	5.961.452.513,00			-	-	-	-	6.027.663.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	5.816.484.725,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.855.888.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	144.967.788,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.775.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah aset dalam kondisi baik*	-			64 unit	414.816.900,00			-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor	-	501.561.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	346.872.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor		399.722.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	67.944.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasarana Gedung Kantor		101.838.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan Persentase Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan***	**-**			**61,53 % 78,92 %**	**5.944.521.500,00**						**-**	**6.446.767.900,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada*	-			10154 Unit	3.901.615.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perlengkapan Jalan	-	4.223.752.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				179 Unit	2.813.589.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perlengkapan Jalan		3.107.289.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	494.550.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3548 Unit	376.184.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		383.463.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				212 Unit	217.290.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perlengkapan Jalan		227.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)*	-			4 unit	404.594.200,00			-	-	Sarana Prasana Terminal Tipe C	-	435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	404.594.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana Prasana Terminal Tipe C		435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata*	-			55 titik	344.455.000,00			-	-	Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum	-	345.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	344.455.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum		345.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	-			8530 KBWU	300.915.200,00			-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	-	400.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4265 Unit	188.049.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				21 Unit	112.865.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan diuji dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		85.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio*	-			2800 unit 130 ruas	637.052.500,00			-	-	-	-	671.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	283.656.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	353.396.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		376.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	-			2 laporan	21.043.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	-	-	25.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	21.043.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	-		25.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Operasional Bis Sekolah Tersedianya Dokumen Load Factor*	-			2 unit 2 dokumen	334.846.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	-	345.675.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	334.846.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		345.675.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**11.498.421.297,00**							**10.471.147.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.472.910.997,00**							**10.451.147.308,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**8.900.739.897,00**							**9.831.328.438,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.222.799.723,00**						**-**	**3.814.768.167,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	54.486.900,00			-	-	-	-	22.542.911,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.334.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	38.152.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.032.911,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.785.627.393,00			-	-	-	-	3.374.446.020,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2.724.450.493,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.309.253.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.516.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.492.490,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.660.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.699.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26.609.200,00			-	-	-	-	29.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.209.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.475.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	24.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.286.300,00			-	-	-	-	90.555.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.684.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.625.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	59.602.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118.379.330,00			-	-	-	-	134.012.594,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.715.890,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.191.732,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	97.663.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.820.862,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	153.410.600,00			-	-	-	-	164.005.792,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	100.823.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.820.862,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27.106.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.156.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	25.481.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.028.330,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**815.683.800,00**						**-**	**763.837.910,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	815.683.800,00			-	-	-	-	763.837.910,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permohonan	241.922.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		277.846.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				6 Media	573.761.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		485.991.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**4.862.256.374,00**						**-**	**5.252.722.361,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.862.256.374,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.252.722.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	112.324.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	553.931.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	120.394.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	145.803.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				40 Perangkat Daerah	3.831.429.574,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.159.722.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	98.373.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**209.520.400,00**							**244.373.700,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**209.520.400,00**						**-**	**244.373.700,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	209.520.400,00			-	-	-	-	244.373.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	189.669.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		199.373.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	19.850.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**362.650.700,00**							**375.445.170,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**362.650.700,00**						**-**	**375.445.170,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	340.324.800,00			-	-	-	-	350.739.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	340.324.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.739.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.325.900,00			-	-	-	-	24.705.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				42 Perangkat Daerah	22.325.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.705.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital														
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				90 Objek	2.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	**NON URUSAN**						**25.510.300,00**							**20.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**25.510.300,00**							**20.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**25.510.300,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.510.300,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.510.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**7.943.309.892,00**							**5.725.358.582,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.943.309.892,00**							**5.725.358.582,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.443.309.892,00**							**5.725.358.582,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.854.101.652,00**						**-**	**2.608.254.171,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	20.000.900,00			-	-	-	-	22.786.390,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.590.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.970.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.195.990,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	2.091.918.764,00			-	-	-	-	2.300.695.720,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				324 Orang/bulan	2.045.289.364,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.249.818.300,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	38.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.590.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	8.379.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.287.420,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	46.945.500,00			-	-	-	-	55.311.520,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.066.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.774.020,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.879.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.537.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	340.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	267.446.988,00			-	-	-	-	148.697.881,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	177.644.964,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.565.438,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.802.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.132.443,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	87.789.500,00			-	-	-	-	80.762.660,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	73.565.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.115.710,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	14.224.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.646.950,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**17.843.000,00**						**-**	**18.700.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*	-			65,69 %	17.843.000,00			-	-	-	-	18.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				108 Unit Usaha	11.459.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				5 Unit Usaha	6.383.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**	**-**			**-**	**100.798.800,00**						**-**	**115.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi*	-			97,31 %	100.798.800,00			-	-	-	-	115.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				93 Orang	100.798.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**	**-**			**-**	**2.069.533.400,00**						**-**	**2.282.043.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)*	-			4,73 %	2.069.533.400,00			-	-	-	-	2.282.043.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				946 Unit Usaha	1.766.257.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.943.132.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				55 Unit Usaha	296.085.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				57335 Unit Usaha	7.190.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.911.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**			**-**	**401.033.040,00**						**-**	**700.861.411,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase Pengembangan UMKM*	-			2,09 %	401.033.040,00			-	-	-	-	700.861.411,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	401.033.040,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.861.411,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*	-			1 Kali	2.500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			0				0 0	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU						**3.593.867.287,00**							**718.794.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.115.347.287,00**							**718.794.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.115.347.287,00**							**718.794.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.546.860.887,00**						**-**	**0,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.975.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.128.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.846.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.925.384.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	1.885.154.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	37.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	71.999.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	22.944.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.055.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.203.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.203.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	388.214.587,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	162.588.295,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	225.626.292,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.084.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	81.809.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	56.275.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**120.341.500,00**						**-**	**211.150.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	120.341.500,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	211.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.341.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		211.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**144.205.200,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	144.205.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	144.205.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**262.686.400,00**						**-**	**277.944.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	262.686.400,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	277.944.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2700 Pelaku Usaha	235.313.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		266.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	8.813.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		11.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				700 Kegiatan Usaha	18.559.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**9.517.500,00**						**-**	**169.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.517.500,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	169.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	9.517.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		169.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**31.735.800,00**						**-**	**60.300.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.735.800,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	60.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	31.735.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		60.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**478.520.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**478.520.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**478.520.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	478.520.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			0				0 0	478.520.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**52.266.155.828,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**3.565.156.342,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu*	-			23 Dokumen	33.689.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	23.689.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	2.687.283.879,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.605.877.279,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	73.271.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	8.135.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	72.701.945,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.207.945,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	46.494.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			1 Unit	19.280.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lingkup Dinas	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19.280.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lingkup Dinas		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	229.460.684,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	101.064.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.395.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			4 Laporan	522.740.634,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	87.495.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	166.994.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	8.422.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	259.828.634,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**48.700.999.486,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman*	-			3 Dokumen	6.507.910.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				14 Dokumen	2.116.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				8 Laporan	3.891.910.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan*	-			1 Dokumen	1.677.403.706,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	1.677.403.706,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang dikelola dan dikembangkan*	-			1 Unit	6.363.446.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	6.363.446.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya*	-			3 Unit	1.357.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				20 Unit	1.357.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	-			11 Dokumen	32.794.439.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				2 Laporan	2.877.658.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1.076.769.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				5 Laporan	2.606.954.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				10 Orang	376.352.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				12 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				9 Dokumen	637.103.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				75 Orang	1.617.377.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				9 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				3 Laporan	5.812.335.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				5 Laporan	6.189.888.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Seniman dan Masyarakat Umum		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.269.773.832,00**							**4.173.110.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.269.773.832,00**							**4.173.110.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.904.377.732,00**							**3.782.860.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**3.637.074.132,00**						**-**	**3.615.120.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Disampaikan Tepat Waktu*	-			25 Dokumen	15.010.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.060.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.949.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Dokumen	2.827.645.783,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	2.976.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.786.966.783,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		2.931.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	34.747.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.931.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			2 Dokumen	7.957.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.957.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	63.409.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	21.751.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41.658.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			3 unit	178.495.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	178.495.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	360.487.489,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107.429.029,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	253.058.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	184.068.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	132.720.660,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	41.348.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan***	**-**			**49,49 %**	**267.303.600,00**						**-**	**167.740.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan Perpustakaan*	-			7 Perpustakaan	241.814.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo	-	140.720.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpustakaan	17.431.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		13.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	131.416.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		112.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				800 Eksemplar	92.966.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		14.890.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*	-			1 perpustakaan	25.489.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo	-	27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustakaan	25.489.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**365.396.100,00**							**390.250.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan***	**-**			**74,20 %**	**365.396.100,00**						**-**	**390.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis*	-			18700 Berkas	282.068.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo	-	294.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				18.700 Berkas	233.969.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		218.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	48.098.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	-			14000 Arsip	83.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo	-	96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				14000 Arsip	83.328.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**9.129.623.750,00**							**4.774.384.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.322.140.500,00**							**42.300.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.322.140.500,00**							**42.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**17.536.900,00**						**-**	**42.300.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.536.900,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	42.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.391.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.145.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		38.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**5.304.603.600,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	5.304.603.600,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				48 kegiatan Objek	5.304.603.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.807.483.250,00**							**4.732.084.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3.807.483.250,00**							**4.732.084.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.963.075.950,00**						**-**	**3.245.914.000,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.580.178.853,00			-	-	-	-	2.472.814.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.520.479.553,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.405.214.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	55.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.749.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.412.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.412.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.745.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	89.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	13.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.285.797,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	181.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45.722.681,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		44.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	154.563.116,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		137.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.454.300,00			-	-	-	-	351.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				47 Unit	110.449.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.016.900,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		21.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	7.988.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**			**-**	**169.160.300,00**						**-**	**203.930.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	19.933.100,00			-	-	-	-	42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				8 Unit	19.933.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.691.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	71.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	40.691.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		71.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	108.535.800,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	108.535.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**506.850.900,00**						**-**	**915.220.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	333.594.000,00			-	-	-	-	730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	333.594.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	173.256.900,00			-	-	-	-	185.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	79.980.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				59 Unit	93.276.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**46.335.300,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	46.335.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				30 Pelaku Usaha	46.335.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**122.060.800,00**						**-**	**247.020.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	72.402.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				70 Unit Usaha	72.402.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	49.658.500,00			-	-	-	-	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	49.658.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						**62.587.743.739,00**							**35.319.815.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**55.392.357.700,00**							**30.118.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**55.392.357.700,00**							**30.118.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**55.392.357.700,00**						**-**	**30.118.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	26.227.317.900,00			-	-	-	-	1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	26.227.317.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	29.165.039.800,00			-	-	-	-	28.961.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				10 Dokumen	8.273.541.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.480.680.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				6 Laporan	4.999.612.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.480.680.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				12 Laporan	15.891.885.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.195.386.039,00**							**5.201.815.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**7.195.386.039,00**							**5.201.815.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.897.952.035,00**						**-**	**2.976.840.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.916.100,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.579.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.336.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.422.343.079,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.361.266.379,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	57.042.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.034.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.655.100,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.735.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.456.000,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.456.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.100.056,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	126.549.596,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.550.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.481.700,00			-	-	-	-	496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	86.002.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.408.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	28.070.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**3.822.510.904,00**						**-**	**1.229.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	3.750.040.004,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3.750.040.004,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	72.470.900,00			-	-	-	-	1.229.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	72.470.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.229.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**230.042.000,00**						**-**	**509.820.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	230.042.000,00			-	-	-	-	509.820.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	156.963.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.910.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	73.078.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.910.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**244.881.100,00**						**-**	**486.155.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	244.881.100,00			-	-	-	-	486.155.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	144.451.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		486.155.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	100.429.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**9.928.100.646,00**							**731.755.810.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**976.896.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**976.896.000,00**							**70.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**976.896.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	976.896.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				270 Unit	976.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.951.204.646,00**							**731.685.810.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**8.047.103.046,00**							**728.711.260.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota***	**-**			**100 %**	**4.598.089.796,00**						**-**	**724.524.790.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	24.860.700,00			-	-	-	-	19.430.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.004.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.780.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.856.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		10.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 laporan	3.934.036.321,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	4.807.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				720 Orang/bulan	3.855.565.021,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		4.680.160.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	62.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.740.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	16.371.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		14.640.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 dokumen	68.367.100,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	123.780.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.157.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		30.610.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	48.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		93.170.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			3 unit	22.522.200,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	718.740.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	22.522.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		718.740.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	361.554.775,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	452.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	196.847.895,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		212.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	164.706.880,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		239.580.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			2 laporan	186.748.700,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	326.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	160.739.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		186.340.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		106.480.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	26.009.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		33.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan***	**-**			**37,5 %**	**2.240.349.450,00**						**-**	**2.974.550.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan*	-			2 unit	1.830.619.100,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	2.714.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	575.726.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.544.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				25 Unit	1.254.893.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan*	-			6764 dokumen	409.730.350,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2738 Dokumen	180.650.350,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4026 Dokumen	229.080.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***	**-**			**12,67 %**	**790.525.000,00**						**-**	**572.330.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan*	-			4 laporan	323.500.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	439.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	323.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		439.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	-			13 dokumen	467.025.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	133.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				13 Laporan	467.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		133.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n***	**-**			**235,22 milyar rupiah**	**211.446.400,00**						**-**	**537.530.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina*	-			110 orang	211.446.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	537.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				110 Produk	211.446.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		537.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen***	**-**			**undefined undefined**	**206.692.400,00**						**-**	**102.060.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang*	-			6000 unit	206.692.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	102.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				6000 Unit	206.692.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		102.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**904.101.600,00**							**2.974.550.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah industri baru tahun ke n*** ***Persentase sentra industri aktif***	**-**			**150 unit 47,06 %**	**904.101.600,00**						**-**	**2.974.550.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten*	-			14 dokumen	904.101.600,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	2.974.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	98.342.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		266.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				8 Dokumen	208.706.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		272.860.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	597.052.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		2.435.490.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**25.829.537.215,00**							**40.639.677.354,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**-**			**100 %**	**19.726.952.500,00**						**-**	**32.474.802.354,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*	-			23 Dokumen	24.896.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	32.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.356.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	9.380.636.317,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda	-	19.164.102.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	9.191.494.317,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		18.909.762.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	177.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		231.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	11.842.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	-			2 Dokumen	6.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	-	10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	1.578.694.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah	-	1.641.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	393.768.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.184.926.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			27 Unit	1.425.964.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				27 Unit	1.425.964.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	2.471.465.413,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	2.467.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	744.357.037,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		787.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.727.108.376,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	2.044.440.650,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah	-	3.910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				88 Unit	1.061.108.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	688.999.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				425 Unit	294.333.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional*	-			3 Laporan	944.121.020,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati	-	944.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	181.155.720,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	146.922.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	16.043.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				40 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan*	-			3 Laporan	385.883.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	-	503.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	212.789.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	153.581.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	19.512.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	-			9 Dokumen	260.422.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD, Pemkab	-	436.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	69.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD, Pemkab		86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	96.265.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD, Pemkab		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7 Dokumen	94.757.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD, Pemkab		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	-			12 Laporan	1.204.428.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1.204.428.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**-**			**97,45 %**	**4.856.896.788,00**						**-**	**6.008.800.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan*	-			12 Dokumen	797.722.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon	-	879.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	289.884.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	170.737.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		238.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	337.101.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		241.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra*	-			26 Dokumen	2.722.518.888,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan	-	3.612.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				11 Dokumen	1.356.685.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.785.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				10 Dokumen	1.236.962.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	128.870.588,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum*	-			480 Dokumen	1.292.471.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan	-	1.464.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				480 Dokumen	130.830.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		152.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	1.040.996.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		1.128.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				480 Dokumen	120.644.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolahan		183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Fasilitasi Kerjasama*	-			4 Dokumen	44.183.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo	-	52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	44.183.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo		52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan***	**-**			**100 %**	**978.375.927,00**						**-**	**1.556.075.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	-			17 Dokumen	267.441.027,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD	-	351.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	129.626.927,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		162.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	137.814.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	-			10 Laporan	120.091.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	42.295.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		57.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	50.017.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	27.778.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait		68.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	-			150 Dokumen	352.003.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	577.688.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	236.460.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		367.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	57.378.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				240 Orang	58.163.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		100.188.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	-			9 Dokumen	238.839.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan	-	416.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				6 Dokumen	92.198.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		111.335.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	7.617.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		111.335.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	139.024.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		194.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanan***	**-**			**91,92 %**	**267.312.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota*	-			8 Lembaga	182.312.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				8 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	32.312.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo*	-			3 Dokumen	85.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural	-	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.187.448.103,00**							**45.808.046.784,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**25.741.337.847,00**						**-**	**25.000.486.784,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*	-			25 Dokumen	16.108.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.508.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.600.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		9.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	2.061.023.088,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	2.101.486.784,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.001.525.288,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		2.033.986.784,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	54.163.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		57.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.334.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			1 Dokumen	21.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	21.876.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			24 Dokumen	181.937.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	82.123.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		80.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.814.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		90.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			413 Unit	2.149.824.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1.793.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				410 Unit	356.674.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	1.483.767.248,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	515.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.829.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		185.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.282.937.748,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		330.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			2 Laporan	735.705.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	-	1.875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	458.679.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	161.712.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		825.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	115.312.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		175.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			14 Dokumen	18.832.315.011,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	19.312.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	18.649.375.611,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		18.900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				40 Paket	102.723.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		375.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	80.216.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		37.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD*	-			9 Dokumen	258.781.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD, Sekretariat DPRD	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				9 Laporan	258.781.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD, Sekretariat DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	**-**			**100 %**	**9.446.110.256,00**						**-**	**20.807.560.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			8 dokumen	2.011.149.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	4.982.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	276.058.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	1.316.153.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.276.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	346.927.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		810.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	72.010.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		546.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas*	-			3 Dokumen	1.659.789.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	1.659.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			6 Dokumen	2.260.363.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	3.690.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	336.320.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	1.358.421.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.140.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	565.621.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD*	-			47 Dokumen	482.247.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	3.044.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	360.878.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.184.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				46 Dokumen	121.369.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		860.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			2 Dokumen	246.392.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	988.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	246.392.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		988.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*	-			4 Laporan	163.657.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	89.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	163.657.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		89.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah*	-			4 Dokumen	1.171.837.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	680.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	1.171.837.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		680.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD*	-			80 Dokumen	1.450.672.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD	-	5.098.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				8 Dokumen	193.190.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.340.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				58 Laporan	624.170.456,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				13 Dokumen	299.865.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		395.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	333.446.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		1.163.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.540.330.365,00**							**6.589.089.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**367.885.900,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**367.885.900,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase situs warisan geologi yang terkelola***	**-**			**100 persen**	**367.885.900,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi*	-			5 obyek	367.885.900,00			-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				5 Objek	367.885.900,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**252.540.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**252.540.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Pengendalian Keistimewaan***	**-**			**100 persen**	**252.540.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*	-			8 dokumen	252.540.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	161.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				4 Laporan	91.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.919.904.465,00**							**6.589.089.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.652.143.965,00**							**6.266.639.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 persen**	**4.692.430.165,00**						**-**	**4.367.790.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	61.137.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	58.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.638.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		45.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.499.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		12.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 dokumen	3.853.604.995,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	3.659.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	3.766.187.695,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		3.547.970.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	45.467.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		67.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	41.949.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		44.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			2 dokumen	29.206.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	35.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		2.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				57 Orang	27.206.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		32.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 dokumen	201.429.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	110.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	26.305.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		32.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.124.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		77.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Daerah Jumlah penambahan aset*	-			6 Unit	19.798.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19.798.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	297.938.020,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	233.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.043.240,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		65.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	202.894.780,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		167.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	229.315.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda	-	225.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	186.853.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		155.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		10.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				76 Unit	35.462.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		59.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Capaian perencanaan pembangunan daerah persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah***	**-**			**100 persen 99,74 persen**	**1.172.302.600,00**						**-**	**1.157.679.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			8 dokumen	881.462.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	682.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	49.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		46.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	832.402.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		635.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			6 dokumen	49.935.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Dokumen	49.935.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah*	-			22 dokumen	240.905.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	326.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	177.498.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		251.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	63.406.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		75.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu***	**-**			**100 persen**	**787.411.200,00**						**-**	**741.170.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			25 dokumen	327.945.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	386.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	70.911.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		120.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				9 Laporan	165.345.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		157.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	91.689.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		107.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA*	-			17 dokumen	237.477.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	163.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	51.599.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		84.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	185.877.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		79.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			16 dokumen	221.988.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo	-	191.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	116.990.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		98.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	104.997.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		93.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**267.760.500,00**							**322.450.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Capaian Inovasi Daerah Capaian penelitian dan pengembangan***	**-**			**134 satinov 7 dokumen**	**267.760.500,00**						**-**	**322.450.000,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi daerah yang masih eksis*	-			satinov 134	267.760.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	322.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	207.878.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		251.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	59.881.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		70.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**226.915.111.203,00**							**724.612.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**226.904.387.303,00**							**724.612.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**226.904.387.303,00**							**724.612.900,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**27.115.426.588,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	42.327.700,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	42.327.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.211.200.571,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	26.061.821.371,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	94.768.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	17.996.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	36.614.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.061.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	44.735.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.326.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	418.508.317,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	152.476.929,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	266.031.388,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	359.328.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	238.078.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				107 Unit	106.249.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**194.243.162.015,00**						**-**	**260.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	551.267.700,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	108.053.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				85 Dokumen	62.366.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				12 Dokumen	271.926.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	108.922.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	361.959.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				110 Dokumen	107.304.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	20.577.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	13.985.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	220.093.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	187.243.600,00			-	-	-	-	260.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				168 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				504 Laporan	58.176.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	64.067.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	193.142.690.915,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	174.973.244.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	4.800.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	13.369.446.915,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**277.044.200,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	277.044.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	106.635.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	12.032.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	48.191.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	38.185.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	71.999.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**5.268.754.500,00**						**-**	**464.612.900,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	5.268.754.500,00			-	-	-	-	464.612.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	66.406.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	80.888.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	2.282.527.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	1.985.713.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29 Layanan	365.791.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		464.612.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	316.781.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	68.616.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	74.706.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	27.323.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**10.723.900,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.723.900,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.723.900,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.723.900,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	10.723.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**143.272.722.110,00**							**108.254.660.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**462.698.000,00**							**248.570.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**462.698.000,00**							**248.570.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan***	**-**			**100 %**	**462.698.000,00**						**-**	**248.570.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah peserta pelatihan internalisasi keistimewaan*	-			60 Orang	462.698.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	462.698.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**142.810.024.110,00**							**108.006.090.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**142.810.024.110,00**							**108.006.090.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**138.690.496.010,00**						**-**	**102.514.740.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	24.968.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.684.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	9.284.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Dokumen	138.225.100.166,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	101.863.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	138.159.902.566,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		101.777.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	56.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	8.647.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			1 Dokumen	6.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	107.153.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	97.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	17.212.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.941.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			6 Unit	7.504.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.504.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	190.550.994,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.214.962,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120.336.032,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	129.218.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	94.037.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	19.581.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Cakupan Pengembangan Aparatur*** ***Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur*** ***Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur***	**-**			**45,23 %** **84,07 %** **99,98 %**	**4.119.528.100,00**						**-**	**5.491.350.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			3 Dokumen	969.361.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	755.682.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	120.422.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	93.255.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat*	-			3 Dokumen	548.809.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	660.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				230 Dokumen	48.637.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	53.150.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	447.022.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN*	-			4 Dokumen	2.484.717.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.399.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	16.379.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				24 Orang	139.436.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	2.287.043.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.266.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	41.857.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			2 Dokumen	116.640.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	197.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				27 Dokumen	15.683.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	100.956.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		INSPEKTORAT DAERAH						**9.902.148.647,00**							**5.634.660.600,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.595.455.347,00**							**5.606.709.600,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.595.455.347,00**							**5.606.709.600,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**9.310.385.847,00**						**-**	**4.589.587.356,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	52.892.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	73.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15.181.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	37.711.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		38.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			38 laporan	8.667.861.155,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	3.984.137.356,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	8.596.643.355,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		3.923.137.356,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	66.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		57.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.617.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			6 dokumen	45.235.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	45.235.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah*	-			6 dokumen	97.040.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	21.023.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	76.017.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			22 unit	48.650.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	48.650.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	204.010.592,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	193.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.686.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	122.323.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	194.694.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	190.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	159.901.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		173.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				178 Unit	34.793.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		17.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan***	**-**			**93,38 %**	**168.110.900,00**						**-**	**806.856.084,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah laporan pengawasan internal*	-			429 laporan	145.192.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo	-	739.073.964,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	15.979.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		150.416.593,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				295 Laporan	41.268.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		225.809.677,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				87 Laporan	19.422.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		281.467.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	68.522.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		81.380.181,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasandengan Tujuan Tertentu*	-			14 laporan	22.918.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan dengan tujuan tertentu	-	67.782.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	22.918.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan dengan tujuan tertentu		67.782.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi***	**-**			**94,05 %**	**116.958.600,00**						**-**	**210.266.160,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah laporan pendampingan dan asistensi*	-			133 laporan	116.958.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	-	210.266.160,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 perangkat daerah	5.646.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		24.090.480,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	85.998.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		162.082.440,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				86 perangkat daerah	25.313.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		24.093.240,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**306.693.300,00**							**27.951.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**306.693.300,00**							**27.951.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**306.693.300,00**						**-**	**27.951.000,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian*	-			6 dokumen	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	306.693.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.951.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	306.693.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		27.951.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KAPANEWON TEMON						**2.001.148.469,00**							**2.131.713.725,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.830.106.269,00**							**1.898.498.321,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.830.106.269,00**							**1.898.498.321,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.730.106.269,00**						**-**	**1.798.498.321,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	10.620.400,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	12.010.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.596.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		6.467.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.023.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		5.543.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	1.406.828.583,00			-	-	-	-	1.418.615.721,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	1.370.655.183,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.369.141.521,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.930.900,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.923.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.543.300,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	32.247.900,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	60.791.800,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.707.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		25.984.300,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		34.807.500,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			2 Unit	3.500.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	114.728.954,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	141.869.200,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.556.930,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		35.403.400,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.172.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		106.465.800,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	162.180.432,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	132.875.600,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.074.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		101.578.900,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	96.757.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		13.858.300,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	14.348.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		17.438.400,00	KAPANEWON TEMON
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon	-	100.000.000,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		100.000.000,00	KAPANEWON TEMON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**62.244.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**62.244.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**30.000.000,00**						**-**	**62.244.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	-			3 Dokumen	30.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon	-	62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**141.042.200,00**							**170.971.304,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**141.042.200,00**							**170.971.304,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**43.152.000,00**						**-**	**53.729.322,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			13 Dokumen	34.851.400,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	43.804.322,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	17.070.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		18.573.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	17.781.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		25.231.322,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	8.300.600,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	9.925.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.300.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		9.925.000,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**26.691.300,00**						**-**	**31.010.227,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			8 Laporan	26.691.300,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	26.691.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**52.015.700,00**						**-**	**64.571.654,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			4 Laporan	52.015.700,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	64.571.654,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	16.113.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		18.080.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	35.902.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		46.491.654,00	KAPANEWON TEMON
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**19.183.200,00**						**-**	**21.660.101,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 Laporan	19.183.200,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon	-	21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	19.183.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Temon		21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
		KAPANEWON WATES						**4.791.332.903,00**							**4.868.217.499,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelengaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates	-	100.000.000,00	KAPANEWON WATES
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		100.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**101.777.200,00**							**51.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**101.777.200,00**							**51.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota undefined***	**-**			**100 % undefined undefined**	**16.777.200,00**						**-**	**16.500.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adminitrasi umum perangkat daerah*	-			2 Dokumen	16.777.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	16.500.000,00	KAPANEWON WATES
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.777.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.500.000,00	KAPANEWON WATES
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**85.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	85.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun*	-			3 Dokumen	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.525.891.203,00**							**4.644.717.499,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.525.891.203,00**							**4.644.717.499,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**2.427.581.903,00**						**-**	**2.665.560.354,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Laporan	13.033.700,00			-	-	Kapanewon Wates	-	14.825.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.914.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		10.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.118.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		4.325.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang di sampaikan tepet waktu*	-			14 Dokumen	2.079.747.855,00			-	-	Kapanewon Wates	-	2.147.145.441,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				434 Orang/bulan	2.024.535.355,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		2.087.595.441,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	51.115.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		55.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.097.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		4.550.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan asset*	-			21 unit	21.645.200,00			-	-	Kapanewon Wates	-	119.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	21.645.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		119.000.000,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			12 Laporan	214.669.986,00			-	-	Kapanewon Wates	-	289.589.913,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.999.946,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		96.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149.670.040,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		193.589.913,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	98.485.162,00			-	-	Kapanewon Wates	-	95.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	60.334.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		65.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	38.150.612,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase peningkatan pelayanan kecamatan***	**-**			**100 %**	**39.520.700,00**						**-**	**76.806.750,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan*	-			9 dokumen	35.183.000,00			-	-	Kapanewon Wates	-	37.252.950,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	7.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		11.601.150,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	27.458.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		25.651.800,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan*	-			12 dokumen	4.337.700,00			-	-	Kapanewon Wates	-	39.553.800,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	4.337.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		39.553.800,00	KAPANEWON WATES
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan***	**-**			**100 %**	**1.410.143.000,00**						**-**	**1.144.812.942,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah laporan peningkatan evektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	-			9 Laporan	31.249.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	38.217.200,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	31.249.700,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		38.217.200,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan*	-			17 Lembaga	1.378.893.300,00			-	-	Kapanewon Wates	-	1.106.595.742,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga Kemasyarakatan	901.860.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		732.808.525,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	439.859.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		331.890.389,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	37.172.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		41.896.828,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase peningkatan penyelengaraan urusan pemerintahan umum***	**-**			**97,37 %**	**626.877.600,00**						**-**	**738.469.406,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*	-			1064 orang	626.877.600,00			-	-	Kapanewon Wates	-	738.469.406,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				444 Orang	565.168.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		671.429.928,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				135 Orang	31.418.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		30.733.528,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	30.290.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		36.305.950,00	KAPANEWON WATES
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**21.768.000,00**						**-**	**19.068.047,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	-			9 Laporan	21.768.000,00			-	-	Kapanewon Wates	-	19.068.047,00	KAPANEWON WATES
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	21.768.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Wates		19.068.047,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**63.664.500,00**							**72.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**63.664.500,00**							**72.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota undefined***	**-**			**100 % undefined undefined**	**63.664.500,00**						**-**	**72.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adminitrasi umum perangkat daerah*	-			2 Dokumen	33.165.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates	-	39.000.000,00	KAPANEWON WATES
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33.165.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		39.000.000,00	KAPANEWON WATES
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 Laporan	30.499.500,00			-	-	-	-	33.000.000,00	KAPANEWON WATES
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	30.499.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	KAPANEWON WATES
		KAPANEWON PANJATAN						**2.039.702.578,00**							**2.850.814.897,20**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan*	-			100 %	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Panjatan		100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**31.000.000,00**							**71.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**31.000.000,00**							**71.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**31.000.000,00**						**-**	**71.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	31.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	31.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*	-			3 Dokumen	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Panjatan	-	40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				3 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Panjatan		40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.908.702.578,00**							**2.679.814.897,20**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.908.702.578,00**							**2.679.814.897,20**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.739.061.178,00**						**-**	**2.452.119.847,20**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			23 Dokumen	10.241.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	15.754.310,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.750.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		9.882.620,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.491.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		5.871.690,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	1.435.910.036,00			-	-	-	-	1.584.050.237,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1.401.117.436,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.526.826.147,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	31.927.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.427.160,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.865.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.796.930,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	35.155.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	59.465.560,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.355.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		25.805.560,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		33.660.000,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			5 Unit	20.398.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	398.305.820,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.398.900,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		398.305.820,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 Laporan	151.023.392,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	192.500.035,20	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.287.408,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		60.790.400,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119.735.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		131.709.635,20	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			15 Unit	86.331.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	202.043.885,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	69.765.250,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		118.605.585,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		47.300.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	16.566.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		36.138.300,00	KAPANEWON PANJATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**42.562.500,00**						**-**	**55.380.050,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			18 Dokumen	35.348.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	43.408.200,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	14.514.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		18.793.500,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	20.833.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		24.614.700,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	7.214.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Panjatan	-	11.971.850,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.214.300,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Panjatan		11.971.850,00	KAPANEWON PANJATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**39.509.500,00**						**-**	**47.330.250,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			7 Laporan	39.509.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	47.330.250,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	39.509.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		47.330.250,00	KAPANEWON PANJATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**65.362.200,00**						**-**	**88.739.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			5 Laporan	65.362.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	88.739.750,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				76 Orang	20.081.300,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		29.245.700,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	45.280.900,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		59.494.050,00	KAPANEWON PANJATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**22.207.200,00**						**-**	**36.245.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 Laporan	22.207.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	36.245.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	22.207.200,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		36.245.000,00	KAPANEWON PANJATAN
		KAPANEWON GALUR						**1.918.895.869,00**							**2.238.568.504,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur	-	100.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		100.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.244.100,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.244.100,00**							**68.469.100,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**62.244.100,00**						**-**	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi*	-			2 dokumen	62.244.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.469.100,00	KAPANEWON GALUR
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	62.244.100,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		68.469.100,00	KAPANEWON GALUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.756.651.769,00**							**2.070.099.404,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.756.651.769,00**							**2.070.099.404,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota***	**-**			**100 %**	**1.634.426.769,00**						**-**	**1.927.490.729,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	12.149.100,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur	-	8.850.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.855.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Galur		5.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.294.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Galur		3.850.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 Laporan	1.386.527.315,00			-	-	Kapanewon Galur	-	1.652.672.496,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1.350.377.815,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Galur		1.602.002.496,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.309.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Galur		46.200.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.840.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Galur		4.470.000,00	KAPANEWON GALUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			12 Dokumen	35.621.700,00			-	-	-	-	47.008.500,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.201.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.335.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.420.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		30.673.500,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan aset*	-			3 Unit	10.549.400,00			-	-	-	-	16.840.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.549.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.840.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang*	-			12 Laporan	92.767.904,00			-	-	Kapanewon Galur	-	108.204.465,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.899.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Galur		35.090.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.867.992,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kapanewon Galur		73.114.465,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)*	-			3 Laporan	96.811.350,00			-	-	-	-	93.915.268,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	68.317.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.149.268,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	16.055.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.456.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	12.438.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.310.000,00	KAPANEWON GALUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**30.255.500,00**						**-**	**47.452.472,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			15 Laporan	23.590.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur	-	26.068.230,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	6.835.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		8.812.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	16.755.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		17.256.230,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	6.665.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Galur	-	21.384.242,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Dokumen	6.665.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Galur		21.384.242,00	KAPANEWON GALUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**20.352.200,00**						**-**	**20.661.744,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			7 Laporan	20.352.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur	-	20.661.744,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	20.352.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		20.661.744,00	KAPANEWON GALUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**56.912.100,00**						**-**	**55.993.366,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			132 Orang	56.912.100,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur	-	55.993.366,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				160 Orang	21.434.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Galur		20.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	35.477.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Galur		35.993.366,00	KAPANEWON GALUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**14.705.200,00**						**-**	**18.501.093,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya*	-			6 Laporan	14.705.200,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur	-	18.501.093,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	14.705.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Kapanewon Galur		18.501.093,00	KAPANEWON GALUR
		KAPANEWON LENDAH						**2.034.471.497,00**							**2.323.143.926,67**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	68.469.100,00	KAPANEWON LENDAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		68.469.100,00	KAPANEWON LENDAH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.886.545.797,00**							**2.148.674.826,67**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.886.545.797,00**							**2.148.674.826,67**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.721.948.197,00**						**-**	**1.940.858.215,67**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	8.387.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.387.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	1.436.977.365,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon	-	1.535.484.526,67	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/bulan	1.403.407.365,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		1.481.934.526,67	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	30.577.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		47.550.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.992.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon		6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 Dokumen	40.030.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	65.800.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.940.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		28.125.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.090.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		37.675.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			4 Unit	3.667.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan	-	35.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	3.667.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		35.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang Disediakan*	-			24 Laporan	153.279.232,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon	-	153.556.689,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.543.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		38.320.000,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119.736.032,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		115.236.689,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	79.606.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon	-	144.017.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	61.111.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		110.142.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.442.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	13.052.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		18.875.000,00	KAPANEWON LENDAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**51.662.500,00**						**-**	**59.329.311,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			7 Laporan	42.686.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan	-	48.588.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	14.620.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		17.573.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	28.066.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		31.015.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	8.975.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	10.741.311,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.975.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		10.741.311,00	KAPANEWON LENDAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**25.433.600,00**						**-**	**26.915.589,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			8 Laporan	25.433.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapanewon dan kalurahan	-	26.915.589,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	25.433.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapanewon dan kalurahan		26.915.589,00	KAPANEWON LENDAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**94,74 %**	**60.592.200,00**						**-**	**103.629.960,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			4 Laporan	60.592.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	103.629.960,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	20.859.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		64.902.680,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	39.732.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		38.727.280,00	KAPANEWON LENDAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**26.909.300,00**						**-**	**17.941.751,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Lapoan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			8 Laporan	26.909.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan	-	17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	26.909.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
	X	**NON URUSAN**						**2.925.700,00**							**6.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.925.700,00**							**6.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**2.925.700,00**						**-**	**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.925.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon	-	6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.925.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		6.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
		KAPANEWON SENTOLO						**1.865.328.400,00**							**2.391.136.512,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**68.469.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**68.469.100,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.714.100.900,00**							**2.214.415.412,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.714.100.900,00**							**2.214.415.412,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.547.177.100,00**						**-**	**2.035.089.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	2.559.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	5.277.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.559.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		5.277.400,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 laporan	1.249.105.108,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	1.705.000.682,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	1.212.395.208,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		1.652.945.732,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	33.940.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		46.537.600,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.769.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		5.517.350,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum*	-			2 Dokumen	38.170.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	55.772.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		17.991.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.490.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		37.781.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan aset*	-			0 unit	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			24 laporan	89.147.892,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	90.434.760,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.279.876,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		26.146.920,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.868.016,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		64.287.840,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			3 laporan	168.194.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	162.892.218,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	73.298.600,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		90.343.498,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	78.897.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		57.196.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	15.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.352.320,00	KAPANEWON SENTOLO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**44.185.000,00**						**-**	**58.493.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			16 Dokumen	36.092.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	44.093.560,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	11.373.800,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.761.310,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	24.719.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		28.332.250,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 Dokumen	8.092.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.092.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**23.420.400,00**						**-**	**21.410.229,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			7 laporan	23.420.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	23.420.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**71.572.200,00**						**-**	**69.571.627,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			6 laporan	71.572.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	69.571.627,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	23.829.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		23.136.840,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	47.743.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		46.434.787,00	KAPANEWON SENTOLO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**27.746.200,00**						**-**	**29.850.696,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 laporan	27.746.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	-	29.850.696,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	27.746.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		29.850.696,00	KAPANEWON SENTOLO
	X	**NON URUSAN**						**6.227.500,00**							**8.252.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.227.500,00**							**8.252.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**6.227.500,00**						**-**	**8.252.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	6.227.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.252.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.227.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.252.000,00	KAPANEWON SENTOLO
		KAPANEWON PENGASIH						**1.828.291.874,00**							**2.150.525.074,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**62.244.100,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**62.244.100,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**62.244.100,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan*	-			2 dokumen	62.244.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4.01.04.5.01.0006	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				2 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	62.244.100,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.666.047.774,00**							**2.040.525.074,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.666.047.774,00**							**2.040.525.074,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota***	**-**			**100 %**	**1.524.415.274,00**						**-**	**1.825.017.673,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			25 dokumen	10.076.076,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.241.176,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	1.834.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			14 dokumen	1.276.341.543,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	1.421.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.237.972.943,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		1.379.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		38.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.518.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		4.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 dokumen	39.552.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	31.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.552.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		31.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			6 unit	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			12 Laporan	114.729.805,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	116.521.869,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.927.781,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		20.964.039,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		15.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.802.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		80.057.830,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			9 unit	83.715.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	214.416.756,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	71.942.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		86.416.756,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		114.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	11.773.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**40.176.700,00**						**-**	**64.247.237,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			8 Laporan	32.298.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih	-	50.247.237,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	11.591.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		22.397.237,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	20.707.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		27.850.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			12 dokumen	7.878.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.878.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**20.574.600,00**						**-**	**32.410.382,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			8 Laporan	20.574.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih	-	32.410.382,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.574.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		32.410.382,00	KAPANEWON PENGASIH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 %**	**57.812.400,00**						**-**	**78.295.543,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			75 orang	57.812.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih	-	78.295.543,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75 Orang	16.709.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		20.848.681,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	41.103.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		57.446.862,00	KAPANEWON PENGASIH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**23.068.800,00**						**-**	**40.554.239,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			6 laporan	23.068.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se-Kapanewon Pengasih	-	40.554.239,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	23.068.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se-Kapanewon Pengasih		40.554.239,00	KAPANEWON PENGASIH
		KAPANEWON KOKAP						**1.822.456.672,00**							**2.499.681.932,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.552.855.774,00**							**2.104.441.532,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.552.855.774,00**							**2.104.441.532,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 Persen**	**1.452.855.774,00**						**-**	**2.004.441.532,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			21 laporan	14.725.400,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.104.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.621.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	1.274.599.331,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.723.909.032,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/bulan	1.238.869.731,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.679.509.032,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.131.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.598.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	26.700.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	28.792.500,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		28.792.500,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibutuhkan*	-			1 unit	45.087.100,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	45.087.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	-			12 Laporan	27.923.543,00			-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	31.540.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.923.543,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		31.540.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan DInas Operasional atau laporan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*	-			9 Unit	63.820.400,00			-	-	-	-	85.200.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	63.820.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.200.000,00	KAPANEWON KOKAP
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KAPANEWON KOKAP
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.000.000,00**							**45.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.000.000,00**							**45.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	45.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**224.600.898,00**							**350.240.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**224.600.898,00**							**350.240.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota***	**-**			**100 %**	**101.114.802,00**						**-**	**183.192.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	6.266.094,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.266.094,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan*	-			12 Laporan	87.394.008,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87.394.008,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan DInas Operasional atau laporan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan*	-			9 Unit	7.454.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	62.492.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				2 0	7.454.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.492.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KAPANEWON KOKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**-**			**100 %**	**38.690.696,00**						**-**	**55.648.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait*	-			6 laporan	31.328.096,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	42.648.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	13.807.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		19.516.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	17.520.696,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.132.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*jumlah laporan pelaksanaan non perijinan pada urusan pemerintahan*	-			12 laporan	7.362.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.362.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**22.412.300,00**						**-**	**25.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah laporan penigkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	-			11 laporan	22.412.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	22.412.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum***	**-**			**100 %**	**49.722.600,00**						**-**	**68.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah orang yang mengikuuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi)*	-			200 orang	49.722.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	17.590.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	32.131.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**			**100 %**	**12.660.500,00**						**-**	**18.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya*	-			5 laporan	12.660.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	12.660.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
		KAPANEWON GIRIMULYO						**1.837.663.630,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**376.403.724,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**376.403.724,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**276.403.724,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disampaikan tepat waktu*	-			25 Dokumen	13.056.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.201.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.855.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			26 Laporan	35.791.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.541.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			17 Laporan	40.871.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.811.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			24 Laporan	108.823.524,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.651.536,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.171.988,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Laporan	77.860.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	67.862.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	9.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**49.020.700,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**49.020.700,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**18.988.300,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			1 Paket	18.988.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18.988.300,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Presentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyaktarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**30.032.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun*	-			3 Dokumen	30.032.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	30.032.400,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.412.239.206,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.412.239.206,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.268.820.506,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			26 Laporan	1.268.820.506,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/bulan	1.268.820.506,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik***	**-**			**100 %**	**39.679.300,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			2 Laporan	31.906.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	17.613.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	14.293.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	-			14 laporan	7.772.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Pemberdayaan Masyarakaat Desa dan Keluarahan***	**-**			**100 %**	**24.825.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*	-			6 laporan	24.825.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	24.825.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 %**	**62.716.500,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			4 Laporan	62.716.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	27.573.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	35.142.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Peningkatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**16.197.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	-			37 Orang	16.197.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Girimulyo	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	16.197.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
		KAPANEWON NANGGULAN						**2.086.592.488,00**							**256.336.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.846.821.038,00**							**104.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.846.821.038,00**							**104.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota***	**-**			**100 %**	**1.746.821.038,00**						**-**	**4.000.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu*	-			4 Dokumen	12.686.499,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.896.499,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	3.790.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu*	-			- Dokumen	1.575.324.049,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.537.152.749,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.156.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.014.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			5 Paket	33.443.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.303.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang*	-			undefined undefined	109.798.390,00			-	-	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.996.366,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	89.802.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			1 Unit	15.568.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3.499.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	12.068.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	100.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		100.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**48.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**48.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**	**-**			**-**	**48.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	48.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				4 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**138.085.300,00**							**152.336.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**138.085.300,00**							**152.336.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.471.900,00**						**-**	**4.000.000,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.471.900,00			-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.471.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100% undefined**	**46.843.800,00**						**-**	**28.464.700,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	38.178.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	-	28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	14.838.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	23.340.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			100% undefined	8.664.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.664.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100% undefined**	**21.895.000,00**						**-**	**28.464.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			undefined Laporan	21.895.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	21.895.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaran Urusan pemerintahan Umum***	**-**			**100% undefined**	**49.479.800,00**						**-**	**69.920.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			undefined Laporan	49.479.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	69.920.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				91 Orang	10.076.600,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		22.920.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	39.403.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		47.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa***	**-**			**100% undefined**	**17.394.800,00**						**-**	**21.487.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			undefined Laporan	17.394.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan	-	21.487.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	17.394.800,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		21.487.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	X	**NON URUSAN**						**53.686.150,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**53.686.150,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah***	**-**			**1 Unit**	**53.686.150,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			1 Unit	53.686.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	53.686.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
		KAPANEWON SAMIGALUH						**2.187.534.231,00**							**2.624.254.179,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.926.558.431,00**							**2.308.097.779,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.926.558.431,00**							**2.308.097.779,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.898.066.431,00**						**-**	**2.273.097.779,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja di Sampaiakn Tepat waktu*	-			25 dokumen	12.152.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	10.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.281.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		7.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	2.870.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		3.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan yang di Sampaikan Tepat Waktu*	-			14 Laporan	1.448.444.396,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	1.418.358.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.411.499.396,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		1.374.725.400,00	KAPANEWON SAMIGALUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	32.828.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		39.632.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.117.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		4.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum*	-			2 dokumen	38.981.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kapanewon Samigaluh	-	41.312.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.061.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kapanewon Samigaluh		13.697.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		27.615.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penambahan Aset*	-			1 unit	200.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	225.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			24 Laporan	79.638.816,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	76.575.376,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.770.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		19.770.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	59.868.016,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		56.804.576,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			3 Laporan	118.849.419,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	501.852.403,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	94.076.919,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		106.422.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.770.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		379.147.603,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.002.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		16.282.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**28.492.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	-			3 dokumen	28.492.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	28.492.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**160.975.800,00**							**216.156.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**160.975.800,00**							**216.156.400,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan***	**-**			**100 %**	**45.195.100,00**						**-**	**55.154.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jummlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon*	-			12 Laporan	39.885.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	46.933.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	13.038.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		19.932.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	26.846.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		27.001.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Paneu*	-			12 dokumen	5.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.220.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.220.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Peningkatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**27.330.000,00**						**-**	**32.792.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			6 Laporan	27.330.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	32.792.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	27.330.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		32.792.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**63.495.400,00**						**-**	**97.900.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			6 Laporan	63.495.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	97.900.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	25.066.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		50.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	38.428.600,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		47.900.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**24.955.300,00**						**-**	**30.309.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			5 Laporan	24.955.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh	-	30.309.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	24.955.300,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		30.309.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
		KAPANEWON KALIBAWANG						**1.993.291.124,00**							**2.094.143.448,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**323.357.534,00**							**336.804.347,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**323.357.534,00**							**336.804.347,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**223.357.534,00**						**-**	**236.804.347,00**	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			4 Paket	35.920.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	40.526.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.020.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		18.626.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	21.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		21.900.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			12 Laporan	82.315.867,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	86.764.280,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.867.851,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		30.959.704,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	55.448.016,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		55.804.576,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.120.867,00			-	-	-	-	109.513.467,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	80.384.367,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.384.367,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.394.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		11.787.400,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	17.341.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.341.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**-**			**100 %**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan*	-			1 Event	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Kalibawang		100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**26.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***	**-**			**100 %**	**26.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan*	-			3 Dokumen	26.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.643.933.590,00**							**1.717.339.101,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.643.933.590,00**							**1.717.339.101,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**1.486.946.790,00**						**-**	**1.534.979.092,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu*	-			24 Dokumen/ Laporan	15.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu*	-			40 Dokumen/ Laporan	1.409.549.954,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.455.545.695,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	1.371.874.254,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.411.119.995,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	33.675.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		40.425.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantoratau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			3 Paket	61.471.836,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	68.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	61.471.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		68.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik***	**-**			**100 %**	**39.511.500,00**						**-**	**40.741.909,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			6 Dokumen	30.705.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	31.059.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	11.528.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		11.679.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	19.176.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		19.380.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			12 Dokumen	8.806.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.806.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	**-**			**100 %**	**27.509.500,00**						**-**	**24.900.300,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			8 Laporan	27.509.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	27.509.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**97,37 %**	**64.500.800,00**						**-**	**91.252.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			35/6 Orang/Laporan	64.500.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	91.252.800,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	33.781.900,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		33.491.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	30.718.900,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		57.761.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**25.465.000,00**						**-**	**25.465.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	-			7 Laporan	25.465.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemerintah Kalurahan di Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	25.465.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	25.465.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Pemerintah Kalurahan di Lingkup Kapanewon Kalibawang		25.465.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.879.885.271,00**							**4.065.459.434,81**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.879.885.271,00**							**4.065.459.434,81**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.879.885.271,00**							**4.065.459.434,81**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**1.771.635.439,00**						**-**	**1.850.930.719,81**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*	-			25 Dokumen	17.329.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.289.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.040.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan perangkat daerah*	-			100 %	1.440.014.274,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.561.044.273,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.398.562.274,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.518.744.273,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		40.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.952.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	47.054.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	28.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.450.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		12.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.604.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		16.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	32.996.100,00			-	-	-	-	72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32.996.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	98.849.065,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	89.686.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	31.547.073,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		37.536.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67.301.992,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		52.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	135.392.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	108.668.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		67.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	26.723.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		24.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan***	**-**			**80 %**	**1.269.972.236,00**						**-**	**179.758.715,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan*	-			100 %	1.269.972.236,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	179.758.715,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				528 Orang	1.269.972.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kesatuan Bangsa dan Politik		179.758.715,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik***	**-**			**80 %**	**1.095.521.496,00**						**-**	**965.900.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	-			100 %	1.095.521.496,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	965.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				370 Orang	1.095.521.496,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		965.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan***	**-**			**57,55 %**	**146.507.200,00**						**-**	**10.520.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	-			100 %	146.507.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	146.507.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya***	**-**			**18,`8 %**	**134.934.700,00**						**-**	**465.850.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	-			100 %	134.934.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	465.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				107 Orang	134.934.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		465.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial***	**-**			**100 %**	**461.314.200,00**						**-**	**592.500.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			100 %	461.314.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	592.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	240.366.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				130 Orang	103.445.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	117.502.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		142.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.485.998.882.460,00**							**2.095.956.599.214,68**	

5.2. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, dinyatakan bahwa Dana Keistimewaan dimasukkan dalam struktur APBD Kab/Kota pada rekening urusan keistimewaan, dicatat pada rekening anggaran pendapatan dan dialokasikan pada rekening belanja langsung, serta Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pasal 11 menyatakan bahwa Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota setelah diperolehkepastian penganggaran dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Perencanaan atau Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Program/Kegiatan yang diusulkan untuk didanai menggunakan Dana Keistimewaan DIY, masih bersifat indikatif d dikarenakan masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2025. Akan tetapi untuk menjamin sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2025, usulan program/kegiatan Dana Keistimewaan DIY menjadi bagian penting skema perencanaan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (1 dan 2), Pemerintah DIY merinci usulan program/ kegiatan Kabupaten/Kota dalam dalam Berita Acara kesepakatan pembahasan pemberian BK Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023, Pasal 20 ayat (2) Dalam hal terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun jamak untuk disepakati dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk pencantuman dalam RKPD Kabupaten/Kota. Secara lebih rinci, usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦃꦢꦲꦫꦃꦢꦲꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠiꦩꦺꦮꦄꦗꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: jogjaprov.go.id Email: santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

BERITA ACARA AWAL
PENILAIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN/KEWENANGAN KELEMBAGAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 100.1.5.1/3068

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Rapat Bimasena, Paniradya Kaistimewan, Kompleks Kepatihan Danurejan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan keistimewaan, telah menyepakati hasil pembahasan Penilaian Usulan Awal Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun 2025 Urusan Kelembagaan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

9. Peraturan Gubernur DIY...

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042;
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Urusan/Kewenangan Kelembagaan tanggal 22 Februari 2024.

B. Ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut
1. Berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas;
2. Target kinerja Kegiatan mendukung pencapaian target Program yang telah ditentukan.
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Koordinator pelaksana Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan melaporkan capaian kinerja fisik kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Urusan Keistimewaan Kelembagaan dan Paniradya Kaistimewan serta melaporkan capaian kinerja keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disetujui untuk diusulkan pada Penilaian Usulan Awal terkait urusan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, adalah sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Skema Optimis, sebesar Rp3.947.602.600,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);
2. Skema Moderat, sebesar Rp3.947.602.600,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);
3. Skema Pesimis, sebesar Rp3.897.602.600,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) kegiatan, yakni:
   A. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan;
   B. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan; dan
   C. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan.

D. Lain-lain:
1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo wajib melaporkan progres pelaksanaan kegiatan satu bulan sekali dan melakukan koordinasi dengan Paniradya Kaistimewan dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelembagaan bertujuan untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi kelembagaan di DIY;
3. Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan sesuai target waktu dan output sebagaimana yang direncanakan.
4. Pencantuman skema anggaran ke dalam RKPD Kabupaten atau Kota menggunakan skema pesimis.

Demikian Berita Acara...

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	**Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**
Dra. SITI MUQODIMAH	**ANA WINDYAWATI, S.H., M.H.**
NIP. 19690609 199401 2 001	NIP. 19680617 199003 2 008

Mengetahui,

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan	**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY**	**Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo**
ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.	**WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.**	**Ir. MUH. ARIS NUGROHO, M.M.A.**
NIP. 19721101 199703 1 005	NIP. 19680215 199403 1 005	NIP. 19690416 199303 1 006

Lampiran Berita Acara…

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENILAIAN USULAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025 - KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN KELEMBAGAAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas			Output Sesuai Kepmendagri			ANGGARAN
				Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KABUPATEN KULON PROGO									**3.897.602.600**
	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KULON PROGO									**235.000.000**
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan 2. Publikasi kelembagaan asli	1. 1 2. 3	1. dokumen 2. kali	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	18	Lembaga	150.000.000
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. ASN yang memahami tentang Budaya Pemerintahan 2. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang tingkat Implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	1. 200 2. 35	1. orang 2. PD/UPT	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2	dokumen	85.000.000
	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KAB. KULON PROGO									**32.312.000**
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik	12	Kapanewon (dari 12 Kapanewon)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	1	Dokumen	32.312.000
	BAPPEDA KULON PROGO									**252.540.000**
4	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 3. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 4. Dokumentasi hasil perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2025	1. 2 2. 1 3. 1 4. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. laporan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	5	Dokumen	161.000.000
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2024 tahap akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2025 per tahapan	1. 1 2. 3	1. laporan 2. laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	4	Laporan	91.540.000
	BKPP KAB. KULON PROGO									**462.698.000**
6	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	1. Jumlah ASN Eselon III Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti Internalisasi keistimewaan 2. Jumlah ASN Eselon IV Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti Internalisasi keistimewaan	1. 30 2. 30	1. orang 2. orang	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	2	Laporan	462.698.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas			Output Ses			;ARAN
				Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALDUK KB KAB. KULON PROGO									**1.419.520.000**
7	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan 2. Tambahan penghasilan pengganti pelungguh dan pengarem arem di 3 Kalurahan Karangkopek 3. Laporan hasil monev pelaksanaan kelembagaan asli di kalurahan	1. 87 2. 12 3. 1	1. orang 2. bulan 3. dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3	Dokumen	1.419.520.000
	DPMPTSP KAB KULON PROGO									**478.520.000**
8	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.Inovasi Pelayanan Publik Si Peri Manis Kapanewon 2. Sosialisasi dan Pelayanan Perizinan Berusaha 3. Video Panduan Inovasi Si Peri Manis Kapanewon 4. Sarpras pelayanan publik	1.12 2. 240 3. 1 4. 12	1. Kapanewon 2. Pelaku usaha 3. Video 4. Kapanewon	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	478.520.000
	PUSKESMAS SENTOLO									**479.000.000**
9	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Pengembangan Inovasi pelayanan publik Posbindu Disabiltas Sentosa	4	Kalurahan	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	479.000.000
	KAPANEWON KAB. KULON PROGO (11 Kapanewon)									**453.012.600**
10	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	33	Dokumen	453.012.600
	KAPANEWON WATES									**85.000.000**
11	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 4. Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Wates	1. 1 2. 1 3. 1 4. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen 4. dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	Dokumen	85.000.000

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: jogjaprov.go.id Email: santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

BERITA ACARA AWAL
PENILAIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN/KEWENANGAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 100.1.5.1/3068

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Rapat Bimasena, Paniradya Kaistimewan, Kompleks Kepatihan Danurejan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan keistimewaan, telah menyepakati hasil pembahasan Penilaian Usulan Awal Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042;

10. Peraturan Gubernur DIY...

10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Urusan/Kewenangan Kebudayaan tanggal 22 Februari 2024.

B. Ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut
1. Berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas;
2. Target kinerja Kegiatan mendukung pencapaian target Program yang telah ditentukan.
3. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo selaku Koordinator pelaksana Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan melaporkan capaian kinerja fisik kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Urusan Keistimewaan Kebudayaan dan Paniradya Kaistimewan serta melaporkan capaian kinerja keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disetujui untuk diusulkan pada Penilaian Usulan Awal terkait urusan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, adalah sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Skema Optimis, sebesar Rp176.441.688.336,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
2. Skema Moderat, sebesar Rp128.858.490.486,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
3. Skema Pesimis, sebesar Rp128.858.490.486,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian 7 (Tujuh) kegiatan, yakni:
   A. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya, dengan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan;
   B. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan;
   C. Pendidikan Berbasis Budaya, dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan;
   D. Pengelolaan Taman Budaya, dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan;
   E. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, dengan 8 (Delapan) Sub Kegiatan;
   F. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan; dan
   G. Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan.

D. Lain-lain:
1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo wajib melaporkan progres pelaksanaan kegiatan satu bulan sekali dan melakukan koordinasi dengan Paniradya Kaistimewan dan Dinas Kebudayaan DIY dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan bertujuan untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memelihara dan mengembangkan kebudayaan di DIY;
3. Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan sesuai target waktu dan output sebagaimana yang direncanakan.
4. Pencantuman skema anggaran ke dalam RKPD Kabupaten atau Kota menggunakan skema pesimis.

Demikian Berita Acara…

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs. EKA PRANYATA	**DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A.**
NIP. 19650723 198602 1 004	NIP. 19721209 199903 2 004

Mengetahui,

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.	**WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.**	**Ir. MUH. ARIS NUGROHO, M.M.A.**
NIP. 19721101 199703 1 005	NIP. 19680215 199403 1 005	NIP. 19690416 199303 1 006

Lampiran Berita Acara…

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENILAIAN USULAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DANA KEISTIMEWAAN
URUSAN KEBUDAYAAN - KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI			Anggaran (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	KABUPATEN KULON PROGO										128.858.490.486
1	DINAS KEBUDAYAAN										48.700.999.486
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	14	Dokumen	2.116.000.000
					1. LCC Sejarah	1	event				
					2. Peringatan Hari Besar Sejarah	4	kali				
					3. Lawatan Sejarah	150	orang				
					4. Penulisan Buku Sejarah Lokal	4	dokumen				
					5. Testimoni Pejuang Bangsa	3	kali				
					6. Lomba Vlog dan Essay Sejarah	1	event				
				Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	8	Laporan	3.891.910.400
					1. Kompetisi Bahasa dan Sastra (8 Jenis Lomba : Alih Aksara, Macapat, Geguritan, Maca Cerkak, Stand Up Comedy, Mendongeng, Sesorah, Pranata	1	kali				
					2. Macapat	12	kali				
					3. Kidung Ratri	12	kali				
					4. Pentas Sastra	12	kali				
					5. Sinau Basa lan Aksara Jawa	3	kali				
					6. Pelatihan Pranatacara	2	kali				
					7. Sepekan Sastra	1	kali				
					8.Pawiyatan Waranggana	24	orang				
				Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				Jumlah permuseuman yang dibina dan dikelola	1	Unit	500.000.000
					1. LCC Museum	1	event				
					2. Wajib Kunjung Museum	320	orang				
					3. Pameran Koleksi Museum	1	event				
			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	30	Objek	1.677.403.706
					1. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	20	Naskah				
					2. Pemeliharaan Cagar Budaya	4	Cagar Budaya				
					3. Edukasi Cagar Budaya	6	Kali				
					6. Pekerjaan Lanjutan Situs Eks Tambang Mangaan Kliripan (Terowongan Holiday)	1	paket				
					7. Pengadaan Sarana Prasarana Cagar Budaya	2	lokasi				
			Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	1	Objek	6.363.446.280
					1. Pemeliharaan Taman Budaya Kulon Progo	12	bulan				
					2. Pemeliharaan Gedung Taman Budaya Kulon	1	paket				
					4. Pentas Band	10	kali				
					5. Pentas Seni Tradisi	40	kali				
					6. Art For Children	35	kali				
					7. Art For Millenials	35	kali				
					8. Pentas Kethoprak	5	kali				
					9. Pentas Sendratari	5	kali				
					10. Pentas Teater	2	kali				
					11. Pentas Musik Kolaborasi	1	kali				
					12. Pentas Musik Orkestra	1	kali				
					13. Instalasi Seni Luar Ruangan	1	paket				
					14. Kulon Progo Manekawarna	1	kali				
					15. Pentas Wayang Kulit/Golek	1	kali				
					16. Pentas Wayang Wong	2	kali				
			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya	20	Unit	1.357.800.000
					1. Pengadaan Gamelan	5	set				
					2. Alat Musik Religi	5	paket				
					3. Alat Musik Jathilan dan Kostum Jathilan	10	paket				

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI			an (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR			
			Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2	Laporan	2.877.658.600
					1. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh	32	kalurahan				
					2. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	40	kalurahan				
				Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				Jumlah Lembaga Penggiat Seni	2	Lembaga	1.076.769.000
					1. Pameran Seni Rupa	1	kali				
					2. Fasilitasi Film	1	kali				
					3. Pembinaan Seni Rupa	1	kali				
					4. Menoreh Screening	1	kali				
				Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri				Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negri dalam rangka diplomasi budaya	5	Laporan	2.606.954.900
					1. Pesona Budaya Nusantara	1	event				
					2. Misi Kebudayaan Gelar Seni Budaya Yogyakarta	1	event				
					3. Misi Kebudayaan Citra Budaya	1	event				
					5. Misi Kebudayaan ke Bali	1	event				
				Penghargaan Seniman dan Budayawan				Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	10	orang	376.352.500
					Penerimaan Penghargaan Budaya	5	kategori				
				Festival Kebudayaan Yogyakarta				Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3	Laporan	600.000.000
					1. Pentas FKY	2	event				
					2. Pawai FKY	1	event				
					3. Pasar Seni FKY	2	event				
				Gelar Budaya Jogja			event	Jumlah Laporan Gelar Budaya	12	Laporan	5.000.000.000
					1. Festival Kethoprak	1	event				
					2. Festival Langen Carita	1	event				
					3. Festival Sendratari	3	event				
					4. Festival Teater	1	event				
					5. Festival Karawitan	1	event				
					6. Festival Langen Sekar	1	event				
					7. Festival Dagelan Mataram	1	event				
					8. Parade Tari	1	event				
					9. Parade Sindhen	1	event				
					10. Pembinaan Tari Klasik Gaya Yogyakarta	1	event				
					11. Menoreh Art Festival	1	event				
					12. Lomba Lukis DIY-Kyoto	300	orang				
				Publikasi Seni dan Budaya Daerah				Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan	9	Dokumen	637.103.600
					1. Siaran Media Elektronik	6	kali				
					2. Siaran Pers	4	kali				
					3. Kaleidoskop Kebudayaan	3	paket				
				Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				Jumlah Penghayat Kepercayaan , Adat dan Tradisi yang dibina	75	Orang	1.617.377.300
					1. Nyadran Agung	1	kegiatan				
					2. Fasilitasi Himpunan Penghayat Kepercayaan	4	kali				
					3. Festival Musik Religi	1	event				
				Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam Masyarakat	9	Laporan	6.000.000.000
					1. Pembinaan Dhalang Wayang Kuli dan Wayang Golek Anak dan Remaja	5	event				
					2. Perayaan Gelar Potensi WBTB	8	event				
					3. Kajian WBTB	3	dokumen				
					4. Fasilitasi DKKP	12	bulan				
					5. Pergelaran Wayang Gagrag Ngayogyakarta	2	event				
					6. Festival Wayang Wong Tingkat DIY	1	event				
					7. Permainan Tradisional	4	event				
					8. Pembinaan Paes Manten dan Busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta	4	event				
					9. Fasilitasi Forum Seni dan Budaya Kabupaten Kulon Progo	15	Forum				
				Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	3	Laporan	5.812.335.000
					1. Pentas Fasilitasi Seni Budaya	120	kali				
					2. Parade Budaya Perbatasan	4	kali				
					3. Nggugah Budaya Menoreh	3	kali				

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUAI			an (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR			
				Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Festival Upacara Adat Tingkat Kabupaten	12	kontingen	Jumlah Laporan Pembinaan Kelelmbagaan Adat dan Tradisi	5	Laporan	**6.189.888.200**
					2. Pengiriman Kontingen Festival Upacara Adat ke	1	kali				
					3. Pentas Gadon	6	kali				
					4. Bimtek Upacara Adat	2	hari				
					5. Fasilitasi Upacara Adat	110	kali				
2	**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**										**1.602.439.900**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Pendidikan Berbasis Budaya**	**Pembinaan Muatan Lokal**				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	5	Laporan	**1.451.323.700**
					Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter berbasis budaya	12	Satuan pendidikan				
					Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter berbasis budaya	60	Satuan pendidikan				
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Pengembangan Industri Kreatif**	Jumlah Pemuda Seni Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100	orang	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	1	unit	**151.116.200**
3	**DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**										**282.277.200**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pengembangan Ekonomi Perempuan**	1. Pelatihan Kewirausahaan	31	kelompok	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	**282.277.200**
					2. Ekspose Hasil Karya Kaum Perempuan	31	orang				
4	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**										**9.463.459.700**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Pengembangan Lumbung Mataraman**				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	1	laporan	**1.127.611.900**
					Penumbuhan dan Pengembangan Lumbung Mataraman	15	Kelompok Wanita Tani (KWT)				
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Pengembangan sistem pertanian tradisional**				Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	1	dokumen	**5.054.181.200**
					A. Pendampingan Kegiatan Saemaul Undong di Kapanewon Nanggulan						
					1. Pembangunan Retaining Wall/ Talud penahan longsoran di Kawasan Saemaul (Jamur Tiram)	1	paket				
					2. Pengembangan Jamur Tiram	1	gapoktan				
					3. Pengembangan Padi Lokal Menor:	10	kelompok				
					4. Pengembangan Kambing Bligon	1	kelompok				
					B. Pengembangan Komoditas Hortikultura						
					1. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Bawang Merah di Girimulyo	2	kelompok tani				
					2. Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Cabai Merah	5	kelompok tani				
					C. Pengembangan Komoditas Perkebunan						
					1. Bantuan Sarana Pendukung Pembibitan Kelapa Bojong Bulat	3	Kelompok Tani				
			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia**	**A. Pengembangan Pertanian di Lahan Surjan**			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	1	objek	**3.281.666.600**
					1. Bantuan Saprodi dan Alat Pengendali OPT Pengembangan Bawang Merah	10	kelompok tani				
					2. Pembangunan saluran irigasi sistem sprinkler	10	kelompok tani				
					3. Sekolah Lapang GAP - GHP Bawang Merah	40	orang				
					4. Wiwitan bawang merah	4	Kali				
					5. Bantuan Sarana Produksi Padi	10	kelompok tani				
					6. Lomba Intensifikasi di Lahan Surjan	1	kali				
5	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**										**789.720.200**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**	**Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat**	Bimtek Manajemen Kelompok Pengelola Sampah	126	orang	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1	Laporan	**789.720.200**
					Pelatihan pengolahan sampah organik/anorganik	50	orang				

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESU			an (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR			
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										2.000.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Penguatan jaringan internet kalurahan berbasis fiber optic di Kabupaten Kulon Progo yang terbangun	1	Paket	Jumlah Ekosistem Kultural DIY berbasis digital yang dibangun	1	Paket	2.000.000.000
7	DINAS KOPERASI DAN UMKM										2.500.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif	Gereget KUMKM			Jumlah Industri Kreatif yang	1	Kegiatan	2.500.000.000
					1. Gereget Koperasi	1	Kegiatan				
					2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	30	orang				
					3. Peningkatan Kapasitas Wirausaha	100	orang				
					4. Gereget UMKM	1	kagiatan				
					6. Pelatihan UMKM	5	Kegiatan				
					7. Pendampingan Inkubasi Bisnis Kuliner	2	Kegiatan				
					8. Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan Susu Kambing	1	Unit				
					9. Pengadaan Sarpras Rumah Produksi Pengolahan Susu Kambing	1	paket				
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										5.304.603.600
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari							5.304.603.600
					Pemberdayaan Pokdakan Wanita	26	kelompok				
					Pengembangan Mina Surjan	4	kelompok				
					Pemberdayaan Poklahsar Wanita	6	kelompok				
					Festival Gerbang Segoro	12	kapanewon				
					Sarana Publikasi Melalui Media elektronik	8	kegiatan				
					JagaKaliku (Jaga Komitmen warga untuk kelestarian lingkungan ikan Kulon Progo)	12	event				
					Jaga Segoro	1	kegiatan				
					Pemberdayaan pokmaswas	12	Kelompok				
					Pemberdayaan KUB Nelayan Kecil	5	Kelompok				
					Pengembangan pasar ikan sarwo laris	2	kegiatan				
					Rehabilitasi UPI	1	unit				
9	DINAS PARIWISATA										55.392.357.700
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni							15.891.885.900
					1. Kiskendha Mrahaswara	10	event				
					2. Pentas Atraksi Wisata Budaya	40	kali				
					3. Festival Paralayang Wisata	1	event				
					4. Menoleh ke Menoreh	1	event				
					5. Romansa Pansela	1	event				
					6. Glagah Lagoon Festival	1	event				
					7. Sumilir Gunung Kelir	1	event				
					9. Jelajah Wisata	1	event				
					10. Sepekan Bendung Khayangan	1	event				
					11. Nglarak Blarak Wisata	1	event				
					12. Jemparing Wisata	1	event				
					13. Menoreh Fashion Week	1	event				
					14. Gelar Kolaborasi Wisata Perbatasan	1	event				
				Pengembangan Atraksi Wisata Budaya							26.227.317.900
					Pembangunan Lanjutan Revitalisasi Amphietheater Kiskendha	1	paket				
					Karya Seni Instalasi Wisata	12	paket				
					Gerakan Sambanggo	20	kali				
					Pembangunan Lanjutan Kawasan Paralayang	1	paket				
					Sarana Prasarana disabilitas "laku wirasa" pada destinasi wisata pantai Glagah	1	paket				
					Pengadaan tanah kliripan	1	Paket				
					Wisata Arung Jeram "Catur Banjar"	1	Paket				
					Penataan Widosari (Geopark)	1	Paket				

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESU			an (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR			
				Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat							**4.999.612.700**
					Lomba Gelar Potensi Desa Wisata	1	event				
					Menoreh Food Festival	1	event				
					Pameran Ekonomi Kreatif	1	event				
					Festival Pacak Sepuran	30	titik				
				Publikasi Seni dan Budaya Daerah							**8.273.541.200**
					Pameran Wisata Budaya	4	event				
					Cetak bahan Promosi Pariwisata	1	paket				
					Promosi melalui Media Luar Ruang	4	paket				
					Promosi melalui Media Elektronik	8	paket				
					Fam Trip Difable	1	kegiatan				
					Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo	1	kegiatan				
					Misi Pariwisata Budaya Jawa Barat	1	event				
					Misi Pariwisata Budaya Jawa Tengah	1	event				
					Pembuatan Film Pariwisata	3	film				
					Wayang Wisata Istimewa	12	kali				
					Safari Pariwisata	1	event				
					Rally Foto Konservasi	1	event				
					Asia Tri (Indonesia, Korea, Jepang)	1	event				
					Tour De Menoreh	1	event				
10	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**										**976.896.000**
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Pengembangan Industri Kreatif**	Pelatihan dan pengembangan usaha industri kreatif	220	IKM	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan			**976.896.000**
11	**BAPPEDA**										**367.885.900**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia**	1. Penyelenggaraan Forum Geoheritage Kabupaten Kulon Progo	1	Laporan	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk	5	Objek	**367.885.900**
					2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Geosite dan Geodiversity Site di Kabupaten Kulon Progo	1	Laporan				
					3. Penyusunan Kajian Zona Pengembangan Geodiversity Site pada Kawasan Geopark Jogja Segmen Kabupaten Kulon Progo	1	Dokumen				
14	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**										**277.850.800**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembinaan Jaga Warga**	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina	3520	orang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina	1540	orang	**277.850.800**
16	**KAPANEWON TEMON**										**100.000.000**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	**100.000.000**
17	**KAPANEWON WATES**										**100.000.000**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	**100.000.000**
18	**KAPANEWON PANJATAN**										**100.000.000**
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya**	**Gelar Budaya Jogja**	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	**100.000.000**

NO.	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS			OUTPUT SESUA			ın (Rp)
					AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR			
19	KAPANEWON GALUR										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
20	KAPANEWON LENDAH										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
21	KAPANEWON SENTOLO										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
22	KAPANEWON PENGASIH										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
23	KAPANEWON KOKAP										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
24	KAPANEWON GIRIMULYO										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
25	KAPANEWON NANGGULAN										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
26	KAPANEWON SAMIGALUH										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000
27	KAPANEWON KALIBAWANG										100.000.000
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1	Event	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	100.000.000

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦃꦢꦲꦫꦃꦢꦲꦫꦃꦄꦶꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦃꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: jogjaprov.go.id Email: santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

BERITA ACARA AWAL
PENILAIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN/KEWENANGAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 100.1.5.1/3068

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Rapat Bimasena, Paniradya Kaistimewan, Kompleks Kepatihan Danurejan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan keistimewaan, telah menyepakati hasil pembahasan Penilaian Usulan Awal Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun 2025 Urusan Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

9. Peraturan Gubernur DIY...

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042;
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Urusan/Kewenangan Pertanahan tanggal 22 Februari 2024.

B. Ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut
1. Berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas;
2. Target kinerja Kegiatan mendukung pencapaian target Program yang telah ditentukan.
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo selaku Koordinator pelaksana Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan melaporkan capaian kinerja fisik kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Urusan Keistimewaan Pertanahan dan Paniradya Kaistimewan serta melaporkan capaian kinerja keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disetujui untuk diusulkan pada Penilaian Usulan Awal terkait urusan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, adalah sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Skema Optimis, sebesar Rp2.656.019.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah);
2. Skema Moderat, sebesar Rp2.656.019.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah);
3. Skema Pesimis, sebesar Rp2.411.109.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) kegiatan, yakni:
   A. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan; dan
   B. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan.

D. Lain-lain:
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo wajib melaporkan progres pelaksanaan kegiatan satu bulan sekali dan melakukan koordinasi dengan Paniradya Kaistimewan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan bertujuan untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi pertanahan di DIY;
3. Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan sesuai target waktu dan output sebagaimana yang direncanakan.
4. Pencantuman skema anggaran ke dalam RKPD Kabupaten atau Kota menggunakan skema pesimis.

Demikian Berita Acara...

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs. RIYADI SUNARTO	**ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum.**
NIP. 19671018 199303 1 004	NIP. 19720711 199703 1 006

Mengetahui,

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.	**WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.**	**Ir. MUH. ARIS NUGROHO, M.M.A.**
NIP. 19721101 199703 1 005	NIP. 19680215 199403 1 005	NIP. 19690416 199303 1 006

Lampiran Berita Acara…

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENILAIAN USULAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025 - KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN PERTANAHAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	Output Sesuai Kepmendagri		ANGGARAN (Rp)
					Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
KABUPATEN KULON PROGO							**2.411.109.000**
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)							**2.239.844.000**
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Kalurahan (624 sertifikat)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	5 Dokumen	173.385.000
				Pendaftaran Hak Pakai Tanah Kalurahan diatas Hak Miilik Kasultanan / Kadipaten di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (166 bidang)			233.140.000
				Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (50 bidang)			654.910.000
				Pendaftaran Hak Milik Tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten dari Hasil Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (480 bidang)			480.000.000
				Identifikasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (3 dokumen)			193.656.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo (30 dokumen)	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	30 Dokumen	115.348.000
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo (30 dokumen)	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20 Rekomendasi	100.000.000
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah Kalurahan (3 berita acara)	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah	3 Berita Acara	289.405.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DALDUK, DAN KB KAB. KULON PROGO							**171.265.000**
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Berita Acara Penegasan Batas Desa : a. Penyusunan Data Spasial dan Perbup Batas Desa (2 kapanewon)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	171.265.000

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦃꦢꦲꦫꦃꦢꦲꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦃꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: jogjaprov.go.id Email: santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

BERITA ACARA AWAL
PENILAIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA KABUPATEN KULON PROGO
URUSAN/KEWENANGAN TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: 100.1.5.1/3068

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Rapat Bimasena, Paniradya Kaistimewan, Kompleks Kepatihan Danurejan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan keistimewaan, telah menyepakati hasil pembahasan Penilaian Usulan Awal Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun 2025 Urusan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

9. Peraturan Gubernur DIY...

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042;
10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 Urusan/Kewenangan Tata Ruang tanggal 22 Februari 2024.

B. Ketentuan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut
1. Berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas;
2. Target kinerja Kegiatan mendukung pencapaian target Program yang telah ditentukan.
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo selaku Koordinator pelaksana Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang melaporkan capaian kinerja fisik kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Urusan Keistimewaan Tata Ruang dan Paniradya Kaistimewan serta melaporkan capaian kinerja keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disetujui untuk diusulkan pada Penilaian Usulan Awal terkait urusan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025, adalah sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Skema Optimis, sebesar Rp24.881.438.200,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
2. Skema Moderat, sebesar Rp24.881.438.200,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
3. Skema Pesimis, sebesar Rp18.265.818.700,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian 2 (Dua) kegiatan, yakni:
   A. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan; dan
   B. Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan.

D. Lain-lain:
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo wajib melaporkan progres pelaksanaan kegiatan satu bulan sekali dan melakukan koordinasi dengan Paniradya Kaistimewan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tata Ruang bertujuan untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta reformasi tata ruang di DIY;
3. Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan sesuai target waktu dan output sebagaimana yang direncanakan.
4. Pencantuman skema anggaran ke dalam RKPD Kabupaten atau Kota menggunakan skema pesimis.

Demikian Berita Acara…

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	**Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
Kabupaten Kulon Progo	**Daerah Istimewa Yogyakarta**
Drs. RIYADI SUNARTO	**ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum.**
NIP. 19671018 199303 1 004	NIP. 19720711 199703 1 006

Mengetahui,

Paniradya Pati	**Kepala Badan Pengelola**	**Kepala BAPPEDA**
Paniradya Kaistimewan	**Keuangan dan Aset DIY**	**Kabupaten Kulon Progo**
ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si.	**WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.**	**Ir. MUH. ARIS NUGROHO, M.M.A.**
NIP. 19721101 199703 1 005	NIP. 19680215 199403 1 005	NIP. 19690416 199303 1 006

Lampiran Berita Acara…

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENILAIAN USULAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025
URUSAN TATA RUANG - KABUPATEN KULON PROGO

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	Output Sesuai Kepmendagri			ANGGARAN
					Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KABUPATEN KULON PROGO							**18.265.818.700**
	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KAB. KULON PROGO							**432.854.300**
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (2 dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	2	Dokumen	432.854.300
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KASAWAN PERMUKIMAN KAB. KULON PROGO							**13.751.500.000**
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Ngargosari (100 SR)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	6	Dokumen	875.000.000
				Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Banjaroyo (80 SR)				700.000.000
				Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Kalirejo (91 SR)				364.000.000
				Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat Desa Hargotirto (70 SR)				612.500.000
				Peningkatan jalan ruas Tegalsari - Kebonharjo 1,3				5.200.000.000
				Peningkatan jalan ruas bendo-beku 1,5 km				6.000.000.000
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KULON PROGO							**4.081.464.400**
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	**1. Pengembangan Kawasan Durian Tonogoro**	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	19	Dokumen	
				a. Sewa Tanah Tonogoro (210.000 m2)				95.746.300
				b. Pemeliharaan kawasan kebun durian (1 paket)				48.909.400
				c. Pengembangan kawasan durian penyangga Tonogoro (6 KT)				667.549.000
				d. Pengembangan penangkar benih durian di kawasan menoreh (1000 benih)				290.698.000
				e. Pemeliharaan ternak kambing bligon di Tonogoro (1 paket) - Pembangunan rumah pakan dan rumah kompos				161.603.000
				f. Pengembangan ternak kambing bligon di kawasan penyangga Tonogoro (2 kelompok @22 kambing)				332.319.000
				g. Uji Kebenaran , Keunggulan, Identifikasi, dan Pendaftaran Varietas Baru Durian Kalibawang (6 varietas)				113.600.000
				h. Upaya peningkatan produksi dan kualitas durian (100 pohon durian meningkat produksinya)				200.000.000
				2. Pengembangan Kawasan Durian Embung Kleco :				
				a. Pemeliharaan kebun durian di kawasan Embung Kleco (3 kelompok tani)				150.000.000
				b. Pembangunan sarana dan prasarana di Embung Kleco : - Perbaikan Membran				300.000.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	Outpu			ANGGARAN
					Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3. Pengembangan Agroeduwisata Hargowilis				
				- Pemeliharaan kelapa genjah (Pupuk organik) : 1200 pohon				150.000.000
				- Pemeliharaan komoditas tanaman hortikultura (1 paket)				55.280.000
				- Peremajaan kelapa genjah (Bibit kelapa genjah dan pupuk organik)				116.150.000
				5. Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh (1 paket)				
				a. Bantuan Sarana Prasarana Pengembangan Kambing PE di Kawasan Menoreh (1 kelompok tani)				357.063.700
				b. Bimtek Pengolahan Hijauan Pakan Ternak pada Pengembangan kambing PE (25 orang)				11.652.500
				c. Kontes Kambing PE Ras Kaligesing Lokal Kulon Progo (1 event)				228.550.500
				6. Pengembangan Kopi Menoreh:				
				a. Sarana Pemasaran Kopi/ Outlet Mobile (5 unit)				202.343.000
				e. Festival Kopi (1 event)				200.000.000
				7. Heboh Buah (1 event)				400.000.000

5.3. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik belum masuk sebagai komponen belanja di dalam kerangka anggaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan belum bisa diberikan atau dipasang nilai/ pagu anggarannya. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan pagu alokasi riil yang nantinya akan dipasang di RKPD 2025 masih berproses di Bappenas maupun kementerian teknis, sehingga nilai atau pagu anggaran pasti sampai saat ini belum ada. Akan tetapi untuk menjamin sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2025, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan DAK baik fisik maupun non fisik menjadi bagian penting dalam skema perencanaan di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun perencanaan 2025 ini, proses usulan program, kegiatan dan sub kegiatan DAK Fisik dilakukan melalui aplikasi KRISNA.

Di tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan alokasi DAK fisik sebesar 84,64 miliar rupiah dengan pemisahan 44,81 miliar rupiah pada DAK fisik non tematik yaitu pendidikan dan kesehatan, 19,9 miliar rupiah pada tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan 19,92 miliar rupiah pada tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan. Pada DAK non fisik, alokasi yang didapat oleh Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 214,47 miliar rupiah untuk bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, koperasi dan UMK, pariwisata, perlindungan perempuan dan anak, penanaman modal, dan ketahanan pangan dan pertanian.

5.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang telah disepakati untuk didanai melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Hibah Tahun 2025

No.	URAIAN	OPD	ALOKASI (Rp.)
1.	Hibah Penyediaan Biaya Pendidikan (PBP) untuk SD Swasta dan MI Negeri dan Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	716.250.000
2.	Hibah pengadaan mebel untuk SD swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	343.400.000
3.	Hibah Penyediaan Biaya Pendidikan (PBP) untuk SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	566.100.000
4.	Hibah pengadaan alat peraga TIK untuk SD swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	400.000.000
5.	Operasional Keaksaraan APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50.000.000
6.	Operasional Pendidikan Kesetaraan APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	193.500.000
7.	Hibah pengadaan laptop untuk PAUD swasta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	33.150.000
8.	Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.985.600.000
9.	Hibah KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	100.000.000
10.	Hibah NPC (National Paralympic Committee)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	250.000.000
11.	Hibah Pramuka	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	300.000.000
12.	Hibah Komisi Penanggulangan AIDS	Dinas Kesehatan	80.000.000
13.	Hibah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPKP	400.000.000
14.	Hibah Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (Program Hibah Air Limbah Setempat)	Dinas PUPKP	1.720.000.000
15.	Hibah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (pembangunan jalan lingkungan, drainase dan lampunisasi/ penerangan jalan lingkungan)	Dinas PUPKP	15.801.100.000
16.	Hibah ke Pemerintah pusat (Polres dan Pengadilan Negeri)	Dinas PUPKP	4.672.650.000
17.	Hibah SPAM	Dinas PUPKP	2.433.000.000
18.	Hibah Padat Karya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.905.925.000
19.	Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian dan Pangan	125.000.000
20.	Hibah Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	238.274.700
21.	Hibah Peningkatan Kualitas Tanaman	Dinas Pertanian dan Pangan	1.083.768.500
22.	Hibah pemanfaatan SDG	Dinas Pertanian dan Pangan	40.148.400

No.	URAIAN	OPD	ALOKASI (Rp.)
23.	Hibah pengembangan ternak domba dan sapi	Dinas Pertanian dan Pangan	339.445.600
24.	Hibah Cetak Sawah Baru	Dinas Pertanian dan Pangan	250.000.000
25.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Dinas Pertanian dan Pangan	600.000.000
26.	Pembangunan Jalan Irigasi Usaha Tani (JIUT)	Dinas Pertanian dan Pangan	329.010.200
27.	Hibah Bantuan Sarana Produksi Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	307.665.000
28.	Hibah kepada IKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	128.500.000
29.	Hibah Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH)	Dinas Lingkungan Hidup	173.051.700
30.	Hibah Pengadaan Pohon Sekitar Mata Air	Dinas Lingkungan Hidup	227.762.800
31.	Hibah Pengolahan Emas tanpa merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	1.358.369.000
32.	Hibah TMMD 4 lokasi	Dinas PMD Dalduk dan KB	730.000.000
33.	Hibah TP PKK Kabupaten	Dinas PMD Dalduk dan KB	200.000.000
34.	Hibah PMI	Sekretariat Daerah	75.000.000
35.	Hibah Kepada Gereja	Sekretariat Daerah	75.000.000
36.	Hibah Kepada MDT	Sekretariat Daerah	75.000.000
37.	Hibah Kepada Ponpes	Sekretariat Daerah	100.000.000
38.	Hibah Kepada Masjid	Sekretariat Daerah	600.000.000
39.	Hibah Kepada Vihara	Sekretariat Daerah	15.000.000
40.	Hibah Pemberdayaan kelurahan	Kapanewon Wates	640.000.000
41.	Hibah Padat Karya Kalurahan	Kapanewon Wates	174.881.900
42.	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik (8 Partai Politik)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	949.682.696
JUMLAH			**42.786.235.000**

Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

No.	URAIAN	OPD	ALOKASI (Rp)
1.	Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD 550 siswa @ Rp1.000.000)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	550.000.000
2.	Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama (BSM MP 303 siswa @ Rp1.350.000)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	409.050.000
3.	Bantuan Sosial Jamban Sehat (158 KK @Rp2.500.000)	Dinas Kesehatan	395.000.000

No.	URAIAN	OPD	ALOKASI (Rp)
4.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga (pembangunan baru rumah korban bencana)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	152.600.000
5.	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (172 KK @ Rp20.000.000)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.445.950.000
6.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga (SR Listrik)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	145.000.000
7.	Permakanan Anak Balita Terlantar (100 orang x Rp1.000.000)	Dinas Sosial PPPA	100.000.000
8.	Bansos Permakanan	Dinas Sosial PPPA	20.000.000
9.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Permakanan LKS	Dinas Sosial PPPA	300.000.000
10.	Kontrol/ Transportasi Obat (Psikotik/ODDP) (24 orang x @Rp500.000)	Dinas Sosial PPPA	12.000.000
11.	Bantuan Sosial Kepada Keluarga (Bantuan Non Tunai/BNT) (4.400 x @Rp2.400.000/ tahun)	Dinas Sosial PPPA	10.560.000.000
12.	Bantuan sosial kepada pekerja pabrik rokok (DBHCHT) (704 orang x Rp600.000)	Dinas Sosial PPPA	422.400.000
13.	Bantuan sosial penyediaan alat bantu kepada penyandang disabilitas	Dinas Sosial PPPA	5.400.000
14.	Bantuan Sosial Uang kepada Transmigran (2 KK x @Rp14.000.000)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.000.000
15.	Bantuan Sosial Yatim Piatu (200 anak @ Rp 1.000.000)	Sekretariat Daerah	200.000.000
JUMLAH			**16.745.400.000**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/ pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran daerah, indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah dan indikator kinerja program yang tertuang pada RPD tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir RKPD 2025, serta indikator yang disepakati dalam Rakotekbang tahun 2025 ditampilkan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Gini Rasio	Nilai	0,402	0,359-0,399	0,357-0,394
2.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,65	5,19-5,75	5,52-5,90
3.	Angka kemiskinan	%	15,64	16,34-16,56	14,12-15,12
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,82	75,68 – 75,9	76,00-76,23
5.	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%	54,04	58,96	64,24
6.	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	76,16	74,98	77,22
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78,05	77,00	79,00
8.	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Nilai	79,66	83,59	86,27

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	35,77	32,27	41,91-66,64
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,40	2,13-3,17	2,08-2,60
3.	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,18	9,25	9,35
4.	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,48	14,30	14,63-15,72
5.	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	79,10	78,85	79,64
6.	Angka Harapan Hidup	tahun	75,35	75,35	75,50-79,75
7.	Indeks Keluarga sehat	Nilai	0,31	0,31	0,33
8.	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	54,04	58,96	64,24

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	51,46	50,46	51,63
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	67,50	62,84	67,73-70,23
11.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,56	88,60	88,65
12.	Persentase Penanggulangan Bencana	Nilai	97,16	98,01	98,86
13.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A	A	A
14.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
15.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,634	84,50	85,65
16.	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100	100	100

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Capaian sasaran daerah lingkup pemerintahan dan kesra	%	100	100	100	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	Capaian sasaran daerah lingkup perekonomian	%	100	100	100	Asisten Pembangunan dan Sumberdaya Alam
3	Capaian sasaran daerah lingkup infrastruktur	%	100	100	100	Asisten Pembangunan dan Sumberdaya Alam
4	Capaian sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan dan keamanan ketertiban	%	100	100	100	Asisten Administrasi Umum

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Nilai	18,12	17,47	17,63	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	%	89,09	93,88	93,96	
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	%	92,64	95,57	95,73	
		Angka Melek Huruf	%	95,66	95,52	95,57	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	%	47,84	48,62	49,40	
		Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Nilai	72,975	2,04	2,14	
		Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan dasar)	Nilai	74,9	2,09	2,19	
2.	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olah raga	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	81,28	78,85	79,64	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan /Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	25,35	117,23	94,73	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	9,13	7,33	7,17	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	94,83	81,22	82,10	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	73	73,32	73,71	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	62,72	60,63	63,15	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum	%	80,86	56,95	58,62	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase penanggulangan bencana	%	97,16	98,01	98,86	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	%	75,90	73,61	73,07	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	75,42	85,12	94,11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Pengurangan pengangguran	Penempatan tenaga kerja	Orang	3.458	3.455	3.472	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija					Dinas Pertanian dan Pangan
		Padi Sawah	ton	130.745	124.195	124.816	
		Jagung	ton	19.331	24.724	24.848	
		Kedelai	ton	3.008	2.939	2.954	
		Produksi Tanaman Sayuran					Dinas Pertanian dan Pangan
		Bawang Merah	kuintal	116.315,80	128.342	134.760	
		Cabe besar	kuintal	361.068,29	357.071	374.924	
		Produksi Tanaman Buah					Dinas Pertanian dan Pangan
		Alpukat	kuintal	23.762	19.724	20.710	
		Durian	kuintal	56.783	56.382	59.202	
		Klengkeng	kuintal	7.754	5.439	5.711	
		Produksi Tanaman Biofarmaka					Dinas Pertanian dan Pangan
		Jahe	kg	4.632.000	4.654.392	4.747.480	
		Produksi Tanaman Perkebunan					Dinas Pertanian dan Pangan
		Kelapa	ton	26.575	26.189	26.582	
		Kopi	ton	3320	3.317	3.367	
		Kakao	ton	1.423	1.408	1.430	
14.	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging	ton	16.041.420	15.309.036	16.074.488	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi telur	ton	15.255.870	13.885.958	14.580.256	
15.	Meningkatnya pola pangan harapan	skor pola pangan harapan	%	93,53	93,70	94,00	Dinas Pertanian dan Pangan
16.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	88,56	88,60	88,65	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17.	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN	%	41,83	42,58	45,26	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
18.	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Nilai	50,61	35,50	36,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,74	87,30	87,60	
19.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,254	83,113	83,114	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,53	97,31	97,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.	Angka Harapan Hidup	Cakupan Ketahanan keluarga	%	61,23	47,25	48,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	93,23	92,96	95,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23.	Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	%	18,66	17,43	18,04	Dinas Perhubungan
24.	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks SPBE	Nilai	4,08	3,52	3,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah	Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah	%	99,21	89,24	91,42	Dinas Komunikasi dan Informatika
26.		Nilai rata rata volume usaha koperasi	Rp	1.181.102.681	687.217.981	688.616.929	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi	Rp	100.552.671.111	84.155.805.000	92.344.485.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
27.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi	Juta Rp	309.780	350.000	400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28.	Meningkatnya pelayanan perizinan	IKM	%	89,45	84,00	84,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29.	Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	52,80	54,97	57,67	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
30.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	%	40,54	34,49	34,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan	%	76,06	59,31	69,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	ton	518.890.721.866,7	472.678.263.852	474.150.259.525	Dinas Kelautan dan Perikanan
33.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.923.606	2.621.067	2.835.041	Dinas Pariwisata
34.	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	1,72	1,92	1,95	Dinas Pariwisata
35.	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rp.	2.637.962.355.000	2.065.250.250.000	2.274.243.150.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36.	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Rp.	2.646.490.007.009	2.705.295.000.000	2.840.559.750.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	111,46	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
38.	Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,34	85,10	85,20	Sekretariat Daerah
39.	Meningkatnya Kualitas Terhadap	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
40.	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentase Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	%	85,71	68,25	69,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
41.	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	%	100,00	95,24	97,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	satuan inovasi	70	74	77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
43.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset	%	97,65	95,17	95,43	Badan Keuangan dan Aset Daerah
44.	Meningkatnya kualitas aparatur	Cakupan peningkatan Profesionalitas ASN	%	64,30	59,04	59,11	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
45.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan hasil pengawasan	%	96,73	89,70	93,65	Inspektorat Daerah
46.	Meningkatnya Kapabilitas APIP dan SPIP	Peningkatan kapabilitas APIP	Level	3,08	3,10	3,20	Inspektorat Daerah
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,09	3,00	3,10	
47.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	84,50	84,75	12 Kapanewon
		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	%		98,25	99,12	
48.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Persentase Peningkatan penyelesaian konflik sosial	%	77,24	78,78	81,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
49.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	Semua OPD

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 6.5

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	%	55,84	34,92	35,27	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase SD/ MI terakreditasi A	%	60,76	65,49	65,76	
		Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	%	67,47	71,25	72,50	
		Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	Nilai	87,71	86,98	87,15	
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda berprestasi	%	100,00	72,92	76,04	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	%	81,28	87,18	87,97	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP UKM	%	82,09	79,96	83,09	Dinas Kesehatan
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas SDMK	%	90,32	59,22	63,92	Dinas Kesehatan
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar	%	75,00	88,33	89,38	Dinas Kesehatan
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	%	67,65	48,22	49,31	Dinas Kesehatan
8.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	Nilai	86,97	86,77	86,95	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
9.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	%	96,52	94,21	94,29	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	26,09	22,89	23,22	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	88,73	88,71	88,80	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%	73,58	73,96	74,48	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	73,47	69,23	71,15	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
14.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	73,39	74,16	74,92	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
15.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	%	89,01	90,27	91,78	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
16.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	%	73,82	78,50	80,74	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
17.	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	10,57	7,09	7,63	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
							Kawasan Permukiman
18.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	44,28	44,54	45,32	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	%	95,01	97,87	98,94	Satuan Polisi Pamong Praja
20.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	%	68,73	78,41	88,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	38,54	44,79	52,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%	54,79	57,78	63,61	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	58,37	63,90	68,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
27.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	%	99,99	99,99	99,99	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	15,52	31,03	46,55	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	%	31,13	31,30	29,48	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	dokumen	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	%	94,10	82,03	82,81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,02	63,98	64,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	34,55	48,25	49,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	%	102,28	99,44	99,57	Dinas Pertanian dan Pangan
36.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentese peningkatan penanganan kerawanan pangan	%	100,00	95,45	96,59	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	%	36,91	35,60	43,94	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
37.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	%	94,33	90,00	92,50	Dinas Pertanian dan Pangan
38.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak	animal unit	170.191	192.833	202.824	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas tanaman pangan	ku/ha	50,71	51,52	52,50	
		Produktivitas tanaman perkebunan	ku/ha	56,22	54,36	54,63	
		Produktivitas tanaman hortikultura	ku/ha	139,12	130,77	130,97	
		Persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	
39.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	%	13,85	13,63	13,81	Dinas Pertanian dan Pangan
40.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	%	0,19	5,72	5,49	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	%	92,19	71,11	72,00	
		Transaksi ternak besar dan ternak kecil	ekor	9.730	4.536	4.752	
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	%	84,72	88,65	94,32	
41.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	%	n/a	0,36	0,30	Dinas Pertanian dan Pangan
42.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	%	45,33	44,96	45,40	Dinas Pertanian dan Pangan
43.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	57,01	68,98	80,56	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
		Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	78,39	84,65	90,91	
44.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
45.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
46.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
47.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	%	35,54	15,75	16,36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
48.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup	%	50,00	64,29	85,71	Dinas Lingkungan Hidup
49.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	%	35,29	59,57	63,12	
		Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	%	27,66	40,43	42,55	
		Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	%	60,00	80,00	100,00	
50.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	2,80	1,40	1,40	Dinas Lingkungan Hidup
51.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase peningkatan usaha/kegiatan	%	52,68	50,11	51,18	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan					
52.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	%	90,94	95,67	97,52	Dinas Lingkungan Hidup
53.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
54.	Program Pengelolaan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	%	31,04	28,00	30,00	Dinas Lingkungan Hidup
55.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	99,66	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
56.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	99,58	97,20	97,20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
57.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
58.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
59.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	%	74,67	72,02	74,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	87,26	84,74	86,87	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
60.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	%	100,00	70,88	72,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61.	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,61	0,90	1,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	NIlai	1,48	1,90	2,00	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Nilai	4,53	3,65	3,36	
62.	Program Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	%	55,96	50,20	50,68%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	%	55,90	48,48	49,92%	
63.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	23,73	28,23	28,31%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	%	80,42	76,17	78,92	Dinas Perhubungan
		Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	%	50,46	54,48	61,53	
65.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	%	98,81	85,71	88,10	Dinas Komunikasi dan Informasi
66.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	%	70,00	74,82	82,50	Dinas Komunikasi dan Informasi

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
67.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasi	%	100,00	96,30	98,06	Dinas Komunikasi dan Informasi
68.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	%	49,17	48,58	55,61	Dinas Komunikasi dan Informasi
69.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	60,35	63,93	65,69	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
70.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	93,15	96,19	97,31	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
71.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	%	30,84	4,09	4,73	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
72.	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	%	1,67	1,79	2,09	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
73.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	24,00	30,00	35,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
75.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	%	100,00	87,10	87,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
76.	Program Pengendalian	Persentase Pengendalian	%	92,00	84,76	86,79	Dinas Penanaman Modal dan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Penanaman Modal					Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
78.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	%	63,18	65,14	67,18	
		Cakupan pengelolaan Taman Budaya	%	96,93	98,25	98,70	
		Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	%	31,09	33,37	36,33	
79.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	%	57,13	49,34	49,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
80.	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	%	69,17	67,70	74,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
81.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	2.183,85	2.075	2.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
82.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	16.803,44	16.805	16.855	Dinas Kelautan dan Perikanan
83.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	92,59	92,00	92,31	Dinas Kelautan dan Perikanan
84.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan	%	44,37	52,82	63,38	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
		dan pemasar ikan yang sesuai standar					
		Produksi pengolahan ikan	Kg	166,42	145.000	150.000	
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	87,50	87,50	100,00	Dinas Pariwisata
86.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	79,91	100,00	100,00	Dinas Pariwisata
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	%	18,69	20,43	21,94	Dinas Pariwisata
88.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	nilai	26,92	32,00	37,50%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
89.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	7,79	10,55	12,67	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
90.	Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	rupiah	236.113.493.009	220.811.186.838	235.216.780.256	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
91.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	%	56,51	74,86	86,70	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
92.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri baru tahun ke n	unit	115,00	130,00	150,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase sentra industri aktif	%	47,06	41,18	47,06	
93.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	115,40	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
94.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan	%	105,82	94,91	97,45	Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
		kesejahteraan rakyat					
95.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	108,33	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
96.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
97.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	99,91	99,73	99,74	
98.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	
		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	
99.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	satinov	195	129	134	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Capaian penelitian dan pengembangan	dokumen	6	7	7	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
100.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran	%	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan	%	97,72	95,17	95,43	
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00	
101.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
102.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	84,28	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase capaian Pendapatan Daerah	%	104,20	75,02	78,49	
103.	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan Aparatur	%	64,38	45,10	45,23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	%	79,47	82,81	84,07	
		Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	%	99,41	99,98	99,98	
104.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	%	94,54	89,19	93,38	Inspektorat Daerah
105.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	100,00	90,48	94,05	Inspektorat Daerah
106.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	%	103,49	100,00	100,00	Kapanewon
107.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	Kapanewon
108.	Program Penyelenggaraan	Persentase Peningkatan	%	92,11	94,74	97,37	Kapanewon

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
109.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	Kapanewon
110.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80,00	80,00	80,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
111.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	80,00	80,00	80,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
112.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	54,48	57,55	62,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
113.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	12,50	18,18	23,86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
114.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
115.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	115,40	100,00	100,00	Semua OPD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota					
116.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	%	66,67	59,48	76,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
117.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	92,68	91,83	91,92	Sekretariat Daerah
118.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	92,68	91,83	91,92	DPMPTSP
119.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	
120.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
121.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	100,00	100,00	100,00	12 Kapanewon
122.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
123.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Persentase Pembentukan	%	26,77	75,05	87,58	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kelompok Jaga Warga					
124.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	n/a	100	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
125.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	n/a	n.a.	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
126.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pemberdayaan kelompok wanita tani	%	30,00	40,00	35,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase pelestarian lahan surjan	%	5,66	5,66	7,55	
127.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
128.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	n/a	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
129.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	n/a	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan UKM
130.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya bahari	%	101,9	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
131.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan publikasi seni dan budaya daerah	%	120,00	100,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	%	142,86	100,00	100,00	
132.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan	%	71,43	71,43	100	Dinas Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan	pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya					dan Perindustrian
133.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	n/a	n.a.	100	Bappeda
134.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	%	n/a	100	100	12 Kapanewon
135.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftarkan di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	%	66,48	69,70	72,06	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Urusan Pertanahan)
136.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	%	25,29	42,53	54,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
137.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	%	50,00	50	75,00	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman
138.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh	%	n/a	6,48	8,33	Dinas Pertanian dan Pangan
139.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	%	25,00	50,00	75,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Urusan Tata Ruang)

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	PD Penanggung Jawab
140.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase perwujudan Satuan Ruang Strategis	%	n/a	66,67	100	Dinas Lingkungan Hidup
141.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase perwujudan Satuan Ruang Strategis	%	n/a	66,67	100	Dinas Perhubungan

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 6.6

Indikator Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA 2025

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
1	**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		
1	**BIDANG PENDIDIKAN**		
a	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	100
b	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100
c	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	100
d	Iklim Keamanan SMP	Nilai	80,40
e	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	84,47
f	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	81,32
g	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	64,65
h	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63,66
i	Iklim Keamanan SD	Nilai	82,95
j	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS	%	100
k	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100
l	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	71,28
m	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,92
n	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	84,79
o	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,01
p	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	75,46
q	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	83,08
2	**BIDANG KESEHATAN**		

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
a	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13,5
b	Penemuan Kasus TBC	%	70
c	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran hidup	66,67
d	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	97
e	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100
f	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	100
g	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	95
h	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	100
3	**BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
a	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	357
b	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	58
c	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Matek	0
d	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Matek	3
e	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	1
f	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	2
g	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	5
h	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Propinsi	1
i	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	74,92
j	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	0
k	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	75
l	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruks	%	70
m	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	71
n	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	30
o	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	44
p	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	12,5
q	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	0
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
a	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	94,5
5	**Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
a	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
b	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	dokumen	1
c	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah	1
d	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah	1
e	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah	1
6	**URUSAN Kesatuan Bangsa dan Politik**		
a	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Provinsi	1
b	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi	1
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**		
a	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	90,6
8	**Bidang Sosial**		
a	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13.5
b	Penemuan Kasus TBC	%	70
c	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	66,67
d	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	97
e	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100
f	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	100
g	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	95
h	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	100
9	**BIDANG TENAGA KERJA**		
a	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75
b	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70
c	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	22.150
d	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	3.481
e	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	75
f	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
g	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	150
h	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	0
i	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	60
10	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak**		
a	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	69
b	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
c	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
d	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,57
e	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,175
f	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	nilai	801
g	Persentase ARG	%	10
h	Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	nilai	701
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**		
a	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	32
b	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0
c	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	0
d	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85
12	**Bidang Pertanahan**		
a	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	bidang tanah	0
b	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	kk	0
13	**BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
a	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	matek	0
b	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	matek	3
c	Penetapan RTRW	perda/perkda	1
d	Penetapan RDTR	perda/perkda	2
e	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	kasus	5
f	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	prov	1
14	**Bidang Lingkungan Hidup**		

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,75
15	**Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
a	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,5
b	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100
c	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100
d	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100
e	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	85,3
f	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30
g	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	dokumen	2
16	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa**		
a	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	desa	87
b	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	desa	87
c	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	desa	87
d	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	desa	82
e	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	orang	500
f	Persentase Desa Mandiri	%	100
g	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	%	14.12
h	Persentase BUM Desa Maju	%	29,88
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Ta. 2025**		
a	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61
b	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	3,36
c	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2
d	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60,49
e	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,44
18	**BIDANG PERHUBUNGAN**		
a	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0,34

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
b	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84,5
c	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	18,61
d	Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani pada Jalan Kabupaten/Kota	Unit	3
e	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	0
f	Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi	Orang	8
g	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	Unit	1
h	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	4.265
19	**BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	4,72
b	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	5,470
c	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,37
d	Pertumbuhan Wirausaha	%	0,45
20	**Bidang Penanaman Modal**		
a	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp. T	0,3666
21	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**		
a	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	nilai	2,50
b	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	82,29
c	Peningkatan Prestasi Olahraga	indeks	49,65
d	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	73
22	**Bidang Statistik**		
a	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	poin	2,65
23	**BIDANG KEBUDAYAAN**		
a	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,6
24	**BIDANG PERPUSTAKAAN**		
a	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,44
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	84,95
25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**		

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
a	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	90,6
26	**BIDANG PERSANDIAN**		
a	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	1
b	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	1
c	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	1
27	**Bidang Kelautan dan Perikanan**		
a	Produksi Perikanan Tangkap	ton	2.100
b	Produksi Perikanan Budidaya	ton	16.855
c	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	31,40
d	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	76
28	**BIDANG PARIWISATA**		
a	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	0
b	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	2.835.041
c	Rasio PDB Pariwisata	%	5,27
29	**Bidang Pertanian**		
a	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	92
b	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	94
c	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	80
d	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	26
e	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	50,2
f	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	71
g	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40,2
h	Jumlah Produksi Jagung	ton	10734
i	Jumlah Produksi Padi	ton	107806
j	Jumlah Produksi Kedelai	ton	975
k	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	ton	35200
l	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	ton	44227
m	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	ton	11632
n	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	ton	452.33

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekbang
1	2	3	4
o	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	ton	26625.5
p	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	ton	1376.41
q	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	ton	0
r	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	ton	4,09
s	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	ton	0
t	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	ton	661.08
u	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	ton	20030
v	Jumlah Produksi Susu	ton	13,3
w	Jumlah Produksi Telur	ton	62102
30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**		
a	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6,52
b	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
c	Persentase alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	86,7
d	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Persentase	16,67
31	**BIDANG PERINDUSTRIAN**		
a	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	7
b	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	15.539.000
c	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	70.000
d	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	126.000.000.000
e	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	12,89

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

BAB VII
PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemda DIY tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun 2023-2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/ pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/ pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi

alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut Permendagri tersebut, tata cara pengendalian dilaksanakan dengan penyajian program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi PD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing PD agar menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.
2. PD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKPD DIY Tahun 2025 dan prioritas pembangunan pada RPD Kulon Progo Tahun 2023-2026.

2. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo 2025 merupakan acuan/ pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD 2025.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2025 yaitu: "**Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif".** Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing PD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 5 prioritas pembangunan yaitu:
   a. **Pengembangan Kawasan Aerotropolis.** Tujuan prioritas ini adalah untuk mengoptimalkan pusat pertumbuhan di kawasan aerotropolis sehingga *spillover effect* atau efek perekonomian yang menetes ke bawah bisa terasa oleh masyarakat Kulon Progo. Kawasan aerotropolis tidak hanya mengutamakan sektor tersier, namun juga sektor primer untuk menjalankan *smart agriculture* dan *smart farming.*
   b. **Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.** Tujuan prioritas ini adalah untuk peningkatan pendapatan masyarakat, melalui pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional, pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan investasi serta pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan serta peningkatan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan. Di samping itu juga diupayakan peningkatan perlindungan sosial dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, bagi seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat.
   c. **Peningkatan kualitas SDM.** Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan (a) kualitas pendidikan, (b) budaya membaca, (c) kualitas manajemen pendidikan, (d) produktivitas tenaga kerja, (e) karakter dan budaya masyarakat, (f) kualitas kesehatan masyarakat, (g) kesejahteraan keluarga, (h) menurunkan angka kematian ibu dan bayi, (i) profesionalisme ASN.
   d. **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.** Prioritas ini ditujukan untuk:
      1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
      2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah serta optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
      3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;

4. Mewujudkan *good governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, melalui optimalisasi peran Jaga Warga dan Satlinmas, serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam berbagai program seperti "Gerakan Ibu Memanggil" dan lain sebagainya.

   Strategi lainnya terkait penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni dengan mengoptimalkan peran Forkopimda, Forkopimkap, serta kolaborasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti pemberantasan pungutan liar dan lain-lain. Selain itu, kondisi masyarakat yang tentram dan tertib juga diupayakan melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

e. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan. Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya meningkatkan akses wilayah di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan; (b) Meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai; (d) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; (e) Meningkatkan kinerja layanan transportasi; (f) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta (g) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

4. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

Wates, 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

PARAF KOORDINASI		

bappeda.kulonprogo.go.id

bappeda@kulonprogo.go.id

(0274) 773247
0897-1174-500